



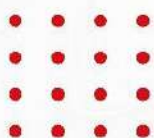
PEMERINTAH ACEH

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH (LKPA)

TAHUN ANGGARAN 2025

Audited

Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, atas rahmat dan karunia Allah *Subhanahu wa ta'ala* Pemerintah Aceh dapat melaksanakan program kerja Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2025 dengan maksimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini Pemerintah Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi kas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2025.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2025 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2025.
4. Laporan Operasional, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Aceh tahun 2025 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Aceh.
5. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Pemerintah Aceh yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir 2025.



6. Laporan Arus Kas, memberikan informasi arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, sehingga diketahui kenaikan/penurunan kas selama periode pelaporan, ditambah saldo kas pada bendahara dan saldo kas BLUD.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, disertai penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.



Banda Aceh, 22 Juni 2026

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

R.P



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	XV
RINGKASAN EKSEKUTIF	XVI
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
C. NERACA	4
D. LAPORAN OPERASIONAL	7
E. LAPORAN ARUS KAS	9
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1. Maksud dan Tujuan	12
1.2. Landasan Hukum Penyusunan	14
1.3. Entitas Pelaporan Keuangan	16
1.4. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA	19
2.1. Ekonomi Makro.....	19
2.2. Kebijakan Strategis	30
2.3. Kebijakan Keuangan.....	39
2.4. Mandatory Spending	44
2.5. Bencana Hidrometeorologi.....	46
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	49
3.1. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh.....	49
3.2. Pencapaian Realisasi Belanja.....	52
3.3. Pencapaian Realisasi Belanja Modal.....	57
3.4. Pencapaian Realisasi Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.....	59
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA	74
4.1. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh.....	74
4.2. Entitas Pelaporan Keuangan	74
4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	75
4.4. Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	75
4.5. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	77



4.6.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	79
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN		141
5.1.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	141
5.2.	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL).....	176
5.3.	NERACA	177
5.4.	LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	264
5.5.	Laporan Arus Kas	290
5.6.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	295
BAB VI INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN.....		296
6.1	Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) TA 2025	296
6.2	Dana Otonomi Khusus (Otsus)	297
6.3	Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)	299
6.4	Utang Pemerintah Aceh pada Pemerintah Pusat	300
6.5	Belanja yang Belum Terbayarkan pada Beberapa SKPA Per 31 Desember 2025	302
6.6	Utang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PNS Tahun 2025	304
BAB VII PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....		305
7.1.	Gambaran Umum Provinsi Aceh	305
7.2.	Wilayah Rawan Bencana	305
7.3.	Demografi	306
7.4.	Sosiologi	307
7.5.	Pemerintahan.....	307
7.6.	Visi dan Misi Pemerintah Aceh	309
BAB VIII PENUTUP		311



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	IPM Aceh Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2025	20
Tabel 2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan q-to-q (Persen)	21
Tabel 3.	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (persen)	23
Tabel 4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh menurut Daerah, Maret 2023 – September 2025	27
Tabel 5.1	Rincian APBA Periode 5 (lima) Tahun Terakhir	41
Tabel 5.2	Rincian APBA dan Perubahan APBA Tahun 2025	43
Tabel 6.	Alokasi Anggaran Pegawai	44
Tabel 7.	Alokasi Anggaran Pendidikan	45
Tabel 8.	Alokasi Anggaran Infrastruktur	45
Tabel 9.	Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh TA 2025	49
Tabel 10.	Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan TA 2025	51
Tabel 11.	Pencapaian Realisasi Belanja	52
Tabel 12.	Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2017-2025	60
Tabel 13.	Perbandingan Capaian Realisasi Zakat Tahun 2025 dan 2024	62
Tabel 14.	Realisasi Penyaluran Infak, 2021-2025	70
Tabel 15.	Daftar Rekening Giro Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya	73
Tabel 16.	Klasifikasi Kas dan Setara Kas	79
Tabel 17.	Klasifikasi Piutang	81
Tabel 18.	Perhitungan Penyisihan Piutang	84
Tabel 19.	Klasifikasi Persediaan	88
Tabel 20.	Klasifikasi Investasi Dana Bergulir	91
Tabel 21.	Piutang Pendapatan Akibat Investasi Dana Bergulir	92
Tabel 22.	Pendapatan Hasil Dana Bergulir	92
Tabel 23.	Klasifikasi Investasi	93
Tabel 24.	Klasifikasi Aset Tetap	95
Tabel 25.	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap	98
Tabel 26.	Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap	101
Tabel 27.	Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap	104
Tabel 28.	Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	109
Tabel 29.	Klasifikasi Dana Cadangan	111
Tabel 30.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan	111
Tabel 31.	Klasifikasi Aset Tetap Lainnya	113
Tabel 32.	Klasifikasi Aset Tidak Berwujud	116
Tabel 33.	Klasifikasi Kewajiban	118
Tabel 34.	Pendapatan Asli Aceh	121
Tabel 35.	Pendapatan Transfer	122
Tabel 36.	Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah	122
Tabel 37.	Klasifikasi Belanja	124
Tabel 38.	Definisi Transfer	125
Tabel 39.	Transfer/Belanja Bagi Hasil	125
Tabel 40.	Transfer/ Belanja Bantuan Keuangan	126
Tabel 41.	Konsesi Jasa Diklasifikasikan	137
Tabel 42.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2025 dan TA 2024	141



Tabel 43.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024	141
Tabel 44.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh TA 2025 dan TA 2024 ..	141
Tabel 45.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak	142
Tabel 46.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi	144
Tabel 47.	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	146
Tabel 48.	Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	147
Tabel 49.	Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	148
Tabel 50.	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	148
Tabel 51.	Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal.....	149
Tabel 52.	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah	150
Tabel 53.	Rincian Hasil Kerja sama Daerah	151
Tabel 54.	Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	152
Tabel 55.	Rincian Pendapatan BLUD	152
Tabel 56.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer	153
Tabel 57.	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil	153
Tabel 58.	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus	154
Tabel 59.	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik	155
Tabel 60.	Rincian Dana Otonomi Khusus	156
Tabel 61.	Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.....	156
Tabel 62.	Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	157
Tabel 63.	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah	158
Tabel 64.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024	158
Tabel 65.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	159
Tabel 66.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	159
Tabel 67.	Rincian Belanja Pegawai BLUD	160
Tabel 68.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi	161
Tabel 69.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah	161
Tabel 70.	Rincian Anggaran dan Realisasi Hibah dalam Bentuk Uang	161
Tabel 71.	Daftar Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang	161
Tabel 72.	Rincian Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Barang	162
Tabel 73.	Rincian Belanja Bantuan Sosial	163
Tabel 74.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang	163
Tabel 75.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	163
Tabel 76.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164
Tabel 77.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	165
Tabel 78.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165
Tabel 79.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya	166
Tabel 80.	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	166
Tabel 81.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer	168
Tabel 82.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten.....	169
Tabel 83.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kota	169



Tabel 84.	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.....	170
Tabel 85.	Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	171
Tabel 86.	Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Bencana Hidrometeorologi Tahap I	172
Tabel 87.	Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Bencana Hidrometeorologi Tahap II	172
Tabel 88.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup	173
Tabel 89.	Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	173
Tabel 90.	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	174
Tabel 91.	Rincian SiLPA Berdasarkan Sumber Dana	175
Tabel 92.	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal.....	176
Tabel 93.	Perhitungan SiLPA	176
Tabel 94.	Rincian Aset Lancar	177
Tabel 95.	Rincian Rekening Kas di Kas Daerah.....	178
Tabel 96.	Rincian Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan	178
Tabel 97.	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	178
Tabel 98.	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	179
Tabel 99.	Rincian Mutasi Kas di BLUD	179
Tabel 100.	Rincian Mutasi Kas Dana BOS TA 2025	180
Tabel 101.	Rincian Mutasi Kas Lainnya	180
Tabel 102.	Rincian Mutasi Piutang Pajak.....	181
Tabel 103.	Rincian Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	181
Tabel 104.	Rincian Mutasi Pajak Air Permukaan	181
Tabel 105.	Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Pajak.....	182
Tabel 106.	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	183
Tabel 107.	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	183
Tabel 108.	Rincian Piutang Retribusi	184
Tabel 109.	Rincian Mutasi Piutang Retribusi.....	184
Tabel 110.	Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi.....	186
Tabel 111.	Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAA yang Sah	186
Tabel 112.	Rincian Piutang Lain-lain PAA yang Sah	187
Tabel 113.	Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	187
Tabel 114.	Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	188
Tabel 115.	Rincian Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	188
Tabel 116.	Rincian Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	188
Tabel 117.	Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	191
Tabel 118.	Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	191
Tabel 119.	Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat	192
Tabel 120.	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat	192
Tabel 121.	Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	193
Tabel 122.	Rincian Tagihan Penjualan Barang Milik Aceh	193
Tabel 123.	Mutasi Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	193



Tabel 124. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	193
Tabel 125. Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka	194
Tabel 126. Rincian Belanja Sewa Dibayar Dimuka	194
Tabel 127. Rincian Asuransi Dibayar Dimuka	195
Tabel 128. Rincian Mutasi Persediaan	197
Tabel 129. Rincian Investasi Jangka Panjang	198
Tabel 130. Rincian Mutasi Dana Bergulir.....	198
Tabel 131. Rincian Setoran PER	199
Tabel 132. Rekening Dana PER.....	199
Tabel 133. Saldo Dana PER	200
Tabel 134. Saldo Dana PINBUK	200
Tabel 135. Pengembalian Dana PINBUK	200
Tabel 136. Rincian Penyisihan Dana Bergulir.....	201
Tabel 137. Rincian Investasi Permanen	202
Tabel 138. Rincian Perhitungan Investasi pada Bank Aceh Syariah	202
Tabel 139. Rincian Perhitungan Investasi pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda)	202
Tabel 140. Penyertaan Modal PT Pembangunan Aceh.....	203
Tabel 141. Rincian Mutasi Aset Tetap	203
Tabel 142. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah	204
Tabel 143. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	205
Tabel 144. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205
Tabel 145. Rincian Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin	206
Tabel 146. Rincian Mutasi Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan Mesin	207
Tabel 147. Rincian Mutasi Tambah Belanja Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin	208
Tabel 148. Rincian Mutasi Tambah Mutasi antar SKPA Peralatan dan Mesin	208
Tabel 149. Rincian Mutasi Tambah Penyesuaian Nilai akibat dari Rekonsiliasi Peralatan dan Mesin	209
Tabel 150. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin	209
Tabel 151. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Peralatan dan Mesin	210
Tabel 152. Rincian Mutasi Kurang Beban Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin	211
Tabel 153. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan	211
Tabel 154. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar SKPA	211
Tabel 155. Rincian Mutasi Kurang Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi.....	211
Tabel 156. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin <i>Extracomtable</i>	212
Tabel 157. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	213
Tabel 158. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	213
Tabel 159. Rincian Mutasi Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan	214
Tabel 160. Rincian Mutasi Tambah Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan	214
Tabel 161. Rincian Mutasi Tambah Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan.....	215
Tabel 162. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan	216
Tabel 163. Rincian Mutasi Kurang Beban Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan.....	217



Tabel 164. Rincian Mutasi Kurang Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan.....	217
Tabel 165. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi ke KDP Gedung dan Bangunan	218
Tabel 166. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	218
Tabel 167. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	219
Tabel 168. Rincian Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	219
Tabel 169. Rincian Mutasi Tambah Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	220
Tabel 170. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	220
Tabel 171. Rincian Mutasi Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	221
Tabel 172. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	221
Tabel 173. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	222
Tabel 174. Rincian Mutasi Tambah Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya	223
Tabel 175. Rincian Reklasifikasi antar Aset Tetap	223
Tabel 176. Rincian Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya	223
Tabel 177. Rincian Reklasifikasi ke Persediaan Aset Tetap Lainnya	224
Tabel 178. Rincian Mutasi Kurang Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya	224
Tabel 179. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	224
Tabel 180. Rincian Reklasifikasi antar Aset Tetap	225
Tabel 181. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan	228
Tabel 182. Rekap Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi Tahun 2025 pada Wilayah Provinsi Aceh	230
Tabel 183. Rincian Akumulasi Penyusutan.....	231
Tabel 184. Rincian Dana Cadangan	235
Tabel 185. Rincian Mutasi Dana Cadangan	236
Tabel 186. Rincian Mutasi Aset Lainnya	237
Tabel 187. Rincian Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	237
Tabel 188. Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga	238
Tabel 189. Rincian Aset Kemitraan-Sewa dengan PT ASDP Indonesia Ferry.....	238
Tabel 190. Rincian Aset Kemitraan-Kerja sama Pemanfaatan dengan PT ASDP Indonesia Ferry	239
Tabel 191. Rincian Aset Kemitraan-Kerja sama Pemanfaatan dengan PT Pembangunan Aceh – KIA Ladong.....	240
Tabel 192. Rincian Aset Kemitraan-Kerja sama Pemanfaatan dengan PT Pembangunan Aceh – KEK Arun.....	241
Tabel 193. Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Kerja sama	241
Tabel 194. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud.....	242
Tabel 195. Rincian Akumulasi Amortisasi ATB	242
Tabel 196. Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	243
Tabel 197. Rincian Mutasi Aset Lain-lain dalam Penelusuran Hilang/TDF	244
Tabel 198. Rincian Aset Lain-lain akan Dihilahkan/Rencana Hibah.....	245



Tabel 199. Rincian Mutasi Aset Lain-lain akan D hibahkan/Rencana Hibah	246
Tabel 200. Rincian Aset Lain-lain Lainnya	246
Tabel 201. Rincian Mutasi Aset Lain-lain Lainnya	247
Tabel 202. Rincian Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BP Kapet	247
Tabel 203. Rincian Properti Investasi	248
Tabel 204. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	249
Tabel 205. Rincian Mutasi Kewajiban Jangka Pendek	250
Tabel 206. Rincian Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	250
Tabel 207. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	251
Tabel 208. Rincian Mutasi Utang Belanja	252
Tabel 209. Rincian Mutasi Utang Belanja Pegawai	252
Tabel 210. Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa	253
Tabel 211. Rincian Mutasi Utang Belanja Barang	253
Tabel 212. Rincian Mutasi Utang Belanja Jasa	255
Tabel 213. Rincian Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan	258
Tabel 214. Rincian Mutasi Utang Belanja Hibah	260
Tabel 215. Rincian Mutasi Utang Belanja Modal	260
Tabel 216. Rincian Mutasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260
Tabel 217. Rincian Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	261
Tabel 218. Rincian Mutasi Utang Belanja Bagi Hasil	262
Tabel 219. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	262
Tabel 220. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	263
Tabel 221. Pendapatan dan Beban LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	264
Tabel 222. Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO	264
Tabel 223. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Asli Aceh-LO	264
Tabel 224. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO	265
Tabel 225. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO	266
Tabel 226. Selisih Pendapatan Retribusi Aceh-LRA dengan Pendapatan Retribusi Aceh-LO	266
Tabel 227. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	267
Tabel 228. Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LO ..	267
Tabel 229. Kenaikan/Penurunan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO	268
Tabel 230. Selisih Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah -LO	268
Tabel 231. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO	269
Tabel 232. Selisih Pendapatan Transfer -LRA dengan Pendapatan Transfer-LO	269
Tabel 233. Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil –LO	270
Tabel 234. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Umum –LO	270
Tabel 235. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO	271
Tabel 236. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO	272
Tabel 237. Rincian Dana Otonomi Khusus – Provinsi Aceh	273
Tabel 238. Kenaikan/Penurunan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	274
Tabel 239. Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	274
Tabel 240. Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO	274



Tabel 241. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO	275
Tabel 242. Selisih Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO	275
Tabel 243. Selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan-LO	276
Tabel 244. Kenaikan/Penurunan Beban Jasa	277
Tabel 245. Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan	278
Tabel 246. Selisih Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan- LO	278
Tabel 247. Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas	280
Tabel 248. Selisih Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban perjalanan-LO	280
Tabel 249. Kenaikan/Penurunan Beban Subsidi	280
Tabel 250. Kenaikan/Penurunan Beban Hibah	281
Tabel 251. Selisih Belanja Hibah dengan Beban Hibah-LO	281
Tabel 252. Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial	282
Tabel 253. Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi	282
Tabel 254. Selisih antara Beban Penyusutan – Peralatan dan Mesin dengan Kenaikan Akumulasi Penyusutan.....	282
Tabel 255. Selisih antara Beban Penyusutan – Gedung dan Bangunan dengan Kenaikan Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	283
Tabel 256. Selisih antara Beban Penyusutan JIJ dan Kenaikan Akumulasi Penyusutan JIJ	284
Tabel 257. Selisih antara Beban Amortisasi dengan Kenaikan Amortisasi	284
Tabel 258. Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang	285
Tabel 259. Selisih antara Beban Penyisihan Piutang dengan Kenaikan Penyisihan Piutang	285
Tabel 260. Kenaikan/Penurunan Beban Transfer	285
Tabel 261. Belanja Tranfer-LRA dan Beban Transfer-LO	286
Tabel 262. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024	290
Tabel 263. Penjelasan Selisih Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	290
Tabel 264. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024	291
Tabel 265. Penjelasan Selisih Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi.....	291
Tabel 266. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	292
Tabel 267. Penjelasan Selisih Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	292
Tabel 268. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2025 dan 2024	293
Tabel 269. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2025 dan 2024	294
Tabel 270. Saldo Akhir Kas.....	294
Tabel 271. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	295
Tabel 272. Tahapan Penetapan APBA 2025	296
Tabel 273. Penerimaan Dana Otsus TA 2008-2025.....	297
Tabel 274. Rincian Pengelolaan Dana Otsus Provinsi dan Kab/Kota 2008-2025.....	298
Tabel 275. Alokasi Dana Otsus Aceh Per Bidang Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008.....	299
Tabel 276. Realisasi JKRA Tahun 2010-2024.....	300
Tabel 277. Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang.....	300
Tabel 278. Rencana <i>Debt Swap</i>	301
Tabel 279. Realisasi Kegiatan <i>Debt Swap</i>	301



Tabel 280. Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan <i>Debt Swap</i>	301
Tabel 281. Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan <i>Debt Swap</i>	301
Tabel 282. Rincian Tunggakan Biaya Iklan Dinas Peternakan Tahun 2025.....	303
Tabel 283. Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh.....	308



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PERTUMBUHAN PDRB BEBERAPA LAPANGAN USAHA (C-TO-C) (PERSEN), 2023-2025	21
GAMBAR 2. PERTUMBUHAN PDRB KOMPONEN PENGELUARAN (C-TO-C) (PERSEN)	23
GAMBAR 3. TINGKAT INFLASI YEAR ON YEAR (Y-ON-Y) PROVINSI ACEH BULAN DESEMBER, 2025 (PERSEN)	24
GAMBAR 4. JUMLAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) FEBRUARI 2024 – NOVEMBER 2025	25
GAMBAR 5. JUMLAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) FEBRUARI 2024 – NOVEMBER 2025	26
GAMBAR 6. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI ACEH 2020 – 2025.....	26
GAMBAR 7. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH TRIWULAN I-2025 (Y-ON-Y) (PERSEN)..	29
GAMBAR 8. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH, TRIWULAN I-2024 (Y-ON-Y).....	29
GAMBAR 9. ANGGARAN DAN REALISASI APBA TA 2025	49
GAMBAR 10. KONTRIBUSI PENDAPATAN ACEH TA 2025	50
GAMBAR 11. PROFIL APBA TA 2025 BERDASARKAN KLASIFIKASI FUNGSI	54
GAMBAR 12. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN ZAKAT TAHUN 2017-2025.....	61
GAMBAR 13. REALISASI PENYALURAN ZAKAT PER SENIF TAHUN 2025.....	62
GAMBAR 14. REALISASI PENYALURAN INFAK, 2021-2025.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Silpa Zakat dan Infak
Lampiran 2	Rincian Pendapatan BLUD SMKN
Lampiran 3	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024
Lampiran 4	Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024
Lampiran 5	Rincian Belanja BLUD SMKN
Lampiran 6	Realisasi Hibah dalam Bentuk Barang
Lampiran 7	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024
Lampiran 8	Rincian Kas BLUD SMKN
Lampiran 9	Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2025 dan Tahun 2024
Lampiran 10	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan 2025 dan 2024
Lampiran 11	Piutang Retribusi
Lampiran 12	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi
Lampiran 13	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah
Lampiran 14	Belanja Sewa Dimuka
Lampiran 15a	Rincian Persediaan Barang Habis Pakai Pemerintah Aceh (1/2)
Lampiran 15b	Rincian Persediaan Barang Habis Pakai Pemerintah Aceh (2/2)
Lampiran 15c	Daftar Obat Kedaluwarsa Tahun 2025
Lampiran 15d	Daftar Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2025
Lampiran 16a	Rekapitulasi Perkembangan Pengembalian Dana LUEP APBA Periode 2025
Lampiran 16b	Resume Penyerahan Pengurusan Piutang LUEP Tahun 2025
Lampiran 17	Aset Tetap Berdasarkan Kondisi Barang
Lampiran 18	<i>Extracomptable</i> Aset Tetap
Lampiran 19	Daftar Aset Tak Berwujud
Lampiran 20	Aset Rusak Berat
Lampiran 21	<i>Extracomptable</i> Aset Lain-lain
Lampiran 22	Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran 23	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
Lampiran 24	Beban Persediaan
Lampiran 25	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Lampiran 26	Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota

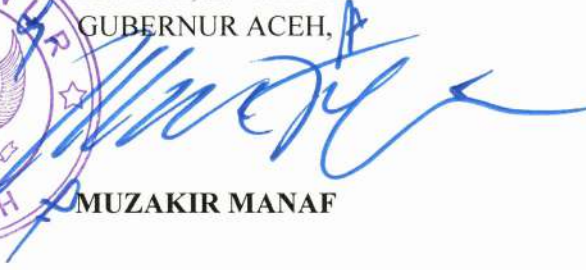
**GUBERNUR ACEH****PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Banda Aceh, **22** Juni 2026
GUBERNUR ACEH,


MUZAKIR MANAF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan luas dengan titik berat otonomi diletakkan pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri, yaitu pengelolaan urusan rumah tangga maupun pengelolaan keuangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyetujui Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Aceh telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 189, 190, 191, 192 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Pemerintah Aceh menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2025, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

a. Pendapatan	:	Rp10.700.061.956.317,20
b. Belanja dan Transfer	:	Rp10.652.709.341.864,08
Surplus	:	Rp47.352.614.453,12
c. Pembiayaan	:	
Penerimaan	:	Rp530.390.534.720,59
Pengeluaran	:	Rp59.284.549.418,65
d. Pembiayaan Netto	:	Rp471.105.985.301,94
e. Silpa	:	Rp518.458.599.755,06



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2025 dengan periode sebelumnya. Dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp530.262.155.633,59
- b. Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) : Rp518.458.599.755,06
- c. Saldo Anggaran Akhir : Rp518.458.599.755,06

3. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

- a. Aset : Rp32.094.703.141.769,41
- b. Kewajiban : Rp885.880.130.300,50
- c. Ekuitas : Rp31.208.823.011.468,91

4. Laporan Operasional

Menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO : Rp11.005.514.243.717,61
- b. Beban-LO : Rp11.179.635.068.160,95
- c. Defisit dari Operasi LO : Rp(174.120.824.443,34)
- d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO : Rp(68.543.745.622,66)
- e. Beban Luar Biasa : Rp(487.107.902,74)
- f. Defisit LO : Rp(243.151.677.968,74)

5. Laporan Arus Kas

Menggambarkan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas non anggaran.

Nilai arus kas bersih berdasarkan aktivitas selama satu Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Nilai kas bersih dari Aktivitas Operasi : Rp973.192.281.445,68
- b. Nilai kas bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan : Rp(960.995.927.082,23)
- c. Nilai kas bersih dari Aktivitas Pendanaan : Rp128.379.087,00
- d. Nilai Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran : -

Saldo kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Koreksi Saldo Awal Kas di Kasda	:	Rp36.250.000,12
b. Kenaikan Kas Selama Periode Akuntansi	:	Rp12.324.733.450,45
c. Saldo Awal Kas di BUA & Kas di Bendahara Pengeluaran	:	Rp486.638.267.260,64
d. Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas Bendahara Pengeluaran	:	Rp498.999.250.711,21
e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	:	Rp43.927.994,00
f. Saldo Akhir Kas BLUD	:	Rp19.325.719.626,20
g. Saldo Akhir Kas di BOS	:	Rp89.701.423,65
h. Saldo Kas Lainnya	:	Rp754.594.770,80
i. Saldo Akhir Kas	:	Rp519.213.194.525,86

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	:	Rp31.508.885.357.276,83
b. Surplus/Defisit LO	:	Rp(243.151.677.968,74)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	:	Rp(56.910.667.839,18)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	:	Rp31.208.823.011.468,91

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Menguraikan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, Sistematika Penulisan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA, serta Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Kebijakan Akuntansi. Selain itu dalam rangka pengungkapan yang memadai, CaLK juga menyajikan informasi tentang Penjelasan atas Pos-Pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan, Informasi Penting dan Kewajiban Kontinjensi yang mempengaruhi Laporan Keuangan, serta Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.



Banda Aceh, 22 Juni 2026
GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF



A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
PENDAPATAN ACEH					
Pendapatan Asli Aceh	5.1.1.1.	2.707.548.137.347,00	2.713.537.411.858,65	100,22	3.225.685.925.856,02
Pendapatan Pajak Aceh	5.1.1.1.1.	1.552.776.409.674,00	1.499.781.765.834,50	96,59	1.930.621.844.261,00
Pendapatan Retribusi Aceh	5.1.1.1.2.	708.333.834.165,00	684.774.199.352,66	96,67	790.959.745.324,61
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	267.905.085.228,00	270.253.493.775,00	100,88	267.660.903.349,00
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	5.1.1.1.4.	178.532.808.280,00	258.727.952.896,49	144,92	236.443.432.921,41
Pendapatan Transfer	5.1.1.2.	7.962.250.252.200,00	7.963.190.526.056,00	100,01	8.167.778.560.238,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.2.	3.625.892.648.000,00	3.621.202.927.656,00	99,87	3.872.936.043.238,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.	306.356.158.000,00	331.492.150.000,00	108,20	384.647.924.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.	2.208.557.679.000,00	2.250.706.483.460,00	101,91	2.310.752.304.717,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.	122.745.459.000,00	109.854.191.253,00	89,50	347.597.422.745,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.	988.233.352.000,00	929.150.102.943,00	94,02	829.938.391.776,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.	4.336.357.604.200,00	4.341.987.598.400,00	100,13	4.294.842.517.000,00
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	100,00	4.276.993.035.000,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.	26.774.964.200,00	32.404.958.400,00	121,03	-
Insentif Fiskal	5.1.1.2.	-	-	-	17.849.482.000,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	5.1.1.3.	22.096.400.000,00	23.334.018.402,55	105,60	2.573.582.835,56
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.	2.096.400.000,00	3.334.018.402,55	159,04	2.573.582.835,56
Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	5.1.1.3.	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		10.691.894.789.547,00	10.700.061.956.317,20	100,08	11.396.038.068.929,58
BELANJA ACEH					
Belanja Operasi	5.1.2.1.	8.244.019.010.213,44	7.820.849.998.603,50	94,87	8.209.331.872.526,06
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	3.510.201.365.904,05	3.383.380.144.754,26	96,39	3.371.575.286.947,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	4.103.698.646.426,52	3.965.855.346.259,74	96,64	3.727.115.239.159,49
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3.	5.023.000.000,00	5.022.985.000,00	100,00	6.386.180.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	371.650.077.808,87	359.568.508.263,50	96,75	1.017.004.886.266,57
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	253.445.920.074,00	107.023.014.326,00	42,23	87.250.280.153,00
Belanja Modal	5.1.2.2.	1.036.272.620.029,32	985.368.226.787,58	95,09	1.244.417.671.176,17
Belanja Tanah	5.1.2.2.1.	6.478.007.085,00	4.601.695.429,00	71,04	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	557.606.737.095,42	547.528.521.588,38	98,19	409.877.240.494,06
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	249.677.787.580,90	235.454.381.597,20	94,30	325.817.680.305,94
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4.	117.179.771.878,00	107.640.896.800,00	91,86	402.230.663.576,17
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	102.489.266.855,00	87.317.673.673,00	85,20	83.856.301.999,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	2.841.049.535,00	2.825.057.700,00	99,44	22.635.784.801,00

R.P.



Uraian	Ref	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	80.973.612.274,24	50.320.641.632,00	62,14	19.848.398,45
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	80.973.612.274,24	50.320.641.632,00	62,14	19.848.398,45
Jumlah Belanja		9.361.265.242.517,00	8.856.538.867.023,08	94,61	9.453.769.392.100,68
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	1.802.891.702.664,00	1.796.170.474.841,00	99,63	1.833.379.495.751,00
BELANJA TRANSFER BAGI HASIL	5.1.2.4.1.	670.143.363.872,00	665.660.491.383,00	99,33	881.118.949.469,00
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1.	670.143.363.872,00	665.660.491.383,00	99,33	881.118.949.469,00
BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.2.	1.132.748.338.792,00	1.130.509.983.458,00	99,80	952.260.546.282,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.1.2.4.2.	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.	119.323.781.792,00	117.085.426.458,00	98,12	952.260.546.282,00
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.	973.424.557.000,00	973.424.557.000,00	100,00	-
JUMLAH BELANJA DAN BELANJA TRANSFER		11.164.156.945.181,00	10.652.709.341.864,08	95,42	11.287.148.887.851,68
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3.	(472.262.155.634,00)	47.352.614.453,12	(10,03)	108.889.181.077,90
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.	530.262.155.634,00	530.390.534.720,59	100,02	474.004.949.182,60
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya	5.1.4.	530.262.155.634,00	530.262.155.633,59	100,00	473.295.918.241,60
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.	-	128.379.087,00	-	709.030.941,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.	58.000.000.000,00	59.284.549.418,65	102,21	52.631.974.626,91
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.	58.000.000.000,00	59.284.549.418,65	102,21	52.631.974.626,91
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4.	472.262.155.634,00	471.105.985.301,94	99,76	421.372.974.555,69
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	5.1.5.	-	518.458.599.755,06	-	530.262.155.633,59

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 22 Juni 2026

 GUBERNUR ACEH
 MUZAKIR MANAF

**B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
Uraian	Ref	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	530.262.155.633,59	473.295.918.241,60
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	5.2.2.	(530.262.155.633,59)	(473.295.918.241,60)
Subtotal		-	-
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	5.2.3.	518.458.599.755,06	530.262.155.633,59
Subtotal		518.458.599.755,06	530.262.155.633,59
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain	5.2.4.	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5.	518.458.599.755,06	530.262.155.633,59

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Banda Aceh, 22 Juni 2026
GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF



C. NERACA



PEMERINTAH ACEH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Aceh	5.3.1.1.	498.738.358.811,21	486.638.267.260,64
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2.	43.927.994,00	545.554.043,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3.	260.891.900,00	-
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.4.	19.325.719.626,20	42.980.049.891,95
Kas di BOS	5.3.1.5.	89.701.423,65	62.034.435,00
Kas Lainnya	5.3.1.6.	754.594.770,80	290.482.810,00
Kas		519.213.194.525,86	530.516.388.440,59
Piutang Pajak	5.3.1.7.	89.769.141.907,00	44.171.235.557,00
Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.8.	(1.229.779.182,73)	(1.084.673.150,98)
Piutang Pajak Netto		88.539.362.724,27	43.086.562.406,02
Piutang Retribusi	5.3.1.9.	117.515.619.227,00	101.641.577.163,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.10.	(24.210.268.826,30)	(24.004.919.720,26)
Piutang Retribusi Netto		93.305.350.400,70	77.636.657.442,74
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	5.3.1.11.	33.105.725.300,00	28.675.103.074,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	5.3.1.12.	(25.992.926.978,72)	(23.553.713.597,37)
Piutang Lain-lain PAA yang Sah Netto		7.112.798.321,28	5.121.389.476,63
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.3.1.13.	9.085.597.513,86	8.869.168.610,86
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.3.1.14.	(9.022.350.114,76)	(8.869.168.610,86)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto		63.247.399,10	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.15.	113.647.088.000,00	49.816.093.000,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		113.647.088.000,00	49.816.093.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.16.	56.509.583,08	56.509.583,08
Penyisihan bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran	5.3.1.17.	(56.509.583,08)	(56.509.583,08)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.18.	1.844.177.061,66	1.823.037.616,89
Persediaan	5.3.1.19.	231.901.692.026,31	268.877.986.131,67
JUMLAH ASET LANCAR		1.055.626.910.459,19	976.878.114.514,54



Uraian	Ref	2025	2024
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
Investasi Dana Bergulir	5.3.2.1.1.	84.872.435.588,52	85.025.821.719,52
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.2.1.2.	(84.872.435.588,52)	(85.025.821.719,52)
Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	5.3.2.2.	2.927.142.433.719,28	2.850.546.791.638,60
Jumlah Investasi Permanen		2.927.142.433.719,28	2.850.546.791.638,60
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.927.142.433.719,28	2.850.546.791.638,60
ASET TETAP			
Tanah	5.3.3.1.	7.030.292.741.319,09	7.023.028.028.681,09
Peralatan dan Mesin	5.3.3.2.	6.099.684.622.851,82	5.667.327.158.202,85
Gedung dan Bangunan	5.3.3.3.	8.936.104.682.768,57	8.772.150.756.625,38
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.3.4.	17.241.903.987.541,50	16.942.662.319.028,20
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5.	1.185.601.559.138,95	1.129.068.849.327,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6.	771.765.110.891,02	1.317.637.001.349,68
Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7.	(18.228.391.885.075,96)	(17.145.661.634.698,04)
Jumlah Aset Tetap		23.036.960.819.434,99	23.706.212.478.516,88
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.4.	1.515.847.852.811,86	1.456.563.303.393,21
Jumlah Dana Cadangan		1.515.847.852.811,86	1.456.563.303.393,21
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.5.1.	25.405.178.307,43	25.405.178.307,43
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto		25.405.178.307,43	25.405.178.307,43
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.5.2.	334.069.851.053,00	334.069.851.053,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.5.3.	(212.705.088.276,77)	(191.913.276.893,60)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto		121.364.762.776,23	142.156.574.159,40
Aset Tidak Berwujud	5.3.5.4.	77.318.392.177,43	74.253.437.637,43
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.5.5.	(66.189.221.472,96)	(63.962.733.706,29)
Aset Tidak Berwujud Netto		11.129.170.704,47	10.290.703.931,14
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.5.6.	-	3.689.872.000,00
Aset Lain-lain	5.3.5.7.	3.359.151.779.221,68	2.953.745.079.100,37
JUMLAH ASET LAINNYA		3.517.050.891.009,81	3.135.287.407.498,34
Properti Investasi	5.3.6.1.	50.239.725.097,00	244.656.528.729,80
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.6.2.	(8.165.490.762,72)	(11.820.364.454,15)
Properti Investasi Netto		42.074.234.334,28	232.836.164.275,65
JUMLAH ASET		32.094.703.141.769,41	32.358.324.259.837,22
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.7.1.1.	1.771.881.770,80	254.949.910,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.7.1.2.	7.861.474.374,13	10.780.453.344,89



Uraian	Ref	2025	2024
Utang Belanja	5.3.7.1.3.	655.224.813.155,57	635.382.703.305,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.7.1.4.	221.021.961.000,00	203.020.796.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		885.880.130.300,50	849.438.902.560,39
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		885.880.130.300,50	849.438.902.560,39
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.8.	31.208.823.011.468,91	31.508.885.357.276,83
JUMLAH EKUITAS		31.208.823.011.468,91	31.508.885.357.276,83
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		32.094.703.141.769,41	32.358.324.259.837,22

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



Banda Aceh, 22 Juni 2026
GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

**D. LAPORAN OPERASIONAL**

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)					
Pendapatan Pajak Aceh	5.4.1.1.1.	1.545.349.393.363,50	1.966.054.208.641,00	(420.704.815.277,50)	(21,40)
Pendapatan Retribusi Aceh	5.4.1.1.2.	710.651.438.910,73	747.390.334.956,46	(36.738.896.045,73)	(4,92)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.4.1.1.3.	346.813.573.829,68	380.711.935.295,36	(33.898.361.465,68)	(8,90)
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	5.4.1.1.4.	275.094.482.087,27	266.174.053.463,22	8.920.428.624,05	3,35
Jumlah Pendapatan Asli Aceh		2.877.908.888.191,18	3.360.330.532.356,04	(482.421.644.164,86)	(14,36)
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.2.1.	373.595.858.000,00	349.197.757.000,00	24.398.101.000,00	6,99
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.2.	2.250.706.483.460,00	2.310.752.304.717,00	(60.045.821.257,00)	(2,60)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.1.2.3.	109.854.191.253,00	347.597.422.745,00	(237.743.231.492,00)	(68,40)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.1.2.4.	929.150.102.943,00	829.938.391.776,00	99.211.711.167,00	11,95
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		3.663.306.635.656,00	3.837.485.876.238,00	(174.179.240.582,00)	(4,54)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	5.4.1.2.5.	4.309.582.640.000,00	4.276.993.035.000,00	32.589.605.000,00	0,76
Dana Insentif Fiskal	5.4.1.2.6.	-	17.849.482.000,00	(17.849.482.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	5.4.1.2.7.	32.404.958.400,00	-	32.404.958.400,00	-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		4.341.987.598.400,00	4.294.842.517.000,00	47.145.081.400,00	1,10
Jumlah Pendapatan Transfer		8.005.294.234.056,00	8.132.328.393.238,00	(127.034.159.182,00)	(1,56)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.	102.311.121.470,43	93.376.024.411,87	8.935.097.058,56	9,57
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.	20.000.000.000,00	-	20.000.000.000,00	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		122.311.121.470,43	93.376.024.411,87	28.935.097.058,56	30,99
Jumlah Pendapatan		11.005.514.243.717,61	11.586.034.950.005,91	(580.520.706.288,31)	(5,01)
BEBAN OPERASI					
Beban Pegawai	5.4.2.1.	3.370.016.308.994,26	3.362.388.579.011,50	7.627.729.982,76	0,23
Beban Persediaan	5.4.2.2.	1.571.714.793.370,22	1.354.668.177.659,80	217.046.615.710,42	16,02
Beban Jasa	5.4.2.3.	2.166.388.650.071,28	2.180.323.798.129,86	(13.935.148.058,58)	(0,64)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4.	257.596.554.812,80	205.342.588.721,22	52.253.966.091,58	25,45
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5.	249.365.683.285,00	254.502.294.161,06	(5.136.610.876,06)	(2,02)
Beban Subsidi	5.4.2.6.	5.022.985.000,00	6.386.180.000,00	(1.363.195.000,00)	(21,35)
Beban Hibah	5.4.2.7.	356.949.148.378,50	996.270.570.861,91	(639.321.422.483,41)	(64,17)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8.	107.023.014.326,00	87.250.280.153,00	19.772.734.173,00	22,66



Uraian	Ref	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9	1.304.976.831.853,24	1.362.143.477.305,12	(57.166.645.451,88)	(4,20)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.10	21.486.700.249,65	47.664.169.555,41	(26.177.469.305,76)	(54,92)
Beban Transfer	5.4.2.11	1.718.773.756.188,00	1.834.003.154.233,00	(115.229.398.045,00)	(6,28)
Beban Tak Terduga	5.4.2.12	50.320.641.632,00	56.098.398,45	50.264.543.233,55	89.600,67
Jumlah Beban Operasi		11.179.635.068.160,95	11.690.999.368.190,33	(511.364.300.029,38)	(4,37)
Surplus/Defisit Dari Operasi	5.4.3	(174.120.824.443,34)	(104.964.418.184,42)	(69.156.406.258,92)	65,89
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.4.1.1	-	1.914.802.500,00	(1.914.802.500,00)	(100,00)
Jumlah Surplus Non Operasional		-	1.914.802.500,00	(1.914.802.500,00)	(100,00)
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	5.4.4.2.1	1.763.698.064,00	2.598.563.172,11	(834.865.108,11)	(32,13)
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	5.4.4.2.2	25.007.044,00	-	25.007.044,00	-
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.4.4.2.3	2.830.232.500,00	6.311.544.077,24	(3.481.311.577,24)	(55,16)
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	5.4.4.2.4	92.646.352,00	314.551.203.500,41	(314.458.557.148,41)	(99,97)
Defisit Penghapusan Aset Lain-lain- LO	5.4.4.2.5	63.832.161.662,66	-	63.832.161.662,66	-
Jumlah Defisit Non Operasional		68.543.745.622,66	323.461.310.749,76	(254.917.565.127,10)	(78,81)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(68.543.745.622,66)	(321.546.508.249,76)	253.002.762.627,10	(78,68)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(242.664.570.066,00)	(426.510.926.434,18)	183.846.356.368,18	(43,10)
BEBAN LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	5.4.5	487.107.902,74	5.567.832.027,53	(5.080.724.124,79)	(91,25)
Jumlah Beban Luar Biasa		(487.107.902,74)	(5.567.832.027,53)	(5.080.724.124,79)	(91,25)
SURPLUS/DEFISIT	5.4.6	(243.151.677.968,74)	(432.078.758.461,71)	188.927.080.492,97	(43,73)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Banda Aceh, 22 Juni 2026
 GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

**E. LAPORAN ARUS KAS**

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Aceh	5.5.1.1.	1.499.781.765.834,50	1.930.621.844.261,00
Penerimaan Retribusi Aceh	5.5.1.1.	14.776.542.073,55	16.604.994.415,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.5.1.1.	270.253.493.775,00	267.660.903.349,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	5.5.1.1.	241.430.342.838,00	220.012.177.423,23
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.	331.492.150.000,00	384.647.924.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.	2.250.706.483.460,00	2.310.752.304.717,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.	123.495.152.257,00	832.951.157.413,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.	4.309.582.640.000,00	4.276.993.035.000,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1.	-	-
Penerimaan Insentif Fiskal		-	17.849.482.000,00
Bantuan Keuangan	5.5.1.1.	32.404.958.400,00	-
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.	2.351.406.866,00	2.573.582.835,56
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	5.5.1.1.	982.509.762,55	-
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1.	20.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		9.097.257.445.266,60	10.260.667.405.413,79
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.	2.803.263.471.768,26	3.360.353.860.106,66
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.	3.057.440.869.450,16	2.719.407.300.512,44
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.	5.022.985.000,00	6.386.180.000,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.	304.823.706.803,50	961.836.115.870,57
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.	107.023.014.326,00	87.250.280.153,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.	50.320.641.632,00	19.848.398,45
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.	1.130.509.983.458,00	952.260.546.282,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.2.	665.660.491.383,00	881.118.949.469,00
Jumlah Arus Keluar Kas		8.124.065.163.820,92	8.968.633.080.792,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		973.192.281.445,68	1.292.034.324.621,67
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET			
NON KEUANGAN			
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	364.296.000,00	-
Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.	-	1.914.802.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas		364.296.000,00	1.914.802.500,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.	59.284.549.418,65	52.631.974.626,91
Perolehan Tanah	5.5.2.2.	4.601.695.429,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.	546.094.545.768,38	408.492.084.642,06
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.	234.699.495.286,20	325.817.680.305,94
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.2.	107.640.896.800,00	402.230.663.576,17



Uraian	Ref	Tahun 2025	Tahun 2024
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.	6.213.982.680,00	14.727.662.250,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.	2.825.057.700,00	516.011.420,00
Jumlah Arus Keluar Kas		961.360.223.082,23	1.204.416.076.821,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(960.995.927.082,23)	(1.202.501.274.321,08)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Aceh Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Aceh	5.5.3.1	128.379.087,00	709.030.941,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Aceh Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		128.379.087,00	709.030.941,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		128.379.087,00	709.030.941,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.	565.551.354.351,60	482.005.550.012,00
Jumlah Arus Masuk Kas		565.551.354.351,60	482.005.550.012,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.	565.551.354.351,60	482.005.550.012,00
Jumlah Arus Keluar Kas		565.551.354.351,60	482.005.550.012,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		-	-
Koreksi Saldo Awal Kas di Kasda	5.5.5.	36.250.000,12	-
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5.	12.324.733.450,45	90.242.081.241,59
Saldo Awal Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5.	486.638.267.260,64	396.396.186.019,05
Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5.	498.999.250.711,21	486.638.267.260,64
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.5.	43.927.994,00	545.554.043,00
Saldo Akhir Kas BLUD	5.5.5.	19.325.719.626,20	42.980.049.891,95
Saldo Akhir Kas di Bendahara Bos	5.5.5.	89.701.423,65	62.034.435,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5.	754.594.770,80	290.482.810,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5.	519.213.194.525,86	530.516.388.440,59

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Banda Aceh, 22 Juni 2026

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

**F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
Ekuitas	5.6.1	31.508.885.357.276,83	32.308.546.824.458,78
Surplus/Defisit-LO	5.6.2	(243.151.677.968,74)	(432.078.758.461,71)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	(56.910.667.839,18)	(367.582.708.720,24)
Koreksi/Penyesuaian Kas		66.974,57	(248.100.000,00)
Koreksi/Penyesuaian Piutang		(8.103.664.104,00)	(4.873.198.809,21)
Koreksi/Penyesuaian Persediaan		18.916.878.316,32	917.875.920,50
Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen		35.562.026,00	53.370.810.944,00
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		18.783.994.189,04	104.275.990.595,91
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan		(54.480.953.036,61)	(140.607.934.900,81)
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya		(167.196.930,00)	(349.402.522.034,53)
Koreksi/Penyesuaian Amortisasi		-	(282.978.933,33)
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu		(137.013.612,50)	(7.733.358.788,70)
Koreksi Utang		(39.756.482.053,00)	(16.883.796.496,51)
Koreksi Penyisihan Piutang		7.999.826.575,00	(6.114.926.217,56)
Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain		(1.686.184,00)	(570.000,00)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.6.4	31.208.823.011.468,91	31.508.885.357.276,83

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 22 Juni 2026
 GUBERNUR ACEH,

 MUZAKIR MANAF

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan umum pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa keuangan Pemerintah Aceh dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance*, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas untuk membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Gubernur Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran (TA). Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Aceh dalam melaksanakan asas transparansi, efisiensi dan efektivitas terhadap jalannya pemerintahan.

Pemerintah Aceh selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam TA 2025 untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan alokasi anggaran dan sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Aceh atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Aceh, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Aceh, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal tersebut dapat diketahui dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Aceh yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis *Akrual* pada Pemerintah Daerah merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Permendagri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS) dan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TA 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
20. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3);
21. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
22. Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 1) dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 11);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 45);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 46); dan
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 47);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 16);

29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Aceh Tahun 2025 Nomor 2);
30. Peraturan Gubernur Aceh No 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Aceh Tahun 2025 Nomor 2);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Aceh Tahun 2025 Nomor 22);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025.

1.3. Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Pemerintah Aceh adalah SKPA yang berada di lingkup Pemerintah Aceh. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh memberi wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) untuk mengelola administrasi keuangan Pemerintah Aceh beserta pelaporan keuangannya.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Aceh TA 2025 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan

hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBA, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK.

Bab VI Informasi Penting dan Kewajiban Kontijensi serta Upaya yang Mempengaruhi Laporan Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

Bab VII Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, di antaranya domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan, dan kejadian yang mempunyai dampak sosial misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

Bab VIII Penutup



Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1. Indikator Ekonomi Makro

2.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh tahun 2025 mencapai 76,23, meningkat 0,87 poin atau 1,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,36. Selama 2020–2025, IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,79 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Provinsi Aceh 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan.

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. UHH Provinsi Aceh terus meningkat setiap tahunnya, UHH bayi yang lahir pada 2025 sebesar 73,48 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM diukur dengan Pendidikan dalam hal ini dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia di atas tujuh tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 25 tahun. Berdasarkan Publikasi BPS Provinsi Aceh pada Desember 2025, pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2025 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,39 tahun menjadi 14,40 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,31 tahun, dari 9,64 tahun menjadi 9,95 tahun pada tahun 2025.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan Publikasi BPS Desember 2025, Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025, sebesar Rp. 11.191.000 meningkat 380 ribu rupiah atau naik 3,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1. IPM Aceh Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	72,69	72,71	72,92	73,06	73,20	73,48
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,31	14,36	14,37	14,38	14,39	14,40
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,33	9,37	9,44	9,55	9,64	9,95
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	9.492	9.572	9.963	10.334	10.811	11.191
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,29	73,48	74,11	74,70	75,36	76,23

Sumber: BPS Provinsi Aceh

2.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Ekonomi Aceh Triwulan IV-2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp257,50 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp158,34 triliun.

Ekonomi Aceh tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 tumbuh sebesar 2,97 persen (*c-to-c*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,00 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,41 persen.

Ekonomi Aceh Triwulan IV-2025 terhadap Triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 1,61 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi terdalam sebesar 17,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi terdalam sebesar 6,13 persen (selain komponen pengurang).

Ekonomi Aceh pada Triwulan IV-2025 dibandingkan triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 0,05 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi terdalam sebesar 19,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami kontraksi terdalam sebesar 6,69 persen.

Bencana Hidrometeorologi – Siklon Tropis Senyar yang terjadi di Aceh pada akhir November 2025 menjadi salah satu pendorong utama berkontraksinya Ekonomi Aceh baik secara *y-on-y* maupun *q-to-q*.

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

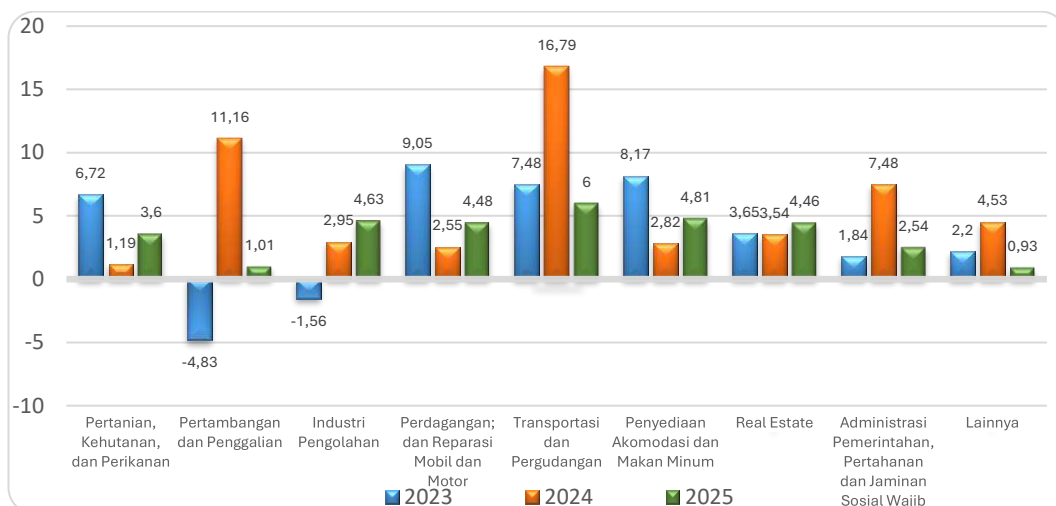
Ekonomi Aceh tahun 2025 tumbuh sebesar 2,97 persen. Pertumbuhan terjadi pada beberapa lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi Adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,00 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,81 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 4,63 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,60 persen. Sedangkan Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 1,01 persen dan Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 2,48 persen.

Struktur PDRB Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian sebesar 32,74 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,10



persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,95 persen; Konstruksi sebesar 8,22 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,96 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 71,97 persen.

GAMBAR 1. PERTUMBUHAN PDRB BEBERAPA LAPANGAN USAHA (C-TO-C) (PERSEN), 2023-2025



Sumber: BPS Provinsi Aceh

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan q-to-q (Persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2025 terhadap Triw II-2025 (Q-to-Q)	Triw IV-2025 terhadap Triw III-2025 (Q-to-Q)	Triw III-2025 terhadap Triw III-2024 (Y-on-Y)	Triw IV-2025 terhadap Triw IV-2024 (Y-on-Y)	Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,86	10,55	6,36	0,85	3,6	0,99
Pertambangan dan Penggalian	-0,84	-19,56	3,79	-17,79	1,01	0,08
Industri Pengolahan	1,61	-1,3	5,68	1,07	4,63	0,2
Pengadaan Listrik, Gas	5,73	-17,5	5,24	-11,71	-2,62	0
Pengadaan Air	-0,01	-6,86	0,04	-8,61	-0,53	0
Konstruksi	9,05	-0,19	-0,07	-8,42	-2,48	-0,24
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,5	-0,4	6,28	-0,06	4,48	0,69
Transportasi dan Pergudangan	-4,91	-8,59	5,09	-3,6	6	0,44
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	8,77	-8,35	7,78	-0,61	4,81	0,07
Informasi dan Komunikasi	6,37	-11,37	6,27	-1,97	1,87	0,08
Jasa Keuangan	3,56	8,28	0,64	13,56	3,85	0,06



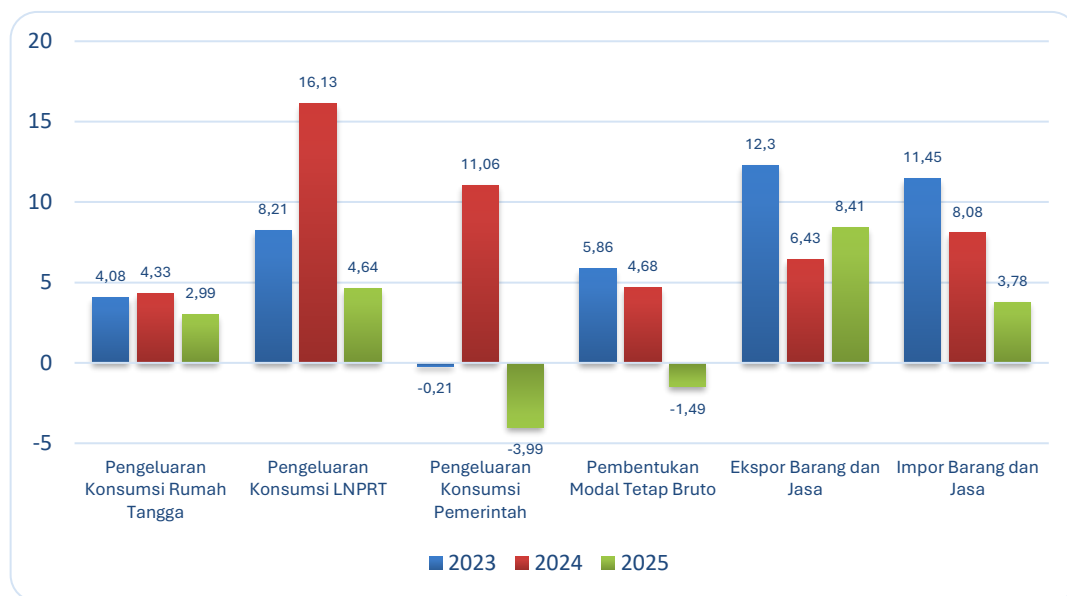
Lapangan Usaha	Triw III- 2025 terhada p Triw II- 2025 (Q- to-Q)	Triw IV- 2025 terhada p Triw III- 2025 (Q- to-Q)	Triw III- 2025 terhada p Triw III- 2024 (Y- on-Y)	Triw IV- 2025 terhada p Triw IV-2024 (Y-on-Y)	Laju Pertumb uhan 2025	Sumb er Pertu mbuh an 2025
Real Estate	5,07	-6,13	7,28	2,89	4,46	0,18
Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan,	5,33	-0,81	-1,88	1,52	-0,52	0
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,04	7,82	0,26	2,91	2,54	0,22
Jasa Pendidikan	4,04	-5,45	6,67	4,1	3,47	0,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,71	-4,62	-0,3	-1,3	2,22	0,07
Jasa Lainnya	-0,04	-6,52	0,64	-0,07	2,06	0,03
Catatan:						
q-to-q : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya						
y-on-y : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya						
c-to-c : PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya						

Sumber: BPS Provinsi Aceh

b. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Aceh tahun 2025 terhadap tahun 2024 (*c-to-c*) tumbuh sebesar 2,97 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang berkontraksi masing-masing sebesar 3,99 persen; dan 1,49 persen. Komponen yang tumbuh signifikan adalah Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,41 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 4,64 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,99 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 3,78 persen.

Struktur PDRB Aceh menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Aceh masih didominasi oleh Ekspor Barang dan Jasa sebesar 66,36 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 53,67 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 31,09 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 16,81 persen dan Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 2,10 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang memiliki kontribusi sebesar 70,28 persen.

GAMBAR 2. PERTUMBUHAN PDRB KOMPONEN PENGELUARAN (C-TO-C) (PERSEN)


Sumber: BPS Provinsi Aceh

Tabel 3. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (persen)

Lapangan Usaha	Triw III- 2025 terhadap Triw II- 2025 (Q- to-Q)	Triw IV- 2025 terhadap Triw III- 2025 (Q- to-Q)	Triw III- 2025 terhadap Triw III- 2024 (Y-on-Y)	Triw IV- 2025 terhadap Triw IV- 2024 (Y-on-Y)	Laju Pertumb uhan 2025	Sumber Pertumbu han 2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,86	10,55	6,36	0,85	3,6	0,99
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,84	-19,56	3,79	-17,79	1,01	0,08
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,61	-1,3	5,68	1,07	4,63	0,2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,73	-17,5	5,24	-11,71	-2,62	0
Perubahan Inventori	-0,01	-6,86	0,04	-8,61	-0,53	0
Ekspor Barang dan Jasa	9,05	-0,19	-0,07	-8,42	-2,48	-0,24
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,5	-0,4	6,28	-0,06	4,48	0,69
q-to-q : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya						
y-on-y : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya						
c-to-c : PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulanan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya						

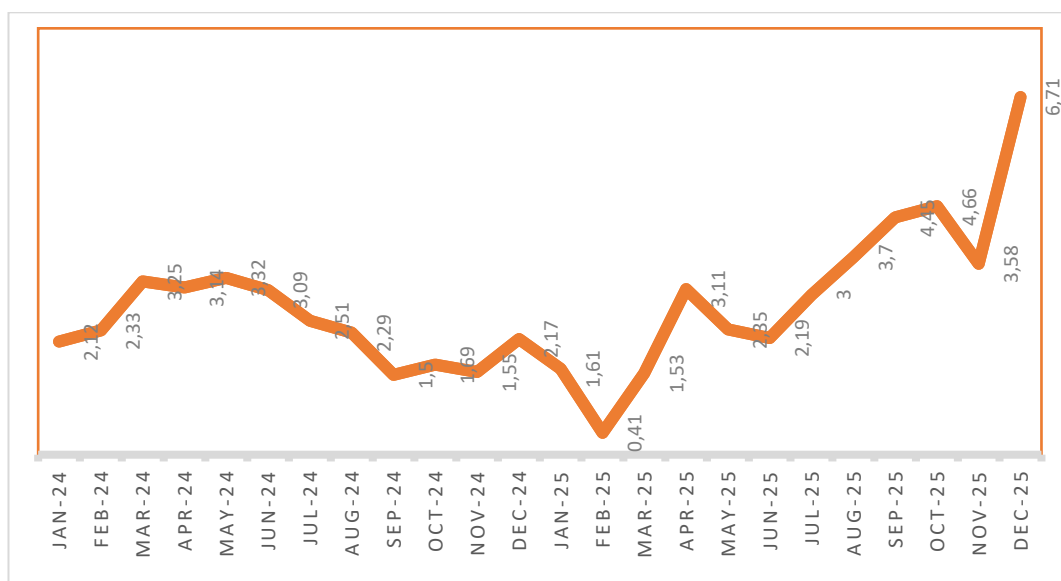
Sumber: BPS Provinsi Aceh

2.1.1.3. Inflasi

Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 6,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,40. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,90 persen, dengan IHK 117,81, dan terendah terjadi di Meulaboh dan Kota Lhokseumawe yang mengalami inflasi sebesar 5,56 persen dengan IHK masing-masing sebesar 114,67 dan 112,20.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 12,47 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,46 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,92 persen; kelompok transportasi sebesar 2,28 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,29 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pendidikan sebesar 0,16 persen.

GAMBAR 3. TINGKAT INFLASI YEAR ON YEAR (Y-ON-Y) PROVINSI ACEH BULAN DESEMBER, 2025 (PERSEN)



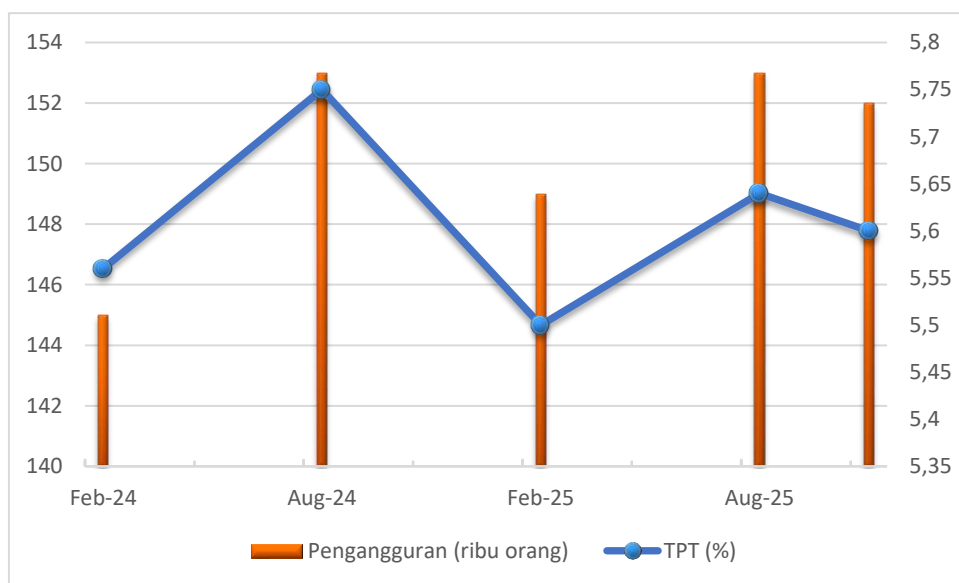
Sumber : BPS Provinsi Aceh

2.1.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

TPT hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 sebesar 5,60 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur. Pada November 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025. Pada November 2025, TPT laki-laki sebesar 4,02 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 8,33 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin, sementara TPT perempuan naik 0,81 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

GAMBAR 4. JUMLAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) FEBRUARI 2024 – NOVEMBER 2025



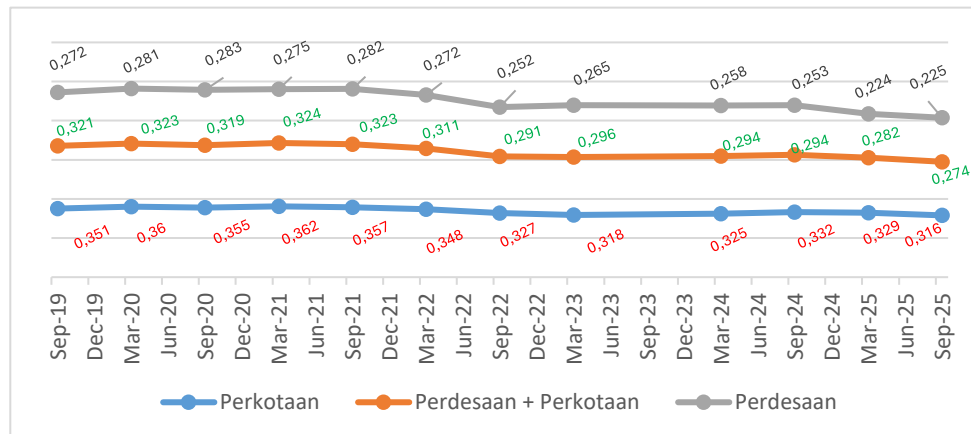
Sumber : BPS Provinsi Aceh

2.1.1.5 Tingkat Ketimpangan/*Gini Ratio*

Gini Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan suatu daerah. Perubahan *gini ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *gini ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini ratio* Provinsi Aceh menunjukkan tren penurunan selama periode September 2019 hingga September 2025. Pada September 2019, *gini ratio* tercatat sebesar 0,321 dan sempat mengalami sedikit kenaikan hingga mencapai 0,324 pada Maret 2021. Selanjutnya, terjadi penurunan bertahap yang cukup konsisten, terutama sejak Maret 2022, yaitu *gini ratio* turun dari 0,311 menjadi 0,274 pada September 2025. *Gini ratio* September 2025 merupakan angka terendah sejak September 2019. Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada September 2025 semakin membaik.

Berdasarkan daerah, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,316. Angka ini turun 0,013 poin dibandingkan Maret 2025 yang nilainya sebesar 0,329. Sementara itu, *gini ratio* di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,225, naik 0,001 poin dibandingkan kondisi Maret 2025 yang nilainya sebesar 0,225.

GAMBAR 5. JUMLAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) FEBRUARI 2024 – NOVEMBER 2025

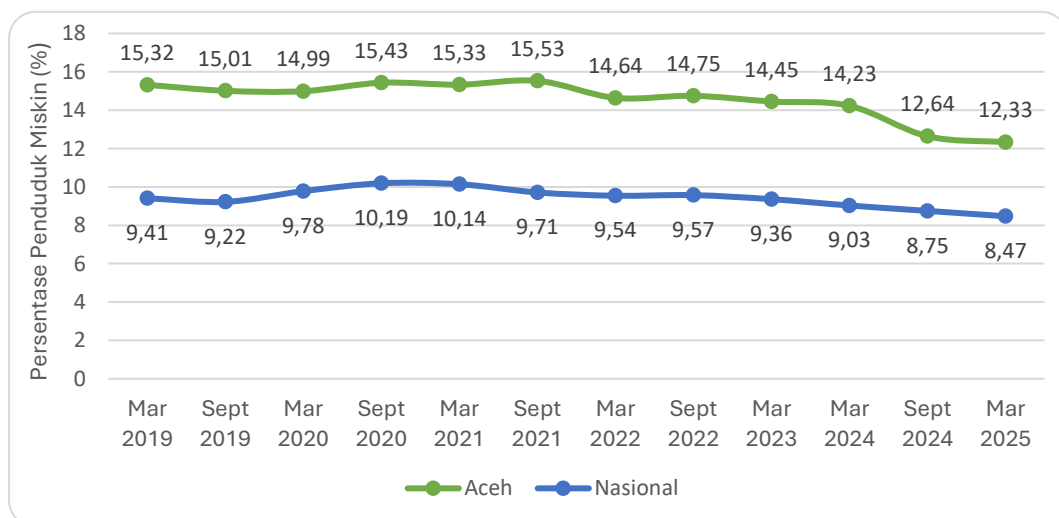


Sumber: BPS Provinsi Aceh

2.1.1.6. Profil Kemiskinan

Secara umum persentase kemiskinan Provinsi Aceh dalam kurun waktu dari 2019-2025 fluktuatif, berada di antara 15,32 persen sampai dengan 12,33 persen. Tingkat kemiskinan Aceh secara konsisten berada jauh di atas rata-rata nasional, meskipun keduanya menunjukkan tren penurunan. Di Aceh, persentase penduduk miskin bergerak fluktuatif di kisaran 14,5-15,5 persen hingga 2023 sebelum turun signifikan menjadi 12,64 persen pada September 2024 dan sedikit naik ke 12,33 persen pada Maret 2025. Sementara itu, angka nasional mengalami penurunan yang lebih stabil dari sekitar 9,4 persen pada 2019 menjadi 8,47 persen pada 2025. Gap antara Aceh dan nasional tetap lebar sekitar 5–6 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Aceh menghadapi tantangan kemiskinan struktural yang lebih besar dibandingkan kondisi rata-rata Indonesia, meskipun arah perbaikan mulai terlihat pada dua tahun terakhir.

GAMBAR 6. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI ACEH 2020 – 2025



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada September 2025 sebanyak 703,33 ribu orang, berkurang 1,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2025 yang jumlahnya 704,69 ribu orang. Di daerah perkotaan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 8,54 persen menjadi 8,15 persen (-0,39 poin). Sedangkan di pedesaan, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 14,44 persen menjadi 14,51 persen (0,07 poin).

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh menurut Daerah, Maret 2023 – September 2025

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
Maret 2023	189,16	9,79
Maret 2024	190,55	9,60
September 2024	168,71	8,37
Maret 2025	174,18	8,54
September 2025	168,71	8,15
Perdesaan		
Maret 2023	617,56	16,92
Maret 2024	613,98	16,75
September 2024	550,25	14,99
Maret 2025	530,51	14,44
September 2025	534,56	14,51
Perkotaan+Perdesaan		
Maret 2023	806,75	14,45
Maret 2024	804,53	14,23
September 2024	718,96	12,64
Maret 2025	704,69	12,33
September 2025	703,33	12,22

Sumber: BPS Provinsi Aceh

2.1.1.7. Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kebutuhan dasar ini mencakup makanan, air bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Pada bulan Maret 2025 persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 12,33 persen atau berjumlah 704.690 orang. Angka ini menurun sebesar 0,31 poin jika dibandingkan dengan bulan September 2024.

Lima langkah yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di antaranya adalah:

1. Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui keberlanjutan program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).
2. Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, pembangunan rumah duafla, dana BOS dan serta bantuan ekonomi lainnya, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin lewat bantuan UMKM, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu menaikkan pendapatan, termasuk pelatihan kerja.
3. Mengendalikan kebutuhan pokok, seperti melakukan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok yang sudah disubsidi pemerintah.

4. Meminimalisir ekonomi biaya tinggi dengan pembangunan jalan yang menghubungkan lintasan provinsi dan di daerah terpencil, sehingga terjadinya konektivitas.
5. Membantu pasca bencana, karena bencana juga menyumbang kemiskinan, antara lain kegiatan bantuan darurat bencana, dan pasca bencana dengan membantu modal usaha.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Aceh, yang merupakan hasil dari perkembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota di provinsi tersebut, membutuhkan upaya pemerataan untuk memastikan bahwa pola pertumbuhan ekonomi tersebut merata. Ini merupakan langkah penting dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, yang pada akhirnya akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan dalam hal pendapatan masyarakat.

Pemerintah Aceh pada tahun 2025 berkomitmen menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat melalui berbagai langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang dijalankan pemerintah Aceh untuk mendorong perekonomian, di antaranya memberikan pelatihan keterampilan kerja dan akses permodalan bagi UMKM.

Selain itu, upaya lainnya juga terus diperkuat dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai elemen fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk, dunia usaha, dan akademisi, sangatlah diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan lainnya seperti angka kemiskinan dan pengangguran.

GAMBAR 7. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH TRIWULAN I-2025 (Y-ON-Y) (PERSEN)



Sumber: BPS Prov Aceh

Pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa perekonomian Aceh yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp61,75 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp38,18 triliun. Ekonomi Aceh pada triwulan I-2025 tercatat sebesar 4,59 persen (y-on-y) dan 6,05 persen (q-to-q).

GAMBAR 8. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH, TRIWULAN I-2024 (Y-ON-Y)



Sumber: BPS Provinsi Aceh

Dari Gambar di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 0,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali pengadaan listrik dan gas serta konstruksi yang berkontraksi masing-masing sebesar 4,77 persen dan 0,11 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah pertambangan dan penggalian yang tercatat sebesar 19,02 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 9,76 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,99 persen. Selanjutnya, struktur PDRB Aceh

menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti, mengingat perekonomian Aceh masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 32,53 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran-reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,52 persen, administrasi pemerintahan sebesar 8,83 persen, konstruksi sebesar 7,80 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 6,84 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai sebesar 71,52 persen.

Pertanian menjadi sektor paling besar yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Aceh. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kebijakan di Aceh perlu melakukan upaya yang dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah dari pertanian di Aceh. Begitu pun dengan pengolahan di mana selama ini sebagian besar produk pertanian Aceh masih diolah ke Sumatera Utara sehingga semua pihak diharapkan dapat berkontribusi untuk mewujudkan agar upaya hilirisasi pertanian bisa ditumbuhkan di Aceh, di mana jika hilirisasi dan peningkatan produk pertanian di Aceh sudah berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi Aceh juga akan terus meningkat.

Dalam rangka mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi di Aceh, telah disusun pola pengembangan wilayah dengan menetapkan daerah pengembangan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Dengan melaksanakan rencana ini, diharapkan pengembangan ekonomi dapat merata di seluruh wilayah Aceh, mengoptimalkan potensi setiap daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2. Kebijakan Strategis

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2025-2029 telah dilantik pada tanggal 12 Februari 2025. Atas dasar ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan peraturan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal sesuai dengan amanat pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Agar pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal, maka RPJMD harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan spasial yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025-2029 disusun dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi Nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045” yang dituangkan dalam delapan asta cita pembangunan dengan pedoman teknis penyusunan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RPJM Aceh 2025-2029 merupakan tahapan pembangunan pertama dari RPJP Aceh 2025-2045. Tahapan ini memfokuskan pada penguatan fondasi transformasi RPJP Aceh, dengan fokus pembangunan dititikberatkan pada pencapaian transformasi sosial, transformasi tata kelola, keamanan yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, pembangunan kewilayahan, ketahanan ekologi dan kesinambungan pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan di atas dan merujuk pada Rancangan RPJM Aceh Tahun 2025-2049, maka isu-isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh.

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat Syariat Islam, dan budaya Aceh dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam dan budaya Aceh. Melakukan program pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat. Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan dan mendorong promosi dan pelestarian cagar budaya dan objek kemajuan kebudayaan Aceh sebagai bagian dari identitas daerah. Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka. Di samping itu, pengelolaan harta agama terhadap wakaf perlu ditangani secara serius seperti manajemen kelembagaan dan status hukum aset wakaf (sertifikasi tanah wakaf).

3.2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan *Stunting*

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka *stunting* yang meliputi:

- a) Peningkatan Akses Makanan Bergizi dengan upaya meningkatkan akses masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak, ke makanan bergizi seimbang melalui promosi praktik pemberian makanan tambahan, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan.
- b) Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat termasuk daerah terpencil, terutama ibu hamil dan anak-anak, ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- c) Pendidikan Kesehatan dan Penyuluhan Gizi dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan keluarga dengan anak balita, tentang pentingnya pola makan sehat, praktik pemberian

makan yang baik, dan pentingnya nutrisi selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak.

- d) Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan dengan mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita yang mengalami *stunting*.
- e) Akses Sanitasi dan Air Bersih dengan meningkatkan akses kepada masyarakat, terutama di pedesaan, ke sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi.
- f) Kolaborasi dan Sinergi antara pemerintah daerah berbagai *stakeholder* termasuk lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya menurunkan *stunting*.

3.2.3. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan pemerataan Pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca Masyarakat dengan cara sebagai berikut:

1) Menurunkan Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk menurunkan disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh, diperlukan upaya lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat;
- b) Mendorong pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
- c) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
- d) Pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; dan
- e) Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

2) Memperkuat Pendidikan Vokasi

Untuk memperkuat pendidikan vokasi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi;
- b) Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- c) Membangun kemitraan dengan industri dan perusahaan lokal;
- d) Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa; dan
- e) Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi.

3) Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Peningkatan akses terhadap bahan bacaan;
- b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas buku;
- c) Integrasi literasi dalam kurikulum pendidikan;
- d) Pembangunan keterampilan;
- e) Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait;
- f) Pengembangan inisiatif inovatif dalam promosi literasi; dan
- g) Membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan.

3.2.4. Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan peningkatan akses layanan dasar akses masyarakat terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak, pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pengembangan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya berikutnya dengan memberikan bantuan tunai, pangan, atau pendidikan kepada keluarga miskin; membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan. Di samping itu, perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

3.2.5. Peningkatan Pendapatan Per Kapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya mendukung peningkatan UMKM terhadap akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UMKM, dan pengembangan produk bersertifikasi halal. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.

Meningkatkan promosi investasi dan kemitraan dengan sektor swasta, serta menyediakan insentif dan kemudahan perizinan. Optimalisasi potensi pariwisata Aceh, termasuk wisata bahari, agrowisata, wisata budaya dan sejarah, ekowisata, wisata spiritual, wisata edukasi, wisata minat khusus lainnya serta pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung. Di samping itu, pengembangan pariwisata di Aceh perlu dilakukan dalam kerangka dan *branding* pada wisata halal/*muslim friendly*. Mengembangkan sektor-sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.6. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digitalisasi

Riset dan Inovasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan sangat penting untuk kemajuan suatu daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk optimalisasi riset dan inovasi dengan cara pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, membangun infrastruktur penelitian dan inovasi untuk mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintahan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. Selanjutnya membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yang didukung oleh kebijakan dan regulasi yang pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan melalui anggaran pemerintah dan kerja sama dengan lembaga penelitian.

3.2.7. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat

Permasalahan lapangan kerja di Aceh saat ini masih menjadi permasalahan utama yang didukung oleh beberapa faktor, yaitu masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini tergambar dari rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja yang terbatas, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Aceh yang belum cukup kuat dan terbatasnya investasi juga menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja.

Berbagai upaya pembangunan yang dapat dilakukan dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat antara lain, yaitu:

- a) pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan penguatan mutu produk UMKM diarahkan pada sertifikasi produk terutama sertifikat halal;
- b) memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan teknologi pertanian modern, pelatihan keterampilan, dan akses pasar;
- c) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan;
- d) menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas;
- e) mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, dan industri manufaktur sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif;
- f) mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi;
- g) mengembangkan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik dan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- h) mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani.

3.2.8. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk memperkuat industri pengolahan dan ekspor dengan cara mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan *positioning* pada Industri Halal sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang Islami. Untuk meningkatkan nilai tambah, Pemerintah Aceh berfokus pada agroindustri terintegrasi terhadap komoditi unggulan dan strategis, terutama: komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, nilam, dan pala), komoditi pertanian (padi dan jagung), komoditi peternakan (sapi/kerbau, kambing/domba dan unggas), serta komoditi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya).

Untuk mendukung pengembangan industri terintegrasi, Pemerintah Aceh membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, jaringan transportasi darat dan laut secara memadai, serta memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha, teknologi, dan juga standarisasi produk untuk memenuhi persyaratan pasar global, dan mendorong sertifikasi produk halal.

Pemerintah Aceh membangun jejaring dan kerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional. Pemerintah Aceh mengusung paradigma baru yang bervisi global karena memiliki keunggulan geostrategis Aceh. Posisi geostrategis didapat karena keberadaan Aceh di antara ekosistem ekonomi global, seperti Indo-Pasifik, IORA (*Indian Ocean Rim Association*), IMT-GT, BRICS, kerja sama Indonesia-India, kerja sama Indonesia-Turki, Selat Malaka, posisi yang dekat pasar dan pintu gerbang pariwisata dunia ke Indonesia, Terusan Kra, serta akses langsung Aceh ke berbagai penjuru dunia melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia.

3.2.9. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Aceh dapat mengambil upaya strategis untuk pengembangan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan melalui skema ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dengan upaya meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan dukungan kepada petani. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh sarana produksi yang ramah lingkungan dengan mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh.

3.2.10. Memperkuat Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pembangunan saat ini juga diarahkan pada peningkatan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan, dalam hal ini Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya dengan mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah

perkotaan dan perdesaan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah melalui pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan perdesaan. Memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, dan promosi pasar. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.

3.2.11. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Tata kelola pemerintahan merupakan cerminan kinerja pemerintahan dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dengan cara melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika dan integritas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efektif. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas. Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan

3.2.12. Memperkuat Otonomi Khusus

Otonomi Khusus Aceh memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur daerahnya, terutama terkait penerapan hukum Syariah, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Otonomi khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan upaya untuk memperkuat otonomi khusus ke depan diarahkan pada memperkuat implementasi hukum dan peraturan terkait otonomi khusus Aceh. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan dalam mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat Aceh. Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional serta membangun kerja sama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan dan kebudayaan.

3.2.13. Kemandirian Dalam Ruang Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada pendanaan pemerintah pusat atau sumber luar lainnya. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam ruang fiskal dengan cara memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah

pusat. Menggalakkan promosi investasi dan kebijakan kemudahan berinvestasi seperti memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha serta pengembangan ekonomi lokal. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri. Membangun komitmen yang kuat bersama *stakeholders* untuk memperkuat kemandirian fiskal di Aceh.

3.2.14. Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk penanganan PPKS dan disabilitas, memperkuat gender dan keluarga dengan cara mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas, mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh serta pelatihan keterampilan, akses modal usaha bagi PPKS, penyandang disabilitas, dan perempuan. Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dengan melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan kesetaraan gender. Selanjutnya memberikan dukungan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan *parenting*.

3.2.15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk melaksanakan Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan dengan cara mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor dan mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan. Selanjutnya melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Menerapkan pendanaan insentif kinerja berbasis ekologi dengan skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi, deforestasi, alam dan alih fungsi lahan kawasan hutan lindung, mangrove dan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)/Kawasan Lindung Aceh. Membangun kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan.

3.2.16. Pengurangan Risiko Bencana

Aceh merupakan daerah dengan Indeks Risiko Bencana yang tinggi. Beberapa bencana yang sering terjadi di Aceh antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Aceh dalam upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan membuat dan melaksanakan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu. Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan tindakan darurat. Mengendalikan pemanfaatan lahan yang rawan bencana, pengelolaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna), pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi ancaman perubahan iklim. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, dan *shelter*. Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.

3.2.17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan di Aceh mencakup pembangunan infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perumahan, dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi secara merata, menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dan antar sektor, potensi wilayah tertinggal juga menjadi perhatian dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah terpinggirkan. Pembangunan Aceh ke depan juga berfokus pada peningkatan infrastruktur layanan dasar masyarakat dan pembangunan jalan nasional dan provinsi menjadi prioritas utama dalam menjaga konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah Aceh juga mendorong pemanfaatan lahan transmigrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses layanan kesehatan dan mendorong pengembangan ekonomi lokal di wilayah pinggiran dan terpencil serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3.2.18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya penting seperti:

- 1) Mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang komprehensif dan terintegrasi serta alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas;
- 2) Meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara;
- 3) Mengembangkan infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan;
- 4) Memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di seluruh wilayah Aceh;
- 5) Meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi;
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan
- 7) Mengembangkan infrastruktur pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan

2.3. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2025 disahkan pada 24 September 2024, dengan total anggaran belanja Rp11,07 triliun, struktur utamanya terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Struktur belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sementara itu struktur pembiayaan Aceh berupa penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA dan pengeluaran pembiayaan. APBA 2025 diatur melalui Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBA 2025. Serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2025 tentang APBA Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 tentang Penjabaran APBA Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan APBA berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan APBA tahun 2025 Pemerintah Aceh juga berpedoman pada prinsip antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Aceh (PAA) tetap diupayakan sebagai pendapatan utama di samping Dana Perimbangan, Dana Otsus dan Pendapatan Lain-lain yang Sah;
2. Struktur belanja Aceh sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada kebutuhan yang objektif, efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang optimal;
3. Seluruh penerimaan yang menjadi hak dan seluruh pengeluaran yang menjadi kewajiban TA 2025 telah dimasukkan atau dicatat dalam APBA dan APBA Perubahan Tahun 2025;
4. Seluruh pendapatan disetor ke Kas Aceh secara bruto yang artinya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan Aceh tidak boleh dipotong secara langsung dari pendapatan tersebut;
5. Seluruh pendapatan Aceh disetor ke Kas Aceh paling lambat satu hari setelah diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
6. Belanja yang dianggarkan tidak boleh melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan baik secara kelompok, jenis, objek maupun rincian objek;
7. Pendapatan yang dianggarkan terukur secara rasional sehingga dapat tercapai untuk setiap objek pendapatan dan anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; dan
8. Pengeluaran yang dianggarkan harus didukung dengan kepastian ketersediaan dana dalam jumlah yang cukup.

2.3.1 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Aceh

Pendapatan Aceh sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian Aceh, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer dan dana Otonomi Khusus (Otsus). Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan Aceh merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kemandirian Aceh harus tergambar dari semakin meningkatkannya PAA. Oleh karena itu, penerimaan PAA terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer dan Dana Otsus yang memiliki jangka waktu terbatas.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan basis penerimaan, antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dan penagihan pajak. Dan dengan telah diundangkannya Qanun Aceh No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, telah bertambah basis penerimaan atas:
 - a. Pajak Daerah, yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) selain jenis Pajak Daerah yang telah ada sebelumnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok; dan
 - b. Retribusi Daerah, yaitu atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, selama pelayanan BLUD tersebut ada dalam jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.
2. Memperkuat proses pemungutan dengan telah diundangkannya Qanun Aceh No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi, Peraturan Gubernur Aceh No. 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, serta Keputusan Gubernur Aceh No. 100.3-1406-2024 tentang Bentuk Formulir Pajak dan Retribusi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi melalui kegiatan diseminasi, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pendidikan dan pelatihan;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;



4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam peningkatan pelayanan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB, BBNKB, Pajak MBLB serta Opsennya melalui kegiatan pendataan dan penagihan;
6. Meningkatkan penerimaan dari sektor pemanfaatan aset, serta zakat, infak dan sedekah;
7. Tersedianya sarana dan prasarana layanan pada UPTD di KB Samsat 23 kabupaten/kota, di antaranya pelayanan baru atas pembayaran PKB melalui *drive thru* kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, pembayaran PKB dan STNK 5 tahunan melalui Samsat *Corner* di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh dan Samsat Keliling.
8. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait pendataan dan penagihan pajak dengan melibatkan pihak terkait seperti kepolisian, jasa raharja, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi lainnya.

APBA periode lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian APBA Periode 5 (lima) Tahun Terakhir

URAIAN	TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024		TA 2025	
	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%
PENDAPATAN	13.864.978,45	100,00	13.382.100,23	100,00	10.369.121,49	100,00	11.262.824,43	100,00	10.691.894,79	100,00
Pendapatan Asli Daerah	2.401.682,45	17,32	2.572.750,10	19,23	2.853.177,43	27,52	3.019.019,70	26,81	2.707.548,14	25,32
Pajak Aceh	1.374.555,53	9,91	1.574.358,04	11,76	1.789.594,98	17,26	1.877.493,72	16,67	1.552.776,41	14,52
Retribusi Aceh	12.133,55	0,09	9.458,30	0,07	14.277,22	0,14	693.832,80	6,16	708.333,83	6,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	182.385,56	1,32	179.862,54	1,34	252.723,80	2,44	265.530,27	2,36	267.905,09	2,51
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	832.607,81	6,01	809.071,22	6,05	796.581,43	7,68	182.162,91	1,62	178.532,81	1,67
Pendapatan Dana	3.880.058,20	27,98	3.229.745,70	24,13	3.541.914,00	34,16	3.946.994,22	35,04	3.625.892,65	33,91
Perimbangan										
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	153.487,13	1,11	237.377,25	1,77	394.572,35	3,81	386.970,92	3,44	306.356,16	2,87
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	1.945.980,61	14,04	1.947.783,84	14,56	2.015.956,29	19,44	2.333.567,66	20,72	2.208.557,68	20,66
Dana Alokasi Khusus	1.780.590,46	12,84	1.044.584,61	7,81	1.131.385,36	10,91	1.226.455,64	10,89	1.110.978,81	10,39
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.583.237,80	54,69	7.579.604,43	56,64	3.974.030,06	38,33	4.296.810,51	38,15	4.358.454,00	40,76
Hibah	27.410,00	0,20	19.604,43	0,15	3.581,36	0,03	1.968,00	0,02	22.096,40	0,21
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	7.555.827,80	54,50	7.560.000,00	56,49	3.960.000,00	38,19	4.276.993,03	37,97	4.309.582,64	40,31
Insentif Fiskal	-	-	-	-	10.448,70	-	17.849,48	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	26.774,96	1,72
BELANJA ACEH	16.482.338,30	100,00	16.763.157,51	100,00	11.621.219,09	100,00	11.672.120,34	100,00	10.070.121,67	100,00
Belanja Tidak langsung	7.229.961,71	43,86	7.357.567,13	43,89	5.881.060,80	50,61	6.652.759,79	57,00	5.050.761,12	50,16
Belanja Pegawai	2.829.428,31	17,17	2.806.337,73	16,74	2.810.065,28	24,18	3.452.402,84	29,58	3.510.201,37	34,86
Belanja Subsidi	-	-	26.194,60	0,36	18.247,42	0,31	6.387,69	0,10	5.023,00	0,10
Belanja Hibah	907.787,48	5,51	1.049.661,83	6,26	914.818,53	7,87	1.085.387,35	9,30	371.650,08	3,69
Belanja Bantuan Sosial	384.303,40	2,33	401.331,50	2,39	350.917,98	3,02	239.226,43	2,05	253.445,92	2,52
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	811.201,83	4,92	764.976,52	4,56	892.314,59	7,68	881.118,95	7,55	670.143,36	6,65
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.149.255,32	13,04	2.292.236,00	13,67	865.435,52	7,45	979.641,34	8,39	159.323,78	1,58
Belanja Tidak Terduga	147.985,37	0,90	16.828,95	0,10	29.261,48	0,25	8.595,19	0,07	80.973,61	0,80
Belanja Langsung	9.252.376,59	56,14	9.405.590,38	56,11	5.740.158,29	49,39	5.019.360,55	43,00	5.019.360,55	49,84
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	5.936.917,13	36,02	6.191.098,14	36,93	4.000.024,82	34,42	3.735.549,52	32,00	3.735.549,52	37,10
Belanja Modal	3.315.459,46	20,12	3.214.492,24	19,18	1.740.133,47	14,97	1.283.811,03	11,00	1.283.811,03	12,75
PEMBIAYAAN										



URAIAN	TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024		TA 2025	
	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%
Penerimaan Pembiayaan	2.924.359,85	100,00	3.933.680,61	100,00	1.304.678,71	100,00	473.295,91	100,00	473.295,91	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	2.924.359,85	100,00	3.933.680,61	100,00	1.304.678,71	100,00	473.295,91	100,00	473.295,91	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	307.000,00	100,00	585.000,00	100,00	52.581,11	100,00	64.000,00	100,00	64.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	242.000,00	78,83	520.000,00	88,89	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	581,11	1,11	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	65.000,00	21,17	65.000,00	11,11	52.000,00	98,89	64.000,00	100,00	64.000,00	100,00

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber pendapatan dalam struktur APBA adalah dari Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh, serta Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dalam kelompok PAA. Selain itu, terdapat Otsus dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, dilanjutkan dengan Tambahan Dana Migas dan Dana Alokasi Umum dalam kelompok Pendapatan Dana Perimbangan.

Komposisi pendanaan program dan kegiatan pemerintahan dalam periode TA 2021-2025, sebagaimana terlihat pada tabel tersebut, pendapatan dari Pajak Aceh dianggarkan rata-rata sebesar 14,02%, diikuti oleh Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 10,57%, selanjutnya Dana Otsus yang masih mendominasi dengan rata-rata sebesar 45,49%.

Pada Tahun 2024 PAA dianggarkan sebesar 26,81%, sementara Tahun 2025 PAA dianggarkan sebesar 25,32%. Penerimaan Dana Otonomi Khusus cenderung naik dari Tahun 2024 sebesar 37,97%, pada Tahun 2025 sebesar 40,31%. Sementara itu Dana Bagi Hasil cenderung meningkat, diakibatkan oleh meningkatnya penerimaan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang dengan adanya sumber-sumber dari ladang minyak dan gas yang baru.

2.3.2 APBA dan Perubahan APBA

Pemerintah Aceh menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran (TA) 2025 berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan Anggaran Pendapatan sebesar Rp10.796.565.460.935,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp11.006.439.723.330,00. APBA TA 2025 mengalami beberapa kali perubahan dan pergeseran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pergeseran pertama APBA TA 2025 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan Anggaran Pendapatan sebesar Rp10.796.565.460.935,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp11.006.439.723.330,00.

Pergeseran APBA di sebabkan penyesuaian kegiatan yang bersumber sisa dana DAU sampai dengan tahun 2024 yang ditentukan penggunaannya, penyesuaian kegiatan sumber dana DAK Non Fisik serta penyesuaian kegiatan yang bersumber dana Otsus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan (RAP)

2. Perubahan APBA TA 2025 sesuai dengan Qanun 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan Anggaran



Pendapatan sebesar Rp10.645.119.825.347,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp11.117.381.980.981,00.

Perubahan APBA TA 2025 disebabkan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, perubahan prioritas kebijakan, pergeseran target pendapatan dan penggunaan SiLPA tahun lalu.

3. Pergeseran kedua APBA TA 2025 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan Anggaran Pendapatan sebesar Rp10.653.919.825.347,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp11.126.181.980.981,00.

Pergeseran kedua APBA disebabkan karena terjadinya Bencana Alam Hidrometeorologi yang melanda beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang membutuhkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

4. Pergeseran ketiga APBA TA 2025 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan Anggaran Pendapatan sebesar Rp10.691.894.789.547,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp11.164.156.945.181,00

Pergeseran ketiga APBA merupakan penyesuaian dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tanggap darurat atas bencana alam Hidrometeorologi yang melanda beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Rincian APBA dan Perubahan APBA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Rincian APBA dan Perubahan APBA Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
	APBA Murni 2025	Pergeseran I	Perubahan	Pergeseran II	Pergeseran III		
	Qanun 1 Tahun 2025	No Pergub 09 Thn 2025	Qanun 11 Thn 2025	No Pergub 30 Thn 2025	No Pergub 34 Thn 2025	(Rp)	%
PENDAPATAN ACEH							
Pendapatan Asli Aceh	2.859.122.172.935,00	2.859.122.172.935,00	2.707.548.137.347,00	2.707.548.137.347,00	2.707.548.137.347,00	151.574.035.588,00	5,30
Pendapatan Pajak Aceh	1.722.008.235.092,00	1.722.008.235.092,00	1.552.776.409.674,00	1.552.776.409.674,00	1.552.776.409.674,00	169.231.825.418,00	9,83
Pendapatan Retribusi Daerah	700.477.633.788,00	700.477.633.788,00	708.333.834.165,00	708.333.834.165,00	708.333.834.165,00	(7.856.200.377,00)	(1,12)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAA Yang Sah	265.781.801.886,00	265.781.801.886,00	267.905.085.228,00	267.905.085.228,00	267.905.085.228,00	(2.123.283.342,00)	(0,80)
	170.854.502.169,00	170.854.502.169,00	178.532.808.280,00	178.532.808.280,00	178.532.808.280,00	(7.678.306.111,00)	(4,49)
Pendapatan Transfer	7.935.475.288.000,00	7.935.475.288.000,00	7.935.475.288.000,00	7.944.275.288.000,00	7.962.250.252.200,00	(8.800.000.000,00)	(0,11)
Dana Perimbangan	3.625.892.648.000,00	3.625.892.648.000,00	3.625.892.648.000,00	3.625.892.648.000,00	3.625.892.648.000,00	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	306.356.158.000,00	306.356.158.000,00	306.356.158.000,00	306.356.158.000,00	306.356.158.000,00	-	-
Dana Alokasi Umum	2.208.557.679.000,00	2.208.557.679.000,00	2.208.557.679.000,00	2.208.557.679.000,00	2.208.557.679.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	122.745.459.000,00	122.745.459.000,00	122.745.459.000,00	122.745.459.000,00	122.745.459.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	988.233.352.000,00	988.233.352.000,00	988.233.352.000,00	988.233.352.000,00	988.233.352.000,00	-	-
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	4.318.382.640.000,00	4.336.357.604.200,00	(8.800.000.000,00)	(0,20)
Bantuan Keuangan	-	-	-	8.800.000.000,00	26.774.964.200,00	(8.800.000.000,00)	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.968.000.000,00	1.968.000.000,00	2.096.400.000,00	2.096.400.000,00	22.096.400.000,00	(128.400.000,00)	(6,52)
Pendapatan Hibah	1.968.000.000,00	1.968.000.000,00	2.096.400.000,00	2.096.400.000,00	2.096.400.000,00	(128.400.000,00)	(6,52)
Dana Darurat	-	-	-	-	20.000.000.000,00	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	10.796.565.460.935,00	10.796.565.460.935,00	10.645.119.825.347,00	10.653.919.825.347,00	10.691.894.789.547,00	142.645.635.588,00	1,32
BELANJA ACEH							
BELANJA OPERASI	8.194.353.477.358,25	8.195.474.804.405,25	8.258.551.209.503,13	8.187.302.023.625,44	8.244.019.010.213,44	7.051.453.732,81	0,09
Belanja Pegawai	3.680.706.217.571,84	3.680.706.217.571,84	3.535.110.534.868,35	3.515.506.357.619,05	3.510.201.365.904,05	165.199.859.952,79	4,49
Belanja Barang dan Jasa	3.877.196.438.703,41	3.878.317.765.750,41	4.084.445.230.451,91	4.041.411.969.123,52	4.103.698.646.426,52	(164.215.530.420,11)	(4,24)
Belanja Subsidi	4.764.000.000,00	4.764.000.000,00	5.282.000.000,00	5.023.000.000,00	5.023.000.000,00	(259.000.000,00)	(5,44)
Belanja Hibah	380.328.997.012,00	380.328.997.012,00	379.267.525.108,87	370.914.777.808,87	371.650.077.808,87	9.414.219.203,13	2,48
Belanja Bantuan Sosial	251.357.824.071,00	251.357.824.071,00	254.445.919.074,00	254.445.919.074,00	253.445.920.074,00	(3.088.095.003,00)	(1,23)
BELANJA Modal	1.004.234.420.901,31	1.004.234.420.901,31	1.059.861.386.948,16	1.054.194.519.278,32	1.036.272.620.029,32	(49.960.098.377,01)	(4,97)
Belanja Modal Tanah	13.871.085.046,00	13.871.085.046,00	12.930.388.080,00	12.630.388.080,00	6.478.007.085,00	1.240.696.966,00	8,94



Uraian	Jumlah (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
	APBA Murni 2025	Pergeseran I	Perubahan	Pergeseran II	Pergeseran III	(Rp)	%
	Qanun 1 Tahun 2025	No Pergub 09 Thn 2025	Qanun 11 Thn 2025	No Pergub 30 Thn 2025	No Pergub 34 Thn 2025		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	429.719.917.996,25	429.719.917.996,25	565.605.829.014,26	561.788.782.610,42	557.606.737.095,42	(132.068.864.614,17)	(30,73)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.133.363.064,00	321.133.363.064,00	251.248.554.476,90	250.012.497.580,90	249.677.787.580,90	71.120.865.483,10	22,15
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.379.500.750,06	138.379.500.750,06	127.077.562.992,00	126.764.011.922,00	117.179.771.878,00	11.615.488.828,06	8,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.915.554.045,00	100.915.554.045,00	102.489.317.855,00	102.489.266.855,00	102.489.266.855,00	(1.573.712.810,00)	(1,56)
Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000,00	215.000.000,00	509.734.530,00	509.572.230,00	2.841.049.535,00	(294.572.230,00)	(137,01)
BELANJA TIDAK TERDUGA	45.424.099.538,44	44.302.772.491,44	3.184.012.698,71	80.100.066.246,24	80.973.612.274,24	(34.675.966.707,80)	(76,34)
Belanja Tidak Terduga	45.424.099.538,44	44.302.772.491,44	3.184.012.698,71	80.100.066.246,24	80.973.612.274,24	(34.675.966.707,80)	(76,34)
BELANJA Transfer	1.762.427.725.532,00	1.762.427.725.532,00	1.795.785.371.831,00	1.804.585.371.831,00	1.802.891.702.664,00	(42.157.646.299,00)	(2,39)
Belanja Bagi Hasil	657.454.350.940,00	657.454.350.940,00	689.811.997.239,00	689.811.997.239,00	670.143.363.872,00	(32.357.646.299,00)	(4,92)
Belanja Bantuan Keuangan	1.104.973.374.592,00	1.104.973.374.592,00	1.105.973.374.592,00	1.114.773.374.592,00	1.132.748.338.792,00	(9.800.000.000,00)	(0,89)
Jumlah Belanja	11.006.439.723.330,00	11.006.439.723.330,00	11.117.381.980.981,00	11.126.181.980.981,00	11.164.156.945.181,00	(119.742.257.651,00)	(1,09)
SURPLUS/DEFISIT	(209.874.262.395,00)	(209.874.262.395,00)	(472.262.155.634,00)	(472.262.155.634,00)	(472.262.155.634,00)	262.387.893.239,00	(125,02)
PEMBIAYAAN							
Penerimaan Pembiayaan	261.874.262.395,00	261.874.262.395,00	530.262.155.634,00	530.262.155.634,00	530.262.155.634,00	(268.387.893.239,00)	(102,49)
Penggunaan SILPA	261.874.262.395,00	261.874.262.395,00	530.262.155.634,00	530.262.155.634,00	530.262.155.634,00	(268.387.893.239,00)	(102,49)
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	58.000.000.000,00	58.000.000.000,00	58.000.000.000,00	(6.000.000.000,00)	(11,54)
Pembentukan Dana Cadangan	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	58.000.000.000,00	58.000.000.000,00	58.000.000.000,00	(6.000.000.000,00)	(11,54)
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	209.874.262.395,00	209.874.262.395,00	472.262.155.634,00	472.262.155.634,00	472.262.155.634,00	(262.387.893.239,00)	(125,02)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-
ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah

2.4. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

2.4.1. Anggaran Pegawai

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa alokasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% (tiga puluh persen), dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan. Persentase belanja pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) pada Pemerintah Aceh untuk tahun 2025 sebesar Rp2.819.862.299.904,05 atau 25,26% dari total belanja daerah APBA sebesar Rp11.164.156.945.181,00 dengan realisasi sebesar Rp2.751.819.075.354,26 atau 97,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Alokasi Anggaran Pegawai

Komponen	Jumlah (Rp)
Total Belanja Daerah pada APBD 2025	11.164.156.945.181,00
1) Belanja Pegawai	3.510.201.365.904,05
a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	613.885.351.000,00
b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	70.609.321.000,00
c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.844.394.000,00
2) Jumlah tunjangan Guru	690.339.066.000,00
3) Jumlah Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru	2.819.862.299.904,05
Persentase Belanja Pegawai terhadap APBD	25,26%

Sumber: Data diolah

2.4.2. Anggaran Pendidikan

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pendidikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari APBA. Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran belanja pendidikan sebesar Rp3.220.198.909.394,00 atau 28,84% dari jumlah anggaran belanja APBA TA 2025 sebesar Rp11.164.156.945.181,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp3.060.966.153.502,66 atau 95,06%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Alokasi Anggaran Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Anggaran Fungsi Pendidikan	3.220.198.909.394,00	3.060.966.153.502,66	95,06
2	Total Belanja Daerah	11.164.156.945.181,00	10.652.362.697.301,10	95,42
	Rasio anggaran pendidikan (1,5:5) x 100%	28,84	28,74	

Sumber: Data diolah

2.4.3. Anggaran Infrastruktur

Sesuai dengan pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Pemerintah Aceh telah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp2.942.788.640.843,64 atau 31,44% dari jumlah anggaran belanja APBA TA 2025 sebesar Rp11.164.156.945.181,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Alokasi Anggaran Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	a. Belanja Modal	1.036.272.620.029,32
	1) Tanah	6.478.007.085,00
	2) Peralatan dan Mesin	557.606.737.095,42
	3) Bangunan dan Gedung	249.677.787.580,90
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	117.179.771.878,00
	5) Aset tetap lainnya	102.489.266.855,00
	6) Aset Lainnya	2.841.049.535,00
	b. Belanja Pemeliharaan	148.671.684.139,45
	c. Belanja Hibah	371.650.077.808,87
	d. Belanja Bantuan Sosial	253.445.920.074,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan	1.132.748.338.792,00
	Jumlah Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah	2.942.788.640.843,64
2	Belanja Daerah	11.164.156.945.181,00
3	Total Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa (a+b)	1.802.891.702.664,00
	a. Belanja Bagi Hasil	670.143.363.872,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	1.132.748.338.792,00
4	Selisih dari Total Belanja Daerah dan Total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa (2 - 3)	9.361.265.242.517,00
	Rasio Anggaran Infrastruktur (1 : 4)	31,44%

Sumber: Data diolah

2.4.4. Anggaran Pengawasan

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi pemerintah daerah provinsi yang memiliki total belanja daerah diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit mengalanggarkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Pemerintah Aceh telah mengalanggarkan belanja pengawasan sebesar Rp19.973.586.518,24 atau 0,18% dari jumlah anggaran belanja APBA TA 2025 sebesar Rp11.164.156.945.181,00.

2.5. Bencana Hidrometeorologi

Aceh merupakan wilayah yang secara geografis dan klimatologis memiliki tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi yang tinggi, khususnya banjir dan tanah longsor. Karakteristik topografi yang didominasi oleh pegunungan di bagian tengah, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang panjang dan bermuara ke wilayah pesisir, serta tingginya intensitas curah hujan musiman menjadikan Aceh rentan terhadap kejadian hujan ekstrem yang berujung pada banjir bandang skala luas dan longsor, terutama di wilayah dengan tutupan lahan yang rentan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim global turut memperbesar frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem (angin kencang/badai tropis) di wilayah ini. Puncak turunnya hujan ekstrem terjadi tanggal 25-27 November 2025, dan pada tanggal 26 November 2025 tercatat sebagai hari dengan curah hujan tertinggi dalam 6 (enam) tahun terakhir di Provinsi Aceh, sebagaimana dicatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kondisi ini dipicu oleh pembentukan dan penguatan Siklon Tropis Senyar di perairan timur Aceh, yang menyebabkan akumulasi awan hujan masif dan menciptakan fenomena serupa “dinding air”, dengan volume curah hujan mencapai sekitar 300 mm dalam waktu singkat. Dampak dari kejadian tersebut sangat luas yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur luas, dan pengungsian massal.

Laporan pantauan data penanggulangan bencana alam hidrometeorologi pada Posko Terpadu Pemerintah Aceh per tanggal 31 Desember 2025, sedikitnya 18 Kabupaten/Kota di Aceh terdampak banjir besar, yaitu Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Pidie jaya, Bireuen, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Pidie, Nagan Raya, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, 203 Kecamatan dan 3.046 Gampong. Korban terdampak 2.584.067 jiwa (670.826 KK) dengan 561 jiwa meninggal dunia. Fasilitas umum yang terdampak antara lain: perkantoran (227 unit), tempat ibadah (641 unit), sekolah (1.204 unit), dayah/pesantren (685 unit), rumah sakit dan puskesmas (146 unit), jalan (2.507 titik), jembatan (599 titik), rumah (218.019 unit), sawah (56.652 Ha), kebun (100.377 Ha) dan tambak (36.239 Ha).

Bencana hidrometeorologi yang melanda 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada akhir Tahun 2025 dengan dampak terparah meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan sekitarnya. Namun telah dilakukan upaya penanganan darurat dan pemulihan fungsi sarana vital secara terencana, cepat, tepat dan berdaya guna. Upaya penanganan darurat yang dilakukan dalam rangka melakukan pencarian, evakuasi dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, serta pemulihan fungsi-fungsi sarana vital yang terdampak bencana. Gubernur Aceh melalui Keputusan Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tanggal 27 November 2025 telah menetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 28 November sampai dengan 11 Desember 2025. Kemudian menetapkan perpanjangan pertama terhadap Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 12 sampai dengan 25 Desember 2025 melalui Keputusan Nomor 300.2/1446/2025, tanggal 10 Desember 2025. Selanjutnya, melalui Keputusan Nomor 300.2/1469/2025, tanggal 25 Desember 2025, setelah mempertimbangkan kondisi di beberapa kabupaten kota masih membutuhkan penanganan secara intensif, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi untuk evakuasi, distribusi logistik, penanganan kerusakan jalan dan jembatan (konektivitas), sarana pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan berbagai fasilitas sosial lainnya maka kemudian menetapkan perpanjangan kedua terhadap Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026.

Kejadian banjir besar November 2025 ini menunjukkan bahwa Aceh tidak hanya menghadapi bencana sebagai peristiwa alam semata, tetapi juga sebagai persoalan pembangunan dan tata kelola wilayah. Kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan di daerah hulu, keterbatasan kapasitas sistem drainase dan pengendalian banjir, serta belum optimalnya mitigasi struktural dan non-struktural memperbesar skala dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah Aceh melalui surat Gubernur Aceh Nomor: 900.1/669 tanggal 19 Januari 2026 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal Laporan Bantuan Keuangan Khusus untuk Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Aceh, melaporkan telah menerima Bantuan Keuangan Khusus dari beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sejak tanggal 3 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan jumlah total Rp32.404.958.400,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Pemerintah Aceh juga telah menerima Bantuan Presiden pada tanggal 10 Desember 2025 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) serta penerimaan donasi dari komunitas masyarakat tertentu maupun masyarakat secara individu sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026 yang diterima melalui rekening infak pada Badan Baitul Mal Aceh. Jumlah donasi dari komunitas masyarakat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.091.725.600,00 dan penerimaan pada tahun 2026 sebesar Rp4.098.980.409,00 (total penerimaan donasi komunitas sebesar Rp8.190.706.009,00). Total bantuan yang diterima Pemerintah Aceh secara keseluruhan per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.496.684.000,00.



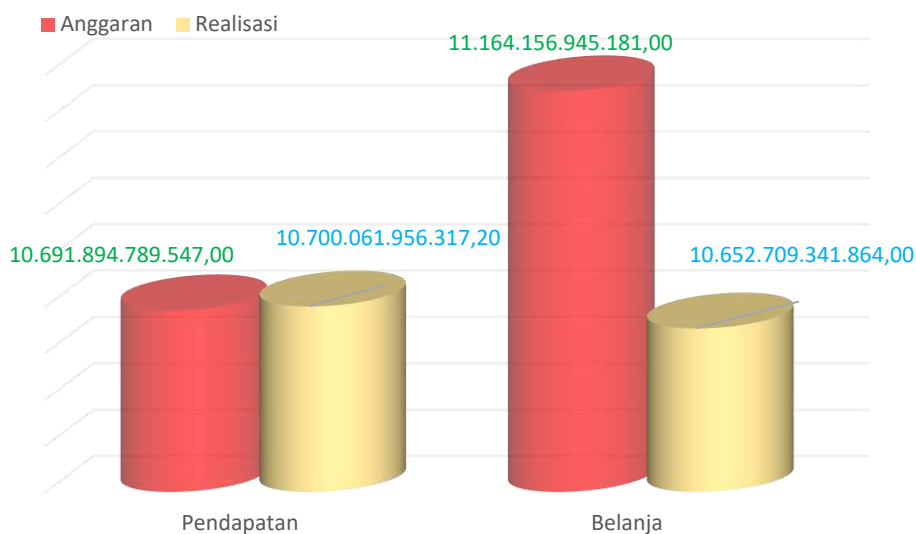
Dalam penanggulangan bencana Pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan melalui Belanja Tidak Terduga dengan total alokasi sebesar Rp80.973.612.274,24 (delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh empat sen) di dalam APBA Pergeseran setelah Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.320.641.632,00 (lima puluh milyar tiga ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh pada TA 2025 dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kinerja pencapaian pendapatan Aceh dan sisi kinerja belanja Aceh baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBA TA 2025. Gambar 9 di bawah ini menggambarkan pelaksanaan APBA TA 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang dicapai.

GAMBAR 9. ANGGARAN DAN REALISASI APBA TA 2025



Sumber: LRA TA 2025

Dari Gambar di atas kita ketahui bahwa realisasi belanja lebih kecil daripada pendapatan sehingga terjadi surplus sebesar Rp47.352.614.453,12 (Rp10.700.061.956.317,20 – Rp10.652.709.341.864,00). Bila dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu, maka TA 2025 terjadi penurunan perolehan pendapatan sebesar 6,11% realisasi belanja juga terjadi penurunan sebesar 5,62%.

3.1. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh

Pencapaian realisasi menurut kelompok pendapatan Aceh TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

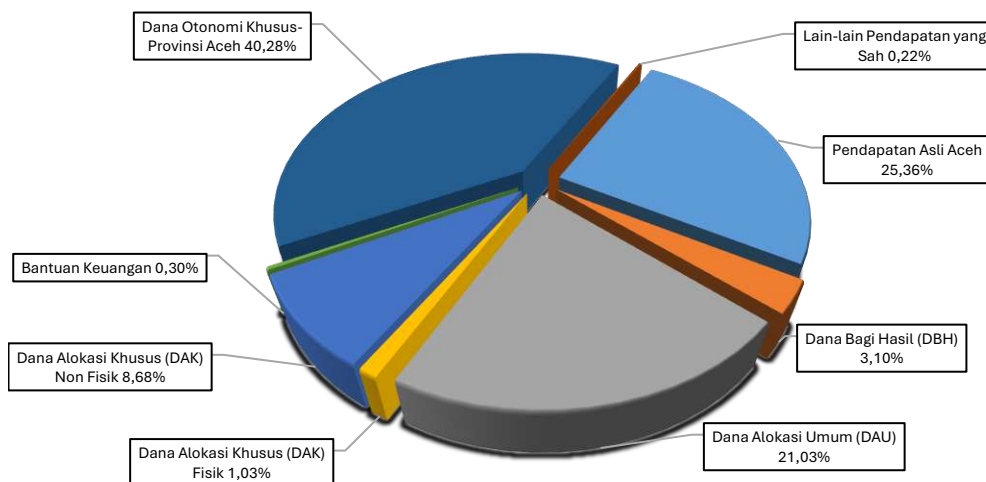
Tabel 9. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh TA 2025 Menurut Kelompok Pendapatan

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Pendapatan Asli Aceh	2.707.548.137.347,00	2.713.537.411.858,65	100,20	3.225.685.925.856,02
2	Pendapatan Transfer	7.962.250.252.200,00	7.963.190.526.056,00	100,01	8.167.778.560.238,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	22.096.400.000,00	23.334.018.402,55	105,60	2.573.582.835,56
Jumlah Pendapatan		10.691.894.789.547,00	10.700.061.956.317,20	100,08	11.396.038.068.929,60

Sumber: data diolah

Sedangkan kontribusi yang diberikan bagi pendapatan Aceh pada TA 2025 dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.

GAMBAR 10. KONTRIBUSI PENDAPATAN ACEH TA 2025



Sumber: Data diolah

Dari Gambar di atas, tampak bahwa Dana Otsus memberikan kontribusi paling besar dibandingkan pendapatan lainnya yaitu 40,28% dari total keseluruhan pendapatan, sebagaimana tercermin pada struktur Pendapatan Aceh. Sementara kontribusi PAA dalam kurun waktu yang sama terhadap Pendapatan Aceh masih tergolong sangat kecil hanya mencapai 25,36%. Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat bergantung pada penerimaan Dana Otsus dalam membiayai pembangunan, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian fiskal Aceh. Terlebih lagi pendapatan dari Dana Otsus tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya.

Masih rendahnya kontribusi PAA jika dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan dan Dana Otsus) mencerminkan bahwa belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber PAA masih didominasi oleh Pajak Daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor, padahal sumber pendapatan tersebut bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan serta rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Secara detail realisasi Pendapatan Aceh TA 2025 berdasarkan objek penerimaan disajikan dalam Tabel di bawah ini.



Tabel 10. Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan TA 2025

URAIAN	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%
PENDAPATAN ACEH	10.691.894.789.547,00	10.700.061.956.317,20	100,08
PENDAPATAN ASLI ACEH	2.707.548.137.347,00	2.713.537.411.858,65	100,22
PAJAK ACEH	1.552.776.409.674,00	1.499.781.765.834,50	96,59
Pajak Kendaraan Bermotor	410.699.335.000,00	369.388.864.230,00	89,94
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	219.981.999.999,00	220.218.250.389,00	100,11
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	581.836.308.000,00	586.414.854.996,00	100,79
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.599.196.000,00	2.517.009.171,00	96,84
Pajak Rokok	328.759.285.675,00	313.695.970.299,00	95,42
Pajak Alat Berat	53.363.000,00	-	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	8.846.922.000,00	7.546.816.749,50	85,30
RETRIBUSI ACEH	708.333.834.165,00	684.774.199.352,66	96,67
Retribusi Jasa Umum	690.325.714.697,00	664.733.248.238,34	96,29
Retribusi Jasa Usaha	17.908.119.468,00	20.040.951.114,32	111,91
Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	-	-
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN ACEH YANG DIPISAHKAN	267.905.085.228,00	270.253.493.775,00	100,88
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Bank Aceh Syariah	267.905.085.228,00	270.253.493.775,00	100,88
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI ACEH YG SAH	178.532.808.280,00	258.727.952.896,49	144,92
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	364.296.000,00	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	736.224.165,00	1.095.101.973,00	148,75
Hasil Kerja Sama Daerah	499.880.000,00	906.610.204,00	181,37
Jasa Giro	1.989.000.000,00	1.144.026.649,45	57,52
Pendapatan Bunga	61.000.000.000,00	76.584.702.616,53	125,55
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	984.232.301,00	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	6.723.655.666,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	9.744.120,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	3.333.982.049,00	60.546.767.341,60	1.816,05
Pendapatan BLUD	19.473.722.066,00	17.185.135.088,84	88,25
Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf	91.500.000.000,00	79.856.905.936,07	87,28
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	13.326.775.000,00	-
DANA PERIMBANGAN	3.625.892.648.000,00	3.621.202.927.656,00	99,87
Dana Bagi Hasil (DBH)	306.356.158.000,00	331.492.150.000,00	108,20
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.208.557.679.000,00	2.250.706.483.460,00	101,91
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	122.745.459.000,00	109.854.191.253,00	89,50
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	988.233.352.000,00	929.150.102.943,00	94,02
Insentif Fiskal	-	-	-
Insentif Fiskal	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.774.964.200,00	32.404.958.400,00	121,03
Bantuan Keuangan	26.774.964.200,00	32.404.958.400,00	121,03
DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHANN INFRASTRUKTUR	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	100,00
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN ACEH YANG SAH	22.096.400.000,00	23.334.018.402,55	105,60
PENDAPATAN HIBAH	22.096.400.000,00	23.334.018.402,55	105,60
Pendapatan Hibah	2.096.400.000,00	3.334.018.402,55	159,04
Dana Darurat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00

Sumber: Data Diolah



3.2. Pencapaian Realisasi Belanja

Pencapaian kinerja keuangan menurut urusan Pemerintah Aceh, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program-program kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh SKPA sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 11. Pencapaian Realisasi Belanja

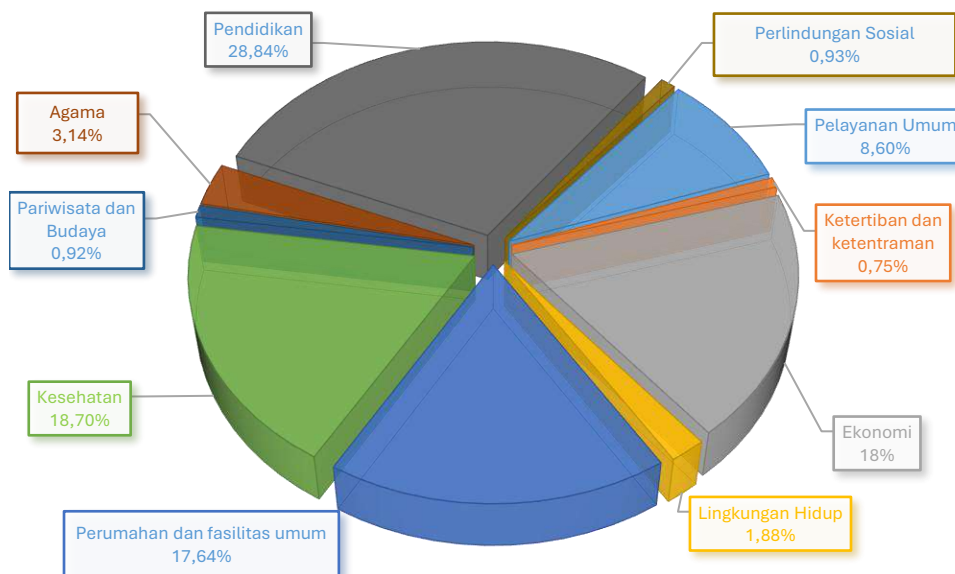
Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.304.365.694.736,26	6.054.208.595.250,52
1.01.	BIDANG PENDIDIKAN	3.220.198.909.394,00	3.101.401.070.579,66
1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan Aceh	2.965.599.697.307,00	2.852.102.358.895,83
1.01.0.00.0.00.08.	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	247.690.973.782,00	242.596.472.443,83
1.01.0.00.0.00.09.	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	6.908.238.305,00	6.702.239.240,00
1.02.	BIDANG KESEHATAN	2.087.764.948.213,26	2.029.994.823.233,70
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan Aceh	963.405.753.555,26	955.710.824.828,00
1.02.0.00.0.00.02.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	882.097.265.306,00	842.185.525.580,00
1.02.0.00.0.00.03.	Rumah Sakit Jiwa	136.342.848.810,00	128.298.425.521,70
1.02.0.00.0.00.04.	Rumah Sakit Ibu dan Anak	105.919.080.542,00	103.800.047.304,00
1.03.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	269.509.793.282,00	257.531.355.215,00
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	161.310.309.031,00	150.185.576.051,00
1.03.0.00.0.00.02.	Dinas Pengairan Aceh	108.199.484.251,00	107.345.779.164,00
1.04.	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PER-MUKIMAN	555.000.000.000,00	499.178.549.133,16
1.04.1.03.0.00.01.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	555.000.000.000,00	499.178.549.133,16
1.05.	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLIN-DUNGAN MASYARAKAT	84.268.002.861,00	79.538.140.934,00
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	53.036.364.284,00	48.944.675.513,00
1.05.0.00.0.00.02.	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	31.231.638.577,00	30.593.465.421,00
1.06.	BIDANG SOSIAL	87.624.040.986,00	86.564.656.155,00
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial Aceh	87.624.040.986,00	86.564.656.155,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAI-TAN DENGAN PELAYANAN DASAR	960.215.090.931,70	948.633.024.873,93
2.07	BIDANG TENAGA KERJA	38.107.020.416,00	37.188.939.669,00
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	38.107.020.416,00	37.188.939.669,00
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN-DUNGAN ANAK	16.495.666.775,00	15.391.024.500,00
2.08.0.00.0.00.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	16.495.666.775,00	15.391.024.500,00
2.09	BIDANG PANGAN	26.194.596.672,00	26.006.713.693,38
2.09.0.00.0.00.01.	Dinas Pangan Aceh	26.194.596.672,00	26.006.713.693,38
2.10	BIDANG PERTANAHAN	15.479.662.364,00	15.051.273.721,70
2.10.0.00.0.00.01.	Dinas Pertanahan Aceh	15.479.662.364,00	15.051.273.721,70
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	210.185.939.373,00	206.224.739.869,50
2.11.3.28.0.00.01.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	210.185.939.373,00	206.224.739.869,50
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEN-CATATAN SIPIL	11.822.982.873,40	11.751.535.614,00
2.12.0.00.0.00.01.	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	11.822.982.873,40	11.751.535.614,00
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.996.414.179,00	20.960.686.176,00
2.13.0.00.0.00.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	20.996.414.179,00	20.960.686.176,00
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	153.795.636.729,00	152.956.242.727,30
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan Aceh	153.795.636.729,00	152.956.242.727,30
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	37.888.309.325,00	37.664.501.758,20
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	37.888.309.325,00	37.664.501.758,20
2.17	BIDANG KOPERSI USAHA KECIL DAN MENENGAH	59.625.259.706,00	59.333.378.089,22
2.17.0.00.0.00.01.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	59.625.259.706,00	59.333.378.089,22
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	24.621.687.979,00	24.409.063.915,00
2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	24.621.687.979,00	24.409.063.915,00
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	198.360.578.898,00	196.729.692.440,00
2.19.0.00.0.00.01.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	198.360.578.898,00	196.729.692.440,00
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	101.418.456.615,30	100.214.871.925,62
2.22.0.00.0.00.06.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	9.842.842.520,00	9.616.805.429,00
2.22.3.26.0.00.01.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	91.575.614.095,30	90.598.066.496,62
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN	45.222.879.027,00	44.750.360.775,01



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi
2.23.2.24.0.00.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	45.222.879.027,00	44.750.360.775,01
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	618.285.448.787,00	595.041.227.664,59
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	93.312.967.206,00	91.945.086.817,00
3.25.0.00.0.00.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	93.312.967.206,00	91.945.086.817,00
3.27	BIDANG PERTANIAN	350.479.104.711,00	331.123.939.362,58
3.27.0.00.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	299.715.219.579,00	283.344.644.399,15
3.27.0.00.0.00.02.	Dinas Peternakan Aceh	50.763.885.132,00	47.779.294.963,43
3.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	134.541.120.634,00	132.167.980.492,73
3.29.0.00.0.00.01.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	134.541.120.634,00	132.167.980.492,73
3.30	PERDAGANGAN	39.952.256.236,00	39.804.220.992,28
3.30.3.31.0.00.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	39.952.256.236,00	39.804.220.992,28
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	498.996.161.078,80	493.806.092.321,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	266.143.440.794,80	264.295.716.355,00
4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah Aceh	266.143.440.794,80	264.295.716.355,00
4.02	SEKRETARIAT DPRA	232.852.720.284,00	229.510.375.966,00
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRA	232.852.720.284,00	229.510.375.966,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.263.795.171.259,80	2.198.293.836.928,51
5.01	PERENCANAAN	51.675.614.461,56	50.521.356.972,00
5.01.5.05.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	51.675.614.461,56	50.521.356.972,00
5.02	KEUANGAN	2.074.273.388.138,24	2.012.445.079.162,00
5.02.0.00.0.00.00.	PPKA	-	-
5.02.0.00.0.00.01.	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2.074.273.388.138,24	2.012.445.079.162,00
5.03	KEPEGAWAIAN	23.489.545.387,00	23.448.883.161,26
5.03.0.00.0.00.01.	Badan Kepegawaian Aceh	23.489.545.387,00	23.448.883.161,26
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	74.281.843.397,00	72.348.751.997,25
5.04.0.00.0.00.01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	74.281.843.397,00	72.348.751.997,25
5.07	PENGHUBUNG	40.074.779.876,00	39.529.765.636,00
5.07.0.00.0.00.01.	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	40.074.779.876,00	39.529.765.636,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	51.784.658.979,24	50.486.807.707,00
6.01	INSPEKTORAT	51.784.658.979,24	50.486.807.707,00
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat Aceh	51.784.658.979,24	50.486.807.707,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	50.507.273.500,00	49.607.833.520,95
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.507.273.500,00	49.607.833.520,95
8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	50.507.273.500,00	49.607.833.520,95
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	416.207.445.908,20	262.631.923.597,58
9.01	KEKHUSUSAN ACEH	416.207.445.908,20	262.631.923.597,58
9.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	28.727.015.473,00	27.067.070.964,00
9.01.0.00.0.00.02.	Dinas Syariat Islam Aceh	62.354.380.287,50	60.989.569.366,58
9.01.0.00.0.00.03.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	16.888.517.386,00	16.703.253.150,00
9.01.0.00.0.00.04.	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	36.790.451.161,70	36.274.268.498,00
9.01.0.00.0.00.05.	Sekretariat Baitul Mal Aceh	271.447.081.600,00	121.597.761.619,00
TOTAL		11.164.156.945.181,00	10.652.709.341.864,08

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi fungsi, maka profil APBA TA 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 11. PROFIL APBA TA 2025 BERDASARKAN KLASIFIKASI FUNGSI


Sumber: Data diolah

Dari Gambar tersebut, alokasi anggaran terbesar pada fungsi Pendidikan sebesar 28,84% dan terkecil pada fungsi ketertiban dan ketenteraman sebesar 0,75%. Pelaksanaan belanja berdasarkan kelompok pada SKPA, baik urusan wajib, pilihan, pemerintahan maupun keistimewaan.

3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp3.220.198.909.394,00, direalisasikan 96,31% atau sebesar Rp3.101.401.070.579,66;
2. Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh, Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dari total anggaran sebesar Rp2.087.764.948.213,26, telah terealisasi 97,23% dari anggaran atau sebesar Rp2.029.994.823.233,70;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, dan Dinas Pengairan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp269.509.793.282,00, telah terealisasi 95,56% dari anggaran atau sebesar Rp257.531.355.215,00;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp555.000.000.000,00, direalisasikan 89,94% atau sebesar Rp499.178.549.133,16;
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp84.268.002.861,00, direalisasikan 94,39% atau sebesar Rp79.538.140.934,00; dan
6. Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp87.624.040.986,00, direalisasikan 98,79% atau sebesar Rp86.564.656.155,00.

3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp38.107.020.416,00, direalisasikan 97,59% atau sebesar Rp37.188.939.669,00;
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp16.495.666.775,00, direalisasikan 93,30% atau sebesar Rp15.391.024.500,00;
3. Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp26.194.596.672,00, direalisasikan 99,28% atau sebesar Rp26.006.713.693,38;
4. Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp15.479.662.364,00, direalisasikan 97,23% atau sebesar Rp15.051.273.721,70;
5. Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp210.185.939.373,00, direalisasikan 98,12% atau sebesar Rp206.224.739.869,50;
6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp11.822.982.873,40, direalisasikan 99,40% atau sebesar Rp11.751.535.614,00;
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp20.996.414.179,00, direalisasikan 99,83% atau sebesar Rp20.960.686.176,00;
8. Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp153.795.636.729,00, direalisasikan 99,45% atau sebesar Rp152.956.242.727,30;
9. Bidang Komunikasi dan Informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp37.888.309.325,00, direalisasikan 99,41% atau sebesar Rp37.664.501.758,20;
10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp59.625.259.706,00, direalisasikan 99,51% atau sebesar Rp59.333.378.089,22;
11. Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp24.621.687.979,00, direalisasikan 99,14% atau sebesar Rp24.409.063.915,00;
12. Bidang Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp198.360.578.898,00, direalisasikan 99,18% atau sebesar Rp196.729.692.440,00;
13. Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp101.418.456.615,30, direalisasikan 98,81% atau sebesar Rp100.214.871.925,62; dan

14. Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp45.222.879.027,00, direalisasikan 98,96% atau sebesar Rp44.750.360.775,01.

3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp93.312.967.206,00, direalisasikan 98,53% atau sebesar Rp91.945.086.817,00;
2. Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dan Dinas Peternakan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp350.479.104.711,00, direalisasikan 94,48% atau sebesar Rp331.123.939.362,58;
3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp134.541.120.634,00, direalisasikan 98,24% atau sebesar Rp132.167.980.492,73; dan
4. Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp39.952.256.236,00, direalisasikan 99,63% atau sebesar Rp39.804.220.992,28.

3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Bidang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp266.143.440.794,80, direalisasikan 99,31% sebesar Rp264.295.716.355,00; dan
2. Bidang Sekretariat DPRA dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp232.852.720.284,00, direalisasikan 98,56% atau sebesar Rp229.510.375.966,00.

3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp51.675.614.461,56, direalisasikan 97,77% atau sebesar Rp50.521.356.972,00;
2. Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp2.074.273.388.138,24, direalisasikan 97,02% atau sebesar Rp2.012.445.079.162,00;
3. Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp23.489.545.387,00, direalisasikan 99,83% atau sebesar Rp23.448.883.161,26;
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp74.281.843.397,00, direalisasikan 97,40% atau sebesar Rp72.348.751.997,25; dan
5. Bidang Penghubung dilaksanakan oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp40.074.779.876,00, direalisasikan 98,64% atau sebesar Rp39.529.765.636,00.

3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Bidang Inspektorat dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp51.784.658.979,24, direalisasikan 97,49% atau sebesar Rp50.486.807.707,00.

3.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp50.507.273.500,00, direalisasikan 98,22% atau sebesar Rp49.607.833.520,95.

3.2.8. Unsur Kekhususan dan Keistimewaan

Bidang Kekhususan Aceh dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp416.207.445.908,20, direalisasikan 63,10% atau sebesar Rp262.631.923.597,58.

3.3. Pencapaian Realisasi Belanja Modal

Pencapaian Realisasi Belanja Modal TA 2025 pada SKPA adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Aceh dari anggaran sebesar Rp301.979.880.812,00 direalisasikan sebesar Rp303.423.740.310,83 atau 100,48%;
2. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dari anggaran sebesar Rp363.359.000,00 direalisasikan sebesar Rp363.359.000,00 atau 100%;
3. Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh dari anggaran sebesar Rp11.948.256.172,00 direalisasikan sebesar Rp11.945.840.800,00 atau 99,98%;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dari anggaran sebesar Rp547.960.476,00 direalisasikan seluruhnya atau sebesar Rp547.585.366,00 atau 99,93%;
5. Dinas Perhubungan Aceh dari anggaran sebesar Rp66.005.928.588,00 direalisasikan sebesar Rp65.945.406.803,14 atau 99,91%;
6. Sekretariat Daerah Aceh dari anggaran sebesar Rp30.641.663.761,50 direalisasikan sebesar Rp30.595.957.807,00 atau 99,85%;
7. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dari anggaran sebesar Rp195.526.500,00 direalisasikan sebesar Rp195.226.578,00 atau 99,85%;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh dari anggaran sebesar Rp4.480.505.515,00 direalisasikan sebesar Rp4.471.757.515,00 atau 99,80%;
9. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh dari anggaran sebesar Rp26.280.299.841,00 direalisasikan sebesar Rp26.221.335.231,00 atau 99,78%;
10. Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh dari anggaran sebesar Rp3.539.459.962,00 direalisasikan sebesar Rp3.530.410.950,00 atau 99,74%;
11. Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dari anggaran sebesar Rp2.666.871.283,00 direalisasikan sebesar Rp2.660.002.064,00 atau 99,74%;

12. Sekretariat Majelis Adat Aceh dari anggaran sebesar Rp405.605.708,00 direalisasikan sebesar Rp404.460.170,00 atau 99,72%;
13. Badan Penanggulangan Bencana Aceh dari anggaran sebesar Rp1.932.643.674,00 direalisasikan sebesar Rp1.925.690.414,00 atau 99,64%;
14. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh dari anggaran sebesar Rp4.149.645.739,46 direalisasikan sebesar Rp4.134.594.540,28 atau 99,64%;
15. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh dari anggaran sebesar Rp3.704.332.594,00 direalisasikan sebesar Rp3.689.624.228,20 atau 99,60%;
16. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh dari anggaran sebesar Rp11.880.216.173,00 direalisasikan sebesar Rp11.827.077.160,00 atau 99,55%;
17. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dari anggaran sebesar Rp3.526.338.172,91 direalisasikan sebesar Rp3.510.470.295,00 atau 99,55%;
18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dari anggaran sebesar Rp206.545.283,00 direalisasikan sebesar Rp205.347.800,00 atau 99,42%;
19. Badan Kepegawaian Aceh dari anggaran sebesar Rp369.173.228,00 direalisasikan sebesar Rp366.880.778,00 atau 99,38%;
20. Badan Penghubung Pemerintah Aceh dari anggaran sebesar Rp11.954.115.750,00 direalisasikan sebesar Rp11.861.577.030,00 atau 99,23%;
21. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh dari anggaran sebesar Rp353.115.586,50 direalisasikan sebesar Rp350.205.000,00 atau 99,18%;
22. Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh dari anggaran sebesar Rp814.546.316,00 direalisasikan sebesar Rp806.774.608,00 atau 99,05%;
23. Dinas Syariat Islam Aceh dari anggaran sebesar Rp990.993.621,20 direalisasikan sebesar Rp981.000.500,00 atau 98,99%;
24. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dari anggaran sebesar Rp763.322.380,00 direalisasikan sebesar Rp755.200.393,00 atau 98,94%;
25. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh dari anggaran sebesar Rp970.993.045,00 direalisasikan sebesar Rp960.424.000,00 atau 98,91%;
26. Sekretariat DPRA dari anggaran sebesar Rp35.316.798.409,00 direalisasikan sebesar Rp34.923.146.110,00 atau 98,89%;
27. Dinas Pengairan Aceh dari anggaran sebesar Rp39.132.582.515,00 direalisasikan sebesar Rp38.677.522.480,00 atau 98,84%;
28. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh dari anggaran sebesar Rp104.755.061.764,00 direalisasikan sebesar Rp103.492.470.326,00 atau 98,79%;
29. Dinas Pertanahan Aceh dari anggaran sebesar Rp2.138.745.722,00 direalisasikan sebesar Rp2.111.515.000,00 sebesar 98,73%;
30. Dinas Pangan Aceh dari anggaran sebesar Rp384.558.500,00 direalisasikan sebesar Rp379.495.095,00 atau 98,68%;

31. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dari anggaran sebesar Rp86.309.013.700,00 direalisasikan sebesar Rp84.899.875.991,00 atau 98,37%;
32. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dari anggaran sebesar Rp25.282.518.681,00 direalisasikan sebesar Rp24.869.536.999,00 atau 98,37%;
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dari anggaran sebesar Rp1.663.323.788,00 direalisasikan sebesar Rp1.634.728.324,00 atau 98,28%;
34. Dinas Kesehatan Aceh dari anggaran sebesar Rp52.031.185.414,90 direalisasikan sebesar Rp50.626.151.150,00 atau 97,30%;
35. Sekretariat Baitul Mal Aceh dari anggaran sebesar Rp179.493.215,00 direalisasikan sebesar Rp174.491.300,00 atau 97,21%;
36. Inspektorat Aceh dari anggaran sebesar Rp1.457.705.068,00 direalisasikan sebesar Rp1.412.407.197,00 atau 96,89%;
37. Dinas Sosial Aceh dari anggaran sebesar Rp2.780.702.455,85 direalisasikan sebesar Rp2.692.245.424,00 atau 96,82%;
38. Rumah Sakit Ibu Dan Anak dari anggaran sebesar Rp15.787.789.368,00 direalisasikan sebesar Rp15.165.824.082,00 atau 96,06%;
39. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dari anggaran sebesar Rp232.084.511,00 direalisasikan sebesar Rp219.616.500,00 atau 94,63%;
40. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh dari anggaran sebesar Rp10.692.006.782,00 direalisasikan sebesar Rp10.017.644.391,72 atau 93,69%;
41. Dinas Pendidikan Dayah Aceh dari anggaran sebesar Rp10.168.090.660,00 direalisasikan sebesar Rp9.239.426.020,41 atau 90,87%;
42. Rumah Sakit Jiwa dari anggaran sebesar Rp30.497.422.552,00 direalisasikan sebesar Rp27.032.211.845,00 atau 88,64%;
43. Dinas Peternakan Aceh dari anggaran sebesar Rp2.451.405.397,00 direalisasikan sebesar Rp2.170.151.885,00 atau 88,53%;
44. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh dari anggaran sebesar Rp65.924.840.510,00 direalisasikan sebesar Rp55.397.330.921,00 atau 84,03%;
45. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh dari anggaran sebesar Rp1.022.329.822,00 direalisasikan sebesar Rp834.656.314,00 atau 81,64%;
46. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dari anggaran sebesar Rp47.865.217.000,00 direalisasikan sebesar Rp23.999.702.484,00 atau 50,14%; dan
47. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh dari anggaran sebesar Rp9.528.445.013,00 direalisasikan sebesar Rp3.718.127.607,00 atau 39,02%.

3.4. Pencapaian Realisasi Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.

Pada tahun 2025, realisasi PAA yang bersumber dari zakat dan infak adalah sebesar Rp79.856.908.836,07 atau 87,28% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp91.500.000.000,00. Realisasi pendapatan zakat belum dapat terealisasi secara optimal,

di mana salah satunya disebabkan pada tahun 2025, terjadi kenaikan nishab zakat yang ditetapkan melalui **Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 04/KPTS/2025, tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi)**, tanggal 15 September 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 01 November 2025, yaitu dari sebelumnya Rp10.500.000,00 menjadi Rp13.000.000,00. Perubahan nishab zakat ini dilakukan atas dasar pertimbangan syariat/teknis dikarenakan adanya kenaikan harga emas di Aceh. Dengan adanya kenaikan nishab zakat tersebut, mengakibatkan berkurangnya pendapatan zakat yang sebagian besarnya adalah bersumber dari ASN di lingkup Pemerintah Aceh, dikarenakan jumlah pendapatan dari ASN tersebut tidak lagi memenuhi nishab zakat sehingga tidak lagi dilakukan pemotongan zakat sebesar 2,5%.

Realisasi pendapatan zakat periode akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp38.087.409.855,16 atau 76,17% dari pagu yang ditetapkan yaitu Rp50.000.000.000,00. Terjadi selisih kurang dari target yaitu sebesar Rp11.912.590.144,84 atau 23,83%. Dibandingkan tahun 2024, realisasi pendapatan zakat juga mengalami penurunan sebesar Rp21.881.141.539,18 atau terjadi penurunan sebesar 36,49%.

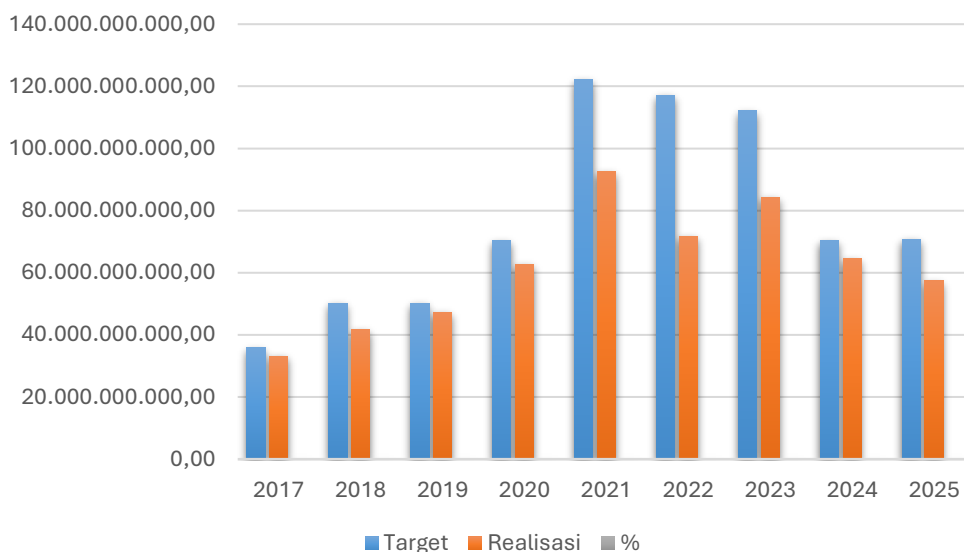
Namun demikian, dari sisi realisasi pendapatan yang bersumber Infak, menunjukkan tren yang positif, hal ini terlihat dari realisasi pendapatan infak telah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp41.769.498.980,91,- atau mencapai 100,65% dari pagu yang telah ditetapkan, yaitu Rp41.500.000.000,00. Salah satu penyebab tingginya realisasi PAA yang bersumber dari infak, berkorelasi dengan kenaikan nishab zakat di mana pendapatan ASN Pemerintah Aceh yang sebelumnya dikenakan pemotongan zakat sebesar 2,5%, sudah tidak lagi dilakukan pemotongan, namun hanya dikenakan pemotongan infak sebesar 1 persen, sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, pada pasal 106 menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab zakat dikenakan pemotongan infak sebesar 1 % (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

Tingkat pencapaian terhadap sasaran kinerja dari Dana Zakat pada BMA, menjadi tolak ukur utama dalam melakukan penilaian kinerja terhadap BMA, di mana sesuai amanah dari UU PA Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal Aceh, bahwa BMA mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana zakat yang merupakan dana umat untuk dapat dikelola secara optimal dengan mengikuti ketentuan syariah. Target dan realisasi dana zakat tahun 2017 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2017-2025

Tahun	Target	Realisasi	%
2025	70.749.995.333,00	57.360.919.761,00	81,08
2024	70.372.246.966,00	64.590.553.027,00	91,78
2023	112.128.121.146,00	84.327.599.354,00	75,21
2022	117.189.759.266,00	71.765.259.891,00	61,24
2021	122.174.155.585,00	92.442.187.683,00	75,66
2020	70.250.190.000,00	62.792.935.769,00	89,38
2019	50.248.000.000,00	47.252.969.560,34	94,04
2018	50.248.000.000,00	41.736.365.693,00	83,06
2017	35.864.400.000,00	33.184.661.500,00	92,53

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh (2025)

GAMBAR 12. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN ZAKAT TAHUN 2017-2025

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh 2025 (diolah)

Berdasarkan data sebagaimana terdapat pada tabel dan gambar di atas, terlihat bahwa jumlah belanja (target) yang dianggarkan pada Baitul Mal Aceh, sejak tahun 2017 terus mengalami kenaikan, namun sejak tahun 2022 s.d. 2025 kembali terjadinya penurunan. Hal ini berkaitan dengan jumlah penerimaan zakat pada tahun berkenaan dan jumlah SiLPA zakat tahun sebelumnya. Dana zakat ini adalah merupakan dana umat, maka dari aspek syariah Baitul Mal Aceh harus benar-benar selektif serta berpedoman pada ketentuan syariat, agar dana umat ini dapat terealisasi dan disalurkan secara benar dan tepat sasaran. Dalam penyaluran dana zakat, dana yang disalurkan sangat tergantung pada permohonan mustahik dan setiap bantuan yang akan disalurkan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental dan musibah atau bencana, bantuan akan disalurkan apabila ada kejadian atau musibah. Namun bila dilihat dari sisi penganggaran belanja, tentunya ketersediaan anggaran sudah harus terlebih dahulu dianggarkan, namun untuk merealisasikannya sangat tergantung pada kondisi yang berlaku. Selain itu, permasalahan administratif lainnya, seperti permasalahan keterbatasan anggaran pendukung yang bersumber dari APBA Murni untuk mendukung kelancaran operasional, keterbatasan sarana pendukung dan ketersediaan SDM untuk melakukan verifikasi juga menjadi kendala dalam proses penyaluran zakat.

Sekilas dapat disampaikan bahwa alur dalam proses penyaluran zakat sebagaimana yang telah diatur dalam Juknis penyaluran zakat, dimulai dari pengajuan permohonan dari mustahik, yang kemudian data mustahik tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, dan setelah dinyatakan selesai tahap administrasi baru kemudian Kepala Sekretariat menugaskan tim untuk melakukan verifikasi lapangan. Setelah verifikasi, mustahik yang dinyatakan layak untuk menerima bantuan, maka akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Sekretariat. Kemudian dilakukan verifikasi lapangan untuk melihat kelayakan dari penerima bantuan. Melihat dari alur proses awal sampai dengan tahap penyaluran, membutuhkan waktu yang relatif panjang, dan tentunya juga harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana pendukung yang optimal.

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Baitul Mal Aceh dalam hal pengentasan kemiskinan, pada tahun 2025 komposisi anggaran yang dialokasikan untuk pendistribusian zakat adalah sebesar Rp70.749.995.333,00 atau 26,06% dari total pagu anggaran, dengan realisasi penyalurannya sebesar Rp57.360.919.761,00 atau 81,08%. Dalam pendistribusiannya dibagi ke dalam 7 (tujuh) senif sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat, yaitu : 1) Senif Fakir; 2) Senif Miskin; 3) Senif Amil; 4) Senif Muallaf; 5) Senif Gharimin; 6) Senif Fisabilillah; dan 7) Senif Ibnu Sabil, walaupun dalam ketentuan syariat yang mengatur tentang zakat terdapat 8 (delapan) senif, yang satunya lagi adalah Senif Riqab. Namun berdasarkan pendapat ulama, bahwa di Aceh belum ada mustahik yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori Senif Riqab, sehingga Baitul Mal tidak mengalokasikan anggaran untuk Senif Riqab ini.

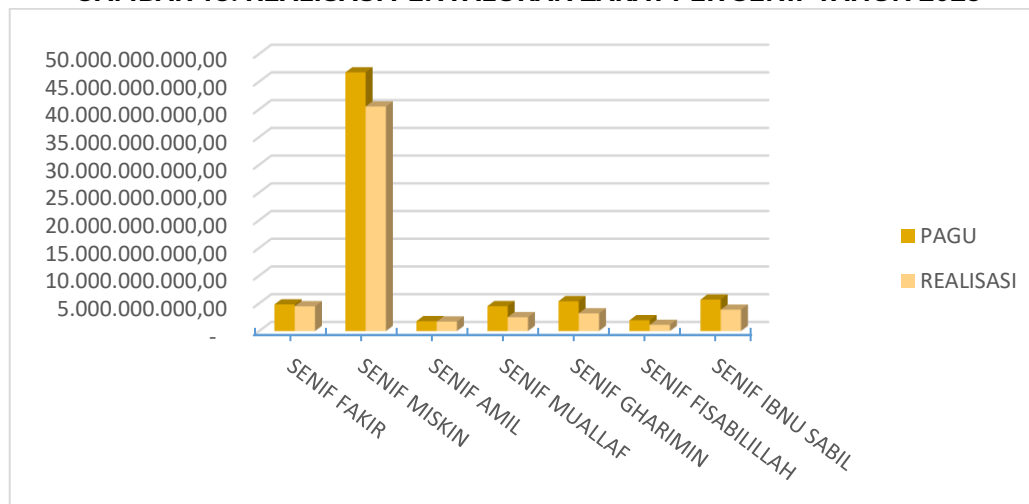
Adapun perbandingan realisasi terhadap pencapaian indikator target Kinerja pendistribusian dana zakat pada BMA dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Perbandingan Capaian Realisasi Zakat Tahun 2025 dan 2024

No	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	ZAKAT						
1	SENIF FAKIR	4.804.800.000,00	4.466.000.000,00	92,95	5.384.400.000,00	5.237.000.000,00	97,26
2	SENIF MISKIN	46.661.945.333,00	40.504.959.497,00	86,81	46.293.596.966,00	42.334.060.247,00	91,45
3	SENIF AMIL	1.784.400.000,00	1.721.761.309,00	96,49	1.384.800.000,00	1.258.966.600,00	90,91
4	SENIF MUALAF	4.496.750.000,00	2.499.121.320,00	55,58	2.993.750.000,00	2.380.606.000,00	79,52
5	SENIF GHARIMIN	5.380.000.000,00	3.192.500.000,00	59,34	2.200.000.000,00	2.199.000.000,00	99,95
6	SENIF FISABILILLAH	1.950.000.000,00	1.121.797.000,00	57,53	3.650.000.000,00	2.766.716.000,00	75,80
7	SENIF IBNU SABIL	5.672.100.000,00	3.854.780.635,00	67,96	8.465.700.000,00	8.414.204.180,00	99,39

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh (diolah)

GAMBAR 13. REALISASI PENYALURAN ZAKAT PER SENIF TAHUN 2025



Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh (diolah)

Dibandingkan tahun 2024, pagu anggaran tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 67% atau berkurang sebesar Rp2.793.600.000,00.

Pencapaian indikator target penyaluran zakat yang dapat disajikan dalam laporan keuangan TA 2025 dapat diklasifikasikan kepada tujuh *asnaf*, sebagai berikut:

3.4.1. Fakir

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan masyarakat kategori fakir ini diselenggarakan dengan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam hal ini Baitul Mal Aceh, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan kategori fakir. Santunan bulanan bagi kaum fakir yang digagas oleh Baitul Mal Aceh merupakan salah satu upaya untuk memberikan fasilitas berupa jaminan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka yang lebih layak.

Kegiatan Santunan Bulanan Fakir merupakan salah satu kegiatan unggulan Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) di mana dana zakat yang diberikan kepada mustahik bersifat berkelanjutan seumur hidup. Penerima santunan ini adalah masyarakat berstatus fakir, yaitu yang tidak sanggup lagi berusaha dan tidak memiliki harta. Tujuan utama santunan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari masyarakat fakir. Pada tahun 2025 dana yang dialokasikan pada senif ini adalah sebesar Rp4.804.800.000,00 yang direncanakan untuk 572 orang mustahik Besar dan dana zakat yang akan diberikan, yaitu sebesar Rp700.000,00/bulan. Jumlah anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.466.000.000,00 capaian realisasi fisik sebesar 92,95%, yang diberikan kepada 545 orang mustahik. Sisa anggaran sejumlah Rp338.800.000,00 dikarenakan terdapat 28 mustahik yang fakir uzur yang meninggal dunia.

3.4.2. Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kategori miskin yang memperoleh bantuan dari Baitul Mal Aceh, yaitu berstatus/berasal dari keluarga miskin (had kifayah per orang kurang $\leq$ Rp873.318,00 per bulan), taat beribadah kepada Allah SWT, berdomisili di Provinsi Aceh, penerima bantuan dibatasi maksimal 1 (satu) orang per KK, tidak sedang menerima bantuan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lain pada tahun yang sama, dan bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh. Mustahik ini kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh setelah melewati proses pendataan, verifikasi dan validasi.

Pendistribusian dana zakat pada kategori senif miskin ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pendistribusian Dana Zakat kepada UPZ sebesar Rp5.300.000.000,00 dan dengan realisasi sebesar Rp5.275.476.585,00 capaian realisasi 99,54%. Sisa anggaran sebesar Rp24.523.415,00 dikarenakan terdapat 1 UPZ yang tidak mengajukan pengembalian.
2. Bantuan santunan Ramadhan bagi keluarga miskin sebesar Rp5.000.000.000,00 target mustahik 5.000 dan realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00. Capaian realisasi fisik 100% dengan jumlah mustahik 5.105 orang.
3. Bantuan Kesehatan sebesar Rp10.480.000.000,00 target mustahik 1.200 dan realisasi sebesar Rp8.331.416.812,00. Dengan jumlah mustahik 1.170 orang, bantuan kesehatan ini terdiri dari beberapa bantuan yaitu:

- a. Bantuan dana bagi penderita kanker, talasemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin dengan pagu sebesar Rp4.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.099.738.000,00 yang disalurkan kepada 571 orang mustahik. Sisa anggaran Rp262.000,00 capaian realisasi fisik 100 % dengan jumlah mustahik 571 orang, kondisi sisa dana dikarenakan sisa dari pembayaran transportasi yang bersifat *at cost* sesuai dengan tiket yang disampaikan mustahik.
- b. Bantuan dana untuk penanggulangan *stunting* dengan pagu Rp1.680.000.000,00 target mustahik 200 orang dan terealisasi sebesar Rp1.328.600.000,00 yang disalurkan kepada 303 orang mustahik. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp351.400.000,00 hal ini dikarenakan terdapat pengurangan 28 mustahik yang sudah lewat usia 2 (dua) tahun, berdasarkan hasil validasi.
- c. Bantuan sanitasi dan air bersih dengan pagu Rp2.700.000.000,00 dan terealisasi Rp2.303.000.000,00 yang disalurkan kepada 260 orang mustahik, capaian realisasi fisik 85,30%, sisa anggaran sebesar Rp397.000.000,00 ini adalah karena berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Lembaga/BMK.
- d. Bantuan dana untuk pembelian kaki palsu target untuk 100 orang mustahik, dengan pagu sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi Rp600.078.812,00 untuk 36 orang mustahik. Sisa anggaran Rp1.399.921.188,00 dikarenakan bantuan tersebut sesuai kuota yang diajukan oleh pihak RSUZA.
- e. Bantuan biaya hidup sering diistilahkan dengan dana insidental untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dengan pagu Rp3.219.945.333,00 target 1.450 orang mustahik dan terealisasi sebesar Rp3.219.771.500,00. Capaian realisasi sebesar 99,99% yang disalurkan kepada 2.082 orang mustahik. Sisa anggaran sebesar Rp173.833,00. Sisa anggaran Bantuan Biaya Hidup tersebut dialihkan ke Senif Infak.
- f. Pemberdayaan Zakat Berbasis Keluarga (*Zakat Family Development/ZFD*) dengan pagu Rp3.162.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.162.000.000,00 atau sebesar 100% yang disalurkan kepada 117 keluarga.
- g. Penyaluran Zakat Guru SMA/SMK/SLB Sederajat ke Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp19.500.000.000,00 dan terealisasi Rp15.516.294.600,00 (79,57%). Sisa anggaran sebesar Rp3.983.705.400,00 dikarenakan terdapat 3 BMK yang tidak mengajukan pengembalian (BMK Aceh Timur, BMK Aceh Besar dan BMK Simeulue).

Dibandingkan Tahun 2024, secara persentase dana zakat yang dianggarkan pada Senif Miskin mengalami kenaikan sebesar 0,8%, atau sebesar Rp368.348.367,00. Untuk perbandingan realisasi, di mana realisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp42.334.060.247,00 atau 91,45% dari total pagu yang dianggarkan yaitu Rp46.293.596.966,00, sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp40.504.959.497,00 atau 86,81% dari total pagu yang dianggarkan yaitu Rp46.661.945.333,00.

3.4.3. Amil

Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil pada UPZ adalah individu yang bertugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada masing-masing

UPZ. Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh, Pasal 18 Ayat (5) menyebutkan bahwa Amil pada UPZ Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan. Pemberian hak amil kepada UPZ yang dimaksud dikarenakan mereka melakukan perhitungan dan pemotongan zakat penghasilan karyawannya secara mandiri, dan kemudian menyetorkannya ke BMA. Sementara Amil pada UPZ SKPA dikecualikan dengan pertimbangan bahwa perhitungan, pemotongan, dan penyetoran zakatnya dilakukan oleh Bendahara Umum Aceh (BUA), bukan oleh Amil di UPZ yang bersangkutan. Sehubungan dengan adanya penyetoran zakat oleh UPZ Lembaga/Instansi Non-Pemerintah Aceh ke BMA di tahun 2024, maka perlu untuk menyediakan hak amil kepada UPZ tersebut dalam program penyaluran zakat tahun 2025. Adapun distribusi anggaran pada Senif Amil adalah sebagai berikut:

1. Amil UPZ Lembaga/Instansi Non Pemerintah Aceh dengan pagu Rp43.600.000,00 target 8 (delapan) UPZ instansi vertikal dan terealisasi Rp40.529.309,00 untuk 7 (tujuh) UPZ. Kondisi sisa dana sebesar Rp3.070.691,00 dikarenakan Lembaga UPZ instansi vertikal tidak mengajukan pengembalian zakat;
2. Amil Relawan Baitul Mal Aceh dengan pagu Rp1.740.800.000,00 untuk 43 orang Amil Relawan Baitul Mal Aceh dengan realisasi sebesar Rp1.681.232.000,00 (96,58%) Sisa anggaran sebesar Rp59.568.000,00 dikarenakan terdapat pemotongan hak Amil atas dasar kedisiplinan dan pelaksanaan kinerja.

Apabila dilihat secara keseluruhan, persentase pagu anggaran zakat Senif Amil tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 28,86%, di mana pagu yang dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp1.384.800.000,00 dan realisasi Rp1.258.966.600,00 atau 73,12%. Sedangkan jumlah pagu tahun 2025 sebesar Rp1.784.400.000,00 dan realisasi Rp1.721.761.309,00 atau 96,49 %.

3.4.4. Mualaf

Mualaf adalah salah satu senif yang wajib untuk mendapatkan zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah (9) : 60. Mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan kelompok ini diharapkan kecenderungan hati dan keyakinannya untuk beriman kepada Allah SWT. Pemberian zakat kepada golongan ini diharapkan dapat menjauhkan mereka dari perbuatan kemaksiatan dan kejahatan. BMA wajib menetapkan bagian zakat kepada mualaf. Dengan memberikan bagian mereka dari zakat akan menjamin kelestarian mereka pada agama Islam dan mencegah berpaling mereka darinya. Sebab, jika mereka tidak mempunyai apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan melihat dengan keluarnya mereka dari agama sebelumnya tidak akan mendapatkan apa yang mereka butuh untuk hidup, mereka akan kembali kufur disebabkan faktor lapar dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Mualaf tentu juga banyak sekali mempunyai problem atau masalah, mulai dari keimanan yang masih lemah atau kurangnya pemahaman terhadap agama Islam karena orang yang baru meyakini Islam sebagai kebenaran. Oleh karena itu, Baitul Mal Aceh memberikan perhatian bagi anak dari keluarga para mualaf, dapat membimbing dan memberikan penyuluhan agama bagi mereka untuk mendalami agama Islam secara lebih jauh dan

nantinya menjadi dai atau penyuluh bagi lingkungan dan keluarga tersebut. Untuk bantuan Mualaf dibagi untuk 5 kategori:

1. Beasiswa penuh bagi anak dari keluarga mualaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA dengan pagu Rp1.703.000.000,00 dengan target mustahik 90 orang dan terealisasi Rp1.486.813.320,00 (87,31%) untuk 100 orang mustahik. Sisa realisasi sebesar Rp216.186.680,00 terjadi karena terdapat 1 mustahik lama yang dikeluarkan dan sisa kuota 13, dan mustahik penerimaan baru yang datanya tidak dipenuhi dari BMK sebanyak 12 mustahik;
2. Beasiswa penuh bagi anak mualaf tingkat D3/S1 lanjutan tahun 2021, dengan pagu Rp96.750.000,00 target mustahik 9 orang dan terealisasi Rp88.699.000,00 (91,68%) untuk 9 orang mustahik. Sisa realisasi sebesar Rp8.051.000,00 dikarenakan pembayaran SPP *at cost*;
3. Bantuan mualaf berdaya dengan pagu Rp2.100.000.000,00 target 42 orang mustahik dan terealisasi 32 orang mustahik atau Rp542.000.000,00 (25,81%). Sisa anggaran sebesar Rp1.558.000.000,00 dikarenakan nominal bantuan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan mustahik berdasarkan hasil verifikasi lapangan/dana zakat defisit;
4. Bantuan mualaf baru dengan pagu Rp297.000.000,00 target 99 orang mustahik dan terealisasi Rp156.000.000,00 (52,53%) untuk 58 orang mustahik. Sisa anggaran sebesar Rp141.000.000,00, sisa anggaran dikarenakan penyaluran pada kegiatan ini bersifat insidental, tergantung pada adanya pensyahadatan mualaf baru; dan
5. Pendampingan Syariah untuk Mualaf dengan pagu Rp300.000.000,00 target 3 kegiatan dan terealisasi Rp225.609.000,00 (75,20%) untuk 2 kegiatan Sisa anggaran Rp74.391.000,00 dikarenakan nominal bantuan diberikan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh Lembaga.

Dibandingkan Tahun 2024, secara persentase dana zakat yang dianggarkan pada Senif Mualaf mengalami penurunan sebesar 62.49 %, di mana tahun 2024 untuk Senif Mualaf pagu anggaran sebesar Rp2.993.750.000,00 sedangkan tahun 2025 pagu anggaran Senif Mualaf sebesar Rp4.496.750.000,00 ada selisih sebesar Rp367.750.000,00. Untuk perbandingan realisasi, di mana realisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp3.192.060.800,00 atau 65,62% dari total pagu yang dianggarkan. Sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.499.121.320,00 atau 44.42% dari total pagu yang dianggarkan.

3.4.5. Gharimin

Gharimin adalah Mustahik yang terkena dampak musibah bencana alam, bencana kemanusiaan dan bencana lainnya di wilayah Indonesia. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) periode Januari s.d. Juni 2024 mencatat telah terjadi bencana alam di Aceh sebanyak 99 kali kejadian bencana. Jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2023 yang mencapai 219 kejadian. Rincian jumlah bencana yang terjadi di Aceh pada Januari s.d. Juni 2024 yaitu banjir sebanyak 23 kali dengan 61 rumah dengan kerugian mencapai Rp3.000.000.000,00. Kebakaran hutan dan lahan 18 kali, dengan 17 hektar lahan terbakar dan kerugian mencapai Rp11.000.000.000,00 angin puting beliung 12 kali dengan 27 rumah rusak dan kerugian mencapai Rp3.000.000.000,00. Longsor 5 kali dengan 5 rumah terdampak dan kerugian Rp320.000.000, banjir bandang 1 kali dan gempa bumi 1 kali. Bencana-bencana tersebut berdampak pada 6 sarana Pendidikan, 4 sarana ibadah, 18 ruko, 3 jembatan dan 11 meter

badan jalan, selama tahun 2024 BMA telah membantu sebanyak 470 mustahik korban musibah bencana alam dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp1.600.000.000,00. Program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian BMA untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat akibat dari kerugian yang ditimbulkan. Baitul Mal Aceh untuk tahun anggaran 2025 menetapkan Pagu untuk Senif Gharimin sebesar Rp5.380.000.000,00 yang dialokasikan untuk Bantuan Dana untuk Korban Bencana Alam, Bencana Kemanusiaan dan Musibah Bencana Lainnya. Realisasi anggaran dari senif ini adalah sebesar Rp3.192.500.000,00 dengan persentase 59,34% untuk 954 orang Mustahik dengan target 1.500 orang mustahik. Sisa anggaran dikarenakan penyaluran pada kegiatan ini bersifat insidental tergantung pada terjadinya bencana/musibah.

Dibandingkan tahun 2024 persentase pagu anggaran pada Senif Gharimin di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 44,55% atau Rp1.800.000.000,00, di mana pagu anggaran tahun 2024 Rp2.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.199.000.000,00 atau 100% Sedangkan pagu anggaran tahun 2025 Rp5.380.000.000,00 dengan realisasi Rp3.192.500.000,00 atau 14,33%. Sisa anggaran sebesar Rp2.187.500.000, kondisi sisa dana dikarenakan bersifat insidental tergantung pada terjadinya bencana alam dan bencana lainnya.

3.4.6. Fisabilillah

Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Kategori mustahik ini termasuk personal dan/atau lembaga/organisasi yang berbasis keislaman yang secara ekonomi tidak mampu dalam memenuhi akomodasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dalam Keputusan Nomor 01/KPTS/I/2023 Tentang Pengertian Senif Penerima Zakat, Besaran Dana dan Bentuk Penyaluran, menyebutkan bahwa kriteria penerima fisabilillah Baitul Mal Aceh (BMA) adalah kegiatan menegakkan akidah umat seperti Da'i di daerah rawan akidah, bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya, membangun tempat peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak, dan bantuan publikasi untuk penguatan akidah. Dalam konteks BMA, lembaga/organisasi/personal yang mana aktivitas kegiatannya dalam rangka menegakkan syiar agama Allah membutuhkan bantuan dan dukungan moral dan materil, seperti (1) Pelatihan dan pendidikan bagi lembaga/dai sebelum ditugaskan di daerah rawan akidah, (2) Penelitian dan pengembangan ilmu agama, merangkul kaum muda agar mengenal agama lebih baik, (3) Membentuk media informasi islami, guna mengkonter informasi-informasi yang mendeskreditkan agama Islam dan (4) Membentuk jurnalis Islami, berguna untuk menjawab tulisan-tulisan yang mendiskreditkan agama Islam dan menggambarkan keindahan agama Islam. Oleh karena itu peran zakat dalam upaya mendukung tegaknya ajaran Islam kepada seluruh umat diharapkan dapat memperkuat dan memperkokuh akidah umat sehingga terjauhkan dari virus-virus penyelewengan dan kerusakan akidah di zaman modern hari ini. Adapun bantuan yang telah disalurkan pada senif ini adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Dana untuk Kegiatan Seminar/Diskusi/Penelitian/Pelatihan dengan pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 untuk 20 lembaga dan terealisasi Rp614.297.000,00 (61,43%) untuk 72 Lembaga. Sisa anggaran sebesar Rp385.703.000,00 dikarenakan sesuai dengan proposal yang masuk;

2. Bantuan Dana untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Mustahik di Rumah Singgah/Yayasan dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 untuk 5 lembaga dan terealisasi Rp80.000.000,00 (80%) untuk 4 lembaga. Sisa anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dikarenakan sesuai proposal yang dimasukkan;
3. Bantuan dana untuk Penunjang Sarana dan Prasarana Ibadah dan Rumah Ibadah Daerah Terpencil dengan pagu anggaran Rp250.000.000,00 untuk 5 lembaga dan terealisasi Rp. 0,00 (0%). Sisa anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dikarenakan bantuan tersebut dialihkan ke Senif Infak;
4. Khitanan Massal dengan pagu anggaran Rp300.000.000,00 untuk 6 lembaga dan terealisasi Rp127.500.000,00 (42,50%) untuk 8 lembaga. Sisa anggaran sebesar Rp172.500.000,00 dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan lembaga yang tidak ada MoU-nya sehingga hanya dapat dibantu Rp20Juta/lembaga (sesuai dengan SBK); dan
5. Bantuan Dana untuk Solidaritas Dunia Islam dengan pagu anggaran Rp300.000.000,00 untuk 3 lembaga dan terealisasi Rp300.000.000,00 (100%) untuk 1 lembaga.

Dibandingkan Tahun 2024, pagu anggaran tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 12.82% atau selisih sebesar Rp250.000.000,00, di mana pagu anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp2.200.000.000,00 dengan realisasi Rp2.199.000.000,00 atau 99,95%, sedangkan tahun 2025 pagu anggaran sebesar Rp1.950.000.000,00 dengan realisasi Rp1.121.797.000,00 (57.53%).

3.4.7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Alokasi anggaran pada Senif Ibnu Sabil tahun 2025 sebesar Rp5.672.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.854.780.635,00 atau 68%, yang disalurkan kepada 895 orang mustahik. Adapun rincian bantuan yang telah disalurkan pada senif ini adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Dana Untuk Orang Terlantar dan kehabisan bekal dengan pagu Rp755.000.000,00 untuk 151 orang dan terealisasi sebesar Rp99.930.635,00 atau 13,24% untuk 46 mustahik. Sisa dana sebesar Rp655.069.365,00 dikarenakan sisa anggaran dikarenakan pembayaran biaya transportasi yang *at cost*;
2. Beasiswa Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan pagu Rp722.400.000,00 untuk 86 mustahik dan terealisasi Rp676.200.000,00 atau 93.60% untuk 161 orang mustahik. Sisa dana sebesar Rp46.200.000,00;
3. Bantuan Beasiswa Berkelanjutan dengan nilai pagu Rp1.272.000.000,00 untuk 109 orang mustahik dan terealisasi sebesar Rp1.147.300.000,00 atau 90,20% untuk 361 orang mustahik, sisa anggaran sebesar Rp124,700.000,00 dikarenakan TMT bulan Juni;
4. Beasiswa Tahfidh Berkelanjutan dengan pagu Rp1.200.000.000,00 untuk 100 orang mustahik dan terealisasi sebesar Rp512.000.000,00 atau 42,67% untuk 220 orang mustahik, sisa anggaran sebesar Rp688.000.000,00 dikarenakan pembayaran beasiswa tidak penuh 12 bulan (TMT Juni s.d. Desember) dan jumlah penerima kurang dari target 100 mustahik (76 mustahik);

5. Beasiswa Utusan Daerah (lanjutan tahun 2023) dengan pagu anggaran Rp104.700.000,00 untuk 3 orang dan terealisasi Rp104.700.000,00 atau 100% untuk 6 orang mustahik;
6. Beasiswa Dayah Manyang (Ma'had Aly) dengan pagu Rp268.000.000,00 untuk 20 orang dan terealisasi Rp149.150.000,00 atau 55,66% untuk 20 orang mustahik. Sisa dana sebesar Rp118.850.000,00 dikarenakan pembayaran SPP yang dan pembayaran beasiswa tidak penuh 12 bulan (TMT Juni s.d. Desember) yang *at cost*; dan
7. Beasiswa Pendidikan Vokasi dengan pagu sebesar Rp1.350.000.000,00 untuk 45 orang mustahik dan realisasi sebesar Rp1.165.500.000,00 untuk 78 mustahik, sisa anggaran adalah sebesar Rp184.500.000,00 dikarenakan hingga total di akhir Desember sebanyak 78 orang mustahik aktif.

Dibandingkan Tahun 2024, pagu anggaran tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 67% atau berkurang sebesar Rp2.793.600.000,00. Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp5.672.100.000,00 dengan realisasi Rp3.854.780.635,00 atau 67,96 % sedangkan tahun 2024 pagu anggaran sebesar Rp8.465.700.000,00 dengan realisasi Rp8.414.204.180,00 atau 99,39 %.

Berdasarkan data-data realisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pencapaian target kinerja dalam pendistribusian dana zakat pada tahun 2025 sudah cukup optimal dengan realisasi yaitu sebesar 81,08%, yang telah di distribusikan untuk ± 15.702 mustahik/lembaga/kegiatan. BMA terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam hal mengoptimalkan realisasi dana zakat, melalui penyusunan *database* mustahik sehingga dana zakat yang akan disalurkan pada awal tahun dapat segera disalurkan tanpa harus menunggu data/permohonan dari mustahik. Selain itu BMA juga terus membangun hubungan kerja sama, baik dengan lembaga Pemerintah (BMK Se-Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM Aceh dan Dinas Sosial Aceh), maupun non pemerintah dalam rangka mendukung optimalisasi penyaluran dana Zakat. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan mulai dari pendataan, proses penyaluran sampai dengan pendampingan bagi mustahik yang telah menerima bantuan zakat, sehingga bantuan yang diterima dapat lebih produktif dan berdaya guna dalam rangka mendukung peningkatan taraf perekonomian mustahik.

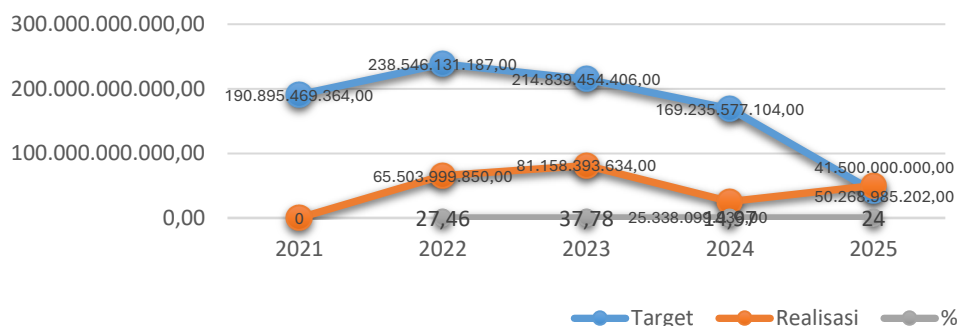
Selain dana zakat pencapaian sasaran kinerja dari pengalokasian dana infak juga menjadi tolak ukur utama dalam penilaian terhadap kinerja Baitul Mal Aceh dalam rangka mendukung Pemerintah Aceh dalam rangka dalam rangka pengentasan Kemiskinan. Sesuai amanah dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh, penyaluran dana infak disalurkan kepada 4 bentuk/bidang, yaitu: 1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 2) diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; 3) penyertaan modal ; 4) kemaslahatan umat dan 5) Biaya Operasional Kegiatan

Tingkat capaian sasaran kinerja dari pengalokasian dana Infak pada BMA, sejak tahun 2019 s.d. 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Penyaluran Infak, 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	%
2025	41.500.000.000,00	50.268.985.202,00	24
2024	169.235.577.104,00	25.338.099.936,00	14,97
2023	214.839.454.406,00	81.158.393.634,00	37,78
2022	238.546.131.187,00	65.503.999.850,00	27,46
2021	190.895.469.364,00	0,00	0,00

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2025 (diolah)

GAMBAR 14. REALISASI PENYALURAN INFAK, 2021-2025


Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2025 (diolah)

Berdasarkan pagu tahun anggaran 2025 yang dikelola oleh Baitul Aceh, besaran alokasi dana yang bersumber dana Infak ini sangat mendominasi, yaitu Rp185.930.320.741,00 atau 68,68% dari total pagu keseluruhan BMA yaitu Rp271.447.081.600,00 sama halnya dengan tahun 2024 pagu infak juga mendominasi yaitu sebesar Rp169.235.577.104,00, atau 66,49%, di mana pagu belanja keseluruhan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp254.533.071.915,-.

Pada tahun 2025, sesuai dengan Keputusan Badan Baitul Mal Aceh Nomor. 06/KEPBAN-BMA/II/ 2025, sasaran kinerja belanja Infak didistribusikan ke dalam 4 bidang, yaitu : 1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 2) Investasi; 3) Penyertaan Modal; dan 4) Kemaslahatan Umat. Adapun rincian pendistribusian dana infak pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pendampingan dan Pengembangan Ekonomi : Pagu Anggaran Rp1.000.000.000, dapat direalisasi Rp512.300.000,- dengan target 6 lembaga dan yang dinyatakan memenuhi kriteria hanya 3 lembaga;
 - b. Bantuan usaha berbasis individu : Pagu anggaran Rp25.000.000.000,- dapat realisasikan Rp24.630.000.000 dengan target 8.210 orang mustahik;
 - c. Bantuan Usaha berbasis kelompok : Pagu anggaran Rp10.500.000.000,- dapat direalisasikan Rp6.477.500.000,00 dengan target 134 mustahik, ada beberapa lembaga yang di pending penyaluran ke tahun 2026 karena adanya bencana.
 - Bantuan modal usaha kelompok berbasis Dayah, dengan realisasi sebesar Rp3.290.000.000,- untuk 91 Dayah yang berlokasi di Banda Aceh, Aceh

Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam.

- Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis Masjid, dengan realisasi sebesar Rp65.000.000,- untuk 2 Masjid yang berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.
- Bantuan modal usaha berbasis kelompok Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dengan realisasi sebesar Rp2.792.500.000,00 untuk 35 BUMG yang berlokasi di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan.
- Bantuan Modal Usaha Berbasis Kelompok (Panti Asuhan), dengan Realisasi Sebesar Rp30.000.000,- untuk 1 Panti Asuhan yang berlokasi di Kabupaten Subulussalam.

2. Investasi

- a. Deposito Syariah : Pagu anggaran Rp109.806.444.741,- dengan target 1 kegiatan, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya kode rekening pembiayaan pada DPA Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b. Tim Penasehat Investasi dan Penyertaan modal: Rp120.000.000,- dalam program ini Investasi tidak berjalan.

3. Kemaslahatan Umat :

- a. Pembangunan data dan sistem informasi Baitul Mal : Pagu anggaran Rp133.267.000,00 tidak dapat dilaksanakan karena aplikasi yang disiapkan oleh DISKOMINSA belum dapat difungsikan pada tahun 2025;
- b. FGD Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Pengawasan Perwalian: Pagu anggaran Rp64.265.0.000,00 dengan target 1 dokumen dengan total Realisasi Rp27.450.000,00 pembayaran biaya FGD makan minum rapat di akomodir dana rutin, realisasi infak hanya untuk honor tim SK Gubernur;
- c. FGD Ranpergub tentang Hak Keuangan DPS, Badan, Tenaga Profesional dan Relawan tidak tetap : Pagu anggaran Rp71.491.000,00 dengan total realisasi Rp37.950.000,00 tidak dapat terealisasi semua karena pembayaran biaya FGD makan minum rapat di akomodir dana rutin, realisasi infak hanya untuk honor tim SK Gubernur;
- d. FGD Perubahan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal : Pagu anggaran Rp52.950.000,00 dengan total Realisasi Rp34.950.000,00 tidak terealisasi semua karena pembayaran biaya FGD makan minum rapat di akomodir dana rutin, realisasi infak hanya untuk honor tim SK Gubernur;
- e. Pelatihan dan sertifikasi amil BMA dan BMK : Pagu anggaran Rp200.000.000,00 tidak ada realisasi karena terlambatnya pengesahan APBA perubahan dan tidak mencukupi waktu pelaksanaan.
- f. Pelatihan dan Sertifikasi Nazir : Pagu anggaran Rp309.300.000,00 tidak ada realisasi karena terlambatnya pengesahan APBA perubahan dan tidak mencukupi waktu pelaksanaan.

- g. Cetak buku tentang Regulasi Baitul Mal : Pagu anggaran Rp30.000.000,00 tidak ada realisasi karena belum tersedianya buku regulasi terbaru.
 - h. Bimbingan teknis (bimtek) pembinaan kelembagaan BMK : Pagu anggaran Rp534.868.000,00 dengan jumlah Realisasi Rp246.910.000,00 tidak terealisasi semua karena pelaksanaan bimtek hanya dapat dilaksanakan 1 tahap.
 - i. Bantuan Pendampingan hukum untuk korban KDRT dan Anak: Pagu anggaran Rp200.000.000,00 dengan jumlah realisasi Rp188.000.000,00
 - j. Asuransi Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Rentan : Pagu anggaran Rp604.800.000,00 dengan total realisasi Rp201.600.000,00 tidak dapat terealisasi semua dikarenakan Penambahan pagu untuk BPJS disabilitas, sedangkan di Qanun hanya di bolehkan untuk pekerja rentan petani.
 - k. Bantuan sosial lainnya : Pagu anggaran Rp31.084.679.000,00 dengan total realisasi Rp17.652.694.565,00 tidak dapat direalisasikan semua karena adanya penambahan pagu pada APBAP tidak terkejar target waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Biaya Operasional Kegiatan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya (ZIWaH)
- a. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendataan, Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi serta Penyaluran/Pendampingan Program/Kegiatan ZIWaH : Pagu anggaran Rp250.000.000,00 tidak ada realisasi operasional perjalanan dinas sumber dana Infak.
 - b. Dalam rangka sinkronisasi program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), BMA dan BMK : Pagu anggaran Rp160.000.000,00 anggaran yang terealisasi Rp158.830.637,00 realisasi sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Dalam rangka advokasi regulasi zakat pengurang pajak : Pagu anggaran Rp115.056.000 tidak ada realisasi operasional perjalanan dinas sumber dana Infak.
 - d. Dalam rangka pendataan dan verifikasi data oleh amil BMK : Pagu anggaran Rp193.200.000,00 dengan total realisasi Rp100.800.000,00

Pada tahun 2025, realisasi anggaran yang bersumber dari belanja Infak masih belum dapat terealisasi secara optimal, atau masih berada di bawah 50 persen yaitu anggaran yang dapat diserap hanya 27,22 persen dari jumlah pagu yang telah dianggarkan. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena ada Peraturan Badan BMA yang belum selesai ditetapkan, seperti Perban tentang Pembentukan Lembaga Keuangan BMA, Perban Investasi, Perban Penyertaan Modal dalam bentuk Deposito Syariah dan beberapa perban lainnya, yang merupakan adalah turunan dari Qanun dan Pergub tentang Pengelolaan Zakat dan Infak. Hal ini berdampak kepada tidak dapat tersalurkannya dana Infak karena terkendala permasalahan regulasi tersebut.

Terdapat Silpa zakat dan Silpa infak pada TA 2025 sebesar Rp137.407.319.946,98 terdiri dari masing-masing Silpa zakat sebesar Rp1.476.485.427,80 dan Silpa infak sebesar Rp135.930.834.519,18. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Tabel 15. Daftar Rekening Giro Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya

No	BANK	Nomor Rekening	Nama Rekening
A	PENERIMAAN ZAKAT		
1	Bank Aceh Syariah	610.01.04.000009-5	Zakat Baitul Mal Aceh
2	Bank Aceh Indonesia	1943961790	Zakat Baitul Mal Aceh
3	Bank Aceh Indonesia	7001569494	Zakat Baitul Mal Aceh
4	Bank Aceh Syariah	010.01.02.121285-2	Zakat Prov. Aceh
5	Bank Muamalat	2410015978	Badan Baitul Mal Prov. NAD
B	PENYALURAN ZAKAT		
1	Bank Aceh Syariah	610.01.04.000098-8	Unit ZIS Produktif BM Aceh
C	PENERIMAAN INFAK		
1	Bank Aceh Indonesia	8202020882	Infak Baitul Mal Aceh
2	Bank Aceh Syariah	610.01.04.000131-1	Infak Baitul Mal Aceh
3	Bank Aceh Syariah	610.01.04.000100-0	Infak Pemerintah Aceh
D	PENYALURAN INFAK		
1	Bank Aceh Syariah	610.01.04.000101-4	Dana Sukarela Mustahik ZIS Prod
E	HARTA KEAGAMAAN LAINNYA		
1	Bank Aceh Syariah	010.01.02.000239-3	Harta Keagamaan Lainnya Baitul Mal Aceh

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada Pergub Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua! Pemerintah Aceh meliputi Kebijakan Konseptual, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi BLUD, serta Bagan Akun Standar dan konversi.

4.1. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Aceh berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
2. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
3. Pengaruh proses politik; dan
4. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Aceh.

Ciri keuangan Pemerintah Aceh yang penting bagi pengendalian:

1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
4. Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.

4.2. Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Pemerintah Aceh adalah SKPA yang berada di lingkup Pemerintah Aceh. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh memberi wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) untuk mengelola administrasi keuangan Pemerintah Aceh beserta pelaporan keuangannya.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan SKPA, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, baik badan, dinas, kantor dan biro, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4.4. Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
8. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Aceh, maupun kas telah diterima di rekening Bendahara Penerimaan.

Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

4.5. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan biakan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Aceh karena Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespons kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non Pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.6.1. Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Definisi:

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran; dan
- b. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi:

- a. Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 16. Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.01	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	√	-
	Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	√	-
	Potongan PFK di SKPA yang Belum Disetor	√	-
	Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
1.1.01.04	Kas di BLUD	√	-
	Kas Tunai BLUD	√	-
	Kas di Bank BLUD	√	-
	Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
	Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
	Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
	Uang Transitoris BLUD	√	-
1.1.01.05	Kas Dana BOS	√	-
1.1.01.07	Kas Lainnya	√	-
1.1.01.08	Setara Kas	√*	√
	Deposito (kurang dari 3 bulan)		
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUA.

3. Pengakuan:

- a. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca;

- b. Kas SKPA terdiri atas dua yaitu Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - c. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang digunakan untuk menampung pendapatan/penerimaan SKPA;
 - d. Kas di Bendahara Penerimaan bersumber dari pendapatan/penerimaan aktivitas operasional dan aktivitas transitoris/non anggaran;
 - e. Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Aceh;
 - f. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Aceh;
 - g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Aceh, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Aceh;
 - h. Pendapatan yang diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUA dan pendapatan terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diizinkan secara resmi oleh BUA untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh;
 - i. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran; dan
 - j. Kas di Bendahara Pengeluaran mencerminkan saldo rekening kas di Bendahara Pengeluaran dan normalnya bersaldo nol pada akhir periode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengukuran
- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya; dan
 - b. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
5. Penyajian dan Pengungkapan
- a. Kas dan setara kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas;
 - b. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas; dan

- c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah: Rincian kas dan setara kas, Kebijakan manajemen setara kas; dan Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.6.2. Akuntansi Piutang

1. Definisi:

- a. Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh; dan
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

2. Klasifikasi:

- a. Piutang diklasifikasi sebagai berikut:

Tabel 17. Klasifikasi Piutang

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.03	Piutang Pajak Aceh	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	√
		Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	√
		Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	√
		Piutang Pajak Air Permukaan	√
		Piutang Pajak Rokok	-
		Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√
1.1.04	Piutang Retribusi Aceh	Piutang Retribusi Jasa Umum	√
		Piutang Retribusi Jasa Usaha	√
		Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	√
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMA	-
1.1.06	Piutang Lain-Lain PAA Yang Sah	Piutang Hasil Penjualan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Pemanfaatan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	-
		Piutang Jasa Giro	-
		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-
		Piutang Pendapatan Bunga	-
		Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-
		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-
		Piutang Pendapatan Denda Pajak Aceh	√
		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Aceh	√
		Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	√
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian	√
		Piutang Pendapatan BLUD	√
		Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	√
	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	√	√
	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	√	√
	Piutang Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf	√	-
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
	Piutang Dana Perimbangan	-	√
	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	-	√
	Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	-	√
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah		
	Piutang Bagi Hasil	-	√
	Piutang Bantuan Keuangan	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya		
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	-	√
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	√
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
	Uang Muka	-	√
1.1.10	Penyisihan Piutang		
	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.11	Belanja Dibayar dimuka		
	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
	Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
	Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
	Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
	Beban Lainnya	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- Piutang Pajak Aceh;
- Piutang Retribusi Aceh; dan
- Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- Pemberian Pinjaman;
- Penjualan;
- Kemitraan;
- Pemberian fasilitas; dan
- Transaksi Dibayar Dimuka.

3) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - b) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - e) Piutang Transfer Lainnya; dan
 - f) Piutang Kelebihan Transfer.
 - 4) Tuntutan Ganti Kerugian
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:
 - a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.
 - 5) Transaksi Dibayar Dimuka
Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, di mana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.
3. Pengakuan:
- a. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca;
 - b. Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi;
 - c. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
4. Pengukuran:
- a. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

- b. Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- c. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- d. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP), disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- e. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan;
- f. Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 18. Perhitungan Penyisihan Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- g. Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - h. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.
 - b. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptabel*.
 - c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan di antaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan

piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.6.3. Akuntansi Penyisihan Piutang

1. Definisi:

- a. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain;
- c. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan;
- d. Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realisasi bersih.

2. Kriteria Kualitas Piutang:

a. Kualitas Piutang Pajak

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e) Wajib pajak likuid; dan/atau
- f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
- d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

- c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

- d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada SKPA yang menangani pengurus Piutang Negara.
- c. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilunasi;
 - 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilunasi; dan
 - 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilunasi.

4.6.4. Akuntansi Persediaan

1. Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi:

a. Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 19. Klasifikasi Persediaan

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.12	Persediaan		
	Bahan	√	-
	Suku cadang	√	-
	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	√	-
	Obat-obatan	√	-
1.1.12.01	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Persediaan untuk dijual/diserahkan	√	-
	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	√	-
	Natura dan Pakan	√	-
	Persediaan Penelitian	√	-
	Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tidak habis Pakai		
	Komponen	√	-
	Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai		
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

b. Suatu aset dapat diklasifikasi sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Aceh;
- 2) Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Aceh.

c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

d. Dalam hal Pemerintah Aceh memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;

- e. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
 - f. Dalam suatu transaksi keuangan di mana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman;
 - g. Persediaan dapat terdiri dari:
 - 1) Barang Konsumsi;
 - 2) Amunisi;
 - 3) Bahan untuk pemeliharaan;
 - 4) Suku cadang;
 - 5) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - 6) Pita cukai dan leges;
 - 7) Bahan baku;
 - 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - 9) Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat;
 - 10) Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat; dan
 - 11) Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat
3. Pengakuan:
- a. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
 - c. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam LO serta diungkapkan dalam CaLK.
 - d. Pengakuan Beban Persediaan:
 - 1) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional;
 - 2) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);
 - 3) Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu:

a) Pendekatan aset

Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.

b) Pendekatan beban

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

e. Selisih Persediaan:

- 1) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluarsa, atau rusak.
- 2) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- 3) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. Pengukuran:

- a. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- d. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 3 alternatif metode penilaian, yaitu:
 - 1) Metode *First In First Out/FIFO* atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP);
 - 2) Rata-rata Tertimbang; dan
 - 3) Harga Pembelian Terakhir.
- e. Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh : jumlah unit persediaan tidak sama dengan hasil perhitungan fisik (Berita Acara *Stock Opname*/BASO) maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (BASO).

5. Penyajian dan Pengungkapan:

Pencatatan atas pemakaian persediaan tergantung pada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan terdiri atas dua metode yaitu:

- a. Metode Perpetual, dalam metode ini setiap transaksi yang mengakibatkan bertambah atau berkurang persediaan, dicatat dengan dengan mendebit persediaan (bertambah) dan dicatat dengan mengkredit persediaan (berkurang) sehingga saldo persediaan menunjukkan nilai terkini.
- b. Metode Periodik, dalam metode ini pencatatan atas transaksi persediaan hanya dilakukan untuk transaksi bertambah persediaan dan pencatatan dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dalam metode periodik ini, transaksi pemakaian persediaan tidak dicatat.
- c. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan persediaan adalah:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.6.5. Akuntansi Dana Bergulir

1. Definisi:

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

2. Klasifikasi:

a. Investasi Dana Bergulir

Tabel 20. Klasifikasi Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.04	Dana Bergulir		
	Dana Bergulir ...	√*	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

b. Piutang Pendapatan akibat Investasi Dana Bergulir.

Tabel 21. Piutang Pendapatan Akibat Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.3	Piutang Pendapatan		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang sah	√*	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

c. Pendapatan Hasil Dana Bergulir.

Tabel 22. Pendapatan Hasil Dana Bergulir

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
4.1.4	8.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	√*	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	√*	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- d. Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- e. Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.
3. Pengakuan:
- a. Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- b. Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- c. Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- d. Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- e. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- f. Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

4. Pengukuran:

- a. Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- b. Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- c. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- d. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

5. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- b. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- c. Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.
- d. Pengungkapkan informasi lain dalam CaLK antara lain: Dasar penilaian dana bergulir, Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, Besarnya suku bunga yang dikenakan, Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir, Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir, dan Informasi lain yang dianggap perlu

4.6.6. Akuntansi Investasi

1. Definisi:

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. ‘

2. Klasifikasi:

- a. Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 23. Klasifikasi Investasi

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.02	Investasi Jangka Panjang	-	√
	Investasi dalam Deposito	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.2.01	Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN)	-	√
	Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	√
	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	√
	Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	-	√
	Investasi dalam Obligasi	-	√
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
	Dana Bergulir	-	√
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	√
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. Pengakuan:

- a. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
4. Pengukuran:
- a. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - b. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
 - b. Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi non permanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.
 - c. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, Jenis-jenis investasi, Investasi Permanen dan Non permanen, Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, Perubahan pos investasi.

4.6.7. Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi:
 - a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - b. Aset tetap dapat diperoleh melalui:
 - 1) Pembelian/Pengadaan;
 - 2) Donasi/Hibah/Wakaf/Sumbangan;
 - 3) Pembangunan; dan
 - 4) Pertukaran.
2. Klasifikasi:
 - a. Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 24. Klasifikasi Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.3.01 Tanah	Tanah Persil	√	-
	Tanah Non Persil	√	-
	Lapangan	√	-
	Tanah BLUD	√	-



Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.3.02	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√ -
		Alat Angkutan	√ -
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√ -
		Alat Pertanian	√ -
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	√ -
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	√ -
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	√ -
		Alat Laboratorium	√ -
		Alat Persenjataan	√ -
		Komputer	√ -
		Alat Eksplorasi	√ -
		Alat Pengeboran	√ -
		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	√ -
		Alat Bantu Eksplorasi	√ -
		Alat Keselamatan Kerja	√ -
		Alat Peraga	√ -
		Peralatan Proses/Produksi	√ -
		Rambu-rambu	√ -
		Peralatan Olahraga	√ -
1.3.03	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√ -
		Monumen	√ -
		Bangunan Menara	√ -
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi	Tugu Titik Kontrol/Pasti	√ -
		Jalan dan Jembatan	√ -
		Bangunan Air	√ -
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	Instalasi	√ -
		Jaringan	√ -
		Bahan Perpustakaan	√ -
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	√ -
		Hewan	√ -
		Biota Perairan	√ -
		Barang Koleksi Non Budaya	√ -
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap Dalam Renovasi	√ -
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	√ -
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√ -
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√ -
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	√ -
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√ -

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi.
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.

- f. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
 - g. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
 - h. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
 - i. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
 - j. Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3. Pengakuan:
- a. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
 - b. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
 - c. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
 - d. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - 6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 7) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

- 8) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi	
1.3.01	Tanah	unit	Rp.	1,-
1.3.02	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
1.3.02.01	Alat Besar			
	- Alat Besar Darat	unit	Rp	20.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp	20.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan			
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp	30.000.000,00
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit	Rp	15.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp	3.000.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp	300.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Alat Pemancar	Unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.11	Alat eksplorasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.12	Alat Pengeboran	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.16	Alat Peraga	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp	500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	unit		
1.3.03.01	Bangunan Gedung	unit	Rp	25.000.000,00
1.3.03.02	Bangunan Monumen	unit	Rp	25.000.000,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	unit	Rp	5.000.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp	5.000.000,00
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi, yg terdiri atas:			
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp	50.000.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	unit	Rp	100.000.000,00
1.3.04.03	Instalasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.04.04	Jaringan	unit	Rp	50.000.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:			
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	-	Tidak dikapitalisasi	
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-	Tidak dikapitalisasi	
1.3.05.03	Hewan		Tidak dikapitalisasi	
1.3.05.04	Biota Perairan		Tidak dikapitalisasi	
1.3.05.05	Tanaman	-	Tidak dikapitalisasi	
1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya		Tidak dikapitalisasi	
	a) Barang Koleksi Non Budaya		Tidak dikapitalisasi	
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi		Tidak dikapitalisasi	

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- e. Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extra comptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- f. Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extra comptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
- g. Catatan dalam *extra comptable* berfungsi sebagai media pengendali.

4. Tanah:

- a. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- b. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- c. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.

5. Peralatan dan Mesin:

- a. Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- c. Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

6. Gedung dan Bangunan:

- a. Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- b. Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- c. Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- d. Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
- e. Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. sarana pendingin dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

7. Jalan, Jaringan dan Irigasi:

- a. Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- b. Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.

- c. Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
 - d. Jalan, Jaringan dan Irigasi diakui pada saat jalan, jaringan dan irigasitelah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
 - e. Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan di maksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
8. Aset Tetap Lainnya:
- a. Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
 - b. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
 - c. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
 - d. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap;
 - 2) Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan; dan
 - 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1) dan 2) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.
9. Pengukuran:
- a. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan yang bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.
 - c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya
 - d. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	- Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. - Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	- Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. - Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran di atas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	- Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. - Biaya Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Sumber: Kebijakan Akuntansi

a. Tanah:

- 1) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- 2) Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- 3) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- 4) Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

b. Peralatan dan Mesin:

- 1) Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- 2) Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya

dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (appraisal) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

- c. Pengukuran Gedung dan bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.
- d. Pengukuran Jalan, jaringan dan irigasi berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, jaringan dan irigasi dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, jaringan dan irigasi didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi.
- e. Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.
- f. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- g. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- h. Pertukaran Aset:
 - 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 - 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 - 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi

seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

- i. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
- j. Pengeluaran Setelah Perolehan:
 - 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 2) Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung di atas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
 - 3) Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.
 - 4) Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset
- k. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:
 - 1) Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 2) Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

10. Penyusutan:

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

- a. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- b. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- c. Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- e. Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- f. Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.
- g. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- h. Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Aceh, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Aceh
- i. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (*idle asset*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap
- j. Bukti Memorial merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.
- k. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi		Uraian		Masa Manfaat
1	3	ASET TETAP		
1	3	Peralatan dan Mesin		
1	3	02	01	Alat Besar
1	3	02	01 01	Alat Besar Darat
1	3	02	01 02	Alat Besar Apung
1	3	02	01 03	Alat Bantu
1	3	02	02	Alat Angkutan
1	3	02	02 01	Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02 02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	02	02 03	Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02 04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02 05	Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	02	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	02	03 01	Alat Bengkel Bermesin



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5
1	3	02	04		Alat Pertanian	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	02	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	02	08		Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01	Unit Laboratorium	8
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	02	08	03	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	02	08	06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i>	10
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	02	09		Alat Persenjataan	
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topograf	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	5
1	3	02	13	02	Produksi	5
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	02	14	01	Alat Bantu Produksi	5
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	02	15	03	Alat SAR	4
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses Produksi	5
1	3	02	18		Rambu-rambu	
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	2
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	2
1	3	02	19		Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	5



Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	03		Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01	Bangunan Gedung	
1	3	03	01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02	Monumen	
1	3	03	02 01	Candi/Tugu Peringatan/Tugu Prasasti	50
1	3	03	03	Bangunan Menara	
1	3	03	03 01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	03	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03	04 01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	04		Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	04	01	Jalan dan Jembatan	
1	3	04	01 01	Jalan	10
1	3	04	01 02	Jembatan	50
1	3	04	02	Bangunan Air	
1	3	04	02 01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04	02 02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04	02 03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04	02 04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04	02 05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04	02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	04	02 07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04	03	Instalasi	
1	3	04	03 01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	04	03 02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	04	03 03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04	03 04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	04	03 05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04	03 06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	04	03 07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04	03 08	Instalasi Gas	30
1	3	04	03 09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04	03 10	Intalasi Lain	
1	3	04	04	Jaringan	
1	3	04	04 01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04 02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04 03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04 04	Jaringan Gas	30

Sumber: Kebijakan Akuntansi

11. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*):

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku.

12. Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Aceh untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca. namun aset misalnya diungkapkan jumlah unit koleksi yang

dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

- b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

13. Penghentian dan Pelepasan:

- a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAA yang sah
- e. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan Surat Keputusan Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Aset tetap yang dipindahtanggankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Aceh, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal)

14. Akuntansi Reklasifikasi Aset Tetap

- a. Reklasifikasi aset tetap terdiri atas:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap ke *Extracomptable*;
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya – Usulan Penghapusan dan Penjualan;
 - 3) Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga;
 - 4) Reklasifikasi KDP ke Aset Lain-lain – Mangkrak; dan
 - 5) Reklasifikasi KDP-Biaya Perencanaan X-1 ke Aset Lain-lain.

15. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- b. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap:

- 1) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- 3) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- 4) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

4.6.8. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**1. Definisi:**

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

2. Klasifikasi:

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 28. Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
	Jalan, Jaringan dan Irigasi Dalam Pengerjaan	√	-
	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
3. Pengakuan:
 - a. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
4. Pengukuran:
 - a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
 - b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - 1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - 2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

- 3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - 4) biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
 - 5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - 1) asuransi;
 - 2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - 3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
 - e. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - 1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - 3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - f. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - g. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - h. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
 - a. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
 - b. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;

- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi; dan
- 6) Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4.6.9. Akuntansi Dana Cadangan

1. Definisi:

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2. Klasifikasi:

- a. Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Dana Cadangan

Tabel 29. Klasifikasi Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.4.01.01 Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional	-	√
	Dst....	-	√

2) Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Tabel 30. Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

				Kewenangan	
Kode Rekening		Uraian Akun		SKPA	SKPKA
LRA	LO				
4.1.04.05	7.1.04.05	Penerimaan Jasa Giro	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	√
4.1.04.07	7.1.04.07	Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	√

3. Pengakuan:

- a. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- b. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang di dalamnya mencakup:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - c. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan;
 - d. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan; dan
 - e. Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.
4. Pengukuran:
- a. Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal;
 - b. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal; dan
 - c. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset, Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK;
 - b. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan;
 - c. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah- jasa giro/bunga dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan - LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa giro/bunga dana cadangan; dan
 - d. dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan: (1) dasar hukum (Qanun) pembentukan dana cadangan, (2) Tujuan pembentukan dana cadangan, (3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, (4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, (5) Sumber dana cadangan, (6) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.6.10. Akuntansi Aset Lainnya

1. Definisi:

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2. Klasifikasi:

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 31. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan		
			SKPA	PPKA	
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√	
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√	
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√	
		Kerja sama Pemanfaatan BGS/BSG	√	√	
		Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	√	√	
	1.5.03	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
			Lisensi dan Frenchise	√	-
Hak Cipta			√	-	
Paten			√	-	
Aset Tidak Berwujud Lainnya			√	-	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			√	-	
Aset Lain-lain			Aset Lain-Lain	√	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

3. Pengakuan:

- a. Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

c) Bangun Guna Serah

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Aceh setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Aceh untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut

d) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Tetap yang pemanfaatannya dalam bentuk KSPI harus direklasifikasikan ke Aset Lain-lain - Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

3) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Aceh akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Aceh. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang merupakan suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

4. Klasifikasi:

- a. Aset Tidak Berwujud diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 32. Klasifikasi Aset Tidak Berwujud

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.5.3 ATB	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	√	
	<i>Goodwill</i>	√	-
	Lisensi dan Frenchise	√	-
	Hak Cipta	√	-
	Paten	√	-
	Kajian /pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang	√	-
	Akumulasi Amortisasi ATB	√	-

- b. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

5. Pengukuran:

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerja sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Aceh ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

6. Amortisasi:

- a. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- b. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- c. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
- d. Aset Tak Berwujud berupa Software dihitung amortisasinya dengan masa manfaat 4 (empat) tahun.
- e. Aset Tak Berwujud berupa Kajian dihitung amortisasinya berdasarkan periode manfaat pada dokumen kajian tersebut.

7. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- b. Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Besaran dan rincian aset lainnya;
 - 2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - 4) Informasi lainnya yang penting.
- c. Pelepasan/Penghentian Aset Tetap

Aktivitas pelepasan/penghentian aset tetap terdiri atas:

 - 1) Penjualan
 - 2) Pemusnahan
 - 3) Hibah
 - 4) Penyertaan Modal

4.6.11. Akuntansi Kewajiban

1. Definisi:

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Aceh juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Aceh, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari peraturan perundang-undangan atau kontrak yang mengikat.

2. Klasifikasi:

a. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 33. Klasifikasi Kewajiban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.02	Utang Bunga	√*	√
2.1.03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√*	√
2.1.04	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.05	Utang Belanja	√	√
2.1.06	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.01	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.02	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- c. Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- d. Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- e. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketentuan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketentuan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- f. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran:

- a. Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

- a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- b) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Aceh.

5) Utang Belanja

Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan Akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

7) Utang Jaminan

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Aceh.

8) Utang Dalam Negeri

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

9) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Utang jangka panjang di BLUD di antaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.

10) Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

Nilai nominal atas utang Pemerintah Aceh yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

11) Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Disajikan sebesar sisa kewajiban dari Pemerintah Aceh pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode Akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode di antaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Aceh.

12) Perubahan Valuta Asing

Utang Pemerintah Aceh dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

5. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban; dan
- b. Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

4.6.12. Akuntansi Pendapatan

1. Definisi:

- a. Pendapatan-LRA dicatat saat adanya pendapatan secara tunai dan non tunai. Pendapatan-LO pada umumnya terjadi karena adanya penerimaan pendapatan secara tunai dan non tunai, adanya tunggakan pungutan pendapatan, pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Aceh
- b. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- c. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Klasifikasi:

- a. Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Tabel 34. Pendapatan Asli Aceh

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.1	Pendapatan Asli Aceh-LRA	√	-
4.1.01	Pajak Aceh-LRA	√	-
4.1.02	Retribusi Aceh-LRA	√	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LRA	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.1.04	Lain-lain PAA yang Sah-LRA	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

b. Pendapatan Transfer

Tabel 35. Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.2	Pendapatan Transfer-LRA	-	√
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	-	√
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	-	√
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

c. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Tabel 36. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	-	√
4.3.01	Pendapatan Hibah-LRA	-	√
4.3.02	Dana Darurat-LRA	-	√
4.3.03	Pendapatan Lainnya-LRA	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

3. Pengakuan:

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Diterima pada Rekening Kas Umum Aceh
- 2) Diterima oleh SKPA
- 3) Diterima entitas lain di luar Pemerintah Aceh atas nama Bendahara Umum Aceh Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut

- 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Aceh dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Aceh, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Aceh.
- 3) Pendapatan kas yang diterima SKPA dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Aceh, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Aceh untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Aceh.

- 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Aceh untuk diakui sebagai pendapatan Aceh.
 - 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Aceh berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Aceh, dan Bendahara Umum Aceh mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah
 - d. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA
 - e. Koreksi kesalahan pencatatan pendapatan ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas dua, yaitu:
 - 1) Koreksi kesalahan pendapatan pada periode berjalan; dan
 - 2) Koreksi kesalahan pendapatan pada periode sebelumnya.Jika terjadi pengembalian pendapatan yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 - f. Koreksi kesalahan pencatatan pendapatan ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas dua yaitu:
 - 1) Koreksi kesalahan pendapatan bersifat normal dan berulang; dan
 - 2) Koreksi kesalahan pendapatan yang bersifat tidak normal dan tidak berulang
 - g. Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah pada SKPA terkait
 - h. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKA akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan
 - i. Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Aceh
 - j. Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi
 - k. Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBA Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan.

- l. Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada SKPKA.
 - m. Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Pengukuran:
- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - c. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
 - d. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
5. Penyajian Dan Pengungkapan:
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6.13. Akuntansi Belanja

1. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.
2. Klasifikasi:
 - a. Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 37. Klasifikasi Belanja

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.1	-	Belanja Operasi		
5.1.01	-	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	-	Belanja Barang	√	-
5.1.03	-	Bunga	-	√
5.1.04	-	Subsidi	-	√
5.1.05	-	Hibah (berupa uang)	-	√
5.1.05	-	Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√
5.1.06	-	Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
5.1.06	-	Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
5.2	-	Belanja Modal		
5.2.01	-	Belanja Tanah	√	-

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.2.02	-	Belanja Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	-	Belanja Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	-	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	√	-
5.2.05	-	Belanja Aset tetap lainnya	√	-
5.3	-	Belanja Tak Terduga		
5.3.01	-	Belanja Tak Terduga	-	√
5.4	-	Belanja Transfer		
5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	-	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

3. Pengakuan:

a. Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4. Pengukuran:

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

5. Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.6.14. Akuntansi Transfer

1. Definisi:

- a. Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Tabel 38. Definisi Transfer

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.4.	-	Belanja Transfer		
5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	-	Belanja Bantuan Keungan	-	√

b. Transfer/Belanja Bagi Hasil

Tabel 39. Transfer/Belanja Bagi Hasil

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA

5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil		
5.4.01.01	-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	√
5.4.01.02	-	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	√

c. Transfer/Belanja Bantuan Keuangan

Tabel 40. Transfer/ Belanja Bantuan Keuangan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.4.02	-	Transfer/Belanja Bantuan Keuangan		
5.4.02.01	-	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	√
5.4.02.02	-	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	√
5.4.02.03	-	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	√
5.4.02.04	-	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	√
5.4.02.05	-	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	√
5.4.02.06	-	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

2. Pengakuan:

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

3. Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
 - Transfer masuk dinilai berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan *kurs* tengah Bank Indonesia

4. Penyajian dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.
- Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.

- c. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
- d. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.

4.6.15. Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi:

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- d. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- e. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- f. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh pada bank yang ditetapkan.
- g. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

2. Klasifikasi:

- a. Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan
 - a) Penggunaan SILPA
 - b) Pencairan Dana Cadangan
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
 - d) Pinjaman Dalam Negeri
 - e) Penerimaan Kembali Piutang
 - f) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
 - g) Pinjaman Luar Negeri

- h) Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembentukan Dana Cadangan
 - b) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh
 - c) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
 - d) Pemberian Pinjaman Daerah
 - e) Pengeluaran Investasi Non Permanen
 - f) Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
 - g) Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
- 3. Pengakuan:
 - a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh;
 - b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh; dan
 - c. Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 4. Pengukuran:
 - a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan; dan
 - b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 5. Penyajian dan Pengungkapan:
 - a. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan; dan
 - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah: Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Aceh, Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.6.16. Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi:
 - a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Klasifikasi:
 - a. Pendapatan Asli Aceh (PAA):
 - 1) Pajak Aceh
 - 2) Retribusi Aceh
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAA yang Sah
 - b. Pendapatan Transfer:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - c. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah:
 - 1) Pendapatan Hibah
 - 2) Dana Darurat
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pengakuan:
 - a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - a) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - a) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - b) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
 - b. Pengakuan Pendapatan Pajak-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
 - c. Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak-LO, Pemerintah Aceh memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan.

- d. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proporsional
- e. Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas
- f. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan
- g. Pendapatan Bantuan Keuangan-LO baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, diakui berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Aceh yang menjadi hak Pemerintah Aceh selaku penerima
- h. Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut
- i. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Aceh, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO

4. Pengukuran:

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- b. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud
- c. Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Aceh
- d. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi

5. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah, (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Aceh, (4) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

4.6.17. Akuntansi Beban

1. Definisi:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

2. Klasifikasi:

Beban diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Beban Operasi-Lo
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

3. Pengakuan:

- a. Beban diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh.
 - 2) Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu
- b. Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
 - 1) Metode pendekatan Beban
 - 2) Metode pendekatan Aset
- c. Beban Pegawai Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Aceh yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
- d. Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan
- f. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Aceh untuk memberikan subsidi telah timbul

- g. Beban Hibah diakui pada saat NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah
 - h. Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial
 - i. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun
 - j. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Aceh kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
4. Pengukuran:
- a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
 - b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga
 - c. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*)
 - d. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku
 - e. Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga
 - f. Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - g. Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku
 - h. Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer
 - i. Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus
 - j. Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian

utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah perselisihan (*dispute*) dikemudian hari

- k. Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga

5. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*)
- b. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- c. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban
- d. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

4.6.18. Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

1. Definisi:

- a. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Perusahaan Daerah Aceh, Masyarakat, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan;
- b. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Aceh kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial; dan
- c. Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Aceh kepada pemerintah daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik.

2. Klasifikasi:

- a. Jenis belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari sisi bentuknya terdiri dari
 - 1) Dalam bentuk uang
 - 2) Dalam bentuk barang
- b. Belanja hibah, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah
 - 1) Pemerintah
 - 2) Pemerintah daerah

- 3) Perusahaan daerah Aceh
 - 4) Masyarakat
 - 5) Organisasi kemasyarakatan
 - c. Belanja bantuan sosial, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima bantuan sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial kepada individu
 - 2) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintahan
 - d. Seluruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bersifat terencana. Belanja yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBA dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBA
3. Pengakuan:
- a. Pengakuan pendapatan hibah terjadi pada saat hak Pemerintah Aceh timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun berjalan serta tidak perlu dibayar kembali
 - b. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional
 - c. Hibah dalam bentuk uang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sejumlah nominal yang diterima
 - d. Hibah dalam bentuk barang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar nilai yang tertuang pada berita acara apabila termasuk dalam hibah terencana dan telah dianggarkan dalam APBA
 - e. Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutory report. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPA dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPA penerima
 - f. Hibah dari aset yang tidak ada nilainya, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) jenis dan jumlah barang yang dihibahkan
 - g. Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah Aceh dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
4. Pengukuran:
- a. Belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi bank sentral pada tanggal transaksi.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional
- c. Jenis informasi atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
 - 2) Penjelasan pencapaian transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan terhadap target yang ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang APBA, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan
 - 3) Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
 - 4) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan
 - 5) Jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga

4.6.19. Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1. Definisi:

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Pengakuan:

a. Pendapatan BLUD - LO diakui dengan kriteria

- 1) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
- 2) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan.
- 4) Pada saat realisasi pendapatan BLUD yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan

- b. Pendapatan BLUD – LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan Pendapatan BLUD oleh fungsi BUA
 - c. Piutang BLUD diakui dengan kriteria
 - 1) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - 2) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan
 - d. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas BLUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja BLUD-LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan atas belanja operasional BLUD oleh fungsi BUA
 - f. Kas Uang Muka Pelayanan BLUD dan Pendapatan Diterima Di Muka diakui pada saat uang diterima di BLUD
 - g. Potongan/Penyesuaian Klaim Pendapatan diakui pada saat dokumen hasil verifikasi diterbitkan oleh pihak ketiga
 - h. Kas transitoris pendapatan-BLUD diakui pada saat uang diterima di BLUD atas jasa layanan yang telah diberikan dan belum dilakukan pengesahan pendapatan
 - i. Kas transitoris belanja-BLUD diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari dana BLUD dan belum dilakukan pengesahan belanja
3. Pengukuran:
- a. Pengukuran pendapatan BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD, Pendapatan Diterima Di Muka diidentifikasi sebesar jumlah nominal yang tertera pada dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD atau yang dipersamakan
 - b. Pengukuran Piutang Jasa Layanan BLUD dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir periode
4. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
 - b. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan
 - c. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun

- d. Laporan Keuangan BLUD disajikan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

4.6.20. Perjanjian Konsesi Jasa

1. Definisi:

- a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di mana: (a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- b. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

2. Klasifikasi:

- a. Konsesi Jasa diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 41. Konsesi Jasa Diklasifikasikan

No	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1	Konsesi Jasa		
	Aset Konsesi Jasa – Tanah	-	√
	Aset Konsesi Jasa – Peralatan dan Mesin	-	√
	Aset Konsesi Jasa – Gedung dan Bangunan	-	√
	Aset Konsesi Jasa – Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	√
	Aset Konsesi Jasa – Aset Tetap Lainnya	-	√

Sumber: Pergub Kebijakan Akuntansi

3. Pengakuan

- a. Pemerintah Aceh mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset Pemerintah Aceh yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila :
 - 1) Pemerintah Aceh mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - 2) Pemerintah Aceh mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

- b. Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa adalah selama masa manfaat/umur aset tersebut.
 - c. Pemerintah Aceh melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki Pemerintah Aceh.
 - d. Apabila Aset yang dimiliki Pemerintah Aceh memenuhi kondisi persyaratan, Pemerintah Aceh melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
 - e. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri di mana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.
 - f. Suatu konstruksi aset yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya.
 - g. Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset tersebut, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
 - h. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi aset.
 - i. Reklasifikasi aset diukur menggunakan nilai tercatat aset.
4. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban
- a. Pada saat pemerintah Aceh mengakui aset konsesi jasa, Pemerintah Aceh juga mengakui kewajiban.
 - b. Pemerintah Aceh tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
 - c. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari Pemerintah Aceh kepada mitra, atau dari mitra kepada Pemerintah Aceh.
 - d. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemerintah Aceh dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan/atau hukum perjanjian yang relevan.
 - e. Pemerintah Aceh memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa sebagai bentuk pertukaran, melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - 1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);

- 2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - a) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - b) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jasa layanan publik.

5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pemerintah Aceh mencatat seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan pengungkapan yang memadai termasuk aspek material.
- b. Pemberi jasa/mitra menyampaikan laporan berupa informasi terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan. Informasi yang diberikan berupa:
 - 1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - 2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - 3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - a) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - b) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - c) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - d) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - f) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
 - g) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan



- h) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
- c. Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa.

BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Pendapatan	10.691.894.789.547,00	10.700.061.956.317,20	100,08	11.396.038.068.929,58
2	Belanja	9.361.265.242.517,00	8.856.538.867.023,08	94,61	9.453.769.392.100,68
3	Transfer	1.802.891.702.664,00	1.796.170.474.841,00	99,63	1.833.379.495.751,00
4	Pembiayaan	472.262.155.634,00	471.105.985.301,94	99,76	421.372.974.555,69
SILPA		-	518.458.599.755,06	-	530.262.155.633,59

Sumber: Data diolah

Realisasi atas penganggaran belanja dan pendapatan Pemerintah Aceh TA 2025 dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
	Rp10.700.061.956.317,20	Rp11.396.038.068.929,58

Pendapatan Aceh terdiri dari Pendapatan Asli Aceh, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp695.976.112.612,38 atau 6,11%.

Tabel 43. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Pendapatan Asli Aceh	2.707.548.137.347,00	2.713.537.411.858,65	100,22	3.225.685.925.856,02
2	Pendapatan Transfer	7.962.250.252.200,00	7.963.190.526.056,00	100,01	8.167.778.560.238,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	22.096.400.000,00	23.334.018.402,55	105,60	2.573.582.835,56
Jumlah Pendapatan		10.691.894.789.547,00	10.700.061.956.317,20	100,08	11.396.038.068.929,58

Sumber: Data diolah

Realisasi masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Aceh	Realisasi 2025	Realisasi 2024
	Rp2.713.537.411.858,65	Rp3.225.685.925.856,02

Pendapatan Asli Aceh merupakan Pendapatan Aceh yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Pajak Aceh	1.552.776.409.674,00	1.499.781.765.834,50	96,59	1.930.621.844.261,00
2	Retribusi Aceh	708.333.834.165,00	684.774.199.352,66	96,67	790.959.745.324,61
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal	267.905.085.228,00	270.253.493.775,00	100,88	267.660.903.349,00
4	Lain-lain PAA yang Sah	178.532.808.280,00	258.727.952.896,49	144,92	236.443.432.921,41
Jumlah Pendapatan Asli Aceh		2.707.548.137.347,00	2.713.537.411.858,65	100,22	3.225.685.925.856,02

Sumber: Data diolah

5.1.1.1.1. Pajak Aceh

Realisasi 2025
Rp1.499.781.765.834,50

Realisasi 2024
Rp1.930.621.844.261,00

Pajak Aceh merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Aceh tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman, serta dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal. Realisasi Pajak Aceh untuk masing-masing jenis pajak dirinci sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	410.699.335.000,00	369.388.864.230,00	89,94	637.490.289.468,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	219.981.999.999,00	220.218.250.389,00	100,11	438.428.318.400,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	581.836.308.000,00	586.414.854.996,00	100,79	525.189.402.107,00
4.	Pajak Air Permukaan	2.599.196.000,00	2.517.009.171,00	96,84	2.431.858.011,00
5.	Pajak Rokok	328.759.285.675,00	313.695.970.299,00	95,42	327.081.976.275,00
6.	Pajak Alat Berat	53.363.000,00	-	-	-
7.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	8.846.922.000,00	7.546.816.749,50	85,30	-
Jumlah		1.552.776.409.674,00	1.499.781.765.834,50	96,59	1.930.621.844.261,00

Sumber: Data diolah

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdiri dari:
 - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan terealisasi sebesar Rp5.493.295.853,00 dari anggaran sebesar Rp7.762.926.000,00 atau 70,76 %;
 - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep terealisasi sebesar Rp32.951.628.023,00 dari anggaran sebesar Rp35.664.319.000,00 atau 92,39 %;
 - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus terealisasi sebesar Rp183.877.305.136,00 dari anggaran sebesar Rp206.551.989.000,00 atau 89,02 %;
 - d. PKB-Mobil Bus-Microbus terealisasi sebesar Rp1.663.293.850,00 dari anggaran sebesar Rp1.500.978.000,00 atau 110,81%;
 - e. PKB-Mobil Bus-Bus terealisasi sebesar Rp352.036.580,00 dari anggaran sebesar Rp323.899.000,00 atau 108,69%;
 - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up terealisasi sebesar Rp27.098.759.015,00 dari anggaran sebesar Rp27.305.857.000,00 atau 99,24%;
 - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck terealisasi sebesar Rp9.810.528.125,00 dari anggaran sebesar Rp18.905.721.000,00 atau 51,89%;
 - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck terealisasi sebesar Rp4.978.570.721,00 dari anggaran sebesar Rp6.089.202.000,00 atau 81,76%;
 - i. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua terealisasi sebesar Rp99.944.345.713,00 dari anggaran sebesar Rp106.248.308.000,00 atau 94,07%;
 - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga terealisasi sebesar Rp32.048.700,00 dari anggaran sebesar Rp77.611.000,00 atau 41,29%; dan

- k. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar terealisasi sebesar Rp3.187.052.514,00 dari anggaran sebesar Rp268.525.000,00 atau 1.186,87 % merupakan PKB atas kendaraan khusus Ambulans, Mobil Pemadam Kebakaran, dan Truk Tangki.

Pengenaan PKB atas PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar merupakan pengenaan PKB atas kendaraan bermotor yang dirancang untuk keperluan khusus, seperti ambulans/pemadam kebakaran/layanan kebersihan, dan bukan untuk pengenaan PKB atas alat berat/alat besar sebagaimana diatur pengenaannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tidak diatur lagi pengenaan PKB atas alat berat/alat besar, karena atas alat berat telah dikenakan melalui Pajak Alat Berat.

Dengan demikian, terhadap penerimaan pendapatan atas pengenaan PKB-Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud di atas dicatat pada akun PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar, sedangkan untuk penerimaan pendapatan atas pengenaan Pajak Alat Berat telah diatur kode akun dan nama akun tersendiri sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13/9845/Keuda tanggal 15 Desember 2025.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terdiri dari:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan terealisasi sebesar Rp306.968.000,00 dari anggaran sebesar Rp266.151.320,00 atau 115,34%;
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep* terealisasi sebesar Rp16.738.205.600,00 dari anggaran sebesar Rp15.394.627.880,00 atau 108,73%;
 - c. BBNKB-Mobil Penumpang-*Minibus* terealisasi sebesar Rp69.314.712.800,00 dari anggaran sebesar Rp70.451.417.599,00 atau 98,39%;
 - d. BBNKB-Mobil Bus-*Microbus* terealisasi sebesar Rp1.539.826.604,00 dari anggaran sebesar Rp1.512.952.500,00 atau 101,78%;
 - e. BBNKB-Mobil Bus-Bus terealisasi sebesar Rp405.335.400,00 dari anggaran sebesar Rp693.158.600,00 atau 58,48%;
 - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up* terealisasi sebesar Rp12.039.765.400,00 dari anggaran sebesar Rp8.950.777.200,00 atau 134,51%;
 - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck* terealisasi sebesar Rp1.247.462.610,00 dari anggaran sebesar Rp1.256.305.850,00 atau 99,30%;
 - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* terealisasi sebesar Rp940.372.100,00 dari anggaran sebesar Rp816.065.250,00 atau 115,23%;
 - i. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua terealisasi sebesar Rp115.177.396.300,00 dari anggaran sebesar Rp117.949.225.600,00 atau 97,65%;

- j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga terealisasi sebesar Rp136.839.300,00 dari anggaran sebesar Rp173.447.500,00 atau 78,89%; dan
- k. BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat terealisasi sebesar Rp2.371.366.275,00 dari anggaran sebesar Rp2.517.870.700,00 atau 94,18% merupakan BBNKB atas kendaraan khusus Ambulans, Mobil Pemadam Kebakaran, dan Truk Tangki.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terdiri dari:
 - a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin terealisasi sebesar Rp344.735.185.960,00 dari anggaran sebesar Rp354.920.148.000,00 atau 97,13%; dan
 - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar terealisasi sebesar Rp241.679.669.036,00 dari anggaran sebesar Rp226.916.160.000,00 atau 106,51%.
4. Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp2.517.009.171,00 dari anggaran sebesar Rp2.599.196.000,00 atau 96,84%.
5. Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp313.695.970.299,00 dari anggaran sebesar Rp328.759.285.675,00 atau 95,42%.
6. Pajak Alat Berat terealisasi Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp53.363.000,00.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasikan Rp7.546.816.749,50 dari anggaran sebesar Rp8.846.922.000,00 atau 85,30%.

5.1.1.1.2. Retribusi Aceh

Realisasi 2025 **Realisasi 2024**
Rp684.774.199.352,66 **Rp790.959.745.324,61**

Retribusi Aceh merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	690.325.714.697,00	664.733.248.238,34	96,29	770.541.204.515,00
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	177.370.574,00
	Jumlah	690.325.714.697,00	664.733.248.238,34	96,29	770.718.575.089,00
Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	89.661.000,00
2	Retribusi Terminal	-	682.000,00	-	9.196.620,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.686.450.000,00	1.126.574.353,15	66,80	2.036.527.500,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.600.000.000,00	3.381.842.596,40	130,07	3.343.609.766,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	84.300.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	1.018.155.490,00
7	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	967.235.000,00	1.749.830.205,00	180,91	1.096.220.122,60
8	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Ternak Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	230.000.000,00	197.477.500,00	85,86	260.587.500,00



No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
9	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan	986.535.392,00	1.024.603.430,00	103,86	725.061.746,00
10	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.576.000.000,00	1.551.414.300,00	98,44	2.368.756.200,00
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga	1.701.980.000,00	1.873.623.010,00	110,08	1.927.660.004,00
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.423.971.680,00	5.465.536.205,00	123,54	6.336.457.104,01
13	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.735.947.396,00	3.669.367.514,77	98,22	940.770.183,00
Jumlah		17.908.119.468,00	20.040.951.114,32	111,91	20.236.963.235,61
Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	4.207.000,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.000.000,00	-	-	-
Jumlah		100.000.000,00	-	-	4.207.000,00
TOTAL		708.333.834.165,00	684.774.199.352,66	96,67	790.959.745.324,61

Sumber: Data diolah

Realisasi Retribusi Aceh sebesar Rp684.774.199.352,66 atau 96,67% dari anggaran sebesar Rp708.333.834.165,00 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp664.733.248.238,34 dari yang dianggarkan sebesar Rp690.325.714.697,00. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 bahwa Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Realisasi Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp664.733.248.238,34 atau 96,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp690.325.714.697,00 terdiri dari:
 - Setoran Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp398.362.000,00;
 - Setoran Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya pada BLUD Rumah Sakit Dr. Zainoel Abidin Rp608.486.097.161,25;
 - Setoran Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya pada BLUD Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp28.019.639.400,09; dan
 - Setoran Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya pada BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp27.829.149.677,00.
- Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp20.040.951.114,32 dari yang dianggarkan sebesar Rp17.908.119.468,00 di antaranya:
 - Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp682.000,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan pada Dinas Perhubungan Aceh merupakan retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang terdapat pada terminal Aceh Tamiang;

- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila terealisasi sebesar Rp1.126.574.353,15 dari anggaran sebesar Rp1.686.450.000,00 atau sebesar 66,80% dengan rincian:

Tabel 47. Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	4.800.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	235.894.200,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	600.000,00
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	17.300.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	800.000,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	76.150.000,00
7	Dinas Peternakan Aceh	8.175.500,00
8	Sekretariat Daerah Aceh	394.222.000,00
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	1.250.000,00
10	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	228.441.000,00
11	Dinas Syariah Islam Aceh	157.141.653,15
12	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	1.800.000,00
JUMLAH		1.126.574.353,15

Sumber : Data diolah

1. Dinas Pendidikan Aceh, Realisasi retribusi daerah terdiri dari, realisasi retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp4.800.000,00 atau 6,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.700.000,00.
2. Dinas Kesehatan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp235.894.200,00 merupakan pendapatan dari Sewa tempat pada UPTD Bapelkes Aceh.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp600.000,00 merupakan pendapatan dari Sewa Kamar di UPTD Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan di Saree Aceh Besar.
4. Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp17.300.000,00 yang merupakan pendapatan dari Penyewaan Mess Pemuda.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp800.000,00 merupakan Penyewaan Kamar di Mess PPN Idi.
6. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp76.150.000,00 merupakan Penyewaan Kamar Asrama Unit Diklat Sare, Mess UPTD BPTPHP Ulee Kareng Banda Aceh.
7. Dinas Peternakan Aceh Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp8.175.500,00 merupakan Penyewaan Kamar di UPTD BIB Saree.
8. Sekretariat Daerah Aceh Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp394.222.000,00 merupakan Penyewaan Mess/Kamar Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp1.250.000,00 merupakan Penyewaan Mess/kamar di Asrama Diklat.

10. Badan Penghubung Pemerintah Aceh Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp228.441.000,00 merupakan Sewa Mess/Hotel Kutaradja.
 11. Dinas Syariat Islam Aceh Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp157.141.653,15 merupakan Penyewaan Penginapan di LPTQ Aceh.
 12. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp1.800.000,00 merupakan Penyewaan Kamar Mess MPU Aceh.
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp3.381.842.596,40 dari anggaran sebesar Rp2.600.000.000,00 atau sebesar 130,07% pada Dinas Perhubungan Aceh merupakan retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang terdiri dari pas pintu masuk, pas dermaga, jasa timbang kendaraan, jasa penitipan kendaraan dalam hanggar, jasa penitipan kendaraan luar hanggar dan jasa sandar, labuh dan istirahat kapal serta sewa ruangan dan tempat kegiatan usaha sebesar Rp3.381.842.596,40 pada Pelabuhan Ulee Lheue, Lamteng, Kuala Bubon, Labuhan Haji dan Sinabang;
- d. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya terealisasi sebesar Rp1.749.830.205,00 jauh melampaui dari target anggaran sebesar Rp967.235.000,00 atau 180,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48. Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	173.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	1.171.884.391,00
3	Rumah Sakit Jiwa	5.500.000,00
4	Rumah Sakit Ibu dan Anak	20.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	10.000.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	7.350.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	7.900.000,00
8	Dinas Sosial Aceh	5.100.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	5.000.000,00
10	Dinas Pangan Aceh	15.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	8.000.000,00
12	Dinas Perhubungan Aceh	36.237.800,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	3.000.000,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	37.085.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	10.000.000,00
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	36.135.000,00
17	Dinas Peternakan Aceh	3.000.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	7.500.000,00
19	Sekretariat Daerah Aceh	39.000.000,00
20	Sekretariat DPRA	18.465.000,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	13.302.014,00
22	Badan Kepegawaian Aceh	4.345.000,00
23	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	105.000.000,00
24	Dinas Syariat Islam Aceh	8.026.000,00
JUMLAH		1.749.830.205,00

Sumber : Data diolah

- e. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

teralisasi sebesar Rp197.477.500,00 dari target anggaran sebesar Rp230.000.000,00 atau 85,86% pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;

- f. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan terealisasi sebesar Rp1.024.603.430,00 melampaui dari target anggaran sebesar Rp986.535.392,00 atau sebesar 103,86% pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin dan Dinas Syariat Islam Aceh;
- g. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp1.551.414.300,00 dari target anggaran sebesar Rp1.576.000.000,00 atau 98,44% pada Dinas Kelautan dan perikanan Aceh;
- h. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terealisasi sebesar Rp1.873.623.010,00 dari target anggaran sebesar Rp1.701.980.000,00 atau 110,08% pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- i. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp5.465.536.205,00 dari target anggaran sebesar Rp4.423.971.680,00 atau sebesar 123,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49. Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	SKPA	Nilai
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	1.600.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	1.444.152.004,00
3	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	297.820.439,00
4	Dinas Peternakan Aceh	1.347.487.000,00
5	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh	868.000.000,00
6	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh	90.333.000,00
7	Dinas Syariat Islam Aceh	1.416.143.762,00
JUMLAH		5.465.536.205,00

Sumber : Data diolah

- j. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp3.669.367.514,77 dari target anggaran sebesar Rp3.735.947.396,00 atau sebesar 98,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50. Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	33.600.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	124.724.000,00
3	Rumah Sakit Jiwa	17.280.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	249.227.462,00
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	18.187.946,00
6	Dinas Pangan Aceh	28.225.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	141.681.000,00
8	Dinas Perhubungan Aceh	68.344.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	7.500.000,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	5.600.000,00
11	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh	285.700.000,00
12	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	176.100.000,00
13	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	1.848.816.705,00
14	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	261.942.401,77
15	Dinas Peternakan Aceh	23.395.000,00
16	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh	60.307.500,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh	16.096.500,00

No	SKPA	Nilai
18	Sekretariat Daerah Aceh	60.500.000,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	4.900.000,00
20	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	154.000.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh	18.000.000,00
22	Dinas Syariat Islam Aceh	29.500.000,00
23	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	35.740.000,00
JUMLAH		3.669.367.514,77

Sumber: Data diolah

- k. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 disebabkan pada Tahun 2025 tidak ada perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mengajukan izin kerja di Provinsi Aceh melalui website, ada Qanun Retribusi di kabupaten/kota mengatur perusahaan yang mempekerjakan TKA di Kab/Kota, dikenakan retribusi Kab/Kota, dan TKA yang bekerja pada 2 (dua) Provinsi dikenakan kompensasi PNPB di Kementerian Ketenagakerjaan.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal

Realisasi 2025

Realisasi 2024

Rp270.253.493.775,00

Rp267.660.903.349,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal adalah kekayaan Pemerintah Aceh yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang dan pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh. Pada TA 2025 Pemerintah Aceh menganggarkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan sebesar Rp267.905.085.228,00 dengan realisasi sebesar Rp270.253.493.775,00 atau 100,88% dari anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan meningkat dari TA 2024 sebesar Rp267.660.903.349,00. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan disajikan sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Bank Aceh Syariah		
	- Setoran Dividen	215.416.778.183,00	213.435.702.809,00
	- Dana Pembangunan	26.549.774.415,00	26.134.742.497,00
2	BPRS Mustaqim	1.580.109.813,00	1.405.052.571,00
3	PT Pembangunan Aceh	26.706.831.364,00	26.685.405.472,00
Jumlah		270.253.493.775,00	267.660.903.349,00

Sumber: Data diolah

1. Bank Aceh Syariah
Pada TA 2025, Pemerintah Aceh menerima setoran dividen sebesar Rp215.416.778.183,00 dan Dana Pembangunan sebesar Rp26.549.774.415,00, meningkat jika dibandingkan dividen TA 2024 sebesar Rp213.435.702.809,00 dan Dana Pembangunan sebesar Rp26.134.742.497,00.
2. BPRS Mustaqim
Pada TA 2025 Pemerintah Aceh menerima setoran dividen sebesar Rp1.580.109.813,00 meningkat jika dibandingkan dividen TA 2024 sebesar Rp1.405.052.571,00.

3. PT Pembangunan Aceh

Pada TA 2025 Pemerintah Aceh menerima setoran dividen sebesar Rp26.706.831.364,00 meningkat jika dibandingkan dividen TA 2024 sebesar Rp26.685.405.472,00.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah

Realisasi 2025
Rp258.727.952.896,49

Realisasi 2024
Rp236.443.432.921,41

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah merupakan Pendapatan Asli Aceh selain Pajak Aceh, Retribusi Aceh, dan Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah TA 2025 sebesar Rp258.727.952.896,49 atau 144,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp178.532.808.280,00 dan TA 2024 sebesar Rp236.443.432.921,41, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	364.296.000,00	-	1.914.802.500,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	736.224.165,00	1.095.101.973,00	148,75	960.859.500,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	499.880.000,00	906.610.204,00	181,37	116.300.530,00
4	Jasa Giro	1.989.000.000,00	1.144.026.649,45	57,52	5.302.902.977,34
5	Pendapatan Bunga	61.000.000.000,00	76.584.702.616,53	125,55	53.169.660.971,15
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	984.232.301,00	-	2.841.961.161,91
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	6.723.655.666,00	-	1.114.708.660,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	9.744.120,00	-	24.482.440,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	3.333.982.049,00	60.546.767.341,60	1.816,05	60.907.416.977,27
10	Pendapatan BLUD	19.473.722.066,00	17.185.135.088,84	88,25	14.555.721.247,91
11	Pendapatan Zakat Infak Shadaqah dan Wakaf	91.500.000.000,00	79.856.905.936,07	87,28	95.534.615.955,83
12	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	13.326.775.000,00	-	-
Jumlah		178.532.808.280,00	258.727.952.896,49	144,92	236.443.432.921,41

Sumber: Data diolah

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp364.296.000,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, merupakan hasil penjualan Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan hasil penjualan 2 unit berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 000.232/1038/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 Tentang Persetujuan dan Penetapan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa Lelang untuk Pimpinan DPRA dan bukti penerimaan rekening koran Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk/Type Lexus RX300 Tahun 2019 BL 11 disetor sebesar Rp177.868.000,00 Tanggal 13 November 2025
 - b. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk/Type Lexus RX300 Tahun 2019 BL 13 disetor sebesar Rp186.428.000,00 Tanggal 21 Oktober 2025

Dari hasil Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa Lelang untuk Pimpinan DPRA sebesar Rp364.296.000,00 yang disetor ke kas daerah melalui rekening 010.01.02.502015-0 An. BPKA BPNR.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.095.101.973,00 atau 148,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp736.224.165,00 yaitu:
 - a. Hasil Sewa Tanah dan Bangunan untuk Yayasan Teungku Fakinah pertahunnya sebesar Rp771.071.400,00 dan cicilan masih disetor sampai dengan Tahun 2030 sesuai Perjanjian Sewa Nomor 17/PKS/2025 Tanggal 6 Oktober 2025;
 - b. Hasil Sewa Tanah untuk Yayasan Malahayati Aceh Pertahunnya sebesar Rp142.435.665,00 dan cicilan masih disetor sampai dengan Tahun 2030 sesuai Perjanjian Sewa Nomor 06/PKS/2025 Tanggal 9 April 2025;
 - c. Hasil Pemanfaatan BMD dari Sewa Tanah di Jalan Teuku Umar (Samping Taman Budaya) kepada Gita Phonna Sari Tahun sebesar Rp172.495.478,00 dan cicilan masih disetor sampai dengan Tahun 2029 sesuai Perjanjian Sewa Nomor 71/PKS/2024 Tanggal 16 Desember 2024;
 - d. Hasil Pemanfaatan BMD dengan sewa Kepada CV. Joel Furniture Pertahunnya sebesar Rp9.099.430,00 dengan cicilan masih disetor sampai Tahun 2026 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 67/PKS/2024 Tanggal 5 Juli 2024;
3. Hasil Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp906.610.204,00 atau 181,37%, yang dianggarkan sebesar Rp499.880.000,00 yaitu Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh merupakan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Hasil Kerja sama Daerah

No	Uraian	Realisasi	Keterangan
1	Kontribusi Rotan	8.750.000,00	
2	Kontribusi Sawit	73.627.180,00	
3	Kontribusi Sewa	804.880.000,00	Pembayaran kegiatan RKT Tahun 2023 s.d 2025 PKS antara UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan dan PT PLN (Persero) UIP Sumbagut Medan
4	Kontribusi Ekowisata	19.353.024,00	Kontribusi Ekowisata dari KPH Wilayah VI an. BUMK Bur Telege Hakim Bale Bujang
Total		906.610.204,00	

Sumber : Data diolah

4. Jasa Giro terealisasi sebesar Rp1.144.026.649,45 atau 57,52%, yang dianggarkan sebesar Rp1.989.000.000,00 yang terdiri dari:
 - a) Jasa Giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp1.094.554.322,99 atau 55,03% yang dianggarkan sebesar Rp1.989.000.000,00.
 - b) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS terealisasi sebesar Rp49.472.326,46 yang sebelumnya tidak dianggarkan.
5. Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp76.584.702.616,53 dari yang dianggarkan sebesar Rp61.000.000.000,00, merupakan remunerasi TDF pada rekening TDF-DBH sebesar Rp47.552.057,00; bagi hasil bunga deposito sebesar Rp76.537.150.559,53.
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp984.232.301,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan dengan rincian:

Tabel 54. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	282.797.796,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	674.100,00
3	Rumah Sakit Jiwa	7.558.334,00
4	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	19.513.830,00
5	Dinas Pengairan Aceh	110.409.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	264.019.452,00
7	Dinas Perhubungan Aceh	14.851.733,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	3.537.000,00
9	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	2.156.000,00
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh	17.952.030,00
11	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	245.962.582,00
12	Dinas Syariah Islam Aceh	14.800.444,00
JUMLAH		984.232.301,00

Sumber : Data diolah

7. Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp6.723.655.666,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan dengan rincian terdiri dari:
 - a) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp6.363.920.834,00.
 - b) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp9.952.700,00.
 - c) Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi sebesar Rp349.782.132,00.
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp9.744.120,00 pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh yang sebelumnya tidak dianggarkan.
9. Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp60.546.767.341,60 atau 1.816,05% merupakan Pengembalian dari temuan pemeriksaan yang disetor pada tahun 2025, melampaui yang dianggarkan sebesar Rp3.333.982.049,00 yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan dari Pengembalian Belanja Operasi sebesar Rp54.790.748.285,21;
 - b) Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal sebesar Rp5.756.019.056,39.
10. Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp17.185.135.088,84 atau 88,25%, yang dianggarkan sebesar Rp19.473.722.066,00, terdiri dari Pendapatan BLUD sebesar Rp876.578.391,36, Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp4.554.986.232,10, Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp11.344.688.616,64, dan Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp408.881.848,74. Rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Rincian Pendapatan BLUD

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Pendapatan BLUD Dinas Pendidikan Aceh	6.310.773.266,00	4.554.986.232,10	72,18	4.435.676.990,59
2	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin	12.378.028.800,00	12.114.577.688,80	97,87	8.874.209.838,03
3	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa	660.920.000,00	402.970.897,63	60,97	788.765.098,64
4	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	124.000.000,00	112.600.270,31	90,81	457.069.320,65
Total		19.473.722.066,00	17.185.135.088,84	88,25	14.555.721.247,91

Sumber: Data diolah



11. Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf terealisasi sebesar Rp79.856.905.936,07 atau 87,28%, dari yang dianggarkan sebesar Rp91.500.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Zakat sebesar Rp38.092.181.355,16 dan Pendapatan Infak sebesar Rp41.764.724.580,91.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi 2025
Rp7.963.190.526.056,00

Realisasi 2024
Rp8.167.778.560.238,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBA antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan					
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	306.356.158.000,00	331.492.150.000,00	108,20	384.647.924.000,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.208.557.679.000,00	2.250.706.483.460,00	101,91	2.310.752.304.717,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	122.745.459.000,00	109.854.191.253,00	89,50	347.597.422.745,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	988.233.352.000,00	929.150.102.943,00	94,02	829.938.391.776,00
Jumlah		3.625.892.648.000,00	3.621.202.927.656,00	99,87	3.872.936.043.238,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
1	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh	4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	100,00	4.276.993.035.000,00
2	Insentif Fiskal	-	-	-	17.849.482.000,00
3	Bantuan Keuangan	26.774.964.200,00	32.404.958.400,00	121,03	-
Jumlah		4.336.357.604.200,00	4.341.987.598.400,00	100,13	4.294.842.517.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer		7.962.250.252.200,00	7.963.190.526.056,00	100,01	8.167.778.560.238,00

Sumber: Data diolah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp3.621.202.927.656,00 atau sebesar 99,87% dari target yang direncanakan sebesar Rp3.625.892.648.000,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil

No	Rincian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	44.328.443.000,00	51.421.189.000,00	116,00	48.883.335.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	86.224.031.000,00	85.954.254.000,00	99,69	86.254.506.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	1.966.753.000,00	-	1.205.087.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.275.065.000,00	6.447.864.000,00	102,75	2.580.015.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	59.036.457.000,00	59.036.457.000,00	100,00	32.042.775.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	40.999.311.000,00	47.321.784.000,00	115,42	39.024.916.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	168.803.000,00	168.803.000,00	100,00	243.136.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	1.760.159.000,00	-	14.639.958.800,00



No	Rincian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	56.333.221.000,00	64.409.254.000,00	114,34	129.473.490.200,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	104.933.000,00	104.935.000,00	100,00	29.530.543.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	882.813.000,00	897.617.000,00	101,68	770.162.000,00
12	DBH Sawit	12.003.081.000,00	12.003.081.000,00	100,00	-
Jumlah		306.356.158.000,00	331.492.150.000,00	108,20	384.647.924.000,00

Sumber: Data di olah

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 sebesar Rp2.250.706.483.460,00 atau 101,91% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.208.557.679.000,00 yang terdiri dari:

1. DAU terealisasi sebesar Rp1.841.936.132.511,00 atau 106,14% dari target yang direncanakan sebesar Rp1.735.433.014.000,00.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terealisasi sebesar Rp121.050.651.949,00 atau 65,29% dari target yang direncanakan sebesar Rp185.404.966.000,00.
3. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan terealisasi sebesar Rp180.998.240.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan sebesar Rp180.998.240.000,00.
4. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp106.721.459.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan sebesar Rp106.721.459.000,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 sebesar Rp109.854.191.253,00 atau 89,50% dari target yang direncanakan sebesar Rp122.745.459.000,00 terdiri dari:

Tabel 58. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

No	Rincian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA	4.941.974.000,00	4.936.069.416,00	99,88	99.682.282.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB	444.249.000,00	422.121.214,00	95,02	11.299.386.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK	70.455.546.000,00	69.884.790.855,00	99,19	138.582.957.750,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Perpustakaan Daerah	498.828.000,00	493.802.370,00	98,99	-
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	6.240.068.475,00
6	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	-	-	1.279.400.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	5.379.003.054,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-	-	12.563.749.703,00



No	Rincian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	3.597.301.501,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	-	-	8.831.735.499,00
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	-	-	15.820.937.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	-	-	749.214.520,00
13	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	-	-	-	14.226.802.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-	-	23.736.572.500,00
15	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	-	-	-	5.608.012.743,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	46.404.862.000,00	34.117.407.398,00	73,52	-
Jumlah		122.745.459.000,00	109.854.191.253,00	89,50	347.597.422.745,00

Sumber: Data diolah

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 tidak mencapai target yang direncanakan karena penyaluran DAK Fisik dilakukan sebesar total nilai kontrak yang diinput dalam aplikasi OM-SPAN Dirjen Perbendaharaan Keuangan.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 sebesar Rp929.150.102.943,00 atau 94,02% dari target yang direncanakan sebesar Rp988.233.352.000,00 terdiri dari:

Tabel 59. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Rincian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	338.667.219.000,00	338.516.544.839,00	99,96	336.118.407.108,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.370.500.000,00	10.370.500.000,00	100,00	8.430.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	613.885.351.000,00	558.968.722.800,00	91,05	454.767.385.500,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.844.394.000,00	1.986.500.000,00	33,99	7.462.919.964,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.060.721.000,00	5.666.874.300,00	111,98	3.456.450.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.484.866.000,00	3.471.811.365,00	99,63	3.746.211.479,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.782.350.000,00	1.694.788.420,00	95,09	1.908.404.557,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.350.811.000,00	6.859.532.667,00	93,32	2.580.025.657,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	-
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	-	6.722.430.210,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	-	-	-	1.597.506.821,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	328.348.552,00	81,95	298.650.480,00
13	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-	-	-	2.850.000.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	186.480.000,00	186.480.000,00	100,00	-
Jumlah		988.233.352.000,00	929.150.102.943,00	94,02	829.938.391.776,00

Sumber: Data diolah



Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 tidak mencapai target yang direncanakan karena Sisa DAK Non Fisik TA 2024 menjadi pengurang dan dianggarkan kembali menjadi pagu TA 2025 sesuai pagu TKDD atau rincian APBN.

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2025 sebesar Rp4.309.582.640.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.589.605.000,00 dari TA 2024 sebesar Rp4.276.993.035.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60. Rincian Dana Otonomi Khusus

No	Rincian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	-	-	-	4.276.993.035.000,00
2	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	1.263.109.972.990,71	1.428.792.959.960,00	113,12	-
3	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	463.078.368.268,37	437.618.514.389,00	94,50	-
4	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan	59.023.749.650,00	83.964.058.654,00	142,25	-
5	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan	1.376.156.131.323,38	1.262.516.245.643,00	91,74	-
6	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial	101.308.363.390,24	95.183.608.740,00	93,95	-
7	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan	800.503.216.783,90	767.455.222.247,00	95,87	-
8	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh	187.439.264.652,40	174.561.365.045,00	93,13	-
9	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian	58.963.572.941,00	59.490.665.322,00	100,89	-
Jumlah		4.309.582.640.000,00	4.309.582.640.000,00	100,00	4.276.993.035.000,00

Sumber: Data diolah

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp32.404.958.400,00 atau 121,03% dari yang dianggarkan Rp26.774.964.200,00 terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp18.405.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp13.999.958.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

No	Provinsi	Realisasi TA 2025
1	Kalimantan Timur	2.500.000.000,00
2	Sulawesi Utara	2.500.000.000,00
3	Sulawesi Selatan	500.000.000,00
4	Kalimantan Utara	350.000.000,00
5	Maluku Utara	1.000.000.000,00
6	Nusa Tenggara Timur	500.000.000,00
7	Jawa Timur	3.000.000.000,00
8	Banten	1.000.000.000,00
9	DI Yogyakarta	1.000.000.000,00
10	Jambi	170.000.000,00
11	Bengkulu	300.000.000,00
12	Riau	1.000.000.000,00
13	Sulawesi Tenggara	500.000.000,00
14	Sulawesi Tengah	250.000.000,00
15	Kalimantan Tengah	1.000.000.000,00
16	Sulawesi Barat	100.000.000,00
17	Kalimantan Barat	500.000.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	1.000.000.000,00
19	Kepulauan Riau	500.000.000,00
20	Gorontalo	400.000.000,00
21	Maluku	335.000.000,00
Jumlah		18.405.000.000,00

Sumber: Data diolah

**Tabel 62. Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

No	Provinsi	Realisasi TA 2025
1	Kota Pematang	100.000.000,00
2	Kota Bandar Lampung	350.000.000,00
3	Kota Palu	300.000.000,00
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	50.000.000,00
5	Kabupaten Cianjur	100.000.000,00
6	Kabupaten Minahasa Utara	50.000.000,00
7	Kabupaten Mamuju	65.000.000,00
8	Kabupaten Karawang	400.000.000,00
9	Kabupaten Mamasa	15.000.000,00
10	Kota Pekanbaru	1.000.000.000,00
11	Kabupaten Pasangkayu	35.000.000,00
12	Kabupaten Kudus	50.000.000,00
13	Kabupaten Mamuju tengah	35.000.000,00
14	Kabupaten Bungo	50.000.000,00
15	Kabupaten Bengkulu Selatan	50.000.000,00
16	Kabupaten Rejang Lebong	100.000.000,00
17	Kota Batam	2.500.000.000,00
18	Kabupaten Jombang	349.970.000,00
19	Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah	1.300.000.000,00
20	Kabupaten Paser	500.000.000,00
21	Kabupaten Lampung Selatan	300.000.000,00
22	Kota Halmahera Tengah	1.000.000.000,00
23	Kota Tarakan	100.000.000,00
24	Kota Bogor	1.000.000.000,00
25	Kabupaten Muaro Jambi	49.997.100,00
26	Kota Pontianak	50.000.000,00
27	Kota Batu	100.000.000,00
28	Kota Jambi	49.997.100,00
29	Kabupaten Polewali Mandar	50.000.000,00
30	Kabupaten Majene	35.000.000,00
31	Kota Singkawang	35.000.000,00
32	Kota Probolinggo	100.000.000,00
33	Kabupaten Kebumen	100.000.000,00
34	Kabupaten Tanah Laut	250.000.000,00
35	Kabupaten Bangka tengah	50.000.000,00
36	Kota Makassar	500.000.000,00
37	Kota Tomohon	50.000.000,00
38	Kabupaten Halmahera Selatan	500.000.000,00
39	Kabupaten Belitung	100.000.000,00
40	Kabupaten Melawai	50.000.000,00
41	Kabupaten Grobongan	350.000.000,00
42	Kabupaten Tanggerang	400.000.000,00
43	Kabupaten Bojonegoro	500.000.000,00
44	Kabupaten Bangka	100.000.000,00
45	Kabupaten Ogan Komering Ilir	250.000.000,00
46	Kabupaten Barito Timur	50.000.000,00
47	Kabupaten/Kota Lainnya	479.994.200,00
Jumlah		13.999.958.400,00

Sumber: Data diolah

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi 2025
Rp23.334.018.402,55

Realisasi 2024
Rp2.573.582.835,56

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2025 direalisasikan sebesar Rp23.334.018.402,55 atau 105,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.096.400.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.573.582.835,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	2.096.400.000,00	2.351.406.866,00	112,16	2.056.932.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	982.611.536,55	-	516.650.835,56
3	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-
Total		22.096.400.000,00	23.334.018.402,55	105,60	2.573.582.835,56

Sumber: Data diolah

1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri terdiri dari Setoran pengembalian dana PB-PON XXI/2024 Aceh-Sumut Wilayah Aceh sebesar Rp432.918.866,00 yang disetor oleh PB-PON XXI/2024 Aceh-Sumut Wilayah Aceh tanggal 23 Januari 2025 dan Setoran PT Jasa Raharja sebesar Rp1.918.488.000,00.
2. Sumbangan Pihak Ketiga merupakan setoran atas kelebihan pembayaran Retribusi, Setoran oleh wajib pajak atas pembayaran Opsen MBLB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dan setoran atas temuan pemeriksaan.
3. Dana Darurat pada tahap pasca bencana merupakan bantuan Presiden kepada Provinsi Aceh untuk pemulihan sosial, rehabilitasi cepat, bantuan sosial logistik pasca Bencana Hidrometeorologi yang penyalurannya dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Aceh Tahun 2025.

5.1.2. Belanja dan Transfer

Realisasi 2025
Rp10.652.709.341.864,08

Realisasi 2024
Rp11.287.148.887.851,68

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 mencapai Rp10.652.709.341.864,08 atau 95,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.164.156.945.181,00 dan TA 2024 sebesar Rp11.287.155.887.851,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Operasi	8.244.019.010.213,44	7.820.849.998.603,50	94,87	8.209.331.872.526,06
2	Belanja Modal	1.036.272.620.029,32	985.368.226.787,58	95,09	1.244.417.671.176,17
3	Belanja Tak Terduga	80.973.612.274,24	50.320.641.632,00	62,14	19.848.398,45
4	Belanja Transfer	1.802.891.702.664,00	1.796.170.474.841,00	99,63	1.833.379.495.751,00
Jumlah Belanja		11.164.156.945.181,00	10.652.709.341.864,08	95,42	11.287.148.887.851,68

Sumber: Data diolah

**5.1.2.1. Belanja Operasi**

Realisasi 2025
Rp7.820.849.998.603,50

Realisasi 2024
Rp8.209.331.872.526,06

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi TA 2025 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang direalisasikan sebesar Rp7.820.849.998.603,50 atau 94,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.244.019.010.213,44 dan TA 2024 sebesar Rp8.209.331.872.526,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Pegawai	3.510.201.365.904,05	3.383.380.144.754,26	96,39	3.371.575.286.947,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.103.698.646.426,52	3.965.855.346.259,74	96,64	3.727.115.239.159,49
3	Belanja Subsidi	5.023.000.000,00	5.022.985.000,00	100,00	6.386.180.000,00
4	Belanja Hibah	371.650.077.808,87	359.568.508.263,50	96,75	1.017.004.886.266,57
5	Belanja Bantuan Sosial	253.445.920.074,00	107.023.014.326,00	42,23	87.250.280.153,00
Jumlah Belanja Operasi		8.244.019.010.213,44	7.820.849.998.603,50	94,87	8.209.331.872.526,06

Sumber: Data diolah

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi 2025
Rp3.383.380.144.754,26

Realisasi 2024
Rp3.371.575.286.947,00

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRA serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mencapai Rp3.383.380.144.754,26 atau 96,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.510.201.365.904,05 dan TA 2024 sebesar Rp2.650.355.404.617,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Rincian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.171.223.385.774,23	2.111.282.153.344,00	97,24	1.912.695.846.979,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.260.965.885.191,82	1.194.006.100.636,26	94,69	672.893.685.991,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	718.878.095.330,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	59.570.237.090,00	59.552.134.886,00	99,97	49.839.683.382,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	486.881.868,00	406.396.762,00	83,47	110.490.884,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.648.683.240,00	4.638.783.240,00	99,79	3.619.649.064,00
7	Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	-	-	-	2.341.787.000,00
8	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	9.395.557.750,00
9	Belanja Pegawai BOSP	10.850.942.740,00	12.659.880.830,00	116,67	-
10	Belanja Pegawai BLUD	2.455.350.000,00	834.695.056,00	33,99	1.800.490.567,00
Jumlah		3.510.201.365.904,05	3.383.380.144.754,26	96,39	3.371.575.286.947,00

Sumber: Data diolah

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN pada tahun 2025 diakumulasikan ke dalam Belanja Tambahan Penghasilan ASN sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tambahan Penghasilan PNS TA 2025 direalisasikan sebesar Rp1.194.006.100.636,26 merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada setiap PNS berupa berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Pertimbangan Objektif Lainnya dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dinilai dengan tingkat *eselonering*, tingkat kedisiplinan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara.

Dari total Belanja Pegawai, terdapat Belanja Pegawai BLUD TA 2025 sebesar Rp834.695.056,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.800.490.567,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Belanja Pegawai BLUD

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	BLUD Dinas Pendidikan Aceh	1.246.570.000,00	468.456.592,00	37,58	486.710.000,00
2	BLUD Rumah Sakit Jiwa	345.600.000,00	125.967.628,00	36,45	434.193.419,00
3	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	152.500.000,00	135.590.836,00	88,91	725.975.148,00
4	BLUD UPTD Mekanika Pertanian	600.000.000,00	-	-	-
5	BLUD UPTD BTNR Dinas Peternakan	28.720.000,00	28.720.000,00	100,00	81.732.000,00
6	BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman	81.960.000,00	75.960.000,00	92,68	71.880.000,00
Total		2.455.350.000,00	834.695.056,00	33,99	1.800.490.567,00

Sumber: Data diolah

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi 2025
Rp3.965.855.346.259,74

Realisasi 2024
Rp3.727.115.239.159,49

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 mencapai Rp3.965.855.346.259,74 atau 96,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.103.698.646.426,52, dan TA 2024 sebesar Rp3.727.115.239.159,49. dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3**.

Dari total Belanja Barang dan Jasa, terdapat Barang Jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp701.754.793.977,58 dan TA 2024 sebesar Rp794.579.465.753,11 dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 4**.

Selain Belanja Barang dan Jasa tersebut terdapat Belanja BLUD SMKN TA 2023. Pemerintah Aceh pada tanggal 8 Februari 2023 menetapkan 68 SMK menjadi BLUD dengan SK Gubernur Nomor 421.3/702/2023. Berdasarkan mutasi rekening koran pada 68 BLUD SMKN realisasi Belanja BLUD SMKN sebesar Rp4.563.069.620,00, dapat lihat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Realisasi 2025
Rp5.022.985.000,00

Realisasi 2024
Rp6.386.180.000,00

Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Realisasi Belanja Subsidi TA 2025 mencapai Rp5.022.985.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 5.023.000.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp6.386.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 68. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi**

No	Rincian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	5.023.000.000,00	5.022.985.000,00	100	6.386.180.000,00
Jumlah		5.023.000.000,00	5.022.985.000,00	100	6.386.180.000,00

Sumber: Data diolah

Belanja Subsidi direalisasikan pada Dinas Pangan sebesar Rp900.000.000,00 yaitu Subsidi Gelar Pangan Murah dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp4.122.985.000,00 melalui pelaksanaan operasi pasar murah.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi 2025
Rp359.568.508.263,50

Realisasi 2024
Rp1.017.004.886.266,57

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 mencapai Rp359.568.508.263,50 atau 96,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp371.650.077.808,87 dan TA 2024 sebesar Rp1.017.004.886.266,57.

Tabel 69. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Hibah Uang	126.332.288.000,00	125.263.891.839,00	99,15	685.410.359.986,00
Hibah Barang	245.317.789.808,87	234.304.616.424,50	95,51	331.594.526.280,57
Jumlah	371.650.077.808,87	359.568.508.263,50	96,75	1.017.004.886.266,57

Sumber: Data diolah

Belanja Hibah dalam bentuk uang TA 2025 terealisasi sebesar Rp125.263.891.839,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan hibah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut:

Tabel 70. Rincian Anggaran dan Realisasi Hibah dalam Bentuk Uang

No	SKPA	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Dinas Pendidikan Aceh	54.974.228.000,00	54.744.801.460,00	99,58	57.248.870.396,00
2	Dinas Sosial Aceh	4.617.600.000,00	4.617.600.000,00	100,00	4.830.000.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	36.000.000.000,00	35.161.030.379,00	97,67	433.041.089.630,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	29.340.460.000,00	29.340.460.000,00	100,00	188.890.399.960,00
Jumlah		126.332.288.000,00	125.263.891.839,00	99,15	685.410.359.986,00

Sumber: Data diolah

Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 71. Daftar Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang

No	SKPA	Uraian	Keputusan	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	Hibah Dana BOS Satdikmen Swasta	Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 8/P/2024 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan	44.475.773.460,00



No	SKPA	Uraian	Keputusan	Nilai
		Hibah Dana BOS Satdiksus Swasta	Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025	10.269.028.000,00
2	Dinas Sosial Aceh	Hibah Uang Permakanan Panti Anak dan Panti Lanjut Usia	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.9.3/625/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Uang dan Pemakanan Panti Anak dan Pemakanan Panti Lanjut Usia Di Kabupaten/Kota Se-Aceh Tahun 2025	4.617.600.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Bantuan Hibah kepada Komisi Penyiaran dan Informasi Aceh (KPIA)	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/610/2025 tanggal 14 Maret 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2025	1.400.000.000,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah Kepada PRAMUKA	Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 400.4/612/2025 Tanggal 17 Maret 2025 Tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 400.4/1374/2025 Tanggal 17 November 2025 Tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2025	5.997.552.232,00
		Hibah Kepada KONI	Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 400.4/612/2025 Tanggal 17 Maret 2025 Tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 400.4/1374/2025 Tanggal 17 November 2025 Tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2026	29.163.478.147,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Hibah Kepada Parpol	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 200.2/1020/2025 tentang Penetapan Alokasi Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2025 (DAU).	29.340.460.000,00
Jumlah				125.263.891.839,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Selain itu, Belanja Hibah juga disalurkan dalam bentuk Barang Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp234.304.616.424,50. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan hibah dalam bentuk barang/uang adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Rincian Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Barang

No	SKPA	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	1.388.055.000,00	1.388.055.000,00	100,00	-
2	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	919.699.000,00	919.699.000,00	100,00	-
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	91.421.703.870,00	85.524.635.985,00	93,55	156.040.148.688,62
4	Dinas Peternakan Aceh	1.527.900.000,00	1.527.900.000,00	100,00	-
5	Dinas Pangan Aceh	1.333.221.206,43	1.333.221.206,43	100,00	238.853.306,95
6	Dinas Pendidikan Aceh	1.074.632.393,00	1.074.632.393,00	100,00	1.146.524.300,00
7	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	141.602.201.239,43	136.486.095.740,06	-	166.791.579.385,00
8	Dinas Syariat Islam Aceh	182.710.000,01	182.710.000,01	100,00	191.735.000,00
9	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	857.130.600,00	857.130.600,00	100,00	-
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	5.010.536.500,00	5.010.536.500,00	100,00	7.185.685.600,00
Jumlah		245.317.789.808,87	234.304.616.424,50	95,51	331.594.526.280,57

Sumber: Data diolah

Rincian pada **Lampiran 6**.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi 2025
Rp107.023.014.326,00

Realisasi 2024
Rp87.250.280.153,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 mencapai Rp107.023.014.326,00 atau 42,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp253.445.920.074,00 dan TA 2024 mencapai Rp87.250.280.153,00. Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakat antara lain anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak yatim korban kebakaran rumah, yang terdiri dari:

Tabel 73. Rincian Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Bantuan Sosial Uang	253.445.920.074,00	107.023.014.326,00	42,23	87.250.280.153,00
Jumlah	253.445.920.074,00	107.023.014.326,00	42,23	87.250.280.153,00

Sumber: Data diolah

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang TA 2025 terealisasi sebesar Rp107.023.014.326,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk uang adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

No	SKPA	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Sekretariat Baitul Mal Aceh	253.445.920.074,00	107.023.014.326,00	42,23	87.250.280.153,00
	Jumlah	253.445.920.074,00	107.023.014.326,00	42,23	87.250.280.153,00

Sumber: Data diolah

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Uang terdapat pada Sekretariat Baitul Mal Aceh sebesar Rp107.023.014.326,00 yang terdiri dari Sumber Zakat sebesar Rp57.360.919.761,00 dan Sumber Infak sebesar Rp49.662.094.565,00 dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/VIII/2025 Tentang Perubahan atas keputusan Nomor 02/KPTS/IV/2025 Tentang Penetapan Kegiatan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2025 dan Keputusan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 16/VIII/2025 Tentang Perubahan atas keputusan Nomor 06/KEPBAN-BMA/II/2025 Tentang Rincian Anggaran Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2025.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi 2025
Rp985.368.226.787,58

Realisasi 2024
Rp1.244.417.671.176,17

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Aceh yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Tanah	6.478.007.085,00	4.601.695.429,00	71,04	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	557.606.737.095,42	547.528.521.588,38	98,19	409.877.240.494,06
3	Belanja Gedung dan Bangunan	249.677.787.580,90	235.454.381.597,20	94,30	325.817.680.305,94
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	117.179.771.878,00	107.640.896.800,00	91,86	402.230.663.576,17
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	102.489.266.855,00	87.317.673.673,00	85,20	83.856.301.999,00
6	Belanja Aset Lainnya	2.841.049.535,00	2.825.057.700,00	99,44	22.635.784.801,00
	Jumlah Belanja Modal	1.036.272.620.029,32	985.368.226.787,58	95,09	1.244.417.671.176,17

Sumber: Data diolah

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi 2025
Rp4.601.695.429,00

Realisasi 2024
Rp0,00

Belanja Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Belanja Tanah TA 2025 digunakan untuk pengadaan tanah persil dan tanah lapangan. Realisasi Belanja Tanah TA 2025 mencapai Rp4.601.695.429,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.478.007.085,00.

Rincian atas Belanja Modal Tanah dijelaskan pada Aset Tetap Tanah di Neraca.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi 2025
Rp547.528.521.588,38

Realisasi 2024
Rp409.877.240.494,06

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 mencapai Rp547.528.521.588,38 atau 98,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp557.606.737.095,42 dan TA 2024 mencapai Rp409.877.240.494,06, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 7**.

Rincian atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin dijelaskan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi 2025
Rp 235.454.381.597,20

Realisasi 2024
Rp325.817.680.305,94

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	248.485.455.900,90	234.300.698.286,20	94,29	324.725.107.025,94
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	398.797.000,00	398.797.000,00	100,00	499.669.000,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	592.904.280,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	793.534.680,00	754.886.311,00	95,13	-
Jumlah		249.677.787.580,90	235.454.381.597,20	94,30	325.817.680.305,94

Sumber: Data diolah

Rincian atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan dijelaskan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Neraca.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi 2025
Rp 107.640.896.800,00

Realisasi 2024
Rp 402.230.663.576,17

Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telepon, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Modal Jalan	53.909.235.858,00	45.222.015.838,00	83,89	257.051.868.599,64
2	Belanja Modal Jembatan	6.761.351.356,00	6.756.745.058,00	99,93	34.344.059.432,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.073.962.856,00	2.744.946.950,00	89,30	27.384.560.761,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	34.298.320.804,00	34.221.302.200,00	99,78	73.436.972.110,53
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	359.640.550,00	358.790.650,00	99,76	337.907.903,00
6	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	132.292.464,00	132.292.464,00	100,00	-
7	Belanja Modal Instalasi Pengaman	-	-	-	451.129.580,00
8	Belanja Modal Instalasi Lain	17.812.023.990,00	17.371.915.140,00	97,53	9.000.545.760,00
9	Belanja Modal Jaringan Listrik	832.944.000,00	832.888.500,00	99,99	-
10	Belanja Modal Jaringan Gas	-	-	-	223.619.430,00
Jumlah		117.179.771.878,00	107.640.896.800,00	91,86	402.230.663.576,17

Sumber: Data diolah

Rincian atas Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dijelaskan pada Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi di Neraca.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi 2025
Rp 87.317.673.673,00

Realisasi 2024
Rp 83.856.301.999,00

Belanja Aset Tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan, dan tanaman, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.004.425.000,00	1.000.031.480,00	99,56	14.455.182.250,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	9.963.000,00	9.963.000,00	100,00	1.040.000,00
3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	5.218.430.000,00	5.203.988.200,00	99,72	99.950.000,00
4	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	152.250.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	66.827.109.210,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	69.687.887.460,00	74.666.754.673,00	107,14	-
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	26.568.561.395,00	6.436.936.320,00	24,23	2.320.770.539,00
Jumlah		102.489.266.855,00	87.317.673.673,00	85,20	83.856.301.999,00

Sumber: Data diolah

Rincian atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dijelaskan pada Aset Tetap Lainnya di Neraca.

5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya Realisasi 2025 Rp2.825.057.700,00 Realisasi 2024 Rp22.635.784.801,00

Belanja aset lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk mendapatkan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.841.049.535,00	2.825.057.700,00	99,44	516.011.420,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	-	-	-	22.119.773.381,00
Jumlah		2.841.049.535,00	2.825.057.700,00	99,44	22.635.784.801,00

Sumber: Data diolah

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga Realisasi 2025 Rp 50.320.641.632,00 Realisasi 2024 Rp19.848.398,45

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada TA 2025 Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar Rp50.320.641.632,00 atau 62,14% yang dianggarkan sebesar Rp80.973.612.274,24 terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Penerimaan Tahun Anggaran 2024 atas nama CV. Zia Pratama sebesar Rp102.671.394,00. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1371/2025 Tanggal 22 Oktober 2025.
2. Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanggulangan Penanganan Banjir Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 sesuai Surat Gubernur Aceh Nomor 900.1/669 Tanggal 10 Januari 2026 Perihal Laporan Bantuan Keuangan Khusus untuk Masyarakat terdampak Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebesar Rp50.217.970.238,00 pada SKPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

No	SKPA	Realisasi TA 2025
1	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	466.945.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Aceh II	1.769.668.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahap III	2.720.945.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahap IV	265.790.000,00
5	Dinas Kesehatan	166.547.512,00
6	Dinas Kesehatan Tahap II	1.282.014.266,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	574.765.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahap II	95.085.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahap III	328.300.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.566.045,00
11	Dinas Pengairan	372.824.000,00
12	Dinas Pengairan Aceh Tahap II	272.528.000,00
13	Dinas Perhubungan Aceh	35.595.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	790.794.865,00
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahap II	75.000.000,00
16	Dinas Peternakan Aceh	6.488.750,00
17	Dinas Sosial Aceh	19.943.974.800,00
18	Dinas Sosial Aceh Tahap II	20.452.900.000,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	278.784.000,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Tahap II	114.455.000,00
Jumlah		50.217.970.238,00

Sumber: Data diolah

- a) Badan Penanggulangan Bencana Aceh
Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5.223.348.000,00 atau 48,09% dari anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan dan Biaya (RKB) sebesar Rp10.862.270.000,00 yang diperuntukkan untuk sewa alat berat, mobilisasi dan demobilisasi, uang makan dan uang lelah serta belanja bahan bakar minyak alat berat.
- b) Dinas Kesehatan
Realisasi BTT sebesar Rp1.448.561.778,00 dengan rincian Tahap I sebesar Rp166.547.512,00 yang digunakan untuk pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke Kabupaten/Kota terdampak bencana dan untuk biaya operasional tim posko *Health Emergency Operations Centre* (HEOC) atau Pusat Operasi Kedaruratan Kesehatan yang fungsi utamanya mengkoordinasikan respons darurat kesehatan dan diaktifkan saat kondisi darurat untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan cepat dan terkoordinasi. Realisasi Tahap II sebesar Rp1.282.014.266,00 yang digunakan untuk:
- (1) Pelayanan kesehatan dalam tanggap darurat kebencanaan sebesar Rp1.004.820.000,00;
 - (2) Penerimaan, pencatatan, persiapan pendistribusian dan pendistribusian obat-obatan dan perbekalan kesehatan ke Kabupaten/Kota terdampak sebesar Rp159.327.800,00; dan
 - (3) Aktivasi dan pendampingan HEOC Kabupaten/Kota sebesar Rp117.866.466,00.
- c) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Realisasi BTT sebesar Rp998.150.000,00 digunakan untuk belanja barang pakai habis berupa pembelian bahan bakar minyak dan biaya operasional pada Posko Darurat Bencana di Kantor Gubernur dan Landasan Udara Sultan Iskandar Muda (Lanud SIM) sebesar Rp53.100.000,00, untuk belanja jasa kantor berupa uang lelah Tim Tanggap Darurat sebesar Rp144.750.000,00 dan Belanja Modal Alat Komunikasi berupa HP Satelit sebanyak 17 unit sebesar Rp800.300.000,00.
- d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Realisasi BTT sebesar Rp204.566.045,00 yang digunakan untuk biaya operasional yaitu uang lelah, uang makan, sewa rumah, sewa kendaraan dan bahan bakar minyak kendaraan operasional.
- e) Dinas Pengairan
Realisasi BTT sebesar Rp645.352.000,00 dengan rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahap I dalam rangka Penanggulangan Penanganan Banjir Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 Rp372.824.000,00 pada Dinas Pengairan Aceh terdiri dari Pekerjaan Pengalihan Sementara Saluran Primer D.I Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh CV. Khalid Karya Group sebesar Rp256.500.000,00 dan Pekerjaan Perbaikan Tanggul dan Perbaikan Sedimen Saluran Primer D.I Krueng Nalan Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh CV. Peusangan Bumi Agung sebesar Rp116.324.000,00. Selanjutnya realisasi Tahap II dalam rangka Penanggulangan Penanganan Banjir Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 Rp272.528.000,00 terdiri dari Pekerjaan Penanganan Darurat Garis Pantai Pasca Banjir di Kecamatan Lapang dilaksanakan oleh CV. Ananda Putroe Balqis

sebesar Rp115.028.000,00, dan Pekerjaan Penanganan Darurat Saluran Primer D.I Meureudu dilaksanakan oleh CV. Dua Mitra Perkasa sebesar Rp157.500.000,00.

- f) Dinas Perhubungan Aceh
Realisasi BTT sebesar Rp35.595.000,00 digunakan untuk sewa kendaraan atau truk barang untuk distribusi logistik termasuk juga bahan bakar minyak dan sopir.
- g) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
Realisasi BTT sebesar Rp865.794.865,00 dengan rincian Tahap I sebesar Rp790.794.865,00 dan pada Tahap II sebesar Rp75.000.000,00 yang digunakan untuk pengadaan barang dan peralatan lapangan, penyediaan bahan bakar minyak, servis dan suku cadang kendaraan, sewa kendaraan dan uang makan untuk petugas lapangan dan staf pendukung.
- h) Dinas Peternakan
Realisasi BTT sebesar Rp6.488.750,00 yang digunakan untuk Belanja Barang Pakai habis.
- i) Dinas Sosial Aceh
Realisasi BTT sebesar Rp40.396.874.800,00 yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap masing-masing Rp19.943.974.800,00 dan Rp20.452.900.000,00 dengan rincian digunakan untuk pengadaan bahan pangan, pengadaan penyediaan bantuan sandang, pengadaan tempat penampungan sementara (tenda keluarga) dan pembayaran sewa kendaraan mobil *truck* roda 6 (enam) untuk pendistribusian bantuan sebesar Rp19.943.974.800,00 dan Rp20.452.900.000,00.
- j) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
Realisasi BTT sebesar Rp393.239.000,00 terdiri dari belanja barang pakai habis sebesar Rp142.419.000,00 dan belanja jasa dan sewa Rp250.820.000,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Realisasi 2025 **Realisasi 2024**
Rp1.796.170.474.841,00 **Rp1.833.379.495.751,00**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	670.143.363.872,00	665.660.491.383,00	99,33	881.118.949.469,00
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	-
3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	119.323.781.792,00	117.085.426.458,00	98,12	952.260.546.282,00
4	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	973.424.557.000,00	973.424.557.000,00	100,00	-
Jumlah		1.802.891.702.664,00	1.796.170.474.841,00	99,63	1.833.379.495.751,00

Sumber: Data diolah

5.1.2.4.1. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi 2025
Rp665.660.491.383,00

Realisasi 2024
Rp881.118.949.469,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan transfer Pemerintah Aceh kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, yang terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp526.460.300.370,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Kabupaten Aceh Selatan	27.403.702.882,00	27.403.702.882,00	100	37.591.586.391,00
2	Kabupaten Aceh Tenggara	23.696.932.189,00	23.696.932.189,00	100	34.491.045.988,00
3	Kabupaten Aceh Timur	37.119.924.724,00	37.119.924.724,00	100	51.479.996.435,00
4	Kabupaten Aceh Tengah	27.099.036.719,00	27.099.036.719,00	100	37.953.699.116,00
5	Kabupaten Aceh Barat	28.479.044.794,00	28.479.044.794,00	100	41.210.559.952,00
6	Kabupaten Aceh Besar	45.601.525.637,00	45.601.525.637,00	100	55.649.574.519,00
7	Kabupaten Pidie	39.128.182.307,00	39.128.182.307,00	100	55.648.431.100,00
8	Kabupaten Aceh Utara	46.005.735.461,00	46.005.735.461,00	100	59.411.499.781,00
9	Kabupaten Simeulue	18.134.073.511,00	18.134.073.511,00	100	25.421.097.822,00
10	Kabupaten Aceh Singkil	20.922.326.206,00	20.922.326.206,00	100	28.779.412.116,00
11	Kabupaten Bireuen	42.200.484.904,00	42.200.484.904,00	100	52.287.466.075,00
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	22.938.777.748,00	22.938.777.748,00	100	30.399.633.189,00
13	Kabupaten Gayo Lues	20.371.593.988,00	20.371.593.988,00	100	30.638.036.789,00
14	Kabupaten Aceh Jaya	23.146.479.587,00	23.146.479.587,00	100	29.468.845.396,00
15	Kabupaten Nagan Raya	26.273.595.697,00	26.273.595.697,00	100	35.389.822.240,00
16	Kabupaten Aceh Tamiang	32.130.630.691,00	32.130.630.691,00	100	45.182.134.657,00
17	Kabupaten Bener Meriah	23.157.873.088,00	23.157.873.088,00	100	31.041.809.406,00
18	Kabupaten Pidie Jaya	22.650.380.237,00	22.650.380.237,00	100	29.737.873.572,00
Jumlah		526.460.300.370,00	526.460.300.370,00	100	711.782.524.544,00

Sumber: Register SP2D dan LRA

2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebesar Rp139.200.191.013,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kota

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Kota Banda Aceh	47.459.661.598,00	47.123.672.890,00	99,29	52.584.626.081,00
2	Kota Sabang	17.525.765.539,00	17.525.765.539,00	100,00	22.491.913.384,00
3	Kota Lhokseumawe	29.503.586.445,00	29.503.586.445,00	100,00	35.910.026.739,00
4	Kota Langsa	26.151.969.793,00	26.018.471.227,00	99,49	32.546.900.226,00
5	Kota Subulussalam	19.319.433.088,00	19.028.694.912,00	98,50	25.802.958.495,00
Jumlah		139.960.416.463,00	139.200.191.013,00	99,46	169.336.424.925,00

Sumber: Register SP2D dan LRA

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah direalisasikan sebesar Rp665.660.491.383,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten sebesar Rp526.460.300.370,00 dan untuk Kota sebesar Rp139.200.191.013,00.

5.1.2.4.2. Bantuan Keuangan

Realisasi 2025
Rp1.130.509.983.458,00

Realisasi 2024
Rp952.260.546.282,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi di realisasikan sebesar Rp40.000.000.000 yang di berikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1/820/2025 tanggal 27 Mei 2025.

2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota direalisasikan sebesar Rp117.085.426.458,00 atau 98,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.323.781.792,00, dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp24.000.000.000,00, yang terdiri dari:

Tabel 84. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.1/699/2024 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim TA 2024			-	4.914.000.000,00
2	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1/911/2024 tentang Penetapan Penyaluran Belanja BanKeu Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kab. Aceh Tenggara TA 2024			-	3.000.000.000,00
3	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1354/2024 tentang Penetapan Penyaluran Belanja BanKeu Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kab. Pidie Jaya TA 2024			-	15.000.000.000,00
4	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.14.4/753/2024			-	924.346.546.282,00
6	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/843/2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-
7	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1/820/2025 tanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00	66,67	-
Jumlah		26.000.000.000,00	24.000.000.000,00	92,31	947.260.546.282,00

Sumber: Register SP2D dan LRA

Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp24.000.000.000,00 terdiri dari:

- a) Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVII Aceh sesuai SP2D Nomor 0011298/LS-BL/2025 Tanggal 13 Agustus 2025;
- b) Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada dan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk Lanjutan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh sesuai SP2D Nomor 0017313/LS-BL/2025 Tanggal 3 November 2025.

B. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota direalisasikan sebesar Rp56.634.817.000,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.14.3/1425/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Tambahan DBH-Minyak Bumi dan Gas Bumi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Kab. Aceh Barat	1.709.807.000,00	1.709.807.000,00	100,00	-
2	Kab. Aceh Barat Daya	1.747.396.000,00	1.747.396.000,00	100,00	-
3	Kab. Aceh Besar	1.837.668.000,00	1.837.668.000,00	100,00	-
4	Kab. Aceh Jaya	1.901.807.000,00	1.901.807.000,00	100,00	-
5	Kab. Aceh Selatan	1.866.059.000,00	1.866.059.000,00	100,00	-
6	Kab. Aceh Singkil	1.655.490.000,00	1.655.490.000,00	100,00	-
7	Kab. Aceh Tamiang	6.961.614.000,00	6.961.614.000,00	100,00	-
8	Kab. Aceh Tengah	1.916.259.000,00	1.916.259.000,00	100,00	-
9	Kab. Aceh Tenggara	1.927.746.000,00	1.927.746.000,00	100,00	-
10	Kab. Aceh Timur	8.094.654.000,00	8.094.654.000,00	100,00	-
11	Kab. Aceh Utara	6.084.317.000,00	6.084.317.000,00	100,00	-
12	Kab. Bener Meriah	1.776.712.000,00	1.776.712.000,00	100,00	-
13	Kab. Bireuen	1.812.829.000,00	1.812.829.000,00	100,00	-
14	Kab. Gayo Lues	2.182.799.000,00	2.182.799.000,00	100,00	-
15	Kab. Nagan Raya	1.863.841.000,00	1.863.841.000,00	100,00	-
16	Kab. Pidie	1.957.741.000,00	1.957.741.000,00	100,00	-
17	Kab. Pidie Jaya	1.612.849.000,00	1.612.849.000,00	100,00	-
18	Kab. Simeulue	1.731.229.000,00	1.731.229.000,00	100,00	-
19	Kota Banda Aceh	1.477.185.000,00	1.477.185.000,00	100,00	-
20	Kota Langsa	1.481.772.000,00	1.481.772.000,00	100,00	-
21	Kota Lhokseumawe	1.596.695.000,00	1.596.695.000,00	100,00	-
22	Kota Sabang	1.678.413.000,00	1.678.413.000,00	100,00	-
23	Kota Subulussalam	1.759.935.000,00	1.759.935.000,00	100,00	-
Jumlah		56.634.817.000,00	56.634.817.000,00	100,00	-

Sumber : Data diolah

C. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Bencana Hidrometeorologi

Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Bencana Hidrometeorologi direalisasikan sebesar Rp26.774.964.200,00, Sesuai Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh :

- a. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/1455/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota yang terdampak Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun Anggaran 2025;

Tabel 86. Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Bencana Hidrometeorologi Tahap I

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Kab. Aceh Barat	131.465.073,00	131.465.073,00	100,00	-
2	Kab. Aceh Besar	47.517.832,00	47.517.832,00	100,00	-
3	Kab. Aceh Selatan	54.319.286,00	54.319.286,00	100,00	-
4	Kab. Aceh Singkil	102.462.856,00	102.462.856,00	100,00	-
5	Kab. Aceh Tamiang	1.570.631.702,00	1.570.631.702,00	100,00	-
6	Kab. Aceh Tengah	730.880.158,00	730.880.158,00	100,00	-
7	Kab. Aceh Tenggara	101.478.980,00	101.478.980,00	100,00	-
8	Kab. Aceh Timur	1.445.264.962,00	1.445.264.962,00	100,00	-
9	Kab. Aceh Utara	2.034.504.679,00	2.034.504.679,00	100,00	-
10	Kab. Bener Meriah	576.856.661,00	576.856.661,00	100,00	-
11	Kab. Bireuen	206.460.706,00	206.460.706,00	100,00	-
12	Kab. Gayo Lues	439.288.206,00	439.288.206,00	100,00	-
13	Kab. Nagan Raya	143.246.706,00	143.246.706,00	100,00	-
14	Kab. Pidie	139.949.617,00	139.949.617,00	100,00	-
15	Kab. Pidie Jaya	165.267.829,00	165.267.829,00	100,00	-
16	Kota Langsa	488.440.525,00	488.440.525,00	100,00	-
17	Kota Lhokseumawe	324.086.336,00	324.086.336,00	100,00	-
18	Kota Subulussalam	97.877.886,00	97.877.886,00	100,00	-
Jumlah		8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	100,00	-

Sumber : Data diolah

- b. Surat Keputusan Gubernur Aceh 300.2/1481/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang terdampak Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun Anggaran 2025;

Tabel 87. Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Bencana Hidrometeorologi Tahap II

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Kab. Aceh Tamiang	7.120.415.458,00	7.120.415.458,00	100,00	-
2	Kab. Aceh Utara	3.113.628.629,00	3.113.628.629,00	100,00	-
3	Kota Lhokseumawe	170.322.389,00	170.322.389,00	100,00	-
4	Kab. Aceh Timur	1.202.097.876,00	1.202.097.876,00	100,00	-
5	Kab. Aceh Tengah	1.231.808.826,00	1.231.808.826,00	100,00	-
6	Kab. Aceh Tenggara	227.760.064,00	227.760.064,00	100,00	-
7	Kab. Nagan Raya	295.769.600,00	295.769.600,00	100,00	-
8	Kab. Bener Meriah	670.004.865,00	670.004.865,00	100,00	-
9	Kab. Bireuen	1.291.855.421,00	1.291.855.421,00	100,00	-
10	Kab. Pidie Jaya	928.957.533,00	928.957.533,00	100,00	-
11	Kab. Gayo Lues	1.722.343.539,00	1.722.343.539,00	100,00	-
Jumlah		17.974.964.200,00	17.974.964.200,00	100,00	-

Sumber : Data diolah



D. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup

Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup direalisasikan sebesar Rp4.761.645.258,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Kab. Aceh Barat	242.327.320,00	242.327.320,00	100,00	-
2	Kab. Aceh Barat Daya	217.371.375,00	217.371.375,00	100,00	-
3	Kab. Aceh Jaya	318.213.765,00	318.213.765,00	100,00	-
4	Kab. Aceh Selatan	273.140.272,00	273.140.272,00	100,00	-
5	Kab. Aceh Singkil	253.277.378,00	253.277.378,00	100,00	-
6	Kab. Aceh Tamiang	307.059.986,00	307.059.986,00	100,00	-
7	Kab. Aceh Tengah	266.111.864,00	266.111.864,00	100,00	-
8	Kab. Aceh Timur	279.761.237,00	279.761.237,00	100,00	-
9	Kab. Aceh Utara	222.566.286,00	222.566.286,00	100,00	-
10	Kab. Bener Meriah	270.848.400,00	270.848.400,00	100,00	-
11	Kab. Gayo Lues	299.878.786,00	299.878.786,00	100,00	-
12	Kab. Nagan Raya	245.383.150,00	245.383.150,00	100,00	-
13	Kab. Pidie	238.354.742,00	-	0,00	-
14	Kab. Pidie Jaya	233.516.344,00	233.516.344,00	100,00	-
15	Kab. Simeulue	290.711.295,00	290.711.295,00	100,00	-
16	Kota Banda Aceh	243.702.444,00	243.702.444,00	100,00	-
17	Kota Lhokseumawe	230.104.000,00	230.104.000,00	100,00	-
18	Kota Sabang	277.214.713,00	277.214.713,00	100,00	-
19	Kota Subulussalam	290.456.643,00	290.456.643,00	100,00	-
Jumlah		5.000.000.000,00	4.761.645.258,00	95,23	-

Sumber : Data diolah

E. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dan Desa direalisasikan sebesar Rp4.914.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89. Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Kab. Aceh Barat	216.000.000,00	216.000.000,00	100,00	-
2	Kab. Aceh Barat Daya	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	-
3	Kab. Aceh Besar	408.000.000,00	408.000.000,00	100,00	-
4	Kab. Aceh Jaya	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	-
5	Kab. Aceh Selatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
6	Kab. Aceh Singkil	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	-
7	Kab. Aceh Tamiang	186.000.000,00	186.000.000,00	100,00	-
8	Kab. Aceh Tengah	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	-
9	Kab. Aceh Tenggara	306.000.000,00	306.000.000,00	100,00	-
10	Kab. Aceh Timur	396.000.000,00	396.000.000,00	100,00	-
11	Kab. Aceh Utara	456.000.000,00	456.000.000,00	100,00	-
12	Kab. Bener Meriah	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	-
13	Kab. Bireuen	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	-
14	Kab. Gayo Lues	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
15	Kab. Nagan Raya	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	-
16	Kab. Pidie	582.000.000,00	582.000.000,00	100,00	-

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
17	Kab. Pidie Jaya	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	-
18	Kab. Simeulue	174.000.000,00	174.000.000,00	100,00	-
19	Kota Banda Aceh	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	-
20	Kota Langsa	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	-
21	Kota Lhokseumawe	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	-
22	Kota Sabang	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	-
23	Kota Subulussalam	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	-
Jumlah		4.914.000.000,00	4.914.000.000,00	100,00	-

Sumber : Data diolah

3. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota

Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota direalisasikan sebesar Rp973.424.557.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.14.1/635/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025

Tabel 90. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.14.1/635/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025	973.424.557.000,00	973.424.557.000,00	100	952.260.546.282,00
Jumlah		973.424.557.000,00	973.424.557.000,00	100	952.260.546.282,00

Sumber : Data diolah

5.1.3. Surplus/Defisit

Realisasi 2025
Rp47.352.614.453,12

Realisasi 2024
Rp108.896.181.077,90

Berdasarkan realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp10.700.061.956.317,20 dan realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 sebesar Rp10.652.709.341.864,10, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh mengalami Surplus sebesar Rp47.352.614.453,12 dan TA 2024 mengalami surplus sebesar Rp108.896.181.077,90.

5.1.4. Pembiayaan

Realisasi 2025
Rp471.105.985.301,94

Realisasi 2024
Rp421.372.974.555,69

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan yaitu berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp530.262.155.633,59 yaitu Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf sebesar Rp165.180.316.073,91, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp322.101.789.667,73. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp42.980.049.891,95 dan Penerimaan dari Pengembalian Dana Bergulir sebesar Rp128.379.087,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terdiri

dari penerimaan dari LUEP pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp103.379.087,00 dan penerimaan PER dari Kopkaga sebesar Rp25.000.000,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan yaitu berasal dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp59.284.549.418,65.
3. Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yaitu untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Realisasi Pembiayaan Neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp471.105.985.301,94 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp472.262.155.634,00.

5.1.5. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp518.458.599.755,06 **Rp 530.262.155.633,59**

SiLPA merupakan selisih lebih antara Surplus/Defisit dibandingkan dengan Pembiayaan Neto. SiLPA TA 2025 sebesar Rp518.458.599.755,06 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp498.738.358.811,09;
2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp43.927.994,00;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp260.891.900,00;
4. Kas di BLUD sebesar Rp19.325.719.626,20; dan
5. Kas di BOS sebesar Rp89.701.423,65.

Rincian SiLPA sebesar Rp518.458.599.755,06 berdasarkan sumber dana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 91. Rincian SiLPA Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dana Otonomi Khusus	77.815.028.227,12	89.521.232.383,53
2	Dana Alokasi Khusus	28.222.332.226,22	28.463.419.677,00
3	Dana Alokasi Umum	124.615.063.001,00	8.707.261.134,00
4	Dana Migas	8.308.845.208,55	-
5	Dana Bagi Hasil	39.787.692.761,19	6.310.675.031,00
6	Pendapatan Asli Aceh	74.393.279.445,60	188.605.471.789,20
7	Zakat dan Infak	137.407.317.046,98	165.180.316.073,91
8	Hibah	2.109.005.035,55	-
9	Insentif Fiskal	493.729.653,00	493.729.653,00
10	Kas BLUD	19.325.719.626,20	42.980.049.891,95
11	Kas BOS	89.701.423,65	-
12	Kas di Bendahara Pengeluaran	260.891.900,00	-
13	Bantuan Keuangan	5.629.994.200,00	-
Jumlah		518.458.599.755,06	530.262.155.633,59

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah)

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan SAL Akhir.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

	TA 2025	TA 2024
	Rp530.262.155.633,59	Rp473.295.918.241,60

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Pemerintah Aceh sebesar Rp530.262.155.633,59 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 yang terdiri dari:

Tabel 92. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	486.638.267.260,64	396.396.186.019,05
2	Kas di Bendahara Penerimaan	545.554.043,00	929.611.672,01
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di Bendahara BLUD	42.980.049.891,95	75.696.236.366,54
5	Kas di BOS	62.034.435,00	203.884.184,00
6	Kas Lainnya	36.250.003,00	70.000.000
Jumlah		530.262.155.633,59	473.295.918.241,60

Sumber: Data diolah

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	TA 2025	TA 2024
	Rp530.262.155.633,59	Rp473.295.918.241,60

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp530.262.155.633,59 merupakan penggunaan SiLPA TA 2024.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	TA 2025	TA 2024
	Rp518.458.599.755,06	Rp530.262.155.633,59

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp518.458.599.755,06 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 93. Perhitungan SiLPA

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan	10.700.061.956.317,20	11.396.038.068.929,60
2	Belanja	(8.856.538.867.023,08)	(9.453.769.392.100,68)
3	Transfer	(1.796.170.474.841,00)	(1.833.379.495.751,00)
4	Penerimaan Pembiayaan	530.390.534.720,59	474.004.949.182,60
5	Pengeluaran Pembiayaan	(59.284.549.418,65)	(52.631.974.626,91)
Jumlah		518.458.599.755,06	530.262.155.633,59

Sumber: Data diolah

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Koreksi Kesalahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

	TA 2025	TA 2024
	Rp518.458.599.755,06	Rp530.262.155.633,59

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp518.458.599.755,06 mengalami penurunan sebesar Rp11.803.555.878,53 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp530.262.155.633,59.

5.3. NERACA

Penjelasan akun-akun Neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun Neraca per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

5.3.1. Aset Lancar

Per 31 Desember 2025
Rp1.055.626.910.459,19

Per 31 Desember 2024
Rp976.878.114.514,54

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 94. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	498.738.358.811,21	486.638.267.260,64
2	Kas di Bendahara Penerimaan	43.927.994,00	545.554.043,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	260.891.900,00	-
4	Kas di Bendahara BLUD	19.325.719.626,20	42.980.049.891,95
5	Kas di BOS	89.701.423,65	62.034.435,00
6	Kas Lainnya	754.594.770,80	290.482.810,00
7	Piutang Pajak	89.769.141.907,00	44.171.235.557,00
8	Penyisihan Piutang Pajak	(1.229.779.182,73)	(1.084.673.150,98)
9	Piutang Retribusi	117.515.619.227,00	101.641.577.163,00
10	Penyisihan Piutang Retribusi	(24.210.268.826,30)	(24.004.919.720,26)
11	Piutang Lain-lain PAA yang Sah	33.105.725.300,00	28.675.103.074,00
12	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	(25.992.926.978,72)	(23.553.713.597,37)
13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.085.597.513,86	8.869.168.610,86
14	Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(9.022.350.114,76)	(8.869.168.610,86)
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	113.647.088.000,00	49.816.093.000,00
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.509.583,08	56.509.583,08
17	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(56.509.583,08)	(56.509.583,08)
18	Belanja Dibayar Di Muka	1.844.177.061,66	1.823.037.616,89
19	Persediaan	231.901.692.026,31	268.877.986.131,67
Total Aset Lancar		1.055.626.910.459,19	976.878.114.514,54

Sumber: Data diolah

5.3.1.1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2025
Rp498.738.358.811,21

Per 31 Desember 2024
Rp486.638.267.260,64

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Bank Umum yang digunakan atas nama rekening Kas Umum Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.7.1/1388/2025 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh. Saldo awal Kas di Kas Daerah adalah sebesar Rp486.638.267.260,64 kemudian mutasi tambah sebesar Rp9.136.943.489.090,60, mutasi kurang sebesar Rp9.065.595.098.121,50, koreksi penambahan Bunga Deposito Dana Cadangan sebesar Rp59.173.759.177,83, penambahan jasa giro Dana Cadangan sebesar Rp110.790.240,82, pengurangan Kas Lainnya pada BPKA Dana BOS 2024 sebesar Rp36.250.000,00, koreksi pengurangan desimal Kas di Kasda sebesar Rp0,12 dan koreksi pengurangan atas transaksi retur tahun 2025 Rp315.907.055,00, sehingga saldo akhir sebesar Rp498.738.358.811,21.

Adapun rincian Kas di Kas Daerah berdasarkan rekening dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95. Rincian Rekening Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Nomor Rekening	Nilai
1	Bank Aceh (Pemerintah Aceh)	010.01.02.610030.3	359.022.197.627,80
2	Bank Aceh (Zakat)	010.01.02.121285.2	2.183.771.457,80
3	Bank Aceh (INFAK)	610.01.04.000100-0	137.532.248.571,18
4	Rekening Retur	010.01.88.0029732	141.154,43
Jumlah			498.738.358.811,21

Sumber: Bidang Perbendaharaan (BPKA)

5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp43.927.994,00 Rp545.554.043,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo ini merupakan pendapatan Pemerintah Aceh yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh.

Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 sebesar Rp545.554.043,00, mutasi tambah Rp43.927.994,00 dan mutasi kurang Rp545.554.043,00 sehingga saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 sebesar Rp43.927.994,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96. Rincian Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	19.734.000,00	5.679.000,00	19.734.000,00	5.679.000,00
2	Sekretariat Baitul Mal Aceh	499.540.399,00	38.147.220,00	499.540.399,00	38.147.220,00
3	Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh	-	101.774,00	-	101.774,00
4	Dinas Perhubungan Aceh	26.279.644,00	-	26.279.644,00	-
Jumlah		545.554.043,00	43.927.994,00	545.554.043,00	43.927.994,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas Aceh sebesar Rp43.927.994,00 melalui rekening PAD (01.02.120003-4) pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	Jumlah	Keterangan
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	733.000,00	Retribusi Tiket Museum Aceh yaitu pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; Disetor tanggal 5 Januari 2026
	325.000,00	Retribusi Tiket Museum Tsunami yaitu pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan; Disetor tanggal 5 Januari 2025
	4.621.000,00	Retribusi Tiket Museum Tsunami yaitu pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; Disetor tanggal 5 Januari 2026
Sekretariat Baitul Mal Aceh	2.200.500,00	Saldo Rekening Zakat. Disetor tanggal 8 Januari 2026
	2.255.730,00	Saldo Rekening Zakat. Disetor tanggal 8 Januari 2026
	5.087.390,00	Saldo Rekening Zakat. Disetor tanggal 8 Januari 2026
	11.000,00	Saldo Rekening Infak. Disetor tanggal 8 Januari 2024
	8.592.600,00	Saldo Rekening Infak. Disetor tanggal 8 Januari 2025
	20.000.000,00	Saldo Rekening Zakat. Disetor tanggal 8 Januari 2026
Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh	101.774,00	Saldo Sumbangan pihak Ketiga yang merupakan setoran atas opsen pajak MBLB WP Subulussalam; disetor ke Rekening BPKA BPNR tanggal 12 Maret 2026
Jumlah	43.927.994,00	

Sumber: Laporan Keuangan SKPA



5.3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024

Rp260.891.900,00 Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Sisa Uang Persediaan yang belum di setor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari Sekretariat Daerah Aceh sebesar Rp260.891.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPA	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah Aceh	259.000.000,00	Sisa Uang Persediaan yang belum di setor ke Kas Daerah per 31 Des 2025 Telah disetor ke Rekening RKUD Prov Aceh Tanggal 14 April 2026
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.891.900,00	REKLAS DARI KAS BENDAHARA PENERIMAAN MENJADI KAS BENDAHARA PENGELUARAN ATAS Pada BPP 6 UPTD Aceh Utara Pembayaran BBM Genset (OM Genset) Bulan Juli-September 2024 UPTD Aceh Utara tanggal 30 Desember 2024 Rp1.891.500,00 (KOR-BPK/008/REKLAS-KAS/5.02.0.00.0.00.01/2025) BPKA
Jumlah		260.891.900,00	

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

5.3.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024

Rp19.325.719.626,20 Rp42.980.049.891,95

Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD. Kas di BLUD TA 2025 sebesar Rp19.325.719.626,20, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99. Rincian Mutasi Kas di BLUD

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	BLUD Dinas Pendidikan Aceh	560.729.306,20	4.554.986.232,10	4.563.069.620,00	552.645.918,30
2	BLUD Dinas Kesehatan Aceh	-	634.256.200,00	351.952.424,00	282.303.776,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	30.284.129.671,96	622.436.863.875,05	652.167.331.812,00	553.661.735,01
4	BLUD Rumah Sakit Jiwa	1.279.545.758,18	28.445.390.297,72	24.779.344.779,70	4.945.591.276,20
5	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	2.122.246.162,09	27.978.549.947,31	26.292.978.237,00	3.807.817.872,40
6	BLUD Dinas Syariat Islam	171.632.162,25	1.982.577.762,00	2.150.518.735,00	3.691.189,25
7	BLUD Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	8.561.704.131,27	254.442.401,77	-	8.816.146.533,04
8	BLUD Dinas Peternakan Aceh	62.700,00	1.144.711.500,00	780.912.874,00	363.861.326,00
Jumlah		42.980.049.891,95	687.431.778.215,95	711.086.108.481,70	19.325.719.626,20

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Rincian Kas di BLUD SMK dapat di lihat pada **Lampiran 8**.

5.3.1.5. Kas di BOS Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024

Rp89.701.423,65 Rp62.034.435,00

Kas di BOS adalah merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan yang berada pada rekening sekolah atau tunai di Bendahara BOS. Kas di BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.701.423,65 terdiri dari:

**Tabel 100. Rincian Mutasi Kas Dana BOS TA 2025**

No	Nama Sekolah	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	SMAN 10 Aceh Barat Daya	150.000,00	-	150.000,00	-
2	SMAN 1 Calang	9.380.000,00	8.976.000,00	9.380.000,00	8.976.000,00
3	SMAN 1 Bireuen	96,00	-	96,00	-
4	SMAN 1 Samalanga	200.000,00	-	200.000,00	-
5	SMAN 4 Banda Aceh	33.642.050,00	73.244.830,00	33.642.050,00	73.244.830,00
6	SMAN 2 Sabang	72.089,00	-	72.089,00	-
7	SMKN 2 Simpang Kiri	60.000,00	-	60.000,00	-
8	SMKN 1 Teunom	18.530.200,00	-	18.530.200,00	-
9	SMAN 1 Panga	-	12.560,00	-	12.560,00
10	SMAN 1 Bandar	-	833,00	-	833,00
11	SMAN 1 Syiah Utama	-	18.000,00	-	18.000,00
12	SMAN 1 Pantan Cuaca	-	2.500,00	-	2.500,00
13	SMAN 2 Teupah Barat	-	1.000,00	-	1.000,00
14	SMAN 3 Banda Aceh	-	747.048,00	-	747.048,00
15	SMAN 1 Banda Aceh	-	5.775.000,00	-	5.775.000,00
16	SMAN 14 Banda Aceh	-	2.708,00	-	2.708,00
17	SMA N 1 Peudawa	-	155.325,00	-	155.325,00
18	SMAN 1 Julok	-	106.100,94	-	106.100,94
19	SMAN 2 Idi	-	20.733,78	-	20.733,78
20	SMK N 1 Idi	-	493.437,14	-	493.437,14
21	SMK N 1 Indra Makmu	-	58.238,41	-	58.238,41
22	SMK 1 Peureulak	-	87.109,38	-	87.109,38
Jumlah		62.034.435,00	89.701.423,65	62.034.435,00	89.701.423,65

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Aceh

Kas di BOS TA 2024 sebesar Rp62.034.435,00, mutasi tambah sebesar Rp89.701.423,65 dan mutasi kurang sebesar Rp62.034.435,00 sehingga Kas di BOS TA 2025 sebesar Rp89.701.423,65.

5.3.1.6. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2025

Rp754.594.770,80

Per 31 Desember 2024

Rp290.482.810,00

Kas Lainnya adalah saldo kas selain Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan, berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Daerah atau Kas Negara. Kas Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp754.594.770,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101. Rincian Mutasi Kas Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Aceh	253.436.722,00	754.594.770,80	253.436.722,00	754.594.770,80
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	36.250.000,00	-	36.250.000,00	-
3	Dinas Syariat Islam Aceh	796.088,00	-	796.088,00	-
Jumlah		290.482.810,00	754.594.770,80	290.482.810,00	754.594.770,80

Sumber: Pelaporan Pajak

Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp754.594.770,80 berupa Penyetoran Pajak BOS yang baru dibayarkan pada tahun 2026 berupa Utang PPh Pasal 21 sebesar Rp23.846.663,00, Utang PPh Pasal 22 sebesar Rp22.360,00, Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp63.219.788,00 dan Utang PPN Pusat sebesar Rp667.505.959,80.

5.3.1.7. Piutang Pajak

Per 31 Desember 2025

Rp89.769.141.907,00

Per 31 Desember 2024

Rp44.171.235.557,00

Piutang Pajak adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran pajak dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.



Piutang Pajak TA 2025 sebesar Rp89.769.141.907,00 terdiri dari Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp88.962.597.723,00 dan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp806.544.184,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102. Rincian Mutasi Piutang Pajak

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	43.238.326.480,00	88.962.597.723,00	43.238.326.480,00	88.962.597.723,00
2	Piutang Pajak Air Permukaan	932.909.077,00	806.544.184,00	932.909.077,00	806.544.184,00
Jumlah		44.171.235.557,00	89.769.141.907,00	44.171.235.557,00	89.769.141.907,00

Sumber: Data diolah

5.3.1.7.1. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Per 31 Desember 2025 Rp88.962.597.723,00 Per 31 Desember 2024 Rp43.238.326.480,00

Piutang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diakui pada saat telah diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp88.962.597.723,00, terdiri dari:

Tabel 103. Rincian Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	PT. AKR. Corporindo Tbk	13.805.804,00	25.718.234,00	13.805.804,00	25.718.234,00
2	PT. Pertamina Patra Niaga	39.433.448.400,00	49.606.392.084,00	39.433.448.400,00	49.606.392.084,00
3	PT. Elnusa Petrofin	52.433.931,00	91.228.950,00	52.433.931,00	91.228.950,00
4	PT. Prima Wiraguna Parama	3.647.878.345,00	6.417.048.450,00	3.647.878.345,00	6.417.048.450,00
5	PT. Petro Andalan Nusantara	90.760.000,00	251.579.208,00	90.760.000,00	251.579.208,00
6	PT. Baria Bulk Terminal	-	46.320.000,00	-	46.320.000,00
7	PT. Petro Gasindo Intiniaga	-	22.084.800,00	-	22.084.800,00
8	PT. Mesa Global Energi	-	32.502.225.997,00	-	32.502.225.997,00
Jumlah		43.238.326.480,00	88.962.597.723,00	43.238.326.480,00	88.962.597.723,00

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

Mutasi tambah sebesar Rp88.962.597.723,00 dikarenakan penambahan dari Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Bensin dan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Solar TA 2025, dan mutasi kurang sebesar Rp43.238.326.480,00 dikarenakan pembayaran piutang TA 2024 yang dibayar pada TA 2025.

5.3.1.7.2. Piutang Pajak Air Permukaan Per 31 Desember 2025 Rp806.544.184,00 Per 31 Desember 2024 Rp932.909.077,00

Piutang Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang berasal dari semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat sebesar Rp806.544.184,00 rincian pada tabel dan **Lampiran 9**.

Tabel 104. Rincian Mutasi Pajak Air Permukaan

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	PDAM Tirta Mon Pase	437.715.625,00	-	30.000.000,00	407.715.625,00
2	PT. PTPN-I (Kb. Cot Girek)	6.449.040,00	-	6.449.040,00	-
3	PDAM Tirta Peusada	88.563.030,00	-	12.000.000,00	76.563.030,00



No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
4	PDAM Tirta Peusada	2.708.740,00	2.526.360,00	2.708.740,00	2.526.360,00
5	Perumdam Tirta Keumuneng	103.841.200,00	-	18.000.000,00	85.841.200,00
6	PT. Pertamina EP Hulu Migas	370.010,00	-	-	370.010,00
7	PT. Bahari Dwi Kencana Lestari (PT. Bumi Sama Ganda)	9.090.360,00	-	-	9.090.360,00
8	PTPN - I Kb. Aceh Tamiang	8.810.220,00	-	8.810.220,00	-
9	PDAM Tirta Meulaboh	176.814.075,00	-	1.800.000,00	175.014.075,00
10	PT. Energi Alam Raya Semesta	2.646.000,00	-	-	2.646.000,00
11	PDAM Tirta Krueng Meureudue	5.276.680,00	-	5.276.680,00	-
12	PDAM Tirta Krueng Meureudue	9.363.230,00	-	9.363.230,00	-
13	PDAM Tirta Krueng Meureudue	7.832.090,00	-	2.860.090,00	4.972.000,00
14	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata	12.957.880,00	-	4.000.000,00	8.957.880,00
15	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata	10.329.130,00	-	-	10.329.130,00
16	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1	3.358.452,00	-	-	3.358.452,00
17	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	1.349.920,00	-	1.349.920,00	-
18	PT. Ika Bina Agro Wisesa	603.120,00	-	603.120,00	-
19	PT. Perkasa Subur Sakti/BSF	4.048.860,00	907.440,00	4.048.860,00	907.440,00
20	PT. Parasawita	3.146.940,00	-	3.146.940,00	-
21	PT. Sisirau	1.616.700,00	-	1.616.700,00	-
22	PT. Agro Sinergi Nusantara (Batee Puteh)	919.920,00	-	919.920,00	-
23	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	651.300,00	-	651.300,00	-
24	PT. Seunagan Energi	34.446.555,00	-	34.446.555,00	-
25	PT. Pupuk Iskandar Muda	-	15.754.342,00	-	15.754.342,00
26	PT. Bumi Daya Agrotamas	-	1.888.320,00	-	1.888.320,00
27	PT. Socfindo Lae Butar	-	609.960,00	-	609.960,00
Jumlah		932.909.077,00	21.686.422,00	148.051.315,00	806.544.184,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA

Mutasi tambah sebesar Rp21.686.422,00 merupakan penambahan piutang TA 2025 dari PDAM Tirta Peusada, PT. Perkasa Subur Sakti/BSF, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Bumi Daya Agrotamas, dan PT. Socfindo Lae Butar serta mutasi kurang sebesar Rp148.051.315,00 dikarenakan penghapusan piutang TA 2024 yang dibayarkan pada TA 2025.

5.3.1.8. Penyisihan Piutang Pajak

Per 31 Desember 2025
Rp(1.229.779.182,73)

Per 31 Desember 2024
Rp(1.084.673.150,98)

Penyisihan Piutang Pajak adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Mutasi tambah dan kurang Penyisihan Piutang Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 105. Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	(216.191.632,40)	(444.812.988,62)	(216.191.632,40)	(444.812.988,62)
2	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	(868.481.518,58)	(784.966.194,11)	(868.481.518,58)	(784.966.194,11)
Jumlah		(1.084.673.150,98)	(1.229.779.182,73)	(1.084.673.150,98)	(1.229.779.182,73)

Sumber: Data diolah

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp(1.229.779.182,73) terdiri dari:

5.3.1.8.1. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Per 31 Desember 2025
Rp(444.812.988,62)

Per 31 Desember 2024
Rp(216.191.632,40)

Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp(444.812.988,62), terdiri dari:

Tabel 106. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan 2025
1	PT. AKR. Corporindo Tbk	25.718.234,00	Lancar	0,5%	(128.591,17)
2	PT. Pertamina Patra Niaga	49.606.392.084,00	Lancar	0,5%	(248.031.960,42)
3	PT. Elnusa Petrofin	91.228.950,00	Lancar	0,5%	(456.144,75)
4	PT. Prima Wiraguna Parama	6.417.048.450,00	Lancar	0,5%	(32.085.242,25)
5	PT. Petro Andalan Nusantara	251.579.208,00	Lancar	0,5%	(1.257.896,04)
6	PT. Baria Bulk Terminal	46.320.000,00	Lancar	0,5%	(231.600,00)
7	PT. Petro Gasindo Intiniaga	22.084.800,00	Lancar	0,5%	(110.424,00)
8	PT. Mesa Global Energi	32.502.225.997,00	Lancar	0,5%	(162.511.129,99)
Jumlah		88.962.597.723,00			(444.812.988,62)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

5.3.1.8.2. Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan

Per 31 Desember 2025
Rp(784.966.194,11)

Per 31 Desember 2024
Rp(868.481.518,58)

Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp(784.966.194,11) rincian dapat dilihat pada tabel berikut dan **Lampiran 10**.

Tabel 107. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan

No.	Wajib Pajak	Saldo Piutang 2025	Kualitas Piutang	%	Penyisihan Per 31 Des 2025 (Rp)
1	PDAM Tirta Mon Pase	407.715.625,00	Macet	100%	(407.715.625,00)
2	PT. PTPN-I (Kb. Cot Girek)	-	Lancar	0,5%	-
3	PDAM Tirta Peusada	76.563.030,00	Macet	100%	(76.563.030,00)
4	PDAM Tirta Peusada	2.526.360,00	Lancar	0,5%	(12.631,80)
5	Perumdam Tirta Keumuneng	85.841.200,00	Macet	100%	(85.841.200,00)
6	PT. Pertamina EP Hulu Migas	370.010,00	Macet	100%	(370.010,00)
7	PT. Bahari Dwi Kencana Lestari (PT. Bumi Sama Ganda)	9.090.360,00	Macet	100%	(9.090.360,00)
8	PTPN - I Kb. Aceh Tamiang	-	Lancar	0,5%	-
9	PDAM Tirta Meulaboh	175.014.075,00	Macet	100%	(175.014.075,00)
10	PT. Energi Alam Raya Semesta	2.646.000,00	Macet	100%	(2.646.000,00)
11	PDAM Tirta Krueng Meureudue	-	Macet	100%	-
12	PDAM Tirta Krueng Meureudue	-	Macet	100%	-
13	PDAM Tirta Krueng Meureudue	4.972.000,00	Macet	100%	(4.972.000,00)
14	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata	8.957.880,00	Macet	100%	(8.957.880,00)
15	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata	10.329.130,00	Macet	100%	(10.329.130,00)
16	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1	3.358.452,00	Macet	100%	(3.358.452,00)
17	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	-	Lancar	0,5%	-
18	PT. Ika Bina Agro Wisesa	-	Lancar	0,5%	-
19	PT. Perkasa Subur Sakti/BSF	907.440,00	Lancar	0,5%	(4.537,20)
20	PT. Parasawita	-	Lancar	0,5%	-
21	PT. Sisirau	-	Lancar	0,5%	-



No.	Wajib Pajak	Saldo Piutang 2025	Kualitas Piutang	%	Penyisihan Per 31 Des 2025 (Rp)
22	PT. Agro Sinergi Nusantara (Batee Puteh)	-	Lancar	0,5%	-
23	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	-	Lancar	0,5%	-
24	PT. Seunagan Energi	-	Lancar	0,5%	-
25	PT. Pupuk Iskandar Muda	15.754.342,00	Lancar	0,5%	(78.771,71)
26	PT. Bumi Daya Agrotamas	1.888.320,00	Lancar	0,5%	(9.441,60)
27	PT. Socfindo Lae Butar	609.960,00	Lancar	0,5%	(3.049,80)
Jumlah		806.544.184,00			(784.966.194,11)

Sumber: Data diolah

5.3.1.9. Piutang Retribusi

Per 31 Desember 2025
Rp117.515.619.227,00

Per 31 Desember 2024
Rp101.641.577.163,00

Piutang Retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp117.515.619.227,00 yang terdiri dari:

Tabel 108. Rincian Piutang Retribusi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis	116.007.977.359,00	100.593.732.635,00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	261.499.150,00	234.537.550,00
Piutang Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan			
3	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	7.986.000,00	19.900.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.199.056.718,00	793.406.978,00
Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya			
5	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	19.900.000,00	-
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah			
7	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	19.200.000,00	-
Jumlah		117.515.619.227,00	101.641.577.163,00

Rincian piutang retribusi untuk masing-masing SKPA disajikan sebagai berikut:

Tabel 109. Rincian Mutasi Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	92.735.832.836,00	107.651.039.143,00	87.764.420.487,00	112.622.451.492,00
2	Rumah Sakit Jiwa	3.050.428.325,00	-	1.734.324.432,00	1.316.103.893,00
3	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	4.807.471.474,00	2.552.598.043,00	5.290.647.543,00	2.069.421.974,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	234.537.550,00	261.499.150,00	234.537.550,00	261.499.150,00
5	Dinas Perhubungan Aceh	70.670.711,00	85.542.318,00	70.670.711,00	85.542.318,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	19.900.000,00	53.900.000,00	34.700.000,00	39.100.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	722.736.267,00	424.135.733,00	25.371.600,00	1.121.500.400,00
Jumlah		101.641.577.163,00	111.028.714.387,00	95.154.672.323,00	117.515.619.227,00

Sumber: Data diolah

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Piutang Retribusi Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Aceh sebesar 112.622.451.492,00 merupakan piutang retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang menjadi hak Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin yang belum

diterima pembayarannya dari masyarakat umum/perorangan maupun pihak penjamin akibat telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Rumah Sakit Jiwa

Piutang Retribusi Rumah Sakit Jiwa Aceh sebesar Rp1.316.103.893,00 merupakan piutang retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang menjadi hak Rumah Sakit Jiwa yang belum diterima pembayarannya dari masyarakat umum/perorangan maupun pihak penjamin akibat telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Rumah Sakit Ibu dan Anak

Piutang BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp2.069.421.974,00 merupakan klaim atau tagihan yang telah dilakukan oleh BLUD-RSIA yang ditandai dengan dikeluarkannya SK oleh Pengguna Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Klaim Pending BPJS Juli s/d November 2025 sebesar Rp1.403.111.376,00;
- b. Klaim Obat Kemo dan Kronis Oktober s/d Desember 2025 sebesar Rp72.545.143,00;
- c. Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis Juli s/d Oktober 2025 sebesar Rp14.460.455,00;
- d. Klaim Ambulance Dinkes September s/d Desember 2025 sebesar Rp13.979.000,00;
- e. Klaim Lab PA Rumah Sakit Ibnu Sina Oktober s/d Desember 2025 sebesar Rp7.837.000,00;
- f. Klaim CT Scan Rumah Sakit Ibnu Sina Oktober s/d Desember 2025 sebesar Rp26.075.000,00;
- g. Klaim Radiologi Rumah Sakit Meuraxa dan RSUDZA Oktober s/d Desember 2025 sebesar Rp528.967.000,00;
- h. Klaim CT Scan Klinik K-Sehat Wal'Afiat Desember 2025 sebesar Rp1.490.000,00; dan
- i. Klaim Lab Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang Desember 2025 sebesar Rp957.000,00.

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Piutang Retribusi pada DLHK adalah Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp261.499.150. Terdiri dari Kota Banda Aceh Rp228.934.150,00 dan Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp32.565.000,00.

5. Dinas Perhubungan Aceh

Piutang Retribusi 2025 pada Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp85.542.318,00 terdiri dari Piutang Retribusi Pasar, Grosir, dan/atau Pertokoan sebesar Rp7.986.000,00 dan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp77.556.318,00.

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Piutang Retribusi 2025 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp39.100.000,00 yang merupakan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat kegiatan Usaha lainnya berupa Penyewaan Kantin Museum Tsunami sebesar Rp13.360.000,00 dan Kantin Dinas sebesar Rp6.540.000. serta Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa Rumah Dinas dan Mess sebesar Rp19.200.000,00.

7. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Piutang Retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2025 sebesar Rp1.121.500.400,00 yang merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan berupa gudang pengepakan dan kios pada UPTD PPS Kutaraja dan Piutang Retribusi warung kuliner pada UPTD PPN Idi.

Rincian Piutang Retribusi per masing-masing Wajib Retribusi dirincikan pada **Lampiran 11**.

5.3.1.10. Penyisihan Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
5.3.1.11. Piutang Lain-lain PAA yang Sah	Rp(24.210.268.826,30)	Rp(24.004.919.720,26)

Piutang Lain-lain PAA yang Sah timbul akibat adanya pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan yang terdiri dari:

Tabel 111. Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAA yang Sah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Sewa BMD	513.127.074,00	150.000.000,00	663.127.074,00	-
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	5.000.036.000,00	5.000.000.000,00	5.000.036.000,00	5.000.000.000,00
3	Piutang Pendapatan BLUD	23.161.940.000,00	4.954.781.043,00	10.995.743,00	28.105.725.300,00
Jumlah		28.675.103.074,00	10.104.781.043,00	5.674.158.817,00	33.105.725.300,00

Sumber: Data diolah

Saldo Piutang Lain-lain PAA yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.105.725.300,00 terdiri dari:

Tabel 112. Rincian Piutang Lain-lain PAA yang Sah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Hasil Sewa BMD			
1	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	-	482.127.074,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	31.000.000,00
Jumlah		-	513.127.074,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian			
1	Dinas Syariat Islam Aceh	-	36.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah		5.000.000.000,00	5.000.036.000,00
Piutang Pendapatan BLUD			
1	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	27.850.925.300,00	23.161.940.000,00
2	Rumah Sakit Jiwa	254.800.000,00	-
Jumlah		28.105.725.300,00	23.161.940.000,00
Total		33.105.725.300,00	28.675.103.074,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Piutang Lain-lain PAA yang Sah terdiri dari Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp5.000.000.000,00, dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp28.105.725.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp5.000.000.000,00 yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berupa Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dari Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Kepala BPKA kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 900/2956 tanggal 21 Desember 2023 perihal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Tidak Terealisasi; dan
2. Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp28.105.725.300,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp27.850.925.300,00 dan Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp254.800.000,00.

5.3.1.12. Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah Per 31 Desember 2025 Rp(25.992.926.978,72) Per 31 Desember 2024 Rp(23.553.713.597,37)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Rincian mutasi tambah dan kurang Piutang Lain-lain PAA yang Sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 113. Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	(4.370.635,37)	(150.000.000,00)	(154.370.635,37)	-
2	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	(500.000.180,00)	-	(180,00)	(500.000.000,00)
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(23.049.342.782,00)	(2.446.820.679,34)	(3.236.482,62)	(25.492.926.978,72)
Jumlah		(23.553.713.597,37)	(2.596.820.679,34)	(157.607.297,99)	(25.992.926.978,72)

Sumber: Data diolah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp(25.992.926.978,72) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114. Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD			
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	-	(2.410.635,37)
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	(1.960.000,00)
	Jumlah	-	(4.370.635,37)
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian			
1	Dinas Syariah Islam Aceh	-	(180,00)
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	(500.000.000,00)	(500.000.000,00)
	Jumlah	(500.000.000,00)	(500.000.180,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD			
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	(25.467.446.978,72)	(23.161.940.000,00)
2	Rumah Sakit Jiwa	(25.480.000,00)	112.597.218,00
	Jumlah	(25.492.926.978,72)	(23.049.342.782,00)
	Total	(25.992.926.978,72)	(23.553.713.597,37)

Sumber: Data diolah

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.13. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Rp9.085.597.513,86 Rp8.869.168.610,86

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak tagih atas hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.085.597.513,86 terdiri dari:

Tabel 115. Rincian Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	8.869.168.610,86	216.428.903,00	-	9.085.597.513,86
Jumlah	8.869.168.610,86	216.428.903,00	-	9.085.597.513,86

Sumber: Data diolah

Rincian Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 116. Rincian Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah			
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2.501.000.000,00	2.501.000.000,00
	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2.501.000.000,00	2.501.000.000,00
	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2.501.000.000,00	2.501.000.000,00
	Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja	690.898.610,86	690.898.610,86
	Masa denda	225.090.000,00	225.090.000,00
	Masa denda	225.090.000,00	225.090.000,00
	Masa denda	225.090.000,00	225.090.000,00
	Jumlah I	8.869.168.610,86	8.869.168.610,86
2	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin		
	Layanan Parkir (Bagi Hasil Sewa Lahan Parkir November 2025)	30.571.980,00	-

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Layanan Parkir (Bagi Hasil Sewa Lahan Parkir Desember 2025)	24.861.180,00	-
	Bagi Hasil Apotik Kimia Farma Desember 2025	10.995.743,00	
	Sisa Piutang Parkir Tahun Lalu	150.000.000,00	
	Jumlah II	216.428.903,00	-
	Total	9.085.597.513,86	8.869.168.610,86

Sumber: Data diolah

a. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Pemerintah Aceh melakukan kerja sama dengan PT AHM jangka waktu 20 (dua puluh tahun) untuk pemanfaatan tanah dan bangunan (Mess Aceh) milik Pemerintah Aceh di Jalan R.P. Soeroso Nomor 14 Menteng Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan kerja sama untuk mengoptimalisasi aset Pemerintah Aceh dalam rangka penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA). Objek dan bentuk kerja sama adalah Pemerintah Aceh menyerahkan kepada PT AHM tanah dan bangunan gedung permanen serta barang inventaris lainnya, di mana foto udara lokasi tanah dan bangunan, gambar situasi tanah dan bangunan, layout bangunan gedung dan foto kondisi bangunan gedung dan daftar inventaris lainnya terlampir dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) Nomor 11/PKS/2014 dan Nomor 08/DIR/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan PT AHM Indonesia, atas objek tanah dan bangunan tersebut PT AHM melakukan pemanfaatan, mengelola dan/atau mengusahakan dalam keadaan baik dengan kewajiban membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan setiap tahun kepada Pemerintah Aceh.

Kontribusi tetap yang harus dibayarkan oleh PT AHM kepada Pemerintah Aceh setiap tahun sebesar Rp2.501.000.000,0 (Dua Milyar Lima Ratus Satu Juta Rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan. Pembagian hasil keuntungan pengelolaan sebesar 15% (lima belas persen) dari laba bersih setelah pajak berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Pemerintah Aceh paling lambat 30 Maret tahun berikutnya. Kontribusi tahun pertama harus dibayar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan.

Pasal 5 ayat (2) huruf e Perjanjian Kerja sama menyebutkan PT AHM berkewajiban menyeter ke rekening Kas Umum Aceh secara bertahap selama 4 (empat) tahun biaya penyusutan dari gedung dan bangunan yakni sebesar 2% (dua persen) dihitung dari nilai perolehan bangunan gedung sejak perjanjian kerja sama ditandatangani dan penyeteran tahap pertama sebesar 1% (satu persen) pada bulan Juni tahun 2016 dan tahap kedua sebesar 1% (satu persen) pada bulan Juni tahun 2018. Lebih lanjut Pasal 9 ayat (5) PKS menyebutkan keterlambatan pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, PT AHM akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu per seribu) per hari maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender, kecuali dalam keadaan kahar (*force majeure*).

Penyeteran kontribusi tetap tahun pertama dibayarkan sebesar Rp2.501.000.000,00 pada tanggal 2 Oktober tahun 2014 ke Kas Umum Aceh melalui Bank Central Asia (BCA). Sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2015 PT AHM belum membayar

kontribusi tetap tahun kedua sehingga Pemerintah Aceh mengirimkan surat kepada PT AHM Indonesia untuk menyetor kontribusi tetap tahap kedua serta denda keterlambatan sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 590/26478 tanggal 19 November 2015. Singkatnya sampai dengan awal tahun 2018 PT AHM belum menyetorkan tunggakan kontribusi tetap beserta denda keterlambatan dan biaya penyusutan yang tertera dalam PKS. Pemerintah Aceh telah mengirimkan beberapa kali surat teguran keterlambatan pembayaran dan telah melakukan beberapa kali rapat pertemuan penyelesaian permasalahan perjanjian kerja sama dengan PT AHM.

Tahun 2018 dikeluarkan Surat Gubernur Aceh Nomor: 013/6925 tanggal 5 Maret 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT AHM Indonesia perihal Pemutusan Perjanjian Kerja sama Nomor 11/PKS/2014 dan Nomor P08/DIR/V/2014, yang isinya antara lain menyebutkan PT AHM Indonesia hingga saat ini tidak menepati kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam PKS, sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 total tunggakan kontribusi tetap sebesar Rp.7.503.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus ratus tiga juta rupiah), tunggakan biaya penyusutan nilai perolehan gedung yang jatuh tempo pada bulan Juni 2016 sebesar Rp690.898.611,00 (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah), total denda keterlambatan sebesar Rp675.270.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta menyebutkan bahwa sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut Pemerintah Aceh memutuskan perjanjian kerja sama dengan PT AHM.

Selanjutnya pada September 2018 PT AHM mengajukan gugatan kepada Pemerintah Aceh pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 551/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 28 Februari 2019 antara PT AHM Indonesia selaku Penggugat melawan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh cq. Gubernur Daerah Istimewa Aceh sebagai Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bermuara atau bersumber dari tidak dilaksanakannya secara konsekuen Perjanjian Kerja sama Nomor 11/PKS/2014 dan Nomor 08/DIR/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan (Mess Aceh) yang terletak di Jl. R.P. Suroso Nomor 14 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat oleh pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Majelis hakim menimbang dan memutuskan:

Sependapat dengan Pemerintah Aceh yang disampaikan melalui eksepsi (nota keberatan/bantahan) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh PT AHM Indonesia karena sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Aceh dan PT AHM Indonesia bila terjadi perselisihan maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Karena eksepsi Pemerintah Aceh dikabulkan maka PT AHM Indonesia dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara.

Mengadili dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi Pemerintah Aceh, menyatakan pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara dan menghukum PT AHM Indonesia untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp316.000,00.



- b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp216.428.903,00 merupakan Piutang Layanan Parkir Bulan November sebesar Rp30.571.980,00, bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp24.861.180,00, Bagi Hasil Apotik Kimia Farma Desember 2025 sebesar Rp10.995.743,00 dan Sisa Piutang Parkir Tahun Lalu sebesar Rp150.000.000,00.

5.3.1.14. Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp(9.022.350.114,76) **Rp(8.869.168.610,86)**

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp(9.022.350.114,76) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117. Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(8.869.168.610,86)	(153.181.503,90)	-	(9.022.350.114,76)
Jumlah	(8.869.168.610,86)	(153.181.503,90)	-	(9.022.350.114,76)

Sumber: Data diolah

Tabel 118. Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2025 (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh						
1	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2015	2.501.000.000,00	Macet	100%	(2.501.000.000,00)
2	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2016	2.501.000.000,00	Macet	100%	(2.501.000.000,00)
3	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2017	2.501.000.000,00	Macet	100%	(2.501.000.000,00)
4	Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja	2017	690.898.610,86	Macet	100%	(690.898.610,86)
5	Masa denda	2015	225.090.000,00	Macet	100%	(225.090.000,00)
6	Masa denda	2016	225.090.000,00	Macet	100%	(225.090.000,00)
7	Masa denda	2017	225.090.000,00	Macet	100%	(225.090.000,00)
Jumlah I			8.869.168.610,86			(8.869.168.610,86)
BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin						
1	Layanan Parkir (Bagi Hasil Sewa Lahan Parkir November 2025)	2025	30.571.980,00	Kurang Lancar	10%	(3.057.198,00)
2	Layanan Parkir (Bagi Hasil Sewa Lahan Parkir Desember 2025)	2025	24.861.180,00	Lancar	0,5%	(124.305,90)
3	Bagi Hasil Apotek Kimia Farma Desember 2025	2025	10.995.743,00	Lancar		
4	Sisa Piutang Parkir Tahun Lalu	2024	150.000.000,00	Macet	100%	(150.000.000,00)
Jumlah II			216.428.903,00			(153.181.503,90)
TOTAL			9.085.597.513,86			(9.022.350.114,76)

Sumber: Data diolah

Sehingga nilai Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Neto sebesar Rp63.192.420,39 yang diperoleh dari nilai Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan

Daerah sebesar Rp9.085.597.513,86 dikurangi dengan Penyisihan Piutang sebesar Rp(9.022.350.114,76)

5.3.1.15. Piutang Transfer Pemerintah Pusat **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp113.647.088.000,00 **Rp49.816.093.000,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp113.647.088.000,00 diakui berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 Tanggal 24 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 119. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Piutang Dana Perimbangan	49.816.093.000,00	202.984.546.000,00	139.153.551.000,00	113.647.088.000,00
	Jumlah	49.816.093.000,00	202.984.546.000,00	139.153.551.000,00	113.647.088.000,00

Sumber: Data diolah

Tabel 120. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	26.711.738.000,00	16.475.375.000,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	44.696.202.000,00	3.594.808.000,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	2.452.535.000,00	347.011.000,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	1.063.898.000,00	401.386.000,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	10.580.110.000,00	-
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	12.027.674.000,00	14.686.150.000,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	66.487.000,00	-
8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.931.298.000,00	825.815.000,00
9	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	13.097.563.000,00	13.451.161.000,00
10	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan- DR	19.583.000,00	34.387.000,00
	JUMLAH	113.647.088.000,00	49.816.093.000,00

Sumber: Data diolah

Piutang Dana Transfer Umum-DBH diakui sebesar Rp113.647.088.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, di mana seharusnya Pemerintah Aceh menerima jumlah kurang bayar atas dana transfer sebesar Rp85.277.115.000,00, namun penyaluran tersebut langsung dipotong sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dari Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Aceh Rp21.446.120.000,00.

5.3.1.16. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp56.509.583,08 **Rp56.509.583,08**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp56.509.583,08 merupakan bagian lancar dari sisa tagihan ganti rugi rumah dan tanah milik Pemerintah Aceh yang timbul akibat penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121. Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.509.583,08	-	-	56.509.583,08
Jumlah		56.509.583,08	-	-	56.509.583,08

Sumber: Data diolah

Tabel 122. Rincian Tagihan Penjualan Barang Milik Aceh

No	Nama	Tahun 2025	Tahun 2024
1	T. Bahrom Umri	20.206.526,93	20.206.526,93
2	Ummi Kalsum	15.696.015,15	15.696.015,15
3	Sirtu Hadi	20.607.041,00	20.607.041,00
Jumlah		56.509.583,08	56.509.583,08

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

5.3.1.17. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2025 Rp(56.509.583,08) Per 31 Desember 2024 Rp(56.509.583,08)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah penyisihan yang disajikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya – bagian lancar tagihan penjualan angsuran sehingga nilai piutang lainnya – bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 sebesar Rp(56.509.583,08) terdiri dari:

Tabel 123. Mutasi Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(56.509.583,08)	-	-	(56.509.583,08)
Jumlah		(56.509.583,08)	-	-	(56.509.583,08)

Sumber: Data diolah

Tabel 124. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	Nama	Nilai (Rp)	Kualitas Piutang	%	Jumlah (Rp)
1	T. Bahrom Umri	20.206.526,93	Macet	100%	(20.206.526,93)
2	Ummi Kalsum	15.696.015,15	Macet	100%	(15.696.015,15)
3	Sirtu Hadi	20.607.041,00	Macet	100%	(20.607.041,00)
Jumlah		56.509.583,08			(56.509.583,08)

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

Sehingga nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto sebesar Rp0,00 yang diperoleh dari nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp56.509.583,08 dikurangi dengan nilai Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp(56.509.583,08).

5.3.1.18. Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 Rp1.844.177.061,66 Per 31 Desember 2024 Rp1.823.037.616,89

Belanja Dibayar Dimuka merupakan pembayaran atas pajak kendaraan dan sewa gedung melewati TA 2025 sebesar Rp1.844.177.061,66, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 125. Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Beban Sewa Dibayar Dimuka	1.156.589.208,95	1.300.285.588,22	1.156.589.208,93	1.300.285.588,25
2	Beban Asuransi Dibayar Dimuka	666.448.407,94	543.891.473,41	666.448.407,94	543.891.473,41
Jumlah		1.823.037.616,89	1.844.177.061,64	1.823.037.616,87	1.844.177.061,66

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

5.3.1.18.1. Belanja Sewa Dibayar Dimuka **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
1.300.285.588,25 **Rp1.156.589.208,95**

Belanja Sewa Dibayar Dimuka merupakan pembayaran sewa gedung yang melewati TA 2024. Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.300.285.588,25 dapat dilihat pada tabel berikut dan **Lampiran 14**.

Tabel 126. Rincian Belanja Sewa Dibayar Dimuka

No	Uraian	Nomor Kontrak	Periode Kontrak		Nilai Kontrak	Beban Dibayar Dimuka 2025
			Awal	Akhir		
1	DINAS PENDIDIKAN ACEH					
	Sewa Kantor Cabang Dinas Nagan Raya	425.1/1595.a/2025	20/09/2025	19/09/2026	88.700.000,00	63.669.589,04
	Sewa Kantor Cabang Dinas Aceh Timur	001/SPS.GDG/CABDISDI KWIL-ATIM/2025	20/07/2025	19/07/2026	88.700.000,00	48.602.739,73
	Sewa Kantor Cabang Dinas Aceh Tamiang	011/N/748/2025	01/05/2025	30/04/2026	133.050.000,00	43.742.465,75
	Sewa Kantor Cabang Dinas Pidie Jaya	001/SPS.GDG/CABDISDI KWIL-PIJAY/2025	01/10/2025	30/09/2026	88.700.000,00	66.342.739,73
	Jumlah I				399.150.000,00	222.357.534,25
2	DINAS PANGAN ACEH					
	Sewa Ruko	500.1.3.1/827	08/05/2025	08/05/2026	72.000.000,00	25.052.054,79
	Jumlah II				72.000.000,00	25.052.054,79
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH					
	Sewa Kantor Samsat UPTD Wilayah XIX Subulussalam	000.1.4/09	10/08/2025	10/08/2026	27.800.000,00	16.832.328,77
	Sewa Kantor Samsat UPTD Wilayah XVI Pidie Jaya	00.1.4/04	01/09/2025	01/09/2026	19.000.000,00	12.649.315,07
	Sewa Kantor Samsat Gampong UPTD Wilayah III Pidie	000.1.4/04	15/03/2025	15/03/2026	25.000.000,00	5.068.493,15
	Sewa Kantor Samsat UPTD Wilayah XVI Pidie Jaya	000.1.4/03	02/03/2025	02/03/2026	38.000.000,00	6.246.575,34
	Sewa Kantor Samsat UPTD Wilayah XVIII Aceh Jaya	900.1.13.1/18	01/01/2025	31 DES 2025	14.000.000,00	-
	Jumlah III				123.800.000,00	40.796.712,33
4	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH					
	Uraian Kontrak Sewa Internet Rumah Dinas Indramayu	NO. SPK : 014/079/SPK/PL/2025	10/12/2025	09/12/2026	84.000.000,00	78.936.986,29
	Uraian Kontrak Sewa Internet Mess Aceh	NO. SPK : 014/080/SPK/PL/2025	10/12/2025	09/12/2026	169.200.000,00	159.001.643,85
	Kontrak Sewa Rumah	019/18/SPSH/2025	02/05/2025	01/01/2026	200.000.000,00	816.326,53
	Jumlah IV				453.200.000,00	238.754.956,67
5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH					
	Lisensi C Panel	EP-01K1SNSQWVVNQ1TEV7 VQP2KWYP	02/07/2025	03/07/2026	29.970.000,00	15.025.831,06



No	Uraian	Nomor Kontrak	Periode Kontrak		Nilai Kontrak	Beban Dibayar Dimuka 2025
			Awal	Akhir		
	Bandwidth	#EP-01JQ6ZDFG7XVT18C7JJS RTZ15D	01/03/2025	28/02/2026	2.377.789.164,00	384.354.960,76
	Perpanjangan Akun Ios Developer	Invoice: 025.INV-0040005	27/01/2025	26/01/2026	5.000.000,00	356.164,38
	Perpanjangan Layanan Whatsapp Bot	Invoice: 025.INV-0040003	16/04/2025	15/04/2026	1.000.000,00	287.671,23
	Zoom Meeting Pro	01/P-PL/BIDSAN/V/2025	02/06/2025	02/06/2026	6.000.000,00	2.498.630,14
	Lisensi Ssl	#EP-01JSGB7Q2Y97SE66M3N K2JQT5J	24/04/2025	24/04/2026	27.250.000,00	8.436.301,37
	Sewa Layanan Aplikasi Cloudflare	03/SPK.CLOUDFLARE/EG OV/IV/2025	05/05/2025	04/05/2026	56.443.500,00	19.175.326,03
	Vpn Pemerintah Aceh	#EP-01JSNM9ANHFYXJ2K8RJ0 57RZQ	15/03/2025	14/03/2026	101.565.500,00	20.313.100,00
	Jaringan Metro Pemerintah Aceh	#EP-01JT826102PR2XN3JMY7 367NBK	03/02/2025	02/02/2026	545.994.792,00	117.423.937,97
Jumlah V					3.903.798.084,00	567.871.922,94
6	SETDA ACEH					
	Sewa Rumah Kepala Perwakilan Aceh di Medan	No. 001/SEWA-MENYEWA/VIII/2025	08/08/2025	07/08/2026	50.000.000,00	30.000.000,00
	Sewa Bangunan Gedung Arsip BPBJ	NO. 900/1431	01/11/2025	01/11/2026	64.158.000,00	53.435.704,10
Jumlah VI					114.158.000,00	83.435.704,10
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG					
	Asuransi Polis Standar Kendaraan Bermotor Dinas Dpmg Aceh Tahun 2024	020/7624/SPK/XII/2024	23/12/2024	22/12/2025	74.499.000,00	-
Jumlah VII					74.499.000,00	-
8	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK					
	Sewa Tanah PT KAI	Nomor : KL.701/V/13/SDV.1.1-2025 Tgl. 28 Mei 2025	01/01/2025	31/12/2029	152.500.000,00	122.016.703,18
Jumlah VIII					152.500.000,00	122.016.703,18
Total					5.293.105.084,00	1.300.285.588,25

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

5.3.1.18.2. Belanja Asuransi Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2025
Rp543.891.473,39

Per 31 Desember 2024
Rp666.448.407,94

Belanja Asuransi Dibayar Dimuka adalah pembayaran asuransi kendaraan yang melewati TA 2025. Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp543.891.473,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127. Rincian Asuransi Dibayar Dimuka

Uraian	Nomor Polis Asuransi	Periode		Nilai Kontrak	Prestasi yang belum dinikmati
I. Sekretariat Daerah Aceh					
Asuransi Kendaraan Dinas Mobil Gubernur/VIP pada Biro Umum Sekretariat Daerah	No. SPK: 2631/SPK/2025	20/09/25	20/09/26	198.285.000,00	142.330.602,74
Asuransi Kendaraan Dinas Pool/Jabatan pada Setda	No. SPK: 2451.01/SPK/2025	02/09/25	02/09/26	99.120.300,00	68.162.178,90
Asuransi Kendaraan Pool Operasional Mobil Biro Administrasi Pembangunan Setda (No. Polisi BL 1016 AL, BL	No. SPK : Adm.pemb.000.3/4 03/VII/2025	30/07/25	30/07/26	33.237.700,00	19.123.060,27



Uraian	Nomor Polis Asuransi	Periode		Nilai Kontrak	Prestasi yang belum dinikmati
1012 AG, BL 1075 AO, BL 1076 AO dan BL 8031 AD					
Asuransi Kendaraan Pool Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh	No. SPK: 3191/SPK/2024	15/11/24	15/11/25	108.746.700,00	-
Premi Asuransi Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero Sport BK 1680 J Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan	No. Policy: 02-M 0001801/2024/2/0	27/05/24	27/05/25	9.010.000,00	-
Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Kijang Zenix BL 1078 AA Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan . Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Kijang Zenix BL 1079 AA Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan.	No. Policy: 02-M 0003812/2024/0/0 DAN No. Policy: 02-M 0003804/2024/0/0	23/04/24	23/04/25	16.620.250,00	-
Jumlah I				465.019.950,00	229.615.841,92
II. Sekretariat DPRA					
Premi Asuransi Kendaraan Pool Operasional	EP-01JXY5K6VEHXAB6 ET7VHFB8ZPT	18/06/25	17/06/26	470.196.413,00	216.419.170,92
Premi Asuransi Kendaraan Pool Suv	EP-01KD2QGSXTV70P WEQBKAKEAENM	23/12/25	22/12/26	17.792.588,00	17.353.866,65
Premi Asuransi Kendaraan Bus	EP-01KD539CS8YY7W MSAAH4AESMBH	24/12/25	22/12/26	28.602.637,00	27.897.366,50
Premi Asuransi Kendaraan Pool Operasional	027/059/SP/KPA.1/P2/2025	25/06/25	24/06/26	10.687.445,00	5.124.117,47
Premi Asuransi Mobil Pimpinan Dpra	EP-01JXF0ZH1FWMDY FW39WN1J21DD	12/06/25	11/06/26	106.979.044,00	47.481.109,94
Asuransi Mobil Jabatan Tahun 2024	027/226/SPK/KPA.1/P2/2024	23/12/24	22/12/25	78.288.850,00	-
Asuransi Kendaraan Pool Operasional Roda 4 dan Roda 6	027/001/SP/KPA.1/P2/2024	16/05/24	15/05/25	522.413.750,00	-
Jumlah II				1.234.960.727,00	314.275.631,48
III. Keurukon Katibul Wali					
Premi Asuransi Kendaraan Dinas Alphard 2.5 G AT BL 1030 LS, Mitsubishi New Pajero Sport BL 1013 AA, Ford Ranger 2.0 Wildtrack DC 4x4 10 AT BL 8042 JB sesuai Nomor Kontrak: 906/254.B /SPK/XI/2024 Tanggal 12 November 2025.	906/254.D/BAP/XII/2024	09/12/24	09/12/25	37.353.500,00	-
Jumlah III				37.353.500,00	-
IV. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong					
Asuransi Polis Standar Kendaraan Bermotor Dinas Dpmg Aceh Tahun 2024	020/7624/SPK/XII/2024	23/12/24	22/12/25	74.499.000,00	-
Jumlah IV				74.499.000,00	-
Total				1.811.833.177,00	543.891.473,39

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp543.891.473,39 dari total nilai polis asuransi sebesar Rp1.811.833.177,00 dengan jumlah kendaraan yang diasuransikan sebanyak 112 Unit dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRA sebanyak 61 unit kendaraan roda empat dan 1 unit bus (roda enam); dan
2. Sekretariat Daerah Aceh sebanyak 50 unit kendaraan roda empat.

**5.3.1.19. Persediaan****Per 31 Desember 2025
Rp231.901.692.026,31****Per 31 Desember 2024
Rp268.877.986.131,67**

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional serta barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Aceh sebesar Rp231.901.692.026,31 mengalami penurunan sebesar Rp36.976.294.105,36 dibandingkan TA 2024 sebesar Rp268.877.986.131,67. Persediaan terdiri dari bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian dan persediaan dalam proses dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128. Rincian Mutasi Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.246.000,00	61.592.000,00	14.246.000,00	61.592.000,00
2	Bahan Kimia	1.625.054.476,05	1.381.461.103,66	1.625.054.476,05	1.381.461.103,66
3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.258.588.738,00	1.149.794.467,69	1.258.588.738,00	1.149.794.467,69
4	Bahan Baku	-	160.000,00	-	160.000,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	48.160.000,00	83.990.400,00	48.160.000,00	83.990.400,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	581.740.814,41	437.855.202,73	581.740.814,41	437.855.202,73
7	Isi Tabung Gas	332.476.580,00	295.697.587,00	332.476.580,00	295.697.587,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.690.317.882,00	1.589.653.550,00	1.690.317.882,00	1.589.653.550,00
9	Bahan Lainnya	58.705.804.776,80	45.800.637.069,80	60.978.590.282,94	43.527.851.563,66
10	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.976.000,00	3.652.000,00	5.976.000,00	3.652.000,00
11	Suku Cadang Alat Laboratorium	127.841.292,00	66.407.481,00	127.841.292,00	66.407.481,00
12	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
13	Suku Cadang Lainnya	4.439.555.717,68	2.796.537.736,50	4.439.555.717,68	2.796.537.736,50
14	Alat Tulis Kantor	2.284.749.676,82	2.192.275.581,32	2.284.749.676,82	2.192.275.581,32
15	Kertas dan Cover	293.627.551,00	219.008.593,64	293.627.551,00	219.008.593,64
16	Bahan Cetak	2.305.579.679,47	2.497.060.900,03	2.305.579.679,47	2.497.060.900,03
17	Benda Pos	63.850.000,00	60.790.000,00	63.850.000,00	60.790.000,00
18	Bahan Komputer	610.159.013,00	888.757.157,33	610.159.013,00	888.757.157,33
19	Perabot Kantor	87.752.276,36	56.823.788,65	87.752.276,36	56.823.788,65
20	Alat Listrik	614.967.796,66	570.110.675,75	614.967.796,66	570.110.675,75
21	Perlengkapan Dinas	201.379.870,00	589.177.347,00	201.379.870,00	589.177.347,00
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.213.761.341,00	9.978.915.596,00	4.213.761.341,00	9.978.915.596,00
23	Suvenir/Cendera Mata	167.691.973,33	241.527.191,66	165.691.973,33	243.527.191,66
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.384.735.882,48	19.697.868.868,61	20.987.722.723,48	5.094.882.027,61
25	Obat	78.182.704.826,43	83.068.165.113,58	111.565.455.037,00	49.685.414.903,01
26	Obat-obatan Lainnya	15.359.800,00	166.417.251,00	15.359.800,00	166.417.251,00
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	103.430.137.064,18	106.612.650.368,07	104.588.125.742,18	105.454.661.690,07
28	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	205.800.000,00	1.521.473.957,00	205.800.000,00	1.521.473.957,00
29	Pakan	985.511.604,00	684.087.754,00	985.511.604,00	684.087.754,00
30	Pipa Plastik PVC (UPVC)	455.500,00	-	455.500,00	-
31	Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	602.654.520,00	-	602.654.520,00
JUMLAH		268.877.986.131,67	283.316.203.262,02	320.292.497.367,38	231.901.692.026,31

Sumber: Data diolah

Rincian Persediaan pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada **Lampiran 15a dan 15b**.

Saldo Persediaan di atas tidak termasuk Bahan Habis Pakai yang telah kadaluwarsa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dan Dinas Kesehatan Aceh.

Obat yang kadaluwarsa sebesar Rp1.057.007.646,08, terdapat pada Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp2.657.113,00, Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp110.009.731,80, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebesar Rp12.017.770,00 dan Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp923.323.031,28. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15c**.

Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp31.910.951,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebesar Rp21.643.282,00 dan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp10.267.669,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15d**.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 Rp3.012.014.869.307,80 Per 31 Desember 2024 Rp2.935.572.613.358,12

Investasi Jangka Panjang yaitu investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari:

Tabel 129. Rincian Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	84.872.435.588,52	85.025.821.719,52
2	Investasi Permanen	2.927.142.433.719,28	2.850.546.791.638,60
Jumlah		3.012.014.869.307,80	2.935.572.613.358,12

Sumber: Data diolah

5.3.2.1. Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2025 Rp84.872.435.588,52 Per 31 Desember 2024 Rp85.025.821.719,52

Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2025 sebesar Rp84.872.435.588,52 merupakan Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Aceh adalah Dana Bergulir yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

5.3.2.1.1. Investasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 Rp84.872.435.588,52 Per 31 Desember 2024 Rp85.025.821.719,52

Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut di atas, dilakukan perhitungan nilai Penyisihan Dana Bergulir. Nilai Dana Bergulir yang dapat di realisasikan diperoleh dari saldo Dana Bergulir dikurangi dengan Penyisihan Dana Bergulir. Penyisihan Dana Bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Perhitungan nilai bersih Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel 130. Rincian Mutasi Dana Bergulir

No	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	42.251.461.000,00	-	-	42.251.461.000,00
2	Investasi Dana Bergulir PER	35.592.745.026,52	-	25.000.000,00	35.567.745.026,52
3	Investasi Dana Bergulir PINBUK	554.000.000,00	-	-	554.000.000,00



No	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
4	Investasi Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)	6.627.615.693,00	-	128.386.131,00	6.499.229.562,00
Jumlah		85.025.821.719,52	-	153.386.131,00	84.872.435.588,52

Sumber: Data diolah

1. Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp42.251.461.000,00 merupakan bantuan untuk koperasi/usaha kecil menengah dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat yang disalurkan pada TA 2007 s.d. 2009. Dana bergulir tersebut disisihkan sebesar 100% dengan kualitas macet disebabkan karena beberapa hal di antaranya penerima dana tidak diketahui keberadaannya, penerima dana mengalami kesulitan bangkrut, meninggal dunia dan beberapa mengalami musibah (*Force Majeure*).
2. Dana Bergulir PER sebesar Rp35.592.745.026,52 merupakan program Pemerintah Aceh yang dimulai pada TA 2001 hingga TA 2003 yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan pemberdayaan ekonomi rakyat berupa penyaluran kredit untuk Usaha Kecil dan Rumah Tangga serta Koperasi melalui beberapa Bank Umum, Perusahaan Daerah serta Koperasi. Pengelolaan dana PER pada lembaga-lembaga ekonomi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 518/368/2001 tentang Penunjukan Bank dan Koperasi Kantor Gubernur (KOPKAGA) untuk Penyaluran Dana Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Perbankan dan KOPKAGA. Pada TA 2025 pengurangan dana PER, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131. Rincian Setoran PER

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Keterangan
1	KPRI Syariah Kopkaga	25.000.000,00	25.000.000,00	Disetor pada tanggal 19 Desember 2025 ke Rekening BPKA BPNR
2	PT Bank Aceh Syariah	-	1.500.000,00	Disetor pada tanggal 27 Desember 2024
3	PT Bank Aceh Syariah	-	7.557.646,00	Disetor pada tanggal 05 Januari 2024
Jumlah		25.000.000,00	34.057.646,00	

Sumber: Data diolah

Tabel 132. Rekening Dana PER

No	Nama Rekening	Nomor Rekening
PT Bank BRI		
1.	Giro Khusus Penempatan Dana Pemerintah Aceh	0037.01.000192.30.5
2.	Giro Penampungan Jasa/Fee Pemerintah Aceh	0037.01.000200.30.2
3.	Giro Penampungan Fee Tim Teknis PMUKRT	0037.01.000202.30.4
PT Bank Aceh		
1.	Dana PER Aceh Barat	01.02.801001.1
2.	Dana PER Aceh Jaya	01.02.801002.0
3.	Dana PER Nagan Raya	01.02.801003.7
4.	Titipan Dana PER NAD	010.202.03.15
5.	Set. Bunga Kredit PER Provinsi	010.202.03.09
6.	Set. Pokok Kredit PER Propinsi	010.201.03.08
7.	Tim Teknis PMUKRTK	010.01.02.570779.2
8.	Rekening Khusus	01.02.121.200.0
PT BUKOPIN		
1.	PKPMUKRT & KOP	1002000136
2.	PKPMUKRT & KOP	1001999130

Sumber: Data diolah

Saldo Dana PER yang belum dikembalikan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 133. Saldo Dana PER

No.	Lembaga Bank Penyalur	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	PT. Bank BRI	6.491.598.037,00	-	-	6.491.598.037,00
2	PT. Bank Aceh	14.140.853.094,90	-	-	14.140.853.094,90
3	PT. Bank Bukopin	6.169.000.000,00	-	-	6.169.000.000,00
4	KPRI Kopkaga	1.488.034.847,00	-	25.000.000,00	1.463.034.847,00
5	PT. BPRM	7.303.259.047,62	-	-	7.303.259.047,62
Jumlah		35.592.745.026,52	-	25.000.000,00	35.567.745.026,52

Sumber: Data diolah

- Dana Bergulir PINBUK disalurkan masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 kepada sebelas Baitul Qiradh, dikelola selama lima tahun dan telah berakhir atau jatuh tempo pada 31 Desember 2014.

Tabel 134. Saldo Dana PINBUK

No	Nama BQ	Alamat	Penyertaan Modal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Amanah Nanggroe	Banda Aceh	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.	Cut Nyak Dhien	Banda Aceh	100.000.000,00	-	100.000.000,00
3.	BIMA	Banda Aceh	100.000.000,00	15.000.000,00	85.000.000,00
4.	Surya Madinah	Banda Aceh	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
5.	Abu Indrapuri	Aceh Besar	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
6.	Ar-Rahmah	Pidie Jaya	100.000.000,00	-	100.000.000,00
7.	Dewantara	Aceh Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8.	Surya Melati	Lhokseumawe	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
9.	Arafah	Aceh Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
10.	Al-Muslim	Aceh Tamiang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
11.	Al-Ikhwah	Meulaboh	100.000.000,00	21.000.000,00	79.000.000,00
Jumlah			1.100.000.000,00	546.000.000,00	554.000.000,00

Sumber: Data diolah

BQ Amanah Nanggroe, BQ Dewantara, BQ Arafah, dan BQ Al-Muslim telah mengembalikan dana masing-masing sebesar Rp100.000.000,00. Saldo dana pada BQ Bina Insan Mandiri dan BQ Abu Indrapuri masih dalam pembiayaan UKM masing-masing sebesar Rp85.000.000,00 dan Rp75.000.000,00. BQ Surya Madinah dan BQ Surya Melati mengalami musibah tercurinya agunan nasabah dan belum dapat mengembalikan sisa dana masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp75.000.000,00. BQ Cut Nyak Dhien dan BQ Ar-Rahmah dilaporkan telah tutup dan belum mengembalikan seluruh dana yang diterima masing-masing sebesar Rp100.000.000,00, demikian pula BQ LKMS Al-Ikhwah yang telah tutup dengan sisa dana yang belum dikembalikan Rp79.000.000,00.

Dana PINBUK telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp546.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135. Pengembalian Dana PINBUK

No	Nama BQ	Jumlah Pengembalian	Penyetor	Keterangan
1	Amanah Nanggroe	100.000.000,00	PINBUK Aceh	Telah disetor ke Rekening Kas Daerah tanggal 3 Juni 2015
2	BIMA	15.000.000,00		
3	Surya Madinah	60.000.000,00		
4	Abu Indrapuri	25.000.000,00		
5	Dewantara	100.000.000,00		
6	Surya Melati	25.000.000,00		
7	Arafah	100.000.000,00		
8	Al-Muslim	100.000.000,00		

No	Nama BQ	Jumlah Pengembalian	Penyetor	Keterangan
9	Al-Ikhwah	21.000.000,00		
Jumlah		546.000.000,00		

Sumber: Data diolah

4. Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.499.229.562,00 merupakan pinjaman LUEP dalam rangka mendanai Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan. Penagihan Dana Bergulir LUEP sudah diserahkan kepada KPKNL sebanyak 62 orang penerima bantuan. Saldo awal Dana Bergulir tahun 2025 sebesar Rp6.627.615.693,00, berkurang sebesar Rp128.386.131,00 terdiri dari setoran debitor TA 2025 sebesar Rp103.379.087,00, pembebanan biaya transaksi keuangan administrasi bank sebesar Rp30.000,00 dan pengurangan dari penyesuaian hasil rekonsiliasi dengan KPKNL tahun 2025 sebesar Rp24.977.044,00 dengan rincian pada **Lampiran 16a dan 16b**.

Saldo Dana Bergulir Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 disajikan sebagai investasi non permanen, namun telah dilakukan penyisihan 100 persen sehingga tidak lagi memenuhi definisi aset sesuai PSAP 01 dan PSAP 06, serta tidak mencerminkan substansi ekonomi karena manfaat ekonominya tidak dapat diharapkan.

5.3.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir	Per 31 Desember 2025 Rp(84.872.435.588,52)	Per 31 Desember 2024 Rp(85.025.821.719,52)
--	---	---

Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir. Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp(84.872.435.588,52) mengalami penurunan sebesar Rp153.386.131,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp(85.025.821.719,52) terdiri dari:

Tabel 136. Rincian Penyisihan Dana Bergulir

No	Uraian	Saldo 2025	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan	Beban Penyisihan
1	Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	42.251.461.000,00	Macet	100%	(42.251.461.000,00)
2	Investasi Dana Bergulir PER	35.567.745.026,52	Macet	100%	(35.567.745.026,52)
3	Investasi Dana Bergulir PINBUK	554.000.000,00	Macet	100%	(554.000.000,00)
4	Investasi Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)	6.499.229.562,00	Macet	100%	(6.499.229.562,00)
Jumlah		84.872.435.588,52			(84.872.435.588,52)

Sumber: Data diolah

Penurunan penyisihan tersebut menjadi Koreksi Ekuitas – Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen TA 2025.

5.3.2.2. Investasi Permanen	Per 31 Desember 2025 Rp2.927.142.433.719,28	Per 31 Desember 2024 Rp2.850.546.791.638,60
------------------------------------	--	--

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen TA 2025 sebesar Rp2.927.142.433.719,28 terdiri dari:

**Tabel 137. Rincian Investasi Permanen**

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	PT Bank Aceh Syariah	2.585.731.608.475,76	288.659.294.012,22	241.966.552.598,00	2.632.424.349.889,98
2	PT BPRS Mustaqim	113.754.004.369,84	3.303.905.025,46	1.580.109.813,00	115.477.799.582,30
3	PT Pembangunan Aceh	151.061.178.793,00	54.885.936.818,00	26.706.831.364,00	179.240.284.247,00
Jumlah		2.850.546.791.638,60	346.849.135.855,68	270.253.493.775,00	2.927.142.433.719,28

Sumber: Data diolah

Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada perusahaan daerah yaitu sebagai berikut:

1. PT Bank Aceh Syariah

Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138. Rincian Perhitungan Investasi pada Bank Aceh Syariah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2024	2.585.731.608.475,76	2.500.876.449.580,83
Penambahan Tahun 2025:		
Pengumuman - Laba/Rugi Bank Aceh Syariah Tahun 2025. (70,34% x Rp418.673.570.514,00)	288.659.294.012,22	324.425.604.200,93
Pembagian Dividen Tahun Anggaran 2025	(215.416.778.183,00)	(213.435.702.809,00)
Dana Pembangunan Tahun Anggaran 2025	(26.549.774.415,00)	(26.134.742.497,00)
Jumlah Tahun 2025	46.692.741.414,22	84.855.158.894,93
Jumlah Investasi s.d. Tahun 2025	2.632.424.349.889,98	2.585.731.608.475,76

Sumber: Data diolah

Nilai Investasi Awal sebesar Rp2.585.731.608.475,76. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Aceh Syariah Tahun 2025 *Audited* Penghasilan Komprehensif Rp418.673.570.514,00, persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 70,34%. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Aceh Tahun 2025, Pembagian Dividen kepada Pemerintah Aceh Tahun 2024 sebesar Rp215.416.778.183,00, Dana Pembangunan Daerah sebesar Rp26.549.774.415,00, sehingga nilai Investasi Akhir pada PT Bank Aceh Syariah sebesar Rp2.632.424.349.889,98.

2. PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda)

Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139. Rincian Perhitungan Investasi pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2024	113.754.004.369,84	112.286.388.574,41
Penambahan Tahun 2025:		
Pengumuman - Laba/Rugi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) Tahun 2025 (99,99% x Rp3.304.235.449,00)	3.303.905.025,46	2.872.668.366,43
Pembagian Dividen Tahun Anggaran 2025	(1.580.109.813,00)	(1.405.052.571,00)
Jumlah s.d. Tahun 2025	1.723.795.212,46	1.467.615.795,43
Jumlah Investasi s.d. Tahun 2025	115.477.799.582,30	113.754.004.369,84

Sumber: Data diolah

Nilai Investasi Awal sebesar Rp113.754.004.369,84. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) Tahun 2025 *Audited*, Laba Bersih sebesar Rp4.055.425.497,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 99,99% dan Pembagian Dividen sebesar

Rp1.580.109.813,00 Sehingga nilai Investasi Akhir PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) sebesar Rp115.477.799.582,30.

3. PT Pembangunan Aceh

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada PT Pembangunan Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140. Penyertaan Modal PT Pembangunan Aceh

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2024	151.061.178.793,00	70.962.110.593,00
Penambahan Tahun 2025:		
Koreksi Tambah Ekuitas -Pengakuan Laba Tahun sebelumnya	35.562.026,00	53.370.810.944,00
Pembagian Dividen Tahun Anggaran 2025	(26.706.831.364,00)	(26.685.405.472,00)
Pengumuman - Laba/Rugi PT PEMA Tahun 2025 (100% x Rp54.850.374.792,00)	54.850.374.792,00	53.413.662.728,00
Jumlah s.d. Tahun 2025	28.179.105.454,00	80.099.068.200,00
Jumlah Investasi s.d. Tahun 2025	179.240.284.247,00	151.061.178.793,00

Sumber: Data diolah

Nilai Investasi Awal sebesar Rp151.061.178.793,00. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh Tahun 2025, Pembagian dividen sebesar Rp26.706.831.364,00, Pengumuman - Laba/Rugi PT PEMA Tahun 2025 sebesar Rp54.850.374.792,00, Koreksi Tambah Ekuitas – Pengakuan Laba Tahun sebelumnya sebesar Rp35.562.026,00 Sehingga nilai Investasi Akhir PT Pembangunan Aceh sebesar Rp179.240.284.247,00.

5.3.3. Aset Tetap

Per 31 Desember 2025

Rp23.036.960.819.434,99

Per 31 Desember 2024

Rp23.706.212.478.516,88

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya dan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.036.960.819.434,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141. Rincian Mutasi Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah	7.023.028.028.681,09	8.088.241.638,00	823.529.000,00	7.030.292.741.319,09
2	Peralatan Dan Mesin	5.667.327.158.202,85	914.686.972.779,65	482.329.508.130,69	6.099.684.622.851,82
3	Gedung Dan Bangunan	8.772.150.756.625,38	650.025.160.529,31	486.071.234.386,12	8.936.104.682.768,57
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.942.662.319.028,20	742.728.767.022,37	443.487.098.509,05	17.241.903.987.541,50
5	Aset Tetap Lainnya	1.129.068.849.327,72	172.371.899.689,46	115.839.189.878,23	1.185.601.559.138,95
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.317.637.001.349,68	97.577.081.252,13	643.448.971.710,79	771.765.110.891,02
7	Akumulasi Penyusutan	(17.145.661.634.698,04)	(1.368.011.817.578,40)	(285.281.567.200,57)	(18.228.391.885.075,96)
	Jumlah	23.706.212.478.516,88	1.217.466.305.332,52	1.886.717.964.414,31	23.036.960.819.434,99

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.3.3.1. Tanah

Per 31 Desember 2025
Rp7.030.292.741.319,09

Per 31 Desember 2024
Rp7.023.028.028.681,09

Saldo Aset Tanah pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.030.292.741.319,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 142. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Tahun 2025
Saldo Awal	7.023.028.028.681,09
BERTAMBAH	8.088.241.638,00
Belanja Modal Tahun 2025	4.601.695.429,00
Hibah	-
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	168.123.417,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	-
Barang Jasa	181.233.792,00
Mutasi antar SKPA	305.189.000,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	-
Properti Investasi	2.832.000.000,00
BERKURANG	823.529.000,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	518.340.000,00
Mutasi antar SKPA	305.189.000,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	-
Penghapusan	-
Jumlah	7.030.292.741.319,09

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Tanah berasal dari:
 - a) Belanja modal tanah tahun 2025 sebesar Rp4.601.695.429,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Aceh sebesar Rp3.782.009.613,00 dan Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp819.685.816,00;
 - b) Reklasifikasi Antar Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebesar Rp168.123.417,00;
 - c) Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp181.233.792,00;
 - d) Mutasi Antar SKPA pada Dinas Pendidikan Dayah berupa pengalihan status pengguna dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh BAST Nomor 37333/BAST/XI/2025 Tanggal 10 November 2025 sebesar Rp305.189.000,00; dan
 - e) Properti Investasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.832.000.000,00.
2. Pengurangan saldo Tanah berasal dari:
 - a. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp518.340.000,00 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh berupa tanah yang akan direncanakan hibah ke Kabupaten Aceh Barat Daya (GOR SIGUPAI); dan
 - b. Mutasi Tanah antar SKPA sebesar Rp305.189.000,00 merupakan perpindahan aset dikarenakan tidak sesuai tugas dan fungsi SKPA bersangkutan yang terdapat pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh berupa pengalihan status pengguna dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh BAST Nomor 37333/BAST/XI/2025 Tanggal 10 November 2025.

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2025
Rp6.099.684.622.851,82

Per 31 Desember 2024
Rp5.667.327.158.202,85

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.099.684.622.851,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 143. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025
Saldo Awal	5.667.327.158.202,85
BERTAMBAH	914.686.972.779,65
Belanja Modal Tahun 2025	547.541.575.588,38
Hibah	34.305.341.044,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	133.281.910.144,56
Barang dan Jasa	836.307.750,00
Mutasi antar SKPA	3.270.051.213,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	183.448.422.335,71
Extracomptable	-
Utang Belanja Modal	12.003.364.704,00
Belanja Modal BLUD	-
BERKURANG	482.329.508.130,69
Hibah	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	112.471.900.945,12
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	91.842.170.042,82
Reklasifikasi antar Aset Lainnya	42.158.499.470,67
Barang dan Jasa	46.689.992.362,40
Reklasifikasi ke Persediaan	1.380.083.662,00
Mutasi antar SKPA	3.270.051.213,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	183.390.755.335,68
Extracomptable	1.126.055.099,00
Belanja Modal BOS/BOM	-
Jumlah	6.099.684.622.851,82

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berasal dari:
 - a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp547.541.575.588,38 yang terdiri dari:

Tabel 144. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	211.617.429.633,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.058.510.725,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	219.616.500,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	489.833.050,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	20.465.465.264,00
6	Rumah Sakit Jiwa	9.523.656.109,00
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	12.853.465.614,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	275.638.864,00
9	Dinas Pengairan Aceh	906.268.036,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	3.518.959.204,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	834.656.314,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	1.270.347.714,00
13	Dinas Sosial Aceh	2.681.045.424,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	151.642.150,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	632.950.300,00
16	Dinas Pangan Aceh	379.495.095,00
17	Dinas Pertanahan Aceh	2.111.515.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	8.388.182.785,00
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	363.359.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	547.585.366,00
21	Dinas Perhubungan Aceh	54.879.405.680,38
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	941.070.118,00
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	3.433.651.380,00



No	SKPA	Nilai
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	183.147.800,00
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	294.320.200,00
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	255.010.520,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	19.892.963.495,00
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	3.430.611.066,00
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.267.506.600,00
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	3.080.420.336,00
31	Dinas Peternakan Aceh	2.026.406.885,00
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	85.988.262.722,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	2.752.476.626,00
34	Sekretariat Daerah Aceh	30.168.740.526,00
35	Sekretariat DPRA	19.626.888.864,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.100.282.530,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	20.737.442.525,00
38	Badan Kepegawaian Aceh	168.179.097,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	1.720.302.795,00
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	11.861.577.030,00
41	Inspektorat Aceh	1.412.407.197,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	350.205.000,00
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	370.350.349,00
44	Dinas Syariat Islam Aceh	974.000.500,00
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	162.226.500,00
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1.999.605.800,00
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh	174.491.300,00
Jumlah		547.541.575.588,38

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.305.341.044,00 terdiri dari:

Tabel 145. Rincian Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	17.698.524.138,00	Terima Hibah dari Kementerian Kesehatan Ke Pemerintah Aceh
2	Dinas Sosial Aceh	586.796.466,00	Terima Hibah dari Kementerian Sosial Ke Pemerintah Aceh
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	253.680.400,00	Terima Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Pemerintah Aceh
4	Dinas Perhubungan Aceh	7.050.000.000,00	Terima Hibah dari Kementerian Perhubungan Ke Pemerintah Aceh
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	8.716.340.040,00	Terima Hibah dari Kementerian Pertanian ke Pemerintah Aceh
Jumlah		34.305.341.044,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebesar Rp17.698.524.138,00 merupakan hibah barang dari Kementerian Kesehatan (Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan) sesuai berita acara serah terima (BAST) nomor KN.01.08/D.V/3616/2025 Dan NO. 000.2.3.2./06631 berupa Alat kedokteran *radiodiagnostic* - MRI (*Magnetic Resonance Imaging*).
2. Dinas Sosial Aceh sebesar Rp586.796.466,00 merupakan hibah barang dari Kementerian Sosial (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial) sesuai BAST Nomor 526/4/PL.06/7/2024 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebesar Rp253.680.400,00 merupakan hibah barang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.2765/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/4/2020 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor.

4. Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp7.050.000.000,00 merupakan hibah barang dari Kementerian Perhubungan sesuai BAST Nomor HK.201/7/3/DJPD/2023 DAN 01/PKS/2023 Alat Angkutan Darat Bermotor – *Microbus* Rapid Transit Trans Kutaradja.
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp8.716.340.040,00 merupakan hibah barang dari:
 - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI sesuai BAST nomor 143/PL.130/C/06/2025 sebesar Rp878.560.000,00 berupa Alat Panen/Pengolahan;
 - Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sesuai BAST Nomor 558/PSP.KP/BMN/B.I/09/2025 sebesar Rp3.634.380.000,00 berupa *Tractor Four Wheel* (Dengan Kelengkapannya);
 - Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sesuai BAST nomor 551/PSP.KP/BMN/B.I/09/2025 sebesar Rp1.118.050.000,00 berupa *Portable Water Pump* (Pompa Air);
 - Kementerian Pertanian RI sesuai BAST Nomor 1848/PL.130/A4/04/2017 sebesar Rp92.050.000,00 berupa Sepeda Motor;
 - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI sesuai BAST Nomor 21/PL.10/C/06/2024 sebesar Rp313.500.040,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor – *Pick Up* dan Sepeda Motor; dan
 - Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor 464/PSP.KP/BMN/B/10/2024 sebesar Rp2.679.800.000,00 berupa *Tractor* Tangan Dengan Perlengkapannya.
- c. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp133.281.910.144,56 terdiri dari:

Tabel 146. Rincian Mutasi Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	72.247.565.282,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	128.049.600,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	74.869.500,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	135.296.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	6.307.041.220,00
6	Rumah Sakit Jiwa	2.008.714.268,00
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	336.883.000,00
8	Dinas Pengairan Aceh	56.410.200,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	1.187.024.446,42
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh	32.600.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	5.550.000,00
12	Dinas Sosial Aceh	543.463.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	9.900.000,00
14	Dinas Pangan Aceh	148.884.000,00
15	Dinas Pertanahan Aceh	42.624.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	417.784.000,00
17	Dinas Perhubungan Aceh	909.070.302,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	2.777.220.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	99.436.000,00

No	SKPA	Nilai
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	13.395.903.996,14
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	795.093.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	67.546.500,00
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.755.089.520,00
24	Dinas Peternakan Aceh	1.144.410.000,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	17.371.915.140,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.366.972.126,00
27	Sekretariat Daerah Aceh	204.620.376,00
28	Sekretariat DPRA	4.244.211.750,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	176.131.498,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.331.469.420,00
31	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	2.088.570.000,00
32	Inspektorat Aceh	2.997.000,00
33	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	74.925.000,00
34	Dinas Syariat Islam Aceh	298.500.000,00
35	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1.495.170.000,00
Jumlah		133.281.910.144,56

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- d. Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin sebesar Rp836.307.750,00, terdiri dari:

Tabel 147. Rincian Mutasi Tambah Belanja Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	3.150.000,00
2	Dinas Pertanahan Aceh	7.500.000,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	99.955.500,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	725.702.250,00
Jumlah		836.307.750,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- e. Mutasi antar SKPA Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.270.051.213,00 terdiri dari:

Tabel 148. Rincian Mutasi Tambah Mutasi antar SKPA Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Jiwa	317.413.000,00	Serah Terima dari RSIA berupa aset Peralatan dan Mesin Intra dengan BAST No : 028/112/BAST/2025 Tanggal 15 Desember 2025
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	85.000.000,00	Pindah Pencatatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sesuai BAST No. 021/BAST/KESBANGPOL/XII/2025 Tgl. 05 Desember 2025
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	515.264.000,00	Pindah Pencatatan dari Biro Umum Sekretariat Daerah Mobil 1 unit Berdasarkan BAST No. 2601071506/BAST/2026 Tgl. 7 Januari 2026
4	Sekretariat Daerah	2.011.300.000,00	Pindah Pencatatan dari Disperindag 2 Unit Kendaraan Hi-ace dan Venturer dengan nilai Rp1.030.500.000,00, dan dari Inspektorat 3 Unit berupa 2 Unit reborn 1 Unit Panther Touring senilai Rp980.800.000
5	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	341.074.213,00	Pindah Pencatatan dari Biro Umum Setda berupa 1 Unit DC Triton
Jumlah		3.270.051.213,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- f. Penyesuaian Nilai akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp183.448.422.335,71 yang terdiri dari:

Tabel 149. Rincian Mutasi Tambah Penyesuaian Nilai akibat dari Rekonsiliasi Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	452.113.250,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.340.033.144,45
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	3.030.994.000,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	290.992.050,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	52.255.000,00
6	Rumah Sakit Jiwa	5.372.193.382,00
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	58.506.000,00
8	Dinas Pengairan Aceh	403.056.520,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	1.435.566.455,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	1.737.377.683,27
11	Dinas Sosial Aceh	836.052.300,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.339.368.450,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	1.551.326.450,00
14	Dinas Pertanahan Aceh	531.436.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	13.080.002.998,00
16	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	451.805.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.689.953.926,00
18	Dinas Perhubungan Aceh	6.495.353.335,44
19	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	2.740.065.302,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	574.274.330,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	1.572.310.670,33
22	Sekretariat Majelis Adat Aceh	41.594.700,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	4.282.921.749,30
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	31.333.857.127,84
25	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	3.785.937.541,00
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	12.503.859.883,00
27	Dinas Peternakan Aceh	6.266.269.384,04
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	109.550.000,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.842.436.600,00
30	Sekretariat Daerah Aceh	21.161.414.725,00
31	Sekretariat DPRA	11.378.446.255,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	2.320.665.992,04
33	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	19.473.138.981,00
34	Badan Kepegawaian Aceh	1.934.164.200,00
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	1.781.919.500,00
36	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	8.267.712.972,00
37	Inspektorat Aceh	3.726.638.147,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	2.214.644.842,00
39	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	584.608.400,00
40	Dinas Syariat Islam Aceh	429.848.390,00
41	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	267.648.600,00
42	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	4.574.645.500,00
43	Sekretariat Baitul Mal Aceh	131.462.600,00
Jumlah		183.448.422.335,71

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- g. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.003.364.704,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

2. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp112.471.900.945,12, terdiri dari:

Tabel 150. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	52.621.663.655,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	107.514.600,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	74.869.500,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	135.296.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	2.994.800.000,00
6	Rumah Sakit Jiwa	831.138.768,00

No	SKPA	Nilai
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	339.147.400,00
8	Dinas Pengairan Aceh	56.410.200,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	3.613.050,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	32.600.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	5.550.000,00
12	Dinas Sosial Aceh	543.463.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	9.900.000,00
14	Dinas Pangan Aceh	148.884.000,00
15	Dinas Pertanahan Aceh	42.904.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	417.784.000,00
17	Dinas Perhubungan Aceh	17.545.929.235,98
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	2.777.220.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	99.436.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	18.935.384.846,14
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	566.325.000,00
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.755.089.520,00
23	Dinas Peternakan Aceh	1.144.410.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.366.972.126,00
25	Sekretariat Daerah Aceh	203.621.376,00
26	Sekretariat DPRA	4.244.211.750,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	176.131.498,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.331.469.420,00
29	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	2.088.570.000,00
30	Inspektorat Aceh	2.997.000,00
31	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	74.925.000,00
32	Dinas Syariah Islam Aceh	298.500.000,00
33	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1.495.170.000,00
Jumlah		112.471.900.945,12

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Rp91.842.170.042,82, terdiri dari:

Tabel 151. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	7.331.202.825,54
2	Dinas Pengairan Aceh	2.533.130.240,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	846.827.962,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	595.000.000,00
5	Dinas Perhubungan Aceh	795.000.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	795.093.000,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	74.479.666.267,28
8	Dinas Peternakan Aceh	645.700.000,00
9	Sekretariat Daerah Aceh	573.500.000,00
10	Sekretariat DPRA	2.798.378.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	85.000.000,00
12	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	255.720.798,00
13	Sekretariat Baitul Mal Aceh	107.950.950,00
Jumlah		91.842.170.042,82

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- c. Reklasifikasi antar Aset Lainnya sebesar Rp42.158.499.470,67 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp7.268.481.041,67 dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp34.890.018.429,00 berupa Reklasifikasi ke aset rusak berat.
- d. Beban Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.678.288.362,40, terdiri dari:

Tabel 152. Rincian Mutasi Kurang Beban Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	12.191.103.873,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	18.253.950,00
3	Dinas Perhubungan Aceh	33.654.497.269,40
4	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	57.756.800,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	42.340.000,00
6	Sekretariat Majelis Adat Aceh	4.375.620,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	14.000.000,00
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	33.320.000,00
9	Dinas Peternakan Aceh	159.790.050,00
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	232.899.000,00
11	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	80.258.550,00
12	Dinas Syariat Islam Aceh	25.382.000,00
13	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	163.293.250,00
14	Sekretariat Baitul Mal Aceh	1.018.000,00
Jumlah		46.678.288.362,40

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan sebesar Rp1.380.083.662,00, terdiri dari:

Tabel 153. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	194.382.652,00
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	18.560.000,00
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	25.641.000,00
4	Dinas Sosial Aceh	182.550.600,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	4.610.940,00
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	14.634.000,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	1.600.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	129.610.920,00
9	Sekretariat Daerah Aceh	808.493.550,00
Jumlah		1.380.083.662,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- f. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar SKPA sebesar Rp3.270.051.213,00, terdiri dari:

Tabel 154. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar SKPA

No	SKPA	Nilai
1	Rumah Sakit Ibu dan Anak	317.413.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.030.500.000,00
3	Sekretariat Daerah Aceh	856.338.213,00
4	Inspektorat Aceh	980.800.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	85.000.000,00
JUMLAH		3.270.051.213,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- g. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp183.390.755.335,68, yang terdiri dari:

Tabel 155. Rincian Mutasi Kurang Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	454.552.250,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.340.033.144,45
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	3.030.994.000,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	290.992.050,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	52.255.000,00
6	Rumah Sakit Jiwa	5.372.193.382,00
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	-
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-
9	Dinas Pengairan Aceh	403.056.520,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	1.435.566.455,00



No	SKPA	Nilai
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	1.737.377.683,27
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-
13	Dinas Sosial Aceh	836.052.300,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.339.368.450,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	1.551.326.450,00
16	Dinas Pangan Aceh	-
17	Dinas Pertanahan Aceh	531.436.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	13.080.002.998,00
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	451.805.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.689.953.926,00
21	Dinas Perhubungan Aceh	6.495.353.335,45
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	2.740.065.302,00
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	574.274.330,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	1.572.310.670,33
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	-
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	41.594.700,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	4.281.321.749,30
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	31.333.857.127,84
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	3.785.937.541,00
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	12.503.859.883,00
31	Dinas Peternakan Aceh	6.266.269.384,04
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	109.550.000,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.842.436.600,00
34	Sekretariat Daerah Aceh	21.161.414.725,00
35	Sekretariat DPRA	11.378.446.255,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	2.320.665.992,04
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	19.473.138.981,00
38	Badan Kepegawaian Aceh	1.934.164.200,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	1.781.919.499,96
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	8.267.712.972,00
41	Inspektorat Aceh	3.726.638.147,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	2.214.644.842,00
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	584.608.400,00
44	Dinas Syariah Islam Aceh	429.848.390,00
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	267.648.600,00
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	4.574.645.500,00
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh	131.462.600,00
Jumlah		183.390.755.335,68

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- h. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan *extracomtable* sebesar Rp1.126.055.099,00, terdiri dari:

Tabel 156. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin *Extracomtable*

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	630.379.079,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	44.057.720,00
3	Rumah Sakit Jiwa	29.890.000,00
4	Rumah Sakit Ibu dan Anak	18.000.000,00
5	Dinas Pertanahan Aceh	3.600.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	3.000.000,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	385.562.000,00
8	Dinas Peternakan Aceh	1.300.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	3.596.400,00
10	Sekretariat Daerah Aceh	5.649.900,00
11	Sekretariat DPRA	1.020.000,00
Jumlah		1.126.055.099,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 Rp8.936.104.682.768,57 Per 31 Desember 2024 Rp8.772.150.756.625,38

Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.936.104.682.768,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 157. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025
Saldo Awal	8.772.150.756.625,38
BERTAMBAH	650.025.160.529,31
Belanja Modal Tahun 2025	235.454.381.597,20
Hibah	578.804.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	82.429.277.201,71
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	-
Barang dan Jasa	5.525.762.401,67
Mutasi antar SKPA	500.000.000,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	316.819.025.755,93
Reklasifikasi dari KDP	334.751.580,00
Utang Belanja Modal	1.402.246.213,00
Properti Investasi	6.961.511.779,80
Extracomptable	19.400.000,00
Belanja Modal BLUD	
BERKURANG	486.071.234.386,12
Reklasifikasi antar Aset Tetap	63.993.760.578,92
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	26.323.821.565,00
Barang dan Jasa	53.892.301.315,78
Reklasifikasi Ke Persediaan	-
Mutasi antar SKPA	500.000.000,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	305.522.225.755,96
Reklasifikasi ke KDP	35.544.772.148,00
Extracomptable	294.493.022,48
Penghapusan	-
Utang Belanja Modal	-
Jumlah	8.936.104.682.768,57

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berasal dari:

- Realisasi Belanja Modal tahun 2025 Gedung dan Bangunan sebesar Rp235.454.381.597,20 yang terdiri dari:

Tabel 158. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	17.152.610.004,83
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	8.096.999.295,41
3	Dinas Kesehatan Aceh	50.121.788.100,00
4	Rumah Sakit Jiwa	14.605.856.636,00
5	Rumah Sakit Ibu dan Anak	2.312.358.468,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	31.461.500,00
7	Dinas Pengairan Aceh	199.399.678,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	81.380.916.787,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	441.262.500,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	655.132.458,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	327.473.700,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.629.461.606,72
13	Dinas Perhubungan Aceh	10.738.003.670,76
14	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	387.884.110,20
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	1.038.106.135,00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	11.651.520.600,00
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh	149.449.650,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	500.961.036,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	7.229.129.614,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.615.883.300,00
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	637.707.271,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.382.117.914,28

No	SKPA	Nilai
23	Sekretariat Daerah Aceh	426.218.281,00
24	Sekretariat DPRA	15.197.023.446,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	534.445.794,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	4.132.094.474,00
27	Badan Kepegawaian Aceh	198.701.681,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	1.790.167.500,00
29	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	196.850.044,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	33.000.078,00
31	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	660.396.264,00
Jumlah		235.454.381.597,20

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp578.804.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin berupa Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen (Lapangan Tenis) Terima Hibah dari Bank BSI Nomor Istimewa Tanggal 23 Juni 2025.
- c. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp82.429.277.201,71 yang terdiri dari:

Tabel 159. Rincian Mutasi Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	8.363.587.344,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.972.136.883,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	60.687.480.918,21
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	51.060.000,00
5	Rumah Sakit Jiwa	719.718.549,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	41.253.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	167.440.550,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.480.758.461,50
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	14.973.900,00
10	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	496.141.140,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	6.684.371.022,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	498.778.500,00
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	99.816.363,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	213.097.989,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	938.662.582,00
Jumlah		82.429.277.201,71

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- d. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.525.762.401,67 yang terdiri dari:

Tabel 160. Rincian Mutasi Tambah Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	443.142.524,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	3.916.406.805,58
3	Dinas Sosial Aceh	175.033.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	171.027.086,16
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	806.909.998,93
6	Sekretariat Baitul Mal Aceh	13.242.987,00
Jumlah		5.525.762.401,67

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- e. Mutasi Antar SKPA Gedung dan Bangunan sebesar Rp500.000.000,00 pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan Pengalihan Status berupa Bangunan gedung Laboratorium Permanen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp500.000.000,00 Nomor BAST 37333/BAST/XI/2025, tanggal 10 November 2025.

- f. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp316.819.025.755,93 terdiri dari:

Tabel 161. Rincian Mutasi Tambah Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	14.320.751.724,28
2	Rumah Sakit Jiwa	4.727.460.182,00
3	Dinas Pengairan Aceh	1.131.587.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	878.264.919,29
5	Dinas Sosial Aceh	0,01
6	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.570.046.479,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	1.057.749.716,00
8	Dinas Pertanahan Aceh	134.640.776,86
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	3.520.563.533,60
10	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1.028.132.587,44
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	553.945.287,00
12	Dinas Perhubungan Aceh	30.282.380.749,45
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	185.180.000,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	1.559.480.075,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	331.512.000,00
16	Sekretariat Majelis Adat Aceh	329.267.437,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	36.965.870.878,67
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	122.136.244.886,13
19	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	16.139.789.190,89
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	18.416.308.327,61
21	Dinas Peternakan Aceh	14.999.727.255,24
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	249.624.909,94
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	2.555.814.920,28
24	Sekretariat Daerah Aceh	6.023.042.981,74
25	Sekretariat DPRA	12.205.163.751,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	8.978.194.069,12
27	Badan Kepegawaian Aceh	655.688.755,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	9.679.385.670,83
29	Inspektorat Aceh	776.410.000,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	148.076.000,00
31	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	245.627.909,55
32	Dinas Syariat Islam Aceh	139.799.771,00
33	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	10.418.026,00
34	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	4.643.839.843,00
35	Sekretariat Baitul Mal Aceh	239.036.143,00
Jumlah		316.819.025.755,93

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- g. Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp334.751.580,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar Rp 299.786.580,00 berupa Gedung *Venue* Panahan PON XXI di SHB Lhong Raya dan Monumen tugu PON XXI di SHB Lhong Raya serta pada Dinas Sosial Aceh sebesar Rp34.965.000,00 berupa Bangunan Pagar UPTD RSBM.
- h. *Extracomptable* Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.400.000,00 pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berupa Lapangan Bola Voli dan Basket Kantor Disperindag Aceh.
- i. Utang belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.402.246.213,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang merupakan pekerjaan Rehabilitasi Gedung Balee Meuseuraya Aceh sebesar

Rp316.518.300,00 dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh sebesar Rp1.085.867.913,00.

- j. Properti Investasi sebesar Rp6.961.511.779,80 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berupa Gedung BKIA Banda Aceh.

2. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.993.760.578,92 yang terdiri dari:

Tabel 162. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	2.083.404.331,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	3.309.760.297,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	50.121.788.100,00
4	Rumah Sakit Jiwa	1.490.764.711,00
5	Rumah Sakit Ibu dan Anak	6.678.448,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	1.228.277.446,42
7	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	167.440.550,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.480.758.461,50
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	312.001.672,00
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	199.416.663,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	455.548.440,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	120.972.989,00
13	Sekretariat DPRA	738.737.893,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.602.119.422,00
15	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	196.850.044,00
16	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	479.241.111,00
Jumlah		63.993.760.578,92

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.323.821.565,00, yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp6.528.353.702,00 berupa Bangunan Gedung yang terdampak Bencana Hidrometeorologi;
 - 2) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp2.175.588.000,00 berupa reklasifikasi ke Aset Lain-lain Rencana Hibah;
 - 3) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp2.046.650.000,00 berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Rusak berat dan Aset Lain-lain Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah;
 - 4) Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh sebesar Rp15.145.467.231,00 berupa reklasifikasi ke Aset Lain-lain Rencana Hibah berupa Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen ke Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (GOR SIGUPAI);
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp427.762.632,00 berupa Bangunan Gedung yang terdampak Bencana Hidrometeorologi.
- c. Beban Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.892.301.315,78 terdiri dari:

Tabel 163. Rincian Mutasi Kurang Beban Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	186.557.648,00
2	Rumah Sakit Ibu dan Anak	302.398.657,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	46.135.803.805,58
4	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	424.045.450,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	186.469.600,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	148.703.145,22
7	Dinas Perhubungan Aceh	3.318.549.330,78
8	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	387.884.110,20
9	Sekretariat Majelis Adat Aceh	149.449.650,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	218.006.400,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	571.290.000,00
12	Sekretariat DPRA	468.219.313,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	534.445.794,00
14	Badan Kepegawaian Aceh	198.701.681,00
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	447.621.500,00
16	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	33.000.078,00
17	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	181.155.153,00
Jumlah		53.892.301.315,78

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- d. Mutasi antar SKPA Gedung dan Bangunan sebesar Rp500.000.000,00, merupakan Pengalihan Status berupa Bangunan gedung Laboratorium Permanen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp500.000.000,00 Nomor BAST 37333/BAST/XI/2025, tanggal 10 November 2025.
- e. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp305.522.225.755,96 terdiri dari:

Tabel 164. Rincian Mutasi Kurang Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	14.320.751.724,28
2	Rumah Sakit Jiwa	4.727.460.182,00
3	Dinas Pengairan Aceh	1.131.587.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	878.264.919,29
5	Dinas Sosial Aceh	0,02
6	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.570.046.479,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	1.057.749.716,00
8	Dinas Pertanahan Aceh	134.640.776,86
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	3.520.563.533,60
10	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1.028.132.587,44
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	553.945.287,00
12	Dinas Perhubungan Aceh	30.282.380.749,47
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	185.180.000,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	1.559.480.075,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	331.512.000,00
16	Sekretariat Majelis Adat Aceh	329.267.437,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	36.965.870.878,67
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	122.136.244.886,13
19	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	16.139.789.190,89
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	18.416.308.327,61
21	Dinas Peternakan Aceh	3.702.927.255,24
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	249.624.909,94
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	2.555.814.920,28
24	Sekretariat Daerah Aceh	6.023.042.981,74
25	Sekretariat DPRA	12.205.163.751,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	8.978.194.069,12
27	Badan Kepegawaian Aceh	655.688.755,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	9.679.385.670,83
29	Inspektorat Aceh	776.410.000,00

No	SKPA	Nilai
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	148.076.000,00
31	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	245.627.909,55
32	Dinas Syariat Islam Aceh	139.799.771,00
33	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	10.418.026,00
34	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	4.643.839.843,00
35	Sekretariat Baitul Mal Aceh	239.036.143,00
Jumlah		305.522.225.755,96

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- f. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke KDP sebesar Rp35.544.772.148,00 yang terdiri dari:

Tabel 165. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi ke KDP Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	33.660.784.748,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	97.659.500,00
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.291.129.600,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	495.198.300,00
JUMLAH		35.544.772.148,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- g. Extracomptable Gedung dan Bangunan sebesar Rp294.493.022,48 yang terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp20.526.035,48 berupa Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen dan Bangunan Terbuka Bangunan Bank Sampah;
- 2) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp3.400.000,00 berupa Batu Prasasti di Parkiran Gedung RSUDZA;
- 3) Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp24.960.000,00 berupa Taman Kantor di Kuta Malaka;
- 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp235.764.000,00 berupa Bangunan Penerangan Lampu PJU di Museum Tsunami;
- 5) Sekretariat Baitul Mal Aceh sebesar Rp13.242.987,00 berupa Taman Permanen Kantor.

5.3.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Rp17.241.903.987.541,50 Rp16.942.662.319.028,20

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.241.903.987.541,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 166. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Tahun 2025
Saldo Awal	16.942.662.319.028,10
BERTAMBAH	742.728.767.022,37
Belanja Modal Tahun 2025	107.640.896.800,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	449.242.281.040,30
Barang dan Jasa	4.251.357.068,69
Mutasi antar SKPA	380.949.290,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	179.718.622.444,38
Reklasifikasi dari KDP	-
Extracomptable	-
Utang Belanja Modal	1.494.660.379,00
Belanja Modal BLUD	-
BERKURANG	443.487.098.509,05
Reklasifikasi antar Aset Tetap	33.527.449.688,00

Uraian	Tahun 2025
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	229.020.009.164,67
Barang dan Jasa	449.128.202,00
Mutasi antar SKPA	380.949.290,00
Reklasifikasi Ke KDP	259.307.100,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	179.718.622.444,38
Extracomptable	131.632.620,00
Penghapusan	-
Utang Belanja Modal	-
Jumlah	17.241.903.987.541,42

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari:

- Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp107.640.896.800,00 yang terdiri dari:

Tabel 167. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	83.916.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	51.308.220.944,00
3	Dinas Pengairan Aceh	36.752.168.950,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	214.080.200,00
5	Dinas Perhubungan Aceh	199.159.752,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	832.888.500,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	647.021.050,00
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	17.504.207.604,00
9	Sekretariat DPRA	99.233.800,00
JUMLAH		107.640.896.800,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp449.242.281.040,30, yang terdiri dari:

Tabel 168. Rincian Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	857.614.099,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	219.662.001,00
3	Rumah Sakit Jiwa	2.140.835.711,00
4	Dinas Pengairan Aceh	429.017.450.695,32
5	Dinas Perhubungan Aceh	16.786.159.483,98
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	99.600.300,00
7	Sekretariat DPRA	120.958.750,00
Jumlah		449.242.281.040,30

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp4.251.357.068,69, yang terdiri dari Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp4.191.505.448,69 dan pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Rp59.851.620,00.
- Mutasi Antar SKPA Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp380.949.290,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang merupakan Pengalihan Status Aset Berupa Instalasi Air Tanah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan BAST No. 000.2.3.2/11/BAST/I/2025 Tgl. 22 Januari 2025.
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp179.718.622.444,38 yang terdiri dari:

Tabel 169. Rincian Mutasi Tambah Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	28.518.990,00
2	Dinas Pengairan Aceh	121.437.293.749,90
3	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.706.605.484,84
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	808.473.365,46
5	Dinas Perhubungan Aceh	106.010.645,41
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	3.990.429.543,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	8.101.184.931,00
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	3.208.436.530,27
9	Dinas Peternakan Aceh	109.375.953,18
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	342.000.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	36.966.053.309,32
12	Sekretariat DPRA	199.585.100,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.972.045.342,00
14	Badan Kepegawaian Aceh	39.720.000,00
15	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	607.739.500,00
16	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	95.150.000,00
Jumlah		179.718.622.444,38

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- f. Utang Belanja Modal sebesar Rp1.494.660.379,00 yang merupakan Utang Belanja Modal pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp314.010.000,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp1.180.650.379,00 yang merupakan Penambahan Nilai dari Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2025/PN-BNA Tanggal 19 Mei 2025 yang merupakan Jalan Batas Pidie – Samalanga – Sp. Samalanga.

2. Pengurangan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp33.527.449.688,00, terdiri dari:

Tabel 170. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	20.535.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	14.707.204.034,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	214.080.200,00
4	Dinas Perhubungan Aceh	149.300.550,00
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	832.888.500,00
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	17.504.207.604,00
7	Sekretariat DPRA	99.233.800,00
Jumlah		33.527.449.688,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp229.020.009.164,67 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp91.187.718.824,00 dan Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp137.832.290.340,67 yang merupakan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang terdampak Bencana Hidrometeorologi.
- c. Beban Barang dan Jasa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp449.128.202,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp399.269.000,00 berupa Rencana Aksi Tahunan (RAT) karena pekerjaan Penyusunan RAT bukan merupakan Aset Tetap yang secara sifat tidak menghasilkan barang Berwujud hanya berupa jasa Konsultasi yang input nya hanya berupa dokumen.

- 2) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp49.859.202,00 berupa Pemeliharaan Tugu TIT Rehab *Movable Bridge* Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue.
- d. Mutasi Antar SKPA Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp380.949.290,00 merupakan Pengalihan Status Aset Berupa Instalasi Air Tanah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sesuai dengan BAST No. 000.2.3.2/11/BAST/I/2025 Tgl. 22 Januari 2025.
- e. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp179.718.622.444,38 yang terdiri dari:

Tabel 171. Rincian Mutasi Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	28.518.990,00
2	Dinas Pengairan Aceh	121.437.293.749,90
3	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.706.605.484,84
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	808.473.365,46
5	Dinas Perhubungan Aceh	106.010.645,41
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	3.990.429.543,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	8.101.184.931,00
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	3.208.436.530,27
9	Dinas Peternakan Aceh	109.375.953,18
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	342.000.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	36.966.053.309,32
12	Sekretariat DPRA	199.585.100,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.972.045.342,00
14	Badan Kepegawaian Aceh	39.720.000,00
15	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	607.739.500,00
16	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	95.150.000,00
Jumlah		179.718.622.444,38

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- f. Reklasifikasi ke KDP Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh sebesar Rp259.307.100,00 yang merupakan pekerjaan Perencanaan Pekerjaan yang fisiknya belum dikerjakan.
- g. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang merupakan *Extracomtable* sebesar Rp131.632.620,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp8.400.000,00;
 - 2) Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebesar Rp63.381.000,00 berupa Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum Dayah Perbatasan Singkil; dan
 - 3) Sekretariat Baitul Mal sebesar Rp59.851.620,00 berupa Pembuatan saluran drainase pada Kantor Baitul Mal.

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2025

Rp1.185.601.559.138,95

Per 31 Desember 2024

Rp1.129.068.849.327,72

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.185.601.559.138,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 172. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2025
Saldo Awal	1.129.068.849.327,72
BERTAMBAH	172.371.899.689,46
Belanja Modal Tahun 2025	87.301.469.673,00
Hibah	-
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	54.605.515.472,00

Uraian	Tahun 2025
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	-
Barang dan Jasa	1.486.200.000,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	28.978.714.544,46
BERKURANG	115.839.189.878,23
Reklasifikasi antar Aset Tetap	78.823.593.204,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	1.972.582.841,00
Barang dan Jasa	1.058.335.250,00
Reklasifikasi ke Persediaan	717.213.338,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	28.978.714.544,23
Penghapusan	2.830.232.500,00
Extracomtable	1.443.968.201,00
Utang Belanja Modal	14.550.000,00
Belanja Modal BOS/BOM	-
Jumlah	1.185.601.559.138,95

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp87.301.469.673,00 yang terdiri dari:

Tabel 173. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	74.650.550.673,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	14.530.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	3.534.237.220,00
4	Rumah Sakit Jiwa	2.902.699.100,00
5	Dinas Sosial Aceh	11.200.000,00
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	700.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	22.200.000,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	4.994.522.200,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.162.831.480,00
10	Sekretariat Daerah Aceh	999.000,00
11	Dinas Syariat Islam Aceh	7.000.000,00
Jumlah		87.301.469.673,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp54.605.515.472,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp45.127.346.308,00 berupa penyesuaian kode barang;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp8.784.906.614,00;
 - 3) Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp298.401.000,00;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar Rp3.613.050,00 merupakan reklasifikasi dari Alat Kantor Rumah Tangga;
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp391.248.500,00 berupa Aset Tetap Renovasi Gedung D Kantor Gubernur Aceh di mana Aset Gedung dan Bangunannya tercatat pada KIB Sekretariat Daerah Aceh;
- c. Belanja Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.486.200.000,00 pada Dinas Peternakan Aceh berupa pengadaan hewan ternak sebanyak 12.035 ekor ayam; dan

- d. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.978.714.544,46 yang terdiri dari :

Tabel 174. Rincian Mutasi Tambah Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Rumah Sakit Jiwa	280.064.100,00
2	Dinas Pengairan Aceh	21.871.011.661,00
3	Dinas Sosial Aceh	0,46
4	Dinas Pertanahan Aceh	10.045.728,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	99.000.000,00
6	Dinas Perhubungan Aceh	431.129.800,00
7	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	225.115.000,00
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.239.118.000,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	1.166.608.900,00
10	Sekretariat Daerah Aceh	219.932.975,00
11	Sekretariat DPRA	1.812.643.400,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.281.700.000,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	42.843.760,00
14	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	40.600.000,00
15	Inspektorat Aceh	35.734.700,00
16	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	1.168.160,00
17	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	221.998.360,00
Jumlah		28.978.714.544,46

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

2. Pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp40.755.980.453,00, terdiri dari:

Tabel 175. Rincian Reklasifikasi antar Aset Tetap

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	71.978.376.935,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	3.519.687.220,00
3	Rumah Sakit Jiwa	2.547.365.049,00
4	Dinas Pengairan	685.040.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	92.125.000,00
6	Sekretariat Daerah Aceh	999.000,00
Jumlah		78.823.593.204,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.972.582.841,00 yang terdiri dari Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp1.529.717.561,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebesar Rp442.865.280,00;
- c. Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.058.335.250,00 yang terdiri dari:

Tabel 176. Rincian Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	1.021.235.250,00
2	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	700.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	22.200.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	7.200.000,00
5	Dinas Syariah Islam Aceh	7.000.000,00
Jumlah		1.058.335.250,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- d. Reklasifikasi ke Persediaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp717.213.338,00 yang terdiri dari:

Tabel 177. Rincian Reklasifikasi ke Persediaan Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	336.149.287,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	14.530.000,00
3	Rumah Sakit Jiwa	355.334.051,00
4	Dinas Sosial Aceh	11.200.000,00
Jumlah		717.213.338,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- e. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.978.714.544,23 terdiri dari:

Tabel 178. Rincian Mutasi Kurang Penyesuaian Nilai Akibat Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Rumah Sakit Jiwa	280.064.100,00
2	Dinas Pengairan Aceh	21.871.011.661,00
3	Dinas Sosial Aceh	0,23
4	Dinas Pertanahan Aceh	10.045.728,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	99.000.000,00
6	Dinas Perhubungan Aceh	431.129.800,00
7	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	225.115.000,00
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.239.118.000,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	1.166.608.900,00
10	Sekretariat Daerah Aceh	219.932.975,00
11	Sekretariat DPRA	1.812.643.400,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.281.700.000,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	42.843.760,00
14	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	40.600.000,00
15	Inspektorat Aceh	35.734.700,00
16	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	1.168.160,00
17	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	221.998.360,00
Jumlah		28.978.714.544,23

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- f. *Extracomtable* Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.443.968.201,00 pada Dinas Pendidikan Aceh.
- g. Penghapusan Aset tetap Lainnya sebesar Rp2.830.232.500,00 pada Dinas Peternakan Aceh berupa Penghapusan ayam ternak disebabkan mati dan afkir sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 000.2.3.2/970/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Aceh dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Peternakan Aceh.
- h. Utang Belanja Modal sebesar Rp14.550.000,00 pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin.

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2025
Rp771.765.110.891,02

Per 31 Desember 2024
Rp1.317.637.001.349,68

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp771.765.110.891,02, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 179. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2025
Saldo Awal	1.317.637.001.349,68
BERTAMBAH	97.577.081.252,13
Belanja Modal Tahun 2025	-
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	96.649.399.142,00
Barang dan Jasa	927.682.110,13

Uraian	Tahun 2025
BERKURANG	643.448.971.710,79
Reklasifikasi antar Aset Tetap	491.916.538.621,53
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	151.532.433.089,26
Jumlah	771.765.110.891,02

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp96.649.399.142,00 yang terdiri dari:

Tabel 180. Rincian Reklasifikasi antar Aset Tetap

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	87.331.888,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	2.702.217.384,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	50.121.788.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	5.922.297.420,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	33.660.784.748,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	311.739.700,00
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.291.129.600,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	754.505.400,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	132.292.464,00
10	Sekretariat DPRA	717.012.943,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	272.208.340,00
12	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	196.850.044,00
13	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	479.241.111,00
Jumlah		96.649.399.142,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Penjelasan :

- Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp87.331.888,00 merupakan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Kota Langsa.
- Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebesar Rp2.702.217.384,00 Merupakan Lanjutan Pembangunan Gedung Administrasi Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil Rp. 2.702.217.384,00.
- Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp50.121.788.100,00 yang merupakan :
 - Pekerjaan Reviu DED RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh sebesar Rp99.319.200,00.
 - Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh Rp48.480.195.000,00.
 - Pengawasan Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh sebesar Rp1.542.273.900,00.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp5.922.297.420,00 merupakan :
 - Pelaksanaan Pekerjaan Reviu DED Ruas Jalan Bintang - Pungki(Sumber Dana Otsus Aceh) (PR-JLJB/10/2025). Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebesar Rp395.151.342,00.
 - Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan DED Ruas Jalan Krueng Mane - Sawang - Batas Bireuen (Sumber Dana Otsus Aceh) (PR-JLJB/02/2025) sebesar Rp991.290.162,00.
 - Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan DED Longsoran Ruas Jalan Jantho - Batas Aceh Jaya (Otsus) sebesar Rp994.357.758,00.

- d) Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan DED Penanganan Longsoran Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (Otsus) sebesar Rp782.838.600,00.
- e) Pelaksanaan Penyusunan DED Penanganan Longsoran Jalan Batas Gayo Lues - Babah Rot (Otsus) sebesar Rp484.265.361,00.
- f) Pelaksanaan Penyusunan DED Penanganan Longsoran Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (Otsus) sebesar Rp892.530.999,00.
- g) Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan DED Penanganan Longsoran Jalan Blangkejeren - Tongra- Batas Aceh Barat Daya (Otsus) sebesar Rp882.695.532,00.
- h) Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan DED Jembatan Ruas Jalan Kuala Tuha - Lamie (Otsus) sebesar Rp499.167.666,00.
- (5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar Rp33.660.784.748,00 merupakan :
 - a) Pembangunan Gedung Kantor BKA sebesar Rp1.085.867.913,00.
 - b) Pembangunan Power House Gedung Utama Dinas Perkim Aceh sebesar Rp199.600.000,00.
 - c) Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahap IV sebesar Rp23.526.496.000,00.
 - d) Pembangunan Interior Gedung Utama Dinas Perkim Aceh Sebesar Rp1.507.308.748,00.
 - e) Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh Tahap II sebesar Rp7.341.512.087,00.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebesar Rp311.739.700,00 yang merupakan :
 - a) Reviu DED Perencanaan Rekonstruksi Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) Bendung Lawe Kisam Sub. D.I lawe Bulan Desa lembah Alas Kec. Deleng Pokhkisen Kab. Aceh Tenggara (OTSUS ACEH) sebesar Rp71.393.000,00.
 - b) Pekerjaan reviu Perencanaan *Landscape* Geo Park Tsunami Aceh Gua Ek Leuntie Kec. Lhoong (OTSUS ACEH) sebesar Rp97.659.500,00.
 - c) Pekerjaan Reviu DED Perencanaan Rekonstruksi Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) Bendung D.I. Peudada Gampong Hagu Kec. Peudada Kab. Bireuen (OTSUS ACEH) sebesar Rp71.238.700,00.
 - d) Pekerjaan Reviu DED Perencanaan Rekonstruksi Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) D.I Kuta Tinggi Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara (OTSUS ACEH) sebesar Rp71.448.500,00.
- (7) Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh sebesar Rp1.291.129.600,00 yang merupakan :
 - a) Sirkuit Kuta Malaka sebesar Rp299.544.600,00.
 - b) DED Gedung Kempo sebesar Rp78.543.000,00.
 - c) Gedung Lapangan Tembak SHB sebesar Rp913.042.000,00.
- (8) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp754.505.400,00 yang merupakan :
 - a) Perencanaan Pembangunan TPI dan Pagar Keliling PP Panteraja sebesar Rp85.858.500,00.

- b) Perencanaan Rehab Kantor dan Dermaga PP Anak Laut sebesar Rp85.803.000,00.
- c) Perencanaan Pembangunan Kantor Administrasi dan TPI PP Sawang Ba'u Aceh Selatan sebesar Rp85.891.800,00.
- d) Perencanaan Rehabilitasi Gedung Mesin *Semi Contact Freezer* (SCF) dan Pengadaan Mesin *Semi Contact Freezer* (SCF) untuk ICS PPI Pusong Kota Lhok Seumawe sebesar Rp85.914.000,00.
- e) Perencanaan Rehab ICS Sabang sebesar Rp85.359.000,00.
- f) Perencanaan Rehab Fasilitas PPS Kutaraja sebesar Rp66.372.000,00.
- g) Perencanaan Pembangunan Jalan Akses PPI Peudada Bireuen sebesar Rp85.836.300,00.
- h) Perencanaan Kanopi Dermaga & Rehabilitasi Dermaga PPI Ujung Baroh Meulaboh sebesar Rp85.858.500,00.
- i) Perencanaan Rehabilitasi Dermaga PPI Ujung Serangga Abdya Rp61.272.000,00.
- j) Perencanaan Instalasi Air Bersih Mushalla PP Ujung Serangga Abdya sebesar Rp26.340.300,00.
- (9) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sebesar Rp132.292.464,00 yang merupakan Perencanaan PLTS *Rooftop* di Kantor Pemerintah.
- (10) Sekretariat DPRA sebesar Rp717.012.943,00 yang merupakan :
 - a) Perencanaan Rehab Instalasi Air Bersih pada Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp99.233.800,00;
 - b) Perencanaan Rehab Ruang Komisi VII sebesar Rp279.385.890,00;
 - c) Perencanaan Rehab Ruang Humas Sekretariat DPRA sebesar Rp89.014.637,00;
 - d) Perencanaan Renovasi Atap Gedung Komisi Sebesar Rp84.288.516,00;
 - e) Perencanaan Rehab Koridor Lantai 2 Gedung Sekretariat DPRA sebesar Rp66.411.300 dan Perencanaan Pembangunan Kantin Sekretariat DPRA sebesar Rp98.678.800,00.
- (11) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp272.208.340,00 yang merupakan :
 - a) Perencanaan Rehab Kantor UPTD Banda Aceh Rp96.733.500,00;
 - b) Perencanaan Rehab Halaman, Toilet dan Pos Satpam Kantor UPTD Lhokseumawe Rp15.109.000,00;
 - c) Perencanaan Penambahan ruang kerja, Penambahan toilet WP dan Pos Satpam; Pagar dan kantin Kantor UPTD Bener Meriah Rp32.833.000,00;
 - d) Perencanaan Rehabilitasi Atap Kantor, Atap Mushalla dan Pos Satpam UPTD Simeulue Rp16.144.600,00;
 - e) Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas UPTD Aceh Tenggara Rp24.844.600,00;
 - f) Perencanaan Rehab Halaman Kantor UPTD Bireuen dan Rehab Kantor Lama UPTD Bireuen Rp19.648.500,00;
 - g) Perencanaan Pengecatan dan penambahan dinding Alukubon UPTD Aceh Tengah Rp9.989.000,00;
 - h) Perencanaan Pembangunan Ruang Rapat dan Pembangunan Rumah Genset UPTD Nagan Raya Rp18.481.500,00;

- i) Perencanaan Pembuatan Papan Nama kantor UPTD Pidie Jaya Rp6.489.000,00;
- j) Perencanaan Rehab Ruang dan Rehab Lantai ruang pelayanan dan ruang arsip UPTD Aceh Utara Rp31.935.640,00.
- (12) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh sebesar Rp196.850.044,00 yang merupakan Reviu DED gedung kantor BRA Dan Museum Perdamaian Aceh.
- (13) Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebesar Rp479.241.111,00 yang merupakan :
 - a) Perencanaan Renovasi Pendopo Wali Nanggroe sebesar Rp99.888.622,00;
 - b) Perencanaan Renovasi Aula Gedung Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebesar Rp99.820.912,00;
 - c) Perencanaan Renovasi Mess Wali Nanggroe sebesar Rp99.836.452,00;
 - d) Perencanaan Renovasi Taman sebesar Rp79.885.368,00;
 - e) Perencanaan Pembangunan Gapura Komplek Lembaga Wali Nanggroe sebesar Rp99.809.757,00.
- b. Barang dan Jasa sebesar Rp927.682.110,13 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang merupakan :
 - (1) Perencanaan Destinasi Pariwisata Taman Ratu Safiatuddin dikerjakan Tahun 2025 sebesar Rp99.528.150,00.
 - (2) Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinas dikerjakan Tahun 2025 sebesar Rp49.577.040,00.
 - (3) Perencanaan Lanjutan Pagar dan Jalan Lapangan Golf dikerjakan Tahun 2025 sebesar Rp99.777.900,00.
 - (4) Perencanaan Listrik Tenaga Surya Museum Tsunami dan Museum Aceh dikerjakan Tahun 2025 sebesar Rp99.790.066,44.
 - (5) Perencanaan Rehabilitasi/ Revitalisasi Gedung Komunitas Seni Taman Budaya dikerjakan Tahun 2025 sebesar Rp99.857.609,11.
 - (6) Perencanaan Landscape Taman Budaya dikerjakan Tahun 2025 sebesar Rp99.806.760,00.
 - (7) Perencanaan Digitalisasi Museum Aceh dikerjakan Tahun 2025 sebesar Rp99.685.778,88.
 - (8) Perencanaan Rehabilitasi Taman Tugu Sri Ratu Safiatuddin Kota Banda Aceh dikerjakan Tahun 2025 sebesar Rp279.658.805,70.

2. Pengurangan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengurangan sebesar Rp491.916.538.621,53 yang terdiri dari:

Tabel 181. Rincian Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.752.379.388,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	60.687.480.918,21
3	Dinas Pengairan Aceh	428.630.811.695,32
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	299.786.580,00
5	Dinas Sosial Aceh	34.965.000,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	14.973.900,00
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	496.141.140,00

Jumlah**491.916.538.621,53**

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Penjelasan :

- (1) Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebesar Rp1.752.379.388,00 yang merupakan:
 - a) Pembangunan RKB Tingkat Aliyah Dayah MUQ Pagar Air Kab. Aceh Besar sebesar Rp1.306.135.882,00, yang sudah difungsikan pada tahun 2025;
 - b) Lanjutan Pembangunan Asrama Putra Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil Rp446.243.506,00 yang sudah difungsikan pada tahun 2025.
- (2) Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp60.687.480.918,21 yang merupakan:
 - a) Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp12.116.477.178,76;
 - b) Pembangunan Pagar Gedung RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp1.178.821.400,00;
 - c) Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sebesar Rp12.209.375.000,00;
 - d) Pembangunan Gedung RSUD Tgk. Chik Ditiro Kabupaten Pidie sebesar Rp30.459.751.558,45; dan
 - e) Pembangunan Gedung Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp4.723.055.781,00.
- (3) Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp428.630.811.695,32 yang terdiri dari:
 - a) Pengaman Tebing dan Normalisasi Sungai Kr. Jeunieb Kab. Bireuen sebesar Rp982.788.000,00;
 - b) Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Mon Seuke Pulot Peusangan Selatan Kab. Bireuen sebesar Rp97.970.029.900,00;
 - c) Pembangunan Jetty Kuala Cangkoi, Kab. Aceh Utara sebesar Rp22.206.123.000,00;
 - d) Pembangunan Jetty Kr. Kuala Langa Batang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sebesar Rp22.500.523.000,00;
 - e) Pengendalian Banjir Sungai Kr. Teunom Kab. Aceh Jaya sebesar Rp16.460.712.100,00;
 - f) Pembangunan Bendung D.I. Sigulai Kab. Simeulue sebesar Rp129.567.369.830,32;
 - g) Pembangunan Jetty Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya sebesar Rp49.285.782.428,00;
 - h) Perencanaan DED Pengendalian Banjir Sungai Kr. Masen Kab. Aceh Jaya (Dana Otsus) sebesar Rp298.401.000,00;
 - i) DED Pengendalian Banjir Sungai Kr. Jeunib Gp. Lhee Simpang / Gp. Mns. Tunong Kab. Bireuen sebesar Rp99.805.650,00;
 - j) DED Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Ulim Kab. Pidie Jaya sebesar Rp99.631.280,00;
 - k) Pembangunan Saluran Suplesi D.I. Krueng Nalan Jeunib Kab. Bireuen sebesar Rp79.505.138.507,00; dan
 - l) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dan Normalisasi Sungai Krueng Manggeng Kab. Aceh Barat Daya sebesar Rp9.654.507.000,00.

- (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar Rp299.786.580,00 yang merupakan :
 - a) Pembangunan Tugu (PON XXI / 2024) sebesar Rp99.858.830,00;
 - b) Perencanaan Venue Basket di Hall Gedung Serbaguna Stadion Harapan Bangsa (PON XXI/2024) sebesar Rp99.922.200,00, yang sudah dikapitalisasi ke bangunan induk;
 - c) Pembangunan Venue Panahan di Komplek Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh (PON XXI / 2024) sebesar Rp99.936.630,00, yang sudah dikapitalisasi ke bangunan induk.
- (5) Dinas Sosial Aceh sebesar Rp34.965.000,00 yang merupakan Reklas antar aset tetap ke Gedung dan Bangunan pada Tugu Titik Kontrol/Pasti dikarenakan kapitalisasi Pembangunan Rehab Pagar Panti Tuna Sosial UPTD. RSBM yang DED/Perencanaannya di Tahun 2023 dengan Nilai Rp34.965.000,00 dan Fisiknya di Tahun 2024 dengan Nilai Rp167.532.000,00
- (6) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh sebesar Rp14.973.900,00 yang merupakan Perencanaan Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen yang sudah dikapitalisasi ke bangunan induk.

Dari total nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp41.426.442.895.053,00 terdiri dari Aset Tetap dalam kondisi baik sebesar Rp41.240.038.780.549,50, Aset Tetap yang belum memiliki nilai sebanyak 165 unit, Aset Tetap yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp17.699.651.000,00 dan Properti Investasi sebesar Rp50.239.725.097,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Aset *Extracomtable* Aset Tetap adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tetap namun masih dicatat dalam Laporan Barang Milik Aceh sampai dengan akhir TA 2025 tercatat sebesar Rp333.518.123.373,26. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 171 satuan pendidikan dibawah kewenangan Pemerintah Aceh yang menerima Dana Revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang merupakan bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas melalui rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan. Atas Dana Revitalisasi tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 belum dilakukan serah terima kepada Pemerintah Aceh. Adapun jumlah bantuan dana revitalisasi yang disalurkan ke satuan pendidikan sebesar Rp234.000.025.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 182. Rekap Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi Tahun 2025 pada Wilayah Provinsi Aceh

No.	Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Nilai Bantuan
1	SMA NEGERI	142	174.944.943.000,00
2	PKPKL	2	2.610.354.000,00
3	SMK NEGERI	27	56.444.728.000,00
Total		171	234.000.025.000,00

Sumber: Data diolah

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan	Per 31 Desember 2025 Rp(18.228.391.885.075,96)	Per 31 Desember 2024 Rp(17.145.661.634.698,04)
--------------------------------------	---	---

Akumulasi penyusutan adalah total akumulasi beban penyusutan selama satu periode atau satu tahun. Akun ini memiliki pengurangan bahwa pada tahun pertama akumulasi penyusutan akan sama dengan beban penyusutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp (18.228.391.885.075,96), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 183. Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.687.839.848.355,56)	(442.976.942.896,00)	(154.701.789.419,47)	(4.976.115.001.832,09)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.876.224.713.082,63)	(191.018.061.302,30)	(8.486.734.112,22)	(2.058.756.040.272,71)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(10.580.505.919.711,82)	(733.763.539.086,43)	(122.093.043.668,27)	(11.192.145.014.130,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.091.153.548,03)	(284.675.293,78)	(0,65)	(1.375.828.841,16)
Saldo akhir setelah penyesuaian		(17.145.661.634.698,04)	(1.368.043.218.578,51)	(285.281.567.200,57)	(18.228.391.885.075,96)

Sumber: Bidang Akuntansi BPKA

Catatan Penting Aset

1. Aset yang bersinggungan dengan TNI

a. Tanah Lapangan Blang Padang

1) Latar Belakang

Pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, saat itu Lapangan Blang Padang merupakan areal persawahan rakyat, lalu sultan mengambil alih dengan membeli lokasi persawahan tersebut, setelah itu sultan mewakafkannya kepada Mesjid Raya Baiturrahman. Tanah Lapangan Blang Padang juga berfungsi sebagai alun-alun keraton dan sebagian digunakan untuk sawah (umong sara) yang hasilnya berupa padi dan kelapa diserahkan ke masjid raya untuk membiayai pemeliharaan masjid, insentif imam serta bilal.

Berdasarkan peta BLAD Nomor 310 tahun 1906 dan peta Koetaradja tahun 1915 yang tertulis "Aloen-Aloen" Kesultanan Aceh, maka Tanah Blang Padang tidak pernah dikuasai oleh *Koninklijk Nederlands Indische Leger* (KNIL), bahkan sampai dengan saat ini pun dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kota Banda Aceh, Blang Padang telah ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau.

Tanah Blang Padang merupakan salah satu warisan Kerajaan Aceh, yang kemudian sejak Indonesia merdeka tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Aceh dan digunakan sebagai lapangan sepak bola dan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh serta kegiatan penting lainnya, seperti acara tempat kegiatan keramaian rakyat, olahraga, upacara, tempat pelaksanaan MTQ dan lain sebagainya.

Tanah Blang Padang terdaftar sebagai aset Pemerintah Aceh pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Registrasi 0001 dan Kode Barang 01.01.13.01.12 atau dengan perkataan lain sudah terdaftar pada Inventaris Kekayaan Daerah (IKD) yang saat ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan kode 1.3.1.01.02.02.002.

Pemerintah Aceh menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh pada tanggal 9 Maret 2022 untuk melakukan penelusuran data aset tanah Blang Padang di Belanda. Dengan diperoleh hasil berupa :

- a) Buku *De Inrichting Van het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaay Door K.F.H. Vanlangen. S-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1888.*
- b) Peta penguasaan Belanda di Aceh tahun 1875

Berdasarkan dokumen tersebut menjelaskan bahwa tanah Blang Padang tidak dikuasai oleh Belanda melainkan tanah sultan Aceh yang diwakafkan kepada Mesjid Raya Baiturrahman.

2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan

- a) Dukungan dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk mensertifikatkan tanah blang padang atas nama Pemerintah Aceh tahun 2010.
- b) Surat Gubernur Aceh Nomor 06/SPRINT/2010, tanggal 16 September 2010, telah meminta kakanwil BPN Aceh untuk segera mengeluarkan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Aceh terhadap tanah Blang Padang seluas 89.802 m2.
- c) Surat BPN Nomor 1097/18-11.600/XI/2010, tanggal 19 November 2010, menyampaikan bahwa permohonan hak pakai atas nama Pemerintah Aceh secara yuridis formal, telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan per UU, namun ditemukan bukti fisik dan simbol diindikasikan dipasang oleh Kodam IM
- d) Surat Gubernur Aceh Nomor 590/44699 tanggal 30 September 2013 kepada Presiden RI terkait permohonan penyelesaian sengketa tanah Blang Padang
- e) Mediasi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait Aset tumpang tindih Barang Milik Daerah tanggal 17 Februari 2022.
- f) Berdasarkan dua dokumen baru yang diperoleh, Pemerintah Aceh telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh melalui Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 028/5179 tanggal 27 Maret 2023 perihal Penyampaian kelengkapan dokumen dan fakta sejarah tentang Blang Padang guna proses pensertifikatan tanah tersebut.

3) Kondisi Saat ini

Sampai dengan saat ini Lapangan Blang Padang masih diklaim sebagai tanah milik TNI-AD yang ditandai dengan adanya pemasangan plang yang berbunyi “Tanah Ini Milik TNI-AD” pada beberapa sudut lapangan.

b. Tanah Anjong Mon Mata**1) Latar Belakang**

Gubernur Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Nomor 451.1/15846 tanggal 14 Oktober 1980 mengajukan permintaan kepada Pangdam I/IM untuk menggunakan tanah Ki Angmor seluas 13.000 m² sebagai Wisma Tamu dan arena terbuka penunjang MTQ Tingkat Nasional ke 12 Tahun 1981.

2) Permasalahan

- a) Status tanah hingga saat ini masih dalam status pinjam pakai sampai dengan penyelesaian *ruislagh* berdasarkan Surat Pangdam I Iskandar Muda Nomor B/772/XI/1980, tanggal 20 November 1980
- b) Sejak tahun 1980 rencana pengalihan kepemilikan dari Kodam I/IM kepada Pemerintah Aceh dengan cara *ruislagh* belum terealisasi.

3) Kondisi saat ini

Di atas Tanah Anjong Mon Mata tersebut berdiri bangunan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi Pemerintah Aceh dan masih dalam tahapan mediasi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait aset tumpang tindih Barang Milik Aceh tanggal 17 Februari 2022

c. Tanah dan Bangunan Kolam Renang Tirta Raya**1) Latar Belakang**

Berdasarkan surat Pangdam IM Nomor B/79/II/1981 tanggal 9 Februari 1981, melaporkan kepada Kepala Staf TNI-AD di Jakarta terkait telah diberikan izin sementara kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh untuk menggunakan tanah HMAD. Bangunan Kolam Renang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Aceh dengan Registrasi 0001 dan Kode Barang 1.3.3.01.01.11.007. Tanah Kolam Renang tercatat dalam Kartu Inventaris Pemerintah Aceh dengan Registrasi 0001 dan Kode Barang 1.3.1.01.01.05.001.

2) Permasalahan

Pemerintah Aceh tidak bisa mengoperasikan kolam renang tersebut sehingga menjadi terbengkalai.

3) Kondisi saat ini

Terakhir kalinya mediasi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait Aset tumpang tindih Barang Milik Daerah tanggal 17 Februari 2022.

d. Kantor & Gedung Olahraga (GOR) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh

Saat ini digunakan oleh KONI Aceh sebagai Kantor Sekretariat dan Pusat Latihan Olahraga. Tanah belum memiliki sertifikat dan masih dalam tahapan mediasi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait aset tumpang tindih Barang Milik Daerah tanggal 17 Februari 2022.

2. Tanah Milik Pemerintah Aceh yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura II

Pemerintah Aceh memiliki tanah ± 46 Ha di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang berada dalam kompleks Bandara Sultan Iskandar Muda dan saat ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura II dalam rangka penyelenggaraan Operasional dan Penerbangan domestik dan internasional. Tanah tersebut telah bersertifikat hak pakai dengan nomor 01.03.11.07.4.00013, 01.03.11.07.4.00012, 01.03.11.07.4.00005, 01.03.11.07.4.00010, 01.03.23.13.4.00001, 01.03.23.17.4.00003, 01.03.23.15.4.00003, 01.03.23.18.4.00007, 01.03.11.29.4.00003, 01.03.11.53.4.00005, 01.03.11.53.4.00006, dan 01.03.11.53.4.00004.

Pengelolaan tanah milik Pemerintah Aceh oleh PT. Angkasa Pura II dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Aceh dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) tentang Pemanfaatan Barang Milik Aceh untuk Operasional dan Penerbangan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Nomor 7/MoU/2016/ dan MoU.04.04/00.02/05/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang berlaku selama dua tahun, nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman persiapan pelaksanaan pemanfaatan BMA.

Pemerintah Aceh dan PT. Angkasa Pura telah membuat nota kesepahaman Nomor 25/MoU/2022 dan Nomor PJJ.04.04/00/06/2022/A.0326 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Aceh untuk operasional dan pengembangan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. selanjutnya Pemerintah Aceh berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut akan menindaklanjuti pemanfaatan dalam bentuk Kerja sama Pemanfaatan (KSP).

3. Tanah Milik Pemerintah Aceh Eks. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Pemerintah Aceh memperoleh Aset eks PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berupa pelabuhan sabang beserta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya dengan nilai buku sebesar Rp16.310.501.056,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berupa Pelabuhan Sabang kepada Pemerintah Aceh Nomor KU.61/1/15/P.I-09 dan 17/BA/2009 tanggal 13 November 2009.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Sabang dengan suratnya Nomor 032/BPKS/239 tanggal 13 Juni 2013 menyurati Gubernur Aceh untuk mempercepat hibah aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS, berdasarkan surat tersebut Gubernur Aceh meminta persetujuan hibah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan surat Nomor 032/43153 tanggal 13 Agustus 2013, namun saat itu belum ditanggapi.

Kemudian kepala BPKS Sabang dengan suratnya nomor 028/BPKS/241 tanggal 14 juli 2014 menyurati kembali Gubernur Aceh untuk dapat segera menindaklanjuti percepatan hibah aset-aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS dan Gubernur Aceh menindaklanjutinya dengan meminta kembali persetujuan Ketua DPRA dengan surat Nomor 030/37726. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 dengan surat nomor 019.3/BPKS/133 kepala BPKS Sabang menyurati Ketua DPRA untuk meminta kesediaan Audiensi tentang percepatan hibah aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS, kemudian Ketua DPRA dengan suratnya nomor 160/2141 tanggal 13 Desember 2016 mengundang Gubernur Aceh dalam rangka pembahasan dan penjelasan terhadap salah satu aset yang dikelola oleh BPKS adalah pelabuhan CT-1 eks PT. Pelindo 1 yang

telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh. Namun sampai saat ini pelaksanaan hibah tidak terlaksana.

Aset- aset eks Pelindo hingga saat ini masih tercatat di neraca Pemerintah Aceh dan selanjutnya Pemerintah Aceh akan menggunakan dan memanfaatkan aset ex. pelindo tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Aset Helikopter M1-2

Helikopter M1-2 semula merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang pengadaannya dilakukan pada masa Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Aset tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Aceh ketika Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si., menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena disita menjadi barang bukti. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tidak disebutkan secara jelas mengenai status Helikopter M1-2 tersebut. Saat ini aset tersebut berada di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda.

5.3.4. Dana Cadangan

Per 31 Desember 2025
Rp1.515.847.852.811,86

Per 31 Desember 2024
Rp1.456.563.303.393,21

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pada TA 2025 tidak dilakukan penyisihan Dana Cadangan.

Nilai Dana Cadangan adalah saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp1.456.563.303.393,21 kemudian mutasi tambah dari Jasa Giro dan Bunga Deposito sebesar Rp59.284.549.418,58 sehingga saldo akhir Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.515.847.852.811,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 184. Rincian Dana Cadangan

No	Jenis Dana Cadangan	Nama Bank	Bentuk Penempatan	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Dana Cadangan Umum	Bank Aceh Syariah	Giro	010.01.02.570482-0	57.643.851.738,54	41.127.910.039,72
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000308-2	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000312-6	26.492.376.242,00	26.492.376.242,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000279-1	29.360.000.000,00	29.360.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000291-6	15.677.228.025,00	15.677.228.025,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000303-4	20.641.284.392,00	20.641.284.392,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	610.04.03.000096-6	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000295-3	42.039.000.000,00	42.039.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000329-2	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
2	Dana Abadi Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Giro	010 01.02 571159-1	82.273.441.928,62	58.825.325.075,35
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000274-3	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000310-4	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000313-0	39.113.895.337,00	39.113.895.337,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000281-3	41.675.000.000,00	41.675.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000289-4	22.918.394.032,00	22.918.394.032,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000304-5	29.483.528.146,00	29.483.528.146,00



No	Jenis Dana Cadangan	Nama Bank	Bentuk Penempatan	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
3	Dana Cadangan Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000296-4	58.794.000.000,00	58.794.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000327-0	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Giro	010 01.02.571160-6	67.571.152.336,62	48.250.661.470,14
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000309-3	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000311-5	29.065.352.992,00	29.065.352.992,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000280-2	34.195.000.000,00	34.195.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000290-5	18.047.253.823,00	18.047.253.823,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000305-6	24.276.093.819,00	24.276.093.819,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000297-5	49.581.000.000,00	49.581.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000328-1	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00
JUMLAH					1.515.847.852.811,86	1.456.563.303.393,21

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKA

Mutasi Dana Cadangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 185. Rincian Mutasi Dana Cadangan

No	Jenis Dana Cadangan	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dana Cadangan Umum	406.337.798.698,72	16.515.941.698,83	-	422.853.740.397,54
2	Dana Abadi Pendidikan	575.810.142.590,35	23.448.116.853,27	-	599.258.259.443,62
3	Dana Cadangan Pendidikan	474.415.362.104,14	19.320.490.866,48	-	493.735.852.970,62
Jumlah		1.456.563.303.393,20	59.284.549.418,58	-	1.515.847.852.811,86

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKA

1. Dana Cadangan Umum

Dana Cadangan Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp422.853.740.397,54 bertambah dari saldo awal sebesar Rp406.337.798.698,72. Penambahan saldo sebesar Rp16.515.941.698,83 berasal dari Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Cadangan Umum yang ditempatkan pada Bank Aceh Syariah.

2. Dana Abadi Pendidikan

Dana Abadi Pendidikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp599.258.259.443,62 bertambah dari saldo awal sebesar Rp575.810.142.590,35. Penambahan saldo sebesar Rp23.448.116.853,27 berasal dari Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Abadi Pendidikan yang ditempatkan pada Bank Aceh.

Dana Abadi Pendidikan dibentuk pada TA 2004 yang berasal dari penyisihan Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat yang terakumulasi dalam SiLPA. Pada TA 2005 dan 2006 dilakukan penambahan terhadap Dana Cadangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/068/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/079/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2006.

3. Dana Cadangan Pendidikan

Dana Cadangan Pendidikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp493.735.852.970,62, bertambah dari saldo awal sebesar Rp474.415.362.104,14. Penambahan saldo sebesar Rp19.320.490.866,48 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Cadangan Pendidikan yang ditempatkan pada Bank Aceh. Dana Cadangan Pendidikan dibentuk pada TA 2005 yang berasal dari sisa Dana Pendidikan atas SiLPA TA 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/057/2005 tanggal 1 September 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Khusus Dana Cadangan Pendidikan Tahun 2005.

5.3.5. Aset Lainnya

Per 31 Desember 2025
Rp3.517.050.891.009,81

Per 31 Desember 2024
Rp3.135.287.407.498,34

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.517.050.891.009,81 mengalami penurunan sebesar Rp381.763.483.511,46 dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.135.287.407.498,34. Mutasi Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 186. Rincian Mutasi Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	25.405.178.307,43	-	-	25.405.178.307,43
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	334.069.851.053,00	-	-	334.069.851.053,00
3	Aset Tidak Berwujud	74.253.437.637,43	5.647.853.780,00	2.582.899.240,00	77.318.392.177,43
4	Aset Lain-lain	4.644.389.110.946,93	729.031.534.287,42	94.565.890.394,00	5.278.854.754.840,35
5	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.689.872.000,00	-	3.689.872.000,00	-
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
7	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	191.913.276.893,60	20.791.811.383,17	-	212.705.088.276,77
8	Akumulasi Aset Lain-lain	-	-	-	-
		63.962.733.706,29	2.226.487.766,67	-	66.189.221.472,96
		1.690.644.031.846,56	416.950.128.066,96	187.891.184.294,84	1.919.702.975.618,68
	Jumlah	3.135.287.407.498,34	294.710.960.850,62	87.052.522.660,84	3.517.050.891.009,80

Sumber: data diolah

5.3.5.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2025
Rp25.405.178.307,43

Per 31 Desember 2024
Rp25.405.178.307,43

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.405.178.307,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 187. Rincian Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	24.749.248.329,43	-	-	24.749.248.329,43
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	655.929.978,00	-	-	655.929.978,00
	Jumlah	25.405.178.307,43	-	-	25.405.178.307,43

Sumber: Data diolah

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp24.749.248.329,43 Kepada Sdr. H, selaku Kuasa Bendahara Umum Aceh. Terhadap Kerugian Daerah, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pembebanan Sementara (SKPS) Kerugian Keuangan Daerah sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 951/633/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Atas kerugian tersebut telah dilakukan penelusuran oleh Inspektorat Aceh.
2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara an. Sfw per 31 Desember 2021 sebesar Rp655.929.978,00 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

5.3.5.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp334.069.851.053,00 **Rp334.069.851.053,00**

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Tabel 188. Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Kemitraan – Sewa	88.392.413.329,79	-	-	88.392.413.329,79
2	Kemitraan – Kerja Sama Pemanfaatan	245.677.437.723,21	-	-	245.677.437.723,21
Jumlah		334.069.851.053,00	-	-	334.069.851.053,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp334.069.851.053,00 terdiri dari Sewa sebesar Rp88.392.413.329,79 dan Kerja sama Pemanfaatan sebesar Rp245.677.437.723,21.

1. Kemitraan-Sewa

Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa. Kemitraan - Sewa per 31 Desember 2025 sebesar Rp88.392.413.329,79, terdapat pada Dinas Perhubungan Aceh yang merupakan Sewa antara Pemerintah Aceh dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang terdiri dari:

Tabel 189. Rincian Aset Kemitraan-Sewa dengan PT ASDP Indonesia Ferry

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kapal Motor Penumpang BRR untuk Lintasan Ulee Lheue – Balohan Sabang	26.426.603.700,00	26.426.603.700,00
2	Kapal Motor Penumpang Aceh Hebat 2 untuk Lintasan Ulee Lheue - Balohan Sabang	61.965.809.629,79	61.965.809.629,79
Jumlah		88.392.413.329,79	88.392.413.329,79

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh

- a. Perjanjian Sewa Nomor 49/PKS/2021 dan Nomor Sperj.307/HK.102/ASDP-2021 tanggal 11 Oktober 2021 yaitu sewa Kapal KMP BRR 1000 GT dengan nilai kapal sebesar Rp26.426.603.700,00 rute Lintasan Ulee Lheue- Balohan Sabang dan sebaliknya dengan nilai perjanjian sewa sebesar Rp8.000.850.000,00

selama lima tahun mulai 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2026 dan telah disetor ke Kas Daerah pada TA 2021.

- b. Perjanjian Sewa Nomor 41/PKS/2022 dan Nomor SPERJ.108/HK.102/ASDP-2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pemanfaatan Kapal KMP Aceh Hebat 2 Barang Milik Pemerintah Aceh. Nilai kapal sebesar Rp61.965.809.629,79. KMP Aceh Hebat 2 melayani rute Lintasan Ulee Lheue-Balohan Sabang. Pada TA 2022 PT ASDP Indonesia Ferry menyetorkan biaya sewa ke rekening kas daerah sebesar Rp9.348.000.000,00 selama lima tahun mulai 30 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2027 sebagaimana STS Nomor 00014/STS/2.15.0.00.0.00.01/AO1/I/2022.

2. Kemitraan-Kerja sama Pemanfaatan

Kerja sama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Aceh dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

Kemitraan-Kerja sama Pemanfaatan Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 sebesar Rp245.677.437.723,21, terdapat pada SKPA sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp115.499.463.370,21 adalah kerja sama atas pemanfaatan Aset Kapal Pemerintah Aceh yang terdiri dari:

Tabel 190. Rincian Aset Kemitraan-Kerja sama Pemanfaatan dengan PT ASDP Indonesia Ferry

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Kapal Motor Penumpang Aceh Hebat 1 untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue	76.546.510.870,21	76.546.510.870,21
2	Kapal Kapal Motor Penumpang Aceh Hebat 3 untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak	38.952.952.500,00	38.952.952.500,00
Jumlah		115.499.463.370,21	115.499.463.370,21

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh

- 1) Kerja sama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat 1
berdasarkan perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil Nomor 550/518/2024 dan Nomor SPerj.034/HK.102/ASDP-2024 tanggal 3 April 2024 Tentang Penggunaan Pengoperasian KMP Aceh Hebat 1. KMP Aceh Hebat 1 melayani Rute Calang-Sinabang dan sebaliknya. Jangka waktu kerja sama mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025. Nilai aset kapal yang menjadi objek kerja sama adalah sebesar Rp76.546.510.870,21.
- 2) Kerja sama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat 3
Berdasarkan perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil Nomor 500.12.17.1/769/2025 dan Nomor Sperj. 072/HK.104/ASDP-SKL/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang

Penggunaan Pengoperasian KMP Aceh Hebat 3, jangka waktu kerja sama mulai 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Nilai aset kapal yang menjadi objek kerja sama adalah sebesar Rp38.952.952.500,00.

Kapal Aceh Hebat 1 dan kapal Aceh Hebat 3 Milik Pemerintah Aceh yang dioperasikan oleh PT ASDP merupakan kapal yang berlayar di jalur perintis Lintasan Calang - Sinabang dan Lintasan Singkil – Pulau Banyak yang mendapat subsidi operasional dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 6838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis TA 2025 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.11.16/1345/2024 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Aceh.

- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp59.816.234.353,00 adalah kerja sama atas pemanfaatan Barang Milik Aceh dengan PT Pembangunan Aceh berupa Tanah dan Bangunan beserta fasilitas pendukung di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, yang terletak di kampung Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA) Nomor 47/PKS/2020 tanggal 12 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 191. Rincian Aset Kemitraan-Kerja sama Pemanfaatan dengan PT Pembangunan Aceh – KIA Ladong

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah seluas 656.800 M ²	47.469.239.553,00	47.469.239.553,00
2	Peralatan dan Mesin	90.615.000,00	90.615.000,00
3	Gedung dan Bangunan	7.553.687.072,00	7.553.687.072,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.646.362.477,00	4.646.362.477,00
5	Aset Tetap Lainnya	56.330.251,00	56.330.251,00
Jumlah		59.816.234.353,00	59.816.234.353,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Perjanjian kerja sama berlaku selama 30 tahun terhitung sejak perjanjian kerja sama ditandatangani. PT Pembangunan Aceh (PEMA) berkewajiban memberikan pembagian laba hasil keuntungan atau laba bersih sebesar 15% dan /atau dividen setelah dipotong pajak berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik.

Keterlambatan pembagian hasil keuntungan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam perjanjian kerja sama akan dikenakan denda sebesar 1% perhari maksimal 90 hari kalender, kecuali dalam keadaan kahar.

- c. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp70.361.740.000,00 adalah kerja sama atas pemanfaatan Barang Milik Aceh dengan PT Pembangunan Aceh-KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Arun berupa lahan seluas 66.400 m² dan *Gas Turbine Generator (GTG)* beserta aksesoris yang terletak di Komplek Eks PT Arun Lhokseumawe sesuai Perjanjian sewa Nomor 73/PKS/2020/-/006/PEMA-PKS/V/2020 Tanggal 4 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 192. Rincian Aset Kemitraan-Kerja sama
Pemanfaatan dengan PT Pembangunan Aceh – KEK Arun**

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah seluas 66.400 m ²	6.115.440.000,00	6.115.440.000,00
2	Gas Turbine Generator (GTG)	21.415.433.334,00	21.415.433.334,00
3	Gas Turbine Generator (GTG)	21.415.433.333,00	21.415.433.333,00
4	Gas Turbine Generator (GTG)	21.415.433.333,00	21.415.433.333,00
Jumlah		70.361.740.000,00	70.361.740.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Kerja sama pemanfaatan dilakukan dengan pembagian laba hasil keuntungan atau laba bersih kepada Pemerintah Aceh sebesar 10% dan/atau dividen setelah di potong pajak berdasarkan dari akuntan publik. Jangka waktu kerja sama berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

5.3.5.3. Akumulasi Penyusutan Kerja sama Pemanfaatan **Per 31 Desember 2025
Rp(212.705.088.276,77)** **Per 31 Desember 2024
Rp(191.913.276.893,60)**

Akumulasi Penyusutan Kerja sama Pemanfaatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(212.705.088.276,77) merupakan perhitungan Penyusutan kerja sama pemanfaatan Pemerintah Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 193. Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Kerja sama

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan - Sewa		(53.035.447.997,88)	(8.839.241.332,98)	-	(61.874.689.330,86)
1	PT. ASDP INDONESIA FERRY	(53.035.447.997,88)	(8.839.241.332,98)	-	(61.874.689.330,86)
2	Yayasan Tgk. Fakinah	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Pemanfaatan		(138.877.828.895,72)	(11.952.570.050,19)	-	(150.830.398.945,91)
1	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) Ladong	(5.331.850.873,60)	(402.623.713,17)	-	(5.734.474.586,77)
2	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) KEK ARUN	(64.246.300.000,00)	-	-	(64.246.300.000,00)
3	PT. ASDP INDONESIA FERRY	(69.299.678.022,12)	(11.549.946.337,02)	-	(80.849.624.359,14)
Jumlah		(191.913.276.893,60)	(20.791.811.383,17)	-	(212.705.088.276,77)

Sumber: Data diolah

5.3.5.4. Aset Tak Berwujud **Per 31 Desember 2025
Rp77.318.392.177,43** **Per 31 Desember 2024
Rp74.253.437.637,43**

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini merupakan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan sumber daya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, rancangan dan implementasi suatu sistem atau proses yang baru, dan kekayaan intelektual. Entitas berupaya untuk melakukan riset dan pengembangan. Terlebih bagi entitas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan riset dan pengembangan. Namun tidak semua hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut merupakan Aset Tak Berwujud.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.318.392.177,43 merupakan *software*, dokumen rancangan pembangunan, kajian-kajian survei dan tata ruang dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 194. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Lisensi dan frenchise	34.351.456.456,59	2.772.865.280,00	2.337.900.000,00	34.746.421.736,59
2	Software	30.638.358.816,00	2.874.988.500,00	204.999.240,00	33.308.348.076,00
3	Kajian	6.856.777.050,00	-	-	6.856.777.050,00
4	Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	1.087.537.480,00	-	-	1.087.537.480,00
5	Hak Cipta	1.319.307.834,84	-	-	1.319.307.834,84
Jumlah		74.253.437.637,43	5.647.853.780,00	2.542.899.240,00	77.318.392.177,43

Sumber: Data diolah

5.3.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025 Rp(66.189.221.472,96) Per 31 Desember 2024 Rp(63.962.733.706,29)

Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 195. Rincian Akumulasi Amortisasi ATB

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise			
1	Dinas Perhubungan Aceh	(115.655.960,59)	(115.655.960,59)
2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	-	(47.900.000,00)
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	(33.466.189.103,50)	(32.559.352.501,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software			
1	Dinas Pendidikan Aceh	(1.502.870.760,00)	(1.502.870.760,00)
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	(243.349.000,00)	(243.349.000,00)
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	(48.480.000,00)	(48.480.000,00)
4	Dinas Kesehatan Aceh	(602.545.000,00)	(602.545.000,00)
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	(3.983.724.879,00)	(3.943.403.379,00)
6	Rumah Sakit Jiwa	(1.422.259.725,00)	(1.422.259.725,00)
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	(326.204.245,00)	(321.704.245,00)
8	Dinas Pengairan Aceh	(213.257.600,00)	(177.707.600,00)
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	(37.379.250,00)	(24.919.500,00)
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	(76.500.000,00)	(76.500.000,00)
11	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	(103.477.185,00)	(79.001.685,00)
12	Dinas Sosial Aceh	(238.164.206,25)	(238.164.206,25)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	(25.850.000,00)	(25.850.000,00)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	(47.480.000,00)	(47.480.000,00)
15	Dinas Pangan Aceh	(101.500.000,00)	(101.500.000,00)
16	Dinas Pertanahan Aceh	(61.325.000,00)	(61.325.000,00)
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	(8.830.001,00)	(8.830.001,00)
18	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	(647.866.000,00)	(647.866.000,00)
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	(59.705.000,00)	(59.705.000,00)
20	Dinas Perhubungan Aceh	(5.009.044.715,00)	(4.963.945.855,00)
21	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	(3.354.674.700,00)	(2.772.174.700,00)
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	(38.280.000,00)	(38.280.000,00)



No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	(430.415.625,00)	(430.415.625,00)
24	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	(283.925.000,00)	(283.925.000,00)
25	Sekretariat Majelis Adat Aceh	(44.500.000,00)	(44.500.000,00)
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	(452.620.988,00)	(452.620.988,00)
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	(489.598.650,00)	(476.040.400,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	(226.405.000,00)	(213.930.000,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	(634.731.000,00)	(634.731.000,00)
30	Dinas Peternakan Aceh	(157.633.750,00)	(109.215.000,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	(183.015.000,00)	(183.015.000,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	(73.926.700,00)	(73.926.700,00)
33	Sekretariat Daerah Aceh	(878.858.700,00)	(872.658.700,00)
34	Sekretariat DPRA	(273.281.000,00)	(273.281.000,00)
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	(1.109.935.000,00)	(1.109.935.000,00)
36	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	(5.932.247.000,00)	(5.932.247.000,00)
37	Badan Kepegawaian Aceh	(406.301.113,00)	(406.301.113,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	(103.580.000,00)	(103.580.000,00)
39	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	(60.500.000,00)	(60.500.000,00)
40	Inspektorat Aceh	(21.000.000,00)	(21.000.000,00)
41	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	(379.905.000,00)	(326.659.000,00)
42	Dinas Syariat Islam Aceh	(39.160.000,00)	(39.160.000,00)
43	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	(146.800.000,00)	(146.800.000,00)
44	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	(172.535.000,00)	(172.535.000,00)
45	Sekretariat Baitul Mal Aceh	(263.350.000,00)	(263.350.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian			
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	(589.741.150,00)	(442.305.862,50)
2	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	(1.082.270.133,30)	(740.957.866,62)
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	(14.373.333,33)	(14.373.333,33)
Jumlah		(66.189.221.472,96)	(63.962.733.706,29)

Sumber: Data diolah

Tabel 196. Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise	(32.726.908.461,59)	(858.936.602,50)	-	(33.585.854.064,09)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(30.038.188.182,25)	(878.803.610,00)	-	(30.916.991.792,25)
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	(1.197.637.062,45)	(488.747.554,17)	-	(1.686.384.616,62)
Jumlah		(63.962.733.706,29)	(2.226.487.766,67)	-	(66.189.221.472,96)

Sumber: Data diolah

Sehingga nilai Aset Tidak Berwujud Neto sebesar Rp11.129.170.704,47 yang diperoleh dari nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp77.318.392.177,43 dikurangi nilai akumulasi amortisasi sebesar Rp(66.189.221.472,96) Rincian Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.3.5.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2025
Rp0,00

Per 31 Desember 2024
Rp3.689.872.000,00

TDF merupakan fasilitas penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility*-Transfer ke Daerah (TDF-TKD) berupa penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah, yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah berdasarkan surat Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-397/PB.3/2024 tanggal 12 Maret 2025 perihal Penyampaian Data

Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Tahun 2024 Pemerintah Daerah Lingkup Wilayah Aceh. Saldo TDF pada Kantor Pusat Bank Indonesia atas nama Rekening Lain BI TDF-TKD Provinsi Aceh sebesar Rp0,00.

5.3.5.7. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2025
Rp3.359.151.779.221,68

Per 31 Desember 2024
Rp2.953.745.079.100,37

Aset Lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh, Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya, dan Kas dikonsinyasikan. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.359.151.779.221,68 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.623.616.701.957,29 sedangkan pada TA 2024 sebesar Rp2.953.745.079.100,37 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.644.389.110.946,93 yang terbagi atas Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.

1. Aset Rusak Berat/Usang

Nilai buku Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp256.253.679.937,02 dengan nilai perolehan sebesar Rp705.333.822.538,67 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp(449.080.142.601,65). Rincian Aset Rusak Berat pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Penambahan Aset Rusak Berat yang terdampak bencana hidrometeorologi sebesar Rp235.053.717.859,07 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh yaitu aset jembatan Pintu Rime Gayo di Kab. Bener Meriah pada Jalan Provinsi Kolektor sebesar Rp 90.875.610.824,00 dan jembatan Rikib Gaib Ketukah Pada Jalan Kabupaten Arteri sebesar Rp312.108.000,00.
- Dinas Pengairan Aceh yaitu Bangunan Air Saluran Irigasi sebesar Rp137.832.290.340,67.
- Dinas Pendidikan Aceh yaitu Peralatan dan Mesin pada SMAN 4 Kejuruan Muda sebesar Rp2.933.285.074,40 dan Aset Tetap Lainnya – Buku sebesar Rp1.145.028.041,00.
- Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu Peralatan dan Mesin pada Samsat Aceh Tamiang sebesar Rp1.527.632.947,00 dan Bangunan Gedung Perkantoran sebesar Rp427.762.632,00.

- Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang/TDF per 31 Desember 2025 sebesar Rp102.225.523.493,00 rincian SKPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 197. Rincian Mutasi Aset Lain-lain dalam Penelusuran Hilang/TDF

No	Nama SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Aceh	5.561.504.644,00	-	-	5.561.504.644,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	5.259.069.049,00	-	-	5.259.069.049,00
3	Rumah Sakit Jiwa	355.000.000,00	-	-	355.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	949.188.440,00	-	-	949.188.440,00
5	Dinas Pengairan Aceh	105.970.000,00	-	-	105.970.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	3.114.370.000,00	-	-	3.114.370.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	16.850.000,00	-	-	16.850.000,00
8	Dinas Sosial Aceh	232.000.000,00	-	-	232.000.000,00



No	Nama SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	329.895.697,00	-	-	329.895.697,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	885.739.041,00	-	-	885.739.041,00
11	Dinas Perhubungan Aceh	4.792.174.853,00	-	-	4.792.174.853,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	288.000.000,00	-	-	288.000.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	232.800.000,00	-	-	232.800.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.537.433.286,00	-	63.000.000,00	1.474.433.286,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	749.536.514,00	-	-	749.536.514,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	10.066.237.588,00	-	-	10.066.237.588,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	6.689.896.100,00	-	-	6.689.896.100,00
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	694.355.050,00	-	-	694.355.050,00
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	251.465.400,00	-	-	251.465.400,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	940.967.765,00	-	-	940.967.765,00
21	Sekretariat Daerah Aceh	54.108.198.712,00	-	-	54.108.198.712,00
22	Sekretariat DPRA	564.195.040,00	-	-	564.195.040,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	341.950.000,00	-	-	341.950.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	660.642.641,00	-	-	660.642.641,00
25	Badan Kepegawaian Aceh	1.678.226.400,00	-	-	1.678.226.400,00
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	52.000.000,00	-	-	52.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	483.242.015,00	-	-	483.242.015,00
28	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	17.240.000,00	-	-	17.240.000,00
29	Dinas Syariat Islam Aceh	1.315.584.560,00	-	-	1.315.584.560,00
30	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	14.790.698,00	-	-	14.790.698,00
Jumlah		102.288.523.493,00	-	63.000.000,00	102.225.523.493,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

3. Nilai buku Aset Lain-lain Akan Dihibahkan/Rencana Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.349.395.802.731,98 dari hasil verifikasi bidang penatausahaan aset terhadap 24 SKPA dengan nilai perolehan sebesar Rp2.784.494.688.694,42. Rincian SKPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 198. Rincian Aset Lain-lain akan Dihibahkan/Rencana Hibah

No	Nama SKPA	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Dinas Pendidikan Aceh	363.258.229.925,60	(221.634.089.381,91)	141.624.140.543,69
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	41.540.977.000,00	-	41.540.977.000,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	192.322.273.679,21	(45.311.091.455,39)	147.011.182.223,82
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	407.948.690.584,00	(355.760.620.010,00)	52.188.070.574,00
5	Dinas Pengairan Aceh	344.971.983.865,41	(269.707.429.031,77)	75.264.554.833,64
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	628.012.124.664,65	(270.629.865.932,74)	357.382.258.731,91
7	Dinas Sosial Aceh	1.698.026.000,00	(509.407.800,00)	1.188.618.200,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	66.642.051.848,00	(19.425.831.341,03)	47.216.220.506,97
9	Dinas Pangan Aceh	1.440.767.400,00	(1.127.699.160,00)	313.068.240,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	272.500.000,00	-	272.500.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	50.762.000,00	(50.762.000,00)	-
12	Dinas Perhubungan Aceh	209.714.367.241,00	(86.853.735.213,93)	122.860.632.027,07
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	22.930.646.712,00	(20.568.747.936,50)	2.361.898.775,50
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	77.340.334.424,00	(15.013.828.589,38)	62.326.505.834,62
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	32.743.933.023,35	(32.743.933.023,35)	-
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.064.250.000,00	(638.550.000,00)	425.700.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	23.349.261.111,00	(3.910.119.929,93)	19.439.141.181,07



No	Nama SKPA	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	53.030.731.687,00	(25.065.449.779,90)	27.965.281.907,10
19	Dinas Peternakan Aceh	645.700.000,00	(645.700.000,00)	-
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	169.749.170.214,20	(45.020.449.170,47)	124.728.721.043,73
21	Sekretariat Daerah Aceh	815.244.000,00	(815.244.000,00)	-
22	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	143.661.206.365,00	(18.379.124.756,14)	125.282.081.608,86
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	80.000.000,00	(80.000.000,00)	-
24	Sekretariat Baitul Mal Aceh	1.211.456.950,00	(1.207.207.450,00)	4.249.500,00
Jumlah		2.784.494.688.694,42	(1.435.098.885.962,44)	1.349.395.802.731,98

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Mutasi Aset Lain-lain akan Dihilangkan/Rencana Hibah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 199. Rincian Mutasi Aset Lain-lain akan Dihilangkan/Rencana Hibah

No	SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Aceh	141.624.140.543,69	-	-	141.624.140.543,69
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	41.540.977.000,00	-	-	41.540.977.000,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	153.576.550.562,01	-	6.565.368.338,19	147.011.182.223,82
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	53.046.669.339,00	-	858.598.765,00	52.188.070.574,00
5	Dinas Pengairan Aceh	76.843.237.391,86	-	1.578.682.558,22	75.264.554.833,64
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	367.093.096.856,63	-	9.710.838.124,72	357.382.258.731,91
7	Dinas Sosial Aceh	1.222.578.720,00	-	33.960.520,00	1.188.618.200,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	48.801.979.063,51	-	1.585.758.556,54	47.216.220.506,97
9	Dinas Pangan Aceh	321.764.580,00	-	8.696.340,00	313.068.240,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	272.500.000,00	714.000.000,00	714.000.000,00	272.500.000,00
11	Dinas Perhubungan Aceh	123.966.703.698,31	2.970.588.000,00	4.076.659.671,24	122.860.632.027,07
12	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	2.974.642.958,50	18.793.726.600,00	19.406.470.783,00	2.361.898.775,50
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	49.036.943.974,46	15.663.807.231,00	2.374.245.370,84	62.326.505.834,62
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	532.125.000,00	-	106.425.000,00	425.700.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	19.643.038.934,27	15.298.225,00	219.195.978,20	19.439.141.181,07
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	28.384.617.982,80	2.154.507.843,00	2.573.843.918,70	27.965.281.907,10
17	Dinas Peternakan Aceh	74.900.000,00	720.600.000,00	795.500.000,00	-
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	146.164.321.144,36	455.548.440,00	21.891.148.540,63	124.728.721.043,73
19	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	125.709.951.481,83	-	427.869.872,97	125.282.081.608,86
20	Sekretariat Baitul Mal Aceh	4.249.500,00	107.950.950,00	107.950.950,00	4.249.500,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	80.000.000,00	80.000.000,00	-
Jumlah		1.380.834.988.731,23	41.676.027.289,00	73.115.213.288,25	1.349.395.802.731,98

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

4. Nilai buku Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.651.276.773.059,68 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.686.800.720.114,26 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp(35.523.947.054,58). Rincian SKPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 200. Rincian Aset Lain-lain Lainnya

No	SKPA	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Kesehatan Aceh	151.532.433.089,26	(3.030.648.662)	148.501.784.427,47
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	760.399.000,00	(193.485.340)	566.913.660,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	836.103.851,00	(836.103.851,00)	-
4	Dinas Sosial Aceh	2.116.617.000,00	(1.238.524.500,00)	878.092.500,00
5	Dinas Perhubungan Aceh	89.000.000,00	(89.000.000,00)	-



No	SKPA	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	305.900.000,00	-	305.900.000,00
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	12.213.811.500,00	(3.416.919.490,00)	8.796.892.010,00
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	12.373.471.400,00	(6.845.657.391,43)	5.527.814.008,57
9	Sekretariat Daerah Aceh	573.500.000,00	(114.700.000,00)	458.800.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.504.762.084.274,00	(18.521.507.820,36)	1.486.240.576.453,64
11	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.237.400.000,00	(1.237.400.000,00)	-
Jumlah		1.686.800.720.114,26	(35.523.947.054,79)	1.651.276.773.059,68

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Mutasi Aset Lain-lain Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 201. Rincian Mutasi Aset Lain-lain Lainnya

No	SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Kesehatan	-	151.532.433.089,26	3.030.648.661,79	148.501.784.427,47
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh	63.440.067.497,19	566.913.660,00	63.440.067.497,19	566.913.660,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	-	836.103.851,00	836.103.851,00	-
4	Dinas Sosial Aceh	1.109.677.400,00	-	231.584.900,00	878.092.500,00
5	Dinas Perhubungan Aceh	-	89.000.000,00	89.000.000,00	-
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	305.900.000,00	-	-	305.900.000,00
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	9.033.873.240,00	-	236.981.230,00	8.796.892.010,00
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	5.691.201.760,73	3.253.321.200,00	3.416.708.952,16	5.527.814.008,57
9	Sekretariat Daerah Aceh	-	573.500.000,00	114.700.000,00	458.800.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.300.859.126.778,45	190.132.712.903,00	4.751.263.227,81	1.486.240.576.453,64
Jumlah		1.380.439.846.676,37	346.983.984.703,26	76.147.058.319,95	1.651.276.773.059,68

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Dari perolehan total Aset Lain-lain lainnya sebesar Rp1.486.240.576.453,64 pada BPKA di antaranya merupakan Aset Lain-lain pada Komisi Independen Pemilu (KIP), Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS) dan Badan Pengusaha Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP Kapet) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 202. Rincian Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BP Kapet

No	SKPA	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	KIP	717.800.000,00	3.818.367.160,00	2.120.895.000,00	-	441.705.000,00	7.098.767.160,00
2	BPKS	-	3.316.940.000,00	5.526.431.000,00	74.445.000,00	-	8.917.816.000,00
3	BPKapet	-	757.357.000,00	-	14.817.200,00	-	772.174.200,00
Jumlah		717.800.000,00	7.892.664.160,00	7.647.326.000,00	89.262.200,00	441.705.000,00	16.788.757.360,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Pencatatan Aset dengan label KIP, BPKS, BP Kapet tersaji pada Daftar Barang Pengelola dengan jenis Aset Lain-lain dan sampai saat ini tidak ada perjanjian dalam bentuk apapun baik pinjam pakai maupun kerja sama lainnya

Aset *Extracomtable* Aset Lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tetap namun masih dicatat dalam Laporan Barang Milik Aceh sampai dengan akhir TA 2025 tercatat sebesar Rp39.925.435.180,91, Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.6. Properti Investasi

5.3.6.1. Properti Investasi

Per 31 Desember 2025
Rp50.239.725.097,00

Per 31 Desember 2024
Rp244.656.528.729,80

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi Pemerintah Aceh sebesar Rp50.239.725.097,00 terdiri dari Tanah dan Bangunan Gedung yang disewa oleh pihak lain. Rincian Properti Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 203. Rincian Properti Investasi

No	Uraian	Aset Properti Investasi	Tahun	Tahun 2025	Tahun 2024
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh					
1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan Gudang Dinas Sosial	Tanah	2009	3.162.740.000,00	3.162.740.000,00
2	Tanah Untuk Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang	Tanah	1994	-	184.623.291.853,00
3	Tanah Balai Pengajian Makkah Al-Mukarramah Punge Blang Cut	Tanah	2009	1.051.773.450,00	1.051.773.450,00
4	Tanah Bangunan Garasi/Pool	Tanah	2012	13.413.826.100,00	13.413.826.100,00
5	Tanah dan Bangunan YayasanTgk Fakinah (Rumah Sakit Swasta Tgk. Fakinah)	Tanah	-	11.337.000.000,00	11.337.000.000,00
		Bangunan Gedung	-	19.027.856.046,00	19.027.856.046,00
		Bangunan Gudang	-	37.273.000,00	37.273.000,00
		Sampah	-	-	-
		Bangunan Semi Permanen Kantin	-	1,00	1,00
		Bangunan Selasar	-	484.558.000,00	484.558.000,00
		Instalasi Pengolahan Air Limbah	-	521.698.500,00	521.698.500,00
Jumlah				49.036.725.097,00	233.660.016.950,00
Inspektorat Aceh					
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja PT. Telkom	Tanah	2005	1.203.000.000,00	1.203.000.000,00
Jumlah				1.203.000.000,00	1.203.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh					
1	Tanah dan Bangunan Yayasan Cut Nyak Dhien (Gedung Resepsi)	Tanah	1957	-	2.832.000.000,00
		Bangunan Gedung	1989	-	3.994.319.882,52
		Pagar	1989	-	2.967.191.897,28
Jumlah				-	9.793.511.779,80
Total				50.239.725.097,00	244.656.528.729,80

Sumber: Data diolah

1. Properti Investasi Tanah sebesar Rp30.168.339.550,00 yang terdiri dari:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) sebesar Rp28.965.339.550,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Gudang Dinas Sosial Provinsi NAD Cot Paya Aceh Besar Tahun 2009 dengan nilai perolehan Rp3.162.740.000,00. Sampai dengan saat ini tanah tersebut belum dilakukan pemanfaatan;
 - Tanah Balai Pengajian Makkah Al-Mukarramah Punge Blang Cut seluas 2.657 m² Perumahan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh Tahun 2009 dengan nilai perolehan Rp1.051.773.450,00 berdasarkan Perjanjian Nomor

49/PKS/2024 tanggal 6 November 2023 di mana Pemerintah Aceh memperoleh besaran sewa untuk lima tahun sebesar Rp3.405.300,00;

- Tanah Bangunan Garasi/Pool Jl. Malahayati Kajhu Kec. Baitussalam Aceh Besar Tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp13.413.826.100,00. Sampai dengan saat ini tanah tersebut belum dilakukan pemanfaatan; dan
- Tanah seluas 11.337 M² sebesar Rp11.337.000.000,00 yang digunakan Yayasan Tgk Fakinah (Rumah Sakit Swasta Tgk. Fakinah), Jl. Sudirman Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Banda Aceh berdasarkan Perjanjian Nomor 15/PKS/2021 antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Tgk Fakinah di mana Pemerintah Aceh memperoleh besaran sewa untuk 5 tahun atas tanah dan bangunan sebesar Rp3.352.375.000,00.

- b. Inspektorat Aceh sebesar Rp1.203.000.000,00 merupakan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja PT Telkom Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh seluas 2.005 m² Tahun 1999 dengan nilai perolehan Rp1.203.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Nomor 44/PKS/2022 dan Nomor K.TEL 0227/HK.810/RIW-IDI 00000/2022, di mana sebelumnya aset ini tercatat pada barang inventaris Pengelola Barang dan perjanjian kerja sama dilakukan oleh pengelola. Pemerintah Aceh memperoleh besaran sewa untuk lima tahun sebesar Rp298.475.000,00.

2. Properti Investasi Gedung

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp19.549.687.047,00 merupakan Bangunan pada Rumah Sakit Swasta Tgk. Fakinah, Jl. Sudirman Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Banda Aceh. berdasarkan Perjanjian Nomor 15/PKS/2021 antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Tgk. Fakinah.

3. Properti Investasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp521.698.500,00 merupakan Instalasi pada Rumah Sakit Swasta Tgk. Fakinah, Jl. Sudirman Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Banda Aceh. berdasarkan Perjanjian Nomor 15/PKS/2021 antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Tgk. Fakinah.

5.3.6.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Rp(8.165.490.762,72) Rp(11.820.364.454,15)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi adalah kumpulan dari alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akumulasi Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp(8.165.490.762,72) terdiri dari:

Tabel 204. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
1	Bangunan Yayasan Cut Nyak Dhien (Gedung Resepsi), Jl. Tgk Abu Lam U Nomor 5 Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Banda Aceh	-	(4.095.006.929,29)
Jumlah		-	(4.095.006.929,29)
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
1	Bangunan Yayasan Tgk Rakinah (Rumah Sakit Swasta Tgk. Fakinah), Jl. Sudirman Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Banda Aceh	(8.053.696.462,72)	(7.632.195.608,20)



No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
2	Instalasi Pengolahan air limbah Yayasan Tgk Fakinah (Rumah Sakit Swasta Tgk. Fakinah), Jl. Sudirman Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Banda Aceh	(111.794.300,00)	(93.161.916,67)
Jumlah		(8.165.490.762,72)	(7.725.357.524,87)
Total		(8.165.490.762,72)	(11.820.364.454,16)

Sumber: Data diolah

5.3.7. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab atas tindakan di masa lalu dan muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Kewajiban Jangka Pendek diharapkan dapat dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, seperti Utang Transfer Pemerintah, Bunga Pinjaman, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.3.7.1. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 Rp885.880.130.300,50 Per 31 Desember 2024 Rp849.438.902.560,39

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 sebesar Rp885.880.130.300,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 205. Rincian Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	254.949.910,00	1.771.881.770,80	254.949.910,00	1.771.881.770,80
2	Pendapatan diterima dimuka	10.780.453.344,89	2.868.329.123,44	5.787.308.094,20	7.861.474.374,13
3	Utang Belanja	635.382.703.305,50	689956977271,57	670114867421,50	655224813155,57
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	203.020.796.000,00	221.021.961.000,00	203.020.796.000,00	221.021.961.000,00
Jumlah		849.438.902.560,39	915.619.149.165,81	879.177.425,70	885.880.130.300,50

Sumber: Data diolah

5.3.7.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2025 Rp1.771.881.770,80 Per 31 Desember 2024 Rp254.949.910,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh yang harus diserahkan kepada pihak lain. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2025 sebesar Rp1.771.881.770,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 206. Rincian Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Utang PPh Pusat					
1	Dinas Pendidikan Aceh	20.099.713,00	87.088.811,00	20.099.713,00	87.088.811,00
2	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	717.100,00	-	717.100,00	-
3	Dinas Syariah Islam Aceh	796.088,00	-	796.088,00	-
4	Sekretariat DPRA	-	1.017.287.000,00	-	1.017.287.000,00
Jumlah I		21.612.901,00	1.104.375.811,00	21.612.901,00	1.104.375.811,00



No	SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Utang PPN Pusat					
1	Dinas Pendidikan Aceh	233.337.009,00	667.505.959,80	233.337.009,00	667.505.959,80
	Jumlah II	233.337.009,00	667.505.959,80	233.337.009,00	667.505.959,80
	Total I + II	254.949.910,00	1.771.881.770,80	254.949.910,00	1.771.881.770,80

Sumber: Data diolah

1. Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp754.594.770,80 berupa Penyetoran Pajak BOS yang baru dibayarkan pada tahun 2026 berupa Utang PPh Pasal 21 sebesar Rp23.846.663,00, Utang PPh Pasal 22 sebesar Rp22.360,00, Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp63.219.788,00 dan Utang PPN Pusat sebesar Rp667.505.959,80.
2. Sekretariat DPRA sebesar Rp1.017.287.000,00 berupa Utang PPh Pasal 21 atas Tunjangan Efektif Rata-rata (TER) Pimpinan dan Anggota DPRA.

5.3.7.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025 Rp7.861.474.374,13 Per 31 Desember 2024 Rp10.780.453.344,89

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak lain. Pendapatan diterima dimuka berdasarkan jenis pendapatan tahun 2025 sebesar Rp7.861.474.374,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 207. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPA	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Diterima Dimuka SKPA				
1	Dinas Pendidikan Aceh	72.478.082,22	293.375.682,37	(220.897.600,15)
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	5.419.708,03	10.415.145,99	(4.995.437,96)
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	714.246,58	-	714.246,58
4	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	424.657,53	423.497,27	1.160,26
5	Dinas Pangan Aceh	2.589.041,10	-	2.589.041,10
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	-	18.993.711,17	(18.993.711,17)
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.457.534,25	3.342.465,76	(1.884.931,51)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.972.602,74	1.972.602,74	-
9	Dinas Perhubungan Aceh	3.011.667.552,04	6.479.537.349,41	(3.467.869.797,37)
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	64.453.757,00	101.689.036,02	(37.235.279,02)
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	214.094.625,62	284.431.743,84	(70.337.118,22)
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	247.783.833,61	332.833.828,13	(85.049.994,52)
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	6.657.534,24	6.657.534,24	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.754.389.513,90	96.212.461,94	1.658.177.051,96
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	9.534.246,58	11.671.232,88	(2.136.986,30)
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	4.541.095,89	4.541.095,89	-
17	Sekretariat Daerah Aceh	22.652.054,79	22.652.054,79	-
18	Sekretariat DPRA	-	1.139.178,08	(1.139.178,08)
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	-	2.252.054,79	(2.252.054,79)
20	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.629.958.765,83	2.567.329.000,11	(937.370.234,28)
21	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	98.677.007,30	28.549.270,07	70.127.737,23
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	10.158.904,11	10.158.904,11	-
23	Dinas Syariat Islam Aceh	99.610.958,80	161.610.958,60	(61.999.999,80)



No	SKPA	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Diterima Dimuka BLUD				
1	Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	558.320.724,64	217.263.560,30	341.057.164,34
2	Rumah Sakit Ibu dan Anak	27.000.000,00	69.400.976,39	(42.400.976,39)
3	Rumah Sakit Jiwa	16.672.927,33	54.000.000,00	(37.327.072,67)
Jumlah		7.861.474.374,13	10.780.453.344,89	(2.918.978.970,76)

Sumber: Data diolah

Rincian dapat di lihat pada **Lampiran 22**.

5.3.7.1.3. Utang Belanja

Per 31 Desember 2025
Rp655.224.813.155,57

Per 31 Desember 2024
Rp635.382.703.305,50

Utang Belanja adalah utang Pemerintah Aceh yang timbul karena Pemerintah Aceh mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang Belanja Tahun 2025 sebesar Rp655.224.813.155,57, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 208. Rincian Mutasi Utang Belanja

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Pegawai	155.233.766,00	42.327.936,00	155.233.766,00	42.327.936,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	403.312.974.121,50	510.415.808.134,36	438.045.138.237,50	475.683.644.018,36
4	Utang Belanja Hibah	-	8.595.300.615,00	-	8.595.300.615,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.550.004,00	12.008.264.704,00	14.550.004,00	12.008.264.704,00
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.405.786.213,00	-	1.405.786.213,00
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.493.555.190,00	42.449.539.277,21	39.493.555.190,00	42.449.539.277,21
8	Utang Belanja Bagi Hasil	192.406.390.224,00	115.009.671.571,00	192.406.390.224,00	115.009.671.571,00
9	Utang Belanja Tidak Terduga	-	30.278.821,00	-	30.278.821,00
Jumlah		635.382.703.305,50	689.956.977.271,57	670.114.867.421,50	655.224.813.155,57

Sumber: Data diolah

Rincian Utang Belanja dijelaskan sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp42.327.936,00 yang terdiri dari:

Tabel 209. Rincian Mutasi Utang Belanja Pegawai

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	201.700,00	-	201.700,00	-
2	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00
3	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	24.204,00	-	24.204,00	-
4	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.717,00	-	10.717,00	-
5	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	27,00	-	27,00	-
6	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	148.522.382,00	-	148.522.382,00	-
7	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.472.800,00	35.727.936,00	6.472.800,00	35.727.936,00
8	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	484,00	-	484,00	-
9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	1.452,00	-	1.452,00	-
Jumlah		155.233.766,00	42.327.936,00	155.233.766,00	42.327.936,00



Sumber: Data diolah

- 1) Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK sebesar Rp6.600.000,00 merupakan Utang Gaji TA 2025 Tenaga Kontrak yang sudah jadi PPPK An. Aris Kemala Putra dan Ridwan sesuai Surat Kepala Sekretariat MPU Nomor 050/780/2025 Tanggal 31 Desember 2025; dan
 - 2) Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas kekurangan pembayaran iuran JKN 4% Pemerintah Aceh Tahun 2025 berdasarkan surat BPJS Nomor 151/KEPWIL I/0226 Tanggal 08 Februari 2026 Hal Pencatatan Hutang Iuran JKN Tahun 2025 Rp35.727.936,00 pada Dinas Kesehatan Aceh.
- b. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp475.683.644.018,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 210. Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Barang	172.696.474.655,00	377.668.616.005,82	194.582.273.261,00	355.782.817.399,82
2	Utang Belanja Jasa	228.909.981.935,50	119.472.831.727,54	239.313.146.161,50	109.069.667.501,54
3	Utang Belanja Pemeliharaan	1.613.239.029,00	11.793.750.134,00	3.403.568.808,00	10.003.420.355,00
4	Utang Belanja Perjalanan Dinas	93.278.502,00	121.004.845,00	93.278.502,00	121.004.845,00
5	Utang Belanja Jasa Diserahkan	-	1.359.605.422,00	652.871.505,00	706.733.917,00
Jumlah		403.312.974.121,50	510.415.808.134,36	438.045.138.237,50	475.683.644.018,36

Sumber: Data diolah

- 1) Utang Belanja Barang sebesar Rp355.782.817.399,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 211. Rincian Mutasi Utang Belanja Barang

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	254.121.775,00	4.551.600,00	254.121.775,00	4.551.600,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	215.675.000,00	1.947.031.630,00	215.675.000,00	1.947.031.630,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	2.593.499.469,00	7.438.761.150,00	2.593.499.469,00	7.438.761.150,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	105.087.002.187,00	223.028.733.179,09	124.368.233.703,00	203.747.501.663,09
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.996.793.628,00	542.705.907,00	2.143.532.372,00	395.967.163,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	453.614.080,00	-	453.614.080,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.450.000,00	3.138.870.563,00	904.150.344,00	2.256.170.219,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.657.439.500,00	3.109.411.680,00	1.657.439.500,00	3.109.411.680,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.000.000,00	278.717.033,00	24.000.000,00	278.717.033,00
10	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.134.402.373,00	2.979.427.299,00	5.190.328.373,00	2.923.501.299,00



No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	55.671.174.653,00	92.287.642.403,73	57.217.180.655,00	90.741.636.401,73
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.430.070,00	10.000.000,00	8.430.070,00	10.000.000,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.804.000,00	35.597.807.639,00	-	35.624.611.639,00
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan pakai-Natura dan pakan lainnya	-	284.700.000,00	-	284.700.000,00
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	-	664.425.000,00	-	664.425.000,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.682.000,00	1.394.000,00	5.682.000,00	1.394.000,00
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	5.900.822.842,00	-	5.900.822.842,00
Jumlah		172.696.474.655,00	377.668.616.005,82	194.582.273.261,00	355.782.817.399,82

Sumber: Data diolah

- a. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp4.551.600,00;
- b. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-bahan Bakar dan Pelumas di Dinas Peternakan Rp17.009.000,00, Sekretariat Baitul Mal Aceh Rp12.870.130,00 dan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp1.917.152.500,00;
- c. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp6.370.365.483,00 dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rp143.166.000,00;
- d. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Bahan-bahan Lainnya di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp103.668.452.980,00, Rumah Sakit Ibu dan Anak Rp374.440.692,00 dan Dinas Peternakan Rp3.950.000,00;
- e. Utang Belanja Barang Pakai Habis - Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp310.261.843,00;
- f. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp319.603.601,00;
- g. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp2.388.816.219,00;
- h. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp2.942.999.180,00 dan Dinas Peternakan Rp1.543.500,00;
- i. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp275.162.033,00 dan Dinas Peternakan Rp3.555.000,00;
- j. Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp1.405.131.100,00;
- k. Utang Belanja Barang Pakai Habis - Obat-obatan - Obat-obatan di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp64.349.198.379,00, Rumah Sakit Jiwa Rp422.577,00 dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rp744.063.319,00;

- l. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp8.430.070,00 dan Dinas Peternakan Rp10.000.000,00;
- m. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Rp35.624.611.639,00;
- n. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan pakai-Natura dan pakan lainnya di Dinas Peternakan Rp284.700.000,00;
- o. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp664.425.000,00;
- p. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp1.394.000,00;dan
- q. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp5.371.289.312,00.

- 2) Utang Belanja Jasa sebesar Rp109.069.667.501,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 212. Rincian Mutasi Utang Belanja Jasa

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	363.228.627,00	630.465.976,00	363.228.627,00	630.465.976,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	7.575.000,00	8.300.000,00	7.575.000,00	8.300.000,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan	83.400.000,00	-	83.400.000,00	-
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	39.000.000,00	-	39.000.000,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	35.760.000,00	35.760.000,00	-
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	22.541.052.441,00	25.877.380.409,00	22.931.108.001,00	25.487.324.849,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	20.800.000,00	-	20.800.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	-	48.150.000,00	-	48.150.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO	-	83.500.000,00	-	83.500.000,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000,00	21.350.000,00	26.350.000,00	-
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.000.455,00	1.844.319,00	25.000.455,00	1.844.319,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	-	9.478.589.500,00	-	9.478.589.500,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	118.895.000,00	341.160.000,00	122.395.000,00	337.660.000,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	71.814.856,00	73.296.449,00	94.912.891,00	50.198.414,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	784.163.153,00	765.099.373,00	795.349.201,00	753.913.325,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.112.078.829,00	3.282.546.275,00	4.125.086.926,00	3.269.538.178,00



No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	869.177.027,00	305.199.025,54	884.584.894,00	289.791.158,54
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	546.000,00	-	546.000,00
18	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	-	56.044.000,00	-	56.044.000,00
19	Utang Belanja Jasa Kantor-Registri/Keanggotaan	-	128.869.028,00	64.434.514,00	64.434.514,00
20	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	-	14.863.924.000,00	6.728.488.000,00	8.135.436.000,00
21	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-kontribusi Jaminan Kesehatan PBI	-	4.116.500,00	-	4.116.500,00
22	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	174.179.110.000,00	19.506.375.000,00	174.179.110.000,00	19.506.375.000,00
23	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	13.934.348.204,00	1.525.308.400,00	13.934.348.204,00	1.525.308.400,00
24	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	66.630.940,00	2.552.162.341,00	66.630.940,00	2.552.162.341,00
25	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	4.023.000,00	-	1.153.000,00	2.870.000,00
26	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Arsitektur Lainnya	38.846.000,00	4.555.784.600,00	-	4.594.630.600,00
27	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	1.965.086.550,00	-	1.965.086.550,00
28	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan	-	162.067.320,00	-	162.067.320,00
29	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	447.992.857,00	-	447.992.857,00	-
30	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	422.539.839,50	164.986.500,00	422.539.839,50	164.986.500,00
31	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tetap Kerja	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
32	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.636.722,00	-	20.636.722,00	-
33	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.510.497.105,00	1.110.652.457,00	1.510.497.105,00	1.110.652.457,00
34	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak	-	152.380.800,00	-	152.380.800,00
35	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.286.250.000,00	4.949.250.000,00	1.737.750.000,00	4.497.750.000,00
36	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi	7.805.077.080,00	26.753.086.905,00	10.492.169.185,00	24.065.994.800,00



No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
37	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.644.800,00	1.950.000,00	12.644.800,00	1.950.000,00
Jumlah		228.909.981.935,50	119.472.831.727,54	239.313.146.161,50	109.069.667.501,54

Sumber: Data diolah

- a. Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp562.824.976,00;
- b. Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp8.300.000,00;
- c. Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website* di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp3.900.000,00;
- d. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp23.984.597.661,00 dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rp1.647.806.348,00
- e. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi di Dinas Peternakan Rp7.800.000,00;
- f. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum di Dinas Peternakan Rp20.800.000,00;
- g. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Rp48.150.000,00;
- h. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan di Dinas Perhubungan Rp1.844.319,00;
- i. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp9.478.589.500,00;
- j. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp219.665.000,00;
- k. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon atas beban bulan Desember 2025 Rp60.870.630,00;
- l. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air atas beban bulan Desember 2025 Rp754.795.735,00;
- m. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik atas beban bulan Desember 2025 Rp3.268.020.687,00;
- n. Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan atas beban bulan Desember 2025 Rp285.029.762,54;
- o. Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah beban bulan Desember 2025 Rp546.000,00;
- p. Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman beban bulan Desember 2025 Rp56.044.000,00;
- q. Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan beban bulan Desember 2025 pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp64.434.514,00;
- r. Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah beban bulan Desember 2025 pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp4.011.112.000,00;
- s. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-kontribusi Jaminan Kesehatan PBI pada Dinas Kesehatan Aceh Rp4.116.500,00;

- t. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 pada Dinas Kesehatan Aceh Rp19.506.375.000,00;
 - u. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 pada Dinas Kesehatan Aceh Rp1.525.308.400,00;
 - v. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp2.552.162.341,00;
 - w. Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) -Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Rp2.870.000,00;
 - x. Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Arsitektur Lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Rp4.594.630.600,00;
 - y. Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Rp1.965.086.550,00;
 - z. Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp162.067.320,00;
 - aa. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Rp164.986.500,00;
 - bb. Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus pada Dinas Kesehatan Rp1.110.652.457,00;
 - cc. Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp152.380.800,00;
 - dd. Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic* pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp4.497.750.000,00;
 - ee. Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp9.311.659.070,00;dan
 - ff. Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp1.950.000,00.
- 3) Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp10.003.420.355,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 213. Rincian Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	276.142.500,00		276.142.500,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	65.847.500,00	-	65.847.500,00	-
3	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel	115.911.750,00	5.200.000,00	115.911.750,00	5.200.000,00
4	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan	1.361.552.779,00	55.888.500,00	1.417.441.279,00	-



No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
	Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya				
5	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	6.000.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00
6	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	63.927.000,00	630.800.000,00	380.927.000,00	313.800.000,00
7	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi		8.851.000,00		8.851.000,00
8	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya	-	9.397.926.855,00	-	9.397.926.855,00
9	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	1.417.441.279,00	1.417.441.279,00	-
Jumlah		1.613.239.029,00	11.793.750.134,00	3.403.568.808,00	10.003.420.355,00

Sumber: Data diolah

- a. Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp276.142.500,00;
 - b. Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp5.200.000,00;
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Rp1.500.000,00;
 - d. Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp313.800.000,00;
 - e. Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi di Dinas Peternakan Rp8.851.000,00; dan
 - f. Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp9.397.926.855,00.
- 4) Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp121.004.845,00 pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin.
 - 5) Utang Belanja Jasa yang Diserahkan sebesar Rp706.733.917,00 dengan rincian:
 - a. Utang Belanja Jasa yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat di Dinas Pendidikan Rp3.600.000,00; dan
 - b. Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rp553.133.917,00; dan
 - c. Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp150.000.000,00.
 - c. Utang Belanja Hibah

Tabel 214. Rincian Mutasi Utang Belanja Hibah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	8.308.963.615,00	-	8.308.963.615,00
2	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	286.337.000,00	-	286.337.000,00
Jumlah		-	8.595.300.615,00	-	8.595.300.615,00

Sumber : Data Diolah

- 1) Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.308.963.615,00; dan
- 2) Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp286.337.000,00.

d. Utang Belanja Modal

Tabel 215. Rincian Mutasi Utang Belanja Modal

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.550.004,00	12.008.264.704,00	14.550.004,00	12.008.264.704,00
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.405.786.213,00	-	1.405.786.213,00
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.493.555.190,00	42.449.539.277,21	39.493.555.190,00	42.449.539.277,21
Jumlah		39.508.105.194,00	55.863.590.194,21	39.508.105.194,00	55.863.590.194,21

Sumber: Data diolah

- 1) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 216. Rincian Mutasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4,00	6.894.674.000,00	4,00	6.894.674.000,00
2	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	12.200.000,00	-	12.200.000,00
3	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	-	108.517.000,00	-	108.517.000,00
4	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	14.550.000,00	10.000.000,00	14.550.000,00	10.000.000,00
5	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	95.349.000,00	-	95.349.000,00
6	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	350.555.000,00	-	350.555.000,00
7	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	-	657.083.406,00	-	657.083.406,00
8	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	-	3.609.886.298,00	-	3.609.886.298,00
9	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	-	270.000.000,00	-	270.000.000,00
Jumlah		14.550.004,00	12.008.264.704,00	14.550.004,00	12.008.264.704,00

Sumber: Data diolah

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp12.008.264.704,00 dengan rincian sebagaimana tabel di atas.

- 2) Utang Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp1.405.786.213,00 merupakan penambahan pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.085.867.913,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp316.518.300,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi sebesar Rp3.400.000,00 pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin.
- 3) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 217. Rincian Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	39.493.555.190,00	-	-	39.493.555.190,00
2	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus	-	314.010.000,00	-	314.010.000,00
3	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	-	1.180.650.379,00	-	1.180.650.379,00
4	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan pengamanan pengamanan sungai/pantai	-	1.461.323.708,21	-	1.461.323.708,21
Jumlah		39.493.555.190,00	2.955.984.087,21	-	42.449.539.277,21

Sumber: Data diolah

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp42.449.539.277,21 dengan rincian :

1. Utang Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan utang belanja modal jalan dan utang belanja modal jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp40.674.205.569,00 terdiri dari:
 - a. Utang belanja modal jalan-jalan provinsi merupakan sisa pekerjaan yang diberi kesempatan bekerja melampaui tahun anggaran 2022 yaitu pekerjaan peningkatan jalan Peureulak-Lokop-batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 3 (MYC) sebesar Rp39.493.555.190,00 belum dibayarkan karena belum ada revidu Inspektorat Aceh.
 - b. Utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan provinsi merupakan utang atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Krueng Beutong Pangoe Kabupaten Aceh Besar (Otsus Aceh) pada Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.180.650.379,00 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor Rp4/Pdt.Eks/2025/PN-Bna tanggal 19 Mei 2025 atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1940 K/Pdt/2019 tanggal 18 September 2019.

2. Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp314.010.000,00;
 3. Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp1.180.650.379,00;
 4. Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai pada Dinas Pengairan Sebesar Rp1.461.323.708,21 merupakan utang atas paket pekerjaan Tahun Anggaran 2018 tanggap darurat pekerjaan pengaman tebing sungai Krueng Pase – Kuala Blang Mee Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara.
- e. Utang Belanja Tidak Terduga tahun 2025 sebesar Rp30.278.821,00 yang merupakan Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB berdasarkan surat Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB dari PT. IAS Jaya Mandiri (Charli Pangaribuan, ST) tanggal 1 Desember 2025. Atas SPTPD pajak mineral logam dan batuan (MBLB) nomor 973/64a/SSPD/XII/2025 sebesar Rp15.139.413,00.
- f. Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp115.009.671.571,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.13.1/218/2026 tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berdasarkan Realisasi Triwulan IV Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 serta Pajak Rokok berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan IV Bulan Oktober sampai dengan November Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh tanggal 16 Maret 2026, yang terdiri dari:

Tabel 218. Rincian Mutasi Utang Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	154.462.415.661,00	87.816.695.660,00	27.192.975.911,00	27.192.975.911,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	37.943.974.563,00	27.192.975.911,00	27.192.975.911,00	27.192.975.911,00
Jumlah		192.406.390.224,00	115.009.671.571,00	192.406.390.224,00	115.009.671.571,00

Sumber: Data diolah

5.3.7.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2025 Rp221.021.961.000,00 Per 31 Desember 2024 Rp203.020.796.000,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp221.021.961.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 219. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	SKPA	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang Bos kinerja			
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	36.250.000,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	221.021.961.000,00	202.984.546.000,00
Jumlah		221.021.961.000,00	203.020.796.000,00

Sumber: Data diolah

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Aceh diakui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp214.455.536.000,00 yang diselesaikan dengan potongan lebih bayar pada akhir Desember sebesar Rp11.470.990.000,00, sehingga sisa Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp221.021.961.000,00.

Tabel 220. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Nilai
1	DBH PPh Pasal 21	-
2	DBH PBB Bagian Daerah MIGAS	-
3	DBH PBB Bagian Daerah Perhutanan	-
4	DBH PBB Bagian Daerah sektor lainnya	2.807.255.000,00
5	DBH PBB Bagian Daerah Panas Bumi	12.528.000,00
6	Bagi Hasil dari PBB sektor perhutanan	-
7	Pemungutan sektor lainnya	-
8	Pemungutan MIGAS	-
9	DBH SDA Minyak Bumi 15%	439.635.000,00
10	DBH SDA Minyak Bumi Otonomi Khusus	118.678.720.000,00
11	DBH SDA Gas Bumi 30%	2.675.533.000,00
12	DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus	61.782.650.000,00
13	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	753.863.000,00
14	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	15.227.000,00
15	DBH SDA Panas Bumi - Produksi	97.681.000,00
16	DBH SDA Kehutanan - PSDH	180.516.000,00
17	DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	575.315.000,00
18	DBH Cukai Hasil Tembakau	162.447.000,00
18	DBH Perkebunan Sawit	32.840.591.000,00
Jumlah		221.021.961.000,00

Sumber: Data diolah

5.3.8. Ekuitas

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp31.208.823.011.468,91 Rp31.508.885.357.276,83

Ekuitas Pemerintah Aceh merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp31.508.885.357.276,83, Defisit-LO sebesar Rp(243.151.677.968,74), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp(56.910.667.839,18), sehingga jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp31.208.823.011.468,91. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional Pemerintah Aceh. Laporan Operasional disusun dengan basis akrual dengan pengakuan pendapatan dan beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah tanpa memperhatikan kas/setara kas telah diterima atau dikeluarkan dari kas daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 221. Pendapatan dan Beban LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan-LO	11.005.514.243.717,61	11.586.034.950.005,91	(580.520.706.288,31)	(5,01)
2	Beban-LO	11.179.635.068.160,95	11.690.999.368.190,33	(511.364.300.029,38)	(4,37)
	Surplus/Defisit	(174.120.824.443,34)	(104.964.418.184,42)	(69.156.406.258,92)	65,89

Sumber: data diolah

5.4.1. Pendapatan – LO

Tahun 2025
Rp11.005.514.243.717,61

Tahun 2024
Rp11.586.034.950.005,91

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Tahun 2025 sebesar Rp11.005.514.243.717,61 mengalami penurunan sebesar Rp580.520.706.288,31 dibanding saldo tahun sebelumnya sebesar Rp11.586.034.950.005,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 222. Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Aceh-LO	2.877.908.888.191,18	3.360.330.532.356,04	(482.421.644.164,86)	(14,36)
2.	Pendapatan Transfer-LO	8.005.294.234.056,00	8.132.328.393.238,00	(127.034.159.182,00)	(1,56)
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO	122.311.121.470,43	93.376.024.411,87	28.935.097.058,56	30,99
	Jumlah	11.005.514.243.717,61	11.586.034.950.005,91	(580.520.706.288,30)	(5,01)

Sumber: Data diolah

5.4.1.1. Pendapatan Asli Aceh-LO

Tahun 2025
Rp2.877.908.888.191,18

Tahun 2024
Rp3.360.330.532.356,04

Pendapatan Asli Aceh-LO Pemerintah Aceh Tahun 2025 sebesar Rp2.877.908.888.191,18 merupakan pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 223. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Asli Aceh-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Aceh	1.545.349.393.363,50	1.966.054.208.641,00	(420.704.815.277,50)	(21,40)
2	Pendapatan Retribusi Aceh	710.651.438.910,73	747.390.334.956,46	(36.738.896.045,73)	(4,92)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	346.813.573.829,68	380.711.935.295,36	(33.898.361.465,68)	(8,90)
4	Lain-lain PAA yang Sah	275.094.482.087,27	266.174.053.463,22	8.920.428.624,05	3,35
	Jumlah Pendapatan Asli Aceh	2.877.908.888.191,18	3.360.330.532.356,04	(482.421.644.164,86)	(14,36)

Sumber: Data diolah

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Aceh – LO

Tahun 2025
Rp1.545.349.393.363,50

Tahun 2024
Rp1.966.054.208.641,00

Pendapatan Pajak Aceh adalah pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Pajak Aceh – LO Tahun 2025 sebesar Rp1.545.349.393.363,50 mengalami penurunan sebesar Rp420.704.815.277,50 dibanding saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.966.054.208.641,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 224. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO

NO	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	369.388.864.230,00	637.490.289.468,00	(268.101.425.238,00)	(42,06)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	220.218.250.389,00	438.428.318.400,00	(218.210.068.011,00)	(49,77)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	632.139.126.239,00	526.232.293.636,00	105.906.832.603,00	20,13
4	Pajak Air Permukaan-LO	2.390.644.278,00	2.376.094.862,00	14.549.416,00	0,61
5	Pajak Rokok-LO	313.695.970.299,00	361.527.212.275,00	(47.831.241.976,00)	(13,23)
6	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)-LO	7.516.537.928,50	-	7.516.537.928,50	-
Jumlah		1.545.349.393.363,50	1.966.054.208.641,00	(420.704.815.277,50)	(21,40)

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Pendapatan Pajak Aceh-LRA dengan Pendapatan Pajak Aceh-LO sebagai berikut:

NO	Uraian	Tahun 2025
1	Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	1.545.349.393.363,50
2	Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	1.499.781.765.834,50
3	Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	89.769.141.907,00
4	Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca)	44.171.235.557,00
Selisih (1-2-3+4)		(30.278.821,00)
1	Penjelasan Selisih : Pengakuan Utang atas kelebihan penerimaan TA 2025 karena kesalahan penyetoran pada Rekening BPKA BPNR yang seharusnya menjadi penerimaan Kota subulussalam atas opsen MBLB dikeluarkan dengan Utang Belanja Tak Terduga 2026	(30.278.821,00)
Jumlah		(30.278.821,00)

Sumber: Data diolah

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Aceh – LO

Tahun 2025
Rp710.651.438.910,73

Tahun 2024
Rp747.390.334.956,46

Pendapatan Retribusi-LO merupakan Pendapatan Retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan serta pembayaran Retribusi yang dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi Aceh. Pendapatan Retribusi Aceh – LO Tahun 2025 sebesar Rp710.651.438.910,73 mengalami penurunan sebesar Rp36.738.896.045,73 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp747.390.334.956,46, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 225. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO

No	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
Retribusi Jasa Umum-LO					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	684.137.795.266,25	729.021.644.500,00	(44.883.849.233,75)	(6,16)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	261.499.150,00	162.925.230	98.573.920,00	60,50
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	-	177.370.574	(177.370.574,00)	(100,00)
Jumlah		684.399.294.416,25	729.361.940.304,00	(44.962.645.887,75)	(6,16)
Retribusi Jasa Usaha-LO					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.024.109,59	448.652.333,41	(445.628.223,82)	(99,33)
2	Retribusi Terminal-LO	682.000,00	9.196.620,00	(8.514.620,00)	(92,58)
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.878.986.903,15	2.023.290.000,00	(144.303.096,85)	(7,13)
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	-	3.357.613.670,00	(3.357.613.670,00)	(100,00)
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	-	84.300.000,00	(84.300.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	2.773.751.897,55	1.018.155.490,00	1.755.596.407,55	172,43
7	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	2.003.351.863,17	595.520.292,67	1.407.831.570,50	236,40
8	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	197.477.500,00	618.002.250,00	(420.524.750,00)	(68,05)
9	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	996.501.061,50	725.061.746,00	271.439.315,50	37,44
10	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	5.389.358.019,60	2.366.211.007,93	3.023.147.011,67	127,76
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	1.873.623.010,00	1.927.660.004,00	(54.036.994,00)	(2,80)
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	5.250.962.655,00	4.017.378.504,01	1.233.584.150,99	30,71
13	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	5.884.425.474,92	833.145.734,44	5.051.279.740,48	606,29
Jumlah		26.252.144.494,48	18.024.187.652,46	8.227.956.842,02	45,65
Retribusi Perizinan Tertentu-LO					
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	-	4.207.000,00	(4.207.000,00)	(100,00)
Jumlah		-	4.207.000,00	(4.207.000,00)	(100,00)
TOTAL		710.651.438.910,73	747.390.334.956,46	(36.738.896.045,73)	(4,92)

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Pendapatan Retribusi Aceh-LRA dengan Pendapatan Retribusi Aceh-LO sebagai berikut:

Tabel 226. Selisih Pendapatan Retribusi Aceh-LRA dengan Pendapatan Retribusi Aceh-LO

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	710.651.438.910,73
2	Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	684.774.199.352,66
3	Piutang Retribusi Tahun 2025 (Neraca)	117.515.619.227,00
4	Piutang Retribusi Tahun 2024 (Neraca)	101.641.577.163,00
5	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2025 (Neraca)	2.935.879.965,61
6	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2024 (Neraca)	1.350.419.219,44
Selisih (1-2-3+4+5-6)		11.588.658.240,24



No	Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih:		
1	Beban Transaksi Keuangan RSJ	1.858.072,91
2	Koreksi Piutang Retribusi RSJ	831.600,00
3	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2025	391.875.406,25
4	Penambahan Pendapatan Retribusi (Reklas dari Pendapatan lain-lain)	3.526.164.447,55
5	Koreksi/Penyesuaian Piutang Retribusi Tahun 2024 RSIA	103.837.529,00
6	Pengurangan Piutang Retribusi karena adanya Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Tahun Sebelumnya pada RSUZA	7.999.826.575,00
7	Penghapusan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	117.347.410,68
8	Pengurangan Pendapatan Retribusi LO tahun 2024 atas pelunasan piutang	(220.919.700,15)
9	Pengurangan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2024 RSIA, RSUZA tetapi Pendapatan masuk ke Lain-lain pendapatan	(27,00)
10	Pengurangan Piutang tahun lalu pada Dinas Syariat Islam	(36.000,00)
11	Pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2024	(332.127.074,00)
Jumlah		11.588.658.240,24

Sumber: Data diolah

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan - LO

Tahun 2025

Rp346.813.573.829,68

Tahun 2024

Rp380.711.935.295,36

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba perusahaan milik daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 sebesar Rp346.813.573.829,68 mengalami penurunan sebesar Rp33.898.361.465,68 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp380.711.935.295,36.

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari:

Tabel 227. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

NO	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	291.963.199.037,68	327.298.272.567,36	(35.335.073.529,68)	(10,80)
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO	54.850.374.792,00	53.413.662.728,00	1.436.712.064,00	2,69
Jumlah		346.813.573.829,68	380.711.935.295,36	(33.898.361.465,68)	(8,90)

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LO sebagai berikut:

Tabel 228. Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Tahun 2025
1	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	346.813.573.829,68
2	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	270.253.493.775,00
Selisih (1-2)		76.560.080.054,68
Penjelasan Selisih :		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal TA 2024 pada PT. Bank Aceh Syari'ah	(215.416.778.183,00)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal TA 2024 pada PT. BPR Syari'ah Mustaqim Aceh	(1.580.109.813,00)



No	Uraian	Tahun 2025
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal TA 2024 pada PT. Pembangunan Aceh	(26.706.831.364,00)
Pengumuman - Laba/Rugi Tahun Berjalan:		
1	Pengumuman - Laba/Rugi Bank Aceh Tahun 2025. (71,84% x Rp401.808.594.115,00)	288.659.294.012,22
2	Pengumuman - Laba/Rugi PT BPRS Mustaqim Aceh Tahun 2025 (99,99% x Rp3.304.235.449,00)	3.303.905.025,46
3	Pengumuman - Laba/Rugi PT PEMA	54.850.374.792,00
4	Penyetoran Dana Pembangunan Bank Aceh Syari'ah	(26.549.774.415,00)
Jumlah		76.560.080.054,68

Sumber: Data diolah

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO

Tahun 2025
Rp275.094.482.087,27

Tahun 2024
Rp266.174.053.463,22

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah merupakan Pendapatan Asli Aceh selain Pajak Aceh, Retribusi Aceh, dan Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO Tahun 2025 sebesar Rp275.094.482.087,27 mengalami kenaikan sebesar Rp8.920.428.624,05 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp266.174.053.463,22, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 229. Kenaikan/Penurunan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO

No	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	364.296.000,00	-	364.296.000,00	-
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.774.106.949,93	5.022.149.515,15	751.957.434,78	14,97
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	906.610.204,00	116.300.530,00	790.309.674,00	679,54
4	Jasa Giro-LO	1.144.898.547,09	5.302.902.977,34	(4.158.004.430,25)	(78,41)
5	Pendapatan Bunga-LO	76.584.702.616,53	53.169.660.971,15	23.415.041.645,38	44,04
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	11.142.358.434,09	25.727.358.654,21	(14.585.000.220,12)	(56,69)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	984.232.301,00	2.841.961.161,91	(1.857.728.860,91)	(65,37)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	6.723.655.666,00	1.114.708.660,00	5.608.947.006,00	503,18
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	9.744.120,00	24.482.440,00	(14.738.320,00)	(60,20)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	60.546.767.341,60	60.806.195.127,27	(259.427.785,67)	(0,43)
11	Pendapatan dari BLUD-LO	17.729.428.970,96	16.514.240.369,36	1.215.188.601,60	7,36
12	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	79.856.905.936,07	95.534.093.056,83	(15.677.187.120,76)	(16,41)
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	13.326.775.000,00	-	13.326.775.000,00	-
Jumlah		275.094.482.087,27	266.174.053.463,22	8.920.428.624,05	3,35

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah -LO sebagai berikut:

Tabel 230. Selisih Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah -LO

No	Uraian	Nilai
1	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	275.094.482.087,27
2	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	258.727.952.896,49
3	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 (Neraca)	33.105.725.300,00
4	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 (Neraca)	28.675.103.074,00
5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2025 (Neraca)	1.580.028.421,36
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2024 (Neraca)	2.472.412.341,77
Selisih (1-2-3+4+5-6)		11.043.523.044,37



No	Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih:		
1	Reklasifikasi Piutang Lain-Lain PAA yang Sah ke Piutang Pemanfaatan Kekayaan Daerah	4.995.437,96
2	Penghapusan Piutang 2024	36.000,00
3	Penghapusan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Lalu	(8.907.963,34)
4	Reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Dimuka ke Retribusi	3.677.960.024,33
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	10.679.242.064,42
6	Reklasifikasi dari pendapatan BLUD ke Retribusi	(3.526.164.447,55)
7	Penambahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA 2025 karena adanya Koreksi SiLPA BLUD 2024	(66.974,45)
8	Reklasifikasi Piutang BLUD RSUZA	160.995.743,00
9	Piutang BLUD RSUZA	55.433.160,00
Jumlah		11.043.523.044,37

Sumber: Data diolah

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 Rp8.005.294.234.056,00 Tahun 2024 Rp8.132.328.393.238,00

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 Rp8.005.294.234.056,00 mengalami Penurunan sebesar Rp127.034.159.182,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.132.328.393.238,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 231. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	7.972.889.275.656,00	8.132.328.393.238,00	(159.439.117.582,00)	(1,96)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	32.404.958.400,00	-	32.404.958.400,00	
Jumlah Pendapatan Transfer		8.005.294.234.056,00	8.132.328.393.238,00	(127.034.159.182,00)	(1,56)

Sumber: data diolah

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer -LRA dengan Pendapatan Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

Tabel 232. Selisih Pendapatan Transfer -LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

NO	Uraian	Tahun 2025
1	Transfer Pemerintah Pusat - Tahun Berjalan (LO)	8.005.294.234.056,00
2	Transfer Pemerintah Pusat -Tahun Berjalan (LRA)	7.963.190.526.056,00
3	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Tahun Berjalan (Neraca)	113.647.088.000,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Tahun 20NN-1 (Neraca)	49.816.093.000,00
Selisih (1-2-3+4)		(21.727.287.000,00)
Penjelasan Selisih :		
1	Dana Treasury Deposit Facility (TDF) 2024	(3.689.872.000,00)
2	Penyesuaian Utang Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 atas Lebih Bayar sesuai dengan PMK No. 120 Tahun 2025	(18.037.415.000,00)
Jumlah		(21.727.287.000,00)

Sumber: Data diolah

**5.4.1.2.1. Dana Bagi Hasil– LO**

Tahun 2025
Rp373.595.858.000,00

Tahun 2024
Rp349.197.757.000,00

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil– LO TA 2025 sebesar Rp373.595.858.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.398.101.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp349.197.757.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 233. Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil –LO

No	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH PBB-LO	58.837.769.000,00	62.959.352.000,00	(4.121.583.000,00)	(6,55)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	127.055.648.000,00	76.175.578.000,00	50.880.070.000,00	66,79
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	4.072.277.000,00	1.622.242.000,00	2.450.035.000,00	151,03
4	DBH CHT-LO	7.110.376.000,00	2.981.401.000,00	4.128.975.000,00	138,49
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	54.724.435.000,00	28.851.724.000,00	25.872.711.000,00	89,67
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	44.663.308.000,00	58.220.040.000,00	(13.556.732.000,00)	(23,29)
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	235.289.000,00	172.153.000,00	63.136.000,00	36,67
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	3.865.642.000,00	15.316.876.800,00	(11.451.234.800,00)	(74,76)
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	60.365.787.000,00	72.563.296.200,00	(12.197.509.200,00)	(16,81)
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	47.445.000,00	29.530.545.000,00	(29.483.100.000,00)	(99,84)
11	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	614.801.000,00	804.549.000,00	(189.748.000,00)	(23,58)
12	DBH Sawit-LO	12.003.081.000,00	-	12.003.081.000,00	-
Jumlah		373.595.858.000,00	349.197.757.000,00	24.398.101.000,00	6,99

Sumber: Data diolah

5.4.1.2.2. Dana Alokasi Umum-LO

Tahun 2025
Rp2.250.706.483.460,00

Tahun 2024
Rp2.310.752.304.717,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2025 sebesar Rp2.250.706.483.460,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.045.821.257,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.310.752.304.717,00 yang terdiri dari:

Tabel 234. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Umum –LO

No	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAU-LO	1.841.936.132.511,00	1.943.663.033.000,00	(101.726.900.489,00)	(5,23)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	121.050.651.949,00	75.634.958.717,00	45.415.693.232,00	60,05
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	180.998.240.000,00	226.421.030.000,00	(45.422.790.000,00)	(20,06)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	106.721.459.000,00	41.187.010.000,00	65.534.449.000,00	159,11



No	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	-	23.846.273.000,00	(23.846.273.000,00)	-
Jumlah		2.250.706.483.460,00	2.310.752.304.717,00	(60.045.821.257,00)	(2,60)

Sumber: Data diolah

5.4.1.2.3. Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp109.854.191.253,00 Rp347.597.422.745,00

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Tahun 2025 sebesar Rp109.854.191.253,00 mengalami penurunan sebesar Rp237.743.231.492,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp347.597.422.745,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 235. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

No	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) - LO					
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	4.936.069.416,00	99.682.282.000,00	(94.746.212.584,00)	(95,05)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	422.121.214,00	11.299.386.000,00	(10.877.264.786,00)	(96,26)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK-LO	69.884.790.855,00	138.582.957.750,00	(68.698.166.895,00)	(49,57)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	493.802.370,00	-	493.802.370,00	-
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	-	6.240.068.475,00	(6.240.068.475,00)	-
6	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	-	1.279.400.000,00	(1.279.400.000,00)	-
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	-	5.379.003.054,00	(5.379.003.054,00)	-
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	-	12.563.749.703,00	(12.563.749.703,00)	-
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	-	3.597.301.501,00	(3.597.301.501,00)	-
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	-	8.831.735.499,00	(8.831.735.499,00)	-
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	-	15.820.937.000,00	(15.820.937.000,00)	-
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	-	749.214.520,00	(749.214.520,00)	-
13	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	-	14.226.802.000,00	(14.226.802.000,00)	-
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	-	23.736.572.500,00	(23.736.572.500,00)	-
15	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan-LO	-	5.608.012.743,00	(5.608.012.743,00)	-
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	34.117.407.398,00	-	34.117.407.398,00	-
Jumlah		109.854.191.253,00	347.597.422.745,00	(237.743.231.492,00)	(68,40)

Sumber: Data diolah

5.4.1.2.4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

Tahun 2025
Rp929.150.102.943,00

Tahun 2024
Rp829.938.391.776,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Tahun 2025 sebesar Rp929.150.102.943,00 mengalami kenaikan sebesar Rp99.211.711.167,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp829.938.391.776,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 236. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

No	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - LO					
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	338.516.544.839,00	336.082.157.108,00	2.434.387.731,00	0,72
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	10.370.500.000,00	8.466.250.000,00	1.904.250.000,00	22,49
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	558.968.722.800,00	454.767.385.500,00	104.201.337.300,00	22,91
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.986.500.000,00	7.462.919.964,00	(5.476.419.964,00)	(73,38)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	5.666.874.300,00	3.456.450.000,00	2.210.424.300,00	63,95
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	3.471.811.365,00	3.746.211.479,00	(274.400.114,00)	(7,32)
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.694.788.420,00	1.908.404.557,00	(213.616.137,00)	(11,19)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	6.859.532.667,00	2.580.025.657,00	4.279.507.010,00	165,87
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	100.000.000,00			
10	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	-	6.722.430.210,00	(6.722.430.210,00)	-
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	-	1.597.506.821,00	(1.597.506.821,00)	-
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	328.348.552,00	298.650.480,00	29.698.072,00	9,94
13	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	-	2.850.000.000,00	(2.850.000.000,00)	-
14	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah-LO	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian-LO	186.480.000,00	-	186.480.000,00	-
Jumlah		929.150.102.943,00	829.938.391.776,00	99.211.711.167,00	11,95

Sumber: Data diolah

5.4.1.2.5. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO

Tahun 2025
Rp4.309.582.640.000,00

Tahun 2024
Rp4.276.993.035.000,00

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.



Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.309.582.640.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.589.605.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.276.993.035.000,00

Tabel 237. Rincian Dana Otonomi Khusus – Provinsi Aceh

No	Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO					
1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO	1.077.395.660.000,00	4.276.993.035.000,00	(3.199.597.375.000,00)	(74,81)
2	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur-LO	1.071.594.719.970,00	-	1.071.594.719.970,00	-
3	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat-LO	328.213.885.791,75	-	328.213.885.791,75	-
4	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan-LO	62.973.043.990,50	-	62.973.043.990,50	-
5	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan-LO	946.887.184.232,25	-	946.887.184.232,25	-
6	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial-LO	71.387.706.555,00	-	71.387.706.555,00	-
7	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan-LO	575.591.416.685,25	-	575.591.416.685,25	-
8	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh-LO	130.921.023.783,75	-	130.921.023.783,75	-
9	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian-LO	44.617.998.991,50	-	44.617.998.991,50	-
Jumlah		4.309.582.640.000,00	4.276.993.035.000,00	32.589.605.000,00	0,76

Sumber : Data diolah

5.4.1.2.6. Dana Insentif Fiskal

Tahun 2025
Rp0,00

Tahun 2024
Rp17.849.482.000,00

Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja antara lain tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.849.482.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.849.482.000,00.

5.4.1.2.7. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Tahun 2025
Rp32.404.958.400,00

Tahun 2024
Rp0,00

Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana transfer berupa bantuan keuangan khusus yang berasal dari pemerintah provinsi lainnya atau dari pemerintah kab/kota ke Provinsi Aceh sehubungan dengan bencana Hidrometeorologi yang melanda Aceh pada penghujung tahun 2025 yang lalu. Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp32.404.958.400,00.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Tahun 2025
Rp122.311.121.470,43

Tahun 2024
Rp93.376.024.411,87

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Aceh selain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2025 sebesar Rp122.311.121.470,43 mengalami kenaikan sebesar Rp28.935.097.058,56 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp93.376.024.411,87, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 238. Kenaikan/Penurunan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	71.264.679.479,38	79.337.513.676,31	(8.072.834.196,93)	(10,18)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	644.181.598,00	807.944.000,00	(163.762.402,00)	-
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	28.558.000,00	-	28.558.000,00	-
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	29.391.090.856,50	12.713.915.900,00	16.677.174.956,50	131,17
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	982.611.536,55	516.650.835,56	465.960.700,99	90,19
6	Dana Darurat-LO	20.000.000.000,00	-	20.000.000.000,00	-
Jumlah		122.311.121.470,43	93.376.024.411,87	28.935.097.058,56	30,99

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sebagai berikut:

Tabel 239. Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Nilai
1	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO)	122.311.121.470,43
2	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	23.334.018.402,55
Selisih (1-2)		98.977.103.067,88
Penjelasan Selisih:		
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	71.310.695.291,88
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	27.637.849.776,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	28.558.000,00
Jumlah		98.977.103.067,88

Sumber: Data diolah

5.4.2. Beban Operasi – LO

Tahun 2025 Tahun 2024
Rp11.179.635.068.160,95 Rp11.690.999.368.190,33

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari SKPA dalam rangka kegiatan operasional SKPA agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Tahun 2025 mencapai Rp11.179.635.068.160,95 mengalami penurunan sebesar Rp511.364.300.029,38 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.690.999.368.190,33, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 240. Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Pegawai	3.370.016.308.994,26	3.362.388.579.011,50	7.627.729.982,76	0,23
2	Beban Persediaan	1.571.714.793.370,22	1.354.668.177.659,80	217.046.615.710,42	16,02
3	Beban Jasa	2.166.388.650.071,28	2.180.323.798.129,86	(13.935.148.058,58)	(0,64)
4	Beban Pemeliharaan	257.596.554.812,80	205.342.588.721,22	52.253.966.091,58	25,45
5	Beban Perjalanan Dinas	249.365.683.285,00	254.502.294.161,06	(5.136.610.876,06)	(2,02)
6	Beban Subsidi	5.022.985.000,00	6.386.180.000,00	(1.363.195.000,00)	(21,35)
7	Beban Hibah	356.949.148.378,50	996.270.570.861,91	(639.321.422.483,41)	(64,17)
8	Beban Bantuan Sosial	107.023.014.326,00	87.250.280.153,00	19.772.734.173,00	22,66



No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.304.976.831.853,24	1.362.143.477.305,12	(57.166.645.451,88)	(4,20)
10	Beban Penyisihan Piutang	21.486.700.249,65	47.664.169.555,41	(26.177.469.305,76)	(54,92)
11	Beban Transfer	1.718.773.756.188,00	1.834.003.154.233,00	(115.229.398.045,00)	(6,28)
12	Beban Tidak Terduga	50.320.641.632,00	56.098.398,45	50.264.543.233,55	89.600,67
Jumlah Beban Operasi		11.179.635.068.160,95	11.690.999.368.190,33	(511.364.300.029,38)	(4,37)

Sumber: Data diolah

5.4.2.1. Beban Pegawai – LO

Tahun 2025
Rp3.370.016.308.994,26

Tahun 2024
Rp3.362.388.579.011,50

Beban Pegawai - LO merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRA serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Beban Pegawai - LO Tahun 2025 sebesar Rp3.370.016.308.994,26 mengalami kenaikan sebesar Rp7.627.729.982,76 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.362.388.579.011,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 241. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.111.418.388.878,00	1.913.002.140.908,00	198.416.247.970,00	10,37
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.192.509.757.228,26	672.908.629.991,00	519.601.127.237,26	77,22
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	473.561.000,00	720.079.487.782,50	(719.605.926.782,50)	(99,93)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	60.569.421.886,00	49.839.683.382,00	10.729.738.504,00	21,53
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	406.396.762,00	110.490.884,00	295.905.878,00	267,81
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.638.783.240,00	3.619.649.064,00	1.019.134.176,00	28,16
7	Beban Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	-	2.341.787.000,00	(2.341.787.000,00)	(100,00)
9	Belanja Pegawai BLUD	-	486.710.000,00	(486.710.000,00)	-
Jumlah		3.370.016.308.994,26	3.362.388.579.011,50	7.627.729.982,76	0,23

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai-LO sebagai berikut:

Tabel 242. Selisih Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Nilai
1	Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	3.370.016.308.994,26
2	Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	3.383.380.144.754,26
3	Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 (Neraca)	35.052.756,00
4	Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 (Neraca)	155.233.766,00
Selisih ((1-2)-(3-4))		(13.243.654.750,00)
Penjelasan Selisih:		
1	Reklasifikasi Belanja Pegawai BOS ke Barang dan Jasa	(12.659.880.830,00)
2	Pelunasan Utang PPh 21 Tahun 2024	(717.100,00)
3	Pengakuan Utang PPh 21 Tahun 2025	1.017.287.000,00
4	Pengakuan Utang 2025	7.275.180,00
5	Reklasifikasi beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa Pengelola BMD	(1.509.450.000,00)
6	Reklasifikasi beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa Pengelola Keuangan	(100.600.000,00)



No	Uraian	Nilai
7	Reklasifikasi beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa Pengelola Pengadaan dan Jasa	(4.080.000,00)
8	Reklasifikasi Beban dan Jasa BLUD ke Beban Pegawai	6.511.000,00
Jumlah		(13.243.654.750,00)

Sumber: Data diolah

5.4.2.2. Beban Persediaan – LO

Tahun 2025
Rp1.571.714.793.370,22

Tahun 2024
Rp1.354.668.177.659,80

Beban Persediaan adalah pengeluaran Pemerintah Aceh atas penggunaan barang-barang persediaan dalam masa satu tahun operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp1.571.714.793.370,22 mengalami kenaikan sebesar Rp217.046.615.710,42 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.354.668.177.659,80 rincian dapat di lihat pada **Lampiran 24**.

Penjelasan selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan-LO sebagai berikut:

Tabel 243. Selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan-LO

No	Uraian	Nilai
1	Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO) – Di input secara manual	1.571.714.793.370,22
2	Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA) – Di input secara manual	825.240.775.645,63
3	Persediaan Barang Tahun 2025 (Neraca)	231.901.692.026,31
4	Persediaan Barang Tahun 2024 (Neraca)	268.877.986.131,67
Selisih (1-2+3-4)		709.497.723.619,23
Penjelasan Selisih:		
1	Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah-LO)	17.478.152.428,50
2	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Persediaan	249.316.000,00
3	Reklasifikasi dari Beban Hibah ke Persediaan pada Dinas Perkim	6.204.124.000,00
4	Penambahan Beban Persediaan dari Realisasi Belanja BLUD	135.089.676.535,00
5	Penambahan Beban Persediaan karena Utang	1.596.610.218,00
6	Penyesuaian Utang Beban Persediaan pada RSIA	(1.444,00)
7	Penambahan Beban Persediaan karena Utang Tahun 2025	217.417.797.104,00
8	Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan	2.679.487.669,00
9	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa	14.926.739.568,00
10	Penambahan Persediaan karena Hibah	58.031.160.497,38
11	Penambahan Beban Persediaan karena Belanja BLUD pada Dinas Peternakan	697.148.374,00
12	Penambahan Beban Pengakuan BOS karena Realisasi Sisa Kas BOS 2024	46.222.185,00
13	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Persediaan	3.077.159.145,00
14	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler ke Beban Persediaan	127.097.413.552,00
15	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOS Kinerja ke Beban Persediaan	2.356.778.533,00
16	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOS Berasrama ke Beban Persediaan	418.439.848,00
17	Pengurangan Beban Persediaan karena Contra Post pada Dinas Peternakan	(7.136.500,00)
18	Pengurangan Beban Persediaan karena pelunasan utang	(24.860.690.755,00)
19	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.170.121.216,71
20	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap	(1.486.200.000,00)
21	Pengurangan Persediaan ke Aset Tetap	(733.202.250,00)
22	Koreksi/Penyesuaian Persediaan pada RSJ	491.245,82
23	Koreksi/Penyesuaian Persediaan pada Dinas Perkim	19.711.066.000,00
24	Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2025 pada RSUZA sesuai Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu -Inspektorat Aceh	(968.438.098,00)
25	Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2024 pada RSUZA sesuai Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu -Inspektorat Aceh	(8.430.070,00)
26	Penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2025 pada RSUZA sesuai Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu -Inspektorat Aceh	128.811.836.788,82



No	Uraian	Nilai
27	Pengurangan Beban Persediaan Ke Defisit Kegiatan Non Operasional (Karena Persediaan Expired TA 2025) pada RSUZA	(33.661.052,00)
28	Pengurangan Persediaan Ke Defisit Kegiatan Non Operasional (Karena Persediaan Expired TA 2025) pada RSUZA	(58.985.300,00)
29	Penambahan Persediaan Karena Hibah Barang Persediaan dari Pemko Banda Aceh pada RSUZA	644.181.598,00
30	Koreksi Kurang Persediaan Karena adanya Koreksi Harga Satuan pada RSUZA	(44.997.318,00)
31	Berkurangnya Persediaan karena Koreksi Saldo Akhir sesuai BASO pada RSUZA	(4.456.100,00)
Jumlah		709.497.723.619,23

Sumber: Data diolah

5.4.2.3. Beban Jasa - LO

Tahun 2025
Rp2.166.388.650.071,28

Tahun 2024
Rp2.180.323.798.129,86

Beban Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan jasa yang digunakan dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp2.166.388.650.071,28 mengalami penurunan sebesar Rp13.935.148.058,58 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.180.323.798.129,86, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 244. Kenaikan/Penurunan Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	1.030.861.395.941,34	1.097.195.620.546,41	(66.334.224.605,07)	(6,05)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	647.394.685.395,21	712.160.217.441,69	(64.765.532.046,48)	(9,09)
3	Beban Sewa Tanah	532.408.296,82	323.000.000,00	209.408.296,82	64,83
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	67.401.821.415,00	51.958.808.213,00	15.443.013.202,00	29,72
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	32.881.628.707,35	28.763.372.506,82	4.118.256.200,53	14,32
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.896.078,00	1.897.092,00	(1.014,00)	(0,05)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	325.375.000,00	266.880.000,00	58.495.000,00	21,92
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	1.156.400.929,00	461.647.544,00	694.753.385,00	150,49
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	58.724.664.401,76	8.042.645.853,57	50.682.018.548,19	630,17
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.694.597.600,05	3.817.080.546,98	877.517.053,07	22,99
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	73.384.000,00	37.868.500,00	35.515.500,00	93,79
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.366.856.298,00	2.455.308.776,00	(1.088.452.478,00)	(44,33)
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.672.341.673,00	4.585.436.844,00	(1.913.095.171,00)	(41,72)
14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1.591.419.504,50	-	1.591.419.504,50	-
15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	2.270.600,00	24.160.000,00	(21.889.400,00)	(90,60)
16	Beban Gaji dan Tunjangan Wali Nang-groe	4.174.569.000,00	-	4.174.569.000,00	-
17	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-	2.868.584.975,00	(2.868.584.975,00)	(100,00)
18	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	307.578.687.192,25	260.193.643.702,00	47.385.043.490,25	18,21
19	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.630.503.476,00	4.351.913.256,00	278.590.220,00	6,40
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	323.744.563,00	2.815.712.332,39	(2.491.967.769,39)	(88,50)
Jumlah		2.166.388.650.071,28	2.180.323.798.129,86	(13.935.148.058,58)	(0,64)

Sumber: Data diolah

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan - LO

Tahun 2025
Rp257.596.554.812,80

Tahun 2024
Rp205.342.588.721,22

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pemeliharaan aset tetap yang digunakan dalam masa 1 (satu) tahun operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp257.596.554.812,80 mengalami kenaikan sebesar Rp52.253.966.091,58 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp205.342.588.721,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 245. Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	10.100.000,00	339.565.321,00	(329.465.321,00)	(97,03)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.693.917.128,33	95.941.081.428,94	(247.164.300,61)	(0,26)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	89.949.110.252,60	70.043.886.978,28	19.905.223.274,32	28,42
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.840.146.431,87	38.589.252.573,00	33.250.893.858,87	86,17
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	103.281.000,00	70.531.000,00	32.750.000,00	46,43
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	358.271.420,00	(358.271.420,00)	-
Jumlah		257.596.554.812,80	205.342.588.721,22	52.253.966.091,58	25,45

Sumber: Data diolah

Belanja Pemeliharaan Pemerintah Aceh tahun di LRA sebesar Rp144.760.625.748,07. Sedangkan di Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2025 sebesar Rp257.596.554.812,80 terdapat selisih sebesar Rp112.835.929.064,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 246. Selisih Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan- LO

NO	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari utang belanja BLUD	10.003.420.355,00
2	Penambahan dari reklasifikasi belanja modal Aset tetap	87.904.286.844,16
3	Penambahan dari utang belanja Aset tetap ke beban pemeliharaan	316.518.300,00
4	Penambahan dari Asuransi Dibayar Dimuka yang telah menjadi beban tahun 2025	8.703.912,33
5	Penambahan dari beban pemeliharaan BLUD SMK	27.786.000,00
6	Penambahan dari beban pemeliharaan BOS	19.696.617.710,00
7	Penambahan dari beban pemeliharaan BLUD Non SMK	4.429.402.084,00
JUMLAH MUTASI TAMBAH (I)		122.386.735.205,49
1	Pengurangan beban pemeliharaan karena reklasifikasi ke Aset tetap	9.128.340.600,76
2	Pengurangan beban pemeliharaan karena reklasifikasi ke Aset KDP	49.577.040,00
3	Pengurangan beban pemeliharaan karena pembayaran utang belanja pemeliharaan BLUD tahun 2024	372.888.500,00
JUMLAH MUTASI KURANG (II)		9.550.806.140,76
TOTAL (I – II)		112.835.929.064,73

Sumber : Data diolah

Penambahan Beban Pemeliharaan terdiri dari:

1. Penambahan dari utang belanja BLUD merupakan beban pemeliharaan bangunan gedung instalasi sebesar Rp8.851.000,00, beban pemeliharaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sumber radiasi sebesar Rp1.500.000,00, beban pemeliharaan alat kedokteran lainnya sebesar Rp8.722.746.787,00, beban pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar Rp304.920.000,00 dan penambahan karena utang atas beban pemeliharaan aset tetap TA 2025 sebesar Rp965.402.568,00 sesuai laporan hasil audit dengan tujuan tertentu terhadap utang Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin per 31 Desember 2025 Nomor 700/003/PD TT/IA-IRSUS/2026 tanggal 22 Mei 2026.

2. Penambahan dari reklasifikasi belanja modal aset tetap merupakan beban pemeliharaan alat timbangan/biara sebesar Rp19.702.500,00, beban pemeliharaan alat kantor lainnya sebesar Rp9.911.050,00, beban pemeliharaan mebel sebesar Rp58.236.250,00, beban pemeliharaan alat dapur sebesar Rp12.111.250,00, beban pemeliharaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp29.058.000,00, beban pemeliharaan alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp1.018.000,00, beban pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar Rp8.329.012.206,18, beban pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah sebesar Rp30.657.257.684,00, beban pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp2.708.287.579,00, beban pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga sebesar Rp31.524.800,00, beban pemeliharaan bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp6.053.703.505,58, beban pemeliharaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebesar Rp571.290.000,00, beban pemeliharaan bangunan parkir sebesar Rp198.701.681,00, beban pemeliharaan taman sebesar Rp1.845.500.000,00, beban pemeliharaan gedung asrama sebesar Rp398.797.000,00, beban pemeliharaan rumah negara golongan I sebesar Rp181.155.153,00, beban pemeliharaan rumah negara golongan II sebesar Rp659.400.000,00, beban pemeliharaan jalan provinsi sebesar Rp33.450.407.601,40, beban pemeliharaan jembatan penyeberangan sebesar Rp2.506.932.538,00, beban pemeliharaan jaringan distribusi sebesar Rp21.065.580,00, beban pemeliharaan personal komputer sebesar Rp111.355.200,00, dan beban pemeliharaan tugu/tanda batas pagar sebesar Rp49.859.202,00.
3. Penambahan dari utang belanja aset tetap berupa beban pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja bangunan tempat pertemuan sebesar Rp316.518.300,00
4. Penambahan beban pemeliharaan aset tetap dari beban dan jasa BOS berasrama sebesar Rp528.397.301,00
5. Penambahan dari Asuransi dibayar di muka yang telah menjadi beban tahun 2025 merupakan beban pemeliharaan alat angkutan darat bermotor – kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp8.703.912,33.

Pengurangan beban pemeliharaan terdiri dari:

1. Pengurangan beban pemeliharaan karena reklasifikasi ke Aset tetap merupakan beban pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar Rp689.409.835,49, beban pemeliharaan bangunan gedung instalasi sebesar Rp1.700.000,00 dan beban pemeliharaan bangunan gedung taman sebesar Rp188.275.987,00,
2. Pengurangan Beban Pemeliharaan Jaringan listrik lainnya sebesar Rp443.142.524,00, beban pemeliharaan bangunan air – bangunan pengamanan sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam – bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sebesar Rp4.191.505.448,69, dan beban pemeliharaan gedung tempat pertemuan sebesar Rp3.614.306.805,58.
3. Pengurangan beban pemeliharaan karena reklasifikasi ke Aset KDP merupakan beban pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar Rp49.577.040,00.
4. Pengurangan beban pemeliharaan karena pembayaran utang belanja pemeliharaan BLUD tahun 2024 merupakan beban pemeliharaan alat kedokteran lainnya sebesar Rp55.888.500,00 dan beban pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar Rp317.000.000,00.

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas - LO

Tahun 2025
Rp249.365.683.285,00

Tahun 2024
Rp254.502.294.161,06

Beban Perjalanan Dinas adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk perjalanan dinas dalam masa satu tahun operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp249.365.683.285,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.136.610.876,06 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp254.502.294.161,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 247. Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	247.385.462.663,00	250.936.872.337,06	(3.551.409.674,06)	(1,42)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.980.220.622,00	3.565.421.824,00	(1.585.201.202,00)	(44,46)
Jumlah		249.365.683.285,00	254.502.294.161,06	(5.136.610.876,06)	(2,02)

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban perjalanan-LO sebagai berikut:

Tabel 248. Selisih Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban perjalanan-LO

No	Uraian	Nilai
1	Beban Perjalanan Dinas Tahun Berjalan (LO)	249.365.683.285,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 (LRA)	235.495.746.361,00
3	Utang Perjalanan Dinas - Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
4	Utang Perjalanan Dinas - Tahun 20NN-1 (Neraca)	93.278.502,00
Selisih (1-2+3-4)		13.776.658.422,00
Penjelasan Selisih:		
1	Beban Perjalanan Dinas BLUD	4.798.296.810,00
2	Beban Perjalanan Dinas BOS	9.062.495.904,00
3	Pengurangan Beban Perjalanan Dinas Ke Kapitalisasi Aset Tetap	(84.134.292,00)
Jumlah		13.776.658.422,00

Sumber: Data diolah

5.4.2.6. Beban Subsidi - LO

Tahun 2025
Rp5.022.985.000,00

Tahun 2024
Rp6.386.180.000,00

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Aceh kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp5.022.985.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.363.195.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.386.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 249. Kenaikan/Penurunan Beban Subsidi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN	5.022.985.000,00	6.386.180.000,00	(1.363.195.000,00)	(21,35)
Jumlah		5.022.985.000,00	6.386.180.000,00	(1.363.195.000,00)	(21,35)

Sumber: Data diolah

5.4.2.7. Beban Hibah - LO

Tahun 2025
Rp356.949.148.378,50

Tahun 2024
Rp996.270.570.861,91

Beban Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/Organisasi, kelompok/anggota masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi



penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp356.949.148.378,50 mengalami penurunan sebesar Rp639.321.422.483,41 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp996.270.570.861,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250. Kenaikan/Penurunan Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	24.000.000.000,00	(24.000.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	38.160.639.000,00	52.978.491.707,96	(14.817.852.707,96)	(27,97)
3	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	168.000.000,00	(168.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	135.182.361,00	(135.182.361,00)	(100,00)
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	44.202.341.379,00	177.432.425.295,00	(133.230.083.916,00)	(75,09)
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	139.933.789.939,50	181.054.162.345,95	(41.120.372.406,45)	(22,71)
7	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.567.116.600,00	75.980.560.880,00	(25.413.444.280,00)	(33,45)
8	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	424.041.304.876,00	(424.041.304.876,00)	(100,00)
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	44.475.773.460,00	45.214.687.296,00	(738.913.836,00)	(1,63)
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	10.269.028.000,00	9.954.083.100,00	314.944.900,00	3,16
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	29.340.460.000,00	5.311.673.000,00	24.028.787.000,00	452,38
Jumlah		356.949.148.378,50	996.270.570.861,91	(639.321.422.483,41)	(64,17)

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Belanja Hibah dengan Beban Hibah-LO sebagai berikut:

Tabel 251. Selisih Belanja Hibah dengan Beban Hibah-LO

No	Uraian	Nilai
1	Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	356.949.148.378,50
2	Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	359.568.508.263,50
3	Utang Belanja Hibah Tahun 2025 (Neraca)	8.595.300.615,00
4	Utang Belanja Hibah Tahun 2024 (Neraca)	-
Selisih (1-2-3+4)		(11.214.660.500,00)
Penjelasan Selisih:		
1	Reklas Beban Hibah ke Persediaan	(5.010.536.500,00)
2	Koreksi Beban Persediaan Hibah (Jurnal No. KOR BPK 042)	(6.204.124.000,00)
Jumlah		(11.214.660.500,00)

Sumber: Data diolah

5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial - LO

Tahun 2025
Rp107.023.014.326,00

Tahun 2024
Rp87.250.280.153,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Beban Bantuan Sosial pada TA 2025 sebesar Rp107.023.014.326,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.772.734.173,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp87.250.280.153,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 252. Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	107.023.014.326,00	87.250.280.153,00	19.772.734.173,00	22,66
Jumlah		107.023.014.326,00	87.250.280.153,00	19.772.734.173,00	22,66

Sumber: Data diolah

5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Tahun 2025
Rp1.304.976.831.853,24

Tahun 2024
Rp1.362.143.477.305,12

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan Beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2025 sebesar Rp1.304.976.831.853,24 mengalami penurunan sebesar Rp57.166.645.451,88 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.362.143.477.305,12, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 253. Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	421.146.629.580,62	384.897.356.001,07	36.249.273.579,55	9,42
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	180.966.828.090,18	179.606.749.114,67	1.360.078.975,51	0,76
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	625.120.735.098,09	712.188.671.656,56	(87.067.936.558,47)	(12,23)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	253.274.293,67	245.521.118,92	7.753.174,75	3,16
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20.791.811.383,17	20.791.811.383,17	-	-
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.282.220.076,67	9.498.732.014,40	(7.216.511.937,73)	(75,97)
7	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	53.975.200.092,98	54.269.752.432,01	(294.552.339,03)	(0,54)
8	Beban Penyusutan Properti Investasi	440.133.237,86	644.883.584,32	(204.750.346,46)	(31,75)
Jumlah		1.304.976.831.853,24	1.362.143.477.305,12	(57.166.645.451,88)	(4,20)

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan kenaikan Akumulasi Penyusutan dan kenaikan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 254. Selisih antara Beban Penyusutan – Peralatan dan Mesin dengan Kenaikan Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	419.713.694.780,62
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 (Neraca)	(4.974.682.067.032,14)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Neraca)	(4.687.839.848.355,61)
Selisih (1-(3-2))		132.871.476.104,09



No	Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih:		
Mutasi Tambah		
1	Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Peralatan dan Mesin	(1.421.701.200,01)
2	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
	- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Akan Dihilangkan)	2.472.177.750,00
	- Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	(2.617.823.728,14)
3	Mutasi antar SKPA	(2.171.791.213,00)
4	Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Peralatan dan Mesin	(1.421.701.200,01)
Mutasi Kurang		
1	Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Peralatan dan Mesin	0,04
2	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lain)	57.350.000,00
3	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)	3.791.381.345,00
4	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	2.505.811.597,57
5	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
	- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)	23.918.115.643,00
	- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	94.179.453.914,62
	- Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	9.909.598.382,01
6	Mutasi antar SKPA	2.171.791.213,00
7	Reklas ke Aset Ekstrakomptabel	77.112.400,00
Jumlah		132.871.476.104,09

Sumber: Data diolah

Tabel 255. Selisih antara Beban Penyusutan – Gedung dan Bangunan dengan Kenaikan Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	180.966.828.090,18
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	(2.058.756.040.272,66)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(1.876.224.713.082,58)
Selisih (1+(3-2))		(1.564.499.099,90)
Penjelasan Selisih:		
Mutasi tambah		
1	Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Gedung dan Bangunan	(4.095.006.929,29)
2	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
	- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	(9.860.479,49)
	- Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Gedung dan Bangunan Tahun Sebelumnya	(4.178.767.471,87)
3	Penambahan Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(0,56)
4	Mutasi antar SKPA	(200.000.000,00)
Mutasi kurang		
1	Pengurangan Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.221.938,19
2	Pengurangan Beban Penyusutan AT Gedung dan Bangunan karena rencana hibah	(43.511.760,00)
3	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	96.684.168,48
4	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
	- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	24.734.206,86
	- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)	1.429.690.293,85
	- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	1.786.741.668,36
	- Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Gedung dan Bangunan Tahun Sebelumnya	3.417.055.092,13
	- Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	(10.479.826,56)



5	Mutasi antar SKPA	200.000.000,00
Jumlah		(1.564.499.099,90)

Sumber: Data diolah

Tabel 256. Selisih antara Beban Penyusutan JIJ dan Kenaikan Akumulasi Penyusutan JIJ

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Berjalan (LO)	625.089.334.098,09
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Berjalan (Neraca)	(11.192.145.014.130,00)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 20NN-1 (Neraca)	(10.580.505.919.711,90)
Selisih (1-(3-2))		13.450.239.679,99
Penjelasan Selisih:		
Mutasi tambah		
1	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
	- Koreksi/Penyesuaian Akm. Penyusutan AT Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Sebelumnya	(91.257.623.001,19)
2	Penambahan Akumulasi. Penyusutan JIJ karena Reklasifikasi KDP	(7.204.580.264,75)
3	Penambahan Akumulasi Penyusutan JIJ karena Reklasifikasi KIB E	(487.654.544,87)
4	Penambahan Akumulasi Penyusutan JIJ	8.874.136.611,16
5	Mutasi Antar SKPA	(75.667.234,33)
6	Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan JIJ	
Mutasi kurang		
1	Pengurangan Akumulasi Penyusutan JIJ	(5.512.343.437,65)
2	Pengurangan Beban Penyusutan JIJ karena Kapitalisasi KIB D	(512.372.601,60)
3	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	60.121.997.054,60
4	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
	- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	13.198.946.669,87
	- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	36.229.733.194,36
5	Mutasi Antar SKPA	75.667.234,33
6	Koreksi Pembulatan	0,06
Jumlah		13.450.239.679,99

Sumber: Data diolah

Tabel 257. Selisih antara Beban Amortisasi dengan Kenaikan Amortisasi

No	Uraian	Nilai
1	Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	2.282.220.076,67
2	Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)	(66.189.221.472,96)
3	Akumulasi Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca)	(63.962.733.706,29)
Selisih (1-(3-2))		55.732.310,00
Penjelasan Selisih:		
1	Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software akibat koreksi/penyesuaian pada DINAS PERHUBUNGAN ACEH	43.757.310,00
2	Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software akibat koreksi/penyesuaian pada DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH	11.975.000,00
Jumlah		55.732.310,00

Sumber: Data diolah

5.4.2.10. Beban Penyisihan Piutang - LO

Tahun 2025
Rp21.486.700.249,65

Tahun 2024
Rp47.664.169.555,41

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang dalam Tahun 2025 sebesar Rp21.486.700.249,65 mengalami penurunan sebesar Rp26.177.469.305,76 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp47.664.169.555,41, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 258. Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang**

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	444.812.988,62	216.191.632,40	228.621.356,22	105,75
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	784.966.194,11	274.116,18	784.692.077,93	286.262,59
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	17.144.646.043,71	22.258.310.612,08	(5.113.664.568,37)	(22,97)
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	778.106.540,59	402.189.371,80	375.917.168,79	93,47
5	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pem-anfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.181.503,90	1.365.005.000,00	(1.361.823.496,10)	-
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	-	180,00	(180,00)	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	2.330.986.978,72	23.164.350.635,37	(20.833.363.656,65)	(89,94)
8	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	-	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
9	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	7.848.007,58	(7.848.007,58)	-
Jumlah		21.486.700.249,65	47.664.169.555,41	(26.177.469.305,76)	(54,92)

Sumber: Data diolah

Penjelasan selisih Beban Penyisihan Piutang dengan kenaikan Penyisihan Piutang tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 259. Selisih antara Beban Penyisihan Piutang dengan Kenaikan Penyisihan Piutang

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (LO)	21.486.700.249,65
2	Penyisihan Piutang Tahun 2024 (Neraca)	(153.384.074.049,11)
3	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Neraca)	(142.594.806.382,09)
Selisih (1+2-3)		10.697.432.582,63
Penjelasan Selisih:		
1	Penyisihan piutang tahun 2025	152.740.660,41
2	Koreksi Ekuitas - Piutang karena perubahan saldo nilai Piutang yang berdampak pada perubahan nilai penyisihan	44.132.388.948,41
3	Koreksi Penyisihan Piutang karena lebih saji beban penyisihan piutang tahun sebelumnya pada RSUZA	(36.283.178.924,00)
4	Bertambahnya beban penyisihan piutang retribusi pada RSUZA	22.800,00
5	Penghapusan Piutang Tahun Sebelumnya	2.172.879.011,56
6	Penyesuaian Piutang Tahun sebelumnya dikarenakan reklasifikasi atau perubahan kode akun piutang	522.580.086,25
Jumlah		10.697.432.582,63

*Sumber: Data diolah***5.4.2.11. Beban Transfer - LO**

Tahun 2025
Rp1.718.773.756.188,00

Tahun 2024
Rp1.834.003.154.233,00

Beban Tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Beban Transfer TA 2025 sebesar Rp1.718.773.756.188,00 mengalami penurunan sebesar Rp115.229.398.045,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.834.003.154.233,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 260. Kenaikan/Penurunan Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	459.814.580.369,00	710.705.136.528,00	(250.890.556.159,00)	(35,30)



No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	128.449.192.361,00	171.037.471.423,00	(42.588.279.062,00)	(24,90)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	40.000.000.000,00	-	40.000.000.000,00	-
4	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	117.085.426.458,00	952.260.546.282,00	(835.175.119.824,00)	(87,70)
5	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	973.424.557.000,00	-	973.424.557.000,00	-
Jumlah		1.718.773.756.188,00	1.834.003.154.233,00	(115.229.398.045,00)	(6,28)

Sumber: Data diolah

Belanja Transfer-LRA sebesar Rp1.796.170.474.841,00 dan Beban Transfer-LO sebesar Rp1.718.773.756.188,00 terdapat selisih sebesar Rp77.396.718.653,00, yang terdiri dari:

Tabel 261. Belanja Tranfer-LRA dan Beban Transfer-LO

No	Uraian	LRA	Utang 2024	Utang 2025	LO
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	526.460.300.370,00	154.462.415.661,00	87.816.695.660,00	459.814.580.369,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	139.200.191.031,00	37.943.974.563,00	27.192.975.911,00	128.449.192.361,00
3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	40.000.000.000,00	-	-	40.000.000.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	117.085.426.458,00	-	-	117.085.426.458,00
5	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	973.424.557.000,00	-	-	973.424.557.000,00
Jumlah		1.796.170.474.859,00	192.406.390.224,00	115.009.671.571,00	1.718.773.756.188,00

Sumber: Data diolah

5.4.2.12. Beban Tak Terduga - LO

Tahun 2025
Rp50.320.641.632,00

Tahun 2024
Rp56.098.398,45

Beban Tak Terduga disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban Pemerintah Aceh untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Aceh.

Beban Tak Terduga dalam Tahun 2025 sebesar Rp50.320.641.632,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.264.543.233,55 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp56.098.398,45.

5.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi - LO

Tahun 2025
Rp(174.120.824.443,34)

Tahun 2024
Rp(104.964.418.184,42)

Defisit dari kegiatan operasi-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(174.120.824.443,34). Defisit tersebut didapatkan dari Total Pendapatan – LO sebesar Rp11.005.514.243.717,61 dikurangi Beban - LO sebesar Rp11.179.635.068.160,95.

5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO

Tahun 2025
Rp(68.543.745.622,66)

Tahun 2024
Rp(321.546.508.249,76)

Pada Tahun 2025 Pemerintah Aceh mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(68.543.745.622,66) mengalami penurunan sebesar Rp253.002.762.627,10.

dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan selisih dari Surplus Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Defisit Non Operasional sebesar Rp68.543.745.622,66.

5.4.4.1. Surplus Non Operasional	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp1.914.802.500,00

Pada tahun 2025 Surplus Non Operasional Pemerintah Aceh sebesar Rp0,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.914.802.500,00.

5.4.4.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar yang Tidak Dipisahkan- LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp1.914.802.500,00

Pada tahun 2025 Surplus Penjualan Aset Non Lancar yang Tidak Dipisahkan-LO Pemerintah Aceh sebesar Rp0,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.914.802.500,00.

5.4.4.2. Defisit Non Operasional	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp68.543.745.622,66	Rp323.461.310.749,76

Pada tahun 2025 Defisit Non Operasional Pemerintah Aceh sebesar Rp68.543.745.622,66 mengalami penurunan sebesar Rp254.917.656.127,10 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp323.461.310.749,76.

5.4.4.2.1. Defisit Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.763.698.064,00	Rp2.598.563.172,11

Pada tahun 2025 Defisit Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO Pemerintah Aceh sebesar Rp1.763.698.064,00 mengalami penurunan sebesar Rp834.865.108,11 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.598.563.172,11 yang terdiri dari:

1. Penghapusan karena penjualan atas aset lain-lain lainnya peralatan mesin kendaraan roda empat kepada mantan pimpinan DPRA An. Safaruddin dan Dalimi sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 000.2.3.2/1424/2025 sebesar Rp1.119.351.200,00.
2. Penghapusan alat angkutan - truk sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebesar Rp476.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 000.2.3.2/1391/2025 tanggal 21 November 2025.
3. Penghapusan Alat studio, komunikasi, dan pemancar – alat studio – peralatan studio audio pada Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh sebesar Rp168.346.864,00.

5.4.4.2.2. Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp(25.007.044,00)	Rp(0,00)

Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO Pemerintah Aceh tahun 2025 sebesar Rp(25.007.044,00) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Rp0,00 merupakan penghapusan investasi non permanen dana bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada Dinas Pangan.

5.4.4.2.3. Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp(2.830.232.500,00)	Rp(6.311.544.077,24)

Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Pemerintah Aceh tahun 2025 sebesar Rp(2.830.232.500,00) mengalami penurunan sebesar Rp3.481.311.577,24 dari tahun sebelumnya yang berasal dari penghapusan ayam ternak pada Dinas Peternakan sebesar Rp2.830.232.500,00 disebabkan mati dan afkir sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 000.2.3.2/970/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Aceh dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Peternakan Aceh.

5.4.4.2.4. Defisit dari kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp(92.646.352,00)	Rp(314.551.203.500,41)

Defisit dari kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO sebesar Rp(92.646.352,00) mengalami penurunan Rp314.458.557.148,41 dari tahun sebelumnya yang berasal dari persediaan *expired* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

5.4.4.2.5. Defisit Penghapusan Aset Lain-lain-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp(63.832.161.662,66)	Rp0,00

Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain – LO sebesar Rp(63.832.161.662,66) mengalami kenaikan sebesar Rp63.832.161.662,66 dari tahun sebelumnya yang berasal dari :

1. Pengakuan utang terhadap aset Jalan Irigasi dan Jaringan atas pekerjaan tanggap darurat pengaman tebing Sungai Krueng Pasee - Kuala Blang Mee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp974.215.805,47 pada Dinas Pengairan Aceh.
2. Penghapusan Aset Lain-lain Lainnya Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 030/1668/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Aceh dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Sebesar Rp62.857.945.857,19.

5.4.5. Beban Luar Biasa

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp487.107.902,74	Rp5.567.832.027,53

Pada Tahun 2025 Beban Luar Biasa sebesar Rp487.107.902,74 mengalami penurunan sebesar Rp5.080.724.124,79 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.567.832.027,53. Beban luar biasa pada Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp487.107.902,74 merupakan beban bunga atas kompensasi kerugian PT. Nanggroe Investama dari tahun 2014 sampai dengan 2018 atau 5 (lima) tahun atas pembayaran paket pekerjaan tanggap darurat pengaman tebing sungai Krueng Pase - Kuala Blang Mee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Sisa utang Dinas Pengairan kepada PT. Nanggroe Investama sebesar Rp974.215.805,47 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 44/Pdt.G/2018/PN Bna Tanggal 22 November 2018.



5.4.6. Surplus/Defisit - LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp(243.151.677.968,74)	Rp(432.078.758.461,71)

Defisit – LO sebesar Rp(243.151.677.968,74) merupakan penjumlahan atas Defisit dari Kegiatan Operasi – LO sebesar Rp(174.120.824.443,34), Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(68.543.745.622,66), dan Beban Luar Biasa sebesar Rp487.107.902,74.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/non anggaran.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Aceh selama Tahun 2025 sebesar Rp1.113.669.792.660,13 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Tahun 2025
Rp9.097.257.445.266,60

Tahun 2024
Rp10.260.667.405.413,79

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan arus kas masuk dari pendapatan aceh dan pengembalian belanja (*contra post*/akun) selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Aceh. Pengesahan pendapatan SKPA seperti Pendapatan BLUD, dan Pendapatan BOS yang diterima langsung oleh bendahara penerima masing-masing, serta pendapatan yang sudah diterima di Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah Aceh yang sudah diakui pendapatan sesuai IPSAP 2 namun tidak menjadi bagian arus kas masuk dari aktivitas operasi.

Arus kas masuk Tahun 2025 sebesar Rp9.097.257.445.266,60 mengalami penurunan sebesar Rp1.163.409.960.147,10 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.260.667.405.413,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 262. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Aceh	1.499.781.765.834,50	1.930.621.844.261,00
2	Penerimaan Retribusi Aceh	14.776.542.073,55	16.604.994.415,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	270.253.493.775,00	267.660.903.349,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	241.430.342.838,00	220.012.177.423,23
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	331.492.150.000,00	384.647.924.000,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	2.250.706.483.460,00	2.310.752.304.717,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	123.495.152.257,00	832.951.157.413,00
8	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	4.309.582.640.000,00	4.276.993.035.000,00
9	Penerimaan Insentif Fiskal	-	17.849.482.000,00
9	Bantuan Keuangan	32.404.958.400,00	-
10	Penerimaan Hibah	2.351.406.866,00	2.573.582.835,56
11	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	982.509.762,55	-
12	Penerimaan Dana Darurat	20.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk		9.097.257.445.266,60	10.260.667.405.413,80

Sumber: Data diolah

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2025 berbeda dengan realisasi Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 263. Penjelasan Selisih Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Tahun Berjalan (LAK)	9.097.257.445.266,60	10.260.667.405.413,79
	Pendapatan Daerah Tahun Berjalan (LRA)	10.700.061.956.317,20	11.396.036.068.929,60
	Selisih	(1.602.804.511.050,60)	(1.135.368.663.515,81)



No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penjelasan Selisih			
1	Pendapatan BOS	(348.887.965.783,65)	(344.548.407.108,02)
2	Pendapatan BLUD	(687.431.778.215,95)	(789.503.469.620,52)
3	Koreksi SiLPA	-	-
4	Rekening Retur	-	108.083,72
5	Reklas	(364.296.000,00)	(1.914.802.500,00)
6	Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025	(43.927.994,00)	(545.554.043,00)
7	Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024	545.554.043,00	1.177.711.672,01
8	TPG/TKG/TAMSIL	(566.622.097.100,00)	-
Jumlah		(1.602.804.511.050,60)	(1.135.334.413.515,81)

Sumber: Data diolah

5.5.1.2. Arus Kas Keluar Tahun 2025 Rp8.124.065.163.820,92 Tahun 2024 Rp8.968.633.080.792,12

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan arus kas keluar bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh. Pengesahan belanja di luar Belanja Modal (BLUD, dan dana BOS) yang dikeluarkan langsung oleh bendahara masing-masing, kecuali Belanja Modal tidak dicatat dalam arus kas keluar aktivitas operasi.

Arus kas keluar Tahun 2025 sebesar Rp8.124.065.163.820,92 mengalami penurunan sebesar Rp844.567.916.971,20 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.968.633.080.792,12, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 264. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	2.803.263.471.768,26	3.360.353.860.106,66
2	Pembayaran Barang dan Jasa	3.057.440.869.450,16	2.719.407.300.512,44
3	Pembayaran Subsidi	5.022.985.000,00	6.386.180.000,00
4	Pembayaran Hibah	304.823.706.803,50	961.836.115.870,57
5	Pembayaran Bantuan Sosial	107.023.014.326,00	87.250.280.153,00
6	Pembayaran Tak Terduga	1.130.509.983.458,00	952.260.546.282,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	50.320.641.632,00	19.848.398,45
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	665.660.491.383,00	881.118.949.469,00
Jumlah Arus Kas Keluar		8.124.065.163.820,92	8.968.633.080.792,12

Sumber: Data diolah

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2025 berbeda dengan realisasi Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 265. Penjelasan Selisih Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun Berjalan (LAK)	8.124.065.163.820,92	8.968.633.080.792,12
2	Belanja Operasi (LRA)	7.820.849.998.603,50	8.209.331.872.526,00
3	Belanja Tidak Terduga Tahun Berjalan (LRA)	50.320.641.632,00	19.848.398,45
4	Transfer Daerah Tahun Berjalan	1.796.170.474.841,00	1.833.379.495.751,00
Selisih		(1.543.275.951.255,58)	(1.074.098.135.883,33)
Penjelasan Selisih			
1	Belanja Pegawai BLUD	(834.695.056,00)	(1.800.490.567,00)
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	(701.754.793.974,70)	(794.579.465.750,05)
3	Belanja Pegawai BOS	(12.659.880.830,00)	(9.395.557.750,00)
4	Belanja Barang dan Jasa BOS	(206.659.682.832,00)	(213.153.851.420,28)
5	Belanja Hibah BOS	(54.744.801.460,00)	(55.168.770.396,00)
6	TPG/TKG/TAMSIL	(566.622.097.100,00)	-
7	Reklas/Koreksi	(2,88)	-
Jumlah		(1.543.275.951.255,58)	(1.074.098.135.883,33)

Sumber: Data Diolah

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasional pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Aceh selama Tahun 2025 sebesar Rp(960.995.927.082,23).

5.5.2.1. Arus Kas Masuk

	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp364.296.000,00	Rp1.914.802.500,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset merupakan arus kas masuk pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Aceh kepada masyarakat di masa yang akan datang. Pada TA 2025 tidak terdapat arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Investasi Aset.

Arus kas masuk Tahun 2025 sebesar Rp364.296.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.550.506.500,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.914.802.500,00.

5.5.2.2. Arus Kas Keluar

	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp961.360.223.082,23	Rp1.204.416.076.821,08

Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset merupakan arus kas keluar bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS Belanja Modal yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh, dan Pengesahan Belanja Modal yang dikeluarkan langsung oleh Bendahara masing-masing.

Arus kas keluar Tahun 2025 sebesar Rp961.360.223.082,23 mengalami penurunan sebesar Rp243.055.853.738,85 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.204.416.076.821,08, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 266. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Tahun 2025 dan 2024**

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	59.284.549.418,65	52.631.974.626,91
2	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	-	-
3	Belanja Modal Tanah	4.601.695.429,00	-
4	Peralatan dan Mesin	546.094.545.768,38	408.492.084.642,06
5	Belanja Gedung dan Bangunan	234.699.495.286,20	325.817.680.305,94
6	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	107.640.896.800,00	402.230.663.576,17
7	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.213.982.680,00	14.727.662.250,00
8	Perolehan Aset Lainnya	2.825.057.700,00	516.011.420,00
9	Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	-	-
Jumlah		961.360.223.082,23	1.204.416.076.821,08

Sumber: Data diolah

Terdapat selisih antara arus kas keluar dari aktivitas investasi aset dengan realisasi Belanja Modal dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 267. Penjelasan Selisih Arus Kas Keluar dari Aktivitas
Investasi Aset Non Keuangan**

No	Uraian	Nilai
1	Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Tahun Berjalan (LAK)	961.360.223.082,23
2	Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	4.601.695.429,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	547.528.521.588,38
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	235.454.381.597,20

No	Uraian	Nilai
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Berjalan (LRA)	107.640.896.800,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	87.317.673.673,00
7	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	2.825.057.700,00
8	Pembentukan Dana Cadangan	59.284.549.418,65
Selisih		(83.292.553.124,00)
Penjelasan Selisih:		
1	Belanja Modal BLUD	(8.496.619.451,00)
2	Belanja Modal BOS	(74.795.933.673,00)
Jumlah		(83.292.553.124,00)

Sumber: Data diolah

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah.

5.5.3.1. Arus Kas Masuk	Tahun 2025 Rp128.379.087,00	Tahun 2024 Rp709.030.941,00
--------------------------------	--	--

Arus kas masuk Tahun 2025 sebesar Rp128.379.087,00 mengalami penurunan sebesar Rp580.651.854,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp709.030.941,00. Arus kas masuk tersebut merupakan yaitu Pengembalian Dana Bergulir LUEP pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

5.5.3.2. Arus Kas Keluar	Tahun 2025 Rp0,00	Tahun 2024 Rp0,00
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Arus kas keluar Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBA. Pada Tahun 2025, arus kas masuk dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp565.551.354.351,60 dan arus kas keluar dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp565.551.354.351,60 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah nihil.

5.5.4.1. Arus Kas Masuk	Tahun 2025 Rp565.551.354.351,60	Tahun 2024 Rp482.005.550.012,00
--------------------------------	--	--

Arus kas masuk Tahun 2025 sebesar Rp565.551.354.351,60 bertambah sebesar Rp83.545.804.339,60 dari tahun sebelumnya sebesar Rp482.005.550.012,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 268. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
Tahun 2025 dan 2024**

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	PPN	180.325.882.931,00	188.593.915.973,00
2	PPh Pasal 21	82.927.328.574,00	140.633.609.429,00
3	PPh Pasal 22, 23, 26, 24	34.127.133.188,00	79.482.470.844,00
4	IWP8	118.399.977.378,00	-
5	Infak	29.747.871.442,60	26.870.640.245,00



No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
6	Zakat	24.114.699.349,00	46.424.913.521,00
7	JKK	3.314.485.715,00	-
8	JKM	9.916.926.713,00	-
9	BPJS	81.823.578.835,00	-
10	BPJSTK	108.574.343,00	-
11	Denda	740.454.672,00	-
12	Lain-lain	4.441.211,00	-
Jumlah		565.551.354.351,60	482.005.550.012,00

Sumber: Data diolah

5.5.4.2. Arus Kas Keluar

Tahun 2025 **Tahun 2024**
Rp565.551.354.351,60 **Rp482.005.550.012,00**

Arus kas keluar Tahun 2025 sebesar Rp565.551.354.351,60 bertambah sebesar Rp83.545.804.339,60 dari tahun sebelumnya sebesar Rp482.005.550.012,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 269. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	PPN	180.325.882.931,00	188.593.915.973,00
2	PPh Pasal 21	82.927.328.574,00	140.633.609.429,00
3	PPh Pasal 22, 23, 26, 24	34.127.133.188,00	79.482.470.844,00
4	IWP8	118.399.977.378,00	-
5	Infak	29.747.871.442,60	26.870.640.245,00
6	Zakat	24.114.699.349,00	46.424.913.521,00
7	JKK	3.314.485.715,00	-
8	JKM	9.916.926.713,00	-
9	BPJS	81.823.578.835,00	-
10	BPJSTK	108.574.343,00	-
11	Denda	740.454.672,00	-
12	Lain-lain	4.441.211,00	-
Jumlah		565.551.354.351,60	482.005.550.012,00

Sumber: Data diolah

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Tahun 2025 **Tahun 2024**
Rp519.213.194.525,86 **Rp530.516.388.440,59**

Saldo akhir Kas Tahun 2025 adalah sebesar Rp519.213.194.525,86 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 270. Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kenaikan/Penurunan Kas dari Keempat Aktivitas	12.324.733.450,45	90.242.081.241,59
2	Koreksi Saldo Awal Kas di Kasda	36.250.000,12	-
3=1+2	Kenaikan/Penurunan Kas setelah Koreksi Kas di Kasda	12.360.983.450,57	90.242.081.241,59
4	Saldo Awal Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	486.638.267.260,64	396.396.186.019,05
5=3+4	Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	498.999.250.711,21	486.638.267.260,64
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	43.927.994,00	545.554.043,00
7	Saldo Akhir Kas BLUD	19.325.719.626,20	42.980.049.891,95
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Bos	89.701.423,65	62.034.435,00
9	Saldo Akhir Kas Lainnya	754.594.770,80	290.482.810,00
10=5+6+7+8+9	Saldo Akhir Kas	519.213.194.525,86	530.516.388.440,59

Sumber: Data diolah

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.6.1. Ekuitas Awal	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp31.508.885.357.276,83	Rp32.308.546.824.458,78

Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp31.508.885.357.276,83. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 di Neraca.

5.6.2. Surplus/Defisit – LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp(243.151.677.968,74)	Rp(432.078.758.461,71)

Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(243.151.677.968,74). Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp(56.910.667.839,18)	Rp(367.582.708.720,24)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp(56.910.667.839,18) merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas yang terdiri dari:

Tabel 271. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	2025	2024
Koreksi/Penyesuaian Kas	66.974,57	(248.100.000,00)
Koreksi/Penyesuaian Piutang	(8.103.664.104,00)	(4.873.198.809,21)
Koreksi/Penyesuaian Persediaan	18.916.878.316,32	917.875.920,50
Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	35.562.026,00	53.370.810.944,00
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	18.783.994.189,04	104.275.990.595,91
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(54.480.953.036,61)	(140.607.934.900,81)
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	(167.196.930,00)	(349.402.522.034,53)
Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	(282.978.933,33)
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	(137.013.612,50)	(7.733.358.788,70)
Koreksi Utang	(39.756.482.053,00)	(16.883.796.496,51)
Koreksi Penyisihan Piutang	7.999.826.575,00	(6.114.926.217,56)
Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	(1.686.184,00)	(570.000,00)
Jumlah	(56.910.667.839,18)	(367.582.708.720,24)

Sumber: Data diolah

Rincian disajikan pada **Lampiran 25**.

5.6.4. Ekuitas Akhir	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp31.208.823.011.468,91	Rp31.508.885.357.276,83

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Aceh untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.208.823.011.468,91 yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp31.508.885.357.276,83, Defisit-LO sebesar Rp(243.151.677.968,74), dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp(56.910.667.839,18).

BAB VI

INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian laporan keuangan, Pemerintah Aceh berupaya mengungkapkan seluruh informasi penting yang diperlukan. Banyak peristiwa yang terjadi serta kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang, peristiwa tersebut meliputi:

6.1 Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) TA 2025

Salah satu peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan adalah penetapan APBA. APBA Perubahan TA 2025 ditetapkan pada tanggal 05 November 2025, dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 272. Tahapan Penetapan APBA 2025

No	Uraian	Tanggal Penetapan	Dasar Pendukung
1	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	11 Juli 2024	Surat Gubernur Aceh Nomor 900.1/7954 Perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBA TA 2025
2	Kesepakatan Rancangan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Aceh	17 September 2024	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 45/BA/2024 dan 03/BA/2024 Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBA TA 2025
3	Kesepakatan Rancangan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Aceh	17 September 2024	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 46/BA/2024 dan 03/BA/2024 Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBA TA 2025
4	Persetujuan bersama DPRD Provinsi Aceh dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD	24 September 2024	Berita Acara Nomor 07/BA/2024 dan 50/BA/2024 Tentang Persetujuan Bersama DPRA dan Gubernur Aceh terhadap Qanun Aceh tentang Perubahan APBA TA 2025
5	Penetapan Qanun APBA	10 Februari 2025	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 Tentang APBA TA 2025
6	Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	23 September 2025	Surat Gubernur Aceh Nomor 900.1.1/13604 Perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBA-P TA 2025
7	Kesepakatan Rancangan P-KUA Antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Aceh	25 September 2025	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 21 / BA / 2025 08 / BA / DPRA / 2025 Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBA-P TA 2025
8	Kesepakatan Rancangan P-PPAS Antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Aceh	25 September 2025	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 22 / BA / 2025 09 / BA / DPRA / 2025 Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBA-P TA 2025
9	Persetujuan bersama DPRD Provinsi Aceh dan Kepala Daerah Tentang Ranperda P-APBD	29 September 2025	Berita Acara Nomor 24 / BA / 2025 11 / BA / DPRA / 2025 Tentang Persetujuan Bersama DPRA dan Gubernur

No	Uraian	Tanggal Penetapan	Dasar Pendukung
10	Penetapan Qanun APBA-P	05 November 2025	Aceh terhadap Qanun Aceh tentang Perubahan APBA-P TA 2025 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBA TA 2025

Sumber: Bidang Anggaran BPKA

6.2 Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otsus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Undang-Undang tersebut selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh telah menerima Dana Otsus sejak Tahun 2008. Hingga Tahun 2025, Pemerintah Aceh telah menerima Dana Otsus sebesar Rp108.543.914.578.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 273. Penerimaan Dana Otsus TA 2008-2025

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Dana Otsus (Rp)
2008	3.590.142.897.000,00
2009	3.728.282.000.000,00
2010	3.849.806.840.000,00
2011	4.510.656.496.500,00
2012	5.476.288.764.000,00
2013	6.222.785.783.000,00
2014	6.824.386.514.000,00
2015	7.057.756.971.000,00
2016	7.707.216.942.000,00
2017	7.971.646.295.000,00
2018	8.029.791.593.000,00
2019	8.357.471.654.000,00
2020	7.555.278.348.000,00
2021	7.555.827.806.000,00
2022	7.560.000.000.000,00
2023	3.960.000.000.000,00
2024	4.276.993.035.000,00
2025	4.309.582.640.000,00
Jumlah	108.543.914.578.500,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA

Pelaksanaan Otsus di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan

Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pengalokasian Dana Otsus untuk Kabupaten/Kota dialokasikan disajikan pada **Lampiran 26**.

Berdasarkan Perpres 210 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp4.309.582.640.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.589.605.000,00 dari penerimaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp4.276.993.035.000,00.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Pengalokasiannya paling banyak sebesar 40% untuk Program dan Pembangunan Aceh dan paling sedikit 60% untuk Program dan Kegiatan Kab/Kota. Pada Tahun 2013 terbit Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasiannya berubah yaitu sebesar 60% untuk Program dan Pembangunan Aceh dan 40% untuk Program dan Kegiatan Kab/Kota. Selain diperuntukan untuk program dan Pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga dialokasikan paling banyak 1% untuk Pembangunan Ibu Kota Aceh.

Kemudian pada Tahun 2016 Qanun Aceh tersebut diubah kembali melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk program dan kegiatan bersama Aceh dan Kab/Kota kemudian dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan aceh dan paling banyak 40% dianggarkan untuk program dan kegiatan Kab/Kota. Pengelolaan Dana Otsus Tahun 2008 s.d. 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 274. Rincian Pengelolaan Dana Otsus Provinsi dan Kab/Kota 2008-2025

No	Tahun	Alokasi Provinsi (Rp)	Alokasi Kab/Kota	Alokasi Ibu Kota Provinsi (1% dari Alokasi Provinsi)	Kegiatan Bersama	Total
1	2008	1.472.132.897.000,00	2.118.010.000.000,00	-	-	3.590.142.897.000,00
2	2009	1.610.272.000.000,00	2.118.010.000.000,00	-	-	3.728.282.000.000,00
3	2010	1.612.837.640.000,00	2.236.969.200.000,00	-	-	3.849.806.840.000,00
4	2011	2.200.772.392.499,00	2.309.884.104.001,00	-	-	4.510.656.496.500,00
5	2012	2.769.894.866.100,00	2.706.393.897.900,00	-	-	5.476.288.764.000,00
6	2013	2.937.012.524.600,00	3.285.773.258.400,00	-	-	6.222.785.783.000,00
7	2014	3.811.536.901.955,00	2.974.349.239.298,00	38.500.372.747,00	-	6.824.386.514.000,00
8	2015	4.005.951.596.377,00	3.011.341.217.084,00	40.464.157.539,00	-	7.057.756.971.000,00
9	2016	4.702.599.680.968,00	2.958.797.424.800,00	45.819.836.232,00	-	7.707.216.942.000,00
10	2017	4.536.904.818.351,00	3.388.914.155.252,00	45.827.321.397,00	-	7.971.646.295.000,00
11	2018	4.361.174.501.868,00	2.675.841.166.012,00	-	992.775.925.100,00	8.029.791.592.980,00
12	2019	4.274.191.114.497,00	2.559.003.693.059,00	42.741.911.145,00	1.481.534.935.299,00	8.357.471.654.000,00
13	2020	3.283.392.714.129,00	2.211.387.355.580,00	32.833.927.141,00	2.027.664.351.150,00	7.555.278.348.000,00
14	2021	3.164.243.692.818,00	2.130.747.898.654,00	31.642.436.928,00	2.229.193.777.600,00	7.555.827.806.000,00
15	2022	3.209.213.857.549,00	2.193.503.074.351,00	-	2.157.283.068.100,00	7.560.000.000.000,00
16	2023	1.219.120.094.749,00	833.270.637.151,00	-	1.907.609.268.100,00	3.960.000.000.000,00
17	2024	2.363.908.269.964,00	957.497.644.130,00	18.193.854.870,00	937.393.266.036,00	4.276.993.035.000,00
18	2025	3.336.158.083.000,00	973.424.557.000,00	-	-	4.309.582.640.000,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA (Diolah)

Pada Tahun 2018 terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasian Dana Otonomi Khusus dengan pertimbangan untuk program bersama pemerintah aceh dana Kabupaten/Kota serta

paling sedikit sebesar 60% untuk program kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak 40% untuk program kegiatan dan pembangunan Kabupaten/Kota. Selain diperuntukan untuk program kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dialokasikan sebesar 1% untuk Pembangunan Ibukota Aceh. Alokasi per masing-masing bidang dirinci sebagai berikut:

Tabel 275. Alokasi Dana Otsus Aceh Per Bidang Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008

Tahun	Infrastruktur (milyar)	Pemberdayaan Ekonomi (milyar)	Pengentasan Kemiskinan (milyar)	Pendidikan (milyar)	Sosial (milyar)	Kesehatan (milyar)	Keistimewaan Aceh (milyar)	Penguatan Perdagangan (milyar)	Total
2008	1.901	860	12	418	66	171	162	-	3.590
2009	2.399	466	4	267	107	440	46	-	3.729
2010	1.982	1.108	64	371	17	290	18	-	3.850
2011	2.524	621	501	33	59	401	372	-	4.511
2012	1.565	987	610	1.357	159	667	132	-	5.477
2013	2.836	938	953	764	131	560	41	-	6.223
2014	3.521	549	166	1.570	166	807	46	-	6.825
2015	3.206	778	169	1.684	214	893	113	-	7.057
2016	3.678	992	210	1.582	117	967	161	-	7.707
2017	2.867	942	412	2.014	215	1.280	241	-	7.971
2018	3.683	836	462	1.624	177	1.179	67	-	8.028
2019	3.169	751	859	2.184	104	1.142	149	-	8.358
2020	2.574	442	519	1.431	1.052	1.419	118	-	7.555
2021	3.098	460	241	1.656	298	1.632	170	-	7.555
2022	3.168	484	981	1377	151	1.046	353	-	7.560
2023	1.120	476	235	1.053	148	719	209	-	3.960
2024	1.183	516	192	992	102	780	304	207	4.276
2025	2.148	328	62	946	71	575	130	44	4.304
JUMLAH	46.622	12.534	6.652	21.323	3.354	14.968	2.832	251	108.536
%	42,67	11,71	6,32	19,55	3,15	13,81	2,59	0,20	100,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA (Diolah)

6.3 Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

Pelaksanaan JKRA didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Peserta JKRA adalah seluruh penduduk Aceh, tidak termasuk peserta Askes Sosial, pejabat negara yang iurannya dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Pelayanan kesehatan yang ditanggung meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan tambahan yang difasilitasi dalam program JKRA untuk penduduk Aceh berupa pelayanan Transportasi. Pelayanan kesehatan tersebut disediakan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero)/BPJS.

Realisasi penggunaan dana JKA/JKRA sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2025 yang telah disalurkan kepada PT Askes/BPJS sebagaimana tabel berikut:

Tabel 276. Realisasi JKRA Tahun 2010-2024

Tahun	Realisasi JKRA (Rp)
2010	241.965.073.000,00
2011	399.530.559.122,00
2012	419.000.000.000,00
2013	419.124.502.998,00
2014	364.327.519.598,00
2015	438.308.664.518,00
2016	532.511.267.125,00
2017	555.692.673.000,00
2018	515.747.055.000,00
2019	611.557.484.950,00
2020	888.634.436.616,00
2021	1.012.476.276.000,00
2022	845.725.217.700,00
2023	617.054.204.700,00
2024	732.349.081.386,00
2025	809.288.073.984,00
Jumlah	9.403.292.089.697,00

Sumber: Data Diolah (Dinas Kesehatan Aceh)

6.4 Utang Pemerintah Aceh pada Pemerintah Pusat

Tabel 277. Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang

Penarikan (Rp)	Pembayaran Pokok (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Non Pokok (Rp)	Belum Jatuh Tempo (Rp)	Hak Tagih (Rp)
*16.915.000.000,00	*6.343.125.000,00	10.571.875.000,00	*13.626.051.048,22	0,00	23.833.926.048,22
0,00	**10.571.875.000,00		*0,00		
***0,00	***0,00				
*Penarikan Kas	*Pembayaran		*Non Pokok		
**Penarikan	**Reorganisasi		**Lainnya Prorata		
Reorganisasi	***Mutasi Kurang				
***Penarikan	Lainnya				
Kapitalis					

Sumber: Rekonsiliasi dengan DJKN

Kewajiban ini timbul dalam rangka pembiayaan tambahan penyertaan modal Pemerintah Aceh ke dalam modal PT Bank BPD Aceh pada Tahun 1999, dengan perjanjian pinjaman Nomor RDI-352/DP3/1999 tanggal 7 Mei 1999. Pinjaman berasal dari Rekening Dana Investasi sebesar Rp16.915.000.000,00 yang selanjutnya dilakukan amandemen terhadap naskah pinjaman tersebut dengan Nomor Amandemen: AMA-171/RDI-352/DSMI/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

Terhadap seluruh kewajiban pinjaman tersebut telah dilakukan penghapusan melalui mekanisme *Debt Swap* dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat). Rencana pelaksanaan *Debt Swap* telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Manajemen Investasi untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 278. Rencana Debt Swap

No	SKPA	2010	2012	2014
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	3.560.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	439.991.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	23.908.900.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh	3.605.205.000,00	-	11.060.000.000,00
Jumlah		6.448.809.000,00	13.279.939.000,00	38.528.900.000,00
Total Usulan		58.257.648.000,00		

Sumber: DPA SKPA

Sedangkan Realisasi kegiatan *Debt Swap* adalah sebagai berikut:

Tabel 279. Realisasi Kegiatan Debt Swap

No	SKPA	2010	2012	2014
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	2.421.786.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	439.991.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	21.219.525.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komitel Aceh	3.605.205.000,00	-	9.889.747.000,00
Jumlah		6.448.809.000,00	13.279.939.000,00	33.531.058.000,00
Total Realisasi		53.259.806.000,00		

Sumber: DPA SKPA

Terhadap usulan realisasi kegiatan *debt swap* pada Tahun 2014, setelah dilakukan verifikasi ulang pada Tahun 2017, realisasi kegiatan *debt swap* adalah sebagai berikut:

Tabel 280. Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan Debt Swap

No	SKPA	2010	2012	2014
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	2.929.719.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	430.921.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	21.186.445.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komitel Aceh	3.605.182.040,00	-	9.946.412.000,00
Jumlah		6.439.716.040,00	13.279.939.000,00	34.062.576.000,00
Total Realisasi		53.782.231.040,00		

Sumber: DPA SKPA

Tindak lanjut dari pelaksanaan *debt swap*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, membentuk Tim Verifikasi pelaksanaan *debt swap* dengan Surat Tugas Nomor ST-158/D3-01/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan suratnya Nomor S/202/PB/2018 perihal Tindak lanjut Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi *debt swap* Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa hasil verifikasi atas pelaksanaan *debt swap* pada Pemerintah Aceh telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 176/PMK.05/2016, disampaikan bahwa penyelesaian restrukturisasi pinjaman akan diproses lebih lanjut. Rincian hasil verifikasi pelaksanaan *debt swap* sebagai berikut:

Tabel 281. Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan Debt Swap

No	Nama Pemerintah Daerah	Kewajiban Pelaksanaan Debt Swap	Realisasi Kegiatan			Pemenuhan Debt Swap	Sisa Tunggakan Debt Swap
			Sesuai Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria	Total		
1	Aceh	23.833.926.048,23	48.507.301.040,00	5.274.930.000,00	53.782.231.040,00	23.833.926.048,23	-
Jumlah		23.833.926.048,23	48.507.301.040,00	5.274.930.000,00	53.782.231.040,00	23.833.926.048,23	-

Sumber: DPA SKPA

Pada TA 2021, telah dilakukan rekonsiliasi antara Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Pemerintah Aceh. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pemprov NAD Nomor: AMA-17/RDI-352/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 Nomor Berita Acara BAR/04/2-2021/WPB.01/2022 bahwa Hak Tagih Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dihitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

Terhadap Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat tersebut sudah mendapat persetujuan Presiden atas permohonan penghapusan piutang negara secara bertahap. Hal ini sesuai dengan penyampaian tindak lanjut pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2019 yaitu BA 999.04 tentang Pengelolaan Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah yang telah memperoleh penghapusan bersyarat dimaksud masih memiliki hak tagih kepada negara hingga terbitnya penghapusan mutlak yang ditetapkan Menteri Keuangan atau Presiden sesuai kewenangan dalam PP Nomor 14 Tahun 2005.

6.5 Belanja yang Belum Terbayarkan pada Beberapa SKPA Per 31 Desember 2025

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan BPSDM Aceh Tahun 2025, bahwa terdapat Laporan Tunggakan Pembayaran Beasiswa Kerja sama DAAD Tahun 2025 sebesar Rp90.000.000,- Tunggakan tersebut tidak dapat dibayarkan karena alasan dan rincian sebagai berikut:

- a. Beasiswa kerja sama DAAD a.n. Amalia Mabrina Masbar Rus, S3-Teknik Industri, TU *Bergakademie Freiberg*, Jerman. Beasiswa yang bersangkutan telah dianggarkan namun tidak bisa direalisasikan dikarenakan tidak adanya tagihan dari DAAD pada *invoice* Nomor : 2025/064419 tanggal 24 November 2025.
- b. Tindak Lanjut Surat dari Sekda Aceh Nomor : 300.2/18717 tanggal 3 Desember 2025 tentang Pemoangan Belanja SKPA untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Banjir Hidrometeorologi Aceh maka tanggal 5 Desember 2025 kami melakukan penyesuaian anggaran untuk kegiatan Beasiswa Kerja sama Pemerintah Aceh Luar Negeri (DAAD) atas kelebihan anggaran yang tidak disampaikan pada *invoice* Nomor : 2025/064419 tanggal 24 November 2025.
- c. Tanggal 17 Desember 2025, DAAD mengirim invoice terbaru Nomor : 2025/064552 dan Nomor : 2025/064553, yang di dalamnya termasuk tagihan a.n. Amalia Mabrina Masbar Rus.

Sehubungan dengan kekurangan anggaran Beasiswa DAAD maka BPSDM Aceh mencoba melakukan penyesuaian Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membayar tagihan dimaksud dan anggaran tersebut telah tersedia pada DPA Pergeseran BTT BPSDM Aceh Tahun 2025 sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 anggaran tersebut tidak masuk dalam sistem SIPD dan sistem SIPKD, sehingga pembayaran Beasiswa Kerja sama Pemerintah Aceh Luar Negeri (DAAD) a.n. Amalia Mabrina Masbar Rus tidak semua bisa terbayarkan dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026.

2. Dinas Peternakan Aceh

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPA) Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2025 tersedia anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Aceh pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor Kode Rekening Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan untuk Belanja Publikasi pada media cetak dan elektronik sebesar Rp. 128.550.000,- dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPA) menjadi sebesar Rp. 130.350.000,-, di mana anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar kegiatan - kegiatan biaya iklan pada media cetak yang telah dilaksanakan sehingga Dinas Peternakan Aceh mempunyai utang pada pihak ketiga (PT. Serambi Indonesia).

Pembayaran ini rencananya akan di lunasi pada saat DPA-P tetapi pada saat DPA-P tidak ada penambahan untuk belanja tersebut. Sehingga menyebabkan adanya Belanja Operasi (Belanja Jasa Iklan/Reklame Film Dan Pemotretan) pada Dinas Peternakan Aceh pada Tahun 2025 yang tidak terbayarkan.

Dinas Peternakan Aceh telah menyampaikan Surat Permohonan *Review* kepada Sekretaris Daerah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang tembusannya juga disampaikan kepada Inspektorat Aceh dan Bagian Akuntansi Badan Pengelolaan dan Keuangan Aceh, atas tunggakan biaya iklan pada media cetak/elektronik a.n. PT. Serambi Indonesia sebesar Rp. 69.930.000,- (Enam puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 282. Rincian Tunggakan Biaya Iklan Dinas Peternakan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Tanggal
1.	Iklan Pengukuhan Bunda PAUD	4.995.000	21 Mei 2025
2.	Iklan Selamat dan Sumpah Anggota DPRA	4.995.000	22 Mei 2025
3.	Iklan Penghargaan Opini WTP	4.995.000	27 Mei 2025
4.	Iklan HUT Bhayangkara	4.995.000	1 Juli 2025
5.	Iklan Hari Bhakti Adhiyaksa	4.995.000	22 Juli 2025
6.	Iklan Penghargaan Pimred Award	4.995.000	23 Juli 2025
7.	Iklan Pengukuhan Imam Mesjid Raya	4.995.000	14 Agustus 2025
8.	Iklan Peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh	4.995.000	15 Agustus 2025
9.	Iklan HUT NKRI ke 80 tahun	4.995.000	18 Agustus 2025
10.	Iklan Selamat atas Pelantikan Sekda Aceh	4.995.000	20 Agustus 2025
11.	Iklan Selamat atas Pelantikan KAPOLDA	4.995.000	20 Agustus 2025
12.	Iklan Selamat atas Pelantikan Ketua KAGAMA	4.995.000	8 September 2025
13.	Iklan atas Pelantikan PANGDAM Iskandar Muda	4.995.000	10 September 2025
14.	Iklan HUT TNI	4.995.000	6 Oktober 2025
Total		69.930.000	

Sumber : Dinas Peternakan Aceh

3. Sekretariat Daerah Aceh

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Aceh tidak dapat membayarkan belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.642.105.770.00 dikarenakan pagu yang tidak cukup hingga 31 Desember 2025.

4. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/213/2026 Tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp514.897.528,00 yang belum dicatat sebagai utang Pemerintah Aceh dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan Aceh Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari setoran belanja Beasiswa Masyarakat Aceh pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh sebesar Rp500.000.000,00;

- b. Kelebihan penerimaan Aceh Tahun Anggaran 2025 karena kesalahan penyetoran Pajak Daerah atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang seharusnya menjadi penerimaan Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp2.210.000,00;
- c. Kelebihan penerimaan Aceh Tahun Anggaran 2025 karena kelebihan setor pada Rekening Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang seharusnya menjadi penerimaan Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp297.528,00;
- d. Kelebihan penerimaan Aceh Tahun Anggaran 2025 karena kesalahan penyetoran pada Rekening Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh CV. Karya Pemuda yang penyetorannya dilakukan oleh Saudara Ibnu Haris sebesar Rp10.000.000,00; dan
- e. Kelebihan penerimaan Aceh Tahun Anggaran 2025 karena kesalahan penyetoran pada Rekening Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang seharusnya menjadi penerimaan Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp2.390.000,00.

6.6 Utang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PNS Tahun 2025

Berdasarkan surat Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Nomor 02/I-06/0126 Tanggal 2 Januari 2026 Perihal Pencatatan Utang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagai berikut :

- a. Terdapat kekurangan bayar iuran JKN PNS Tahun 2025 (Kekurangan Bayar Iuran 4% Pemda) atas Gaji sebesar Rp1.308.981,00 dan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp258.955,00.
- b. Terdapat kekurangan bayar iuran JKN PPPK Tahun 2025 (Kekurangan Bayar Iuran 4% Pemda) atas Gaji sebesar Rp2.426.529,00.

BAB VII

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh

Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sumatera Utara dan Samudera Hindia

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sumatera Utara

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia

Aceh memiliki luas wilayah darat 58.880,87 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km² dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada Tahun 2017, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan lima kota, 289 kecamatan, 805 mukim dan 6.497 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor 140/632/2017).

Aceh memiliki mekanisme dan aturan adat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme dan aturan itu tertuang dalam aturan Lembaga Adat, sesuai Pasal 98 ayat (3) UUPA antara lain seperti Panglima Laot, Pawang Glee, dan Kejreun Blang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Untuk mengurangi perubahan fungsi baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya perlu dilakukan penegakan dan penataan batas masing-masing kawasan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan konversi lahan yang menyalahi aturan ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dengan permohonan pemanfaatan ruang oleh pihak ketiga.

7.2. Wilayah Rawan Bencana

Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami bencana gempa dan tsunami yang cukup besar pada Tahun 1797, 1891, 1907 dan 2004. Bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan 126.915 jiwa meninggal, 37.063 jiwa hilang, lebih kurang 100.000 jiwa luka berat maupun ringan serta 517.000 unit rumah rusak terutama di wilayah pesisir pantai barat Aceh. Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Aceh juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Provinsi Aceh kembali menghadapi tantangan kebencanaan yang signifikan. Berdasarkan data BPBA, tercatat sebanyak 387 kejadian bencana yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, meliputi kebakaran permukiman, banjir, kebakaran hutan dan lahan,

angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, dan abrasi. Salah satu kejadian menonjol adalah bencana banjir hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang berdampak pada 18 kabupaten/kota, dengan 15 kabupaten/kota menetapkan status tanggap darurat bencana.

Bencana sepanjang tahun 2025 mengakibatkan dampak kemanusiaan yang signifikan, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 575 orang, korban luka-luka 5.408 orang, serta berdampak pada 862.411 kepala keluarga atau 2.421.674 jiwa. Selain itu, tercatat 925.654 orang harus mengungsi akibat kejadian bencana.

Dari sisi dampak ekonomi, nilai kerugian akibat bencana hingga akhir Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp249,5 miliar. Nilai tersebut masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya mencerminkan kerugian akibat bencana hidrometeorologi, khususnya banjir besar di akhir tahun, yang masih dalam proses penghitungan oleh Tim Penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

Jenis bencana yang paling dominan sepanjang tahun 2025 adalah kebakaran permukiman, dengan jumlah 137 kejadian dan estimasi kerugian sekitar Rp70 miliar. Bencana banjir tercatat sebanyak 72 kejadian, berdampak pada ratusan ribu rumah warga, infrastruktur jembatan, tanggul, serta lahan pertanian, dan menjadi bencana dengan dampak sosial paling luas. Selain itu, kejadian kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi, dan abrasi juga memberikan dampak terhadap permukiman, infrastruktur, dan layanan publik.

Secara umum, beberapa jenis bencana pada tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Terdapat dua tipe gunung api di Aceh, yaitu gunung api tipe A dan tipe C. Gunung api tipe A yaitu Gunung Api Seulawah Agam di Aceh Besar, Gunung Api Puet Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, dan Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah, sedangkan gunung api tipe C yaitu Gunung Api Jaboi di Sabang.

7.3. Demografi

Jumlah penduduk di Aceh pada Tahun 2025 dari hasil proyeksi interim yaitu sebanyak 5.554,8 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen dibandingkan data penduduk tahun 2024, jumlah penduduk Aceh saat ini mengalami kenaikan sekitar 72,29 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang paling besar terdapat masih terdapat di Kabupaten Aceh Utara, yaitu 632,0 ribu jiwa, wa, diikuti Kabupaten Bireuen 459,1 ribu jiwa dan Kabupaten Pidie 452,5 ribu jiwa.

Sementara dalam hal kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.319 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah di Kabupaten Gayo Lues dengan 19 jiwa/km². Secara keseluruhan Kepadatan penduduk Aceh tahun 2025 adalah 96 jiwa per kilometer persegi.

Pada tahun 2025, jumlah angkatan kerja Provinsi Aceh sebanyak 2.661.283 orang, dari hasil survei SAKERNAS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.508.354 orang di antaranya dengan status bekerja, dan sisanya adalah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada tahun 2025 adalah sebesar 5,75 persen, dengan TPT tertinggi adalah Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 8,75 persen dan terendah adalah Kabupaten Bener Meriah yaitu sebesar 2,20 persen.

7.4. Sosiologi

Kearifan adat budaya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan, ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangan.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah *Hadih Maja* (peribahasa), “*Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut*”, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggung jawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah *Hadih Maja* lainnya, yaitu “*Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana*”. Dalam konteks kekinian *Hadih Maja* tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otoritarianisme.

Di samping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laut yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumber daya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

7.5. Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi DPRA sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan seorang Wakil Gubernur.

Terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mengharuskan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Dengan terbitnya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Gubernur Aceh membentuk perangkat daerah Aceh yang

terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh, Dinas, Badan dan Kantor yang masing-masing disebut sebagai SKPA. Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Aceh dan tiga orang Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, serta Asisten Administrasi Umum. Pemerintah Aceh menyusun dan menata kembali SOTK yang baru perangkat Aceh.

Beberapa SKPA yang berubah adalah Dinas Keuangan dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang kemudian menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Sementara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh dipecah menjadi Badan Kepegawaian Aceh serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Aceh. Selanjutnya adalah Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yang menjadi Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Dinas Bina Marga Aceh menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Sementara Dinas Cipta Karya Aceh menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh.

Selanjutnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh yang kemudian menjadi Dinas Pangan Aceh. Sementara itu Dinas Kehutanan Aceh dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Untuk selanjutnya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dipecah menjadi Dinas Perhubungan serta Dinas Informatika dan Persandian Aceh. Sementara Badan Investasi dan Promosi Aceh dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dilebur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh untuk kemudian menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan dilebur menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Sementara Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh berubah menjadi Dinas Peternakan Aceh. Selanjutnya adalah Dinas Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah kemudian menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Aceh berubah untuk kemudian Dinas Pertanahan Aceh. Pemerintah kemudian juga membentuk Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan meniadakan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Aceh. Selanjutnya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh yang menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Tabel 283. Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN
1	Dinas Pendidikan Aceh
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
4	Dinas Kesehatan Aceh
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin
6	Rumah Sakit Jiwa
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
9	Dinas Pengairan Aceh
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
13	Dinas Sosial Aceh
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
16	Dinas Pangan Aceh
17	Dinas Pertanahan Aceh
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
21	Dinas Perhubungan Aceh
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
31	Dinas Peternakan Aceh
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
34	Sekretariat Daerah Aceh
35	Sekretariat DPRA
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
38	Badan Kepegawaian Aceh
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
41	Inspektorat Aceh
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
44	Dinas Syariah Islam Aceh
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sumber: Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016

7.6. Visi dan Misi Pemerintah Aceh

Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 adalah “Aceh Yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera” yang akan dicapai visi tersebut melalui misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata; dan
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode 2023-2026 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pembangunan demokrasi;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional;
3. Pelaksanaan Syariah Islam secara kafah;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah, dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi;



5. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana; dan
6. Meningkatkan penguatan perdamaian.

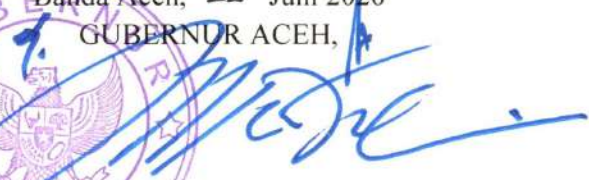
BAB VIII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Laporan Keuangan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA TA 2025 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Dalam CaLK Pemerintah Aceh Tahun 2025, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pengungkapan pada CaLK juga telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian CaLK ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan juga sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA TA 2025 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, 22 Juni 2026
GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF



Silpa Zakat dan Infak

No	Tahun	Realisasi PAD Zakat	Realisasi Belanja/SP2D	Setoran Sisa Penyaluran	Koreksi Kurang	Saldo	Realisasi PAD Infak	Realisasi Belanja/SP2D	Koreksi Tambah	Saldo	Saldo Silpa Zakat dan Infak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2006	2.547.439.399,00	-	-	-	2.547.439.399,00	-	-	-	-	2.547.439.399,00
2	2007	-	116.114.560,00	-	-	2.431.324.839,00	3.768.310.011,00	2.680.450.677,00	-	1.087.859.334,00	3.519.184.173,00
3	2008	-	-	-	-	2.431.324.839,00	14.314.166.205,00	-	-	15.402.025.539,00	17.833.350.378,00
4	2009	3.554.736.230,00	-	-	-	5.986.061.069,00	19.094.618.693,00	-	-	34.496.644.232,00	40.482.705.301,00
5	2010	18.820.427.111,02	3.000.000.000,00	-	-	21.806.488.180,02	11.827.648.628,00	-	-	46.324.292.860,00	68.130.781.040,02
6	2011	8.474.907.584,63	5.000.000.000,00	-	-	25.281.395.764,65	-	60.000.000.000,00	-	(13.675.707.140,00)	11.605.688.624,65
7	2012	10.277.631.819,82	8.961.710.458,00	-	-	26.597.317.126,47	643.800,00	6.850.000.000,00	-	(20.525.063.340,00)	6.072.253.786,47
8	2013	13.299.410.378,29	10.000.000.000,00	-	-	29.896.727.504,76	-	8.000.000.000,00	-	(28.525.063.340,00)	1.371.664.164,76
9	2014	25.176.003.088,25	10.000.000.000,00	1.453.429.059,62	-	46.526.159.652,63	-	-	-	(28.525.063.340,00)	18.001.096.312,63
10	2015	27.805.237.046,74	21.273.480.000,00	-	-	53.057.916.699,37	-	-	-	(28.525.063.340,00)	24.532.853.359,37
11	2016	35.780.632.814,11	36.653.237.943,00	-	-	52.185.311.570,48	-	-	-	(28.525.063.340,00)	23.660.248.230,48
12	2017	52.180.580.303,10	33.184.661.500,00	20.000,00	-	71.181.250.373,58	-	-	-	(28.525.063.340,00)	42.656.187.033,58
13	2018	53.928.676.345,25	41.736.365.693,00	-	-	83.373.561.025,83	-	-	-	(28.525.063.340,00)	54.848.497.685,83
14	2019	59.551.675.959,85	47.226.018.060,34	-	-	95.699.218.925,34	189.420.532.704,78	88.986.260,00	-	160.806.483.104,78	256.505.702.030,12
15	2020	57.556.340.316,62	62.792.935.769,00	-	-	90.462.623.472,96	24.982.353.194,46	-	-	185.788.836.299,24	276.251.459.772,20
16	2021	59.169.323.476,55	92.442.187.683,00	-	-	57.189.759.266,51	27.257.294.887,47	-	-	213.046.131.186,71	270.235.890.453,22
17	2022	61.703.621.770,95	71.765.259.891,00	-	-	47.128.121.146,46	40.297.323.069,63	65.503.999.850,00	-	187.839.454.406,34	234.967.575.552,80
18	2023	62.571.725.173,70	84.327.599.354,00	-	249.999,86	25.371.996.966,30	27.054.516.332,36	81.158.393.634,00	2.242.000,08	133.737.819.104,78	159.109.816.071,08
19	2024	59.968.551.394,34	64.590.553.027,00			20.749.995.333,64	35.566.064.561,49	24.873.562.926,00	-	144.430.320.740,27	165.180.316.073,91
20	2025	38.087.409.855,16	57.360.919.761,00			1.476.485.427,80	41.769.498.980,91	50.268.985.202,00		135.930.834.519,18	137.407.319.946,98
Jumlah		650.454.330.067,38	650.431.043.699,34	1.453.449.059,62	249.999,86	761.380.478.582,80	435.352.971.068,10	299.424.378.549,00	2.242.000,08	1.053.539.550.806,30	1.814.920.029.389,10

Rincian Pendapatan BLUD SMKN

No	BLUD SMK	Penerimaan Tunai dan Nontunai yang Disetor ke Rekening BLUD SMKN
1	SMKN 1 SABANG	22.400.000,00
2	SMKN 1 BANDA ACEH	535.753.500,00
3	SMKN 2 BANDA ACEH	135.022.500,00
4	SMKN 3 BANDA ACEH	1.321.868.261,00
5	SMKN 5 TELKOM BANDA ACEH	950.000,00
6	SMKN 1 AL- MUBARKEYA INGIN JAYA	31.454.000,00
7	SMKN 1 MESJID RAYA	23.650.000,00
8	SMKN 1 JANTHO	8.657.035,98
9	SMK PP N SAREE	16.014.600,00
10	SMKN 1 SIGLI	166.062.000,00
11	SMKN 1 PEUSANGAN	123.200.000,00
12	SMKN 1 GANDAPURA	74.866.500,00
13	SMKN 1 JEUNIEB	52.800.000,00
14	SMKN 1 BENER MERIAH	2.568.000,00
15	SMKN 2 BENER MERIAH	3.000.000,00
16	SMKN 5 BENER MERIAH	17.240.000,00
17	SMKN 1 TAKENGON	28.457.000,00
18	SMKN 2 TAKENGON	58.307.000,00
20	SMKN 5 TAKENGON	4.149.050,26
21	SMKN 1 LHOKSEUMAWE	70.900.000,00
22	SMKN 2 LHOKSEUMAWE	393.108.000,00
23	SMKN 3 LHOKSEUMAWE	263.384.800,00
24	SMKN 5 LHOKSEUMAWE	530.000,00
25	SMKN 6 LHOKSEUMAWE	2.550.000,00
26	SMKN 7 LHOKSEUMAWE	1.100.000,00
27	SMKN 1 BAKTIYA BARAT	9.430.000,00
28	SMKN 1 NISAM	13.474.000,00
30	SMKN 1 COT GIREK	3.470.000,00
32	SMKN 1 TANAH LUAS	450.000,00
33	SMKN 1 SYAMTALIRA ARON	3.300.000,00
34	SMKN 1 TANAH JAMBO AYE	7.032.600,00
35	SMKN 1 DEWANTARA	8.537.000,00
36	SMKN 1 SAWANG	1.135.000,00
37	SMKN 1 PEUREULAK	18.669.900,00
38	SMKN 1 IDI	38.041.000,00
39	SMKN 1 DARUL AMAN	4.354.340,00
41	SMKN DARUL IHSAN	2.600.000,00
42	SMKN TAMAN FAJAR	12.500.000,00
43	SMKN 1 LANGSA	314.306.900,00
44	SMKN 2 LANGSA	146.003.574,00
45	SMKN 3 LANGSA	201.187.000,00
46	SMKN 6 LANGSA	3.555.000,00

47	SMKN 1 KUALA SIMPANG	52.041.000,00
48	SMKN 2 KARANG BARU	16.927.400,00
49	SMKN 3 KARANG BARU	45.466.000,00
51	SMKN 1 KARANG BARU	9.554.766,00
52	SMKN 1 KUTACANE	1.685.754,54
53	SMKN 2 KUTACANE	58.390.518,74
54	SMK PP N KUTACANE	4.196.697,13
55	SMKN 1 ACEH BARAT DAYA	1.600.000,00
56	SMKN 1 LABUHAN HAJI	7.021.000,00
57	SMKN 1 PASIE RAJA	40.891.000,00
58	SMKN 2 SIMPANG KIRI	17.800.000,00
59	SMKN 1 KUTA BAHARU	500.000,00
60	SMKN 1 KUALA BARU	670.000,00
61	SMKN 6 ACEH SINGKIL	55.000.000,00
62	SMKN 1 GUNUNG MERIAH	6.100.000,00
63	SMKN 1 SIMPANG KANAN	14.145.000,00
64	SMKN 1 TEUNOM	1.740.000,00
65	SMKN 2 MEULABOH	53.708.810,00
66	SMKN 3 MEULABOH	9.042.750,00
67	SMKN 4 MEULABOH	11.400.000,00
68	SMKN 1 MEUREUBO	1.000.000,00
Sub Total		4.554.919.257,65
Koreksi Pendapatan		66.974,45
Total		4.554.986.232,10

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Barang Pakai Habis	874.834.148.863,55	824.027.149.145,63	94,19	706.912.749.205,26
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.547.284,00	16.477.000,00	99,58	455.500,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.200.601.712,00	1.197.149.500,00	99,71	108.091.000,00
4	Belanja Jasa Kantor	621.496.114.906,88	595.703.666.616,67	95,85	657.264.142.782,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	813.035.081.094,00	811.260.192.430,00	99,78	735.986.953.535,00
6	Belanja Sewa Tanah	925.465.000,00	880.645.000,00	95,16	323.000.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.557.673.257,00	30.284.354.406,00	99,11	26.493.247.171,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.294.194.114,51	32.566.627.671,00	92,27	28.117.351.461,00
9	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.500.000,00	1.896.078,00	16,49	1.897.092,00
10	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	333.200.000,00	325.375.000,00	97,65	266.880.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	61.323.842.852,10	53.886.226.992,49	87,87	8.213.885.167,97
12	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.212.291.564,10	4.694.597.600,05	90,07	3.817.080.546,98
13	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	7.920.000,00
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.371.015.423,00	1.366.856.298,00	99,70	2.455.308.776,00
15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.474.700.000,00	945.498.000,00	64,11	2.447.448.000,00
16	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.571.132.697,00	2.289.565.701,00	64,11	2.151.438.731,00
17	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.179.416.850,00	1.151.786.979,00	97,66	461.647.544,00
18	Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	4.243.896.000,00	4.174.569.000,00	98,37	-
19	Belanja Pemeliharaan Tanah	133.450.000,00	4.100.000,00	3,07	235.465.321,00
20	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.783.833.343,50	76.438.345.667,00	97,02	70.906.695.778,00
21	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.430.150.484,95	29.162.962.778,91	95,84	22.284.549.703,11
22	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.228.940.311,00	39.059.947.302,16	99,57	35.565.289.009,00
23	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	95.310.000,00	95.270.000,00	99,96	63.451.000,00
24	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	243.953.761.993,93	233.515.525.739,00	95,72	222.652.449.054,06
25	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.002.232.142,00	1.980.220.622,00	98,90	3.565.421.824,00
26	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	309.160.005.862,00	307.472.887.192,25	99,45	184.008.946.702,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	218.224.008.503,00
28	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	218.235.565.334,00	211.598.659.563,00	96,96	-
29	Belanja Barang dan Jasa BLUD	725.594.575.337,00	701.754.793.977,58	96,71	794.579.465.753,11
Jumlah		4.103.698.646.426,52	3.965.855.346.259,74	96,64	3.727.115.239.159,49

Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Dinas Pendidikan Aceh	Dinas Kesehatan Aceh	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	Rumah Sakit Jiwa	Rumah Sakit Ibu dan Anak	Dinas Peternakan Aceh	Dinas Syariat Islam Aceh	TOTAL
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	323.744.563,00		53.522.221.351,00					53.845.965.914,00
2	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				325.404.000,00				325.404.000,00
3	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.511.000,00			52.135.000,00	1.365.000,00			60.011.000,00
4	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.050.000,00		399.234.150,00	159.029.300,00	99.588.000,00			667.901.450,00
5	Beban Bahan-bahan Kimia	8.064.000,00	323.639.734,00						331.703.734,00
6	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		9.990.000,00	2.033.673.228,00	105.866.250,00	114.800.000,00	868.000,00		2.265.197.478,00
7	Beban Bahan-Bahan Baku	2.287.541.104,00							
8	Beban Bahan-Barang dalam Proses	353.925.500,00							
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	834.000,00			159.763.800,00				160.597.800,00
10	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			98.207.200,00		13.969.350,00			112.176.550,00
11	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran				17.948.700,00				17.948.700,00
12	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	200.000,00		4.605.619.815,00		487.746.000,00	-		5.093.565.815,00
13	Beban Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	29.491.900,00							
14	Beban Bahan-Bahan Lainnya	33.897.000,00	9.522.690,00	145.864.873.723,00	3.100.439.808,00	5.256.932.280,00	36.103.000,00		154.301.768.501,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran			2.370.435.119,00		42.906.939,00			2.413.342.058,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			20.265.329,00					20.265.329,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	131.197.808,00		1.626.910.344,00	189.686.700,00	197.927.430,00		4.873.588,00	2.150.595.870,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.040.000,00	8.800.000,00					16.902.000,00	26.742.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.700.000,00		3.493.524.150,00	93.832.550,00	517.964.975,00		4.208.100,00	4.113.229.775,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	730.000,00		33.500.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00			54.230.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.100.000,00							
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	6.805.000,00				9.000.000,00			15.805.000,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor				48.180.700,00				48.180.700,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			24.000.000,00	147.378.500,00	118.805.500,00			290.184.000,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik								-
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga				19.992.000,00				19.992.000,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			22.843.000,00	10.640.000,00			37.462.500,00	70.945.500,00
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	700.000,00		7.880.662.192,00	62.291.000,00	174.318.708,00		95.000.000,00	8.212.971.900,00
29	Beban Obat-Obatan-Obat			71.865.473.777,00	3.843.481.091,00	3.004.334.834,00			78.713.289.702,00
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya						5.484.624,00		5.484.624,00
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	144.434.800,00							
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	700.000,00							
33	Beban Natura dan Pakan-Natura					57.728.500,00			57.728.500,00

34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	550.000,00					647.556.250,00		648.106.250,00
35	Beban Makanan dan Minuman Rapat	19.978.000,00		2.664.641.500,00	69.305.500,00	46.620.000,00			2.800.545.000,00
36	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			700.322.946,00	49.407.100,00	11.730.000,00			761.460.046,00
37	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh			2.700.000,00		174.528.000,00			177.228.000,00
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			10.005.514.418,00	3.505.403.697,00	1.887.143.934,00			15.398.062.049,00
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.120.000,00				4.470.000,00		96.300.000,00	103.890.000,00
40	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					30.569.400,00			30.569.400,00
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				239.120.000,00				239.120.000,00
42	Beban Pakaian Batik Tradisional				255.875.000,00				255.875.000,00
43	Beban Pakaian Olahraga				80.630.000,00				80.630.000,00
44	Beban Komponen-Komponen Peralatan	3.479.033,00							
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00							
46	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	30.000,00							
47	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	34.391.000,00							
48	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			686.355.947,00		1.600.000,00			687.955.947,00
49	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.863.000,00		83.600.000,00	127.700.000,00	92.400.000,00			306.563.000,00
50	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			302.333.000,00					302.333.000,00
51	Beban Honorarium Rohaniwan			505.200.000,00	30.000.000,00				535.200.000,00
52	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			43.800.000,00					43.800.000,00
53	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			92.984.999,00					92.984.999,00
54	Beban Jasa Tenaga Kesehatan			258.964.155.536,00	5.473.384.228,70	8.624.973.269,00			273.062.513.033,70
55	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	500.000,00							
56	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			51.000.000,00					51.000.000,00
57	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial			1.025.000.000,00					1.025.000.000,00
58	Beban Jasa Tenaga Administrasi			14.422.840.000,00	166.200.000,00	259.200.000,00	23.400.000,00		14.871.640.000,00
59	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	102.633.000,00		426.400.000,00			37.500.000,00	1.058.276.997,00	1.624.809.997,00
60	Beban Jasa Tenaga Ahli	107.081.700,00			354.000.000,00				461.081.700,00
61	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.858.720,00				325.780.060,00			327.638.780,00
62	Beban Jasa Tenaga Keamanan			1.412.200.000,00	13.800.000,00	55.200.000,00		216.000.000,00	1.697.200.000,00
63	Beban Jasa Tenaga Supir			669.900.000,00					669.900.000,00
64	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	56.845.500,00							
65	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO				137.545.000,00	129.184.736,00			266.729.736,00
66	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			26.350.000,00					26.350.000,00

67	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			98.800.000,00		50.000.000,00			148.800.000,00
68	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	631.500,00		66.761.679,00	84.000,00	65.000,00	2,88		67.542.181,88
69	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi				42.600.000,00				42.600.000,00
70	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara					8.697.650,00			8.697.650,00
71	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi				31.014.549,00	15.600.000,00			46.614.549,00
72	Beban Jasa Pencucian Pakailan, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga						2.999.220,00		2.999.220,00
73	Beban Jasa Kalibrasi			25.545.000,00	85.070.400,00	179.522.177,00			290.137.577,00
74	Beban Jasa Pengolahan Sampah			79.200.000,00	73.406.500,00	12.000.000,00			164.606.500,00
75	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	4.210.000,00		13.240.094.190,00					13.244.304.190,00
76	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pernetretan			562.790.000,00		45.958.200,00			608.748.200,00
77	Beban Tagihan Telepon			58.032.837,00		14.791.590,00			72.824.427,00
78	Beban Tagihan Air			2.909.253.820,00	800.000,00				2.910.053.820,00
79	Beban Tagihan Listrik	20.294.000,00		9.136.775.209,00					9.157.069.209,00
80	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			8.236.000,00	8.640.000,00	4.130.000,00			21.006.000,00
81	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.826.300,00		106.228.475,00	63.244.111,00				174.298.886,00
82	Beban Paket/Pengiriman	240.000,00		7.659.150,00	893.350,00				8.792.500,00
83	Beban Registrasi/Keanggotaan			68.704.029,00	145.340.132,00				214.044.161,00
84	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			106.520.239,00		97.327.327,00			203.847.566,00
85	Beban Pengolahan Air Limbah			4.790.880.000,00		388.457.800,00			5.179.337.800,00
86	Beban Lembur				257.454.000,00				257.454.000,00
87	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			496.995.367,00					496.995.367,00
88	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			65.693.863,00	962.000,00	1.235.000,00			67.890.863,00
89	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			44.988.116,00	1.348.750,00	1.543.750,00			47.880.616,00
90	Beban Sewa Lapangan Lainnya				3.780.000,00				3.780.000,00
91	Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			70.732.492,00					70.732.492,00
92	Beban Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic			2.733.750.000,00					2.733.750.000,00
93	Beban Sewa Alat Laboratorium Patologi			15.968.767.350,00					15.968.767.350,00
94	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya						7.437.000,00		7.437.000,00
95	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			43.167.000,00					43.167.000,00
96	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga			26.964.800,00					26.964.800,00
97	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise						4.613.950,00		4.613.950,00
98	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural				37.858.000,00				37.858.000,00
99	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					224.663.199,00			224.663.199,00
100	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan				74.537.000,00				74.537.000,00
101	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			519.046.723,00	188.696.700,00	323.502.500,00			1.031.245.923,00
102	Beban Bimbingan Teknis			393.510.980,00					393.510.980,00
103	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				7.400.000,00				7.400.000,00
104	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	2.270.600,00							

105	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam			6.000.000,00					6.000.000,00
106	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set					47.350.000,00			47.350.000,00
107	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa							69.918.900,00	69.918.900,00
108	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan							44.988.300,00	44.988.300,00
109	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya					149.100.000,00		6.993.000,00	156.093.000,00
110	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				146.264.591,00				146.264.591,00
111	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat			739.690.000,00					739.690.000,00
112	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	460.000,00							
113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				406.353.200,00	165.681.042,00			572.034.242,00
114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel			285.911.750,00	49.367.000,00				335.278.750,00
115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.100.000,00				245.735.530,00			246.835.530,00
116	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum			1.153.485.589,00	54.875.100,00	23.820.600,00			1.232.181.289,00
117	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya			276.769.553,00					276.769.553,00
118	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya			378.031.175,00					378.031.175,00
119	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi					7.675.000,00			7.675.000,00
120	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya					6.000.000,00			6.000.000,00
121	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					50.040.000,00			50.040.000,00
122	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan							21.450.000,00	21.450.000,00
123	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.350.000,00				28.140.000,00		22.722.000,00	54.212.000,00
124	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	14.235.000,00							
125	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			500.087.000,00		217.449.820,00		65.913.180,00	783.450.000,00
126	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	630.000,00							

127	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi						1.281.000,00		1.281.000,00
128	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan			447.543.138,00					447.543.138,00
129	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman								-
130	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman			64.933.000,00					64.933.000,00
131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa					195.694.000,00			195.694.000,00
132	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Distribusi					76.334.145,00			76.334.145,00
133	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Potong	4.411.000,00							
134	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	3.600.000,00							
135	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.677.000,00		3.417.559.020,00		368.059.025,00			3.794.295.045,00
136	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.000.000,00			683.272.606,00				684.272.606,00
137	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.560.000,00							
138	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.515.000,00							
139	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi			58.800.000,00					58.800.000,00
140	Beban Uang Meugang-LO				23.500.000,00	23.500.000,00			47.000.000,00
141	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.750.000,00		4.240.921.462,00					4.248.671.462,00
TOTAL		3.770.957.028,00	351.952.424,00	648.633.094.592,00	21.750.678.051,70	24.719.860.270,00	752.192.874,00	1.776.058.737,88	701.754.793.977,58

Rincian Belanja BLUD SMKN

No	BLUD SMK	Belanja dari Penerimaan yang Disetor ke Rekening BLUD SMKN
1	SMKN 1 SABANG	30.626.574,00
2	SMKN 1 BANDA ACEH	537.314.280,00
3	SMKN 2 BANDA ACEH	142.482.000,00
4	SMKN 3 BANDA ACEH	1.348.432.861,00
5	SMKN 5 TELKOM BANDA ACEH	891.000,00
6	SMKN 1 AL- MUBARKEYA INGIN JAYA	17.327.000,00
7	SMKN 1 MESJID RAYA	22.270.000,00
8	SMKN 1 JANTHO	9.260.000,00
9	SMK PP N SAREE	16.014.600,00
10	SMKN 1 SIGLI	142.473.000,00
11	SMKN 1 PEUSANGAN	124.335.700,00
12	SMKN 1 GANDAPURA	74.866.500,00
13	SMKN 1 JEUNIEB	52.800.000,00
14	SMKN 2 BENER MERIAH	300.000,00
15	SMKN 5 BENER MERIAH	25.000.000,00
16	SMKN 1 TAKENGON	5.118.000,00
17	SMKN 2 TAKENGON	21.975.000,00
18	SMKN 5 TAKENGON	4.142.500,00
19	SMKN 1 LHOKSEUMAWE	74.373.000,00
20	SMKN 2 LHOKSEUMAWE	407.817.000,00
21	SMKN 3 LHOKSEUMAWE	260.234.800,00
22	SMKN 5 LHOKSEUMAWE	800.000,00
23	SMKN 6 LHOKSEUMAWE	1.700.000,00
24	SMKN 7 LHOKSEUMAWE	1.100.000,00
25	SMKN 1 BAKTIYA BARAT	14.110.000,00
26	SMKN 1 NISAM	12.850.000,00
27	SMKN 1 COT GIREK	3.300.000,00
28	SMKN 1 BAKTIYA	1.000.000,00
29	SMKN 1 SYAMTALIRA ARON	1.500.000,00
30	SMKN 1 TANAH JAMBO AYE	4.151.000,00
31	SMKN 1 DEWANTARA	8.578.000,00
32	SMKN 1 SAWANG	700.000,00

33	SMKN 1 PEUREULAK	10.430.000,00
34	SMKN 1 IDI	38.041.000,00
35	SMKN 1 DARUL AMAN	3.479.033,00
36	SMKN DARUL IHSAN	2.675.000,00
37	SMKN TAMAN FAJAR	14.400.000,00
38	SMKN 1 LANGSA	314.363.900,00
39	SMKN 2 LANGSA	143.425.000,00
40	SMKN 3 LANGSA	200.762.000,00
41	SMKN 6 LANGSA	500.000,00
42	SMKN 1 KUALA SIMPANG	44.858.000,00
43	SMKN 2 KARANG BARU	19.111.000,00
44	SMKN 3 KARANG BARU	50.250.000,00
45	SMKN 1 KARANG BARU	11.500.000,00
46	SMKN 1 KUTACANE	1.870.000,00
47	SMKN 2 KUTACANE	134.695.872,00
48	SMKN 1 ACEH BARAT DAYA	1.600.000,00
49	SMKN 1 LABUHAN HAJI	5.806.000,00
50	SMKN 1 PASIE RAJA	40.840.500,00
51	SMKN 2 SIMPANG KIRI	18.421.000,00
52	SMKN 1 KUALA BARU	1.270.000,00
53	SMKN 6 ACEH SINGKIL	59.950.000,00
54	SMKN 1 GUNUNG MERIAH	7.260.000,00
55	SMKN 1 SIMPANG KANAN	14.145.000,00
56	SMKN 1 TEUNOM	3.000.000,00
57	SMKN 2 MEULABOH	38.000.000,00
58	SMKN 3 MEULABOH	9.493.500,00
59	SMKN 4 MEULABOH	3.980.000,00
60	SMKN 1 MEUREUBO	1.100.000,00
JUMLAH		4.563.069.620,00

Realisasi Hibah dalam Bentuk Barang

No	SKPA	Barang yang Dihilahkan	Penerima Hibah	Dasar Hukum
1	Dinas Pendidikan Aceh	Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMAS Darul Quran Aceh Kab. Aceh Besar (DAK Fisik SMA)	IPA SMAS Darul Quran Aceh Kab. Aceh Besar	SP No : 008/DAK/PSE-SMA/01.0041/2025 Tanggal 21 Maret 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMA TEUNGKU CHIK KUTA KARANG Kab. Aceh Besar (DAK Fisik SMA)	IPA SMA TEUNGKU CHIK KUTA KARANG Kab. Aceh Besar	SP No : 006/DAK/PSE-SMA/01.0041/2025 Tanggal 20 Maret 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMAS ABULYATAMA Kab. Aceh Besar (DAK Fisik SMA)	IPA SMAS ABULYATAMA Kab. Aceh Besar	SP No : 005/DAK/PSE-SMA/01.0041/2025 Tanggal 24 Maret 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMA PLUS AL-ATHIYAH BANDA ACEH Kota Banda Aceh (DAK Fisik SMA)	IPA SMA PLUS AL-ATHIYAH BANDA ACEH Kota Banda Aceh	SP No : 032/DAK/PSE-SMA/01.0041/2025 Tanggal 21 Maret 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMA ISLAM SWASTA MIFTAHUL ILMI Kab. Aceh Tamiang (DAK Fisik SMA)	IPA SMA ISLAM SWASTA MIFTAHUL ILMI Kab. Aceh Tamiang	SP No : 018/DAK/PSE-SMA/01.0041/2025 Tanggal 21 Maret 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMA HIDAYATULLAH Kota Subulussalam (DAK Fisik SMA)	IPA SMA HIDAYATULLAH Kota Subulussalam	SP No : 034/DAK/PSE-SMA/01.0041/2025 Tanggal 21 Maret 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMA IT ASSALAM ISLAMIC SCHOOL Kab. Bireuen (DAK Fisik SMA)	IPA SMA IT ASSALAM ISLAMIC SCHOOL Kab. Bireuen	SP No : 021/DAK/PSE-SMA/01.0041/2025 Tanggal 21 Maret 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMAS MUHAMMADIYAH GUNUNG MERIAH Kab. Aceh Singkil (DAK Fisik SMA)	IPA SMAS MUHAMMADIYAH GUNUNG MERIAH Kab. Aceh Singkil	SP No : 017/DAK/PSE-SMA/01.0041/2025 Tanggal 21 Maret 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan SLB YPPC BANDA ACEH Kota Banda Aceh (DAK Fisik SLB)	SLB YPPC BANDA ACEH Kota Banda Aceh	SP No: 050/DAK/PSE-SLB/03.0040/2025 Tgl 14 Juli 2025
		Pengadaan peralatan pendidikan SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen Kab. Bireuen (DAK Fisik SLB)	SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen Kab. Bireuen	SP No: 049/DAK/PSE-SLB/03.0040/2025 Tgl 14 Juli 2025
		Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SLB BUKESRA ACEH Kota Banda Aceh (DAK Fisik SLB)	SLB BUKESRA ACEH Kota Banda Aceh	SP No: 43/DAK/PSE-SLB/03.0040/2025 Tgl 12 Juni 2025
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	Pengadaan Peralatan dan Alat Pendukung lainnya untuk Usaha Catering. Kelompok PUTRI MERIAH BELANGI, Gp. Bahgie Bertona, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah (DANA OTSUS)	Kelompok PUTRI MERIAH BELANGI	SK Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1032/2025
		Pengadaan Usaha Doorsmer dan Alat Pendukung Lainnya untuk Kelompok Sukses Abadi Bersama di Banda Aceh (DANA OTSUS)	Kelompok Sukses Abadi Bersama	SK Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1032/2025
		Pengadaan Pendukung Alat Kerja Digital Printing untuk Kelompok Aneuk Muda Kreatif Kec. Samalanga Kab. Bireuen (DANA OTSUS)	Kelompok Aneuk Muda Kreatif	SK Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1032/2025
		Pengadaan Peralatan CoffeShop dan Peralatan Pendukung Lainnya Bagi Kelompok Usaha Maju GATA Kopi di Banda Aceh (DANA OTSUS)	Kelompok Usaha Maju GATA Kopi	SK Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1032/2025
		Pengadaan Mesin UPVC Dan Peralatan Bengkel Kelompok Aneuk Metuah Gampong Teubang Phui Baroh, Kec Montasik Kab. Aceh Besar (DANA OTSUS)	Kelompok Aneuk Metuah	SK Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1032/2025
		PENGADAAN PERALATAN AIR MINUM DALAM KEMASAN UNTUK KELOMPOK ARSYIFA JAYA MANDIRI DI KAB ACEH SELATAN (DANA OTSUS)	KELOMPOK ARSYIFA JAYA MANDIRI	SK Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1032/2025
		Pengadaan perlengkapan Wirausaha pemula Alat-alat Percetakan untuk kelompok Indah teupin bersama Gampong Teupin Drum Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur (DANA OTSUS)	kelompok Indah teupin bersama	SK Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1032/2025
		Pengadaan Peralatan Usaha Digital Printing Untuk Koperasi Konsumen Mitra Kebangsaan Indonesia Syariah (DANA OTSUS)	Koperasi Konsumen Mitra Kebangsaan Indonesia Syariah	SK Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1032/2025
		Pembangunan Lantai Jemur Kelompok Tusam Indah Kab. Aceh Tenggara Tahun 2025 (OTSUS)	Kelompok Tusam Indah	SK Gubernur Aceh Nomor 500.1.3.3/975/2025
		Pembangunan Lantai Jemur Kelompok Sepakat Kab. Aceh Tenggara Tahun 2025 (OTSUS)	Kelompok Sepakat	SK Gubernur Aceh Nomor 500.1.3.3/975/2025
3	Dinas Pangan Aceh	Pembangunan Lantai Jemur Kelompok Tuah Ame Kab. Aceh Tenggara Tahun 2025 (OTSUS)	Kelompok Tuah Ame	SK Gubernur Aceh Nomor 500.1.3.3/975/2025
		Pengadaan Peralatan Pendukung Kelompok Khumah Mbelin Kab. Aceh Tenggara Tahun 2025 (OTSUS)	Kelompok Khumah	SK Gubernur Aceh Nomor 500.1.3.3/975/2025
4	Dinas Syariat Islam Aceh	Pengadaan Sound System	Masjid Darul Ulya Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	SK Gubernur Aceh Nomor 900.1.13.5/602/2025

No	SKPA	Barang yang Dihilangkan	Penerima Hibah	Dasar Hukum
5	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	pembangunan/Rehabilitasi Pesantren/Dayah/Balai Pengajian di Pemerintah Aceh	Panitia pembangunan Dayah di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya , Bireuen, lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Kota Subulussalam, Aceh Singkil	SK Gubernur Aceh Nomor 800.2/760/2025
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Pekerjaan Pembangunan BINDA (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2025
		Pekerjaan Rehabilitasi Pagar Kantor Bais (Badan Intelegen Strategis) Neusu Kota Banda Aceh (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2025
		Pembangunan Gedung Propam Polda Aceh (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2025
		Lanjutan Pembangunan Gedung Diklat Kejaksaan Tinggi Aceh (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2026
		Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Wakajati Aceh (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2027
		Lanjutan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2028
		Lanjutan Pembangunan Masjid Alue Peunyareng (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2029
		Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Aceh (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2030
		Lanjutan Pembangunan Aula Kodam (OA)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2031
		Rehabilitasi Gedung Direktorat Intelkam Polda Aceh (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2032
		Rehabilitasi Ruangan Forkopimda (Asisten Perdata Umum) Kejaksaan Tinggi Aceh (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2033
		Lanjutan Pembangunan Gedung RSGM USK (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2034
		Rehabilitasi Asrama Putra Leuser Bogor (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2035
		Lanjutan Pembangunan Asrama Putra NAD Surabaya (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2036

No	SKPA	Barang yang Dihilangkan	Penerima Hibah	Dasar Hukum
		Lanjutan Pembangunan Asrama Cut Nyak Dhien Yogyakarta (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2037
		Lanjutan Pembangunan Asrama Putri Semarang (OTSUS ACEH)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2038
		pembangunan/Rehabilitasi Masjid/Mushalla di Pemerintah Aceh	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/860/2025 Tanggal 28 April 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun Anggaran 2039
7	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	Lanjutan Pembangunan Lapangan Tembak Kejati Aceh, Tahun Anggaran 2025 (DANA OTSUS)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 400.4/1382/2025 Tanggal 17 Maret 2025 Tanggal 20 November 2025 Tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah berupa Barang Dan Jasa Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2025
8	Dinas Peternakan Aceh	Pengadaan Sapi Simental Kelompok BUMI SAREE ACEH Gampong Saree Aceh Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar (OTSUS)	Kelompok BUMI SAREE ACEH	SK Gubernur Aceh Nomor 500.7/1037/2025
		Pengadaan ternak lokal untuk dibagikan ke masyarakat Kelompok Ternak di Kabupaten Aceh Tenggara (OTSUS)	Kelompok Ternak di Kabupaten Aceh Tenggara	SK Gubernur Aceh Nomor 500.7/1037/2025
9	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	Pembangunan Gudang Pengolahan Ikan Yayasan Astra Indonesia Desa Lamtutui Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Sub Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik (Otsus)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1452/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2025
		Pembangunan Pasar di Desa Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Sub Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik (Otsus)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1452/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2026
		Pembangunan Pasar di Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Sub Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik (Otsus)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1452/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2027
		Pemberdayaan Ekonomi Bagi Mantan Kombatan, Eks Tapol/Napol dan Korban Konflik Pengawasan Pembangunan Pasar di Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik (Otsus)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1452/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2029
		Pembangunan Kandang Ayam Broiler Close House Kelompok Usaha Jurong Blang Batee Raya Desa Lamjruen Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar Sub Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik (Otsus)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/1452/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2028
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Pekerjaan Pengadaan Videotron (DAU)	Lembaga yang bersangkutan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.1.3.3/1063/2025 Tanggal 10 Juni 2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa Dari Pemerintah Aceh Untuk Pengadaan Videotron Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2025

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.130.000.000,00	4.507.731.090,00	87,87	2.085.147.500,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	246.258.767,00	224.883.967,00	91,32	4.970.990.230,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	45.663.707.039,00	45.393.101.956,00	99,41	11.240.864.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	418.478.000,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	334.000.000,00	333.799.200,00	99,94	-
6	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	666.000.000,00	661.338.000,00	99,30	110.000.000,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	66.712.702,00	50.281.000,00	75,37	38.805.000,00
8	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	20.236.575,00	16.126.000,00	79,69	28.709.000,00
9	Belanja Modal Alat Ukur	272.698.140,00	265.956.000,00	97,53	278.640.000,00
10	Belanja Modal Alat Pengolahan	213.512.911,41	194.704.050,00	91,19	1.782.565.900,00
11	Belanja Modal Alat Kantor	18.512.918.083,25	18.193.868.503,00	98,28	9.759.217.434,06
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	165.730.201.009,91	163.059.578.410,38	98,39	182.085.917.771,00
13	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.181.427.530,00	1.164.835.828,00	98,60	1.206.312.900,00
14	Belanja Modal Alat Studio	35.146.704.115,00	34.759.035.014,00	98,90	7.185.488.250,00
15	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.205.577.273,80	1.182.964.663,00	98,12	1.384.190.430,00
16	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	4.095.530.000,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	36.780.014.068,00	34.955.794.398,00	95,04	6.526.392.610,00
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	363.125.000,00	362.052.500,00	99,70	2.755.000,00
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.530.363.900,05	1.248.187.659,00	81,56	1.217.139.770,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	138.248.295.510,00	136.609.098.888,00	98,81	141.614.015.626,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	48.817.297.447,00	48.202.641.890,00	98,74	17.552.130.750,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.575.216.193,00	15.396.651.258,00	98,85	8.885.631.296,00
23	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	3.000.000,00	-	-	-
24	Belanja Modal Alat SAR	-	-	-	4.533.044.000,00
25	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	-	-	-	10.000.000,00
26	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	27.000.000,00	26.751.000,00	99,08	26.928.600,00
27	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	39.283.181.376,00	39.247.564.494,00	99,91	1.245.556.555,00
28	Belanja Modal Peralatan Olahraga	38.000.000,00	37.600.000,00	98,95	207.634.020,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	228.075.000,00	129.179.000,00	56,64	
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.323.214.455,00	1.304.796.820,00	56,03	1.385.155.852,00
Jumlah		557.606.737.095,42	547.528.521.588,38	98,19	409.877.240.494,06

Rincian Kas BLUD SMKN

No	BLUD SMK	Kas Tunai	Kas di Rekening BLUD SMKN	Saldo Akhir Kas di BLUD SMKN
1	SMKN 1 SABANG	-	29.425.426,00	29.425.426,00
2	SMKN 1 BANDA ACEH	-	16.206.438,00	16.206.438,00
3	SMKN 2 BANDA ACEH	-	23.807.500,00	23.807.500,00
4	SMKN 3 BANDA ACEH	-	91.070.469,00	91.070.469,00
5	SMKN 5 TELKOM BANDA ACEH	-	5.559.000,00	5.559.000,00
6	SMKN 1 AL- MUBARKEYA INGIN JAYA	-	23.673.220,00	23.673.220,00
7	SMKN 1 MESJID RAYA	-	7.960.000,00	7.960.000,00
8	SMKN 1 JANTHO	-	4.809.757,89	4.809.757,89
9	SMK PP N SAREE	-	55.231.462,00	55.231.462,00
10	SMKN 1 SIGLI	-	42.445.900,00	42.445.900,00
11	SMKN 1 PEUSANGAN	-	-	-
12	SMKN 1 GANDAPURA	-	-	-
13	SMKN 1 JEUNIEB	-	-	-
14	SMKN 1 BENER MERIAH	-	4.164.000,00	4.164.000,00
15	SMKN 2 BENER MERIAH	-	2.700.000,00	2.700.000,00
16	SMKN 5 BENER MERIAH	-	2.870.000,00	2.870.000,00
17	SMKN 1 TAKENGON	-	28.959.000,00	28.959.000,00
18	SMKN 2 TAKENGON	-	37.485.000,00	37.485.000,00
19	SMKN 3 TAKENGON	-	710.000,00	710.000,00
20	SMKN 5 TAKENGON	-	6.550,26	6.550,26
21	SMKN 1 LHOKSEUMAWE	-	9.614.500,00	9.614.500,00
22	SMKN 2 LHOKSEUMAWE	-	-	-
23	SMKN 3 LHOKSEUMAWE	-	5.693.000,00	5.693.000,00
24	SMKN 5 LHOKSEUMAWE	-	2.230.000,00	2.230.000,00
25	SMKN 6 LHOKSEUMAWE	-	2.200.000,00	2.200.000,00
26	SMKN 7 LHOKSEUMAWE	-	-	-
27	SMKN 1 BAKTIYA BARAT	-	2.550.000,00	2.550.000,00
28	SMKN 1 NISAM	-	13.594.000,00	13.594.000,00
29	SMKN 1 LHOKSUKON	-	3.005.000,00	3.005.000,00
30	SMKN 1 COT GIREK	-	290.000,00	290.000,00
31	SMKN 1 BAKTIYA	-	330.000,00	330.000,00
32	SMKN 1 TANAH LUAS	-	1.120.000,00	1.120.000,00
33	SMKN 1 SYAMTALIRA ARON	-	1.800.000,00	1.800.000,00
34	SMKN 1 TANAH JAMBO AYE	-	5.692.600,00	5.692.600,00
35	SMKN 1 DEWANTARA	-	-	-

36	SMKN 1 SAWANG	-	460.000,00	460.000,00
37	SMKN 1 PEUREULAK	-	9.677.900,00	9.677.900,00
38	SMKN 1 IDI	-	-	-
39	SMKN 1 DARUL AMAN	-	875.307,00	875.307,00
40	SMKN 1 INDRA MAKMU	-	100.000,00	100.000,00
41	SMKN DARUL IHSAN	-	-	-
42	SMKN TAMAN FAJAR	-	-	-
43	SMKN 1 LANGSA	-	307.000,00	307.000,00
44	SMKN 2 LANGSA	-	4.483.612,00	4.483.612,00
45	SMKN 3 LANGSA	-	425.000,00	425.000,00
46	SMKN 6 LANGSA	-	3.144.000,00	3.144.000,00
47	SMKN 1 KUALA SIMPANG	-	9.266.650,00	9.266.650,00
48	SMKN 2 KARANG BARU	-	10.677.400,00	10.677.400,00
49	SMKN 3 KARANG BARU	-	3.766.000,00	3.766.000,00
50	SMKN 1 BENDAHARA	-	6.200.000,00	6.200.000,00
51	SMKN 1 KARANG BARU	-	2.037.766,00	2.037.766,00
52	SMKN 1 KUTACANE	-	552.036,61	552.036,61
53	SMKN 2 KUTACANE	-	1.514,94	1.514,94
54	SMK PP N KUTACANE	-	6.828.659,28	6.828.659,28
55	SMKN 1 ACEH BARAT DAYA	-	2.400.000,00	2.400.000,00
56	SMKN 1 LABUHAN HAJI	-	5.882.000,00	5.882.000,00
57	SMKN 1 PASIE RAJA	-	1.781.000,00	1.781.000,00
58	SMKN 2 SIMPANG KIRI	-	-	-
59	SMKN 1 KUTA BAHARU	-	500.000,00	500.000,00
60	SMKN 1 KUALA BARU	-	830.000,00	830.000,00
61	SMKN 6 ACEH SINGKIL	-	-	-
62	SMKN 1 GUNUNG MERIAH	-	-	-
63	SMKN 1 SIMPANG KANAN	-	-	-
64	SMKN 1 TEUNOM	-	1.835.000,00	1.835.000,00
65	SMKN 2 MEULABOH	-	35.624.610,83	35.624.610,83
66	SMKN 3 MEULABOH	-	2.699.395,00	2.699.395,00
67	SMKN 4 MEULABOH	-	16.038.000,00	16.038.000,00
68	SMKN 1 MEUREUBO	-	1.050.243,49	1.050.243,49
JUMLAH		-	552.645.918,30	552.645.918,30

Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Wajib Pajak	Lokasi Wajib Pajak	Masa Pajak Terutang	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	
1	PT. Pupuk Iskandar Muda	Aceh Utara	November 2025	-	15.754.342,00		15.754.342,00
2	PDAM Tirta Mon Pase	Aceh Utara	2007 - Juni 2014	437.715.625,00		30.000.000,00	407.715.625,00
3	PT. PTPN-I (Kb. Cot Girek)	Aceh Utara	September - Oktober 2024	6.449.040,00		6.449.040,00	-
4	PDAM Tirta Peusada	Aceh Timur	2012 - Agustus 2017	88.563.030,00		12.000.000,00	76.563.030,00
5	PDAM Tirta Peusada	Aceh Timur	November 2025	2.708.740,00	2.526.360,00	2.708.740,00	2.526.360,00
6	Perumdam Tirta Keumuneng	Langsa	2012 - Agustus 2017	103.841.200,00		18.000.000,00	85.841.200,00
7	PT. Pertamina EP Hulu Migas	Aceh Tamiang	Januari - Desember 2019	370.010,00			370.010,00
8	PT. Bahari Dwi Kencana Lestari (PT. Bumi Sama Ganda)	Aceh Tamiang	Mei 2016 - Februari 2017	9.090.360,00			9.090.360,00
9	PTPN - I Kb. Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	September - Oktober 2024	8.810.220,00		8.810.220,00	-
10	PDAM Tirta Meulaboh	Aceh Barat	2009 - 2012	176.814.075,00		1.800.000,00	175.014.075,00
11	PT. Energi Alam Raya Semesta	Nagan Raya	Mei 2016-Desember 2018	2.646.000,00			2.646.000,00
12	PDAM Tirta Krueng Meureudue	Pidie Jaya	Januari - Desember 2018	5.276.680,00		5.276.680,00	-
13	PDAM Tirta Krueng Meureudue	Pidie Jaya	Januari - Desember 2019	9.363.230,00		9.363.230,00	-
14	PDAM Tirta Krueng Meureudue	Pidie Jaya	Januari - September 2020	7.832.090,00		2.860.090,00	4.972.000,00
15	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata	Aceh Jaya	Januari - Desember 2018	12.957.880,00		4.000.000,00	8.957.880,00
16	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata	Aceh Jaya	Januari - Desember 2019	10.329.130,00			10.329.130,00
17	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1	Aceh Singkil	April - September 2018	3.358.452,00			3.358.452,00
18	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	Pidie	November 2024	1.349.920,00		1.349.920,00	-
19	PT. Ika Bina Agro Wisesa	Aceh Utara	November 2024	603.120,00		603.120,00	-
20	PT. Perkasa Subur Sakti/BSF	Aceh Timur	November 2025	4.048.860,00	907.440,00	4.048.860,00	907.440,00
21	PT. Parasawita	Aceh Tamiang	Desember 2023 - Oktober 2024	3.146.940,00		3.146.940,00	-
22	PT. Sisirau	Aceh Tamiang	Oktober - November 2024	1.616.700,00		1.616.700,00	-
23	PT. Agro Sinergi Nusantara (Batee Puteh)	Aceh Barat	November 2024	919.920,00		919.920,00	-
24	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	Aceh Barat	November 2024	651.300,00		651.300,00	-
25	PT. Seunagan Energi	Nagan Raya	November 2024	34.446.555,00		34.446.555,00	-
26	PT. Bumi Daya Agrotamas	Subulussalam	November 2025	-	1.888.320,00		1.888.320,00
27	PT. Socfindo Lae Butar	Aceh Singkil	November 2025	-	609.960,00		609.960,00
Jumlah				932.909.077,00	21.686.422,00	148.051.315,00	806.544.184,00

Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan TA 2025 dan TA 2024

No.	Wajib Pajak	2025			2024		
		Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 2025	Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 2024
1	PT. Pupuk Iskandar Muda	15.754.342,00	0,5%	(78.771,71)	-		-
2	PDAM Tirta Mon Pase	407.715.625,00	100%	(407.715.625,00)	437.715.625,00	100%	(437.715.625,00)
3	PT. PTPN-I (Kb. Cot Girek)	-	100%	-	6.449.040,00	0,5%	(32.245,20)
4	PDAM Tirta Peusada	76.563.030,00	100%	(76.563.030,00)	88.563.030,00	100%	(88.563.030,00)
5	PDAM Tirta Peusada	2.526.360,00	0,5%	(12.631,80)	2.708.740,00	0,5%	(13.543,70)
6	Perumdam Tirta Keumuneng	85.841.200,00	100%	(85.841.200,00)	103.841.200,00	100%	(103.841.200,00)
7	PT. Pertamina EP Hulu Migas	370.010,00	100%	(370.010,00)	370.010,00	100%	(370.010,00)
8	PT. Bahari Dwi Kencana Lestari (PT. Bumi Sama Ganda)	9.090.360,00	100%	(9.090.360,00)	9.090.360,00	100%	(9.090.360,00)
9	PTPN - I Kb. Aceh Tamiang	-	100%	-	8.810.220,00	0,5%	(44.051,10)
10	PDAM Tirta Meulaboh	175.014.075,00	100%	(175.014.075,00)	176.814.075,00	100%	(176.814.075,00)
11	PT. Karya Tanah Subur	-	100%	-	-	100%	-
12	PT. Energi Alam Raya Semesta	2.646.000,00	100%	(2.646.000,00)	2.646.000,00	100%	(2.646.000,00)
13	PDAM Tirta Krueng Meureudue	-	0,5%	-	5.276.680,00	100%	(5.276.680,00)
14	PDAM Tirta Krueng Meureudue	-	0,5%	-	9.363.230,00	100%	(9.363.230,00)
15	PDAM Tirta Krueng Meureudue	4.972.000,00	100%	(4.972.000,00)	7.832.090,00	100%	(7.832.090,00)
16	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata	8.957.880,00	100%	(8.957.880,00)	12.957.880,00	100%	(12.957.880,00)
17	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata	10.329.130,00	100%	(10.329.130,00)	10.329.130,00	100%	(10.329.130,00)
18	PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1	3.358.452,00	100%	(3.358.452,00)	3.358.452,00	100%	(3.358.452,00)
19	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	-		-	1.349.920,00	0,5%	(6.749,60)
20	PT. Ika Bina Agro Wisesa	-		-	603.120,00	0,5%	(3.015,60)
21	PT. Perkasa Subur Sakti/BSF	907.440,00		(4.537,20)	4.048.860,00	0,5%	(20.244,30)
22	PT. Parasawita	-		-	3.146.940,00	0,5%	(15.734,70)
23	PT. Sisirau	-		-	1.616.700,00	0,5%	(8.083,50)
24	PT. Agro Sinergi Nusantara (Batee Puteh)	-		-	919.920,00	0,5%	(4.599,60)
25	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	-		-	651.300,00	0,5%	(3.256,50)
26	PT. Seunagan Energi	-		-	34.446.555,00	0,5%	(172.232,78)
27	PT. Bumi Daya Agrotamas	1.888.320,00	0,5%	(9.441,60)	-	0,0%	-
28	PT. Socfindo Lae Butar	609.960,00	0,5%	(3.049,80)	-	0,0%	-
	Jumlah	806.544.184,00		(784.966.194,11)	932.909.077,00		(868.481.518,58)

Piutang Retribusi

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Bpjs Kesehatan	Bpjs Kesehatan	2025	103.456.047.673,00
		Dinas Kesehatan Aceh	Dinas Kesehatan Aceh	2025	609.689.117,00
		Jasa Raharja	Jasa Raharja	2025	729.598.948,00
		Kemenkes	Kemenkes	2025	-
		Bpjs Ketenagakerjaan	Bpjs Ketenagakerjaan	2025	135.401.090,00
		Piutang Umum	Piutang Umum	2025	4.733.395.382,00
		Bank Indonesia	Bank Indonesia	2025	470.000,00
		Piutang Nayaka	Piutang Nayaka	2025	7.345.028,00
		Telkom	Telkom	2025	10.132.486,00
		Mifa Bersaudara	Mifa Bersaudara	2025	11.557.621,00
		Pt. Pln	Pt. Pln	2025	1.489.878.509,00
		Rs Bhayangkara Polda Aceh	Rs Bhayangkara Polda Aceh	2025	38.880.611,00
		Ykkbi	Ykkbi	2025	1.470.000,00
		Medco	Medco	2025	2.299.990,00
		Ramayana	Ramayana	2025	178.853.289,00
		Fullerton	Fullerton	2025	1.190.000,00
		Mandiri Inhealth	Mandiri Inhealth	2025	543.847.302,00
		Lppnpi/ Airnav	Lppnpi/ Airnav	2025	-
		Rs Pertamina	Rs Pertamina	2025	106.206.704,00
		Pertamina Hulu Energi North	Pertamina Hulu Energi North	2025	13.064.873,00
		Yayasan Kesehatan Pertamina	Yayasan Kesehatan Pertamina	2025	50.704.536,00
		Kesdam	Kesdam	2025	-
		Prodia Widya Husada	Prodia Widya Husada	2025	2.320.000,00
		Nusantara Power	Nusantara Power	2025	4.036.857,00
		Asuransi Jiwa Astra	Asuransi Jiwa Astra	2025	2.295.070,00
		Pembangunan Perumahan (Pp)	Pembangunan Perumahan (Pp)	2025	24.992.177,00
		Hanwa Life Insurance	Hanwa Life Insurance	2025	116.000,00
		Halodoc	Halodoc	2025	405.876,00
		Lpsk	Lpsk	2025	6.285.000,00
		Nusantara Asistama Perkasa	Nusantara Asistama Perkasa	2025	-
		Kesbangpol Aceh	Kesbangpol Aceh	2025	8.600.800,00
		Axa Insurance Indonesia	Axa Insurance Indonesia	2025	388.263,00
		Surveyor Indonesia	Surveyor Indonesia	2025	-
		Asuransi Jiwa Manulife Indonesia-Halodoc	Asuransi Jiwa Manulife Indonesia-Halodoc	2025	940.000,00
		Rumah Sakit Umum Cempaka Lima	Rumah Sakit Umum Cempaka Lima	2025	169.477.000,00
		Asuransi Intra Asia	Asuransi Intra Asia	2025	1.916.000,00
		Jasindo	Jasindo	2025	3.090.264,00
		Sunday Insurance Indonesia	Sunday Insurance Indonesia	2025	436.095,00
		Petrochina	Petrochina	2025	-
		Asuransi Bri Life	Asuransi Bri Life	2025	67.147.180,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		Pertamina Ep Asset 2	Pertamina Ep Asset 2	2025	-
		Bp Berau	Bp Berau	2025	758.656,00
		Chubb Life Insurance	Chubb Life Insurance	2025	-
		Yakes Pegawai Ojk	Yakes Pegawai Ojk	2025	-
		Parama Global Inspira	Parama Global Inspira	2025	-
		Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi	Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi	2025	-
		Pt. Pembangunan Aceh	Pt. Pembangunan Aceh	2025	10.213.834,00
		Asuransi Sequis Financial	Asuransi Sequis Financial	2025	-
		Triangle Pase-Fullerton Health Indonesia	Triangle Pase-Fullerton Health Indonesia	2025	714.720,00
		Bpma-Fullerton Health Indonesia	Bpma-Fullerton Health Indonesia	2025	74.912.141,00
		Rs Bhayangkara Polda Aceh	Rs Bhayangkara Polda Aceh	2025	9.225.000,00
		Angkasa Pura Indonesia	Angkasa Pura Indonesia	2025	84.490.690,00
		Bara Energi Lestari	Bara Energi Lestari	2025	1.870.638,00
		Asuransi Takaful Keluarga	Asuransi Takaful Keluarga	2025	17.695.074,00
		Medika Loka Aceh-Rs Hermina	Medika Loka Aceh-Rs Hermina	2025	7.100.000,00
		Pt. Taspen	Pt. Taspen	2025	1.447.178,00
		Pema Global Energi	Pema Global Energi	2025	668.820,00
		Rs Pendidikan Usk	Rs Pendidikan Usk	2025	875.000,00
	Jumlah				112.622.451.492,00
2	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	BPJS Kesehatan	Klaim BPJS Desember	2025	0,00
		BPJS Kesehatan	Klaim Pending BPJS Juli	2025	30.303.400,00
		BPJS Kesehatan	Klaim Pending BPJS Agustus	2025	274.536.676,00
		BPJS Kesehatan	Klaim Pending BPJS September	2025	422.840.900,00
		BPJS Kesehatan	Klaim Pending BPJS Oktober	2025	323.737.500,00
		BPJS Kesehatan	Klaim Pending BPJS November	2025	351.692.900,00
		Obat Kemo dan Kronis	Klaim Obat Kemo dan Kronis Oktober	2025	21.711.576,00
		Obat Kemo dan Kronis	Klaim Obat Kemo dan Kronis November	2025	22.053.195,00
		Obat Kemo dan Kronis	Klaim Obat Kemo dan Kronis Desember	2025	28.780.372,00
		Obat Kemo dan Kronis	Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis Juli	2025	1.658.872,00
		Obat Kemo dan Kronis	Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis Agustus	2025	4.056.034,00
		Obat Kemo dan Kronis	Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis September	2025	4.980.924,00
		Obat Kemo dan Kronis	Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis Oktober	2025	3.764.625,00
		Ambulance	Klaim Ambulan September	2025	5.600.000,00
		Ambulance	Klaim Ambulan Oktober	2025	4.599.000,00
		Ambulance	Klaim Ambulan November	2025	1.890.000,00
		Ambulance	Klaim Ambulan Desember	2025	1.890.000,00
		Laboratorium PA	Klaim Lab PA Oktober RS. Ibnu Sina	2025	3.797.000,00
		Laboratorium PA	Klaim Lab PA November RS. Ibnu Sina	2025	1.914.000,00
		Laboratorium PA	Klaim Lab PA Desember RS. Ibnu Sina	2025	2.126.000,00
		CT Scan	Klaim CT Scan Oktober RS. Ibnu Sina	2025	5.215.000,00
		CT Scan	Klaim CT Scan November RS. Ibnu Sina	2025	7.450.000,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		CT Scan	Klaim CT Scan Desember RS. Ibnu Sina	2025	13.410.000,00
		Radiologi	Klaim Radiologi Oktober RS. Meuraxa	2025	140.317.000,00
		Radiologi	Klaim Radiologi November RS. Meuraxa	2025	90.847.000,00
		Radiologi	Klaim Radiologi Desember RS. Meuraxa	2025	126.921.000,00
		Radiologi	Klaim Radiologi November RSUZA	2025	132.892.000,00
		Radiologi	Klaim Radiologi Desember RSUZA	2025	37.990.000,00
		CT Scan	Klaim CT Scan Desember Klinik Kasehat Walafiat	2025	1.490.000,00
		Laboratorium PA	Klaim Lab PA Desember RSUD Kota Sabang	2025	957.000,00
	Jumlah				2.069.421.974,00
3	Rumah Sakit Jiwa	Pasien Jaminan BRA (2008)	Pasien Jaminan BRA (2008)	2008	12.487.000,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2010	4.744.000,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2011	8.925.000,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2012	26.048.000,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2013	31.741.500,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2014	18.927.500,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2015	3.030.000,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2016	14.126.747,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2017	138.250.822,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2018	82.656.248,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2019	9.303.982,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2020	355.362.305,00
		Pasien Umum	Piutang Pasien Umum	2021	610.500.789,00
			Klaim Covid 19 tahun 2022 (Dispute) (BAHV 0723/TPKD.11/10.2023	2023	0,00
			Klaim Susulan Juli	2024	0,00
			Klaim IPWL Rawat Inap Agustus	2024	0,00
			Klaim IPWL Rawat Inap September	2024	0,00
			Klaim IPWL Rawat Jalan Oktober	2024	0,00
			Klaim IPWL Rawat Inap Oktober	2024	0,00
			Klaim IPWL Rawat Inap November	2024	0,00
			Klaim Reguler BPJS Desember	2024	0,00
	Jumlah				1.316.103.893,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Banda Aceh	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Banda Aceh	2025	63.562.200,00
		Banda Aceh	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Banda Aceh	2025	64.271.090,00
		Banda Aceh	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Banda Aceh	2025	48.700.860,00
		Banda Aceh	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Banda Aceh	2025	52.400.000,00
		Aceh Besar	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Aceh Besar	2026	32.565.000,00
	Jumlah				261.499.150,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Sewa Kantin Utama Museum Tsunami	Sewa Kantin Utama Museum Tsunami	2024	13.360.000,00
		Sewa Kantin Dinas	Sewa Kantin Dinas	2024	5.040.000,00
		Sewa Kantin Dinas	Sewa Kantin Dinas	2023	1.500.000,00
		Sewa Rumah Dinas (SAFRIANI)	Sewa Rumah Dinas (SAFRIANI)	2023	2.700.000,00
		Sewa Mess Taman Budaya (an. Afrizal)	Sewa Mess Taman Budaya (an. Afrizal)	2023	1.500.000,00
		Sewa Mess Taman Budaya (an. M Nasir)	Sewa Mess Taman Budaya (an. M Nasir)	2023	4.000.000,00
		Sewa Mess Taman Budaya (an. LK Ara)	Sewa Mess Taman Budaya (an. LK Ara)	2023	4.000.000,00
		Sewa Rumah Dinas Prada (SAFRIANI)	Sewa Rumah Dinas Prada (SAFRIANI)	2024	4.000.000,00
		Sewa Rumah Dinas Prada (an.BRIMSYAH)	Sewa Rumah Dinas Prada (an.BRIMSYAH)	2025	3.000.000,00
Jumlah					39.100.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		UPTD PPS KUTARAJA		
		Murdani Ahmad	Gudang Pengepakan No.04	2020	5.200.000,00
		Tabrani/Abu Salam	Gudang Pengepakan No.06	2020	5.200.000,00
		Abu Bakar	Gudang Pengepakan No.09	2020	5.200.000,00
		Tabrani/Abu Salam	Gudang Pengepakan No.06	2021	7.920.000,00
		Abu Bakar	Gudang Pengepakan No.09	2021	7.920.000,00
		Murdani	Gudang Pengepakan No.11	2021	13.120.000,00
		Irwansyah Ibrahim	Gudang Pengepakan No.15	2021	2.720.000,00
		Irfan aulia	Gudang Pengepakan No.16	2021	2.720.000,00
		Agus Susandi	Gudang Pengepakan No.17	2021	2.720.000,00
		Murdani Ahmad	Gudang Pengepakan No.04	2022	7.920.000,00
		Suherman (Pak Man)	Gudang Pengepakan No.05	2022	5.840.000,00
		Tabrani/Abu Salam	Gudang Pengepakan No.06	2022	7.920.000,00
		Abu Bakar	Gudang Pengepakan No.09	2022	7.920.000,00
		Murdani	Gudang Pengepakan No.11	2022	7.920.000,00
		Murdani Ahmad	Gudang Pengepakan No.04	2023	7.920.000,00
		Suherman (Pak Man)	Gudang Pengepakan No.05	2023	7.920.000,00
		Tabrani/Abu Salam	Gudang Pengepakan No.06	2023	7.920.000,00
		Abu Bakar	Gudang Pengepakan No.09	2023	7.920.000,00
		Murdani	Gudang Pengepakan No.11	2023	7.920.000,00
		Irwansyah Ibrahim	Gudang Pengepakan No.15	2023	7.920.000,00
		Irfan aulia	Gudang Pengepakan No.16	2023	7.920.000,00
		Agus Susandi	Gudang Pengepakan No.17	2023	7.920.000,00
		Murdani Ahmad	Gudang Pengepakan No.04	2024	7.920.000,00
		Suherman (Pak Man)	Gudang Pengepakan No.05	2024	7.920.000,00
		Tabrani/Abu Salam	Gudang Pengepakan No.06	2024	7.920.000,00
		Abu Bakar	Gudang Pengepakan No.09	2024	7.920.000,00
		Murdani	Gudang Pengepakan No.11	2024	7.920.000,00
		Irwansyah Ibrahim	Gudang Pengepakan No.15	2024	7.920.000,00
		Irfan aulia	Gudang Pengepakan No.16	2024	7.920.000,00
		Agus Susandi	Gudang Pengepakan No.17	2024	7.920.000,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		Bukhari Raden	Gudang Pengepakan No.02	2025	7.920.000,00
		Murdani Ahmad	Gudang Pengepakan No.04	2025	7.920.000,00
		Suherman (Pak Man)	Gudang Pengepakan No.05	2025	7.920.000,00
		Tabrani/Abu Salam	Gudang Pengepakan No.06	2025	7.920.000,00
		Yusrizal	Gudang Pengepakan No.07	2025	4.165.000,00
		Abu Bakar	Gudang Pengepakan No.09	2025	7.920.000,00
		Murdani	Gudang Pengepakan No.11	2025	7.920.000,00
		Mawardii	Gudang Pengepakan No.13	2025	7.920.000,00
		Irwansyah Ibrahim	Gudang Pengepakan No.15	2025	7.920.000,00
		Irfan aulia	Gudang Pengepakan No.16	2025	7.920.000,00
		Agus Susandi	Gudang Pengepakan No.17	2025	7.920.000,00
		M. Nur/Raja Muda	Kios Nelayan No.11	2021	880.000,00
		M. Nur/Raja Muda	Kios Nelayan No.11	2022	4.880.000,00
		Zulfikar	Kios Nelayan No.11	2023	168.000,00
		M. Nur/Raja Muda	Kios Nelayan No.11	2023	4.880.000,00
		Musliani Yusuf/Black	Kios Nelayan No.18	2023	760.000,00
		Zulfikar	Kios Nelayan No.02	2024	3.200.000,00
		M. Nur/Raja Muda	Kios Nelayan No.11	2024	4.880.000,00
		AZWAR	Kios Nelayan No.15	2024	4.880.000,00
		Musliani Yusuf/Black	Kios Nelayan No.18	2024	4.880.000,00
		Zulfikar	Kios Nelayan No.02	2025	3.200.000,00
		Samsul Bahri	Kios Nelayan No. 06	2025	3.200.000,00
		M. Nur/Raja Muda	Kios Nelayan No.11	2025	4.880.000,00
		Hajarul Azmi	Kios Nelayan No. 12	2025	4.880.000,00
		AZWAR	Kios Nelayan No.15	2025	4.880.000,00
		Musliani Yusuf/Black	Kios Nelayan No.18	2025	4.880.000,00
		Safwandi	Gudang Penyimpanan Es No.01	2025	2.160.000,00
			PT.Yakin Pasifik Tuna	2023-2024	175.866.600,00
			PT.Yakin Pasifik Tuna	2025	144.300.800,00
			PT.DAYAMITRA Telekomunikasi	2025	38.500.000,00
		warung Kuliner di IDI	Penyewaan Kios Nelayan UPTD PPN IDI		
		DARMAWATI	warung kuliner	2021	2.880.000,00
		Salmawati	warung kuliner	2022	300.000,00
		Nurmala	warung kuliner	2022	880.000,00
		Firdaus	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Aldiana	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Zakaria	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Dedi Candra	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Safrida	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Wardatun	warung kuliner	2022	1.180.000,00
		Ernita	warung kuliner	2022	880.000,00
		Rajun Munira	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Yulinar	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		M. Nur	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Suriyanti	warung kuliner	2022	1.380.000,00
		Indra Gunawan	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Nasriah	warung kuliner	2022	2.880.000,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		Basyariah	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Intan	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Nurjannah	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Wardani	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Fadli	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Zainuddin	warung kuliner	2022	3.000.000,00
		Mahyuddin	warung kuliner	2022	3.000.000,00
		Razali	warung kuliner	2022	3.000.000,00
		Azmi	warung kuliner	2022	3.000.000,00
		Amri	warung kuliner	2022	3.000.000,00
		Munir	warung kuliner	2022	3.000.000,00
		Ridwan Sulaiman	warung kuliner	2022	3.000.000,00
		Saiful Hadi	warung kuliner	2022	3.000.000,00
		Mulidar	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Yusnidar	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		M. Saleh	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Rosdawati	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Ibrawati	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Fauziah	warung kuliner	2022	1.880.000,00
		Fitria	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		M Yusuf	warung kuliner	2022	1.760.000,00
		Darmiati	warung kuliner	2022	880.000,00
		Ridwan M Aji	warung kuliner	2022	2.880.000,00
		Darmawati	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Salmawati	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Nurmala	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Firdaus	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Aldiana	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Zakaria	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Dedi Candra	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Safrida	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Wardatun	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Ernita	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Rajun Munira	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Yulinar	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		M. Nur	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Suriyanti	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Indra Gunawan	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Nasriah	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Basyariah	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Intan	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Nurjannah	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Wardani	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Fadli	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Zainuddin	warung kuliner	2023	3.000.000,00
		Mahyuddin	warung kuliner	2023	3.000.000,00
		Razali	warung kuliner	2023	3.000.000,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		Azmi	warung kuliner	2023	3.000.000,00
		Amri	warung kuliner	2023	3.000.000,00
		Munir	warung kuliner	2023	3.000.000,00
		Ridwan Sulaiman	warung kuliner	2023	3.000.000,00
		Saiful Hadi	warung kuliner	2023	3.000.000,00
		Mulidar	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Yusnidar	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		M. Saleh	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Rosdawati	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Ibrawati	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Fauziah	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Raimah	warung kuliner	2023	2.760.000,00
		Fitria	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		M Yusuf	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Darmiati	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		Ridwan M Aji	warung kuliner	2023	2.880.000,00
		DARMAWATI	sewa warung kuliner 0039	2024	2.400.000,00
		SALMAWATI	sewa warung kuliner 0039	2024	2.400.000,00
		NURMALA	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		FIRDAUS	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		ALDIANA	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		ZAKARIA	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		DEDI CANDRA	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		SAFRIDA	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		WARDATUN	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		ERNITA	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		RAJUN MUNIRA	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		YULINAR	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		M. NUR	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		SURIYANTI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		INDRA GUNAWAN	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		NASRIAH	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		BASYARIAH	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		INTAN	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		NURJANNAH	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		WARDANI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		FADLI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		ZAINUDDIN	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		MAHYUDDIN	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		RAZALI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		AZMI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		AMRI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		MUNIR	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		RIDWAN SULAIMAN	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		SAIFUL HADI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		MULIDAR	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		YUSNIDAR	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		M. SALEH	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		ROSDAWATI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		IBRAWATI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		FAUZIAH	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		RAIMAH	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		FITRIA	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		M YUSUF	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		DARMIATI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		RIDWAN M AJI	Warung Kuliner	2024	2.400.000,00
		DARMAWATI	sewa warung kuliner 0039	2025	2.400.000,00
		SALMAWATI	sewa warung kuliner 0039	2025	2.400.000,00
		NURMALA	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		FIRDAUS	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		ALDIANA	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		ZAKARIA	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		DEDI CANDRA	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		SAFRIDA	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		WARDATUN	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		ERNITA	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		RAJUN MUNIRA	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		YULINAR	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		M. NUR	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		SURIYANTI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		INDRA GUNAWAN	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		NASRIAH	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		BASYARIAH	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		INTAN	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		NURJANNAH	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		WARDANI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		FADLI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		ZAINUDDIN	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		MAHYUDDIN	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		RAZALI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		AZMI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		AMRI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		MUNIR	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		SAIFUL HADI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		MULIDAR	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		YUSNIDAR	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		M. SALEH	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		ROSDAWATI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		IBRAWATI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		FAUZIAH	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		RAIMAH	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		FITRIA	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		M YUSUF	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
		DARMIATI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		RIDWAN M AJI	Warung Kuliner	2025	2.400.000,00
	Jumlah				1.121.500.400,00
7	Dinas Perhubungan Aceh	PT.ASDP CAB B.ACEH ULEE LHEUE	Jasa Tambat Labuh Kapal Lambat Aceh Hebat 2	2024	19.775.998,00
		PT. SIM CAB B.ACEH ULEE LHEUE	Jasa Tambat Labuh Kapal Cepat	2024	7.854.750,00
		PT.ASDP CAB B.ACEH LAMTENG	Jasa Tambat Labuh Kapal Lambat Kapal Papuyu	2024	1.014.130,00
		PT.ASDP CAB SINGKIL MEULABOH	Jasa Sandar Labuhan Kapal Aceh Hebat 2	2024	965.625,00
		PT.ASDP CAB SINGKIL LABUHAN HAJI	Jasa Tambat Labuh Kapal Lambat Aceh Hebat 1	2024	1.222.500,00
		PT. ASDP Cabang Singkil Sinabang	Jasa Tambat Labuh Kapal Lambat Aceh Hebat 3	2024	27.175.315,00
		Suwarni	Sewa Ruangan An Suwarni utk bulan des 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	2.142.000,00
		Lukman	Sewa kantin an. lukman untuk Bulan Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	2.677.500,00
		Alfian	Sewa kantin an. Alfian untuk Bulan juli s.d Desember 2025 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	3.213.000,00
		M.Duchan	Sewa Kantin An. M.Duchan untuk Bulan Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	535.500,00
		Nuraini	Sewa Kantin An. Nuraini M.yunus untuk Bulan nov s.d Desember 2025 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	1.071.000,00
		Juniar	Sewa Ruangan an. Juniar utk bulan juli 2025 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	495.000,00
		Taksi	Member taksi bulan des 2025 pelabuhan ulee lee	2025	1.150.000,00
		Becak	Member becak bulan des 2025 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	420.000,00
		Rosi	Sewa Tanah An. Rosi Anggraini untuk bulan September s/d Desember 2025 Pelabuhan Sinabang	2025	1.844.000,00
		Khairunnisa	Sewa Tanah An. Khairun Nisa untuk Bulan oktober s/d Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	400.000,00
		Khairunnisa	Sewa Tanah An. Khairun Nisa untuk bulan oktober s/d November 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	800.000,00
		Zainab	Sewa Tanah An. Zainab untuk bulan oktober s/d November 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	1.600.000,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		Zainab	Sewa Tanah An. Zainab untuk bulan Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	800.000,00
		Rusli	Sewa Tanah An. Rusli Mahmud untuk bulan oktober s/d November 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	1.600.000,00
		Rusli	Sewa Tanah An. Rusli Mahmud untuk bulan Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	800.000,00
		PT. Jasa Rahayu Geumpung	Sewa Locket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan Agustus	2025	0,00
		PT. Jasa Rahayu Geumpung	Sewa Locket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan September	2025	0,00
		PT. Jasa Rahayu Geumpung	Sewa Locket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan Oktober	2025	0,00
		PT. Jasa Rahayu Geumpung	Sewa Locket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan November	2025	0,00
		PT. Jasa Rahayu Geumpung	Sewa Locket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan Desember	2025	0,00
		PT. Bintang Lestari	Sewa Locket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan November 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	0,00
		PT. Bintang Lestari	Sewa Locket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan juni 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	103.333,33
		PT. Bintang Lestari	Sewa Locket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan sept 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	103.333,33
		PT. Bintang Lestari	Sewa Locket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan okt 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	103.333,33
		PT.Premium clara	Sewa locket PT.Premium clara buan oktober 2025 terminal tipe b tamiang	2025	62.000,00
		PT. Rajawali Family Transport	Sewa Locket PT. Rajawali Family Transport untuk bulan Juli s/d Oktober 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	248.000,00
		PT. TKBM	Sewa Locket PT. TKBM untuk bulan September s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	720.000,00
		PT. Mandala	Sewa Locket PT. Mandala untuk bulan Desember 2025 Terminal Tipe Aceh Selatan	2025	180.000,00
		PT. Anugrah Jaya	Sewa Locket PT. Anugrah Jaya untuk bulan September s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	720.000,00

No	SKPA	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
		PT. Labuhan Raya	Sewa Loker PT. Labuhan Raya untuk bulan Agustus s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	900.000,00
		PT. Primadona Elma Utama	Sewa Loker PT. Primadona Elma Utama untuk bulan Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	180.000,00
		Fahrizal	Sewa Kios Fahrizal untuk bulan September s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	490.000,00
		Lismarni	Sewa Kios Lismarni untuk bulan Juli s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	720.000,00
		Yusdi	Sewa Kios Yusdi untuk bulan September s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	3.456.000,00
		PT. Bintang Lestari	Sewa Loker PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan Desember 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	0,00
		PT. Berkah Jaya Optima(BJO)	Sewa Loker PT. Berkah Jaya Optima(BJO) untuk bulan November 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	0,00
		PT. Berkah Jaya Optima(BJO)	Sewa Loker PT. Berkah Jaya Optima(BJO) untuk bulan Desember 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	0,00
Jumlah					85.542.318,00
Total					117.515.619.227,00

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

No	Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin					
	Bpjs Kesehatan 0,5%	2025	46.587.623.016,00	Lancar	0,5%	(232.938.115,08)
	Bpjs Kesehatan 10%	2025	32.072.178.425,00	Kurang Lancar	10%	(3.207.217.842,50)
	Bpjs Kesehatan 50%	2025	24.796.246.232,00	Diragukan	50%	(12.398.123.116,00)
	Bpjs Kesehatan 100%	2024	-	Macet	100%	-
	Dinas Kesehatan Aceh	2025	609.689.117,00	Lancar	0,5%	(3.048.445,59)
	Jasa Raharja 10%	2025	200.174.395,00	Kurang Lancar	10%	(20.017.439,50)
	Jasa Raharja 50%	2025	431.915.846,00	Diragukan	50%	(215.957.923,00)
	Jasa Raharja 100%	2024	97.508.707,00	Macet	100%	(97.508.707,00)
	Bpjs Ketenagakerjaan 0,5%	2025	46.920.989,00	Lancar	0,5%	(234.604,95)
	Bpjs Ketenagakerjaan 10%	2025	22.858.282,00	Kurang Lancar	10%	(2.285.828,20)
	Bpjs Ketenagakerjaan 50%	2025	65.621.819,00	Diragukan	50%	(32.810.909,50)
	Piutang Umum 05%	2025	5.081.550,00	Lancar	0,5%	(25.407,75)
	Piutang Umum 10%	2025	210.043.548,00	Kurang Lancar	10%	(21.004.354,80)
	Piutang Umum 50%	2025	412.003.586,00	Diragukan	50%	(206.001.793,00)
	Piutang Umum 100%	2024	4.106.266.698,00	Macet	100%	(4.106.266.698,00)
	Bank Indonesia	2024	470.000,00	Macet	100%	(470.000,00)
	Piutang Nayaka 0,5%	2025	1.124.000,00	Lancar	0,5%	(5.620,00)
	Piutang Nayaka 10%	2025	1.220.000,00	Kurang Lancar	10%	(122.000,00)
	Piutang Nayaka 50%	2025	515.357,00	Diragukan	50%	(257.678,50)
	Piutang Nayaka 100%	2024	4.485.671,00	Macet	100%	(4.485.671,00)
	Telkom 0,5%	2025	9.844.586,00	Lancar	0,5%	(49.222,93)
	Telkom 100%	2024	287.900,00	Macet	100%	(287.900,00)
	Mifa Bersaudara	2025	11.557.621,00	Lancar	0,5%	(57.788,11)
	Pt. Pln 0,5%	2025	290.998.171,00	Lancar	0,5%	(1.454.990,86)
	Pt. Pln 10%	2025	745.680.523,00	Kurang Lancar	10%	(74.568.052,30)
	Pt. Pln 50%	2025	446.181.751,00	Diragukan	50%	(223.090.875,50)
	Pt. Pln 100%	2024	7.018.064,00	Macet	100%	(7.018.064,00)
	Rs Bhayangkara Polda Aceh	2024	38.880.611,00	Macet	100%	(38.880.611,00)
	Ykkbi	2025	1.470.000,00	Lancar	0,5%	(7.350,00)
	Medco	2025	2.299.990,00	Kurang Lancar	10%	(229.999,00)
	Ramayana	2024	178.853.289,00	Macet	100%	(178.853.289,00)
	Fullerton	2024	1.190.000,00	Macet	100%	(1.190.000,00)
	Mandiri Inhealth 0,5%	2025	132.492.854,00	Lancar	0,5%	(662.464,27)
	Mandiri Inhealth 10%	2025	81.362.663,00	Kurang Lancar	10%	(8.136.266,30)
	Mandiri Inhealth 100%	2024	329.991.785,00	Macet	100%	(329.991.785,00)
	Rs Pertamina	2024	106.206.704,00	Macet	100%	(106.206.704,00)
	Pertamina Hulu Energi North	2025	13.064.873,00	Kurang Lancar	10%	(1.306.487,30)
	Yayasan Kesehatan Pertamina 0,5%	2025	4.062.470,00	Lancar	0,5%	(20.312,35)
	Yayasan Kesehatan Pertamina 100%	2024	46.642.066,00	Macet	100%	(46.642.066,00)
	Prodia Widya Husada 0,5%	2025	1.390.000,00	Lancar	0,5%	(6.950,00)
	Prodia Widya Husada 10%	2025	460.000,00	Kurang Lancar	10%	(46.000,00)
	Prodia Widya Husada 100%	2024	470.000,00	Macet	100%	(470.000,00)
	Nusantara Power 0,5%	2025	660.630,00	Lancar	0,5%	(3.303,15)
	Nusantara Power 10%	2025	1.438.559,00	Kurang Lancar	10%	(143.855,90)
	Nusantara Power 100%	2024	1.937.668,00	Macet	100%	(1.937.668,00)
	Asuransi Jiwa Astra	2024	2.295.070,00	Macet	100%	(2.295.070,00)
	Pembangunan Perumahan (Pp)	2024	24.992.177,00	Macet	100%	(24.992.177,00)
	Hanwa Life Insurance	2024	116.000,00	Macet	100%	(116.000,00)
	Halodoc	2024	405.876,00	Macet	100%	(405.876,00)
	Lpsk	2024	6.285.000,00	Macet	100%	(6.285.000,00)
	Kesbangpol Aceh	2024	8.600.800,00	Macet	100%	(8.600.800,00)
	Axa Insurance Indonesia	2024	388.263,00	Macet	100%	(388.263,00)
	Asuransi Jiwa Manulife Indonesia-Halodoc	2025	940.000,00	Diragukan	50%	(470.000,00)
	Rumah Sakit Umum Cempaka Lima 10%	2025	11.241.000,00	Kurang Lancar	10%	(1.124.100,00)
	Rumah Sakit Umum Cempaka Lima 50%	2025	150.116.000,00	Diragukan	50%	(75.058.000,00)
	Rumah Sakit Umum Cempaka Lima 100%	2024	8.120.000,00	Macet	100%	(8.120.000,00)

No	Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2025 (Rp)
	Asuransi Intra Asia	2025	1.916.000,00	Kurang Lancar	10%	(191.600,00)
	Jasindo 0,5%	2025	2.014.686,00	Lancar	0,5%	(10.073,43)
	Jasindo 10%	2025	1.075.578,00	Kurang Lancar	10%	(107.557,80)
	Sunday Insurance Indonesia	2025	436.095,00	Lancar	0,5%	(2.180,48)
	Asuransi Bri Life 0,5%	2025	36.396.443,00	Lancar	0,5%	(181.982,22)
	Asuransi Bri Life 10%	2025	18.881.288,00	Kurang Lancar	10%	(1.888.128,80)
	Asuransi Bri Life 50%	2025	11.869.449,00	Diragukan	50%	(5.934.724,50)
	Bp Berau	2025	758.656,00	Diragukan	50%	(379.328,00)
	Pt. Pembangunan Aceh	2025	10.213.834,00	Lancar	0,5%	(51.069,17)
	Triangle Pase-Fullerton Health Indonesia	2025	714.720,00	Diragukan	50%	(357.360,00)
	Bpma-Fullerton Health Indonesia 10%	2025	18.131.221,00	Kurang Lancar	10%	(1.813.122,10)
	Bpma-Fullerton Health Indonesia 50%	2025	56.780.920,00	Diragukan	50%	(28.390.460,00)
	Rs Bhayangkara Polda Aceh 0,5%	2025	670.000,00	Lancar	0,5%	(3.350,00)
	Rs Bhayangkara Polda Aceh 50%	2025	8.555.000,00	Diragukan	50%	(4.277.500,00)
	Angkasa Pura Indonesia 0,5%	2025	3.107.603,00	Lancar	0,5%	(15.538,02)
	Angkasa Pura Indonesia 10%	2025	51.547.049,00	Kurang Lancar	10%	(5.154.704,90)
	Angkasa Pura Indonesia 50%	2025	29.836.038,00	Diragukan	50%	(14.918.019,00)
	Bara Energi Lestari 0,5%	2025	664.873,00	Lancar	0,5%	(3.324,37)
	Bara Energi Lestari 10%	2025	1.205.765,00	Kurang Lancar	10%	(120.576,50)
	Asuransi Takaful Keluarga 0,5%	2025	15.892.074,00	Lancar	0,5%	(79.460,37)
	Asuransi Takaful Keluarga 10%	2025	1.803.000,00	Kurang Lancar	10%	(180.300,00)
	Medika Loka Aceh-Rs Hermina 0,5%	2025	6.430.000,00	Lancar	0,5%	(32.150,00)
	Medika Loka Aceh-Rs Hermina 10%	2025	670.000,00	Kurang Lancar	10%	(67.000,00)
	Pt. Taspen	2025	1.447.178,00	Lancar	0,5%	(7.235,89)
	Pema Global Energi	2025	668.820,00	Lancar	0,5%	(3.344,10)
	Rs Pendidikan Usk	2025	875.000,00	Lancar	0,5%	(4.375,00)
	Jumlah		112.622.451.492,00			(21.762.073.909,95)
2	Rumah Sakit Ibu Dan Anak					
	Klaim BPJS Desember	2025	-			-
	Klaim Pending BPJS Juli	2025	30.303.400,00	Diragukan	50%	(15.151.700,00)
	Klaim Pending BPJS Agustus	2025	274.536.676,00	Diragukan	50%	(137.268.338,00)
	Klaim Pending BPJS September	2025	422.840.900,00	Kurang Lancar	10%	(42.284.090,00)
	Klaim Pending BPJS Oktober	2025	323.737.500,00	Kurang Lancar	10%	(32.373.750,00)
	Klaim Pending BPJS November	2025	351.692.900,00	Kurang Lancar	10%	(35.169.290,00)
	Klaim Obat Kemo dan Kronis Oktober	2025	21.711.576,00	Kurang Lancar	10%	(2.171.157,60)
	Klaim Obat Kemo dan Kronis November	2025	22.053.195,00	Kurang Lancar	10%	(2.205.319,50)
	Klaim Obat Kemo dan Kronis Desember	2025	28.780.372,00	Lancar	0,5%	(143.901,86)
	Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis Juli	2025	1.658.872,00	Diragukan	50%	(829.436,00)
	Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis Agustus	2025	4.056.034,00	Diragukan	50%	(2.028.017,00)
	Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis September	2025	4.980.924,00	Diragukan	50%	(2.490.462,00)
	Klaim Pending Obat Kemo dan Kronis Oktober	2025	3.764.625,00	Kurang Lancar	10%	(376.462,50)
	Klaim Ambulan September	2025	5.600.000,00	Diragukan	50%	(2.800.000,00)
	Klaim Ambulan Oktober	2025	4.599.000,00	Kurang Lancar	10%	(459.900,00)
	Klaim Ambulan November	2025	1.890.000,00	Kurang Lancar	10%	(189.000,00)
	Klaim Ambulan Desember	2025	1.890.000,00	Lancar	0,5%	(9.450,00)
	Klaim Lab PA Oktober RS. Ibnu Sina	2025	3.797.000,00	Kurang Lancar	10%	(379.700,00)
	Klaim Lab PA November RS. Ibnu Sina	2025	1.914.000,00	Kurang Lancar	10%	(191.400,00)
	Klaim Lab PA Desember RS. Ibnu Sina	2025	2.126.000,00	Lancar	0,5%	(10.630,00)
	Klaim CT Scan Oktober RS. Ibnu Sina	2025	5.215.000,00	Kurang Lancar	10%	(521.500,00)
	Klaim CT Scan November RS. Ibnu Sina	2025	7.450.000,00	Kurang Lancar	10%	(745.000,00)
	Klaim CT Scan Desember RS. Ibnu Sina	2025	13.410.000,00	Lancar	0,5%	(67.050,00)
	Klaim Radiologi Oktober RS. Meuraxa	2025	140.317.000,00	Kurang Lancar	10%	(14.031.700,00)
	Klaim Radiologi November RS. Meuraxa	2025	90.847.000,00	Kurang Lancar	10%	(9.084.700,00)
	Klaim Radiologi Desember RS. Meuraxa	2025	126.921.000,00	Lancar	0,5%	(634.605,00)
	Klaim Radiologi November RSUZA	2025	132.892.000,00	Kurang Lancar	10%	(13.289.200,00)
	Klaim Radiologi Desember RSUZA	2025	37.990.000,00	Lancar	0,5%	(189.950,00)
	Klaim CT Scan Desember Klinik Kasehat Wafafiat	2025	1.490.000,00	Lancar	0,5%	(7.450,00)
	Klaim Lab PA Desember RSUD Kota Sabang	2025	957.000,00	Lancar	0,5%	(4.785,00)
	Jumlah		2.069.421.974,00			(315.107.944,46)
3	Rumah Sakit Jiwa					

No	Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2025 (Rp)
	Piutang BRA (2008)	2008	12.487.000,00	Macet	100%	(12.487.000,00)
	Piutang Pasien Umum (2010)	2010	4.744.000,00	Macet	100%	(4.744.000,00)
	Piutang Pasien Umum (2011)	2011	8.925.000,00	Macet	100%	(8.925.000,00)
	Piutang Pasien Umum (2012)	2012	26.048.000,00	Macet	100%	(26.048.000,00)
	Piutang Pasien Umum (2013)	2013	31.741.500,00	Macet	100%	(31.741.500,00)
	Piutang Pasien Umum (2014)	2014	18.927.500,00	Macet	100%	(18.927.500,00)
	Piutang Pasien Umum (2015)	2015	3.030.000,00	Macet	100%	(3.030.000,00)
	Piutang Pasien Umum (2016)	2016	14.126.747,00	Macet	100%	(14.126.747,00)
	Piutang Pasien Umum (2017)	2017	138.250.822,00	Macet	100%	(138.250.822,00)
	Piutang Pasien Umum (2018)	2018	82.656.248,00	Macet	100%	(82.656.248,00)
	Piutang Pasien Umum (2019)	2019	9.303.982,00	Macet	100%	(9.303.982,00)
	Piutang Pasien Umum (2020)	2020	355.362.305,00	Macet	100%	(355.362.305,00)
	Piutang Pasien Umum (2021)	2021	610.500.789,00	Macet	100%	(610.500.789,00)
	Klaim Covid 19 tahun 2022 (Dispute) (BAHV 0723/TPKD.11/10.2023	2022	-	Macet	100%	-
	Klaim Susulan Juli	2024	-	Lancar	0,5%	-
	Klaim IPWL Rawat Inap Agustus	2024	-	Kurang Lancar	10%	-
	Klaim IPWL Rawat Jalan Oktober	2024	-	Lancar	0,5%	-
	Klaim IPWL Rawat Inap September	2024	-	Lancar	0,5%	-
	Klaim IPWL Rawat Inap Oktober	2024	-	Lancar	0,5%	-
	Klaim IPWL Rawat Inap November	2024	-	Lancar	0,5%	-
	Klaim Reguler BPJS Desember	2024	-	-	-	-
	Jumlah		1.316.103.893,00			(1.316.103.893,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh					
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Banda Aceh	2025	63.562.200,00	Diragukan	50%	(31.781.100,00)
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Banda Aceh	2025	64.271.090,00	Kurang Lancar	10%	(6.427.109,00)
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Banda Aceh	2025	48.700.860,00	Lancar	0,5%	(243.504,30)
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Banda Aceh	2025	52.400.000,00	Lancar	0,5%	(262.000,00)
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Aceh Besar	2026	32.565.000,00	Lancar	0,5%	(162.825,00)
	Jumlah		261.499.150,00			(38.876.538,30)
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh					
	Sewa Kantin Utama Museum Tsunami	2024	13.360.000,00	Macet	100%	(13.360.000,00)
	Sewa Kantin Dinas	2024	5.040.000,00	Macet	100%	(5.040.000,00)
	Sewa Kantin Dinas	2023	1.500.000,00	Macet	100%	(1.500.000,00)
	Sewa Rumah Dinas (SAFRIANI)	2023	2.700.000,00	Macet	100%	(2.700.000,00)
	Sewa Mess Taman Budaya (an. Afrizal)	2023	1.500.000,00	Macet	100%	(1.500.000,00)
	Sewa Mess Taman Budaya (an. M Nasir)	2023	4.000.000,00	Macet	100%	(4.000.000,00)
	Sewa Mess Taman Budaya (an. LK Ara)	2023	4.000.000,00	Macet	100%	(4.000.000,00)
	Sewa Rumah Dinas Prada (SAFRIANI)	2024	4.000.000,00	Macet	100%	(4.000.000,00)
	Sewa Rumah Dinas Prada (an.BRIMSYAH)	2025	3.000.000,00	Kurang Lancar	0,5%	(15.000,00)
	Jumlah		39.100.000,00			(36.115.000,00)
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh					
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2020	15.600.000,00	Macet	100%	(15.600.000,00)
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2021	37.120.000,00	Macet	100%	(37.120.000,00)
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2022	37.520.000,00	Macet	100%	(37.520.000,00)
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2023	63.360.000,00	Macet	100%	(63.360.000,00)
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2024	63.360.000,00	Macet	100%	(63.360.000,00)
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2025	83.365.000,00	Lancar	0,5%	(416.825,00)
	Penyewaan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	2021	880.000,00	Macet	100%	(880.000,00)
	Penyewaan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	2022	4.880.000,00	Macet	100%	(4.880.000,00)
	Penyewaan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	2023	5.808.000,00	Macet	100%	(5.808.000,00)
	Penyewaan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	2024	17.840.000,00	Macet	100%	(17.840.000,00)
	Penyewaan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	2025	25.920.000,00	Lancar	0,5%	(129.600,00)
	Gudang Penyimpanan Es No.01	2025	2.160.000,00	Lancar	0,5%	(10.800,00)
	PT.Yakin Pasifik Tuna	2024	175.866.600,00	Macet	100%	(175.866.600,00)
	PT.Yakin Pasifik Tuna	2025	144.300.800,00	Lancar	0,5%	(721.504,00)

No	Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2025 (Rp)
	PT.DAYAMITRA Telekomunikasi	2025	38.500.000,00	Lancar	0,5%	(192.500,00)
	Penyewaan Warung Kuliner Idi di Aceh Timur	2021	2.880.000,00	Macet	100%	(2.880.000,00)
	Penyewaan Warung Kuliner Idi di Aceh Timur	2022	96.500.000,00	Macet	100%	(96.500.000,00)
	Penyewaan Warung Kuliner Idi di Aceh Timur	2023	116.040.000,00	Macet	100%	(116.040.000,00)
	Penyewaan Warung Kuliner Idi di Aceh Timur	2024	96.000.000,00	Macet	100%	(96.000.000,00)
	Penyewaan Warung Kuliner Idi di Aceh Timur	2025	93.600.000,00	Lancar	0,5%	(468.000,00)
	Jumlah		1.121.500.400,00			(735.593.829,00)
7	Dinas Perhubungan Aceh					
	Pt.Asdp Cab B.Aceh Ulee Lheue	2024	19.775.998,00	Lancar	0,5%	(98.879,99)
	Pt. Sim Cab B.Aceh Ulee Lheue	2024	7.854.750,00	Lancar	0,5%	(39.273,75)
	Pt Asdp Cab B.Aceh Lamteng	2024	1.014.130,00	Lancar	0,5%	(5.070,65)
	Pt Asdp Cab Singkil Meulaboh	2024	965.625,00	Lancar	0,5%	(4.828,13)
	Pt Asdp Cab Singkil Labuhan Haji	2024	1.222.500,00	Lancar	0,5%	(6.112,50)
	Pt. Asdp Cabang Singkil Sinabang	2024	27.175.315,00	Lancar	0,5%	(135.876,58)
	Sewa Ruangan An Suwarni utk bulan des 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	2.142.000,00	Lancar	0,5%	(10.710,00)
	Sewa kantin an. lukman untuk Bulan Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	2.677.500,00	Lancar	0,5%	(13.387,50)
	Sewa kantin an. Alfian untuk Bulan juli s.d Desember 2025 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	3.213.000,00	Lancar	0,5%	(16.065,00)
	Sewa Kantin An. M.Duchan untuk Bulan Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	535.500,00	Lancar	0,5%	(2.677,50)
	Sewa Kantin An. Nuraini M.yunus untuk Bulan nov s.d Desember 2025 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	1.071.000,00	Lancar	0,5%	(5.355,00)
	Sewa Ruangan an. Juniar utk bulan juli 2025 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	495.000,00	Lancar	0,5%	(2.475,00)
	Member taksi bulan des 2025 pelabuhan ulee lee	2025	1.150.000,00	Lancar	0,5%	(5.750,00)
	Member becak bulan des 2025 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	420.000,00	Lancar	0,5%	(2.100,00)
	Sewa Tanah An. Rosi Anggraini untuk bulan September s/d Desember 2025 Pelabuhan Sinabang	2025	1.844.000,00	Lancar	0,5%	(9.220,00)
	Sewa Tanah An. Khairun Nisa untuk Bulan oktober s/d Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	400.000,00	Macet	100,0%	(400.000,00)
	Sewa Tanah An. Khairun Nisa untuk bulan oktober s/d November 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	800.000,00	Macet	100,0%	(800.000,00)
	Sewa Tanah An. Zainab untuk bulan oktober s/d November 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	1.600.000,00	Macet	100,0%	(1.600.000,00)
	Sewa Tanah An. Zainab untuk bulan Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	800.000,00	Macet	100,0%	(800.000,00)
	Sewa Tanah An. Rusli Mahmud untuk bulan oktober s/d November 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	1.600.000,00	Macet	100,0%	(1.600.000,00)
	Sewa Tanah An. Rusli Mahmud untuk bulan Desember 2024 Pelabuhan Ulee Lheue	2025	800.000,00	Macet	100,0%	(800.000,00)
	Sewa Loket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan Agustus	2025	-	-	-	-
	Sewa Loket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan September	2025	-	-	-	-
	Sewa Loket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan Oktober	2025	-	-	-	-
	Sewa Loket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan November	2025	-	-	-	-
	Sewa Loket PT. Jasa Rahayu Geumpang (JRG)untu bulan Desember	2025	-	-	-	-
	Sewa Loket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan November 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	-	-	-	-
	Sewa Loket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan juni 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	103.333,33	Lancar	0,5%	(516,67)
	Sewa Loket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan sept 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	103.333,33	Lancar	0,5%	(516,67)
	Sewa Loket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan okt 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	103.333,33	Lancar	0,5%	(516,67)
	Sewa loket PT.Premium clara buan oktober 2025 terminal tipe b tamiang	2025	62.000,00	Lancar	0,5%	(310,00)

No	Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2025 (Rp)
	Sewa Locket PT. Rajawali Family Transport untuk bulan Juli s/d Oktober 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	248.000,00	Lancar	0,5%	(1.240,00)
	Sewa Locket PT. TKBM untuk bulan September s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	720.000,00	Lancar	0,5%	(3.600,00)
	Sewa Locket PT. Mandala untuk bulan Desember 2025 Terminal Tipe Aceh Selatan	2025	180.000,00	Lancar	0,5%	(900,00)
	Sewa Locket PT. Anugrah Jaya untuk bulan September s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	720.000,00	Lancar	0,5%	(3.600,00)
	Sewa Locket PT. Labuhan Raya untuk bulan Agustus s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	900.000,00	Lancar	0,5%	(4.500,00)
	Sewa Locket PT. Primadona Elma Utama untuk bulan Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	180.000,00	Lancar	0,5%	(900,00)
	Sewa Kios Fahrizal untuk bulan September s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	490.000,00	Lancar	0,5%	(2.450,00)
	Sewa Kios Lismami untuk bulan Juli s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	720.000,00	Lancar	0,5%	(3.600,00)
	Sewa Kios Yusdi untuk bulan September s/d Desember 2025 Terminal Tipe B Aceh Selatan	2025	3.456.000,00	Lancar	0,5%	(17.280,00)
	Sewa Locket PT. Bintang Lestari Tour untuk bulan Desember 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	-			-
	Sewa Locket PT. Berkah Jaya Optima(BJO) untuk bulan November 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	-			-
	Sewa Locket PT. Berkah Jaya Optima(BJO) untuk bulan Desember 2024 Terminal Tipe B Tamiang	2025	-			-
Jumlah			85.542.318,00			(6.397.711,59)
Total			117.515.619.227,00			(24.210.268.826,30)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah

Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2025
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh					
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Kepada Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Surat Kepala BPKA Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 900/2956 Tanggal 21 Desember 2023 Perihal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tidak Terealisasi Dikarenakan Kegiatan Pada Dinas Pertanian Tidak Tersedia Program Kegiatannya.	2023	5.000.000.000,00	Macet	10%	(500.000.000,00)
Jumlah III		5.000.000.000,00			(500.000.000,00)
Rumah Sakit Umum Zainal Abidin					
Tagihan Biaya Praktik Pendidikan Mahasiswa FK USK Asal Thailand Periode Januari S.D. Juni 2025 (Susulan)	2025	37.170.000,00	Diragukan	50%	(18.585.000,00)
Tagihan Biaya Praktik Pendidikan Mahasiswa FK USK Periode Juli S.D. Desember 2025	2025	4.572.945.300,00	Diragukan	50%	(2.286.472.650,00)
Sisa Piutang Tahun Lalu USK	2024	23.161.940.000,00	Macet	100%	(23.161.940.000,00)
Tagihan Sterilisasi Instrumen Rs Kesdam Iskandar Muda Pada RSUDZA	2025	53.870.000,00	Lancar	0,5%	(269.350,00)
Tagihan Sterilisasi Instrumen RSIA Pada RSUDZA	2025	25.000.000,00	Lancar	0,5%	(125.000,00)
Bagi Hasil Apotik Kimia Farma Desember 2025 (SALAH KAMAR AKUN Penyisihan Piutang antara Lain-lain PAA yg Sah dengan Hasil Pemanfaatan BMD)					(54.978,72)
Jumlah IV		27.850.925.300,00			(25.467.446.978,72)
Rumah Sakit Jiwa Aceh					
Piutang Pendapatan BLUD Dari Hasil Kerjasama dengan Praktek Pendidikan PPDS FK USK Bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2025	2024	134.800.000,00	Kurang Lancar	10%	(13.480.000,00)
	2025	120.000.000,00	Kurang Lancar	10%	(12.000.000,00)
Jumlah V		254.800.000,00			(25.480.000,00)
Total		#####			(25.992.926.978,72)

Belanja Sewa dan Asuransi Dimuka

No	SKPA	Saldo Awal 2025	Nomor Kontrak	Uraian	Periode Kontrak		Nilai Kontrak	MUTASI 2025		BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2025
					Awal	Akhir		Tambah	Kurang	
Beban Dibayar Dimuka SKPA										
I.	DINAS PENDIDIKAN ACEH									
		63.741.369,86	425.1/1595.a/2025	Nagan Raya	20 09 2025	19 09 2026	88.700.000,00	63.669.589,04	63.741.369,86	63.669.589,04
		47.441.095,89	001/SPS.GDG/CABDISDIKWIL-ATIM/2025	Aceh Timur	20 JULI 2025	19 JULI 2026	88.700.000,00	48.602.739,73	47.441.095,89	48.602.739,73
		29.194.520,55	011/N/748/2025	Aceh Tamiang	1 MEI 2025	30 April 2026	133.050.000,00	43.742.465,75	29.194.520,55	43.742.465,75
			001/SPS.GDG/CABDISDIKWIL-PIJAY/2025	Pidie Jaya	01 OKT 2025	30 September 2026	88.700.000,00	66.342.739,73		66.342.739,73
	Jumlah I	140.376.986,30					399.150.000,00	222.357.534,25	140.376.986,30	222.357.534,25
II. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK										
		-	KL.701/V/13/SDV.1-2025 Tanggal 28/05/2025	Penyewaan Tanah PT KAI Oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak	1 Januari 2025	31 Desember 2029	152.500.000,00	122.016.703,18	-	122.016.703,18
	Jumlah II	-					152.500.000,00	122.016.703,18	-	122.016.703,18
II. DINAS PANGAN ACEH										
		25.052.054,79	500.1.3.1/827	Sewa Ruko	08 MEI 2025	08 MEI 2026	72.000.000,00	25.052.054,79	25.052.054,79	25.052.054,79
	Jumlah III	25.052.054,79					72.000.000,00	25.052.054,79	25.052.054,79	25.052.054,79
IV. SETDA ACEH										
		24.794.520,55	No. 001/SEWA-MENYEWA/VIII/2025	Sewa Rumah Kepala Perwakilan Aceh di Medan	8 AGUSTUS 2025	07 AGUSTUS 2026	50.000.000,00	30.000.000,00	24.794.520,55	30.000.000,00
		52.304.657,53	NO. 900/1431	Sewa Bangunan Gedung Arsip BPBJ	01 November 2025	01 November 2026	64.158.000,00	53.435.704,10	52.304.657,53	53.435.704,10
	Jumlah IV	77.099.178,08					114.158.000,00	83.435.704,10	77.099.178,08	83.435.704,10
VI. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH										
		16.832.328,77	000.1.4/09	Sewa Kantor Samsat UPTD Wilayah XIX Subulussalam	10 AGT 2025	10 AGT 2026	27.800.000,00	16.832.328,77	16.832.328,77	16.832.328,77
		12.649.315,07	00.1.4/04	Sewa Kantor Samsat UPTD Wilayah XVI Pidie Jaya	01 September 2025	01 September 2026	19.000.000,00	12.649.315,07	12.649.315,07	12.649.315,07
		5.000.000,00	000.1.4/04	Sewa Kantor Samsat Gampong UPTD Wilayah III Pidie	15 March 2025	15 March 2026	25.000.000,00	5.068.493,15	5.000.000,00	5.068.493,15
		6.246.575,34	000.1.4/03	Sewa Kantor Samsat UPTD Wilayah XVI Pidie Jaya	02 March 2025	02 March 2026	38.000.000,00	6.246.575,34	6.246.575,34	6.246.575,34
		14.000.000,00	900.1.13.1/18	Sewa Kantor Samsat UPTD Wilayah XVIII Aceh Jaya	01 January 2025	31 DES 2025	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
	Jumlah V	54.728.219,18					123.800.000,00	40.796.712,33	54.728.219,18	40.796.712,33
VII. BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH										
		78.936.986,30	NO. SPK : 014/079/SPK/PL/2025	Uraian Kontrak Sewa Internet Rumah Dinas Indramayu	10 DES 2025	9 DES 2026	84.000.000,00	78.936.986,30	78.936.986,31	78.936.986,29
		159.001.643,84	NO. SPK : 014/080/SPK/PL/2025	Uraian Kontrak Sewa Internet Mess Aceh	10 DES 2025	9 DES 2026	169.200.000,00	159.001.643,84	159.001.643,83	159.001.643,85
			019/18/SPSH/2025	Kontrak Sewa Rumah	02 MEI 2025	01 January 2026	200.000.000,00	816.326,53		816.326,53
	JUMLAH VI	237.938.630,14					453.200.000,00	238.754.956,67	237.938.630,14	238.754.956,67
VIII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH										
		23.753.150,68	EP-01K1SNSQWVVNQ1TEV7VQP2KWYP	Lisensi Cpanel	2 JULI 2025	3 JULI 2026	29.970.000,00	15.025.831,06	23.753.150,68	15.025.831,06
		334.046.511,63	#EP-01JQ6ZDFG7XVT18C7JJSRTZ15D	Bandwidth	1 MARET 2025	28 February 2026	2.377.789.164,00	384.354.960,76	334.046.511,63	384.354.960,76
			Invoice: 025.INV-0040005	Perpanjangan Akun Ios Developer	27 January 2025	26 January 2026	5.000.000,00	356.164,38		356.164,38
			Invoice: 025.INV-0040003	Perpanjangan Layanan Whatsapp Bot	16 April 2025	15 April 2026	1.000.000,00	287.671,23		287.671,23
			01/P-PL/BIDSAN/V/2025	Zoom Meeting Pro	02 June 2025	02 June 2026	6.000.000,00	2.498.630,14		2.498.630,14
			#EP-01JSGB7Q2Y97SE66M3NK2JQT5J	Lisensi Ssl	24 April 2025	24 April 2026	27.250.000,00	8.436.301,37		8.436.301,37
			03/SPK.CLOUDFLARE/EGOV/IV/2025	Sewa Layanan Aplikasi Cloudflare	5 MEI 2025	4 MEI 2026	56.443.500,00	19.175.326,03		19.175.326,03
		55.438.679,25	#EP-01JSNM9ANHFXJ2K8RJ057RZQ	Vpn Pemerintah Aceh	15 March 2025	14 March 2026	101.565.500,00	20.313.100,00	55.438.679,25	20.313.100,00
		137.133.575,67	#EP-01JT826102PR2XN3JMY7367NBK	Jaringan Metro Pemerintah Aceh	03 February 2025	02 February 2026	545.994.792,00	117.423.937,97	137.133.575,67	117.423.937,97

		21.166.849,32		Sigap Aceh.Id			27.300.000,00		21.166.849,32	-
		21.166.849,32		Gampong.Id			27.300.000,00		21.166.849,32	-
		1.885.245,90		Virtual			6.000.000,00		1.885.245,90	-
		26.803.278,69		Malware			30.000.000,00		26.803.278,69	-
	JUMLAH VII	621.394.140,46					3.241.612.956,00	567.871.922,94	621.394.140,46	567.871.922,94
	JUMLAH SEWA	1.156.589.208,95					4.556.420.956,00	1.300.285.588,26	1.156.589.208,95	1.300.285.588,26
	Asuransi Dibayar Dimuka									
	I. SEKRETARIAT DAERAH									
		111.369.879,34	No. SPK: 2631/SPK/2025	Asuransi Kendaraan Dinas Mobil Gubernur/VIP pada Biro Umum Sekretariat Daerah	20 September 2025	20 September 2026	198.285.000,00	142.330.602,74	111.369.879,34	142.330.602,74
		55.403.605,48	No. SPK: 2451.01/SPK/2025	Asuransi Kendaraan Dinas Pool/Jabatan pada Setda	02 September 2025	02 September 2026	99.120.300,00	68.162.178,91	55.403.605,48	68.162.178,91
		19.081.218,03	No. SPK : Adm.pemb.000.3/403/VII/2025	Asuransi Kendaraan Pool Operasional Mobil Biro Administrasi Pembangunan Setda (No. Polisi BL 1016 AL, BL 1012 AG, BL 1075 AO, BL 1076 AO dan BL 8031 AD	30 JULI 2025	30 JULI 2026	33.237.700,00	19.123.060,27	19.081.218,03	19.123.060,27
		94.743.700,27	No. SPK: 3191/SPK/2024	Asuransi Kendaraan Pool Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh	15 November 2024	15 November 2025	108.746.700,00		94.743.700,27	-
		3.604.000,00	No. Policy: 02-M 0001801/2024/2/0	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero Sport BK 1680 J Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan	27 Mei 2024	27 May 2025	9.010.000,00		3.604.000,00	-
		5.099.912,33	0003812/2024/0/0 DAN No. Policy: 02-M 0003812/2024/0/0	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Kijang Zenix BL 1078 AA Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan , Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Kijang Zenix BL 1079 AA Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan.	23 April 2024	23 April 2025	16.620.250,00		5.099.912,33	-
	Jumlah I	289.302.315,45					465.019.950,00	229.615.841,92	289.302.315,45	229.615.841,92
	II. SEKRETARIAT DPRA									
			EP-01JXY5K6VEHXAB6ET7VHFB8ZPT	Premi Asuransi Kendaraan Pool Operasional	18 Juni 2025	17 Juni 2026	470.196.413,00	216.419.170,92		216.419.170,92
			EP-01KD2QGSXTV70PWEQBKAKEAENM	Premi Asuransi Kendaraan Pool Suv	23 Desember 2025	22 Desember 2026	17.792.588,00	17.353.866,66		17.353.866,66
			EP-01KD539CS8YY7WMSAAH4AESMBH	Premi Asuransi Kendaraan Bus	24 Desember 2025	23 Desember 2026	28.602.637,00	27.897.366,50		27.897.366,50
			027/059/SP/KPA.1/P2/2025	Premi Asuransi Kendaraan Pool Operasional	25 Juni 2026	24 Juni 2025	10.687.445,00	5.124.117,47		5.124.117,47
			EP-01JXF0ZH1FWMDYFW39WN1J21DD	Premi Asuransi Mobil Pimpinan Dpra	12 Juni 2025	11 Juni 2026	106.979.044,00	47.481.109,94		47.481.109,94
		76.358.440,00	027/226/SPK/KPA.1/P2/2024	Asuransi Mobil Jabatan Tahun 2024	23 Desember 2024	22 Desember 2025	78.288.850,00		76.358.440,00	-
		193.221.523,97	027/001/SP/KPA.1/P2/2024	Asuransi Kendaraan Pool Operasional Roda 4 Dan Roda 6	16 Mei 2024	15 Mei 2025	522.413.750,00		193.221.523,97	-
	Jumlah II	269.579.963,97					1.234.960.727,00	314.275.631,49	269.579.963,97	314.275.631,49
	III. KEURUKON KATIBUL WALI									
		34.904.090,16	906/254.D/BAP/XII/2024	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Alphard 2.5 G AT BL 1030 LS, Mitsubishi New Pajero Sport BL 1013 AA, Ford Ranger 2.0 Wildtrack DC 4x4 10 AT BL 8042 JB sesuai Nomor Kontrak: 906/254.B /SPK/XI/2024 Tanggal 12 November 2025.	9 Desember 2024	9 Desember 2025	37.353.500,00		34.904.090,16	-
	Jumlah III	34.904.090,16					37.353.500,00	-	34.904.090,16	-
	IV. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG									
		72.662.038,36	020/7624/SPK/XII/2024	ASURANSI POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DPMG ACEH TAHUN 2024	23 Desember 2024	22 Desember 2025	74.499.000,00		72.662.038,36	-
	Jumlah IV	72.662.038,36					74.499.000,00	-	72.662.038,36	-
	Jumlah Asuransi	666.448.407,94					1.811.833.177,00	543.891.473,41	666.448.407,94	543.891.473,41
	TOTAL	1.823.037.616,89					6.368.254.133,00	1.844.177.061,67	1.823.037.616,89	1.844.177.061,67

No.	SKPA	Persediaan Barang Habis Pakai																
		Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan Baku	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan/Bibit Tanaman	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Isi Tabung Gas	Bahan Lainnya	Suku Cadang Alat Kedokteran	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Suku Cadang Lainnya	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	-	160.000,00	-	-	-	620.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	189.994.606,00	18.215.100,00	87.280.471,00	297.270.177,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664.890,00	-	130.425,00	795.315,00	
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-	-	-	-	-	3.446.500,00	-	-	-	-	-	-	2.192.700,00	-	-	5.639.200,00	
4	Dinas Kesehatan Aceh	-	333.225.392,40	-	-	-	-	61.385.100,00	11.399.700,00	-	-	52.402.056,00	-	-	45.327.027,00	9.722.620,00	19.376.989,00	532.838.884,40
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoeil Abidin	-	-	908.719.232,00	-	-	-	-	275.683.887,00	39.822.804.174,27	-	-	-	674.654.715,22	-	783.808.929,91	42.465.670.938,40	
6	Rumah Sakit Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	524.242.494,00	-	-	-	-	111.572.991,40	-	-	635.815.485,40	
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	58.778.000,00	4.200.000,00	18.109.700,00	-	-	13.014.750,00	7.864.000,00	3.001.388.918,43	-	-	-	-	4.247.187,00	-	6.740.000,00	3.114.342.555,43	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-	-	-	-	-	6.944.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.944.000,00	
9	Dinas Pengairan Aceh	-	-	-	-	-	5.616.600,00	-	-	-	-	-	-	2.242.579,00	-	341.170,00	8.200.349,00	
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.204.085,00	
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038.690.680,00	-	5.034.032,00	613.200,00	184.556.853,00	2.038.690.680,00
13	Dinas Sosial Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	-	-	-	-	11.888.100,00	-	-	-	-	-	-	60.513.394,00	-	3.503.750,00	75.905.244,00	
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	-	-	-	-	-	5.127.423,00	-	-	-	-	-	-	2.572.000,00	-	640.000,00	8.339.423,00	
16	Dinas Pangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.304.203,00	-	17.729.000,00	21.033.203,00	
17	Dinas Pertanahan Aceh	-	134.303.676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.847.056,50	87.209,00	-	892.237.941,50	
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	-	-	-	-	4.830.000,00	-	-	-	-	-	-	620.000,00	294.710,00	395.150,00	6.139.860,00	
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	-	-	184.258.800,00	-	-	8.205.000,00	-	-	-	-	-	-	579.000,00	-	275.000,00	193.317.800,00	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.026.167,00	-	21.776.471,00	32.802.638,00	
21	Dinas Perhubungan Aceh	-	-	-	-	-	7.227.654,00	-	8.072.476,00	-	-	-	-	1.488.300,00	13.306.125,00	5.292.839,00	35.387.394,00	
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	-	-	-	-	-	44.522.000,00	-	-	-	-	-	-	27.560.400,00	-	13.568.973,00	85.651.373,00	
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.022.796,00	-	29.905.500,00	241.928.296,00	
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	-	-	-	-	-	4.669.000,00	-	-	-	-	-	-	16.054.885,00	-	2.200.000,00	22.923.885,00	
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	-	-	-	-	-	4.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.120.000,00	
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	-	-	-	-	-	16.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.400.000,00	
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	-	-	-	-	2.760.000,00	-	-	-	-	-	-	776.499,00	1.065.890,00	9.485.200,00	14.087.589,00	
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	18.053.395,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.071.426,16	12.901.130,64	-	455.025.952,06	
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.868.750,00	-	-	8.868.750,00	
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	-	-	-	-	-	-	83.990.400,00	-	-	-	-	-	4.066.000,00	-	-	4.066.000,00	
31	Dinas Peternakan Aceh	1.734.000,00	101.901.300,00	-	-	1.589.653.550,00	-	-	158.128.380,96	-	14.005.425,00	-	-	44.994.476,42	-	3.553.200,00	1.913.970.332,38	
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.154.604,00	-	10.230.000,00	20.384.604,00	
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	-	-	-	-	-	7.302.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.302.690,00	
34	Sekretariat Daerah Aceh	1.080.000,00	-	36.713.000,00	-	-	-	57.300.000,00	750.000,00	9.496.000,00	-	-	-	12.845.259,00	7.800.245,00	9.575.804,00	135.560.308,00	
35	Sekretariat DPRA	-	-	-	-	-	39.859.250,00	-	3.099.120,00	3.652.000,00	-	-	-	10.014.373,00	748.472,00	2.732.900,00	60.106.115,00	
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	-	-	710.000,00	-	-	-	17.077.000,00	-	-	-	-	-	1.821.273,00	446.630,00	3.741.140,00	23.796.043,00	
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.279.637,50	104.685.000,00	1.246.268.878,80	1.540.233.516,30	
38	Badan Kepegawaian Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.892.600,00	-	-	2.892.600,00	
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.341.296,00	4.835.271,00	20.419.450,00	60.596.017,00	
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	-	-	-	-	-	67.420.000,00	-	-	-	-	-	-	1.110.000,00	-	875.000,00	69.405.000,00	
41	Inspektorat Aceh	-	-	-	-	-	8.100.000,00	-	-	-	-	-	-	59.373.300,00	35.761.000,00	-	103.234.300,00	
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	-	-	1.283.735,69	-	-	1.442.135,73	-	-	-	-	-	-	2.334.676,62	-	362.786,32	5.423.314,36	
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	-	-	-	-	1.380.000,00	-	-	-	-	-	-	1.503.000,00	-	1.850.000,00	4.733.000,00	
44	Dinas Syariat Islam Aceh	-	-	-	-	-	17.897.000,00	-	-	-	-	-	-	4.669.770,00	1.875.500,00	-	24.442.270,00	
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	-	-	-	-	-	6.321.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.321.000,00	
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.287.007,00	-	-	4.287.007,00	
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.900,00	-	8.525.700,00	9.199.600,00	
	Jumlah	61.992.000,00	1.381.461.103,66	1.149.794.467,89	160.000,00	1.589.653.550,00	83.990.400,00	437.855.202,73	295.697.587,00	43.527.851.563,66	3.652.000,00	66.407.481,00	1.000.000,00	2.796.537.736,50	2.192.275.581,32	219.008.593,64	2.497.060.900,03	56.303.998.167,23

No.	SKPA	Persediaan Barang Habis Pakai														Jumlah
		Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Suvenir/Cendera Mata	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pakan	Persediaan Dalam Proses Lainnya	
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	87.229.100,00	-	38.155.715,00	-	-	-	652.071.067,00	-	-	-	-	-	-	777.455.882,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	-	-	-	432.900,00	-	-	-	28.811.080,00	-	-	1.861.421.382,00	-	-	602.654.520,00	2.493.319.882,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-	-	-	854.000,00	-	-	-	19.699.100,00	-	-	-	-	-	-	20.553.100,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	3.920.000,00	134.466.761,00	-	58.691.412,50	-	-	-	-	20.102.965.320,62	-	4.811.478.945,94	-	-	-	25.111.522.440,06
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	-	-	-	143.447.204,00	-	-	-	1.194.417.390,00	26.019.685.547,69	-	-	-	-	-	27.357.550.141,69
6	Rumah Sakit Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	471.688.464,00	1.671.280.148,22	-	-	-	-	-	2.142.968.612,22
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	-	25.841.000,00	-	26.540.260,00	-	-	-	108.077.770,00	1.375.263.433,38	-	-	-	-	-	1.535.522.463,38
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pengairan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.857.842.625,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.857.842.625,00	-	-	-	77.239.936.004,13
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisab Aceh	-	239.000,00	-	2.074.750,00	-	-	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.713.750,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.716.000,00	-	-	-	707.716.000,00
13	Dinas Sosial Aceh	2.750.000,00	-	-	19.284.880,00	-	-	-	2.402.126.670,00	39.454.464,00	-	2.364.063.187,00	-	-	-	4.827.679.291,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.288.917,00	-	-	587.288.917,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	-	-	-	3.814.400,00	-	-	-	3.363.800,00	-	-	-	-	-	-	7.178.200,00
16	Dinas Pangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pertanahan Aceh	-	540.000,00	-	434.000,00	240.000,00	-	12.000.000,00	931.300,00	-	-	-	-	-	-	14.145.300,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	-	-	11.058.380,00	-	-	-	810.500,00	-	-	-	-	-	-	11.868.880,00
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	-	5.512.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	471.131.322,00	-	-	-	476.643.822,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	8.000.000,00	21.494.040,00	-	3.103.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.597.540,00
21	Dinas Perhubungan Aceh	-	-	-	7.361.911,00	-	-	-	13.047.200,00	-	-	-	-	-	-	20.409.111,00
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	-	-	-	22.918.750,00	-	-	-	20.180.155,00	-	-	-	-	-	-	43.098.905,00
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	2.500.000,00	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.631.050,00	-	-	-	7.225.131.050,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	-	-	-	-	-	9.978.915.596,00	-	14.634.000,00	-	-	-	-	-	-	9.993.549.596,00
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	-	-	-	-	-	-	-	3.551.160,00	-	-	-	-	-	-	3.551.160,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	12.307.000,00	56.007.788,65	55.775.956,25	11.064.400,00	-	-	-	-	-	-	33.000.000,00	-	-	168.155.144,90
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	-	-	-	75.289.524,00	-	-	-	9.840.257,00	-	-	-	901.185.040,00	-	-	986.314.821,00
31	Dinas Peternakan Aceh	-	-	-	8.055.380,00	503.872.947,00	-	-	2.775.000,00	476.765.989,10	166.417.251,00	-	-	683.932.754,00	-	1.841.819.321,10
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sekretariat Daerah Aceh	2.710.000,00	26.672.150,00	-	2.735.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000,00	-	32.272.150,00
35	Sekretariat DPRA	5.000.000,00	60.859.260,00	-	15.384.990,00	-	-	32.340.000,00	528.681,00	-	-	-	-	-	-	114.112.931,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	6.000.000,00	4.057.546,00	-	8.711.800,00	74.000.000,00	-	14.999.985,00	3.785.188,00	-	-	-	-	-	-	109.554.519,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2.410.000,00	282.203.780,00	-	16.854.119,00	-	-	95.224.706,66	37.433.774,67	-	-	-	-	-	-	434.126.380,33
38	Badan Kepegawaian Aceh	-	1.050.000,00	-	2.065.500,00	-	-	-	2.606.600,00	-	-	-	-	-	-	5.722.100,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	-	109.519.230,00	-	19.918.062,00	-	-	-	91.489.505,00	-	-	-	-	-	-	220.926.797,00
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	-	-	-	1.184.000,00	-	-	-	2.285.000,00	-	-	-	-	-	-	3.469.000,00
41	Inspektorat Aceh	25.200.000,00	81.025.000,00	816.000,00	5.238.000,00	-	-	49.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	161.779.000,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	300.000,00	268.790,33	-	-	-	-	-	407.105,94	-	-	-	-	-	-	975.896,27
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	1.500.000,00	965.000,00	-	-	-	-	-	578.000,00	-	-	-	-	-	-	3.043.000,00
44	Dinas Syariat Islam Aceh	150.000,00	11.900.000,00	-	8.335.950,00	-	-	37.462.500,00	-	-	-	3.940.441.174,00	-	-	-	3.999.289.624,00
45	Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Keurukon Kalibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	-	-	-	13.202.832,00	-	-	-	7.343.280,00	-	-	-	-	-	-	20.546.092,00
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh	350.000,00	807.000,00	-	187.500,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.344.500,00
Jumlah		60.790.000,00	888.767.157,33	56.823.788,65	570.110.675,75	589.177.347,00	9.978.915.596,00	243.527.191,66	5.094.882.027,61	49.685.414.903,01	166.417.251,00	105.454.661.690,07	1.521.473.957,00	684.087.754,00	602.654.520,00	175.597.693.859,08

Daftar Obat Kadaluwarsa 2025

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluwarsa	Harga	Total (Rp)
1. RUMAH SAKIT JIWA						110.009.731,80
-	Acyclovir 400 mg	100	tablet	1 May 2022	532,35	53.234,50
-	Alprazolam 1 mg	6.600	tablet	1 Jun 2024	99,00	653.400,00
-	Betahistin Mesylat 6 mg	700	tablet	1 Mar 2022	110,00	77.000,00
-	Buspiron 10 mg	600	tablet	28 Feb 2022	3.919,50	2.351.700,00
-	Candesartan 16 mg	40	tablet	30 Jul 2023	322,00	12.879,95
-	Candesartan 16 mg	110	tablet	30 Sep 2023	1.100,00	121.000,00
-	Clopidogrel 75 mg	120	tablet	1 Jun 2022	1.404,00	168.480,00
-	Clopidogrel 75 mg	180	tablet	1 Jun 2022	575,00	103.500,00
-	Cotrimoxazole 480 mg	200	tablet	1 Dec 2019	126,00	25.200,00
-	Donepezil 10 mg	980	tablet	14 Oct 2022	12.485,00	12.235.300,00
-	Duloxetine 60 mg	225	tablet	1 Sep 2023	11.550,00	2.598.750,00
-	Flunarizine	820	tablet	28 Feb 2022	1.210,00	992.200,00
-	Gemfibrozil 300 mg	240	tablet	30 Sep 2021	428,00	102.720,00
-	Haloperidol 1,5 mg	18.100	tablet	31 Aug 2022	59,00	1.067.900,00
-	Haloperidol 5 mg	4.400	tablet	1 Jun 2022	60,00	264.000,00
-	Haloperidol Drop	26	Botol	1 Oct 2022	22.516,00	585.416,00
-	Laktulosa Syrup	5	Botol	30 Sep 2023	30.525,00	152.625,00
-	Oxcarbazepin 300 mg	223	tablet	30 Sep 2023	3.861,00	861.003,00
-	Piroxicam 10 mg	800	tablet	1 Jul 2022	87,75	70.197,60
-	Pramipexole 0,125 mg	90	tablet	1 Jan 2022	4.401,00	396.090,00
-	Quetiapine 100 mg	180	tablet	1 Jan 2022	8.800,00	1.584.000,00
-	Simvastatin 10 mg	180	Tablet	31 Jan 2022	117,00	21.060,00
-	Tablet Tambah Darah	235	Tablet	31 Oct 2023	255,00	59.925,00
-	Metilfenidat 10 mg	2.700	tablet	28 Feb 2021	1.600,00	4.320.000,00
-	Morphine 10 mg	41	tablet	1 Mar 2023	1.674,00	68.634,00
-	Morphine 10 mg	90	tablet	1 Apr 2024	1.200,00	108.000,00
-	Atropin Injeksi	65	ampul	28 Feb 2025	4.773,00	310.245,00
-	Dopamine Injeksi	20	ampul	1 Mar 2022	6.160,00	123.200,00
-	Diazepam injeksi	592	ampul	1 Jul 2023	1.544,95	914.610,40
-	Heparin Injeksi	25	Vial	28 Feb 2025	49.950,00	1.248.750,00
-	Insulin Glulisine 100 IU/mL 3 ml	15	Pen	1 Aug 2022	89.500,00	1.342.500,00
-	Insulin Lispro 25% dan 75% 100 IU/mL 3 ml	10	Pen	1 Feb 2022	110.968,00	1.109.680,00
-	Insulin Detemir 100 U/mL 3 ml	14	pen	1 Jun 2023	89.808,99	1.257.325,86
-	Lidocain Compositum	30	ampul	1 Dec 2023	1.405,00	42.150,00
-	Vitamin Neurotropik Injeksi	69	Vial	1 Sep 2023	3.987,50	275.137,50
-	Sulfadiazine Silver 35 g	11	Tube	1 Aug 2022	20.700,00	227.700,00
-	Sulfadiazine Silver 35 g	15	Tube	1 Oct 2023	18.557,00	278.355,00
-	Permethrin Cream	5	Tube	1 Apr 2022	27.500,00	137.500,00
-	Haloperidol Decanoat Injeksi 50 mg/ml	110	ampul	1 Mar 2023	101.300,00	11.143.000,00
-	Carbamazepine 200 mg	1.500	tablet	1 Aug 2022	250,00	375.000,00
-	Diazepam 5 mg	7.467	tablet	1 Aug 2022	109,00	813.903,00
-	Favipiravir 200 mg	5.900	tablet	1 Aug 2022	10.399,40	61.356.460,00
2. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK						2.657.113,00
-	Digoxin 0,25 mg/2 ML INJ	20	Ampul	juli 2025	21.218,00	424.360,00
-	Fenoterol Hbr 100 mcg	3	Box	juli 2025	81.030,00	243.090,00
-	Chloramphenicole Tetes Telinga 1%	2	Botol	01 September 2025	9.102,00	18.204,00
-	Salmeterol + Fluticasone 25/50 mcg INH	3	Box	Agustus 2025	62.271,00	186.813,00
-	Sulfasalazin 500 mg	270	Tablet	01 September 2025	6.327,00	1.708.290,00
-	Rifampicin 75 mg dan isoniazid 50 mg (Hibah)	84	Tablet	Oktober 2025	909,00	76.356,00
3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN						12.017.770,00
-	Apidra	11	Pen	Feb-25	90.313,00	993.443,00
-	Asam Traneksamat	96	Tablet	Agus-25	1.723,00	165.408,00
-	Atropin Sulfate	39	Amp	Jan-25	4.350,00	169.650,00
-	Atropin Sulfate	18	Amp	Feb-25	4.350,00	78.300,00
-	Azitroxacin Syr	1	Botot	Nov-25	38.499,00	38.499,00
-	Berotec	7	Pcs	Jan-25	81.030,00	567.210,00
-	Cairan RL	2	Fls	Sep-25	8.498,00	16.996,00
-	Cefadroxil 500 mg	300	Tablet	Jul-25	966,00	289.800,00
-	Cefazolin	1	Vial	Jan-25	12.100,00	12.100,00
-	Chloramfenikol	1	Botol	Jan-25	1.925,00	1.925,00
-	Chloroquin	19	Tablet	Feb-25	1.506,00	28.614,00
-	Cotrimoxazole 480 mg	1.100	Tablet	Jun-25	240,00	264.000,00
-	Cotrimoxazole Syr	37	Botol	Juli-25	3.235,00	119.695,00
-	Dexametason Inj	3	Amp	Sep-25	1.776,00	5.328,00
-	Diazepam Supp	2	Pcs	Jon-25	13.545,00	27.090,00
-	Digoxin	42	Tablet	Jan-25	189,00	7.938,00
-	Dobutamin	9	Amp	Apr-25	14.850,00	133.650,00
-	Domperidon Syr	49	Botol	Okt-25	7.700,00	377.300,00
-	Dopamet	10	Tablet	Feb-25	1.088,00	10.880,00
-	Dopamine	7	Amp	Jan-25	13.261,00	92.827,00
-	Dopamihe	39	Amp	Mar-25	13.261,00	517.179,00
-	Efedrin	2	Amp	Mar-25	29.200,00	58.400,00
-	Efrisel 10%	17	Botol	Jan-25	15.098,00	256.666,00
-	Euthyrox 50 mg	100	Tablet	Feb-25	777,00	77.700,00
-	Farbivent	30	Amp	Jan-25	4.218,00	126.540,00
-	Fluconazole 150 mg	20	Tablet	Feb-25	12.500,00	250.000,00

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluarsa	Harga	Total (Rp)
-	Hydroxychloroquine	30	Tablet	Feb-25	2.780,00	83.400,00
-	Hyoscine-N-Butylbromide	7	Amp	Jan-25	9.990,00	69.930,00
-	Iliadin Anak 0.025 A	13	Botol	Jan-25	69.375,00	901.875,00
-	Lantus	6	Pen	Feb-25	89.000,00	534.000,00
-	Levopar	300	Tablet	Mar-25	1.665,00	499.500,00
-	Lidocain 2%	10	Amp	Mar-25	2.760,00	27.600,00
-	Lisinopril 10 mg	5	Tablet	Jan-25	147,00	735,00
-	Manitol	2	Fls	Mar-25	39.650,00	79.300,00
-	MgSO4	6	Ffs	Feb-2J	7.337,00	44.022,00
-	Misoprostol	120	Tablet	Des-25	5.273,00	632.760,00
-	Natacen	15	Pcs	Nov-25	41.583,00	623.745,00
-	Norepineprin	1	Amp	Apr-25	17.239,00	17.239,00
-	Olanzapin 5 mg	450	Tablet	Juni-25	823,00	370.350,00
-	Onbrez 300 mg	1	Pcs	Okt-25	385.068,00	385.068,00
-	Permetrin Cream 5°4	43	Tube	Sep-25	12.765,00	548.895,00
-	Phytomenadione	65	Tablet	Nov-25	1.055,00	68.575,00
-	Piracetam 400 mg	154	Tablet	Mar-25	396,00	60.984,00
-	Piracetam 800 mg	150	Tablet	Mar-25	637,00	95.550,00
-	Pro TB 2	22	Tablet	Feb-25	7.731,00	170.082,00
-	Prosul	5	Amp	Mar-25	92.700,00	463.500,00
-	PTU	10	Tablet	Mar-25	495,00	4.950,00
-	Ringer Fundin	24	Fls	Mei-25	11.857,00	284.568,00
-	RL	3	Fls	Agus-25	8.498,00	25.494,00
-	Satbutamol	4	Nebul	Mei-25	4.995,00	19.980,00
-	Salbutamol	30	Amp	Agus-25	4.995,00	149.850,00
-	Sildenafil 100 mg	16	Tablet	Mar-25	47.730,00	763.680,00
-	Ultibro	1	Pcs	Okt-25	405.000,00	405.000,00
4. DINAS KESEHATAN ACEH						932.323.031,28
-	Rifampicin 75/inh 50 mg	1.512	tablet	1/25	1.026,00	1.551.312,00
-	Etambutol 100 mg	9.100	DT	1/25	670,00	6.097.000,00
-	Ethionamide 125 Mg	300	tablet	1/25	2.136,00	640.800,00
-	Cycloserin 125Mg	400	tablet	4/25	7.323,00	2.929.200,00
-	Ethionamide 250 mg	6.800	tablet	5/25	1.400,00	9.520.000,00
-	Etil Cloride	17	botol	9/26	218.550,00	3.715.350,00
-	IV Cannula Pen no.18 Cosmomed	223	Pcs	Mei 25	6.993,33	1.559.513,00
-	Hepatitis B1 dws	10.093	pouch	Mei 25	51.351,35	518.289.175,55
-	Zidovudine syr	2	botol	Juni 25	40.206,00	80.412,00
-	Cycloserin 125Mg	100	Capsul	Juni 25	7.595,00	759.500,00
-	Cycloserin 125Mg	800	Capsul	Juni 25	7.595,00	6.076.000,00
-	Linezolid 150 mg	1.600	tablet	Juni 25	4.476,00	7.161.600,00
-	Reagensia ZN	10	Kit	Juni 25	180.400,00	1.804.000,00
-	lopinavir 100mg+Ritonavir 25 mg	5.580	tablet	4/25	1.421,00	7.929.180,00
-	Artesunat inj	45	Vial	Juni 25	69.898,00	3.145.410,00
-	Zidovudine syr	55	botol	Juni 25	40.206,00	2.211.330,00
-	Dolutegravir Sodium 10 (DTG) Anak	1.800	tablet	Juli 25	771,93	1.389.480,00
-	Oralit	4.600	sachet	Juli 25	490,00	2.254.000,00
-	Bedaquiline 20 mg	240	Capsul	Agust 25	6.773,00	1.625.520,00
-	Alkohol 70% 100ml	91	botol	9/27	6.844,00	622.804,00
-	Zidovudine 300 mg +Lamivudin (Duviral)	16.380	tablet	Agts 25	4.050,00	66.339.000,00
-	Zidovudine 300 mg +Lamivudin (Duviral)	38.220	tablet	Agts 25	4.087,00	156.205.140,00
-	Levofloxacin 100 mg	300	tablet	9/25	2.262,00	678.600,00
-	Pyrazinamide 500 mg	300	tablet	Des 26	334,00	100.200,00
-	lopinavir 100mg+Ritonavir 25 mg	1.980	tablet	9/25	1.474,23	2.918.975,40
-	Chlopromazine HCL 100 MG	630	tablet	9/25	59.700,00	37.611.000,00
-	IV Cannula Pen No 20 Cosmomed	1	Pcs	Mei 28	6.993,33	6.993,33
-	Povidone Iodine 100ml	42	botol	Des 27	16.008,00	672.336,00
-	lopinavir 100mg+Ritonavir 25 mg	1.980	tablet	9/25	1.474,23	2.918.982,00
-	Clofazimine 50mg	300	tablet	Okt 25	6.450,00	1.935.000,00
-	Rifampicin 75/inh 50 mg	1.680	tablet	Okt 25	909,00	1.527.120,00
-	Lopinavir 40 mg+Ritonavir 10 mg	1.920	sachet	Okt 25	3.075,66	5.905.264,00
-	Reagen TrepoCheck Syphillis	9.825	Test	Okt 25	4.385,00	43.082.625,00
-	IV Cannula Pen no.18 Cosmomed	200	pcs	Juli 25	8.004,00	1.600.800,00
-	Lopinavir 200 mg+Ritonavir 50mg	2.640	tablet	Okt 25	6.350,00	16.764.000,00
-	BCG @ 20 DS	1	Vial	Juli -26	108.289,00	108.289,00
-	Alkohol swab	48	pcs	Agust -25	7.900,00	379.200,00
-	KDT Kat.I Dosis Harian	16	Paket	Okt 25	559.995,00	8.959.920,00
-	Reagensia ZN	10	Kit	11/25	178.500,00	1.785.000,00
-	Morfina 10 mg	10	tablet	4/25	34.360,00	343.600,00
-	Asam Traneksamat 500 mg	1.800	tablet	Des-25	1.733,00	3.119.400,00
TOTAL 1 + 2 + 3						1.057.007.646,08

NO	Nama Barang / Uraian Pemeriksaan / Jenis Menu	Volume	Satuan	Tahun Kadaluaarsa	Harga Satuan	Total (Rp)
1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN						21.643.282,00
-	Abboath No. 16	3	Pes	Apr-25	7.283,00	21.849,00
-	Barium Sulfat	5	Botol	Mar-25	1.341.000,00	6.705.000,00
-	Blood Set	3	Pes	Mei-25	13.752,00	41.256,00
-	Cutting Loop	5	Pes	Mar-25	1.309.950,00	6.549.750,00
-	ETT No. 7,0	2	Pes	Mar-35	96.400,00	192.800,00
-	ETT No.7.5	2	Pes	Mar-25	96.400,00	192.800,00
-	Folley Chateter No. 22	2	Pes	Nov-25	10.120,00	20.240,00
-	Infus Set	1	Pes	Jul-25	25.522,00	25.522,00
-	Infusomat	5	Pes	Mar-25	52.500,00	262.500,00
-	NGT No. 14	1	Pes	Feb-25	11.052,00	11.052,00
-	NGT No. 16	1	Pes	Apr-25	13.371,00	13.371,00
-	NGT No. 3,5 - 35 cm	1	Pes	Apr-25	12.800,00	12.800,00
-	NGT No. 5	2	Pes	Jan-25	15.260,00	30.520,00
-	PDS 6-0	30	Pes	Mar-25	129.930,00	3.897.900,00
-	Silkam 3/0	72	Pes	Jan-25	50.589,00	3.642.408,00
-	Three Way	1	Pes	Feb-25	2.175,00	2.175,00
-	Urine Bag	1	Pes	Jun-25	8.706,00	8.706,00
-	Urine Bag	1	Pes	Sep-25	8.706,00	8.706,00
-	Wing Needle	3	Pes	Mei-25	1.309,00	3.927,00
2. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK						10.267.669,00
-	Metapex	3	Box	Maret 2025	465.000,00	1.395.000,00
-	Bon Wax	24	pcs	Maret 2025	52.437,00	1.258.488,00
-	Lubragel 12,5 gr (Cathegel)	5	pcs	Maret 2025	23.865,00	119.325,00
-	NGT FR.14	70	pcs	April 2025	12.429,64	870.075,00
-	Extention Tube 75 cm	62	pcs	Mei 2025	7.835,89	485.825,00
-	Peep 5 cm H2O Intersurgical	9	pcs	Mei 2025	403.920,00	3.635.280,00
-	NGT 8/100 cm	100	pcs	Juli 2025	14.205,11	1.420.511,00
-	Extention Tube 75 cm	18	pcs	September 2025	7.835,89	141.046,00
-	Suction Cateter No 12	20	pcs	Desember 2025	5.165,40	103.308,00
-	Gelang dewasa abu-abu	400	pcs		1.196,25	478.500,00
-	Gelang dewasa Kuning	200	pcs		1.196,25	239.250,00
-	Gelang dewasa Ungu	69	pcs		1.754,51	121.061,00
TOTAL 1 + 2						31.910.951,00

Rekapitulasi Perkembangan Pengembalian Dana LUEP APBA Periode 2025

No	Nama LUEP	Saldo Per 31 Des 2024		Koreksi	Setoran			Pemotongan Admin Bank	Sisa Piutang		Pengurangan Piutang (Crash Program)	Jumlah Tunggalan (Sisa Pinjaman + Denda) (Rp)
		Pokok	Denda		Pokok	Denda	(Jumlah Pokok + Denda)		Pokok	Denda		
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	KP. Sulaiman Hamid	118.080.000,00	5.904.000,00		-	-	-	-	118.080.000,00	5.904.000,00		123.984.000,00
2	KP. Harap Beuna	39.920.000,00	3.496.000,00		-	-	-	-	39.920.000,00	3.496.000,00		43.416.000,00
3	KUD. Geutanyo	29.999.000,00	1.499.950,00		-	-	-	-	29.999.000,00	1.499.950,00		31.498.950,00
4	KP. Muka Blang Jaya	23.566.000,00	1.178.300,00		-	-	-	-	23.566.000,00	1.178.300,00		24.744.300,00
5	UD. Bersama	58.040.000,00	2.952.000,00		-	-	-	-	58.040.000,00	2.952.000,00		60.992.000,00
6	KP. Usaha Rajin	300.580.000,00	15.029.000,00		-	-	-	30.000,00	300.550.000,00	15.029.000,00		315.579.000,00
7	CV. Tunggal Mandiri	55.000.000,00	2.750.000,00		-	-	-	-	55.000.000,00	2.750.000,00		57.750.000,00
8	KP. Sari Alam	-	9.900.000,00		-	-	-	-	-	9.900.000,00		9.900.000,00
9	KP. Meutuah Baro	487.265.240,00	49.999.500,00	2.500,00	87.242.724,00	-	87.242.724,00	30.000,00	399.990.016,00	49.999.500,00		449.989.516,00
10	KP. Beujaya	299.815.182,00	14.999.850,00		-	-	-	-	299.815.182,00	14.999.850,00		314.815.032,00
11	CV. Babah Dua	222.727.265,00	15.000.000,00		-	-	-	-	222.727.265,00	15.000.000,00		237.727.265,00
12	KP. UD. Edi	40.700.000,00	2.035.000,00		-	-	-	-	40.700.000,00	2.035.000,00		42.735.000,00
13	KP. Makmur Jaya (BNA)	99.800.000,00	5.490.000,00		-	-	-	-	99.800.000,00	5.490.000,00		105.290.000,00
14	KP. UD Sentosa	200.000.000,00	10.000.000,00		-	-	-	-	200.000.000,00	10.000.000,00		210.000.000,00
15	KP. Takana Juo	59.805.772,00	3.740.000,00		-	-	-	-	59.805.772,00	3.740.000,00		63.545.772,00
16	Koptan Putra Anak Bangsa	393.745.454,00	24.960.000,00		-	-	-	-	393.745.454,00	24.960.000,00		418.705.454,00
17	CV. Tabah Mandiri	378.409.091,00	24.375.000,00		-	-	-	-	378.409.091,00	24.375.000,00		402.784.091,00
18	KUD. Tupah	280.181.818,00	15.000.000,00		-	-	-	-	280.181.818,00	15.000.000,00		295.181.818,00
19	UD. HMY Baru	327.600.000,00	16.380.000,00		-	-	-	-	327.600.000,00	16.380.000,00		343.980.000,00
20	UD. Mekar Tani	123.563.637,00	9.360.000,00		-	-	-	-	123.563.637,00	9.360.000,00		132.923.637,00
21	UD. Makmur Jaya (Isn)	359.200.002,00	24.960.000,00		6.363.636,00	-	6.363.636,00	-	352.836.366,00	24.960.000,00		377.796.366,00
22	KP. Tunas Muda	29.181.817,00	7.800.000,00		2.272.727,00	-	2.272.727,00	30.000,00	26.879.090,00	7.800.000,00		34.679.090,00
23	KP. Karya Warisan	89.545.454,00	5.000.000,00		-	-	-	-	89.545.454,00	5.000.000,00		94.545.454,00
24	KP. Berkat Tani	269.536.367,00	15.000.000,00		5.909.091,00	-	5.909.091,00	-	263.627.276,00	15.000.000,00		278.627.276,00
25	UD. Berkat Baru	68.727.273,00	17.550.000,00		-	-	-	-	68.727.273,00	17.550.000,00		86.277.273,00
26	UD. Jasa Bersama	5.000.000,00	9.750.000,00		-	-	-	-	5.000.000,00	9.750.000,00		14.750.000,00
27	UD. Inti Tani	129.818.182,00	11.250.000,00		909.091,00	-	909.091,00	-	128.909.091,00	11.250.000,00		140.159.091,00
28	UD. Usaha Tani	25.000.000,00	5.000.000,00		-	-	-	-	25.000.000,00	5.000.000,00		30.000.000,00
29	UD. Oya	105.454.545,00	9.750.000,00		-	-	-	-	105.454.545,00	9.750.000,00		115.204.545,00
30	UD. Makmur Tani	41.363.636,00	8.750.000,00		-	-	-	-	41.363.636,00	8.750.000,00		50.113.636,00
31	UD. Hamida Tani	241.022.727,00	12.187.500,00		-	-	-	-	241.022.727,00	12.187.500,00		253.210.227,00
32	UD. Tani Makmur	183.750.000,00	12.187.500,00		-	-	-	-	183.750.000,00	12.187.500,00		195.937.500,00
33	UD. Saboh Hate	256.818.182,00	13.750.000,00		-	-	-	-	256.818.182,00	13.750.000,00		270.568.182,00
34	KP. Usaha Tabina	116.754.545,00	9.240.000,00		227.273,00	-	227.273,00	-	116.527.272,00	9.240.000,00		125.767.272,00
35	KP. Setia	167.200.000,00	8.360.000,00		-	-	-	-	167.200.000,00	8.360.000,00		175.560.000,00
36	KP. Tiga H	105.636.361,00	8.250.000,00		454.545,00	-	454.545,00	-	105.181.816,00	8.250.000,00		113.431.816,00
37	KP. Karya Subur	15.294.544,00	9.680.000,00	24.974.544,00	-	-	-	-	(9.680.000,00)	9.680.000,00		-
38	KP. Sumber Rezeki 1 (Hj.Mariam)	176.000.000,00	8.800.000,00		-	-	-	-	176.000.000,00	8.800.000,00		184.800.000,00
39	KP. Sumber rezeki (Tamaniah)	264.000.000,00	13.200.000,00		-	-	-	-	264.000.000,00	13.200.000,00		277.200.000,00
	Setoran LUEP *)	(5.000.000,00)	(1,00)						(5.000.000,00)	(1,00)		(5.000.001,00)
	Jasa LUEP	-	-						-	-		-
	TOTAL	6.183.102.094,00	444.513.599,00	24.977.044,00	103.379.087,00	-	103.379.087,00	90.000,00	6.054.655.963,00	444.513.599,00	-	6.499.169.562,00

Resume Penyerahan Pengurusan Piutang LUEP Tahun 2025

No	Identitas Penanggung Hutang	Kedaaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
1	Ir. Bahrul Walidin Pimpinan LUEP KP. Beujaya Desa Baro Jaman Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/37/2005	299.815.182,00	14.999.850,00	314.815.032,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.521/724. 21 November 2005 - No.050/102. 21 Februari 2006 - No.050/138. 3 Maret 2006 - No.521/121/3/2011, 31 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1833/12/2014, 15 Desember 2014	
2	Muslim Pimpinan LUEP Makmur Jaya Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Rava	Usaha Tidak Jelas	Nomor : 050/1095/2009	99.800.000,00	5.490.000,00	105.290.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.256/536/2009, 15 Juni 2010 - No.526/807/3/2010, 28 September 2010 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1125/04/2015, 24 April 2015	
3	Mukhtar Saleh Pimpinan LUEP KP. UD. Edi Desa Blang Seunung Kec. Beutong Kab. Nagan Raya	Usaha Macet	Nomor : 050/1329/2009	40.700.000,00	2.035.000,00	42.735.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.526/465.5/2009, 12 Juni 2009 - No.521/74/3/2011, 27 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013,26Nopember 2013 - No.526/1854/12/204, 15 Desember 2014	
4	Tamaniah Pimpinan LUEP KP. Sumber Rezeki, Desa Teruntung Pavung Hilir Kec. Babel Kab. Aceh	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/1295/2008	264.000.000,00	13.200.000,00	277.200.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.526/465.4/2009, 12 Juni 2009 - No.521/74/3/2011, 27 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013,26Nopember 2013 - No.526/1854/12/204, 15 Desember 2014	
8	Bakhtiar Aly Pimpinan LUEP KP. Takana Juo Desa Keumumu Hilir Kec Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1292/2008	59.805.772,00	3.740.000,00	63.545.772,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.256/692/2009, 16 Juli 2009 - No.256/1467.8/2009, 28 Desember 2009 - No.521/81/3/2011, 27 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1119/04/2015, 24 April 2015	
5	Hj. Mariam Pimpinan LUEP KP. Sumber Rezeki Gampong Kulam Kec. Svamtalira Aron Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1278/2008	176.000.000,00	8.800.000,00	184.800.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 - No. 256/1467.1/2009, 28 Desember 2009 - No. 521/142/3/2011, 31 Januari 2011 - No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 - No. 526/1850/12/2014, 15 Desember 2014	
6	Ibnu Hasan Main Pimpinan LUEP KP. Irma Desa Kamhan Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1276/2008	-	-	-	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.526/465.3/2009, 12 Juni 2009 - No.256/1467.11/2009, 28 Desember 2009 - No.521/144/3/2011, 31 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - Pelunasan Setoran tahun 2024 sebesar 47.606.044,00 dan Crash program.	
7	Baharuddin Pimpinan LUEP KP. Karya Subur Desa Kubu Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang lancar	Nomor : 050/1275/2008	(9.680.000,00)	9.680.000,00	-	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.526/465.3/2009, 12 Juni 2009 - No.256/1467.12/2009,28 Desember 2009 - No.521/145/1/2011, 31 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - Setoran Tahun 2023 sebesar Rp7.267.728,00 - Setoran Tahun 2025 sebesar Rp24.974.544,00	
8	Budiman Pimpinan LUEP KP. Tiga H Desa Tanjong Puteh Kec. Nihong Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/1271/2008	105.181.816,00	8.250.000,00	113.431.816,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 - No.256/1467.19/2009, 28 Desember 2009 - No.521/146/3/2011, 31 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1116/04/2015, 24 April 2015 - Setoran Tahun 2025 sebesar Rp454.545,00	
9	M. Thaib. AR Pimpinan LUEP KP. Setia Desa Meunasah Pantan Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/1270/2008	167.200.000,00	8.360.000,00	175.560.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 - No. 256/1467.9/2009, 28 Desember 2009 - No. 521/153.1/2011, 31 Januari 2011 - No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 - No. 526/1848/12/2014, 15 Desember 2014	
10	Saridin Hasan Pimpinan LUEP KP. Usaha Tabina Desa Blang Dalam Genteng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/1269/2008	116.527.272,00	9.240.000,00	125.767.272,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.256/465.3/2009, 12 Juni 2009	

No	Identitas Penanggung Hutang	Kedaaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Fokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Uang (Rp)		
							-No.512/147/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1115/04/2015, 24 April 2015 -Setoran Tahun 2025 sebesar Rp227.273,00	
11	Nasir Nafi Pimpinan LUEP KP. Saboh Hate Desa Panigah Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/1268/2009	256.818.182,00	13.750.000,00	270.568.182,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 256/465/3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.13/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/1483/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1846/12/2014, 15 Desember 2014	
12	Said Bustami Pimpinan LUEP UD. Sentosa Desa Gelanggang Gajah Keude Tanjong Kec. Peusangan Kab. Aceh Barat Dava	Usaha tidak jelas	Nomor : 050/733/2007	200.000.000,00	10.000.000,00	210.000.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/430/2008, 28 Juli 2008 -No. 521/844/2008, 13 Oktober 2008 -No. 521/350.1/2009, 1 September 2008 -No. 526/351/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/1543/2009, 21 Februari 2010 -No. 521/65/3/2011, 27 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1846/12/2014, 15 Desember 2014	
13	Saiful Bahri Pimpinan LUEP UD. Tani Makmur Keude Simmane Emsat Kec. Simmane Keramat Kab. Aceh	Usaha bangkrut	Nomor : 050/859/2007	183.750.000,00	12.187.500,00	195.937.500,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/331/2009, 13 Mei 2009 -No.256/176/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/991/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1109/04/2015, 24 April 2015	
14	Hamdani, HS Pimpinan LUEP UD. Hamida Tani Desa Teumneun Kec. Svanmalira Bava Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/858/2007	241.022.727,00	12.187.500,00	253.210.227,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/835/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/334/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/179/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/1003/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1842/12/2014, 15 Desember 2014	
15	Saifuddin Pimpinan LUEP UD. Makmur Tani Desa Teupin Bania Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha bangkrut	Nomor : 050/857/2007	41.363.636,00	8.750.000,00	50.113.636,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/342/2009, 13 Mei 2009 -No.256/187/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/101/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1135/04/2015, 24 April 2015	
16	Syafruddin Pimpinan LUEP UD. Oya Desa Meunasah Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/856/2007	105.454.545,00	9.750.000,00	115.204.545,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/339/2009, 13 Mei 2009 -No.256/184/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/102/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1108/04/2015, 24 April 2015	
17	Abdul Munir Pimpinan LUEP Usaha Tani Jalan Pasan Inpres 3 Geudong Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/855/2007	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/336/2009, 13 Mei 2009 -No.256/181/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/103/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1134/04/2015, 24 April 2015	
18	Zulfikar Pimpinan LUEP Inti Tani Desa Geulumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara	Usaha bangkrut	Nomor : 050/854/2007	128.909.091,00	11.250.000,00	140.159.091,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/337/2009, 13 Mei 2009 -No.256/182/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/104/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1107/04/2015, 24 April 2015 -Setoran Tahun 2025 sebesar Rp909.091,00	
19	M. Yacob Ali Pimpinan LUEP UD. Jasa Bersama Desa Tanjung Dalam Selatan Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara	usaha kurang lancar	Nomor : 050/809/2007	5.000.000,00	9.750.000,00	14.750.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.256/175/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/105/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1133/04/2015, 24 April 2015	
20	M. Nurdin Mahmud Pimpinan LUEP UD. Berkat Baru Desa Meunasah Kumbung Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/807/2007	68.727.273,00	17.550.000,00	86.277.273,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/341/2009, 13 Mei 2009 -No.256/186/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/106.1/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1131/04/2015, 24 April 2015	
21	Saiful Muddin Pimpinan LUEP KP. Berkat Tani Gampong Mee Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/795/2007	263.627.276,00	15.000.000,00	278.627.276,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1841/12/2014, 15 Desember 2014 -Setoran Tahun 2023 sebesar Rp4.520.450,00 -Setoran Tahun 2025 sebesar Rp5.909.091,00	
22	H. Hasanuddin Pimpinan LUEP KP. Hasrat Jaya Desa Rangkileh Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/791/2007	-	-	-	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/332/2009, 13 Mei 2009 -No.256/177/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/108/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013	

No	Identitas Penanggung Hutang	Kedaaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Fokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Uang (Rp)		
23	Said Hamid Pimpinan LUEP KP. Karya Warisan Desa Pucok Ahue Dua Kec. Simanue Ulim Kab. Aceh Timur	Usaha bangkrut	Nomor : 050/851/2007	89.545.454,00	5.000.000,00	94.545.454,00	-No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1106/04/2015, 24 April 2015 -Setoran Tahun 2024 sebesar Rp48.809.091,00 dan Crash Program -Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/952/2008, 30 Oktober 2008 -No. 526/526/2009, 13 Mei 2009 -No. 526/191/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/111/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1840/12/2014, 15 Desember 2014	
24	Dahlan ZA Pimpinan LUEP UD. Mekar Tani Desa Blang Me Timu Kec. Jeunib Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/995/2007	123.563.637,00	9.360.000,00	132.923.637,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan Setemember tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/430/2008, 28 Juli 2008 -No. 521/832/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/310/2009, 13 Mei 2009 -No. 526/171/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/124/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1839/12/2014, 15 Desember 2014	
25	Iskandar Pimpinan LUEP UD. MHY Baru Desa Cot Ara Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/987/2007	327.600.000,00	16.380.000,00	343.980.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/831/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/315/2009, 13 Mei 2009 -No. 526/166/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/87/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1838/12/2014, 15 Desember 2014	
26	Mukhlis, ST Pimpinan LUEP UD. Makmur Jaya Desa Meunasah Dayah Kec. Glumpang Dua Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/791/2007	352.836.366,00	24.960.000,00	377.796.366,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 526/316/2009, 13 Mei 2009. -No. 521/828/2008, 13 Oktober 2008 -Setoran Tahun 2023 sebesar Rp - Lunas dengan Crash Program tahun 2023 sebesar Rp -Setoran Tahun 2023 sebesar Rp19.083.408,00 - Koreksi Rekonsiliasi Rp9.090.909,00 -Setoran Tahun 2025 sebesar Rp6.363.636,00	
27	Hasbi Yacob Pimpinan LUEP UD. Rizky Desa Meunasah Timur Kec. Peusangan Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/784/2007	-	-	-	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/906/2009, 13 Mei 2009 -No.526/174/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/301/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1102/04/2015, 24 April 2015 -Setoran Tahun 2024 sebesar Rp84.886.272,00 dan Crash Program	
28	Saifulah AB Pimpinan LUEP KUD. Tupah Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/783/2007	280.181.818,00	15.000.000,00	295.181.818,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/827/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/314/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/167/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/131/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1835/12/2014, 15 Desember 2014	
29	M. Yunus Ali Pimpinan LUEP UD. Rahmad Tani Desa Darul Aman Darussalam Kec. Samalanea Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/782/2007	-	-	-	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/307/2009, 13 Mei 2009 -No.526/173/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/135/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1101/04/2015, 24 April 2015 -Setoran Tahun 2024 sebesar Rp93.995.055,00 dan Crash program	
30	Khalidin Ismail Pimpinan LUEP CV. Tabah Mandiri Desa Teuping Kupula Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/781/2007	378.409.091,00	24.375.000,00	402.784.091,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/826/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/308/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/172/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/93/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1834/12/2014, 15 Desember 2014	
31	Marzuki Ibrahim Pimpinan LUEP Koptan Putra Anak Bangsa Desa Juli Cot Meurak Kec. Kota Jaang Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/779/2007	393.745.454,00	24.960.000,00	418.705.454,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/313/2009, 13 Mei 2009 -No.526/168/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/94/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1100/04/2015, 24 April 2015	
32	Zahrul Fudhni Pimpinan LUEP KP. Meutuah Baro Desa Lam Neubeun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	Kurang Lancar	Nomor : 050/08/2005	399.990.016,00	49.999.500,00	449.989.516,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.050/102, 21 Februari 2006 -No.050/138, 3 Maret 2006 -No.050/424, 6 Juli 2006 -No.521/4967, 7 Maret 2007 -No. Ku.900/355/2007, 18 Desember 2007 -No.521/60/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1098/04/2015, 24 April 2015 -Setoran Tahun 2023 sebesar Rp79.972.497,00 -Setoran Tahun 2025 sebesar Rp87.242.724,00	
33	T. Nyak Mawardi Pimpinan LUEP UD. Bersama Desa Tokoh Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya	Kurang Lancar	Nomor : 050/523/2004	58.040.000,00	2.952.000,00	60.992.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :	

No	Identitas Penanggung Hutang	Kedaaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Fokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Uang (Rp)		
							-No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/91, 15 Maret 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	
34	Idrus Harun Pimpinan LUEP UD. Muka Blang Jaya Desa Muka Blang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya	Kurang Lancar	Nomor : 050/514/2004	23.566.000,00	1.178.300,00	24.744.300,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/91, 15 Maret 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	
35	Ilyas Cut Ali Pimpinan LUEP KP. Geutanyo Desa Ulee Ateung Kec. Madat Kab. Aceh Timur	Usaha Macet	Nomor : 050/483/2004	29.999.000,00	1.499.950,00	31.498.950,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	
36	Herman Ahmad Pimpinan LUEP KP. Sulaiman Hamid Desa Lhok Awe-Awe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/452/2003	118.080.000,00	5.904.000,00	123.984.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 518/22581, 8 September 2004 -No. 521/4968, 7 Maret 2007 -No. 521/136/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1831/12/2014, 15 Desember 2014	
37	Zamzami Pimpinan LUEP KP. Sapeu Pakat Desa Data Makmur Kec. Blang Bintang Kabupaten Aceh	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/950/2009	-	-	-	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 256/531/2010, 15 Juni 2010 -No. 526/802/3/2010, 28 September 2010 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1122/4/2015, 24 April 2015 - Pelunasan dengan Crash Program sebesar Rp74.837.919,00 tanggal September 2024.	
38	H. Rudli Pimpinan LUEP KP. Usaha Rajin Desa Batee Linteaung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	Usaha Tidak Jelas	Nomor : 050/845/2005	300.580.000,00	15.029.000,00	315.609.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 050/102, 21 Februari 2006 -No. 050/138, 3 Maret 2006 -No. 521/4967, 7 Maret 2007 -No. 521/693/2011, 27 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1831/12/2014, 15 Desember 2014	
39	Mauridatun RL Pimpinan LUEP CV. Tunggal Mandiri Desa Lambunor Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/1281/2008	55.000.000,00	2.750.000,00	57.750.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 256/465.6/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.15/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/703/2011, 27 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1831/12/2014, 15 Desember 2014	
40	Abdul Wahed Thaleib Pimpinan LUEP CV. Bahah Dua Desa Kariang Kec. Grogong Kab. Pidie	Usaha bangkrut	Nomor : 050/845/2007	222.727.265,00	15.000.000,00	237.727.265,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat : -No. 521/839/2008, 13 Oktober 2008. -No. 526/346/2009, 13 Mei 2009. -No. 256/160/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/119/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1844/12/2014, 15 Desember 2014	
41	Munaidi Yasin Pimpinan LUEP UD. Breuh Nanggroe Desa Jeumpa Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie	Usaha tidak jelas	Nomor : 050/1087/2007	-	-	-	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/841/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/343/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/163/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/140/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1845/12/2014, 15 Desember 2014 - Pelunasan dengan Crash Program sebesar Rp271.490.907,00 tanggal Juni 2024	
42	Ismail A. Rahman Pimpinan LUEP KP. Sari Alam Desa Meurah Dua Kec. Meureudu Kab. Pidie Iava	Masih berjalan lancar	Nomor : 050/1296/2008	-	9.900.000,00	9.900.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan. -Penagihan melalui surat : -No. 526/729/2009, 22 Juli 2009.	
43	Afdhal M. Daud Pimpinan LUEP KP. Tunas Muda Desa Matang Mesjid Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen	Usaha macet	Nomor : 050/1329/2009	26.909.090,00	7.800.000,00	34.709.090,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 256/527/2010, 15 Juni 2009 -No. 526/799/3/2010, 28 September 2010 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1855/12/2014, 15 Desember 2014 - Setoran Tahun 2023 sebesar Rp906.591,00 - Setoran Tahun 2025 sebesar Rp2.727.727,00	
44	Pimpinan LUEP KP. Harap Beuna	Usaha Cukup Lancar	-	39.920.000,00	3.496.000,00	43.416.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012	
Setoran Jasa				(5.000.000,00)	(1,00)	(5.000.001,00)		
TOTAL				6.054.715.963,00	444.513.599,00	6.499.229.562,00		

(BGS/BSG) Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(BGS/BSG) Gedung dan Bangunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(BGS/BSG) Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(BGS/BSG) Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSPI Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSPI Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSPI Bangunan dan Gedung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSPI Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSPI Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASET TIDAK BERWUJUD		77.318.392.177,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.318.392.177,43
Goodwill		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisensi dan Frenchise		34.303.556.456,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.303.556.456,59
Hak Cipta		1.319.307.834,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319.307.834,84
Hak Paten		442.865.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442.865.280,00
Software		33.303.843.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.303.843.076,00
Kajian		6.856.777.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.856.777.050,00
ATB yang mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya		1.092.042.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092.042.480,00
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASET LAIN-LAIN		-	58,00	-	-	-	705.413.822.521,66	100.438.899.871,97	1.786.623.621,00	4.487.683.587.870,18	41.392.292.529,36	5.336.715.226.472,18	-	-	-
Aset Rusak Berat/Usang		-	17,00	-	-	-	705.413.822.521,66	-	-	-	15.154.508.233,06	720.568.330.771,72	-	-	-
Tanah Rusak Berat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin Rusak Berat		-	-	-	-	-	326.564.440.372,76	-	-	-	13.103.800.280,06	339.668.240.652,82	-	-	-
Gedung dan Bangunan Rusak Berat		-	17,00	-	-	-	109.723.997.105,67	-	-	-	824.796.450,00	110.548.793.572,67	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat		-	-	-	-	-	258.155.507.520,67	-	-	-	1.225.911.503,00	259.381.419.023,67	-	-	-
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat		-	-	-	-	-	10.969.877.522,57	-	-	-	-	10.969.877.522,57	-	-	-
KDP Rusak Berat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap yg tdk digunakan dlm Opr. Pemerintah		-	40	-	-	-	-	100.438.899.872	1.786.623.621	2.784.306.301.657	25.732.876.296	2.912.264.701.486	-	-	-
Aset Tidak Ditemukan Fisiknya (TDF)		-	-	-	-	-	-	100.438.899.872	-	-	2.591.313.291	103.030.213.162,77	-	-	-
Aset TDF Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset TDF Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	-	86.742.140.286,00	-	-	-	2.031.891.165,80	88.774.031.451,80	-	-	-
Aset TDF Gedung & Bangunan		-	-	-	-	-	656.564.020,00	-	-	-	197.452.125,00	854.016.145,00	-	-	-
Aset TDF Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-	-	3.105.388.450,00	-	-	-	361.970.000,00	3.467.358.450,00	-	-	-
Aset TDF Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	9.934.807.115,97	-	-	-	-	9.934.807.115,97	-	-	-
Aset TDF KDP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hilang		-	-	-	-	-	-	-	1.786.623.621	-	-	1.786.623.621	-	-	-
Aset Hilang Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Hilang Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	-	-	-	1.786.623.621,00	-	-	1.786.623.621,00	-	-	-
Aset Hilang Gedung & Bangunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Hilang Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Hilang Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Hilang KDP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Hibah		-	40,00	-	-	-	-	-	-	2.784.306.301.657	23.141.563.006	2.807.447.864.702	-	-	-
Rencana Hibah Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	156.706.462.278,00	-	156.706.462.278,00	-	-	-
Rencana Hibah Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	-	-	-	-	479.322.648.228,98	1.931.750.501,50	481.254.398.730,48	-	-	-
Rencana Hibah Gedung & Bangunan		-	33,00	-	-	-	-	-	-	1.053.869.351.065,38	3.476.087.789,00	1.057.345.438.887,38	-	-	-
Rencana Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	7,00	-	-	-	-	-	-	588.971.903.406,91	17.733.724.715,00	606.705.628.128,91	-	-	-
Rencana Hibah Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	482.351.244.677,65	-	482.351.244.677,65	-	-	-
Rencana Hibah KDP		-	-	-	-	-	-	-	-	23.084.692.000,00	-	23.084.692.000,00	-	-	-
Aset Lain - Lain Lainnya		-	1	-	-	-	-	-	-	1.703.377.286.213	504.908.000	1.703.882.194.214	-	-	-
Aset Lain - Lain Lainnya Tanah		-	1,00	-	-	-	-	-	-	1.487.079.668.840,00	-	1.487.079.668.841,00	-	-	-
Aset Lain - Lain Lainnya Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	-	22.476.271.141,00	-	-	25.005.000,00	-	22.501.276.141,00	-	-	-
Aset Lain - Lain Lainnya Gedung & Bangunan		-	-	-	-	-	-	-	-	191.803.657.032,26	334.680.000,00	192.138.337.032,26	-	-	-
Aset Lain - Lain Lainnya Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-	-	-	-	-	1.569.484.200,00	145.223.000,00	1.714.707.200,00	-	-	-
Aset Lain - Lain Lainnya Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	448.205.000,00	-	448.205.000,00	-	-	-
Aset Lain - Lain Lainnya KDP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		41.685.090.182.775,90	224,00	17.699.651.000,00	-	-	705.413.822.521,66	100.438.899.871,97	1.786.623.621,00	4.487.683.587.870,18	210.096.755.867,93	47.208.209.523.752,60	-	-	-

Aset Tetap Extracomptable

No	Nama	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Sekretariat Daerah Aceh	1.230.842.814,60	5.649.900,00	5.649.900,00	1.230.842.814,60
2	Sekretariat DPRA	1.366.643.425,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.366.643.425,00
3	Inspektorat Aceh	57.030.110,00			57.030.110,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	43.739.727,00			43.739.727,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2.074.349.868,00		678.000.000,00	1.396.349.868,00
6	Badan Kepegawaian Aceh	233.559.299,00			233.559.299,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	849.300.000,00			849.300.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	608.126.000,00			608.126.000,00
9	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	106.908.336,00			106.908.336,00
10	Dinas Pendidikan Aceh	73.446.387.689,08	2.120.807.280,00	2.408.167.280,00	73.159.027.689,08
11	Dinas Kesehatan Aceh	708.015.550,48	13.136.662,71	13.136.662,71	708.015.550,48
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	1.172.968.564,00			1.172.968.564,00
13	Dinas Pengairan Aceh	45.815.868.057,00	399.269.000,00	399.269.000,00	45.815.868.057,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	86.524.838,00			86.524.838,00
15	Dinas Sosial Aceh	1.923.427.066,00		231.789.500,00	1.691.637.566,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	602.641.899,00			602.641.899,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	85.300.400,00			85.300.400,00
18	Dinas Pangan Aceh	1.432.859.000,00			1.432.859.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	4.601.945.160,30			4.601.945.160,30
20	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	12.060.830,00			12.060.830,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	79.134.000,00			79.134.000,00
22	Dinas Perhubungan Aceh	2.199.441.025,04			2.199.441.025,04
23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	722.056.741,00	29.970.000,00	29.970.000,00	722.056.741,00
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	225.583.788,00	33.872.000,00	33.872.000,00	225.583.788,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	58.784.300,00			58.784.300,00
26	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	666.763.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	666.763.000,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	678.343.257,55	235.764.000,00	235.764.000,00	678.343.257,55
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.071.678.520,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.071.678.520,00
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	3.622.618.980,00			3.622.618.980,00
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	2.884.935.891,00	341.769.600,00	341.769.600,00	2.884.935.891,00
31	Dinas Peternakan Aceh	1.660.263.419,91	1.300.000,00	1.300.000,00	1.660.263.419,91
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	10.330.586.220,60			10.330.586.220,60
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	491.595.884,00	3.596.400,00	3.596.400,00	491.595.884,00
34	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	106.005.000,00			106.005.000,00
35	Dinas Syariat Islam Aceh	97.638.500,00			97.638.500,00
36	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.395.249.794,00	63.381.000,00	63.381.000,00	1.395.249.794,00
37	Dinas Pertanahan Aceh	60.290.906,00	3.600.000,00	3.600.000,00	60.290.906,00
38	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	124.251.900,00			124.251.900,00
39	Sekretariat Majelis Adat Aceh	97.909.000,00			97.909.000,00
40	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	69.647.000,00			69.647.000,00
41	Sekretariat Baitul Mal Aceh	85.493.196,77	73.094.607,00	73.094.607,00	85.493.196,77
42	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	176.668.100,00			176.668.100,00
43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	139.112.780,00			139.112.780,00
44	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	1.767.760.288,70	47.457.720,00	47.457.720,00	1.767.760.288,70
45	Rumah Sakit Jiwa	488.840.900,00	54.850.000,00	54.850.000,00	488.840.900,00
46	Rumah Sakit Ibu dan Anak	457.616.392,00	26.942.848,00	26.942.848,00	457.616.392,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	112.112.900,00			112.112.900,00
48	Pengelola Barang	-			-
Jumlah		166.328.880.318,02	3.472.481.017,71	4.669.630.517,71	165.131.730.818,02

Daftar Aset Tak Berwujud

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2025	Akumulasi Amortisasi	Koreksi	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Amortisasi 2025
LISENSI DAN FRENCHISE											
1	RUMAH SAKIT UMUM dr ZAINOEL ABIDIN			24.750.000,00	-	-	24.750.000,00	-		-	-
1	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00				
2	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00				
3	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00				
4	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00				
5	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00				
2	DINAS PERHUBUNGAN ACEH			115.655.960,59	-	-	115.655.960,59	(115.655.960,59)		-	(115.655.960,59)
1	Lisensi	2022	1	115.655.960,59			115.655.960,59	-115.655.960,59			(115.655.960,59)
3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH			162.350.000,00	2.330.000.000,00	2.377.900.000,00	104.450.000,00	11.975.000,00	11.975.000,00	-	-
1	Exchange CAL Hibah UNDP	2006		25.000.000,00			25.000.000,00				0,00
2	Exchange CAL Hibah UNDP	2006		25.000.000,00			25.000.000,00				0,00
3	Turbo Colding Lisensi For DMD	2009		27.225.000,00			27.225.000,00				0,00
4	Turbo Colding Lisensi For DMD	2009		27.225.000,00			27.225.000,00				0,00
5	Lisensi C Panel	2024	4	47.900.000,00		47.900.000,00	-	11.975.000,00	11.975.000,00		0,00
6	Lisensi dan Franchise	2025			2.330.000.000,00	2.330.000.000,00	-	-			0,00
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)		-	(4.000.000,00)
1	Lisensi Aplikasi	2018	4	4.000.000,00			4.000.000,00	(4.000.000,00)			(4.000.000,00)
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH			34.054.700.496,00	442.865.280,00	-	34.497.565.776,00	(32.559.352.501,00)	-	(906.836.602,50)	(33.466.189.103,50)
1	Lisensi dan Franchise	2021	4	30.870.219.366,00			30.870.219.366,00	(30.870.219.366,00)			(30.870.219.366,00)
2	E-Book 5880 unit	2022	4	387.570.280,00			387.570.280,00	(290.677.710,00)		(96.892.570,00)	(387.570.280,00)
3	Lisensi dan Franchise	2023	4	2.796.910.850,00			2.796.910.850,00	(1.398.455.425,00)		(699.227.712,50)	(2.097.683.137,50)
4	Lisensi dan Franchise	2025	4		442.865.280,00		442.865.280,00	-		(110.716.320,00)	(110.716.320,00)
	Jumlah			34.351.456.456,59	2.772.865.280,00	2.377.900.000,00	34.746.421.736,59	(32.667.033.461,59)	11.975.000,00	(906.836.602,50)	(33.585.845.064,09)
SOFTWARE											
1	DINAS PENDIDIKAN ACEH			1.614.425.760,00	0,00	0,00	1.614.425.760,00	1.502.870.760,00	0,00	0,00	(1.502.870.760,00)
1	Software modernisasi sistem Kearsipan (akan dihibahkan)	2007	4	105.800.000,00			105.800.000,00	105.800.000,00			(105.800.000,00)
2	Software/Program	2008	4	78.500.000,00			78.500.000,00	78.500.000,00			(78.500.000,00)
3	Software Aplikasi Keuangan	2012	4	91.179.000,00			91.179.000,00	91.179.000,00			(91.179.000,00)
4	OSS e-Learning untuk SMP Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	44.100.000,00			44.100.000,00	44.100.000,00			(44.100.000,00)
5	Digital library SMP Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	75.555.000,00			75.555.000,00	75.555.000,00			(75.555.000,00)
6	OSS E-Learning SMA Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	66.200.000,00			66.200.000,00	66.200.000,00			(66.200.000,00)
7	Pembuatan Aplikasi Database	2012	4	39.457.000,00			39.457.000,00	39.457.000,00			(39.457.000,00)
8	Website Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe	2013	4	99.935.000,00			99.935.000,00	99.935.000,00			(99.935.000,00)
9	Software/program pengelolaan web.	2013	4	22.500.000,00			22.500.000,00	22.500.000,00			(22.500.000,00)
10	Software	2013	4	97.790.000,00			97.790.000,00	97.790.000,00			(97.790.000,00)
11	Pembuatan Aplikasi Moner Disdik Aceh	2014	4	99.440.000,00			99.440.000,00	99.440.000,00			(99.440.000,00)
12	System Aplikasi Pendataan	2014	4	36.850.000,00			36.850.000,00	36.850.000,00			(36.850.000,00)
13	Software	2018	4	193.400.000,00			193.400.000,00	193.400.000,00			(193.400.000,00)
14	Pembuatan Aplikasi (Perangkat Radio Streaming)	2019	4	13.624.600,00			13.624.600,00	13.624.600,00			(13.624.600,00)
15	Software.....	2008	4	295.009,00			295.009,00	295.009,00			(295.009,00)
16	Software.....	2009	4	7.650.000,00			7.650.000,00	7.650.000,00			(7.650.000,00)
17	Software.....	2012	4	42.240.000,00			42.240.000,00	42.240.000,00			(42.240.000,00)
18	Software.....	2013	4	1.500.001,00			1.500.001,00	1.500.001,00			(1.500.001,00)
19	Software.....	2015	4	30.800.000,00			30.800.000,00	30.800.000,00			(30.800.000,00)
20	Software IDlearn / Software IDlearn (Indonesia Learning)SMA	2016	4	118.960.000,00			118.960.000,00	118.960.000,00			(118.960.000,00)
21	Aplikasi Receiver Radio Streaming berbasis Web Dinas dan Smartphone	2021	4	24.970.000,00			24.970.000,00	24.970.000,00			(24.970.000,00)
22	Aplikasi Receiver Video Streaming berbasis Web Dinas dan Smartphone	2021	4	24.970.000,00			24.970.000,00	24.970.000,00			(24.970.000,00)
23	Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis Digital UPTD Tekkomdik	2021	4	49.990.050,00			49.990.050,00	49.990.050,00			(49.990.050,00)
24	Aplikasi Manajemen Labkom Tekkomdik	2021	4	49.990.050,00			49.990.050,00	49.990.050,00			(49.990.050,00)
25	Aplikasi E-Talenta UPTD Tekkomdik	2021	4	49.990.050,00			49.990.050,00	49.990.050,00			(49.990.050,00)
26	Aplikasi PPDB SMA dan SMK 23 Kab/Kota UPTD Balai Tekkomdik Aceh	2024	4	148.740.000,00			148.740.000,00	37.185.000,00			(37.185.000,00)
2	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH			243.349.000,00	-	-	243.349.000,00	243.349.000,00	-	-	(243.349.000,00)
1	Alat Computing Lain-lain	2008	4	99.200.000,00			99.200.000,00	99.200.000,00			(99.200.000,00)
2	Software	2017	4	35.392.000,00			35.392.000,00	35.392.000,00			(35.392.000,00)
3	Aplikasi Lesson Organizer Bahasa untuk Dayah Perbatasan Minhajussalam	2019	4	23.626.166,67			23.626.166,67	23.626.166,67			(23.626.166,67)
4	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Safinatussalamah	2019	4	23.626.166,67			23.626.166,67	23.626.166,67			(23.626.166,67)
5	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Darul Amin	2019	4	23.626.166,67			23.626.166,67	23.626.166,67			(23.626.166,67)
6	Aplikasi Lesson Organizer Bahasa untuk Dayah Perbatasan Minhajussalam	2019	4	12.626.166,67			12.626.166,67	12.626.166,67			(12.626.166,67)
7	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Safinatussalamah	2019	4	12.626.166,67			12.626.166,67	12.626.166,67			(12.626.166,67)
8	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Darul Amin	2019	4	12.626.166,67			12.626.166,67	12.626.166,67			(12.626.166,67)
3	SEKRETARIS MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			48.480.000,00	-	-	48.480.000,00	48.480.000,00		-	(48.480.000,00)

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2025	Akumulasi Amortisasi	Koreksi	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Amortisasi 2025
1	Software	2016	4	48.480.000,00			48.480.000,00	48.480.000,00			(48.480.000,00)
4	DINAS KESEHATAN ACEH			602.545.000,00	-	-	602.545.000,00	602.545.000,00		-	(602.545.000,00)
1	Operating System (CD+Box)	2010	4	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00			(12.000.000,00)
2	Aplikasi Program (CD+Box)	2010	4	8.810.000,00			8.810.000,00	8.810.000,00			(8.810.000,00)
3	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000,00			955.000,00	955.000,00			(955.000,00)
4	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000,00			955.000,00	955.000,00			(955.000,00)
5	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000,00			955.000,00	955.000,00			(955.000,00)
6	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000,00			955.000,00	955.000,00			(955.000,00)
7	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000,00			955.000,00	955.000,00			(955.000,00)
8	CD Anti Virus Kaperski	2013	4	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00			(1.250.000,00)
9	CD Anti Virus Kaperski	2013	4	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00			(1.250.000,00)
10	CD Anti Virus Server 2008	2013	4	7.500.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00			(7.500.000,00)
11	SOFTWARE SISITEM AKADEMIK DAN ABSSENSI PEGAWAI PADA AKPER	2015	4	-			-				-
12	SOFTWARE PROGRAM/PROGRAM UNTUK PERALATAN PENUNJANG DATIN DINKES	2015	4	112.000.000,00			112.000.000,00	112.000.000,00			(112.000.000,00)
13	SOFTWARE APLIKASI ANDROID UPTD P2KK PSC 119	2017	4	69.520.000,00			69.520.000,00	69.520.000,00			(69.520.000,00)
14	APLIKASI PENDAFTARAN PELATIHAN ONLINE UPTD BAPELKES	2017	4	31.680.000,00			31.680.000,00	31.680.000,00			(31.680.000,00)
15	Software RS Kab/Kota	2018	4	199.980.000,00			199.980.000,00	199.980.000,00			(199.980.000,00)
16	Software Absensi 2018	2018	4	55.000.000,00			55.000.000,00	55.000.000,00			(55.000.000,00)
17	PENGEMBANGAN SIM RS PROVINSI & KAB/KOTA	2019	4	98.780.000,00			98.780.000,00	98.780.000,00			(98.780.000,00)
5	RUMAH SAKIT UMUM dr ZAINOEL ABIDIN			3.943.403.379,00	161.286.000,00	-	4.104.689.379,00	(3.943.403.379,00)	-	(40.321.500,00)	(3.983.724.879,00)
1	SOFTWARE CATATAN MEDIK	2006	4	193.098.225,00			193.098.225,00	(193.098.225,00)			(193.098.225,00)
2	SOFTWARE PROGRAM	2013	4	37.190.000,00			37.190.000,00	(37.190.000,00)			(37.190.000,00)
3	Software perencanaan	2014	4	55.000.000,00			55.000.000,00	(55.000.000,00)			(55.000.000,00)
4	Software / Program Microsoft visual Studio (4 Unit) IT (BLUD UTG)	2015	4	43.505.000,00			43.505.000,00	(43.505.000,00)			(43.505.000,00)
5	Software / Program Microsoft SQL Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	9.570.000,00			9.570.000,00	(9.570.000,00)			(9.570.000,00)
6	Software / Program Microsoft Windows Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	17.380.000,00			17.380.000,00	(17.380.000,00)			(17.380.000,00)
7	Software / Program Microsoft Windows Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	17.160.000,00			17.160.000,00	(17.160.000,00)			(17.160.000,00)
8	Software	2016	4	17.160.000,00			17.160.000,00	(17.160.000,00)			(17.160.000,00)
9	Software	2018	4	2.823.000.000,00			2.823.000.000,00	(2.823.000.000,00)			(2.823.000.000,00)
10	Software.....(Aplikasi Sistem Informasi Radiologi (Rs) Unlimited User)	2019	4	730.340.154,00			730.340.154,00	- 730.340.154,00			(730.340.154,00)
11	Software	2025	4		161.286.000,00					(40.321.500,00)	(40.321.500,00)
6	RUMAH SAKIT JIWA			1.422.259.725,00	-	-	1.422.259.725,00	1.422.259.725,00		-	(1.422.259.725,00)
1	PC Program MMPPI/Psikotes (APBN)...Pindahan dari KIB B Baik, Dst... (1.3.2.07.01.01.169) ke KIB ATB_Thn 2019	2006	4	164.340.000,00			164.340.000,00	164.340.000,00			(164.340.000,00)
2	TDF Aplikasi Website RSJ	2008	4	54.500.000,00			54.500.000,00	54.500.000,00			(54.500.000,00)
3	Software/Aplikasi Stock Obat	2009	4	14.900.000,00			14.900.000,00	14.900.000,00			(14.900.000,00)
4	TDF Software MMPPI (APBA)	2011	4	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			(1.000.000,00)
5	TDF Pendampingan Sofwer (BLUD) Program	2012	4	24.750.000,00			24.750.000,00	24.750.000,00			(24.750.000,00)
6	TDF Software/Program (APBA)	2012	4	92.000.000,00			92.000.000,00	92.000.000,00			(92.000.000,00)
7	TDF Software (APBA) Int.Catatan Medik	2013	4	180.000.000,00			180.000.000,00	180.000.000,00			(180.000.000,00)
8	Software Aplikasi Persediaan Gudang	2015	4	16.500.000,00			16.500.000,00	16.500.000,00			(16.500.000,00)
9	Software Sistem Informasi Rumah Sakit (BLUD)	2017	4	512.349.725,00			512.349.725,00	512.349.725,00			(512.349.725,00)
10	Software MMPPI	2017	4	167.420.000,00			167.420.000,00	167.420.000,00			(167.420.000,00)
11	Pengadaan Aplikasi SIPKD BLUD	2018	4	194.500.000,00			194.500.000,00	194.500.000,00			(194.500.000,00)
7	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK			326.204.245,00	-	-	326.204.245,00	(321.704.245,00)		(4.500.000,00)	(326.204.245,00)
1	software/program sim rs	2012	4	98.440.000,00			98.440.000,00	(98.440.000,00)			(98.440.000,00)
2	SOFTWARE REMUNERASI (BLUD)	2015	4	39.875.000,00			39.875.000,00	(39.875.000,00)			(39.875.000,00)
3	Software Program BLUD	2016	4	14.760.000,00			14.760.000,00	(14.760.000,00)			(14.760.000,00)
4	Software SIM BLUD	2017	4	149.517.000,00			149.517.000,00	(149.517.000,00)			(149.517.000,00)
5	Aplikasi SISMAADAK Versi Enterprise	2018	4	5.612.245,00			5.612.245,00	(5.612.245,00)			(5.612.245,00)
6	Software Aplikasi e-Pasien	2022	4	18.000.000,00			18.000.000,00	(13.500.000,00)	-	4.500.000,00	(18.000.000,00)
8	DINAS PENGAIRAN ACEH			248.807.600,00	-	-	248.807.600,00	(248.807.600,00)		35.550.000,00	(213.257.600,00)
1	Pembuatan Sistem Integrasi Data Monitoring Telemetry (Early Warning sistem Banjir)	2019	4	99.110.000,00			99.110.000,00	- 99.110.000,00			(99.110.000,00)
2	Software(Pendamping WISMP 20%) (TDF)	2007	4	7.497.600,00			7.497.600,00	- 7.497.600,00			(7.497.600,00)
3	Penyusunan Software Early Warning System	2023	4	142.200.000,00			142.200.000,00	- 142.200.000,00		35.550.000,00	(106.650.000,00)
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH			49.839.000,00	-	-	49.839.000,00	(24.919.500,00)		(12.459.750,00)	(37.379.250,00)
1	Software	2023	4	49.839.000,00			49.839.000,00	(24.919.500,00)	-	12.459.750,00	- 37.379.250,00
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH			76.500.000,00	-	-	76.500.000,00	(76.500.000,00)		-	(76.500.000,00)
1	Website SATPOL PP	2013	4	49.500.000,00			49.500.000,00	(49.500.000,00)			(49.500.000,00)
2	OS / Linux	2013	4	2.000.000,00			2.000.000,00	(2.000.000,00)			(2.000.000,00)
3	Software Barcode Register Barang	2017	4	25.000.000,00			25.000.000,00	(25.000.000,00)			(25.000.000,00)
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH			103.477.185,00	-	-	103.477.185,00	(79.001.685,00)		(24.475.500,00)	(103.477.185,00)
1	Software Microsoft Office	2018	4	5.575.185,00			5.575.185,00	(5.575.185,00)			(5.575.185,00)
2	Software Aplikasi Sistem, Informasi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	2022	4	97.902.000,00			97.902.000,00	(73.426.500,00)	-	24.475.500,00	(97.902.000,00)
12	DINAS SOSIAL ACEH			246.892.275,00	-	-	246.892.275,00	(238.164.206,25)		-	(238.164.206,25)
1	Soft Ware Window Server 2003 - BRA Pusat	2008	4	4.500.000,00			4.500.000,00	(4.500.000,00)		-	(4.500.000,00)
2	Program Website - Perencanaan & Pelaporan	2009	4	48.880.000,00			48.880.000,00	(48.880.000,00)		-	(48.880.000,00)
3	Software	2016	4	59.200.000,00			59.200.000,00	(59.200.000,00)		-	(59.200.000,00)
4	System Penerima Manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2018	4	49.700.000,00			49.700.000,00	(49.700.000,00)		-	(49.700.000,00)

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2025	Akumulasi Amortisasi	Koreksi	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Amortisasi 2025
5	Software	2017	4	49.700.000,00			49.700.000,00	(49.700.000,00)		-	(49.700.000,00)
6	Software (Aplikasi Data) RSN	2022	4	34.912.275,00			34.912.275,00	(26.184.206,25)			(26.184.206,25)
13	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK			25.850.000,00	-	-	25.850.000,00	25.850.000,00		-	(25.850.000,00)
1	Program Aplikasi Perhitungan Upah Lembur	2012	4	9.850.000,00			9.850.000,00	9.850.000,00			(9.850.000,00)
2	Software Aplikasi	2013	4	16.000.000,00			16.000.000,00	16.000.000,00			(16.000.000,00)
14	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK			47.480.000,00	-	-	47.480.000,00	(47.480.000,00)		-	(47.480.000,00)
1	Software Sistem Aplikasi Data SIGA	2014	4	47.480.000,00			47.480.000,00	(47.480.000,00)			(47.480.000,00)
15	DINAS PANGAN			101.500.000,00	-	-	101.500.000,00	(101.500.000,00)		-	(101.500.000,00)
1	Software dan training	2014	4	13.000.000,00			13.000.000,00	(13.000.000,00)			(13.000.000,00)
2	Software	2018	4	88.500.000,00			88.500.000,00	(88.500.000,00)			(88.500.000,00)
16	DINAS PERTANAHAN			61.325.000,00	-	-	61.325.000,00	(61.325.000,00)		-	(61.325.000,00)
1	Software	2019	4	61.325.000,00			61.325.000,00	-			(61.325.000,00)
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH			8.830.001,00	-	-	8.830.001,00	(8.830.001,00)		-	(8.830.001,00)
1	Software	2010	4	8.830.001,00			8.830.001,00	-			(8.830.001,00)
18	DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH			647.866.000,00	-	-	647.866.000,00	(647.866.000,00)		-	(647.866.000,00)
1	Aplikasi Dokumen Surat	2012	4	30.066.000,00			30.066.000,00	(30.066.000,00)			(30.066.000,00)
2	Antivirus server	2012	4	11.330.000,00			11.330.000,00	(11.330.000,00)			(11.330.000,00)
3	Antivirus server	2012	4	11.330.000,00			11.330.000,00	(11.330.000,00)			(11.330.000,00)
4	Anti Virus	2013	4	8.800.000,00			8.800.000,00	(8.800.000,00)			(8.800.000,00)
5	Aplikasi Database	2013	4	199.600.000,00			199.600.000,00	(199.600.000,00)			(199.600.000,00)
7	Software	2016	4	129.690.000,00			129.690.000,00	(129.690.000,00)			(129.690.000,00)
8	- Windows Server 2012 Standar R2 (bagian dari Server) - Microsoft Windows 10 Profesional (PC) - Anti Virus Kaspersky Small Office Security (PC & Server)	2017	4	62.765.600,00			62.765.600,00	(62.765.600,00)			(62.765.600,00)
9	Aplikasi Data Agregat (Aplikasi Sinergitas Data dan Informasi/SIDASI)	2018	4	49.500.000,00			49.500.000,00	(49.500.000,00)			(49.500.000,00)
10	Aplikasi E-Profil Kependudukan	2018	4	49.500.000,00			49.500.000,00	(49.500.000,00)			(49.500.000,00)
12	MICROSOFT Windows Server 2016 CAL-Gov Merk MICROSOFT	2018	4	16.733.900,00			16.733.900,00	(16.733.900,00)			(16.733.900,00)
13	Antivirus Client merk SYMANTEC	2018	4	450.500,00			450.500,00	(450.500,00)			(450.500,00)
14	Software	2019	4	78.100.000,00			78.100.000,00	(78.100.000,00)			(78.100.000,00)
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH			59.705.000,00	-	-	59.705.000,00	(59.705.000,00)		-	(59.705.000,00)
1	Software	2012	4	34.705.000,00			34.705.000,00	(34.705.000,00)			(34.705.000,00)
2	Software	2013	4	25.000.000,00			25.000.000,00	(25.000.000,00)			(25.000.000,00)
20	DINAS PERHUBUNGAN ACEH			5.244.074.420,00	17.482.500,00	175.029.240,00	5.086.527.680,00	(4.956.113.545,00)	-	(52.931.170,00)	(5.009.044.715,00)
1	Pengembangan Aplikasi SIMDA	2011	4	97.000.000,00			97.000.000,00	(97.000.000,00)			(97.000.000,00)
2	Pembangunan Aplikasi Tiketing SIM Sarana Publik Perhubungan Komintel Aceh Berbasis GIS	2011	4	196.500.000,00			196.500.000,00	(196.500.000,00)			(196.500.000,00)
3	Pembangunan Aplikasi Tiketing Pengaduan Jaringan	2011	4	97.000.000,00			97.000.000,00	(97.000.000,00)			(97.000.000,00)
4	Pembangunan Website Bank Data Dishubkomintel	2011	4	49.841.000,00			49.841.000,00	(49.841.000,00)			(49.841.000,00)
5	Pengembangan Sistem Email berbasis LDAP	2011	4	96.000.000,00			96.000.000,00	(96.000.000,00)			(96.000.000,00)
6	Aplikasi Pengarsipan secara Digital	2011	4	193.900.000,00			193.900.000,00	(193.900.000,00)			(193.900.000,00)
7	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi	2011	4	193.000.000,00			193.000.000,00	(193.000.000,00)			(193.000.000,00)
8	Aplikasi Kepemerintahan	2012	4	297.000.000,00			297.000.000,00	(297.000.000,00)			(297.000.000,00)
9	Aplikasi Pertizan Terpadu (BP2T) Berbasis WEB dan SMS	2012	4	296.000.000,00			296.000.000,00	(296.000.000,00)			(296.000.000,00)
10	Aplikasi SIM Sarana Publik Hubkomintel Aceh Berbasis GIS	2012	4	147.000.000,00			147.000.000,00	(147.000.000,00)			(147.000.000,00)
11	Aplikasi Integrasi Autentifikasi Akses Internet	2012	4	98.000.000,00			98.000.000,00	(98.000.000,00)			(98.000.000,00)
12	Software / program	2007	4	58.410.000,00			58.410.000,00	(58.410.000,00)			(58.410.000,00)
13	Aplikasi Wabbase Paternakan	2007	4	84.535.000,00			84.535.000,00	(84.535.000,00)			(84.535.000,00)
14	Aplikasi P2TSP Versi WEB	2007	4	84.725.000,00			84.725.000,00	(84.725.000,00)			(84.725.000,00)
15	Aplikasi P2TSP Versi LAN	2007	4	84.975.000,00			84.975.000,00	(84.975.000,00)			(84.975.000,00)
16	Aplikasi Database Transmigrasi	2007	4	84.000.000,00			84.000.000,00	(84.000.000,00)			(84.000.000,00)
17	Aplikasi Database Pendapatan Daerah	2007	4	84.122.000,00			84.122.000,00	(84.122.000,00)			(84.122.000,00)
18	Aplikasi Database Sosial	2007	4	84.700.000,00			84.700.000,00	(84.700.000,00)			(84.700.000,00)
19	Aplikasi Webbase Kependudukan	2007	4	84.700.000,00			84.700.000,00	(84.700.000,00)			(84.700.000,00)
20	Aplikasi Database Kehutanan	2007	4	84.150.000,00			84.150.000,00	(84.150.000,00)			(84.150.000,00)
21	Aplikasi Database Perkebunan	2007	4	84.150.000,00			84.150.000,00	(84.150.000,00)			(84.150.000,00)
22	Aplikasi Database Tenaga Kerja	2007	4	84.000.000,00			84.000.000,00	(84.000.000,00)			(84.000.000,00)
23	Aplikasi Persuratan	2008	4	48.488.000,00			48.488.000,00	(48.488.000,00)			(48.488.000,00)
24	Aplikasi Absensi	2013	4	7.260.000,00			7.260.000,00	(7.260.000,00)			(7.260.000,00)
25	Webcore (Aceh CMS)	2015	4	195.068.000,00			195.068.000,00	(195.068.000,00)			(195.068.000,00)
26	Pengembangan Aplikasi E-Perjinan Aceh	2015	4	187.330.000,00			187.330.000,00	(187.330.000,00)			(187.330.000,00)
27	Software	2016	4	17.500.000,00			17.500.000,00	(17.500.000,00)			(17.500.000,00)
28	Software	2016	4	1.192.560.000,00			1.192.560.000,00	(1.192.560.000,00)			(1.192.560.000,00)
29	Software	2017	4	8.000.000,00			8.000.000,00	(8.000.000,00)			(8.000.000,00)
30	Aplikasi Call Center	2019	4	19.800.000,00			19.800.000,00	(19.800.000,00)			(19.800.000,00)
31	Pek. Pengadaan Aplikasi Perkantoran	2019	4	39.847.000,00			39.847.000,00	(39.847.000,00)			(39.847.000,00)
32	Pek. Peningkatan Web Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	24.970.000,00			24.970.000,00	(24.970.000,00)			(24.970.000,00)
33	Aplikasi Brodcasting, Pek. Display Sistem Informasi Intra Dinas (Pendukung Gernas)	2019	4	47.898.900,00			47.898.900,00	(47.898.900,00)			(47.898.900,00)
34	Pek. Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Intra Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	129.379.000,00			129.379.000,00	(129.379.000,00)			(129.379.000,00)
35	Pek. Rancang Bangun Sistem Informasi Program dan Pelaporan kegiatan Intra Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	145.664.000,00			145.664.000,00	(145.664.000,00)			(145.664.000,00)
36	Aplikasi Multimedia dan Office	2021	4	13.261.000,00			13.261.000,00	(13.261.000,00)			(13.261.000,00)

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2025	Akumulasi Amortisasi	Koreksi	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Amortisasi 2025
37	Aplikasi Multimedia	2021	4	63.525.000,00			63.525.000,00	(63.525.000,00)			(63.525.000,00)
38	Software	2021	4	70.544.100,00			70.544.100,00	(70.544.100,00)			(70.544.100,00)
40	Pek. Software Editing	2022	4	65.500.000,00			65.500.000,00	(49.125.000,00)		(16.375.000,00)	(65.500.000,00)
42	Software	2024	4	303.771.420,00		175.029.240,00	128.742.180,00	(32.185.545,00)		(32.185.545,00)	(64.371.090,00)
44	Software	2025	4		17.482.500,00		17.482.500,00	-		(4.370.625,00)	(4.370.625,00)
21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH			2.772.174.700,00	2.359.970.000,00	29.970.000,00	5.102.174.700,00	(2.772.174.700,00)		(582.500.000,00)	(3.354.674.700,00)
1	Perangkat Lunak	2002	4	128.220.000,00			128.220.000,00	(128.220.000,00)			(128.220.000,00)
2	Aplikasi Data Base (SIPUP),SIMKAP On Line,Macromedia,Anti Virus untuk Client	2005	4	166.030.000,00			166.030.000,00	(166.030.000,00)			(166.030.000,00)
3	Aplikasi Simpeg, Website/Hosting Dinas Infokom,Windows XP Profesional	2006	4	621.126.000,00			621.126.000,00	(621.126.000,00)			(621.126.000,00)
4	Blue Print 5 Tahunan BPDE	2007	4	49.445.000,00			49.445.000,00	(49.445.000,00)			(49.445.000,00)
5	Data Base RAPI Dan ORARI dan Setup dan Instalasi	2008	4	212.813.700,00			212.813.700,00	(212.813.700,00)			(212.813.700,00)
7	CD Aplikasi Untuk Penyusunan Program dan Aplikasi Network/Manajemen System	2010	4	82.925.000,00			82.925.000,00	(82.925.000,00)			(82.925.000,00)
8	Server Aplikasi Underweb	2011	4	29.480.000,00			29.480.000,00	(29.480.000,00)			(29.480.000,00)
9	Aplikasi Pengelolaan Dokumen Digital,Standar Web Engine,Aplikasi Menev dan Digital Library	2013	4	580.835.000,00			580.835.000,00	(580.835.000,00)			(580.835.000,00)
10	Traffic Analizer dan Aplikasi Konfigurasi Sistem Log Managemen - Bid PSITT	2014	4	238.150.000,00			238.150.000,00	(238.150.000,00)			(238.150.000,00)
11	Software Audit Acunetix - Bid. PSITT	2014	4	173.800.000,00			173.800.000,00	(173.800.000,00)			(173.800.000,00)
12	Aplikasi Server Management Virtual dan Hypervisor - Bid. PSITT	2014	4	148.500.000,00			148.500.000,00	(148.500.000,00)			(148.500.000,00)
13	Web Core Engine - Bid. PSITT	2014	4	188.000.000,00			188.000.000,00	(188.000.000,00)			(188.000.000,00)
14	Pengembangan Aplikasi PPID - Bid. PSITT	2014	4	96.000.000,00			96.000.000,00	(96.000.000,00)			(96.000.000,00)
15	Software/Program - Bidang PSITT	2014	4	9.000.000,00			9.000.000,00	(9.000.000,00)			(9.000.000,00)
16	Software	2017	4	47.850.000,00			47.850.000,00	(47.850.000,00)			(47.850.000,00)
17	Lisensi C Panel	2025	4		29.970.000,00	29.970.000,00	-	-		-	-
18	Software	2025	4		2.330.000.000,00		2.330.000.000,00	-		(582.500.000,00)	-
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH			38.280.000,00	-	-	38.280.000,00	38.280.000,00		-	(38.280.000,00)
1	Aplikasi database monitoring evaluasi KUMKN	2014	4	38.280.000,00			38.280.000,00	(38.280.000,00)			(38.280.000,00)
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			430.415.625,00	-	-	430.415.625,00	(430.415.625,00)		-	(430.415.625,00)
1	Software	2007	4	49.475.000,00			49.475.000,00	(49.475.000,00)			(49.475.000,00)
2	Shofware Multimedia Elektronik Investasi Aceh	2011	4	4.500.000,00			4.500.000,00	(4.500.000,00)			(4.500.000,00)
3	Software Aplikasi Database Pusdatin Aceh	2013	4	199.940.625,00			199.940.625,00	(199.940.625,00)			(199.940.625,00)
4	Peralatan Jaringan Komputer (Software SMS)	2013	4	44.890.000,00			44.890.000,00	(44.890.000,00)			(44.890.000,00)
5	Software Website	2017	4	21.800.000,00			21.800.000,00	(21.800.000,00)			(21.800.000,00)
6	(Software) Pengembangan Database Informasi Penanaman modal dan Perizinan yang terintegrasi	2018	4	50.000.000,00			50.000.000,00	(50.000.000,00)			(50.000.000,00)
8	Lisensi Aplikasi	2018	4	-			-	-			-
9	Aplikasi SKM	2016	4	20.000.000,00			20.000.000,00	(20.000.000,00)			(20.000.000,00)
10	Aplikasi pelayan data	2016	4	39.810.000,00			39.810.000,00	(39.810.000,00)			(39.810.000,00)
							-	-			
24	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			283.925.000,00	-	-	283.925.000,00	(283.925.000,00)		-	(283.925.000,00)
1	Web Hosting dan Pembuatan Website Dispora	2008	4	49.900.000,00			49.900.000,00	(49.900.000,00)			(49.900.000,00)
2	Software Lisensi Microtic	2008	4	10.000.000,00			10.000.000,00	(10.000.000,00)			(10.000.000,00)
3	Software	2018	4	131.200.000,00			131.200.000,00	(131.200.000,00)			(131.200.000,00)
4	Software	2018	4	92.825.000,00			92.825.000,00	(92.825.000,00)			(92.825.000,00)
25	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH			44.500.000,00	-	-	44.500.000,00	(44.500.000,00)		-	(44.500.000,00)
1	Software	2014	4	44.500.000,00			44.500.000,00	(44.500.000,00)			(44.500.000,00)
26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			452.620.988,00	-	-	452.620.988,00	(452.620.988,00)		-	(452.620.988,00)
1	Pengadaan Software	2008	4	4.980.000,00			4.980.000,00	(4.980.000,00)			(4.980.000,00)
2	Software Komputer	2010	4	5.413.716,00			5.413.716,00	(5.413.716,00)			(5.413.716,00)
3	Software Komputer	2010	4	5.413.716,00			5.413.716,00	(5.413.716,00)			(5.413.716,00)
4	Software Komputer	2010	4	436.813.556,00			436.813.556,00	(436.813.556,00)			(436.813.556,00)
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH			488.472.400,00	4.505.000,00	-	492.977.400,00	(476.040.400,00)	-	(13.558.250,00)	(489.598.650,00)
1	Website Badan Perpustakaan	2008	4	49.725.000,00			49.725.000,00	(49.725.000,00)			(49.725.000,00)
2	Jaringan internet	2013	4	9.100.000,00			9.100.000,00	(9.100.000,00)			(9.100.000,00)
3	Software middleware integrasi inliste dengan RFID	2015	4	118.800.000,00			118.800.000,00	(118.800.000,00)			(118.800.000,00)
4	Aplikasi + training	2015	4	7.084.000,00			7.084.000,00	(7.084.000,00)			(7.084.000,00)
5	Instalasi jaringan internet	2015	4	25.000.000,00			25.000.000,00	(25.000.000,00)			(25.000.000,00)
6	Software	2015	4	49.500.000,00			49.500.000,00	(49.500.000,00)			(49.500.000,00)
7	Aplikasi dan Jaringan Absensi	2018	4	69.025.000,00			69.025.000,00	(69.025.000,00)			(69.025.000,00)
8	Instalasi Aplikasi dan Dashboard ipustaka	2018	4	60.610.000,00			60.610.000,00	(69.025.000,00)			(69.025.000,00)
9	Aplikasi Pengelolaan Arsip (E-Arsip)	2021	4	49.900.400,00			49.900.400,00	(49.900.400,00)			(49.900.400,00)
10	Pengadaan Aplikasi Penelusuran Arsip	2022	4	49.728.000,00			49.728.000,00	(37.296.000,00)		(12.432.000,00)	(49.728.000,00)
11	Software	2025	4		4.505.000,00		4.505.000,00	-		(1.126.250,00)	(1.126.250,00)
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH			226.405.000,00	-	-	226.405.000,00	(213.930.000,00)		(12.475.000,00)	(226.405.000,00)
1	Software	2016	4	49.950.000,00			49.950.000,00	(49.950.000,00)			(49.950.000,00)
2	Software	2019	4	76.560.000,00			76.560.000,00	(76.560.000,00)			(76.560.000,00)
4	Software	2020	4	49.995.000,00			49.995.000,00	(49.995.000,00)			(49.995.000,00)
5	SOFTWARE SISTEM PERIZINAN BERBASIS DIGITAL	2022	4	49.900.000,00			49.900.000,00	(37.425.000,00)		(12.475.000,00)	(49.900.000,00)
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH			634.731.000,00	-	-	634.731.000,00	(634.731.000,00)		-	(634.731.000,00)
1	Software Komputer (1 Unit)	2005	4	2.376.000,00			2.376.000,00	(2.376.000,00)			(2.376.000,00)
2	Master Booth Bahan Multiplek dilapisi Melamin SPP SPMA Saree	2011	4	3.795.000,00			3.795.000,00	(3.795.000,00)			(3.795.000,00)

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2025	Akumulasi Amortisasi	Koreksi	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Amortisasi 2025
3	Both Channer Program SPP SPMA RAE	2011	4	315.000,00			315.000,00	(315.000,00)			(315.000,00)
4	Both Channer Program SPP SPMA RAE	2011	4	315.000,00			315.000,00	(315.000,00)			(315.000,00)
5	Both Channer Program SPP SPMA RAE	2011	4	315.000,00			315.000,00	(315.000,00)			(315.000,00)
6	Both Channer Program SPP SPMA RAE	2011	4	315.000,00			315.000,00	(315.000,00)			(315.000,00)
7	Win 7 Starter Original (microsoft)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00			575.000,00	(575.000,00)			(575.000,00)
8	Win 7 Starter Original (microsoft)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00			575.000,00	(575.000,00)			(575.000,00)
9	Win 7 Starter Original (microsoft)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00			575.000,00	(575.000,00)			(575.000,00)
10	Win 7 Starter Original (microsoft)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00			575.000,00	(575.000,00)			(575.000,00)
11	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamin SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00			1.500.000,00	(1.500.000,00)			(1.500.000,00)
12	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamin SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00			1.500.000,00	(1.500.000,00)			(1.500.000,00)
13	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamin SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00			1.500.000,00	(1.500.000,00)			(1.500.000,00)
14	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamin SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00			1.500.000,00	(1.500.000,00)			(1.500.000,00)
15	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00			750.000,00	(750.000,00)			(750.000,00)
16	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00			750.000,00	(750.000,00)			(750.000,00)
17	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00			750.000,00	(750.000,00)			(750.000,00)
18	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	(650.000,00)			(650.000,00)
19	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	(650.000,00)			(650.000,00)
20	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	(650.000,00)			(650.000,00)
21	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	(650.000,00)			(650.000,00)
22	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	(650.000,00)			(650.000,00)
23	Software	2016	4	49.500.000,00			49.500.000,00	(49.500.000,00)			(49.500.000,00)
24	Software	2006	4	564.000.000,00			564.000.000,00	(564.000.000,00)			(564.000.000,00)
30	DINAS PETERNAKAN ACEH			134.180.000,00	143.745.000,00	-	277.925.000,00	(109.215.000,00)	-	(48.418.750,00)	(157.633.750,00)
1	Software Pemetaan Penyakit dan Produksi temak	2012	4	49.500.000,00	-		49.500.000,00	(49.500.000,00)			(49.500.000,00)
2	Software Aplikasi Sistem Pengelolaan Telur	2018	4	34.750.000,00			34.750.000,00	(34.750.000,00)			(34.750.000,00)
3	Aplikasi Informasi Peternakan Terintegrasi Aceh(inPETA)	2023	4	49.930.000,00			49.930.000,00	(24.965.000,00)	-	12.482.500,00	(37.447.500,00)
4	Software	2025	4		143.745.000,00		143.745.000,00	-	-	35.936.250,00	(35.936.250,00)
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH			183.015.000,00	-	-	183.015.000,00	(183.015.000,00)		-	(183.015.000,00)
1	Software	2016	4	88.000.000,00	-		88.000.000,00	(88.000.000,00)			(88.000.000,00)
2	Aplikasi Website Dinas (Aset Tak Berwujud)	2018	4	48.090.000,00			48.090.000,00	(48.090.000,00)			(48.090.000,00)
3	Software	2013	4	46.175.000,00			46.175.000,00	(46.175.000,00)			(46.175.000,00)
4	Software	2008	4	750.000,00			750.000,00	(750.000,00)			(750.000,00)
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			73.926.700,00	-	-	73.926.700,00	(73.926.700,00)		-	(73.926.700,00)
1	Software Batik Fraktal Ubatik, Hibah Kominfo	2013	4	5.929.000,00			5.929.000,00	(5.929.000,00)			(5.929.000,00)
2	Software	2015	4	49.520.000,00			49.520.000,00	(49.520.000,00)			(49.520.000,00)
3	Software	2019	4	6.451.500,00			6.451.500,00	(6.451.500,00)			(6.451.500,00)
4	Software	2019	4	6.451.500,00			6.451.500,00	(6.451.500,00)			(6.451.500,00)
5	Software	2020	4	5.574.700,00			5.574.700,00	(5.574.700,00)			(5.574.700,00)
33	SEKRETARIAT DAERAH ACEH			885.058.700,00	-	-	885.058.700,00	(872.658.700,00)		(6.200.000,00)	(878.858.700,00)
1	Software Program	2008	4	130.883.500,00			130.883.500,00	(130.883.500,00)			(130.883.500,00)
2	Software Aplikasi SIMAPA	2008	4	200.000.000,00			200.000.000,00	(200.000.000,00)			(200.000.000,00)
3	Software Program Aplikasi Dana Kerja	2010	4	197.100.000,00			197.100.000,00	(197.100.000,00)			(197.100.000,00)
4	Design dan Rancangan Database Program Aplikasi Dana Kerja	2010	4	49.400.000,00			49.400.000,00	(49.400.000,00)			(49.400.000,00)
5	Software Aplikasi Arsip Digital	2011	4	19.909.200,00			19.909.200,00	(19.909.200,00)			(19.909.200,00)
6	Website Biro Ekonomi	2013	4	39.358.000,00			39.358.000,00	(39.358.000,00)			(39.358.000,00)
7	Website BPKapet	2013	4	39.358.000,00			39.358.000,00	(39.358.000,00)			(39.358.000,00)
8	Software Anti Virus	2016	4	4.950.000,00			4.950.000,00	(4.950.000,00)			(4.950.000,00)
9	Aplikasi Insilite Perpustakaan	2018	4	34.650.000,00			34.650.000,00	(34.650.000,00)			(34.650.000,00)
10	Software (BRR)	2006	4	29.040.000,00			29.040.000,00	(29.040.000,00)			(29.040.000,00)
11	Software (biro ekonomi)	2019	4	99.660.000,00			99.660.000,00	(99.660.000,00)			(99.660.000,00)
12	Software	2013	4	15.950.000,00			15.950.000,00	(15.950.000,00)			(15.950.000,00)
13	Software	2023	4	24.800.000,00			24.800.000,00	(12.400.000,00)		(6.200.000,00)	(18.600.000,00)
34	SEKRETARIAT DPRA			273.281.000,00	-	-	273.281.000,00	(273.281.000,00)		-	(273.281.000,00)
1	Software/ Program Sistem Informasi Kepustakaan pada Sekretariat DPRA	2011	4	59.884.000,00			59.884.000,00	(59.884.000,00)			(59.884.000,00)
2	Penambahan Modul pada Sistem Informasi Kepustakaan	2013	4	19.800.000,00			19.800.000,00	(19.800.000,00)			(19.800.000,00)
3	Aplikasi Pengendalian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	2013	4	40.000.000,00			40.000.000,00	(40.000.000,00)			(40.000.000,00)
4	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi	2013	4	46.475.000,00			46.475.000,00	(46.475.000,00)			(46.475.000,00)
5	Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan Record Center	2013	4	59.772.000,00			59.772.000,00	(59.772.000,00)			(59.772.000,00)
6	Penambahan Modul pada Sistem Informasi Perpustakaan	2015	4	19.200.000,00			19.200.000,00	(19.200.000,00)			(19.200.000,00)
7	Software Database Kearsipan	2017	4	7.950.000,00			7.950.000,00	(7.950.000,00)			(7.950.000,00)
8	Anti virus	2014	4	20.200.000,00			20.200.000,00	(20.200.000,00)			(20.200.000,00)
35	BAPEDDA			1.109.935.000,00	-	-	1.109.935.000,00	(1.109.935.000,00)		-	(1.109.935.000,00)
1	E-Office	2016	4	48.500.000,00			48.500.000,00	(48.500.000,00)			(48.500.000,00)
2	Aplikasi Integrasi E-Planning dan E-Budgetting	2014	4	483.615.000,00			483.615.000,00	(483.615.000,00)			(483.615.000,00)
3	Aplikasi Integrasi E-Planning dan E-Budgetting	2015	4	541.695.000,00			541.695.000,00	(541.695.000,00)			(541.695.000,00)
4	Software	2019	4	36.125.000,00			36.125.000,00	(36.125.000,00)			(36.125.000,00)
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH			5.932.247.000,00	-	-	5.932.247.000,00	(5.932.247.000,00)		-	(5.932.247.000,00)

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2025	Akumulasi Amortisasi	Koreksi	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Amortisasi 2025
1	software	2007	4	248.625.000,00			248.625.000,00	(248.625.000,00)			(248.625.000,00)
2	Software Finger Print (masing-masing software Rp. 72.600.000 instalasi 6 titik Rp. 37.950.000 dan training Rp. 6.050.000)	2012	4	90.000.000,00			90.000.000,00	(90.000.000,00)			(90.000.000,00)
3	aplikasi sistem informasi penatausahaan keuangan Daerah	2013	4	82.500.000,00			82.500.000,00	(82.500.000,00)			(82.500.000,00)
4	Aplikasi Penatausahaan Surat Bagian Umum	2013	4	27.500.000,00			27.500.000,00	(27.500.000,00)			(27.500.000,00)
5	Anti Virus	2013	4	33.000.000,00			33.000.000,00	(33.000.000,00)			(33.000.000,00)
6	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00			27.500.000,00	(27.500.000,00)			(27.500.000,00)
7	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00			27.500.000,00	(27.500.000,00)			(27.500.000,00)
8	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00			27.500.000,00	(27.500.000,00)			(27.500.000,00)
9	Aplikasi Report (Busines Intelegence) (Kepala Dinas Report dan Gubernur Report)	2014	4	29.920.000,00			29.920.000,00	(29.920.000,00)			(29.920.000,00)
10	Aplikasi Dispenda Pusat (Aplikasi Import Data PKB1)	2015	4	1.320.000,00			1.320.000,00	(1.320.000,00)			(1.320.000,00)
11	Aplikasi Dispenda Pusat (Aplikasi Administrator)	2015	4	236.027.000,00			236.027.000,00	(236.027.000,00)			(236.027.000,00)
12	Software	2016	4	373.046.000,00			373.046.000,00	(373.046.000,00)			(373.046.000,00)
13	Software	2016	4	116.600.000,00			116.600.000,00	(116.600.000,00)			(116.600.000,00)
14	Software	2018	4	199.000.000,00			199.000.000,00	(199.000.000,00)			(199.000.000,00)
15	QR Code	2020	4	132.000.000,00			132.000.000,00	(132.000.000,00)			(132.000.000,00)
16	Aplikasi Database Aset Berbasis Android	2020	4	148.406.500,00			148.406.500,00	(148.406.500,00)			(148.406.500,00)
17	Software	2010	4	93.912.500,00			93.912.500,00	(93.912.500,00)			(93.912.500,00)
18	Software	2013	4	3.712.500.000,00			3.712.500.000,00	(3.712.500.000,00)			(3.712.500.000,00)
19	Software	2014	4	45.000.000,00			45.000.000,00	(45.000.000,00)			(45.000.000,00)
20	Web Server Engine	2021	4	98.450.000,00			98.450.000,00	(98.450.000,00)			(98.450.000,00)
21	Database MySQL	2021	4	181.940.000,00			181.940.000,00	(181.940.000,00)			(181.940.000,00)
37	BADAN KEPEGAWAIAN ACEH			406.301.113,00	-	-	406.301.113,00	(406.301.113,00)		-	(406.301.113,00)
1	WEB KORPRI	2012	4	29.150.000,00			29.150.000,00	(29.150.000,00)			(29.150.000,00)
2	Software	2017	4	109.367.500,00			109.367.500,00	(109.367.500,00)			(109.367.500,00)
3	Software	2007	4	64.932.263,00			64.932.263,00	(64.932.263,00)			(64.932.263,00)
4	Software	2013	4	97.700.000,00			97.700.000,00	(97.700.000,00)			(97.700.000,00)
5	Software	2014	4	25.393.450,00			25.393.450,00	(25.393.450,00)			(25.393.450,00)
6	Software	2015	4	30.115.000,00			30.115.000,00	(30.115.000,00)			(30.115.000,00)
7	Software	2016	4	44.650.000,00			44.650.000,00	(44.650.000,00)			(44.650.000,00)
8	software Mythware	2017	4	4.992.900,00			4.992.900,00	(4.992.900,00)			(4.992.900,00)
38	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH			103.580.000,00	-	-	103.580.000,00	(103.580.000,00)		-	(103.580.000,00)
1	Pengembangan Aplikasi Diklat	2017	4	44.300.000,00			44.300.000,00	(44.300.000,00)			(44.300.000,00)
2	Software Upgrade/ Expanded RT-Win Vers 3.00 Expanded Koneksi Software 2 to 3 Users Handkey II, Pengadaan dengan Mesin Absensi	2013	4	15.500.000,00			15.500.000,00	(15.500.000,00)			(15.500.000,00)
3	Aplikasi Beasiswa Aparatur dan Non Aparatur	2018	4	43.780.000,00			43.780.000,00	(43.780.000,00)			(43.780.000,00)
39	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH			60.500.000,00	-	-	60.500.000,00	(60.500.000,00)		-	(60.500.000,00)
1	Website Kantor	2012	4	60.500.000,00			60.500.000,00	(60.500.000,00)			(60.500.000,00)
40	INSPEKTORAT ACEH			21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	(21.000.000,00)		-	(21.000.000,00)
1	Software Database Server	2011	4	21.000.000,00			21.000.000,00	(21.000.000,00)			(21.000.000,00)
41	SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH			339.151.000,00	188.000.000,00	-	527.151.000,00	(326.659.000,00)		(53.246.000,00)	(379.905.000,00)
1	Software	2017	4	49.900.000,00			49.900.000,00	(49.900.000,00)			(49.900.000,00)
2	Software	2018	4	29.667.000,00			29.667.000,00	(29.667.000,00)			(29.667.000,00)
3	Software	2019	4	35.000.000,00			35.000.000,00	(35.000.000,00)			(35.000.000,00)
4	Aplikasi Analisis Pelanggaran HAM KKR	2021	4	99.800.000,00			99.800.000,00	(99.800.000,00)			(99.800.000,00)
5	Aplikasi Telaah Reparasi dan Rekonstruksi KKR	2021	4	49.900.000,00			49.900.000,00	(49.900.000,00)			(49.900.000,00)
6	Aplikasi Manajemen Arsip dan Dokumentasi Kesekretariatan KKR	2021	4	49.900.000,00			49.900.000,00	(49.900.000,00)			(49.900.000,00)
7	Software	2023	4	24.984.000,00			24.984.000,00	(12.492.000,00)		(6.246.000,00)	(18.738.000,00)
8	Software	2025	4		188.000.000,00		188.000.000,00	-		(47.000.000,00)	(47.000.000,00)
42	DINAS SYARIAT ISLAM			39.160.000,00	-	-	39.160.000,00	(39.160.000,00)		-	(39.160.000,00)
1	Pengadaan Website Dinas	2011	4	39.160.000,00			39.160.000,00	(39.160.000,00)			(39.160.000,00)
43	MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH			146.800.000,00	-	-	146.800.000,00	(146.800.000,00)		-	(146.800.000,00)
1	Website MPU	2011	4	44.800.000,00			44.800.000,00	(44.800.000,00)			(44.800.000,00)
2	Software/System informasi Perpustakaan	2011	4	95.000.000,00			95.000.000,00	(95.000.000,00)			(95.000.000,00)
3	Aplikasi	2013	4	7.000.000,00			7.000.000,00	(7.000.000,00)			(7.000.000,00)
44	KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA			172.535.000,00	-	-	172.535.000,00	(172.535.000,00)		-	(172.535.000,00)
1	Software	2015	4	7.500.000,00			7.500.000,00	(7.500.000,00)			(7.500.000,00)
2	Anti Virus, Microsoft	2017	4	97.495.000,00			97.495.000,00	(97.495.000,00)			(97.495.000,00)
3	Program Office	2014	4	67.540.000,00			67.540.000,00	(67.540.000,00)			(67.540.000,00)
45	SEKRETARIS BAITUL MAL			263.350.000,00	-	-	263.350.000,00	(263.350.000,00)		-	(263.350.000,00)
1	Program Software SIMZA, Bidang Sosbang	2008	4	99.500.000,00			99.500.000,00	(99.500.000,00)			(99.500.000,00)
2	Software	2014	4	49.750.000,00			49.750.000,00	(49.750.000,00)			(49.750.000,00)
3	Software	2017	4	25.000.000,00			25.000.000,00	(25.000.000,00)			(25.000.000,00)
4	Software	2019	4	89.100.000,00			89.100.000,00	(89.100.000,00)			(89.100.000,00)
	Jumlah			30.638.358.816,00	2.874.988.500,00	204.999.240,00	33.308.348.076,00	(22.334.186.902,25)		(815.535.920,00)	(30.916.991.792,25)
KAJIAN											
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.769.223.450,00	-	-	1.769.223.450,00	-		147.435.287,50	-
1	Kajian Penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah aceh tahun 2013- 2033	2022	12	1.769.223.450,00			1.769.223.450,00	(442.305.862,50)		(147.435.287,50)	(589.741.150,00)

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2025	Akumulasi Amortisasi	Koreksi	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Amortisasi 2025
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH			2.047.873.600,00	-	-	2.047.873.600,00	-740.957.866,63	0,00	-341.312.266,67	-1.082.270.133,29
1	Kajian Resiko Bencana Aceh di kabupaten Pidie	2022	6	350.000.000,00			350.000.000,00	(174.999.999,99)	-	58.333.333,33	233.333.333,32
2	Buku Laporan Kajian	2023	6	200.000.000,00			200.000.000,00	(66.666.666,66)	-	33.333.333,33	99.999.999,99
3	Buku Laporan Kajian	2023	6	500.000.000,00			500.000.000,00	(166.666.666,66)	-	83.333.333,33	249.999.999,99
4	Buku Laporan Kajian	2023	6	497.873.600,00			497.873.600,00	(165.957.866,66)	-	82.978.933,33	248.936.799,99
5	Buku Laporan Kajian	2023	6	500.000.000,00			500.000.000,00	(166.666.666,66)	-	83.333.333,33	249.999.999,99
3	DINAS PERHUBUNGAN ACEH			268.400.000,00	-	-	268.400.000,00	-		-	-
1	Revitalisasi Operasional CIO (Chief Information Officer) Dishubkomintel Aceh	2010		268.400.000,00			268.400.000,00				-
4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH			674.660.000,00	-	-	674.660.000,00	-		-	-
1	Kajian.....	2010		192.170.000,00	-	-	192.170.000,00				-
2	Kajian.....	2010		98.590.000,00	-	-	98.590.000,00				-
3	Kajian.....	2010		97.900.000,00	-	-	97.900.000,00				-
4	Kajian.....	2010		94.600.000,00	-	-	94.600.000,00				-
5	Kajian.....	2010		93.500.000,00	-	-	93.500.000,00				-
6	Kajian.....	2010		97.900.000,00	-	-	97.900.000,00				-
5	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ACEH			43.120.000,00	-	-	43.120.000,00	(14.373.333,33)		-	(14.373.333,33)
1	Kajian Pembuatan Akta PB PON XXI 2024	2022	3	43.120.000,00			43.120.000,00	14.373.333,33			(14.373.333,33)
6	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH			2.053.500.000,00	-	-	2.053.500.000,00	-		-	-
1	Kajian IG Pala Tapaktuan	2021		200.000.000,00			200.000.000,00				-
2	Kajian Potensi Pengolahan Gula Sawit Aceh	2021		60.000.000,00			60.000.000,00				-
3	Kajian Produksi dan Rangkaian Pasok Kopi Arabika Aceh Tengah dan Gayo Lues	2021		400.000.000,00			400.000.000,00				-
4	Kajian Peningkatan Produksi Kopi Arabika Gayo dan Tingkat Kesejahteraan Petani	2021		150.000.000,00			150.000.000,00				-
5	Kajian Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Perkebunan Aceh	2021		100.000.000,00			100.000.000,00				-
6	Kajian Disparitas Harga Komoditi Perkebunan di Provinsi Aceh	2022		200.000.000,00			200.000.000,00				-
7	Kajian Evaluasi Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Aceh	2022		150.000.000,00			150.000.000,00				-
8	studi kelayakan ekonomi pabrik padi di nagan raya, Reklas dr KIB E Rp. 118.500.000,- Tahun 2023	2004		118.500.000,00			118.500.000,00				-
9	Kajian Percepatan Pembangunan Pertanian Aceh Berbasis Sistem Informasi Digital (SILPA OTSUS ACEH)	2022		600.000.000,00			600.000.000,00				-
10	Kajian Spasial Peremajaan Sawit Rakyat	2023		75.000.000,00			75.000.000,00				-
	Jumlah			6.856.777.050,00	0,00	0,00	6.856.777.050,00	-1.197.637.062,46		-488.747.554,17	(1.686.384.616,62)
ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA											
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH			207.460.000,00	-	-	207.460.000,00	-		-	-
1	Karya Seni	2016	4	57.650.000,00			57.650.000,00				-
2	Film Dokumentasi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	2022		149.810.000,00			149.810.000,00				-
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH			149.203.980,00	-	-	149.203.980,00	-		-	-
1	Pembuatan Film Dokumenter Literasi	2022		149.203.980,00			149.203.980,00				-
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH			730.873.500,00	-	-	730.873.500,00	-		-	-
1	Karya Seni/ Budaya	2019	4	168.173.500,00	-		168.173.500,00				-
2	Karya Seni/ Budaya	2019	4	403.700.000,00	-		403.700.000,00				-
3	Karya Seni/ Budaya	2019	4	159.000.000,00	-		159.000.000,00				-
	Jumlah			1.087.537.480,00	0,00	0,00	1.087.537.480,00	0,00		0,00	0,00
HAK CIPTA											
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH			99.500.000,00	-	-	99.500.000,00	-		-	-
1	Film Cetak			99.500.000,00			99.500.000,00				-
2	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH			1.111.017.834,84	-	-	1.111.017.834,84	-		-	-
1	Video Mapping Gelombang Tsunami	2021		16.500.000,00			16.500.000,00				-
2	Video Pariwisata Potensi Daerah Aceh	2021		16.500.000,00			16.500.000,00				-
3	Video Informasi tentang Tsunami	2021		16.500.000,00			16.500.000,00				-
4	Video Informasi masa Rehab Rekon	2021		16.500.000,00			16.500.000,00				-
5	Peta Dunia dan Efek Tsunami Pada Wilayah Terdampak	2021		16.500.000,00			16.500.000,00				-
6	Video Informasi Perubahan Pasca Tsunami	2021		16.500.000,00			16.500.000,00				-
7	Video Informasi Perubahan Pasca Tsunami	2021		16.500.000,00			16.500.000,00				-
8	Video Informasi Perubahan Pasca Tsunami	2021		16.500.000,00			16.500.000,00				-
9	Hak Cipta Film 4 Dimensi Judul Kun Fayakun	2021		500.500.000,00			500.500.000,00				-
10	Hak Cipta	2022		478.517.834,84			478.517.834,84				-
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH			108.790.000,00	-	-	108.790.000,00	-		-	-
1	Hak Cipta	2020		108.790.000,00			108.790.000,00				-
	Jumlah			1.319.307.834,84	-	-	1.319.307.834,84	-	-	-	-
Total				74.253.437.637,43	5.647.853.780,00	2.582.899.240,00	77.318.392.177,43	-56.198.857.426,30	11.975.000,00	-2.211.120.076,67	(66.189.221.472,96)

Aset Rusak Berat

No	Nama SKPA	Harga Perolehan 2025	Akumulasi Penyusutan 2025	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan Aceh	178.939.594.703,87	(110.861.744.513,12)	68.077.850.190,75
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	219.950.000,00	(219.950.000,00)	-
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	245.666.000,00	(245.666.000,00)	-
4	Dinas Kesehatan Aceh	5.441.410.709,60	(5.388.237.068,62)	53.173.640,98
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	43.300.767.579,20	(42.648.503.374,66)	652.264.204,54
6	Rumah Sakit Jiwa	2.817.951.720,00	(2.066.404.681,54)	751.547.038,46
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	861.858.150,00	(861.858.150,00)	-
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	104.624.878.824,00	(26.259.620.075,36)	78.365.258.748,64
9	Dinas Pengairan Aceh	162.319.893.117,67	(70.041.059.044,88)	92.278.834.072,79
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	5.904.081.216,00	(5.904.081.216,00)	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	846.827.962,00	(846.827.962,00)	-
12	Dinas Sosial Aceh	5.726.615.177,85	(5.584.451.177,85)	142.164.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	183.094.000,00	(183.094.000,00)	-
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	183.845.000,00	(183.845.000,00)	-
15	Dinas Pangan Aceh	485.337.300,00	(485.337.300,00)	-
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	5.476.267.852,80	(3.744.968.370,80)	1.731.299.482,00
17	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1.144.973.745,83	(1.144.973.745,83)	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	294.875.000,00	(294.875.000,00)	-
19	Dinas Perhubungan Aceh	12.150.472.688,00	(6.712.941.593,00)	5.437.531.095,00
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	34.379.587.457,00	(32.634.002.990,33)	1.745.584.466,67
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	399.354.168,00	(396.768.508,00)	2.585.660,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	1.700.188.870,00	(1.570.743.870,00)	129.445.000,00
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	978.345.469,00	(380.709.346,98)	597.636.122,02
24	Sekretariat Majelis Adat Aceh	271.157.000,00	(233.717.000,00)	37.440.000,00
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	1.498.758.258,00	(1.498.758.258,00)	-
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	2.414.089.150,00	(2.414.089.150,00)	-
27	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	6.671.524.476,00	(4.314.691.826,08)	2.356.832.649,92
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	75.761.598.207,28	(75.647.826.206,28)	113.772.001,00
29	Dinas Peternakan Aceh	1.868.547.746,90	(1.829.802.746,90)	38.745.000,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	667.775.612,00	(667.775.612,00)	-
31	Sekretariat Daerah Aceh	26.823.400.659,00	(24.011.276.001,80)	2.812.124.657,20
32	Sekretariat Dpra	7.283.056.891,00	(7.057.308.991,00)	225.747.900,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	3.021.883.566,00	(3.021.883.566,00)	-
34	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	7.447.790.056,67	(6.749.136.049,62)	698.654.007,05
35	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	907.831.067,00	(907.831.067,00)	-
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	913.454.015,00	(913.454.015,00)	-
37	Dinas Syariah Islam Aceh	41.868.000,00	(41.868.000,00)	-
38	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	207.406.000,00	(207.406.000,00)	-
39	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	641.314.048,00	(636.124.048,00)	5.190.000,00
40	Sekretariat Baitul Mal Aceh	266.531.075,00	(266.531.075,00)	-
Jumlah		705.333.822.538,67	(449.080.142.601,65)	256.253.679.937,02

Aset Lain-Lain Extracomptable

No	Nama	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
1	Sekretariat Daerah Aceh	838.990.379,96	5.649.900,00	5.649.900,00	838.990.379,96
2	Sekretariat DPRA	79.708.602,00	1.020.000,00	1.020.000,00	79.708.602,00
3	Inspektorat Aceh	2.860.200,00			2.860.200,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	7.950.000,00			7.950.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	48.664.600,00		678.000.000,00	(629.335.400,00)
6	Badan Kepegawaian Aceh	35.532.560,00			35.532.560,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	191.828.122,00			191.828.122,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-			-
9	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.100.000,00			1.100.000,00
10	Dinas Pendidikan Aceh	15.134.964.832,35	2.120.807.280,00	2.408.167.280,00	14.847.604.832,35
11	Dinas Kesehatan Aceh	228.049.080,00	13.136.662,71	13.136.662,71	228.049.080,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	242.495.120,00			242.495.120,00
13	Dinas Pengairan Aceh	7.986.527.899,00	399.269.000,00	399.269.000,00	7.986.527.899,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	9.371.381.836,00			9.371.381.836,00
15	Dinas Sosial Aceh	32.929.500,00		231.789.500,00	(198.860.000,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	619.237.282,00			619.237.282,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	49.750.000,00			49.750.000,00
18	Dinas Pangan Aceh	15.434.350,00			15.434.350,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	643.563.299,60			643.563.299,60
20	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	9.102.000,00			9.102.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-			-
22	Dinas Perhubungan Aceh	849.163.431,00			849.163.431,00
23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	91.092.750,00	29.970.000,00	29.970.000,00	91.092.750,00
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	6.192.344,00	33.872.000,00	33.872.000,00	6.192.344,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	8.059.000,00			8.059.000,00
26	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	613.534.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00	613.534.300,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	100.080.143,00	235.764.000,00	235.764.000,00	100.080.143,00
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	88.260.504,00	14.000.000,00	14.000.000,00	88.260.504,00
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	293.886.090,00			293.886.090,00
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	2.213.482.900,00	341.769.600,00	341.769.600,00	2.213.482.900,00
31	Dinas Peternakan Aceh	356.704.123,00	1.300.000,00	1.300.000,00	356.704.123,00
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	49.054.997,00			49.054.997,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	65.778.993,00	3.596.400,00	3.596.400,00	65.778.993,00
34	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	2.524.500,00			2.524.500,00
35	Dinas Syariat Islam Aceh	4.028.500,00			4.028.500,00
36	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	8.800.000,00	63.381.000,00	63.381.000,00	8.800.000,00
37	Dinas Pertanahan Aceh	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-
38	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	19.660.000,00			19.660.000,00
39	Sekretariat Majelis Adat Aceh	8.340.000,00			8.340.000,00
40	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-			-
41	Sekretariat Baitul Mal Aceh	24.333.957,00	73.094.607,00	73.094.607,00	24.333.957,00
42	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-			-
43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	23.975.000,00			23.975.000,00
44	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN	126.775.879,00	47.457.720,00	47.457.720,00	126.775.879,00
45	Rumah Sakit Jiwa	30.060.600,00	54.850.000,00	54.850.000,00	30.060.600,00
46	Rumah Sakit Ibu dan Anak	275.561.347,00	26.942.848,00	26.942.848,00	275.561.347,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	61.661.900,00			61.661.900,00
48	Pengelola Barang	261.503.760,00			261.503.760,00
Jumlah		41.122.584.680,91	3.472.481.017,71	4.669.630.517,71	39.925.435.180,91

Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPA	saldo awal 2025	Nomor Kontrak	Uraian	Periode Kontrak		Nilai Kontrak	MUTASI		Prestasi yang Belum Dinikmati
					Awal	Akhir		Tambah	Kurang	
Pendapatan Diterima Dimuka SKPA		10.123.761.071,04					32.517.232.916,85	3.647.388.848,70		7.259.235.722,15
1	Dinas Pendidikan Aceh		028/001/2025	Sewa Foto Copy dan Sewa Kantin Didik , Sekolah	-	-	-	72.478.082,22		72.478.082,22
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		007/SPK/II/2021	Sewa Kantin	03 Februari 2025	03 Februari 2026	7.900.000,00	714.246,58		714.246,58
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisab Aceh	10.415.145,99	007/SPK/II/2021	Sewa Atm	01 Februari 2024	31 Januari 2027	15.000.000,00		4.995.437,96	5.419.708,03
5	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	423.497,27	01/204/2024	Sewa Kantin	01 Februari 2024	31 Januari 2025	5.000.000,00		423.497,27	-
6	Dinas Pangan Aceh		001/248/2025	Sewa Kantin	01 Februari 2025	31 Januari 2026		424.657,53		424.657,53
			NO. 900.1.13.1/418.1/2025	Sewa Tanah Dan Gedung Bangunan Balai Keureukon Inong Aceh (Bkia)	03 Maret 2025	04 Maret 2026	15.000.000,00	2.589.041,10		2.589.041,10
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	18.993.711,17	No.02 / PKS / 2023	Sewa Tanah Dan Gedung Bangunan Balai Keureukon Inong Aceh (Bkia)	13 Februari 2023	12 Februari 2025	322.893.090,00		18.993.711,17	-
		2.575.342,47	002/PAADLHK/VI/2024	Sewa Kantin	08 Juli 2024	07 Juli 2025	5.000.000,00		2.575.342,47	-
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	767.123,29	001/PAADLHK/VI/2024	Lapangan Tennis	21 Mei 2024	20 Mei 2025	2.000.000,00		767.123,29	-
			NO. 01/PAADLHK/IX/2025	Lapangan Tennis	24 September 2025	23 September 2026	2.000.000,00	1.457.534,25		1.457.534,25
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.972.602,74	020/1176/DPMG/VI/2024	Sewa Kantin	01 April 2024	31 Maret 2025	8.000.000,00		1.972.602,74	-
			020/58/DPMG/VI/2025		01 April 2025	31 Maret 2026	8.000.000,00	1.972.602,74		1.972.602,74
10	Dinas Perhubungan Aceh	2.593.922.891,57	49/PKS/2021. SPej.307/HK.102/ASDP.2021	Kmp Birr	16 Agustus 2021	15 Agustus 2026	8.000.850.000,00		1.599.293.674,70	994.629.216,87
		3.885.614.457,84	41/PKS/2022. SPej.108/HK.102/ASDP.2022	Kmp Aceh Hebat 2	30 Januari 2022	30 Januari 2027	9.348.000.000,00		1.868.576.122,67	2.017.038.335,17
		66.448.260,54	13/PKS/2023	Sewa Tanah	10 Juli 2023	10 Juli 2028	94.402.000,00		18.375.547,22	48.072.713,32
		35.240.775,48	04/132-PKS/0011	Sewa Atm Bsi	01 Desember 2023	01 Desember 2026	55.200.000,00		18.859.731,80	16.381.043,68
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	284.431.743,84	03/PKS/2024	Sewa Ruangan Gedung	16 Januari 2024	15 Januari 2025	352.071.000,00		70.337.118,22	214.094.625,62
		237.077.024,63	44/PKS/2023	Sewa Lahan untuk Mini Soccer	29 Desember 2023	28 Desember 2028	297.078.000,00		59.350.558,29	177.726.466,34
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	95.756.803,50	32/PKS/2023	Sewa Lahan untuk Taman Budaya	22 September 2023	21 September 2028	128.638.000,00		25.699.436,23	70.057.367,27
				Sewa Kantin	01 Juli 2024	30 Juni 2025	7.020.000,00		-	-
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	3.333.358,42	NO. SPK. 001/SPK-KOP/III/2024	Sewa Kantin	01 September 2024	30 AGUSTUS 2025	5.000.000,00			3.333.358,42
		3.324.175,82	NO. SPK. 002/SPK-KOP/III/2024	Sewa Kantin	01 September 2024	30 AGUSTUS 2025	5.000.000,00			3.324.175,82
		24.787.671,23	593.1/SKRA/7/2024	Sewa - PT. Daya Mitra Telekomunikasi	24 August 2024	23 August 2025	38.500.000,00		24.787.671,23	-
		54.936.131,38	351/SPKKCU.01/XI/2023 - 523/2694/1.2/2023	Sewa ATM - Bank Aceh	01 November 2023	31 October 2026	90.000.000,00		54.936.131,39	0,01
		3.983.606,56	523/0009.1/1.2/2024	Sewa - PPI Anak Laut	28 Januari 2024	27 Januari 2025	54.000.000,00		3.983.606,56	(0,00)
		1.849.315,07	974/65/2023	Sewa - PT Diol Kapal Group	16 Mei 2023	16 Mei 2024	25.000.000,00		1.849.315,07	-
		10.655.737,70	020/50/001.2/2024 - 267/GUB/II/2024	Sewa - PPI UJONG BAROH (DASWIN GEUCIK UJONG BAROH)	22 Februari 2024	21 Februari 2025	75.000.000,00		10.655.737,70	-
			No.351/SPKKCU.01/XI/2023 : 523/2694/1.2/2023; Tgl. 1-11-2023	BANK ACEH (ATM)	01 November 2023	31 October 2026	90.000.000,00	24.963.503,65		24.963.503,65
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		000.2.3.2/8605 TGL 10 JULI 2025	CV CEMARA INDAH	3 OKT 2025	2 OKT 2030	129.262.500,00	122.891.401,97		122.891.401,97
			000.2.3.2/8604 TGL 10 JULI 2025	CV FISHERYARY INDO PERKASA	7 OKT 2025	6 OKT 2035	480.000.000,00	36.690.410,96		36.690.410,96
			000.2.3.2/8603 TGL 10 JULI 2025	PT ES MUDA PERKASA	18 September 2025	17 September 2030	258.576.605,00	243.707.742,17		243.707.742,17
			No.000.2.3.2/8602 Tgl. 10-7-2025	PT ACEH LAMPULU JAYA BAHARI (AJB)	08 September 2025	07 September 2030	1.034.100.000,00	968.973.220,15		968.973.220,15
			000.2.3.2/8606 Tgl. 10-7-2025	PT MATAHARI TETAP PERKASA	25 AGUST 2025	24 AGUST 2030	361.935.000,00	336.365.659,91		336.365.659,91
			500.5/2660/1.2/2025, Tgl. 3 DESEMBER 2025	PABRIK ES PPI UJONG SERANGGA	3 DES 2025	2 DES 2026	10.368.000,00	9.541.978,02		9.541.978,02
			415.3/159/2025, Tgl. 15 AGUSTUS 2025	MILITARI AHMAD	01 Januari 2026	31 DES 2026	3.200.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00
			415.3/32/2025, Tgl. 12 MARET 2025	EDI SAPUTRA	12 MARET 2025	12 MARET 2026	3.000.000,00	575.342,47		575.342,47
			415.3/31/2025, Tgl. 12 MARET 2025	M.NAZAR	12 MARET 2025	12 MARET 2026	3.000.000,00	575.342,47		575.342,47
			500.5/0036.1/1.2/2025 Tgl. 20 Februari 2025	PPI ANAK LAUT	20 JANUARI 2025	20 Februari 2026	50.000.000,00	6.313.131,31		6.313.131,31
			425.3/192 Tgl 11 MEI 2025	PT. Diol Kapal Group	16 MEI 2025	16 MEI 2026	1.800.000,00	591.780,82		591.780,82
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	11.671.232,88	52/009/VI/13	Sewa Lahan Untuk Kantin	02 Agustus 2024	01 Agustus 2025	20.000.000,00		11.671.232,88	
			52/001/VI/13	Sewa Lahan Untuk Kantin	21 Agustus 2025	20 Agustus 2026	15.000.000,00	9.534.246,58		9.534.246,58
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	4.541.095,89	10 Agustus 2025	Sewa Lahan Untuk Kantin	10 Agustus 2025	09 Agustus 2026	7.500.000,00	4.541.095,89	4.541.095,89	4.541.095,89
			No. 1061.01/SP-SM/2024	Sewa Kantin Selda Aceh	01 Agustus 2024	31 Juli 2025	20.000.000,00			-
			1061.003.01/SP-SM/2024	Sewa Ruang Kantor & Ruang Atm Cabang Pembantu Bank Aceh Syariah	01 Agustus 2024	31 Juli 2025	12.000.000,00			-
18	Sekretariat Daerah Aceh		No. 1063.01/SP-SM/2024	Sewa Ruang Usaha Kantor Koppaka	01 Agustus 2024	31 Juli 2025	7.000.000,00			-
			1063.01.01/SP-SM/2024	Sewa Ruang Kantor & Ruang Atm Cabang Pembantu Bank Aceh Syariah	01 Agustus 2025	31 Juli 2026	12.000.000,00	6.969.863,01		6.969.863,01
			Um 679.01/SP-SM/2025	Sewa Kantin Selda Aceh	01 Agustus 2025	31 Juli 2026	20.000.000,00	11.616.438,36		11.616.438,36
			Um 679.01/SP-SM/2025	Sewa Ruang Usaha Kantor Koppaka	01 Agustus 2025	31 Juli 2026	7.000.000,00	4.965.753,42		4.965.753,42
		1.139.178,08	100.3.7.1/485/SPK/IV/2024	Sewa Atm	01 April 2024	31 Maret 2025	4.620.000,00		1.139.178,08	
19	Sekretariat DPR			Sewa Atm	01 April 2025	31 Desember 2025	3.465.000,00			-
			000.2.3.2/1907/VI/2025	Sewa Kantin	01 Januari 2025	31 Desember 2025	15.000.000,00			-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	2.252.054,79	027/0902/2024	Sewa Kantin	02 Oktober 2024	02 Oktober 2025	3.000.000,00			2.252.054,79
		34.931.506,85	Nomor : 034.A/SPKKCU.01/IV/2024 DAN Nomor	Sewa Tempat Atm Bank Aceh Di Uptd Batch	01 Mei 2024	30 April 2027	45.000.000,00	19.931.506,85		19.931.506,85
		16.259.124,09	SURAT PERSETUJUAN RO NO.03/1385-3/RO.A	Sewa Tempat Atm Bank Bsi Di Uptd Banda Aceh	01 Februari 2023	31 Januari 2026	45.000.000,00	1.272.810,22		1.272.810,22
		43.726.027,40	Nomor : 034.A/SPKKCU.01/IV/2024 DAN Nomor	Sewa Tempat Atm Bank Aceh Di Uptd Aceh Utara	01 Desember 2024	30 12 2027	45.000.000,00	28.726.027,40		28.726.027,40
		504.875.753,01	SK No.15/PKS/2021	Sewa Kerjasama Barang Milik Aceh Setoran Dari Yayasan Tpk Fakihah	03 Oktober 2020	02 Oktober 2025	3.352.375.000,00			-
		1.081.809.656,49	Kontrak 25/PKS/2023 -376/UNIII/HK.02.06/2023	Sewa Uak Rajm	29 Agustus 2023	28 Agustus 2028	1.479.390.900,00	786.255.371,60		786.255.371,60
		182.626.053,64	Nomor Kontrak: 05/PKS/2023	Sewa Warkop Agussalam	05 Mei 2023	04 Mei 2028	273.490.000,00	127.987.931,03		182.626.053,64
		2.618.744,66	Nomor: 49/PKS/2024	Sewa Balai Pengajian Mekkah Al Mukarramah	06 November 2023	06 November 2028	3.405.300,00	1.938.430,21		1.938.430,21
21	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	130.930.161,56	Nomor Kontrak 44/PKS/2022 - K. TEL 0227/HK.81	Sewa Ptelekomunikasi Indonesia	10 Juni 2022	09 Juni 2027	298.475.000,00	77.234.084,07		130.930.161,56
		-	Nomor Kontrak: 15/PKS/2023	Sewa Intan Pandini-Didaki	10 Juli 2023	09 Juli 2024	4.908.000,00			-
		-	Nomor Kontrak: 12/PKS/2023	Sewa Bahiar M Jamil	23 Mei 2023	23 Mei 2024	1.466.000,00			-
		-	Nomor Kontrak: 500.17/PKS/19/2023	Sewa Joel Furniture	31 Januari 2022	30 Januari 2027	16.116.000,00			-
		14.359.255,20	Nomor Kontrak 01/PKS/2022	Sewa Rahman Zainal	31 Januari 2022	30 Januari 2027	34.500.000,00	7.463.033,96		14.359.255,20
		5.280.112,27	Nomor Kontrak: 67/PKS/2024	Sewa Intan Pandini-Didaki	11 Juli 2024	10 Juli 2029	5.836.250,00	4.113.501,51		4.113.501,51
		4.612.039,86	Nomor Kontrak: 73/PKS/2024	Sewa Dari Cv Joel Furniture	05 Juli 2024	04 Juli 2024	9.099.430,00	4.612.039,86		4.612.039,86
		352.685.592,99	Nomor Kontrak: 70/PKS/2024	Sewa Dari Pj Pema	17 Desember 2024	17 Desember 2026	358.881.680,00	172.894.752,99		172.894.752,99
		27.680.939,70	Nomor Kontrak: 72/PKS/2024	Sewa Agussalam	05 Agustus 2024	04 Mei 2028	273.490.000,00			27.680.939,70
		164.934.032,39	Nomor Kontrak: 71/PKS/2024	Sewa Dari Gita Phonnasari Jasman	16 Desember 2024	15 Desember 2029	862.477.392,85	164.934.032,39		164.934.032,39
			Nomor Kontrak: 06/PKS/2025	Sewa dari BAKTIAR YAYASAN MAKAHAYATI	09 April 2025	08 April 2030	712.178.325,00	38.243.000,47		38.243.000,47
			Nomor Kontrak: 17/PKS/2025	Sewa dari YAYASAN TELUNGKU FAKINAH	03 Oktober 2024	02 Oktober 2030	2.855.820.000,00	194.352.243,29		194.352.243,29
22	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	28.549.270,07	584/365/2022-017/UKT.01/PKS/X/2022	Sewa ATM	26 Oktober 2022	26 Oktober 2025	105.000.000,00	98.677.007,30		98.677.007,30
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	10.158.904,11	01/VI/PS/2024	Sewa Kantin	26 Juli 2024	25 Juli 2025	18.000.000,00			10.158.904,11
		30.684.931,20	No. 04/082-PKS/1001/1/451.2/597/UPTD MRB	Perjanjian Sewa Menyewa Pt. Bank Syariah Indonesia	15 Juli 2024	15 Juli 2026	44.444.444,00		19.999.999,80	16.841.931,40
24	Dinas Syariah Islam Aceh	62.926.027,40	No. 3496/spk/csy.01/VI/2024 dan 451.2/1008	Perjanjian Sewa Menyewa Pt. Bank Aceh Syariah	11 November 2024	11 November 2027	66.000.000,00	22.000.000,00		40.926.027,40
		68.000.000,00	No. 451.2/ND/0005	Pendapatan Alas Pelaksanaan Pemikahan Di Bulan Januari Dan Sudah Diterima Biaya Pemikahan Desember 2024	Tahun 2025		68.000.000,00	48.000.000,00		48.000.000,00

25 Dinas Sosial Aceh		027/Dinsos/9856/I/2025	Sewa Kantin	02 Januari 2025	31 Desember 2025	5.100.000,00			-
Pendapatan Diterima Dimuka BLUD	286.664.536,69					1.755.385.556,00	574.993.651,97		602.238.651,97
1 Rumah Sakit Umum DR. Zainoe Abidin	7.224.958,95	445/02130/20	Sewa - PT Bank Syariah Mandiri	01 Maret 2020	01 Maret 2025	220.000.000,00		7.224.958,95	-
	6.768.459,43	70	Sewa - PT Bank Aceh Syariah	24 Februari 2022	24 Februari 2025	135.000.000,00		6.768.459,43	-
	49.927.007,30	445/17591/2023 DAN 363/SPK/KCU/01/2023	Sewa - ATM BANK ACEH	01 September 2023	31 Agustus 2026	90.000.000,00	19.954.379,56	49.927.007,30	19.954.379,56
	19.797.371,30	22/03-3/010.445/02129/2020	Sewa - PT Bank Syariah Mandiri	30 Agustus 2020	29 Agustus 2025	150.000.000,00		19.797.371,30	
	44.054.794,51	NO.23/008-PKS/8029 DAN NO.445/04844/2024	Sewa - ATM BSI	21 Juni 2024	20 Juni 2026	60.000.000,00	14.054.794,52	44.054.794,52	14.054.794,51
	89.490.968,80	010/SL-GCT/AC/VIII/2023 DAN 445/11128/2023	Sewa - PT. GLOBAL CITRA TAMA	01 Agustus 2023	31 Juli 2028	125.000.000,00	64.518.336,07	89.490.968,80	64.518.336,07
		010/SL-GCT/AC/VIII/2023 DAN 445/11128/2023	Sewa- shop corner	05 Januari 2023	04 Januari 2026	45.000.000,00	164.233,58		164.233,58
		NOMOR.3	BSI PAIMENT POINT	01 Maret 2025	01 Maret 2030	337.500.000,00	280.941.949,62		280.941.949,62
		NOMOR.44	BANK ACEH SYARIAH	24 Februari 2025	23 Februari 2028	202.500.000,00	144.986.301,37		144.986.301,37
		001/PKS/KPN-SS/IV/2024 DAN 100.4.7/12995/2024	KANTIN KPN	02 Juni 2023	01 Juni 2026	243.000.000,00	33.700.729,93		33.700.729,93
	25.319.343,06	NOMOR : 29-	Sewa Atm Bank Aceh Syariah	06 Januari 2023	05 Januari 2026	75.000.000,00	342.153,28	25.319.343,06	342.153,28
	42.658.682,51	NOMOR - 4/1312-3/8029	Sewa Atm Bsi	15 Juli 2024	15 Juli 2026	55.585.556,00	14.903.924,73	42.658.682,51	14.903.924,73
2 Rumah Sakit Ibu dan Anak	1.422.950,82	NOMOR : RSI/1784/2024	Sewa Area Parkir	01 Februari 2024	31 Januari 2025	16.800.000,00	1.426.849,32	1.422.950,82	1.426.849,32
3 Rumah Sakit Jiwa		No : 04/070-PKS/10011 No : 010/1517	Sewa ATM	01 Januari 2024	31 December 2026	81.000.000,00	27.245.000,00		27.245.000,00
JUMLAH	10.410.425.607,72					34.272.618.472,85	4.222.382.500,67		7.861.474.374,12

UTANG TRANSFER BAGI HASIL PAJAK

No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL PAJAK ACEH KEPADA KAB/KOTA					
		PBB-KB (Rp)	PAP (Rp)	PAJAK ROKOK (Periode Okt. & Nov)			JUMLAH
				BAGI HASIL 100% (Rp)	POTONG BPJS (Rp)	JUMLAH (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kota							
1	BANDA ACEH	9.420.640.437,00	6.756.923,00	2.117.448.916,00	1.572.884.487,00	544.564.429,00	9.971.961.789,00
2	SABANG	2.934.480.284,00	8.335.840,00	1.191.311.879,00	937.120.038,00	254.191.841,00	3.197.007.965,00
3	LHOKSEUMAWE	5.431.577.698,00	17.273.736,00	1.847.335.890,00	1.457.340.954,00	389.994.936,00	5.838.846.370,00
4	LANGSA	4.275.481.345,00	9.724.876,00	1.836.910.269,00	1.266.223.712,00	570.686.557,00	4.855.892.778,00
5	SUBULUSSALAM	3.018.624.300,00	11.588.512,00	1.423.702.050,00	1.124.647.853,00	299.054.197,00	3.329.267.009,00
Jumlah		25.080.804.064,00	53.679.887,00	8.416.709.004,00	6.358.217.044,00	2.058.491.960,00	27.192.975.911,00
Kabupaten							
1	ACEH BESAR	8.021.657.785,00	24.696.263,00	2.799.817.056,00	2.147.813.602,00	652.003.454,00	8.698.357.502,00
2	PIDIE	6.579.542.487,00	7.724.277,00	2.901.368.618,00	6.467.848.793,00	(3.566.480.175,00)	3.020.786.589,00
3	ACEH JAYA	3.191.154.887,00	8.955.784,00	1.424.278.929,00	-	1.424.278.929,00	4.624.389.600,00
4	BIREUEN	7.024.303.714,00	14.041.793,00	2.928.649.131,00	2.293.202.185,00	635.446.946,00	7.673.792.453,00
5	PIDIE JAYA	3.526.316.766,00	8.903.788,00	1.705.473.880,00	1.338.221.474,00	367.252.406,00	3.902.472.960,00
6	BENER MERIAH	3.440.051.472,00	7.336.037,00	1.728.753.863,00	1.364.236.156,00	364.517.707,00	3.811.905.216,00
7	ACEH UTARA	7.053.294.510,00	33.069.931,00	3.651.465.669,00	2.755.402.816,00	896.062.853,00	7.982.427.294,00
8	ACEH TIMUR	5.674.463.996,00	11.023.644,00	2.864.126.496,00	2.225.064.975,00	639.061.521,00	6.324.549.161,00
9	ACEH TENGAH	4.041.433.704,00	7.153.354,00	1.957.448.667,00	1.535.899.372,00	421.549.295,00	4.470.136.353,00
10	GAYO LUES	2.888.519.267,00	13.353.965,00	1.456.011.441,00	1.149.070.470,00	306.940.971,00	3.208.814.203,00
11	ACEH TENGGARA	3.197.518.720,00	16.122.192,00	1.989.578.305,00	1.560.029.042,00	429.549.263,00	3.643.190.175,00
12	ACEH TAMIANG	5.236.420.149,00	17.711.179,00	2.301.464.877,00	-	2.301.464.877,00	7.555.596.205,00
13	ACEH SELATAN	4.292.805.113,00	7.353.880,00	2.021.197.949,00	1.586.383.036,00	434.814.913,00	4.734.973.906,00
14	ACEH SINGKIL	3.203.882.554,00	13.342.428,00	1.576.792.295,00	1.244.606.978,00	332.185.317,00	3.549.410.299,00
15	SIMEULUE	2.684.169.514,00	7.167.567,00	1.421.908.710,00	1.121.449.265,00	300.459.445,00	2.991.796.526,00
16	ACEH BARAT	4.898.429.900,00	10.185.121,00	1.874.169.112,00	4.159.528.053,00	(2.285.358.941,00)	2.623.256.080,00
17	NAGAN RAYA	4.476.649.181,00	41.344.137,00	1.747.117.837,00	1.366.651.032,00	380.466.805,00	4.898.460.123,00
18	ACEH BARAT DAYA	3.738.090.991,00	7.961.209,00	1.675.041.435,00	1.318.712.620,00	356.328.815,00	4.102.381.015,00
Jumlah		83.168.704.710,00	257.446.549,00	38.024.664.270,00	33.634.119.869,00	4.390.544.401,00	87.816.695.660,00
Total		108.249.508.774,00	311.126.436,00	46.441.373.274,00	39.992.336.913,00	6.449.036.361,00	115.009.671.571,00

Beban Persediaan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
A.	Beban Barang Pakai Habis	1.567.702.751.319,51	1.351.192.800.284,07	216.509.951.035,44	16,02
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.157.667.998,00	1.808.850.657,50	3.348.817.340,50	185,14
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	49.947.972.655,39	15.310.303.332,35	34.637.669.323,04	226,24
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.426.100.014,31	7.606.290.921,90	1.819.809.092,41	23,93
4	Beban Bahan-Bahan Baku	8.843.474.633,00	7.170.235.139,00	1.673.239.494,00	23,34
5	Beban Bahan-Barang dalam Proses	353.925.500,00	-	353.925.500,00	-
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	44.714.359.356,00	24.640.953.374,00	20.073.405.982,00	81,46
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	924.786.362,68	981.698.949,22	(56.912.586,54)	(5,80)
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	10.950.957.410,00	10.423.910.199,00	527.047.211,00	5,06
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	516.492.832,00	2.379.379.446,00	(1.862.886.614,00)	(78,29)
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	298.105.913.685,98	247.158.576.883,33	50.947.336.802,65	20,61
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000,00	528.273.475,00	(508.273.475,00)	(96,21)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	784.162.534,00	5.907.300.206,00	(5.123.137.672,00)	(86,73)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	124.778.811,00	130.005.633,00	(5.226.822,00)	(4,02)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	76.756.800,00	6.600.000,00	70.156.800,00	1.062,98
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	62.693.744,00	86.013.900,00	(23.320.156,00)	-
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	30.346.900,00	(30.346.900,00)	(100,00)
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	515.700.289,00	928.107.483,00	(412.407.194,00)	(44,44)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.613.734.605,50	43.624.149.780,63	989.584.824,87	2,27
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.395.387.129,36	2.989.166.121,00	(593.778.991,64)	(19,86)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.047.404.956,66	50.017.555.251,33	(3.970.150.294,67)	(7,94)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.018.261.340,00	3.024.590.680,00	(6.329.340,00)	(0,21)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	8.290.645.980,67	8.985.888.920,00	(695.242.939,33)	(7,74)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	167.868.603,71	199.066.080,51	(31.197.476,80)	(15,67)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.253.835.393,91	11.938.326.592,94	(3.684.491.199,03)	(30,86)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	12.631.530.064,00	5.540.965.359,00	7.090.564.705,00	127,97
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	22.435.159.463,00	17.970.486.130,00	4.464.673.333,00	24,84
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.111.113.257,67	4.069.252.180,67	41.861.077,00	1,03
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	85.287.624.229,87	79.566.169.032,19	5.721.455.197,68	7,19
30	Beban Obat-Obatan-Obat	211.599.280.096,85	202.790.438.850,05	8.808.841.246,80	4,34
31	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	231.534.049,00	1.105.954.230,00	(874.420.181,00)	(79,06)
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	505.672.685.147,95	417.736.269.702,45	87.936.415.445,50	21,05
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.536.981.820,00	33.957.556.820,00	(32.420.575.000,00)	(95,47)
34	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.389.581.990,00	3.098.001.800,00	291.580.190,00	9,41
35	Beban Natura dan Pakan-Pakan	2.992.024.036,00	1.809.342.400,00	1.182.681.636,00	65,37
36	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.928.333.854,00	1.264.363.008,00	663.970.846,00	52,51
37	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	811.783.493,00	591.150.800,00	220.632.693,00	37,32
38	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	3.361.821.480,00	-	3.361.821.480,00	-
39	Beban Makanan dan Minuman Rapat	87.324.922.975,00	60.555.195.108,00	26.769.727.867,00	44,21
40	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.324.342.721,00	17.860.110.129,00	(6.535.767.408,00)	(36,59)
41	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.604.776.005,00	2.642.303.399,00	(37.527.394,00)	(1,42)
42	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	14.602.011.400,00	13.742.385.400,00	859.626.000,00	6,26
43	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	30.524.516.540,00	25.059.904.091,00	5.464.612.449,00	21,81
44	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.557.864.100,00	1.842.318.000,00	(284.453.900,00)	(15,44)
45	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.018.536.240,00	4.368.230.818,00	3.650.305.422,00	83,56
46	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	7.000.000,00	362.830.300,00	(355.830.300,00)	(98,07)
47	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.437.764.000,00	1.337.205.000,00	100.559.000,00	7,52
48	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
49	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.333.430.403,00	2.321.135.561,00	3.012.294.842,00	129,78
50	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.963.700.100,00	3.918.325.260,00	(1.954.625.160,00)	(49,88)
51	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	275.594.050,00	287.691.300,00	(12.097.250,00)	(4,20)
52	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	30.999.900,00	-	30.999.900,00	-
53	Beban Pakaian Adat Daerah	17.500.000,00	-	17.500.000,00	-
54	Beban Pakaian Batik Tradisional	898.938.869,00	184.728.720,00	714.210.149,00	386,63
55	Beban Pakaian Olahraga	489.703.400,00	839.496.960,00	(349.793.560,00)	(41,67)
56	Beban Pakaian Jas/Safari	1.987.717.000,00	483.400.000,00	1.504.317.000,00	311,20
B.	Beban Barang Tak Habis Pakai	20.411.533,00	-	5.879.033,00	-
1	Beban Komponen-Komponen Lainnya	3.479.033,00	-	3.479.033,00	-
2	Beban Komponen-Komponen Lainnya	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	14.532.500,00	-	-	-
C.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.991.630.517,71	3.475.377.375,73	561.253.141,98	16,15
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	22.600.000,00	29.880.000,00	(7.280.000,00)	(24,36)
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.000.000,00	-	29.000.000,00	-
3	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	20.710.000,00	-	20.710.000,00	-
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	15.958.000,00	50.534.000,00	(34.576.000,00)	(68,42)
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	4.400.001,00	-	4.400.001,00	-
6	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
7	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.747.000,00	-	1.747.000,00	-
8	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	600.000,00	-	600.000,00	-
9	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	42.112.900,00	-	42.112.900,00	-
10	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pakir Es	1.228.000,00	-	1.228.000,00	-
11	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	600.000,00	-	600.000,00	-

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	350.000,00	-	350.000,00	-
13	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
14	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	1.432.000,00	-	1.432.000,00	-
15	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	18.460.000,00	-	18.460.000,00	-
16	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
17	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	2.690.000,00	-	2.690.000,00	-
18	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	4.301.260,00	-	4.301.260,00	-
19	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	1.881.600,00	-	1.881.600,00	-
20	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	793.860,00	-	793.860,00	-
21	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.870.000,00	-	5.870.000,00	-
22	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	800.000,00	-	800.000,00	-
23	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	47.982.000,00	-	47.982.000,00	-
24	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
25	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	34.858.000,00	-	34.858.000,00	-
26	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	-	61.680.000,00	(61.680.000,00)	(100,00)
27	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	17.700.000,00	-	17.700.000,00	-
28	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	1.300.000,00	27.395.800,00	(26.095.800,00)	(95,25)
29	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	87.000,00	1.113.000,00	1.279,31
30	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	374.974.600,00	309.438.418,55	65.536.181,45	21,18
31	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	74.209.600,00	28.986.000,00	45.223.600,00	156,02
32	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	400.000,00	-	400.000,00	-
33	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-
34	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	600.000,00	-	600.000,00	-
35	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	750.578.800,00	599.443.468,00	151.135.332,00	25,21
36	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-	436.000,00	(436.000,00)	(100,00)
37	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	456.526.000,00	46.389.380,00	410.136.620,00	884,12
38	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	11.372.024,00	2.562.000,00	8.810.024,00	343,87
39	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
40	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
41	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	450.000,00	-	450.000,00	-
42	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	161.489.000,00	-	161.489.000,00	-
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	350.000,00	-	350.000,00	-
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	500.000,00	-	500.000,00	-
47	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO	63.368.120,00	25.058.074,00	38.310.046,00	152,89
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	850.000,00	-	850.000,00	-
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5.515.000,00	-	5.515.000,00	-
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO	-	2.319.900,00	(2.319.900,00)	(100,00)
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	840.000,00	-	840.000,00	-
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomi	650.000,00	-	650.000,00	-
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	800.000,00	-	800.000,00	-
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	900.000,00	-	900.000,00	-
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	350.000,00	-	350.000,00	-
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	308.290.301,00	-	308.290.301,00	-
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	500.000,00	-	500.000,00	-
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	1.542.240,00	-	1.542.240,00	-

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	657.720,00	-	657.720,00	-
60	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	950.000,00	-	950.000,00	-
61	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit ALat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	-	3.663.000,00	(3.663.000,00)	(100,00)
62	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	8.926.000,00	-	8.926.000,00	-
63	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	19.850.000,00	-	19.850.000,00	-
64	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	4.960.000,00	-	4.960.000,00	-
65	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	18.799.000,00	199.565.500,00	(180.766.500,00)	(90,58)
66	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	21.790.954,00	-	21.790.954,00	-
67	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	4.037.040,00	-	4.037.040,00	-
68	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	1.629.180,00	-	1.629.180,00	-
69	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	900.000,00	-	900.000,00	-
70	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	870.000,00	-	870.000,00	-
71	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO	-	185.000.000,00	(185.000.000,00)	(100,00)
72	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	66.697.000,00	-	66.697.000,00	-
73	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	4.061.100,00	-	4.061.100,00	-
74	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	-	22.552.000,00	(22.552.000,00)	(100,00)
75	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.658.000,00	-	13.658.000,00	-
76	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	51.753.000,00	-	51.753.000,00	-
77	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	88.950.000,00	-	88.950.000,00	-
78	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.500.000,00	19.245.620,28	(17.745.620,28)	-
79	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
80	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	9.860.000,00	-	9.860.000,00	-
81	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	-	632.908.072,98	(632.908.072,98)	(100,00)
82	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	99.779.461,92	(99.779.461,92)	-
83	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	10.978.443,16	-	10.978.443,16	-
84	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	5.558.219,55	-	5.558.219,55	-
85	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO	539.513.500,00	-	539.513.500,00	-
86	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO	-	70.010.000,00	(70.010.000,00)	-
87	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	13.242.987,00	-	13.242.987,00	-
88	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	66.530.068,00	390.672.190,00	(324.142.122,00)	(82,97)
89	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	399.269.000,00	398.795.140,00	473.860,00	0,12
90	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	63.381.000,00	223.976.350,00	(160.595.350,00)	(71,70)
91	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	47.678.000,00	-	47.678.000,00	-
92	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO	-	45.000.000,00	-	-
Total Beban Persediaan		1.571.714.793.370,22	1.354.668.177.659,80	217.046.615.710,42	16,02

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
I	Koreksi/Penyesuaian Kas		(248.100.000,00)	66.974,57	(248.100.000,00)	66.974,57
	Penambahan		-	66.974,57	-	66.974,57
1	Dinas Pendidikan	Koreksi SILPA BLUD 2024	-	66.974,45	-	66.974,45
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Koreksi tambah saldo desimal kas di kasda tahun 2025 sesuai hasil rekonsiliasi dengan bidang perbendaharaan	-	0,12	-	
	Pengurangan		(248.100.000,00)	-	(248.100.000,00)	-
1	Dinas Kesehatan Aceh	Penyetoran Kas Bendahara Penerimaan (Retribusi Jasa Usaha Bapelkes Tahun 2023) Berdasarkan Setoran Tanggal 06/05/2024	(248.100.000,00)		(248.100.000,00)	-
II	Koreksi/Penyesuaian Piutang		(4.874.698.809,21)	(7.516.650.506,00)	(4.286.185.211,21)	(8.103.664.104,00)
	Penambahan		77.176.917,79	(7.516.650.506,00)	78.676.917,79	(7.516.650.506,00)
1	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Koreksi/penyesuaian piutang Rp.32.409.917,79 (atas Penyisihan Piutang BPJS Rp.32.282.746,50, Penyisihan Piutang Obat Kemo Rp.77.471,29 dan Ambulan Rp.49.700) , Koreksi Utang Rp. 26.211.730,00 (Atas Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp.2.851.980,00 dan Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Rp.23.359.750,00),	32.409.917,79		32.409.917,79	-
		Koreksi atas kurang saji Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis Surat Direktur RSIA No:900/2716/2025 tgl 23 Desember 2025.	-	483.176.069,00		483.176.069,00
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	Penghapusan Penyisihan Piutang Retribusi TA 2024	44.767.000,00		44.767.000,00	-
3	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	Penambahan Piutang Retribusi 2023 yang belum tercatat sebesar Rp1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Koreksi BPKatas lebih saji piutang tahun lalu		(7.999.826.575,00)	-	(7.999.826.575,00)
	Pengurangan		(4.951.875.727,00)	-	(4.364.862.129,00)	(587.013.598,00)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Koreksi Kelebihan Pengakuan Piutang BLUD 2023	(4.023.413.457,00)		(4.023.413.457,00)	-
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Penyesuaian Dana Bergulir LUEP dari Pengurangan Administrasi Bank Sebesar Rp64.800,00 Dan Pengurangan Cash Program Sebesar Rp. 821.828.413,00	(821.828.413,00)		(821.828.413,00)	-
		Pelunasan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil TA 2023 Rp102.047.557,00	(102.047.557,00)		(102.047.557,00)	-
3	Dinas Syariat Islam Aceh	Koreksi Piutang : Hapus Piutang atas PPN, PPH 21 dan PPH 22 dengan Kas Negara dari BLUD Tahun lalu sebesar 4.586.300	(4.586.300,00)		(4.586.300,00)	-
	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Koreki atas lebih saji Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis Surat Direktur RSIA No:900/2716/2025 tgl 23 Desember 2025.	-	-	587.013.598,00	(587.013.598,00)
III	Koreksi/Penyesuaian Persediaan		917.875.920,50	19.711.557.245,82	1.712.554.850,00	18.916.878.316,32
	Penambahan		917.875.920,50	19.711.557.245,82	917.875.920,00	19.711.557.246,32
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Koreksi Kurang Catat Persediaan Non Medis 2023	844.083.920,00		844.083.920,00	-
2	Rumah Sakit Jiwa	Persediaan TA. 2025	-	491.245,82		491.245,82
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Penyesuaian Persediaan Untuk Diserahkan sesuai dengan BAST No. 01/BAST/PPTK.1/PPBG-WILI/PERKIM/2024 yaitu Asrama Putri di Semarang	39.835.000,00		39.835.000,00	-
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	Koreksi Persediaan Akibat Salah Catat Tahun 2023	0,50			0,50
5	Dinas Peternakan Aceh	Koreksi Nilai Persediaan Obat-obaatan Tahun 2023 senilai Rp.33.957.000,00	33.957.000,00		33.957.000,00	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Koreksi BPK atas Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Aula Kodam IM		19.711.066.000,00	-	19.711.066.000,00
	Pengurangan		-	-	(794.678.930,00)	794.678.930,00
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Koreksi Penambahan Utang Persediaan (audited) sesuai LHP Inspektorat	-	-	(794.678.930,00)	794.678.930,00
VI	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen		53.370.810.944,00	147.443.226,00	53.482.692.144,00	35.562.026,00
	Penambahan		53.370.810.944,00	147.443.226,00	53.370.810.944,00	147.443.226,00
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Koreksi Tambah Investasi PT.PEMA dari Laba Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan PT.PEMA (Unaudited) Tahun 2024	53.370.810.944,00		53.370.810.944,00	-
	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Jurnal balik koreksi atas salah saji Investasi PT. PEMA Unaudited TA 2025	-	111.881.200,00		111.881.200,00
	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Jurnal Koreksi Tambah Ekuitas karena penyesuaian jumlah laba PT. PM sesuai dengan LK Audited PT.PEMA TA.2024 (Pengurangan Jumlah Investasi)	-	35.562.026,00		35.562.026,00
	Pengurangan		-	-	(111.881.200,00)	111.881.200,00
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Koreksi Ekuitas kepemilikan Pemerintah Aceh TA 2024 berdasarkan Ekuitas neraca Audited TA 2024 PT PEMA	-		(111.881.200,00)	111.881.200,00
VII	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		104.275.990.595,91	18.783.994.189,04	104.275.990.595,91	18.783.994.189,04
	Penambahan		284.638.148.978,92	18.783.994.189,07	284.638.148.978,92	18.783.994.189,07
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	Penetapan Status Penggunaan Lahan Pertapakan dan Tanda Batas Tanah SKPA dalam Komplek Keistimewaan Aceh Rp449.654.140,- Jl.T.Nyak Arief Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Luas 1.974 (M2) Berdasarkan SK Gub Aceh No.500.17/105/2024 Tgl 7 Feb 2024	449.654.140,00		449.654.140,00	-
2	Dinas Kesehatan Aceh	Penyesuaian Aset Tetap Peralatan Mesin	0,07		0,07	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Penyesuaian AT Peralatan Mesin-karena pengadaan melalui Utang BM 2023 sudah dibayar ditahun 2024 tapi belum tercatat sebagai Aset	356.029.714,00		356.029.714,00	-
		Penyesuaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Pengadaan Belanja Modal berdasarkan Utang 2025		350.555.000,00		350.555.000,00
4	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Aset Baru Ditemukan KIB B (Alat Pemadam/Portable)	31.500.000,00		31.500.000,00	-
		Penyesuaian Aset Tetap yg baru di Temukan di Peralatan Olah Raga sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 000.2.3.2/0815/2025		58.506.000,00		58.506.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	Penyesuaian Aset Tetap KIB D Tahun 2023	0,40		0,40	-
6	Dinas Pengairan Aceh	Penerimaan Aset Tanah Dari Hasil Inventarisasi	38.454.384.000,00		38.454.384.000,00	-
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke SKPA DISBUDPAR dikapitalasi sesuai BAST No. 000.2.3.2/903	43.540.654,00		43.540.654,00	-
		Mutasi Aset Tetap Jalan dan Bangunan Air ke SKPA DISBUDPAR dikapitalasi Mutasi BAST No. 000.2.3.2/903	57.151.010,00		57.151.010,00	-
8	Dinas Pangan Aceh	Koreksi Penambahan Aset Tetap Tanah Berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 500.17/105/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan status penggunaan lahan pertapakan bangunan Kantor dalam Komplek Keistimewaan Aceh	4.012.521.278,00		4.012.521.278,00	-
		Koreksi Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp2.252.307.808,00,- ke nilai dasar tanah Dinas Pangan Aceh Rp224.800.000,00, berdasarkan Rekonsiliasi dg Bidang BMA dan SKPA	2.252.307.898,00		2.252.307.898,00	-
9	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Koreksi Penambahan Aset Tetap Bngunan Gedung Aula DRKA Kapitalisasi dari Beban Tahun 2023	7.000.000,00		7.000.000,00	-
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Penyesuaian nilai aset tetap pada alat kantor rumah dan rumah tangga (detektor kebakaran) akibat rekonsiliasi	0,32		0,32	-
		Penyesuaian nilai aset tetap pada komputer akibat rekonsiliasi	0,01		0,01	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
11	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	Reklas extracom bangunan gedung ke intracom alat kantor rumah tangga 1 unit Rp.11.528.000 reklas dari kib c 01 karena terdapat kesalahan pencatatan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah berdasarkan sp no. 000.2.3.2/997/2024 tgl. 23/12/2024	11.528.000,00		11.528.000,00	-
12	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Koreksi Penyesuaian Aset Tetap berupa Tanah Bangunan Kantor seluas 2.823m2 Dalam Komplek Keistimewaan Aceh Berdasarkan SK.Gub Aceh No.500.17/105/2024 tgl 7 Feb 2024 sebesar Rp.643.060.419,-	643.060.419,00		643.060.419,00	-
13	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	Mutasi Aset Peralatan Mesin antar SKPA dari Dinas Perkim Aceh ke Disbudpar Aceh berdasarkan BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	93.523.488,00		93.523.488,00	-
		Mutasi Aset Bangunan Gedung antar SKPA dari PERKIM ke DISBUDPAR berdasarkan BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	1.745.124.759,00		1.745.124.759,00	-
		Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPA dari PERKIM ke DISBUDPAR berdasarkan BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	5.255.427.464,00		5.255.427.464,00	-
		Koreksi Aset Tetap Jalan irigasi dan jaringan Sebesar Rp.156.264.000 terdiri dari Bangunan Air Rp. 6.000.000 dan Instalasi Rp.150.264.000 Akibat Pengakuan Nilai Beban Sebelum Tahun 2024 di kapitalisasi Ke Aset Tetap JIJ. tersebut	156.264.000,00		156.264.000,00	-
		Mutasi Aset Bangunan Gedung antar SKPA dari PERKIM ke DISBUDPAR berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/903 tgl 29 Sept 2024	43.540.654,00		43.540.654,00	-
		Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPA dari PERKIM ke DISBUDPAR berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/903 tgl 29 Sept 2024	57.151.010,00		57.151.010,00	-
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh	Penyesuaian Koreksi Pencatatan Kib E Buku Perpustakaan	0,36		0,36	-
15	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	Koreksi Aset Tetap Peralatan mesin TA.2024 Berdasarkan Keputusan Gub. Aceh No.000.2.3.2./1075/2024 Tanggal 16 Agustus 2024	1.084.100.000,00		1.084.100.000,00	-
16	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	Penambahan Aset Tanah karena Hasil Inventarisasi seluas 6.307m3 persil	1.436.732.357,00		1.436.732.357,00	-
17	Dinas Peternakan Aceh	Terima hibah berupa Sapi Brahman dari Kementrian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan BAST Nomor : 02002/PL.130/F2.D/02/2021	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
	Dinas Peternakan Aceh	Penyesuaian Nilai dari Hasil Inventarisasi Aset Berupa Bangunan Kandang Ayam di Blang Bintang Sesuai dengan Surat Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor 000.1.1/2855/IX/2025 Tanggal 30 September 2025 serta surat Pernyataan Nomor : 000.2.3.2/49/II/2026		11.296.800.000,00		11.296.800.000,00
18	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh	Reklas Aset Tetap Jalan Provinsi dari Dinas PUPR ke Disperindag berdasarkan Bast No. 849/bast/x/2024 tgl 17 okt 2024	25.876.237.316,52		25.876.237.316,52	-
		Reklasifikasi Aset Ekstrakomtable - Bangunan Olahraga Terbuka Permanen ke Aset Tetap (Intrakomtable)		19.400.000,00		19.400.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Reklasifikasi Aset Extra Bangunan Gedung all (PPKA) ke BPKA Kib C Extra Dan menjadi AT Bangunan Gedung untuk dikapitalisasi	21.705.286,00		21.705.286,00	-
20	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Penyesuaian Aset Alat Besar Yang Baru Ditemukan	1.311.134.500,00		1.311.134.500,00	-
		Penyesuaian Nilai Aset Tetap Pada Alat Kantor Rumah Tangga Akibat Rekonsiliasi	0,10		0,10	-
21	Inspektorat Aceh	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Tanah berasal dari Alih Status Tanah Dari DISKOMINSA ke Inspektorat No Bast 000.2.3.2/646/BAST.BMA/DISKOMINSA/VIII/2024	297.500.000,00		297.500.000,00	-
		Alih status Aset Tetap Bangunan Gedung yaitu Rumah Dinas I JI. Sudirman Banda Aceh dari Diskominsa Aceh berdasarkan BAST no. 000.2.3.2/646/BAST.BMA/DISKOMINSA/VIII/2024 Tgl 01/08/2024	278.213.445,16		278.213.445,16	-
22	Dinas Syariat Islam Aceh	Penyesuaian Tambah Aset Tetap Tanah Hasil Inventarisasi Sk Gub No.500.17/105/2024 Tanggal 7 February 2024 Tentang Psp Pertapakan Bangunan Kantor Dalam Komplek Keistimewaan Aceh	1.928.985.995,00		1.928.985.995,00	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
	Dinas Syariat Islam Aceh	Penyesuaian tambah Aset Tetap Peralatan Mesin hasil inventarisasi dan koreksi akumulasi sampai dengan 2023 krn pecahan pencatatan aset dari kib c 1. Ac rp. 410.400.000,- 2. Mesin pompa kebakaran rp. 2.064.204.000,- (kode 108 : 1.3.2.05.02.07.002)	2.474.604.000,00		2.474.604.000,00	-
		Penyesuaian Tambah Aset Tetap Bangunan Gedung karena Hasil Inventarisasi Penyesuaian Kode, Maka Dipecah Kode Barangnya Dari Bangunan Gedung Dan Payung Mesjid Raya	132.884.977.808,75		132.884.977.808,75	-
23	Sekretariat Baitul Mal Aceh	Penyesuaian Nilai Aset Tetap Alat Kantor Rumah Tangga Akibat Rekonsiliasi	0,01		0,01	-
24	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	Penyesuaian Aset Tetap Bangunan Penampung Sampah pada Jalan Irigasi dan Jaringan yang Baru Ditemukan	0,02		0,02	-
25	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Pencatatan PTS yang awalnya dicatat pada Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel TA 2023 ke Aset tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.274.249.781,20 pada Dinas ESDM	63.274.249.781,20		63.274.249.781,20	-
26	Dinas Sosial	Penyesuaian Aset Tetap yang baru ditemukan		0,23		0,23
27	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Penyesuaian Aset Tetap yang baru ditemukan		0,04		0,04
28	Dinas Perhubungan Aceh	Hibah dari Kementerian Perhubungan 10 unit bus Rapid Transit No. KP.1814 Tahun 2018	-	7.050.000.000	-	7.050.000.000,00
29	Dinas Pendidikan Aceh	Reklasifikasi Gedung Perpustakaan SMKN 4 Langsa Ke KDP	-	8.733.188,80	-	8.733.188,80
	Pengurangan		(180.362.158.383,01)	(0,03)	(180.362.158.383,01)	(0,03)
1	Dinas Pendidikan Aceh	Koreksi Aset Tetap KIB B yang semula aset intracomtable menjadi aset Extracomtable berdasarkan hasil rekonsiliasi tahun 2024	-		-	-
2	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Penyesuaian Aset Tetap yg baru di Temukan di Peralatan Olah Raga sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 000.2.3.2/0815/2025	-		-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN	Penyesuaian AT Peralatan dan Mesin atas Pengadaan BM berdasarkan Utang 2025				
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Aceh	Koreksi/ Penyesuaian aset tetap ke Koreksi/ Penyesuaian penyusutan dari mutasi AT- Jalan ke Dinas Perindustrian berdasarkan BAST Nomor: 849/BAST/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	(25.876.237.316,52)		(25.876.237.316,52)	-
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin antar SKPA dari Dinas Perkim ke Disbudpar berdasarkan BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	(93.523.488,00)		(93.523.488,00)	-
		Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar SKPA dari Dinas Perkim ke DISBUDPAR berdasarkan BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	(1.745.124.759,00)		(1.745.124.759,00)	-
		Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPA dari Dinas Perkim ke DISBUDPAR berdasarkan BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	(5.255.427.464,00)		(5.255.427.464,00)	-
		Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar SKPA Dinas Perkim ke DISBUDPAR berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/903 tgl 29 Sept 2024	(43.540.654,00)		(43.540.654,00)	-
		Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPA Dinas Perkim ke DISBUDPAR berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/903 tgl 29 Sept 2024	(57.151.010,00)		(57.151.010,00)	-
6	Dinas Pengairan Aceh	Penyesuaian Aset Tanah Karena Double Catat	(537.000.000,00)		(537.000.000,00)	-
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	Koreksi/ Penyesuaian Aset Tetap Peralatan Mesin yang baru ditemukan	(0,11)		(0,11)	-
8	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	Koreksi pengurangan aset tetap tanah alih status ke inspektorat Aceh berdasarkan BAST no. 000.2.3.2/646/BAST.BMA/DISKOMINSA/VIII/2024 Tgl 01/08/2024 (Rumah Bangunan Rumah Negara Gel Ldi jalan Jend Sudirman Geureu)	(297.500.000,00)		(297.500.000,00)	-
		Koreksi pengurangan Aset Tetap Bangunan Gedung alih status ke Inspektorat Aceh berdasarkan BAST no. 000.2.3.2/646/BAST.BMA/DISKOMINSA/VIII/2024 Tgl 01/08/2024 (Rumah Dinas Il Sudirman)	(278.213.445,16)		(278.213.445,16)	-
9	Dinas Pangan Aceh	Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Hasil Rekonsiliasi	(2.477.116.898,00)		(2.477.116.898,00)	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
10	Sekretariat DPRA	Penyesuaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,47)		(0,47)	-
11	Dinas Syariat Islam Aceh	Penyesuaian Kurang Aset Tetap Tanah Hasil Inventarisasi Sk Gub No.500.17/105/2024 Tanggal 7 February 2024 Tentang Psp Pertapakan Bangunan Kantor Dalam Komplek Keistimewaan Aceh	(5.738.256.000,00)		(5.738.256.000,00)	-
		Penyesuaian kurang Aset Tetap dari Gedung dan Bangunan karena hasil inventarisasi karena penyesuaian kode, maka dipecah kode barangnya dari bangunan gedung dan payung mesjid raya	(135.359.581.808,75)		(135.359.581.808,75)	-
12	Sekretariat Baitul Mal Aceh	Koreksi penyesuaian nilai aset tetap tanah akibat dari rekonsiliasi sebesar Rp. 2.507.889.189	(2.507.889.189,00)		(2.507.889.189,00)	-
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Jurnal Penyesuaian Kurang akibat Rekonsiliasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(95.596.350,00)		(95.596.350,00)	-
14	Dinas Sosial	Penyesuaian Aset Tetap yang baru ditemukan		(0,01)		(0,01)
15	Dinas Perhubungan	Penyesuaian Aset Tetap KIB C TA 2025		(0,02)		(0,02)
VIII	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan		(140.607.934.900,81)	33.200.474.855,86	(52.926.507.008,34)	(54.480.953.036,61)
	Penambahan		112.483.772.810,99	37.859.599.343,79	112.483.772.810,99	37.859.599.343,79
1	Dinas Pendidikan Aceh	Jurnal koreksi penyusutan kib c dasar tahun penyusutan 2005	8.291.862.823,88		8.291.862.823,88	-
		Jurnal koreksi penyusutan kib d dasar tahun 2005	50.976.552,00		50.976.552,00	-
		Jurnal koreksi aset extra ke intra pada bangunan gedung dan bangunan air berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tahun 2024	72.390.000,00		72.390.000,00	-
		Jurnal koreksi penyusutan kib b akibat kesalahan perhitungan tahun lalu (berubah kode barang di kib) berdasarkan hasil rekonsiliasi tahun 2024	51.951.882,04		51.951.882,04	-
2	Dinas Kesehatan Aceh	Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C Tahun 2023	311.319.655,29		311.319.655,29	-
		PENYESUAIAN AKM PENYUSUTAN KIB C		72.000,00		72.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Penyesuaian akumulasi penyusutan RSUZA	1.258.419.038,51		1.258.419.038,51	-
4	Rumah Sakit Jiwa	Penyesuaian penyusutan KIB C masa manfaat s.d 2005	169.720.168,23		169.720.168,23	-
		Penyesuaian kapiltasi KIB C	18.797.058,76		18.797.058,76	-
		Penyesuaian kapitalisasi KIB D	43.586.991,03		43.586.991,03	-
5	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Mutasi AT KIB B dari BPBA berupa alat pemadam api berat (apab) 3 unit sesuai BAST Nomor 010 tgl 5 february 2021	33.132.000,00		33.132.000,00	-
		REKLAS KIB B TA 2024 (Peralatan Proses/ Produksi) KE EXTRACOM		10.800.000,00		10.800.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap JIJ 2023	8.676.346.924,84		8.676.346.924,84	-
		Koreksi Penyusutan karena Penyesuaian akumulasi penyusutan 2023	229.795.121,20		229.795.121,20	-
		Koreksi akibat Penyesuaian Utang Jalan dan Jembatan yang tercantum lebih besar dari pelunasan pekerjaan Pembangunan Jalan dua Jalur Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong Aceh Besar	32.749,08		32.749,08	-
		Koreksi atas kelebihan pengakuan dan penyajian utang belanja modal jembatan tahun 2019 pada Dinas PUPR	48.001.684,08		48.001.684,08	-
		Penyesuaian lebih Catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024		192.703.235,46		192.703.235,46
		Penyesuaian Lebih Catat Akumulasi Penyusutan pada Jalan dan Jembatan 2024		23.407.273.119,00		23.407.273.119,00
7	Dinas Pengairan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C TA 2025	82.236.322,24		82.236.322,24	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB D	860.599.087,66		860.599.087,66	-
		Reklas Akumulasi Penyusutan dari bangunan air ke aset rusak berat	1.995.339.631,31		1.995.339.631,31	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C TA 2025		3.361.793.173,54		3.361.793.173,54
8	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Penyesuaian penyusutan KIB C masa manfaat s.d 2005	1.532.050,72		1.532.050,72	-
		Koreksi Penyusutan karena reklas alat angkutan ke aset lainnya rusak berat	526.750.000,00		526.750.000,00	-
		Koreksi Penyusutan karena penyesuaian tahun perolehan KIB C	83.432.967,10		83.432.967,10	-
		Koreksi Penyusutan karena Mutasi SKPA ke Disbudpar KIB D bast no. 032/1269/bast/perkim/2023 tgl. 29 desember 2023	435.246.326,02		435.246.326,02	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Koreksi Penyusutan karena Mutasi skpa ke Disbudpar KIB C bast no. 032/1269/bast/perkim/2023 tgl. 29 desember 2023	52.097.648,92		52.097.648,92	-
		Mutasi skpa ke Disbudpar KIB B BAST No. 032/1269/BAST/Perkim/2023 Tgl. 29 Desember 2023	29.226.090,00		29.226.090,00	-
9	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh	Penyesuaian akumulasi penyusutan karena reklas aset tetap ke aset lain-rusak berat	73.342.600,00		73.342.600,00	-
10	Dinas Sosial Aceh	Penyesuaian Penyusutan KIB C Tahun 2023	1.027.460,96		1.027.460,96	-
		Koreksi akumulasi penyusutan KIB C 2024 akibat adanya rekonsiliasi tahun 2025		11.469.471,71		11.469.471,71
11	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2024	26.425.628,68		26.425.628,68	-
		Penyesuaian penyusutan KIB B TA 2025		15.384.999,97		15.384.999,97
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Penyesuaian akumulasi penyusutan properti investasi akibat tahun neraca awal 2002 menjadi 2005	249.020.691,65		249.020.691,65	-
13	Dinas Pangan Aceh	Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset gedung dan Bangunan akibat perubahan dasar thun perhitungan dari 2002 mjd 2005	103.716.610,49		103.716.610,49	-
		Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C TA 2024		1.258.868.609,59		1.258.868.609,59
14	Dinas Pertanahan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	965.598.527,13		965.598.527,13	-
15	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya akibat Rekonsiliasi Tahun 2024	921.523.745,83		921.523.745,83	-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C 2023	225.270.463,36		225.270.463,36	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Koreksi penyesuaian penyusutan KIB C Tahun 2023	337.766.343,81		337.766.343,81	-
		Koreksi Akumulasi Penyusutan KIB B Tahun 2023	710.000,00		710.000,00	-
		Penyesuaian Penyusutan KIB C Tahun 2024 pada kapitalisasi		111.309.216,42		111.309.216,42
18	Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C akibat konversi thn 2005	107.751.442,06		107.751.442,06	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB D Tahun 2023	66.814.288,71		66.814.288,71	-
		Penyesuaian penyusutan KIB B		7.649.161.139,98		7.649.161.139,98
		Penyesuaian penyusutan KIB C		747.253.931,01		747.253.931,01
		Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C hasil reviu Inspektorat rekklasifikasi dari barang jasa yang dikapitaliasikan		11.466.666,66		11.466.666,66
19	Dinas Perhubungan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	181.929.659,71		181.929.659,71	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB D Tahun 2023	2.822.189,19		2.822.189,19	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan akibat tahun lama	86.483.889,59		86.483.889,59	-
		Koreksi Penyusutan karena Reklas dari bangunan gedung ke KIB C ke Aset Rusak Berat	2.326.367.980,00		2.326.367.980,00	-
		Penyesuaian aset tetap KIB B TA 2025		0,06		0,06
		Penyesuaian aset tetap KIB C TA 2025		0,02		0,02
		Penyesuaian Akibat Perubahan Tahun Perolehan dan Jumlah Unit Aset	-	427.272.597,14	-	427.272.597,14
20	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	59.429.669,13		59.429.669,13	-
		Koreksi kesalahan pencatatan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sekaligus reklas ke aset lain-lain peralatan dan mesin rusak berat berdasarkan sp no. 000.2.3.2/997/2024 tgl. 23/12/2024	45.886.950,00		45.886.950,00	-
		Koreksi Penyusutan karena reklas AT ke aset lain-lain rusak berat berdasarkan sp no. 000.2.3.2/997/2024 tgl 23/12/2024	96.156.500,00		96.156.500,00	-
		Koreksi Penyusutan karena reklas AT ke aset lain-lain rusak berat berdasarkan sp no. 000.2.3.2/997/2024 tgl.23/12/2024	277.250.000,00		277.250.000,00	-
		Koreksi Penyusutan karena reklas AT ke aset lain-lain rusak berat berdasarkan sp no. 000.2.3.2/997/2024 tgl.23/12/2024	2.804.266,67		2.804.266,67	-
		Koreksi Penyusutan karena reklasifikasi Aset Tetap komputer ke aset lain-lain rusak berat	155.837.940,00		155.837.940,00	-
		Koreksi akumulasi penyusutan KIB C TA 2024		44.803.360,00		44.803.360,00
21	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain akan dihibahkan 2023	12.930.638,29		12.930.638,29	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C 2023	387.339.908,88		387.339.908,88	-
		Penyesuaian Beban Penyusutan KIB C krn ada perubahan induk kapitalisasi	-	5.521.191,50	-	5.521.191,50
22	Sekretariat Daerah Aceh	Penyesuaian Koreksi Akumulasi Penyusutan karena kapitalisasi tahun 2023	256.127.706,17		256.127.706,17	-
	Sekretariat Daerah Aceh	Penyesuaian penyusutan KIB C masa manfaat s.d 2005	538.259.973,47		538.259.973,47	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
		Penyesuaian Penyusutan KIB C Tahun 2024 pada kapitalisasi		16.085.356,73		16.085.356,73
23	Sekretariat DPRA	Koreksi Penyusutan karena reklas dari Alat Kantor dan RT ke KIB B Rusak Berat	3.539.669.700,00		3.539.669.700,00	-
		Koreksi Penyusutan karena reklas dari komputer ke KIB B Rusak Berat	751.989.100,00		751.989.100,00	-
		Koreksi Penyusutan karena penyesuaian penyusutan KIB C	159.851.913,94		159.851.913,94	-
		Koreksi Penyusutan karena Reklas dari Alat Besar ke KIB B Rusak Berat	101.105.200,00		101.105.200,00	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB D Tahun 2023	5.714.541,49		5.714.541,49	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	680.549.254,33		680.549.254,33	-
		Penyesuaian Aset Tetap KIB B TA 2025		0,28		0,28
		Penyesuaian Aset Tetap KIB D TA 2025		0,01		0,01
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Koreksi Penyusutan karena Reklas dari Alat Angkutan ke Rusak Berat	833.800.000,00		833.800.000,00	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C	768.049.372,51		768.049.372,51	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	251.321.404,80		251.321.404,80	-
25	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Reklas Aset Tetap Jalan Jaringan Jembatan ke Aset Rusak Berat	208.746.715,08		208.746.715,08	-
		Reklasifikasi Aset tetap KIB C ke Aset Rusak Berat	6.276.604.028,95		6.276.604.028,95	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan	86.347.236,18		86.347.236,18	-
26	Badan Kepegawaian Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	85.844.674,22		85.844.674,22	-
		Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB D Tahun 2023	768.961,54		768.961,54	-
27	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C Tahun 2023	9.930.844.477,68		9.930.844.477,68	-
28	Inspektorat Aceh	Koreksi Kurang penyesuaian akumulasi penyusutan gedung hasil mutasi aset dari diskominsa karena tahun perolehan dibawah 2005 sebesar Rp51.755.266,84	51.755.266,84		51.755.266,84	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	536.396.076,00		536.396.076,00	-
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh	Koreksi Penyusutan karena Penyesuaian Penyusutan KIB C Tahun 2024	8.022.803,04		8.022.803,04	-
		Penyesuaian karena Reklas Aset Tetap KIB B ke aset lainnya Rusak Berat Peralatan dan Mesin Tahun 2024	247.918.802,00		247.918.802,00	-
30	Dinas Syariat Islam Aceh	Penyesuaian kurang Aset Tetap dari KIB C karena hasil inventarisasi karena penyesuaian kode, maka dipecah kode barangnya dari bangunan gedung dan payung mesjid raya	10.927.750.704,70		10.927.750.704,70	-
		Penyesuaian penyusutan KIB C akibat perubahan kode rekening	38.317.091.903,88		38.317.091.903,88	-
		Penyesuaian penyusutan KIB B akibat perubahan kode rekening	0,04		0,04	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023 karena penyesuaian tahun dasar perhitungan dari 2002 ke 2005	47.467.148,94		47.467.148,94	-
31	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C Tahun 2023	3.578.090.853,73		3.578.090.853,73	-
32	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Koreksi penyesuaian penyusutan KIB D 2023 pada Tahun 2024	726.653.184,18		726.653.184,18	-
		Koreksi penyesuaian penyusutan KIB B Tahun 2024	1.362.750.406,35		1.362.750.406,35	-
		Koreksi Penyusutan karena Reklas antar aset tetap dari alat pertanian ke alat rumah tangga tahun 2024	7.657.100,00		7.657.100,00	-
33	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB D Tahun 2023	786.586.696,56		786.586.696,56	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C	1.062.424.179,17		1.062.424.179,17	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB D	38.711.620,92		38.711.620,92	-
34	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh	Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C Tahun 2023	3.780.256,21		3.780.256,21	-
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Koreksi Penyusutan karena Reklas dari aset tetap KIB C Bangunan Gedung & tempat ibadah ke aset rusak berat	87.368.400,00		87.368.400,00	-
36	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C tahun 2023	180.752.981,02		180.752.981,02	-
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH	Koreksi penyesuaian penyusutan KIB C BPBA TA 2024	-	232.829.592,54	-	232.829.592,54
38	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH	Penyesuaian penyusutan KIB C	-	201.236.112,99	-	201.236.112,99
39	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Penyesuaian Aset Tetap TA 2025	-	0,07	-	0,07
40	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH	Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C TA 2025 akibat penambahan kapitaliasi tahun 2025	-	154.295.569,11	-	154.295.569,11
	Pengurangan		(253.091.707.711,80)	(4.659.124.487,93)	(165.410.279.819,33)	(92.340.552.380,40)

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
1	Dinas Pendidikan Aceh	Jurnal Terima Hibah Terima Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Yayasan Lembah Sekorong Sekato NPH nomor 003/YLS/2024 & 000.2.3.2/9530 BAST Nomor 004/YLS/2024 & 000.2.3.2/9531	(52.750.000,00)		(52.750.000,00)	-
		Jurnal Terima hibah Bangunan Gedung dari Yayasan Lembah Sekorong Sekato NPH nomor 003/YLS/2024 & 000.2.3.2/9530 BAST Nomor 004/YLS/2024 & 000.2.3.2/9531	(39.001.600,00)		(39.001.600,00)	-
		Jurnal Koreksi Penyusutan KIB C Tahun 2024 akibat kesalahan (berubah data kib kapitalisasi) berdasarkan hasil rekonsiliasi tahun 2024	(27.102.065.382,69)		(27.102.065.382,69)	-
		Jurnal Koreksi Penyusutan KIB D akibat ada perubahan pada KIB D s.d 2024 (Kapitalisasi) berdasarkan hasil rekonsiliasi 2024	(589.257.300,59)		(589.257.300,59)	-
		Penyesuaian Penyusutan KIB C TA.2025		(211.736.557,94)		(211.736.557,94)
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan 2023 Akibat Kapitalisasi Aset Tetap Kib C Tempat Wudhuk dan Taman Permanen dan Asrama Permanen	(62.531.363,69)		(62.531.363,69)	-
		Penyesuaian Penyusutan Akibat Rekonsiliasi Kib D	(9.845.365,97)		(9.845.365,97)	-
		Koreksi Penyusutan KIB C TA. 2024		(422.126.692,64)		(422.126.692,64)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(365.162.794,57)		(365.162.794,57)	-
		Penyesuaian Penyusutan AT Utang 2025 yang tahun perolehannya 2023		(140.222.000,00)		(140.222.000,00)
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan AT Peralatan dan mesin tahun 2022 dan 2024 (Perubahan Utang PM.BLUH di tahun 2025)		(56.914.100,00)		(56.914.100,00)
4	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Aset baru ditemukan KIB B (alat pemadam/portable)	(31.500.000,00)		(31.500.000,00)	-
		Penyesuaian penyusutan KIB D Tahun 2023	(5.111.993,88)		(5.111.993,88)	-
		Penyesuaian penyusutan KIB C Tahun 2023	(4.971.390,38)		(4.971.390,38)	-
		Penyesuaian Aset Tetap yg baru di Temukan di Peralatan Olah Raga sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 000.2.3.2/0815/2025		(11.701.200,00)		(11.701.200,00)
		KOREKSI AKM PENYUSUTAN KIB C TA 2024		(1.523.840,74)		(1.523.840,74)
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	Reklas AT- Jalan ke Dinas Perindustrian (BAST Nomor: 849/BAST/2024) Tanggal 17 Oktober 2024	-		-	-
6	Dinas Pengairan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Kib C Tahun 2023	(7.716.240,48)		(7.716.240,48)	-
		Penyesuaian Akumulasi Kib D Tahun 2023	(173.364.036.933,77)		(173.364.036.933,77)	-
		Penyesuaian Beban Penyusutan KIB D akibat Reklasifikasi dan Kapitalisasi	-		86.261.567.412,98	(86.261.567.412,98)
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Penyesuaian KIB C Kapitalisasi 2023	(794.490.434,12)		(794.490.434,12)	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Penyesuaian akm penyusutan KIB C Tahun 2023	(239.438.771,81)		(239.438.771,81)	-
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	Penyesuaian Akm Penyusutan Kib C Tahun 2023	(1.017.583.076,43)		(1.017.583.076,43)	-
		Koreksi Penyesuaian Penyusutan KIB B TA.2023	(22.119.999,99)		(22.119.999,99)	-
10	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Koreksi Penyesuaian Penyusutan KIB C TA.2024	(162.790,71)		(162.790,71)	-
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB B Tahun 2023	(7.366.458.343,49)		(7.366.458.343,49)	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	(297.432.185,25)		(297.432.185,25)	-
12	Dinas Perhubungan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Kib D Akibat Salah Catat Tahun Perolehan Di 2023	(237.624.000,00)		(237.624.000,00)	-
		Penyesuaian akumulasi penyusutan kib b	(1.878.712.683,16)		(1.878.712.683,16)	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Kib C	(4.365.440,83)		(4.365.440,83)	-
		Hapus Hibah Rencana Hibah Sk Sekretaris Daerah Aceh Nomor 000.2.3.2/1042/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perhubungan Aceh Yang Dihilangkan Kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe	-		-	-
		Koreksi karena penghapusan Aet Hibah (SK Sekretaris Daerah Aceh Nomor 000.2.3.2/1025/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perhubungan Aceh)	(79.926.400,00)		(79.926.400,00)	-
		PENYESUAIAN ASET TETAP KIB D TA 2025		(0,02)		(0,02)

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
		Hibah dari Kementerian Perhubungan 10 unit bus Rapid Transit No. KP.1814 Tahun 2018	-		1.410.000.000,00	(1.410.000.000,00)
13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	Penyesuaian akibat reklas dari Kib C 03 karena Terdapat Kesalahan Pencatatan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah berdasarkan SP no. 000.2.3.2/997/2024 Tgl. 23/12/2024	(1.334.165.799,32)		(1.334.165.799,32)	-
		Reklas Extracom Bangunan Gedung Ke Intracom Alat Kantor Rumah Tangga 1 Unit Rp.11.528. karena Terdapat Kesalahan Pencatatan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah berdasarkan SP no. 000.2.3.2/997/2024 Tgl. 23/12/2024	(11.528.000,00)		(11.528.000,00)	-
		Koreksi Penyesuaian Akumulasi KIB B TA 2024				-
		KOREKSI PENYESUAIAN AKUMULASI KIB B TA 2024		(181.329.000,00)		(181.329.000,00)
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh	Penyesuaian Akm Penyusutan Kib C Tahun 2024	(5.500.460,71)		(5.500.460,71)	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Jurnal Koreksi Penyusutan Kib C Tahun Lalu Akibat Kesalahan Perhitungan kapitalisasi	(25.822.512,16)		(25.822.512,16)	-
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Penyesuaian akm penyusutan KIB B Tahun 2023	(7.322.700,06)		(7.322.700,06)	-
		Penyesuaian akm penyusutan KIB C Tahun 2023	(764.994.020,07)		(764.994.020,07)	-
17	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	Mutasi SKPA dari PERKIM ke DISBUDPAR KIB D BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	(435.246.326,02)		(435.246.326,02)	-
		Mutasi SKPA dari PERKIM ke DISBUDPAR KIB C BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	(52.097.648,92)		(52.097.648,92)	-
		Mutasi SKPA dai PERKIM ke DISBUDPAR KIB B BAST No. 032/1269/BAST/PERKIM/2023 tgl. 29 Desember 2023	(29.226.090,00)		(29.226.090,00)	-
		Koreksi Penyesuaian Penyusutan Kib D	(3.492.552.889,70)		(3.492.552.889,70)	-
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh	Penyesuaian penyusutan KIB C Tahun 2023	(945.577.590,28)		(945.577.590,28)	-
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	Koreksi Penyesuaian Penyusutan KIB C TA.2024	(2.890.980.219,28)		(2.890.980.219,28)	-
		Reklas AT Bangunan Gedung Kantor Permanen ke Jalan Khusus Komplek berdasarkan hasil rekonsiliasi TA.2024	(177.260.819,20)		(177.260.819,20)	-
		Koreksi Penyesuaian Penyusutan KIB C TA.2025		(252.378.752,78)		(252.378.752,78)
		Koreksi Penyesuaian Penyusutan KIB D TA.2025		(1.716.329,56)		(1.716.329,56)
20	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB B Tahun 2023	(8.184.854.357,12)		(8.184.854.357,12)	-
		Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C Tahun 2023	(2.181.773.805,02)		(2.181.773.805,02)	-
		PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN KIB C TA 2024		(113.932,35)		(113.932,35)
21	Dinas Peternakan Aceh	Penyesuaian penyusutan KIB C Tahun 2023	(332.955.233,58)		(332.955.233,58)	-
		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain akan dihibahkan pada tahun 2024 yang kurang penyaiaannya		(74.900.000,00)		(74.900.000,00)
		Penyesuaian Penyusutan KIB C Tahun 2024		(2.177.353.124,30)		(2.177.353.124,30)
22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh	Penyesuaian Akm Penyusutan Kib C Tahun 2023	(57.288.330,63)		(57.288.330,63)	-
		Pencatatan PIS yang awalnya dicatat pada Gedung dan bangunan ekstrakomptabel TA 2023 ke Aset lain yang dihibahkan sebesar Rp63.274.240.781,20 pada Dinas ESDM	(1.265.484.995,62)		(1.265.484.995,62)	-
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh	Penyesuaian penyusutan KIB C Tahun 2023	(446.947.597,43)		(446.947.597,43)	-
		PENYESUAIAN AKM PENYUSUTAN KIB C TA. 2025		(409.054.616,30)		(409.054.616,30)
24	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB D akibat perubahan tahun	(176.948.484,19)		(176.948.484,19)	-
		Penyesuaian akumulasi penyusutan KIB C BPKA	(79.714.941,24)		(79.714.941,24)	-
		PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN KIB C TA 2024		(13.841.553,22)		(13.841.553,22)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Penyesuaian Akm Penyusutan Kib B Tahun 2023	(3.532.000,00)		(3.532.000,00)	-
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	Koreksi Penyesuaian Penyusutan Kib D Tahun 2023	(42.508.284,62)		(42.508.284,62)	-
		Koreksi Penyesuaian Penyusutan Kib C Tahun 2023	(2.109.745.804,66)		(2.109.745.804,66)	-
27	Inspektorat Aceh	Penyesuaian Akm Penyusutan Kib B 2023	(84.762.500,00)		(84.762.500,00)	-
		PENYESUAIAN AKM PENYUSUTAN KIB C 2024		(566.960.223,64)		(566.960.223,64)
28	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	Penyesuaian akm penyusutan KIB C Tahun 2023	(826.853.370,94)		(826.853.370,94)	-
		Penyesuaian Penyusutan KIB B TA. 2025		(990.000,00)		(990.000,00)

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
29	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	Penyesuaian Akumulasi Kib D Tahun 2023 PENYESUAIAN JURNAL PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN KIB B TAHUN 2025	(377.908.708,85)	(4.009.999,98)	(377.908.708,85)	- (4.009.999,98)
30	Sekretariat Baitul Mal Aceh	Penyesuaian Akm Penyusutan Kib C Tahun 2023	(629.705,66)		(629.705,66)	-
31	Dinas Syariat Islam Aceh	Penyesuaian tambah AT peralatan mesin hasil inventarisasi dan koreksi akumulasi sampai dengan 2023 krn pecahan pencatatan aset dari kib c 1. Ac rp. 410.400.000,- 2. Mesin pompa kebakaran rp. 2.064.204.000,- (kode 108 : 1.3.2.05.02.07.002) Penyesuaian tambah AT dari KIB C karena hasil inventarisasi penyesuaian kode, maka dipecah kode barangnya dari bangunan gedung dan payung Mesjid Raya	(2.474.604.000,00) (10.630.798.224,70)		(2.474.604.000,00) (10.630.798.224,70)	- -
32	Sekretariat Wali Nanggroe/ Katibul Wali	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan KIB C Tahun 2023	(69.857.800,01)		(69.857.800,01)	-
33	SEKRETARIAT DAERAH ACEH	Penyesuaian Penyusutan KIB B 2024 di akibat ada penyesuaian kode akun		(8.574.386,50)		(8.574.386,50)
34	Dinas Pemuda Olahraga	Penyesuaian AKM Penyu TA 2024 karena kapitalisasi asset KIB C TA 2024 Penyesuaian Beban Penyusutan KIB C krn ada perubahan induk kapitalisasi Penyesuaian Penyusutan KIB C krn reklas akibat perubahan induk kapitalisasi	 - -	(123.678.177,96)	 480.072,48 9.380.407,01	(123.678.177,96) (480.072,48) (9.380.407,01)
IX	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya		(349.402.522.034,53)	-	(349.235.325.104,53)	(167.196.930,00)
	Penambahan		923.936.000,10	-	923.936.000,10	-
1	Dinas Peternakan Aceh	Aset Lain lain lainnya Hapus krn Hibah ke USK sesuai SK Hibah : 000.2.3.2/914/2024 Tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hibah BMA kepada Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah	56.175.000,00		56.175.000,00	-
2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	Penyesuaian Aset Lain Yang Baru Ditemukan Karena Rekon BMA. Penyesuaian Aset Tdf Atas Nilai Saldo Awal Karena Kurang Pencatatan Sebesar Rp. 0,04.	0,06 0,04		0,06 0,04	- -
3	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	Reklas Dari Peralatan Mesin Intra Ke Rusak Berat.	867.761.000,00		867.761.000,00	-
	Pengurangan		(350.326.458.034,63)	-	(350.159.261.104,63)	(167.196.930,00)
2	Dinas Pengairan Aceh	Hapus Aset Rusak Berat Peralatan Mesin Sesuai SK Gub No. 030/1068/2023 Tanggal 28 April 2023.	(620.000.000,00)		(620.000.000,00)	-
3	Dinas Perhubungan Aceh	Hibah KIB B RB Kapal (SK Sekretaris Daerah Aceh Nomor 000.2.3.2/824/2024 Tanggal 21 Mei 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perhubungan Aceh). Hapus KIB C (SK Sekretaris Daerah Aceh Nomor 000.2.3.2/701/2024 Tanggal 5 April 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Aceh Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perhubungan Aceh).	(44.208.444.960,00) (6.122.021.000,00)		(44.077.173.030,00) (6.122.021.000,00)	 -
4	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	Hapus Karena Hibah Gedung & Bangunan (Tugu) Ke Pemerintah Kab. Aceh Tengah Sesuai SK Hapus No. 000.2.3.2/144/2024 Pada Tanggal 29 Februari 2024.	(62.225.940,00)		(62.225.940,00)	-
7	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	Reklas Dari Aset Rusak Berat Ke All Lainnya Sesuai Risalah Lelang Dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh. Penghapusan Barang Milik Aceh Sesuai SK Setd No 030/05/2023 Tgl 5 Januari 2023.	(723.250.000,00) (1.674.799.784,90)		(723.250.000,00) (1.674.799.784,90)	- -
8	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Hapus Aset Rusak Berat Jij Karena Pemusnahan Gedung Bpka Lama Sesuai SK Nomor 000.2.3.2/209/2024, Tanggal 20 Maret 2024. Hapus Aset Rusak Berat Jij Karena Pemusnahan Gedung Bpka Lama Sesuai SK Nomor 000.2.3.2/209/2024, Tanggal 20 Maret 2024.	(503.727.000,00) (17.287.632.940,00)		(503.727.000,00) (17.287.632.940,00)	- -
9	Dinas Pertanahan Aceh	Reviu Inspektorat tentang Penghapusan Aset Lain-lain berupa Alat Kantor dan RT (Rusak Berat) sesuai SK Sekda Aceh No. 000.2.3.2/1026/2024, Tgl. 12 Agt 2024	(81.500.000,00)		(81.500.000,00)	-
1	Dinas Pendidikan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas pada Dinas Pendidikan Aceh	(103.459.148.271,42)		(103.459.148.271,42)	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
2	Dinas Pendidikan Dayah	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh	(219.950.000,00)		(219.950.000,00)	-
3	Majelis Pendidikan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(245.666.000,00)		(245.666.000,00)	-
4	Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(42.575.751.670,11)		(42.575.751.670,11)	-
5	Rumah Sakit Jiwa	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(2.066.404.681,54)		(2.066.404.681,54)	-
6	Rumah Sakit Ibu dan Anak	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(861.858.150,00)		(861.858.150,00)	-
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(13.437.160.000,00)		(13.437.160.000,00)	-
8	Dinas Pengairan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(7.385.931.750,28)		(7.385.931.750,28)	-
9	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(5.904.081.216,00)		(5.904.081.216,00)	-
10	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(835.527.851,00)		(835.527.851,00)	-
11	Dins Sosial Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(5.584.451.177,85)		(5.584.451.177,85)	-
12	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(183.094.000,00)		(183.094.000,00)	-
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(183.845.000,00)		(183.845.000,00)	-
14	Dinas Pangan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(485.337.300,00)		(485.337.300,00)	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(3.744.968.370,80)		(3.744.968.370,80)	-
16	Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(1.144.973.745,83)		(1.144.973.745,83)	-
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(294.875.000,00)		(294.875.000,00)	-
18	Dinas Perhubungan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(6.712.941.593,00)		(6.712.941.593,00)	-
19	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(16.821.702.561,33)		(16.785.777.561,33)	(35.925.000,00)
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(396.768.508,00)		(396.768.508,00)	-
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(1.570.743.870,00)		(1.570.743.870,00)	-
22	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(233.717.000,00)		(233.717.000,00)	-
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(1.498.758.258,00)		(1.498.758.258,00)	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(2.414.089.150,00)		(2.414.089.150,00)	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(4.314.691.826,08)		(4.314.691.826,08)	-
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(6.575.988.982,00)		(6.575.988.982,00)	-
27	Dinas Peternakan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(1.829.802.746,90)		(1.829.802.746,90)	-
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(667.775.612,00)		(667.775.612,00)	-
29	Sekretariat Daerah Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(24.011.276.001,80)		(24.011.276.001,80)	-
30	Sekretariat DPRA	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(7.057.308.991,00)		(7.057.308.991,00)	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(3.021.883.566,00)		(3.021.883.566,00)	-
32	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(4.998.468.245,57)		(4.998.468.245,57)	-
33	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(907.831.067,00)		(907.831.067,00)	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(908.454.015,00)		(908.454.015,00)	-
35	Dinas syariat Islam	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(41.868.000,00)		(41.868.000,00)	-
36	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(207.406.000,00)		(207.406.000,00)	-
37	keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Wali Nanggroe Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(222.300.000,00)		(222.300.000,00)	-
38	Sekretariat Baitul Mal Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(266.531.075,00)		(266.531.075,00)	-
39	Dinas Kesehatan Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas pada Dinas Kesehtan Aceh	(5.388.237.068,62)		(5.388.237.068,62)	-
40	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	Koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset rusak berat yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas	(361.288.087,60)		(361.288.087,60)	-
X	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi		(282.978.933,33)	-	(282.978.933,33)	-
	Penambahan		-	-	-	-
	Pengurangan		(282.978.933,33)	-	(282.978.933,33)	-
1	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	(282.978.933,33)		(282.978.933,33)	-
XI	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu		(7.733.358.788,70)	15.298.225,00	(7.581.046.951,20)	(137.013.612,50)
	Penambahan		2.535.157.069,21	15.298.225,00	2.535.157.069,21	15.298.225,00
1	Dinas Pengairan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Kib D	1.461.330,61		1.461.330,61	-
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Semester I BPKA	289.359.920,27		289.359.920,27	-
		Penyesuaian Penyusutan Aset Rencana Hibah Dikarenakan Perubahan Tahun Masa Manfaat Pembagi	306.574.995,01		306.574.995,01	-
		Penyesuaian Penyusutan Aset Akm Properti Investasi Dikarenakan Perubahan Tahun Masa Pembagi Menjadi 2005	251.674.361,50		251.674.361,50	-
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	Penyesuaian Akumulasi Rencana hibah dan Aset Lain	850.720.113,34		850.720.113,34	-
4	Dinas Pendidikan Aceh	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rencana Hibah akibat kesalahan perhitungan tahun lalu (2005)	561.318.465,95		561.318.465,95	-
5	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Hibah Ta 2023	274.047.882,53		274.047.882,53	-
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	Penyesuaian Aset Lain lain untuk dihibahkan TA.2025	-	15.298.225,00	-	15.298.225,00
	Pengurangan		(10.268.515.857,91)	-	(10.116.204.020,41)	(152.311.837,50)
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lainnya Dikarenakan Perubahan Tahun Masa Manfaat Pembagi	(305.192.162,51)		(305.192.162,51)	-
2	Dinas Kesehatan Aceh	Hapus Aset Lain-Lain Rencana Hibah Peralatan Mesin Karena Hibah Ke Kejati Berdasarkan Sk Nomor 030/1594/2023	-		-	-
3	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh	Penghapusan BMA AT yg tdk digunakan dlm operasi onal pemerintah (Aset lain-lain akan dihibahkan) Berupa Tanah, Mesin & Gedung	(9.930.826.527,80)		(9.930.826.527,80)	-
4	Dinas Perhubungan Aceh	Reklas Dr Kib Tdf Ke Rencana Hibah Kib B	(26.400.000,00)		(26.400.000,00)	-
5	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	Penyesuaian Aset Lain lain untuk dihibahkan TA.2024	(6.097.167,60)		(6.097.167,60)	-
6	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain Akan Dihibahkan TA 2024	-		152.311.837,50	(152.311.837,50)
XII	Koreksi Utang		(16.883.796.496,51)	842.382.883,18	23.715.068.439,67	(39.756.482.053,00)
	Penambahan		505.926.205,14	842.382.883,18	505.926.205,14	842.382.883,18

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	Penyesuaian utang tlp TA 2023 sesuai dengan Surat Kepala Dinas PUPR No: 910/447 tgl. 4 Juni 2024, untuk dapat menghapus Utang Telepon sebesar Rp494.646 dari Neraca PUPR. hal ini sesuai dengan surat PT.Telekomunikasi No: Tel.20/UM000/DR1-1A200000/2024	494.646,00		494.646,00	-
2	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh	menghapus Utang Telepon sebesar Rp181.065 dari Neraca SATPOL PP	181.065,00		181.065,00	-
3	Rumah Sakit Jiwa	Pembayaran Utang Belanja Listrik TA. 2023	1.000,00		1.000,00	-
		Beban LO BLUD RSJ bulan Desember 2024	2.071,00		2.071,00	-
4	Dinas Pangan Aceh	Penyesuaian Utang Internet, Air & Listrik TA 2023	3.422.777,00		3.422.777,00	-
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perm	Penyesuaian Utang Pembayaran	7.224.633,14		7.224.633,14	-
		Penyesuaian Utang Tagihan, Listrik, Air, Internet Tahun 2024		3.865.980,00		3.865.980,00
6	Dinas Kesehatan Aceh	Penyesuaian Kurang Utang Ta 2023 Berdasarkan Rekonsiliasi Dengan Rs 23 Kab/Kota Sebesar Rp. 378.558.999	378.558.999,00		378.558.999,00	-
7	Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Penyesuaian utang TA 2023 sesuai dengan surat No: 900/044/2024 tgl 31 Desember 2024,kra adanya kekurangan (penghematan) pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan akibat dari cuti PNS,sehingga nominal yg akan dibayar di akun belanja tsb kembal	26.211.730,00		26.211.730,00	-
		Koreksi Lebih Saji atas Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Ta 2024 berdasarkan Surat Direktur RSIA No:900/2716/2025 tgl 23 Desember 2025.		187.295.432,00		187.295.432,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Koreksi Kurang atas Lebih Saji Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Transfer Pemerintah Pusat)TA 2023, sesuai PMK Nomor 89 Tahun 2024	89.821.438,00		89.821.438,00	-
		Koreksi Kurang atas Lebih Saji Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2023 (Selisih Pembulatan), sesuai KMK Nomor 44/KM.7/2024)	7.846,00		7.846,00	-
		Penyesuaian Utang Dana Perimbangan (Dana Bos Kinerja Afirmasi) Akibat Adanya Potongan Dak Non Fisik Sesuai Krmk No. 43 Tahun 2025	-	36.250.000,00	-	36.250.000,00
9	SEKRETARIAT DPRA	Jurnal Balik Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Prestasi Kerja PNS sesuai surat Set. DPRA No: 900.1/1395		1.677.976,18		1.677.976,18
10	Rumah Sakit Jiwa	Koreksi Utang TA 2024		1,00		1,00
		Penghapusan Utang Belanja Barang Pakai Habis 2023		3.560.000,00		3.560.000,00
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN	Koreksi kelebihan pengakuan utang BLUD 2024		342.828.765,00		342.828.765,00
		Reklasifikasi pembayaran utang belanja modal BLUD 2024		220.604.220,00		220.604.220,00
		Koreksi Inspektorat atas utang Belanja Modal Alat Kedokteran umum tahun 2024		644.322,00		644.322,00
		Koreksi Bpk Atas Utang Dan Persediaan TA. 2025 Sesuai Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Utang Rumah Sakit Umum	-	8.430.070,00	-	8.430.070,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	Penyesuaian Utang Telepon Tahun 2024		2.108.523,00		2.108.523,00
		Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1.973.013,00		1.973.013,00
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Listrik dan Internet TA.2024		16.724.324,00		16.724.324,00
14	SEKRETARIAT DAERAH ACEH	Penyesuaian Utang Tagihan Listrik Tahun 2024		16.420.257,00		16.420.257,00
	Pengurangan		(17.389.722.701,65)	-	23.209.142.234,53	(40.598.864.936,18)
1	Rumah Sakit Jiwa	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet Desember 2023	(393.000,00)		(393.000,00)	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Penyesuaian Utang Blud Sesuai Register Revisi III Tahun 2024	(16.760.303.927,00)		(16.760.303.927,00)	-
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	PENYESUAIAN KEKURANGAN CATAT UTANG BLUD 2024 SESUAI SK REGISTER UTANG BLUD REVISI III TANGGAL 15 DES 2025			40.573.836.617,00	(40.573.836.617,00)
		Penyesuaian Utang Modal Blud Sesuai Register Utang Utang Revisi III	(615.312.271,00)		(615.312.271,00)	-

No	SKPA	Uraian	Nilai	Penambahan	Pengurangan	saldo Audited
3	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Koreksi Atas Pendapatan Di Muka Bank Bsi S.D Ta 2023 Sesuai Dengan Surat Persetujuan Po No 03/1385.3/Po Aceh Tanggal 26 Juli	(13.713.503,65)		(13.713.503,65)	-
4	SEKRETARIAT DPRA	Jurnal Penyesuaian Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Prestasi Kerja PNS sesuai surat Set. DPRA No: 900.1/1395			1.677.976,18	(1.677.976,18)
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	Penyesuaian Utang Listrik Tahun 2024			197.000,00	(197.000,00)
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH	Penyesuaian utang tagihan listrik tahun 2024			10.896.524,00	(10.896.524,00)
7	SEKRETARIAT DAERAH ACEH	Penyesuaian Utang Tagihan Telepon Tahun 2024			12.256.819,00	(12.256.819,00)
XIV	Koreksi Penyisihan Piutang		(6.037.749.299,77)	52.132.215.523,41	38.094.639.648,64	7.999.826.575,00
	Penambahan		-	52.132.215.523,41	-	52.132.215.523,41
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Hapus Penyisihan Piutang Tahun 2024	-	44.132.388.948,41		44.132.388.948,41
		KOREKSI BPK ATAS LEBIH SAJI PIUTANG TAHUN LALU	-	7.999.826.575,00	-	7.999.826.575,00
	Pengurangan		(6.037.749.299,77)	-	38.094.639.648,64	(44.132.388.948,41)
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Penyesuaian Penyisihan Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah Ta 2023 Atas Hotel Amazing Koetaradja Rp6.943.398.610,86 Dan Rs Fakinah Rp562.725.000	(6.037.749.299,77)		(6.037.749.299,77)	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Penyesuaian HAPUS PENYISIHAN PIUTANG BLUD TAHUN 2024 dari Koreksi Koreksi Penyisihan Piutang menjadi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-		7.849.210.024,41	(7.849.210.024,41)
		Koreksi BPK Atas Lebih Saji Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Dan Piutang Retribusi	-	-	36.133.178.924,00	(36.133.178.924,00)
		Koreksi BPK Atas Lebih Saji Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Dan Piutang Retribusi	-	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
XV	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain		(570.000,00)	29.500,00	1.145.684,00	(1.686.184,00)
	Penambahan		-	29.500,00	-	29.500,00
1	Inspektorat	Penyesuaian Utang Telepon Tahun 2024		29.500,00		29.500,00
	Pengurangan		(570.000,00)	-	1.145.684,00	(1.715.684,00)
1	Rumah Sakit Jiwa	Jurnal Penerimaan Kas BLUD RSJ bulan Januari 2024	(570.000,00)	-	(570.000,00)	-
		Penerimaan Kas BLUD RSJ punya tahun 2024 yang diterima bulan Februari 2025	-	-	831.600,00	(831.600,00)
2	Inspektorat	Penyesuaian Utang Listrik Tahun 2024	-	-	780.084,00	(780.084,00)
		Penyesuaian Utang Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2024	-	-	104.000,00	(104.000,00)

Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Pergub No.50 Th. 2008	Pergub No.56 Th. 2009	Surat Gub No. 90/4593 Th. 2009	Surat Sekda an. Gub No. 90/25697 Th. 2010	Surat GubNo. 902/2741 Th. 2011	Pergub No.17 Th.2012	Surat Gub No. 050/12841	Pergub No 10 Th 2015	Pergub No 19 Th 2016	Pergub No 19 Th 2017	Pergub No 19 Th 2017	Pergub No 26 Th 2019	Pergub No 33 Th 2020	Pergub No 21 Th 2021	Kep Gub No 050/1480/2021	Kep Gub No 095/1490/2022	Kep Gub No 900.1.14.4753/2024	Kep Gub No 900.1.14.1635/2025
	Provinsi Aceh	1.412.000.000.000	1.412.000.000.000	1.491.312.800.000	1.539.922.736.000	1.804.262.596.000	2.190.515.505.600	3.248.436.543.702	3.452.084.858.316	4.748.419.517.200	4.582.732.139.700	5.353.950.426.988,00	5.755.726.049.796,00	5.515.916.761.169,00	5.526.572.477.877,00	5.366.496.925.649,00	3.126.729.362.849,00	3.391.301.536.000,00	3.336.158.083.000,00
1	Kab Aceh Barat	93.590.000.000	93.590.000.000	90.890.680.684	96.846.530.789	118.179.368.304	137.811.790.756	126.032.648.587	125.447.783.438	120.027.345.386	145.172.828.135	118.934.901.324,00	106.185.848.936,00	74.324.170.320,00	77.718.790.757,00	92.525.880.584,00	35.497.973.818,00	41.063.804.000,00	43.646.838.000,00
2	Kab Aceh Besar	98.300.000.000	98.300.000.000	107.457.631.142	111.973.712.433	138.327.928.623	164.966.802.758	148.676.787.678	147.914.490.241	145.490.688.294	165.687.091.725	127.872.986.102,00	120.317.507.813,00	94.558.733.789,00	98.291.480.032,00	110.740.056.141,00	42.201.139.548,00	49.508.232.000,00	49.104.532.000,00
3	Kab Aceh Selatan	115.930.000.000	115.930.000.000	119.481.737.962	122.201.007.290	141.107.340.336	180.662.375.651	158.151.037.413	156.731.647.778	154.994.777.928	176.920.357.212	135.950.816.958,00	122.218.179.195,00	104.510.075.485,00	98.537.681.998,00	103.766.244.092,00	38.291.764.198,00	45.572.073.000,00	44.557.549.000,00
4	Kab Aceh Singkil	89.390.000.000	89.390.000.000	97.756.143.949	102.341.111.565	116.767.957.062	130.744.005.985	113.747.315.554	116.337.845.137	116.375.954.770	118.138.819.332	110.202.509.182,00	110.346.584.240,00	78.183.315.384,00	81.551.810.472,00	81.925.172.450,00	31.717.010.156,00	36.281.650.000,00	35.837.429.000,00
5	Kab Aceh Tengah	114.210.000.000	114.210.000.000	115.338.384.798	119.349.261.786	135.798.267.712	171.801.124.648	151.548.782.608	153.029.242.798	155.580.425.460	166.831.320.459	120.601.436.421,00	97.310.057.913,00	94.987.528.438,00	104.762.109.693,00	39.315.523.924,00	46.428.796.000,00	46.176.280.000,00	
6	Kab Aceh Tenggara	102.220.000.000	102.220.000.000	111.850.356.683	119.631.216.398	144.032.456.686	183.285.909.131	162.405.107.409	194.829.969.574	163.800.562.878	175.095.446.154	178.898.377.582,00	129.419.727.670,00	102.095.040.286,00	97.549.792.615,00	103.328.235.393,00	38.942.016.487,00	45.500.943.000,00	44.027.630.000,00
7	Kab Aceh Timur	157.520.000.000	157.520.000.000	161.031.019.908	168.908.398.282	203.315.357.760	229.572.089.071	204.540.812.409	203.304.448.098	204.299.783.417	252.512.203.750	190.863.331.706,00	201.436.674.638,00	127.030.171.761,00	120.083.664.279,00	126.228.540.615,00	49.626.282.097,00	56.135.157.000,00	56.381.868.000,00
8	Kab Aceh Utara	100.710.000.000	100.710.000.000	127.848.390.364	123.034.524.324	138.766.784.896	177.233.160.034	136.328.668.055	132.384.928.052	129.524.653.383	178.692.371.265	130.523.243.754,00	123.597.532.105,00	124.980.601.676,00	122.195.023.703,00	124.374.203.098,00	48.739.825.713,00	55.675.474.000,00	55.558.034.000,00
9	Kab Bireuen	91.790.000.000	91.790.000.000	100.114.996.299	101.218.489.429	124.063.252.755	148.549.131.596	132.235.242.030	126.659.178.409	126.203.414.910	144.746.630.857	119.274.158.548,00	104.606.550.438,00	102.211.815.035,00	95.396.340.982,00	107.517.178.631,00	40.888.569.687,00	47.596.329.000,00	45.604.892.000,00
10	Kab Pidie	93.330.000.000	93.330.000.000	112.185.859.190	118.712.301.061	134.413.543.284	176.071.888.941	160.629.520.329	154.825.046.044	152.724.360.707	174.184.090.318	140.548.593.645,00	152.919.486.547,00	101.314.840.707,00	101.375.635.457,00	115.061.354.804,00	43.175.680.431,00	50.387.684.000,00	50.486.227.000,00
11	Kab Simeulue	89.920.000.000	89.920.000.000	86.781.751.584	92.611.954.618	106.151.786.712	123.803.304.936	105.326.444.150	108.490.033.837	106.477.927.991	129.993.185.554	106.309.441.090,00	98.370.423.520,00	67.433.146.749,00	67.763.188.129,00	79.132.438.368,00	30.447.640.827,00	34.888.143.000,00	36.815.469.000,00
12	Kota Banda Aceh	52.080.000.000	52.080.000.000	59.428.775.408	62.042.094.276	71.225.644.829	85.552.246.792	112.551.355.724	117.110.295.941	117.584.585.309	128.838.661.682	71.879.025.895,00	67.737.433.703,00	104.640.232.516,00	102.253.413.355,00	116.112.173.095,00	44.284.303.522,00	55.412.585.000,00	53.764.288.000,00
13	Kota Sabang	45.690.000.000	45.690.000.000	47.333.129.085	49.197.705.502	57.420.816.610	68.856.877.380	60.213.985.770	62.331.350.724	61.348.336.627	74.736.894.410	78.118.798.574,00	73.928.138.452,00	61.410.740.324,00	56.314.935.397,00	66.532.235.190,00	25.184.038.274,00	29.305.676.000,00	29.591.066.000,00
14	Kota Langsa	62.260.000.000	62.260.000.000	60.514.791.364	63.137.675.665	76.623.404.861	90.176.414.847	81.666.286.361	81.926.615.347	80.680.341.059	92.168.291.565	87.281.275.681,00	78.040.783.301,00	72.649.287.340,00	72.762.884.864,00	78.177.929.978,00	29.802.725.964,00	34.268.256.000,00	33.979.938.000,00
15	Kota Lhokseumawe	61.930.000.000	61.930.000.000	57.477.087.601	61.483.395.522	71.691.684.220	84.158.429.359	73.732.980.017	73.902.055.739	73.736.159.755	87.941.476.679	86.605.166.240,00	79.402.072.351,00	72.678.056.143,00	71.693.169.795,00	78.493.551.332,00	29.841.924.184,00	34.877.553.000,00	34.385.907.000,00
16	Kab Nagan Raya	118.880.000.000	118.880.000.000	104.310.101.317	110.914.506.152	136.282.859.178	146.705.576.546	145.833.596.496	145.845.274.513	140.100.960.736	183.468.756.928	163.927.648.337,00	128.955.146.560,00	92.511.283.451,00	90.948.227.681,00	94.602.588.950,00	35.429.328.541,00	41.935.892.000,00	40.915.166.000,00
17	Kab Aceh Jaya	110.060.000.000	110.060.000.000	118.117.558.841	117.762.405.634	138.679.171.139	175.261.062.131	152.474.420.522	158.425.915.563	155.557.222.303	163.831.996.389	129.907.836.447,00	121.610.719.314,00	81.547.053.280,00	88.509.842.593,00	90.385.152.506,00	34.019.490.652,00	40.016.251.000,00	41.211.025.000,00
18	Kab Aceh Barat Daya	78.300.000.000	78.300.000.000	85.673.554.517	94.471.359.985	107.873.209.046	128.140.347.483	111.022.420.534	111.439.098.930	111.681.805.860	126.398.383.430	108.009.555.427,00	104.242.275.217,00	83.427.389.141,00	81.287.395.406,00	83.401.067.487,00	30.682.733.974,00	36.815.670.000,00	38.497.296.000,00
19	Kab Gayo Lues	151.300.000.000	151.300.000.000	144.551.971.679	147.604.949.042	168.055.431.561	187.734.858.157	195.021.178.231	200.855.367.107	198.087.218.142	212.139.540.027	161.556.797.794,00	161.929.893.441,00	92.360.343.077,00	92.432.452.320,00	100.691.899.572,00	38.332.123.023,00	44.570.197.000,00	43.534.056.000,00
20	Kab Aceh Tamiang	94.270.000.000	94.270.000.000	99.218.010.668	91.571.509.786	107.646.469.694	146.903.529.583	133.953.744.076	126.829.640.443	133.123.671.881	149.383.161.807	119.614.281.198,00	108.632.715.049,00	92.072.358.433,00	95.078.431.399,00	97.058.459.217,00	36.407.120.452,00	43.126.430.000,00	41.708.681.000,00
21	Kab Bener Meriah	77.390.000.000	77.390.000.000	80.388.355.393	80.658.387.499	95.558.173.264	125.676.693.791	109.243.670.794	111.916.310.575	111.031.402.802	127.365.365.951	109.224.375.090,00	102.535.527.609,00	80.400.273.677,00	79.455.522.251,00	85.089.627.141,00	38.029.473.000,00	38.518.757.000,00	
22	Kab Pidie Jaya	55.090.000.000	55.090.000.000	70.535.242.951	72.799.090.971	83.710.613.753	106.853.327.339	94.216.152.766	96.640.402.805	94.651.839.282	98.263.717.918	94.243.412.907,00	87.319.493.982,00	76.830.499.781,00	75.279.453.374,00	79.723.939.131,00	30.515.629.862,00	35.247.937.000,00	35.765.196.000,00
23	Kota Subulussalam	63.850.000.000	63.850.000.000	78.893.668.613	81.412.515.989	90.702.375.615	115.252.311.485	104.797.081.782	104.164.275.991	105.713.985.920	116.403.563.705	106.094.632.531,00	97.391.453.702,00	54.882.100.554,00	67.808.662.826,00	73.873.036.883,00	28.518.083.318,00	33.047.194.000,00	33.556.433.000,00
	Total Kab/Kota	2.118.010.000.000	2.118.010.000.000	2.236.969.200.000	2.309.884.104.001	2.706.393.897.900	3.285.773.258.400	2.974.349.239.295	3.011.341.217.084	2.958.797.424.800	3.388.914.155.252	2.675.841.166.012,00	2.601.745.604.204,00	2.039.361.586.831,00	2.029.255.328.123,00	2.193.503.074.351,00	833.270.637.151,00	975.691.499.000,00	973.424.557.000,00
	TOTAL	3.530.010.000.000	3.530.010.000.000	3.728.282.000.000	3.849.806.840.001	4.510.656.496.500	5.476.288.764.000	6.222.785.782.997	6.463.426.075.400	7.707.216.942.000	7.971.646.294.900	8.029.791.593.000,00	8.357.471.654.000,00	7.555.278.348.000,00	7.555.827.806.000,00	7.560.000.000.000	3.960.000.000.000	4.276.993.035.000,00	4.309.582.640.000,00